PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018







BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun RKPD Tahun 2018 yang digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D);

19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:D

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) Tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen rencana kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.
14. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappppeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
17. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran

sementara berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan RKPD meliputi:

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja; dan
c. sumber pendanaan dan prakiraan maju.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2018 berfungsi sebagai:
   a. pedoman penyusunan Renja-PD;
   b. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Provinsi Tahun Anggaran 2018; dan
   c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2018.

(2) Dalam rangka penyusunan Renja-PD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PD menggunakan RKPD Tahun 2018 untuk:
   a. menyusun Rancangan Akhir Renja-PD; dan
   b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-PD.

BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

a. persiapan penyusunan RKPD;
b. penyusunan rancangan awal RKPD;
c. penyusunan rancangan RKPD;
d. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD;
e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f. penetapan RKPD.

Pasal 6

Kepala Bappppeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja PD berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra-PD serta tugas pokok dan fungsi PD.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Provinsi Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2018.

(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peratuan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program PD yang ditetapkan dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dan program strategis nasional;
   b. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2018; dan
   c. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*) keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2018.

(3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2018.

(4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2018.

(5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2018.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Mei 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 30 SERI E

RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

EXECUTIVE SUMMARY
Regional Work Plan
Of Bangka Belitung Province 2018

I. PENDAHULUAN *(INTRODUCTION)*

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Preparation of the Regional Work Plan (RKPD) as stated in Law Number 25 the Year 2004 on National Development Planning System (SPPN) article 3, clause 2, stated that the Regional Government is obliged to prepare an integrated development planning documents based on the delegated authority. Based on Law Number 23 the Year 2014 on Regional Government stated that RKPD is a regional planning document for a period of 1 (one) year.

In preparing the RKPD of 2018, the Provincial Government of Bangka Belitung refers to the National Development Planning System by applying a political, technocratic, participatory, top-down and bottom-up approach and using the principle of money follows programs through Holistic-thematic, Integrative, and Spatial approaches with a deeper integrated planning and budgeting substance.

To strengthen the implementation of Money Follow Program is by improving the sustainable development priority, controlling the program implementation with standardization activities that support achievement of program indicator, and integrated funding source.

In preparing the RKPD document of Bangka Belitung Province in 2018, the Provincial Government observes the linkages and consistency among planning, budgeting, implementation, and supervision. This preparation is part of the implementation of national development planning system and

Dalam menyusun RKPD Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (*top~down*), dan bawah~atas (*bottom~up*) serta dengan menggunakan prinsip *money follows program* melalui pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Penguatan implementasi *Money Follow Programme* dilakukan melalui penajaman prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standardisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan.

Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan

integrated planning and budgeting system. RKPD document prepared based on national policy, which refers to RKP (Central Work Plan) Year 2018 which is an elaboration of RPJMN (National Medium-Term Development Plan) Year 2015 - 2019 as well as Renstra (Strategic Plan) of each Ministry and Government Institution non-Ministry. In addition, in the regional context, the RKPD document of 2018 is also based on the policy directions and the main target of long-term regional policy based on the RPJPD (Regional Long-term Development Plan) Amendment of Bangka Belitung Province Year 2005-2025 and described through the determination of policy directions and priority target. It is important to do since the RPJMD (Regional Medium-Term Development Plan) 2013-2017 has ended and requires a transition before the next RPJMD that describes the vision and mission of the elected Governor who established through the Regional Regulation.

Since the RPJMD of Bangka Belitung Province 2012-2017 has ended, it has been established the Regulation Number14 of 2017 in RPJMD Bangka Belitung Province Year 2017-2022 then next RKPD of 2018 is an elaboration of the first year planning of the RPJMD development period 2017-2022 based on the policy directions and priority targets of the RPJPD, the national priority programs in the RKP, and the national strategic programs established by the Government according to the vision, mission and program of the elected regional head; and Regional Regulation concerning Organization of Regional Institutions and the Regulation of Home Affairs Minister Number 32 Year 2017 concerning Development of RKPD Year 2018 Article 8, clause 1.

The legal basis of the RKPD preparation Bangka Belitung Province in 2018 is based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Minister of Home Affairs Regulation Number 54 of 2010 on Implementation of Government Regulation Number 8 Year of 2008 on Stage,

nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015 - 2019 serta Renstra masing - masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2018 juga disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok kebijakan jangka panjang daerah sesuai Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan dijabarkan melalui penetapan arah kebijakan dan sasaran pokok prioritas. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat RPJMD 2013-2017 telah berakhir dan membutuhkan transisi sebelum RPJMD berikutnya yang menjabarkan visi dan misi Gubernur terpilih ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Memperhatikan kondisi dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 telah berakhir maka telah ditetapkan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 maka selanjutnya RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari perencanaan tahun pertama periode pembangunan RPJMD tahun 2017-2022 yang disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih; dan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah dan sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Pasal 8 Ayat (1).

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Arrangement of Preparation, Control and Evaluation of Implementation of Regional Development Plan, Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2017 on Preparation of Regional Work Plan of 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (REGIONAL GENERAL DESCRIPTION)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Luas wilayah mencapai 81.725,14 km2 terdiri atas luas daratan 16.424,14 km2 (20,10%) dan luas wilayah laut 65.301 km2 (79,90%) yang terdiri 2 pulau besar yaitu pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi oleh pulau-pulau kecil.

Province of Bangka Belitung with the total area of 81,725.14 km2 consists of land area 16.424,14 km2 (20,10%) and sea area 65,301 km2 (79,90%) consisting of 2 big islands of Bangka Island and Belitung Island which surrounded by small islands.

Based on the potential characteristics of the region, it can be identified that the Bangka Belitung Province has the potential to be developed as a plantation area, fishery, forestry, agriculture, mining, industry, tourism based on spatial planning.

Berdasarkan karakteristik wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan Perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwasata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

In the first quarter of 2017, Bangka Belitung's economy measured based on GDP at constant prices reached Rp17,064 billion, growing by 6.42% (YoY), up from 4.92% (YoY) in the preceding quarter. The field of mining is increasing due to higher tin ore production in line with the steady improvement in tin prices since the third quarter of 2016. The potency of large and retail business grew considerably in line with the increasing demand during Chinese New Year and Ceng Beng celebrations and the implementation of the MXGP international event.

Pada triwulan I 2017, perekonomian Bangka Belitung yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp17.064 miliar atau tumbuh sebesar 6,42% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya 4,92%(yoy). Lapangan usaha pertambangan dan penggalian meningkat disebabkan oleh meningkatnya produksi bijih timah seiring dengan terus membaiknya harga timah sejak triwulan III 2016. Lapangan usaha, perdagangan dan eceran tumbuh cukup besar sejalan dengan meningkatnya permintaan saat perayaan Imlek dan Ceng Beng serta pelaksanaan event internasional MXGP.

In the first quarter of 2017, inflation in Bangka Belitung Province reached 6.39% (YoY), down from 6.75% (YoY) in the previous quarter due to the normalization of air transport fares and some food commodities after Christmas Day and New Year. Bangka Belitung inflation is still above the inflation target set by the Government of 4% ± 1% (YoY.

Pada triwulan I 2017 inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 6,39% (yoy) menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 6,75% (yoy) yang disebabkan antara lain oleh adanya normalisasi harga tarif angkutan udara dan beberapa komoditas bahan makanan paska Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Inflasi Bangka Belitung masih berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah sebesar 4%±1% (yoy).

III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN *(REGIONAL ECONOMIC AND FINANCIAL FRAMEWORK)*

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, mengimplementasikan program dan isu strategis daerah, serta sebagai pedoman dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

The direction of the regional economic policy of Bangka Belitung Province is aimed at realizing the vision and mission of the Head of Region, implementing the program and local strategic issues, as well as the guidance in formulating the priority of development programs and activities that will be implemented.

At now, the regional government policies consider the public and the business community that projected in regional socio-economic conditions throughout 2017 and 2018 keep increasing. By 2017, GRDP will increase to Rp50,484.3 billion and in 2018 it will increase to Rp53,645.1 billion. The trend of GRDP increasing throughout 2017 and 2018, is predicted to be influenced by manufacturing industry sector; agriculture, forestry and fisheries sectors; mining sectors, as well as large and retail trade sectors.

In 2017 the economic growth rate of Bangka Belitung Province is projected to grow by 5.50 percent and In 2018 it is targeted to grow by 6.26 percent. The main growth rate is still supported by the growth of agriculture, forestry and fishery sector which is estimated to grow by 6.90 percent and 7.85 percent, followed by growth in the manufacturing sector by 3.10 percent and 4.55 percent. In 2017 and 2018, it is expected that the inflation rate can be reduced to a range of 4.0 to 3.8 percent for the city of Pangkalpinang and 3.8 percent for the city of Tanjungpandan. The percentage of open unemployment (PPT) during 2017 and 2018 shows a downward trend. PPT in 2017 of 3.78 percent and PPT in 2018 is expected to decrease by 3.07 percent. The decline in unemployment is due to the large number of the working-age population work in agriculture, trade, hotels and restaurants, and mining. The poverty rate in 2017 can be

Kebijakan pemerintah daerah dewasa ini semakin berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha, diproyeksikan kondisi sosial ekonomi daerah sepanjang tahun 2017 dan 2018 akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, PDRB akan meningkat menjadi sebesar Rp50.484,3 milyar dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp53.645,1 milyar. Trend peningkatan PDRB sepanjang tahun 2017 dan 2018, diperkirakan masih dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan besar dan eceran.

Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kepulaun Bangka Belitung diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,50 persen dan Pada tahun 2018 ditargetkan tumbuh sebesar 6,26 persen. Laju pertumbuhan utama masih ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang diperkirakan tumbuh sebesar 6,90 persen dan 7,85 persen, diikuti oleh pertumbuhan di sektor industri pengolahan sebesar 3,10 persen dan 4,55 persen. Pada tahun 2017 dan 2018, diharapkan tingkat inflasi dapat ditekan hingga mencapai kisaran 4,0 - 3,8 persen untuk kota Pangkalpinang dan 3,8 persen untuk kota Tanjungpandan. Persentase pengangguran terbuka (PPT) sepanjang tahun 2017 dan 2018 menunjukkan trend penurunan. PPT pada tahun 2017 sebesar 3,78 persen dan PPT pada tahun 2018 diperkirakan turun sebesar 3,07 persen. Penurunan angka pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restauran, dan pertambangan. Angka kemiskinan pada tahun

reduced to 4.85 percent and decrease to 4.00 percent by 2018. The Williamson Inequality Index of Bangka *Belitung Province is expected to decrease to 0.285 in 2017 and by 0.247 in 2018 this is sought through government policy by conducting regional development equally among districts/cities in Bangka Belitung Province.*

2017 dapat ditekan menjadi 4,85 persen dan semakin menurun menjadi 4,00 persen pada tahun 2018. Indeks ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat turun menjadi sebesar 0,285 pada tahun 2017 dan sebesar 0,247 pada tahun 2018 hal ini diupayakan melalui kebijakan pemerintah dengan melakukan pembangunan kewilayahan secara merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

In order to explore and collect local revenue potentials, the provincial revenue policy of Bangka Belitung Province for fiscal year 2018 is directed through the optimization of sources of revenue of Original Regional Revenue such as local taxes and retributions, utilization of local assets and the revenue of separated regional wealth management; increased balancing funds from the General Allocation Fund and tax-sharing, non-tax sharing and increased public-private partnerships.

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2018 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

The regional expenditure policy in 2018 is expected to use proportional, efficient and effective spending patterns by prioritizing compulsory expenditures, including: personnel expenditures, interest expenditures and loan principal payments, subsidy expenditures, goods and services expenditure of the year. The difference between available fund estimates and the amount of compulsory expenditure is a potential fund that can be granted as an indicative ceiling to each Regional Device (PD). The development expenditure is prioritized to fulfill the regional obligation in order to protect and improve the community quality of life by improving the qualified public services such as education, health and social facilities to develop social security system. It is realized through work performance measured based on the achievement of minimum service standards based on the regulation.

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dengan memprioritaskan alokasi belanja untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan antara lain meliputi : belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap Perangkat Daerah (PD). Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja yang diukur berdasarkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

In 2018 the target of local revenue (PAD) is Rp. 776,196,230,613.87, balance funds Rp 1,684,392,043,000.00 and for other legitimate revenue of the Provincial Government of Bangka Belitung target Rp 30,000,000,000.00. Other legitimate revenue is one of the local revenue therefore the toal of local revenue in 2018 Rp 3,000,000,000,000.00 with the composition of indirect expenditure of Rp 1,641,780,174,964,33 (54.72%) and direct expenditure of Rp 1,358,219,825,035.67 (45.27%) and Projection / Target of Regional Financing in 2018 is Rp 509,411,726,386.13.

Pada tahun 2018 target pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp. 776.196.230.613,87 Dana perimbangan sebesar Rp 1.684.392.043.000,00 dan untuk pos lain-lain pendapatan daerah yang sah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mentargetkan sebesar Rp 30.000.000.000,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah maka pada tahun 2018 total jumlah belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.641.780.174.964,33 (54.72%) dan belanja langsung sebesar Rp 1.358.219.825.035,67 (45,27%) dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2018 sebesar Rp 509.411.726.386,13

IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH *(PRIORITIES AND TARGETS OF REGIONAL DEVELOPMENT*

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 adalah **"Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia menuju pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agribahari dan berdaya saing".** Penyusunan RKPD tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan perubahan paradigma penganggaran dari prinsip *money follow fuction* menjadi *money follow priority programme*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan holistik-tematik, integratif dan spasial dengan memperhatikan pada Pengendalian Perencanaan; Perkuatan perencanaan dan penganggaran; Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan; Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

The development theme of Bangka Belitung Province in 2018 is ***"Improving the quality of Human Resources towards independent and competitive economic development based on agriculture and marine"****. RKPD 2018 was prepared by approaching the budget paradigm amendment from the money follows function principle to the money follows priority program. The strengthening is carried out with a holistic-thematic, integrative and spatial development approach based on Planning Control; Strengthening planning and budgeting; Strengthening regional-based planning; Strengthening the integration of funding sources.*

According to the National Development Program 9 Agenda Nawa Cita, as well as accelerating the achievement of Minimum Service Standards (SPM) targets and Sustainable Development Goals (SDG's) development agreements, The Regional Work Plan contains regional policy directions for a period of 1 (one) year which is the commitment of the Regional Government to

Memperhatikan Program Pembangunan Nasional 9 Agenda Nawa Cita, serta percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kesepakatan-kesepakatan pembangunan SDG's maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang

provide the certain policy to implement sustainable regional development. Therefore, for its implementation, coordination between agencies within the Provincial Government of Bangka Belitung and the participation of the community and all stakeholders from the villages, subdistricts, Regencies / City through the Forum Regional Institutions and Development Planning Discussion (Musrenbang) as a forum for generating agreements, especially synchronization and harmonization of predetermined program and activity plans.

berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Regional priority targets, as described from the vision, mission and priority programs of the elected Governor and Vice Governor 2017-2022 which has been stated in RKPD Document Year 2018 as the annual document is increasing the economic growth, realizing the capacity and quality of human resources, increasing Indonesia Democracy Index of Province, increasing the Bureaucratic Reform Index, decreasing development disparities between regions and communities, and increasing the quality of the environment and managing natural resources.

Sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dari visi, misi dan program unggulan Gubernur, Wakil Gubernur terpilih 2017-2022 yang telah tertuang dalam Dokumen RKPD Tahun 2018 sebagai dokumen rencana tahunan adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat, Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.

The develoment priorities of Bangka Belitung Province of 2018 are Economic Improvement; Capacity and Quality of Human Resources; Bureaucratic and Public Service Management; Interregional and Community Disparities Development; Democracy Development; and Disaster Management.

Prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, yaitu: Peningkatan Ekonomi; Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia; Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik; Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat; Pembangunan Berdemokrasi; dan Penanggulangan Bencana.

V. RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH DAN PAGU INDIKATIF *(REGIONAL PRIORITY PROGRAMS AND INDICATIVE HIGHEST RATE*

Program prioritas dilaksanakan dalam rangka untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan yang mengalami perubahan sangat cepat. Beberapa tantangan dan dinamika pembangunan tersebut teridentifikasi dalam proses dan tahapan perencanaan yang dilakukan. Identifikasi terhadap hal tersebut dilakukan melalui penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD, usulan langsung masyarakat dan stakeholder yang disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik, Musrenbang maupun media informasi lainnya. Selain itu, juga dilakukan pencermatan terhadap usulan secara *bottom-up* dari kabupaten/kota yang mana proses pengusulannya oleh masyarakat telah dimulai pada saat dilaksanakannya Forum Musrenbang Desa/Kelurahan.

Priority programs are implemented in order to address the challenges and dynamics of development that are rapidly changing. Some of the challenges and dynamics of development are identified in the implementation of process and planning stages. The identification is by reviewing the main points of the DPRD (Regional Representative), direct proposals of the community and stakeholders presented in the Public Consultation Forum, Musrenbang and other information media. In addition, there are also observations on the bottom-up proposals from regencies/municipalities where the community proposals have been initiated at the time of the villages/subdistricts Musrenbang Forum.

The Provincial Government of Bangka Belitung accommodates the aspirations of the community based on DPRD of Bangka Belitung Province recommendation. These are the main points of the DPRD that have been completed and become one of the main material of RKPD 2018. The recommendation review of DPRD is accommodated comprehensively by all regional institutions both at provincial and regencies/city level to be incorporated into provincial RKPD and Renja (Work Plan) of regional institutions in 2018.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan rekomendasi hasil Reses DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rekomendasi hasil reses ini merupakan pokok – pokok pikiran DPRD yang telah diparipurnakan dan menjadi salah satu bahan utama penyusunan RKPD 2018. Penelaahan terhadap rekomendasi hasil reses DPRD dilakukan secara komprehensif oleh seluruh PD baik tingkat Provinsi maupun tingkat wilayah kota/kabupaten untuk dituangkan ke dalam RKPD dan Renja PD Tahun 2018.

The Drafting Team of RKPD Bangka Belitung Province reviews 1,197 proposed activities of regencies/city and the approval is 235 activities or only for 19.63 percent. Meanwhile, based on the highest rate, the total proposals reached Rp 3,481,545,516,269 and the accommodated is Rp 350,821,901,000 or only 10.07 percent.

Tim Penyusun RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Penelaahan terhadap kegiatan yang diusulkan Kabupaten/Kota sebanyak 1.197 kegiatan dan yang mendapatkan persetujuan adalah sebesar 235 kegiatan atau hanya sebesar 19,63 persen. Sementara itu dari sisi pagu, total usulan mencapai Rp 3,481,545,516,269 dan yang diakomodir adalah sebesar Rp 350.821.901.000 atau hanya sebesar 10.07 persen.

Total Highest Rate of Provincial Bangka Belitung Province in 2018 Rp 2,040,288,079,381,07 consists of Indirect Expenditures of Rp 682.068.254.345,40 and Direct Expenditure 1,358,219,825,035.67 with 203 programs and 1,234 activities. In 2018 the total of the Provincial Government of Bangka Belitung expenditure Rp 3,000,000,000,000.00 with indirect expenditure composition of Rp1,641,780,174,964.33 (54.72%) and direct expenditure of Rp 1,358,219,825,035 , 67 (45.27%).

Total Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebesar Rp 2.040.288.079.381,07 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 682.068.254.345,40 dan Belanja Langsung 1.358.219.825.035,67 dengan 203 program dan 1.234 kegiatan. Pada tahun 2018 total jumlah belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp1.641.780.174.964,33 (54,72%) dan belanja langsung sebesar Rp 1.358.219.825.035,67 (45,27%).

VI.PENUTUP *(CLOSING)*

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah melalui pendekatan pada prioritas pencapaian arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) 2005-2025 Tahap III, karena Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berakhir di tahun 2017

The RKPD of the Bangka Belitung Province in 2018 is an Annual Planning Document with priorities development through approaches to prioritize the achievement of the policy direction RPJPD 2005-2025 Third Phase, as the RPJMD of Bangka Belitung Province in 2017.

In addition, the principle of regional development priority still refers to the national development targets as set forth in the RPJMN 2015-2019, RKP Year 2018, Regional Spatial Plan (RTRW) of Bangka Belitung Province Year 2014-2034, RPJMD of Regencies/City and RPJMD of Neighboring Province such as South Sumatera Province, National Development Program 9 Agenda Nawa Cita, and acceleration of SPM target achievement and SDG's development agreement of Regional Work Plan contains regional policy direction for period 1 (one) year which is the commitment of the Regional Government to provide policy certainty in implementing sustainable regional development. Therefore, for its implementation, coordination between agencies within the Provincial Government of Bangka Belitung and the participation of the community and all stakeholders through the Regional Development Forum and Development Planning Discussion (Musrenbang) serves as a forum to provide agreements, especially synchronization and harmonization predetermined program and activity plans.

As for the completed regional priorities, target, location and program. The program indicator, activities, activities indicators, indicative highest rate, forward plan, types of programs and activities and the responsible Regional Institution for the RKPD implementation of Bangka Belitung Province is in RKPD document of the Bangka Belitung Province in 2018.

Disamping itu prioritas pembangunan daerah secara prinsip tetap mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota maupun RPJMD Provinsi Tetangga seperti Provinsi Sumatera Selatan, memperhatikan Program Pembangunan Nasional 9 Agenda Nawa Cita, serta percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kesepakatan-kesepakatan pembangunan SDG's Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan

Adapun secara lengkap prioritas daerah, sasaran daerah, lokasi, program. Indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, pagu indikatif, prakiraan maju, jenis program dan kegiatan serta Perangkat Daerah penanggungjawab pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebagaimana yang termuat dalam dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 .....
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR GRAFIK xiii

BAB I PENDAHULUAN I
1.1. LATAR BELAKANG I.1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN I.7
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I.9
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD I.10
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN I.11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II.1
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II.17
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.17
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II.26
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II.45
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM II.48
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib II.48
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan II.93
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH II.102
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II.102
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II.104
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi II.107
2.4.4. Fokus Sumber Daya manusia II.110
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD II.112
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH II.174
2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II.174

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN III
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH III.1

Halaman

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi III.2
3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) III.2
3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi III.5
3.1.1.3. PDRB Perkapita III.7
3.1.1.4. Struktur Sektor Ekonomi III.8
3.1.1.5. Produk Struktur Pengeluaran dalam PDRB III.9
3.1.1.6. Tingkat Inflasi III.10
3.1.1.7. ICOR III.11
3.1.1.8. Tingkat Investasi III.13
3.1.1.9. Ekspor dan Impor III.13
3.1.2. Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan III.15
3.1.2.1. Pengangguran III.15
3.1.2.2. Kemiskinan III.15
3.1.2.3. Ketimpangan Regional III.16
3.1.2.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan III.17
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan 2018 ..... III.18
3.1.3.1. Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2017 dan 2018 ..... III.18
3.1.3.2. Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018 ..... III.18
3.1.3.3. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 ..... III.20
3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.21
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III.21
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III.23
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.26
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III.26
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III.28
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III.31

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV
4.1. TEMA, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV.1
4.1.1. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 ..... IV.1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 ..... IV.4
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV.6
4.2.1. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional IV.7
4.2.2. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung IV.54
4.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH IV.54
4.4. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2018 DALAM MENDUKUNG VISI DAN MISI GUBERNUR PRIODE 2017 – 2022 ..... IV.127
4.5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN SASARAN

Halaman

PEMBANGUNAN MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL IV.137
4.6. PRIORITAS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN IV.194
4.6.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) IV.197
4.6.2. Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 ..... IV.198

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH DAN PAGU INDIKATIF V
5.1. PENELAAHAN TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD V.1
5.2. PENELAAHAN TERHADAP USULAN LANGSUNG MASYARAKAT V.39
5.3. PENELAAHAN TERHADAP USULAN KABUPATEN/KOTA V.43
5.4. RENCANA PROGRAM PRIORITAS V.45
5.5. PAGU INDIKATIF V.52
5.5.1. Pagu Indikatif Perangkat Daerah V.52
5.5.2. Pagu Indikatif Dan Kegiatan Proritas Tahun 2018 ..... V.55

BAB VI PENUTUP VI.1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel	II.1.a	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016	II.1
Tabel	II.1.b	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016	II.2
Tabel	II.1.c	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016	II.2
Tabel	II.1 .d	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016	II.3
Tabel	II.2	Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.5
Tabel	II.3	Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA	II.8
Tabel	II.4	Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030	II.9
Tabel	II.5	Data Bencana Alam Tahun 2013 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.12
Tabel	II.6	Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.13
Tabel	II.7	Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/KotaTahun 2012–2016	II.16
Tabel	II.8	Perkembangan PDRB Tahun 2012–2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)	II.17
Tabel	II.9	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2012 – 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)	II.19
Tabel	II.10	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 – 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)	II.20
Tabel	II.11	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012–2016 Atas Dasar Harga BerlakuProvinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)	II.21
Tabel	II.12	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2016 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)	II.22
Tabel	II.13	Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2011 s.d 2015 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)	II.22
Tabel	II.14	Perkembangan PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)	II.23
Tabel	II.15	Laju Inflasi Tahun 2012-2016 Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran	II.24
Tabel	II.16	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.27
Tabel	II.17	Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.28

Halaman

Tabel II.18 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.28
Tabel II.19 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011/2012 s.d 2015/2016Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.30
Tabel II.20 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014/2015 Menurut kabupaten/kotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung II.31
Tabel II.21 Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.32
Tabel II.22 Perkembangan APM Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.35
Tabel II.23 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.36
Tabel II.24 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2012-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.37
Tabel II.25 Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/KotaTahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.38
Tabel II.26 Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.39
Tabel II.27 Perkembangan Kemiskinan Tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.39
Tabel II.28 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.39
Tabel II.29 Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.40
Tabel II.30 Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2012-2016 Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (ribu jiwa) II.40
Tabel II.31 Persentase penduduk miskin di Pulau SumateraTahun 2012-2016 ..... II.41
Tabel II.32 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.43
Tabel II.33 Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.44
Tabel II.34 Penduduk 15 tahun ke atas Tahun 2011 s.d 2015 menurut Lapangan Pekerjaan UtamaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung II.44
Tabel II.35 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.45
Tabel II.36 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Menurut kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.45
Tabel II.37 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.46
Tabel II.38 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Sepakbola Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.46
Tabel II.39 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.47
Tabel II.40 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.47

Halaman

Tabel II.41 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bulutangkis Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.47
Tabel II.42 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak silat Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.48
Tabel II.43 Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.48
Tabel II.44 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.49
Tabel II.45 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.50
Tabel II.46 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.51
Tabel II.47 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 menurut Kabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung II.53
Tabel II.49 Jumlah Guru dan Murid Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.54
Tabel II.50 Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.54
Tabel II.51 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.55
Tabel II.52 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.55
Tabel II.53 Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.56
Tabel II.54 Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.56
Tabel II.55 Perkembangan Prevelensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.57
Tabel II.56 Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.57
Tabel II.57 Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.58
Tabel II.58 Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.59
Tabel II.59 Perkembangan Jumlah Dokter Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.59
Tabel II.60 Analisis Total Kelas Tingkat Lahan Kritis Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.61
Tabel II.61 Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.62
Tabel II.62 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2015 ..... II.63
Tabel II.63 Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksidan Pemerintahan yang

Halaman

		Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2015	II.63
Tabel	II.64	Persentase Rumah Tangga dengan Luas Hunian per Kapita <= 7,2 m2 Menurut Kabupaten/Kota, 2006-2015	II.64
Tabel	II.65	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.64
Tabel	II.66	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.65
Tabel	II.67	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.65
Tabel	II.68	Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.66
Tabel	II.69	Perkembangan Penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.66
Tabel	II.70	Data Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.67
Tabel	II.71	Data TPAK Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.68
Tabel	II.72	Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.68
Tabel	II.73	Data Tingkat Pengangguran Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.69
Tabel	II.74	Data Pengangguran Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.69
Tabel	II.75	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.70
Tabel	II.76	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.70
Tabel	II.77	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.71
Tabel	II.78	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.71
Tabel	II.79	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.72
Tabel	II.80	Data Ketergantungan Beras 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.73
Tabel	II.81	Data Produksi Padi (Ton) Kabupaten Kota Tahun 2012-215 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.73
Tabel	II.82	Data Ketersediaan Pangan 2014-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.73
Tabel	II.83	Luas Lahan (m^2) Berdasarkan Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013	II.75
Tabel	II.84	Luas Lahan (m^2) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016	II.75

Halaman

Tabel II.85 Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 ..... II.76
Tabel II.86 Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2014-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.77
Tabel II.87 Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 ..... II.77
Tabel II.88 Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016 ..... II.78
Tabel II.89 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 ..... II.78
Tabel II.90 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016 ..... II.79
Tabel II.91 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.80
Tabel II.92 Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2010 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.80
Tabel II.93 Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk II.81
Tabel II.94 Rasio Bayi Berakte Kelahiran II.81
Tabel II.95 Rasio Pasangan Ber-akte Nikah II.81
Tabel II.96 Kepemilikan KTP II.81
Tabel II.97 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk II.81
Tabel II.98 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi II.81
Tabel II.99 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK II.82
Tabel II.100 Kelompok LPM DAN PKK Tahun 2012 s.d 2015 Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.82
Tabel II.101 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.83
Tabel II.102 Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.84
Tabel II.103 Rasio Akseptor KB Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2011 s.d 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.84
Tabel II.104 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.85
Tabel II.105 Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.87
Tabel II.106 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.87
Tabel II.107 Jumlah Terminal Bus, Teminal Udara dan Pelabuhan LautTahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.87
Tabel II.108 Jumlah ijin trayek Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.88
Tabel II.109 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.88
Tabel II.110 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.89

Halaman

Tabel II.111 Jumlah Investasi dan Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.89
Tabel II.112 Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.90
Tabel II.113 Jumlah Klub/Organisasi Olahraga Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.90
Tabel II.114 Buku PDRB dan Provinsi/Kabupaten/Kota Falam Angka Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.91
Tabel II.115 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2012 s.d 2015 Kepulauan Bangka Belitung II.92
Tabel II.116 Jumlah Perpustakaan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.92
Tabel II.117 Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 – 2014 ..... II.94
Tabel II.118 Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.96
Tabel II.119 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tanpa Migas (persen) 2010 – 2014 ..... II.97
Tabel II.120 Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.97
Tabel II.121 Luas Hutan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .. II.98
Tabel II.122 Potensi Bahan Galian Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.99
Tabel II.123 Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U$) II.100
Tabel II.124 Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.101
Tabel II.125 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.102
Tabel II.126 Nilai Tukar etani (NTP) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.103
Tabel II.127 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.103
Tabel II.128 Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2014 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.104
Tabel II.129 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.104
Tabel II.130 Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.105
Tabel II.131 Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.105
Tabel II.132 Kelompok LPM DAN PKK Tahun 2012 s.d 2015 Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.105
Tabel II.133 Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.106
Tabel II.134 Infrastruktur Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.106

Halaman

Tabel II.135 Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2016 ..... II.107
Tabel II.136 Data Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2016 ..... II.108
Tabel II.137 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha II.108
Tabel II.138 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(dalam Rp. Juta) II.109
Tabel II.139 Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Mendukung Iklim Investasi II.110
Tabel II.140 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.110
Tabel II.142 Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.112
Tabel II.142 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 ..... II.113
Tabel II.143 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya II.186
Tabel III.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 (juta rupiah) III.3
Tabel III.2 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun2014-2018(Juta rupiah) III.4
Tabel III.3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2018 ..... III.6
Tabel III.4 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2018 (dalam persen) III.9
Tabel III.5 Ditribusi PDRB Menurut PengeluaranAtas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Beiltung Tahun 2014–2018 (dalam persen). III.10
Tabel III.6 Laju Inflasi Tahunan Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2012-2016 ..... III.11
Tabel III.7 Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014-2016 ..... III.11
Tabel III.8 Perkembangan Realisasi Investasi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011–2015 ..... III.13
Tabel III.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2018 (dalam persen) III.15
Tabel III.10 Indeks Willamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2011–2016) III.17
Tabel III.11 Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010–2017) III.17
Tabel III.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 s.d tahun 2019 ..... III.25
Tabel III.13 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 s.d Tahun 2019 ..... III.30
Tabel III.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s.d Tahun 2019 ..... III.33
Tabel IV.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan RPJPD Provinsi

Halaman

		Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025	IV.4
Tabel	IV.2	Target Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018	IV.5
Tabel	IV.3	Matriks Indikator Sasaran Pokok	IV.6
Tabel	IV.4	Keselarasan target indikator pembangunan makro antara target Nasional, Regional Sumatera dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018	IV.8
Tabel	IV.5	Keselarasan antara Dimensi Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pokok Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018	IV.9
Tabel	IV.6	Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan RKP 2018	IV.11
Tabel	IV.7	Korelasi sasaran RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018	IV.54
Tabel	IV.8	Arah Kebijakan dan Program RKPD 2018 Dalam Mendukung Capaian SPM (Standar Pelayanaan Minimal)	IV.78
Tabel	IV.9	Arah Kebijakan dan Program RKPD 2018 Dalam Mendukung Tujuan SDGs	IV.92
Tabel	IV.10	Prioritas dan Arah Kebijakan RKPD 2018 Dalam Mendukung Visi dan Misi Gubernur Priode 2017 – 2022	IV.127
Tabel	IV.11	Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	IV.138
Tabel	IV.12	Kondisi Indikator Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	IV.195
Tabel	IV.13	Indikasi Program Utama Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034	IV.199
Tabel	V.1	Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	V.2
Tabel	V.2	Rekapitulasi Usulan Masyarakat pada Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	V.40
Tabel	V.3	Rekapitulasi Hasil Penelaahan Terhadap Usulan Kabupaten/Kota	V.44
Tabel	V.4	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	V.53
Tabel	V.5	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka	V.55

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi	I.5
Gambar I.2	Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD	I.8
Gambar II.1	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.3
Gambar II.2	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.10
Gambar II.3	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.12
Gambar II.4	Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.14
Gambar II.6	Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung	II.96
Gambar IV.1	Posisi Dokumen RKPD Tahun 2018 Terhadap RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Tahun 2017 – 2022	IV.2
Gambar IV.2	Pemetaan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Potensi Lokal	IV.194

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik	II.1	Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016	II.15
Grafik	II.2	Perkembangan PDRB Tahun 2012 – 2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)	II.18
Grafik	II.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 – 2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)	II.18
Grafik	II.4	Laju Inflasi Tahun 2012-2016 Kota Pangkalpinang	II.23
Grafik	II.5	Perbandingan Angka Inflasi Tahun 2012-2016 Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional.....	II.24
Grafik	II.6	PDRB Per Kapita Tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan BangkaBelitung	II.25
Grafik	II.7	Indeks Gini Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ...	II.26
Grafik	II.8	Indeks Williamson Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.26
Grafik	II.9	Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.27
Grafik	II.10	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.29
Grafik	II.11	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010/2011 s.d 2014/2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.31
Grafik	II.12	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014/2015 Menurut kabupaten/kotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.32
Grafik	II.13	Perkembangan APM Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.36
Grafik	II.14	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015 menurut Kabupaten/KotaProvinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.37
Grafik	II.15	Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nasional Tahun 2016	II.42
Grafik	II.16	Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.43
Grafik	II.17	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.50
Grafik	II.18	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.51
Grafik	II.19	Ketersediaan Sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.52
Grafik	II.20	Presentase Lahan Kritis Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.61
Grafik	II.21	Penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ...	II.67

Halaman

Grafik	II.22	Grafik Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.72
Grafik	II.23	Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2012 s.d 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.85
Grafik	II.24	Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandann Tahun 2015	II.86
Grafik	II.25	Rasio lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.111
Grafik	III.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018	III.6
Grafik	III.2	PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 (dalam Rupiah)	III.7
Grafik	III.3	Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016	III.8
Grafik	III.4	Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2014-2018	III.10
Grafik	III.5	Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008–2012	III.12
Grafik	III.6	Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung Tahun2011-2016 (dalam juta US$)	III.14
Grafik	III.7	Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2016(dalam juta US$)	III.14
Grafik	III.8	Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2018	III.16
Grafik	V.1	Realisasi Penelaahan terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD	III.39
Grafik	V.2	Realisasi Penelaahan terhadap Usulan Langsung Masyarakat	III.43
Grafik	V.3	Persentase Realisasi Usulan Kabupaten/Kota terhadap Total Usulan .	III.45

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 34 TAHUN 2017
TANGGAL 31 MEI 2017

- **BAB I** PENDAHULUAN
- **BAB II** EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
- **BAB III** RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
- **BAB IV** PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
- **BAB V** RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- **BAB VI** PENUTUP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2018



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

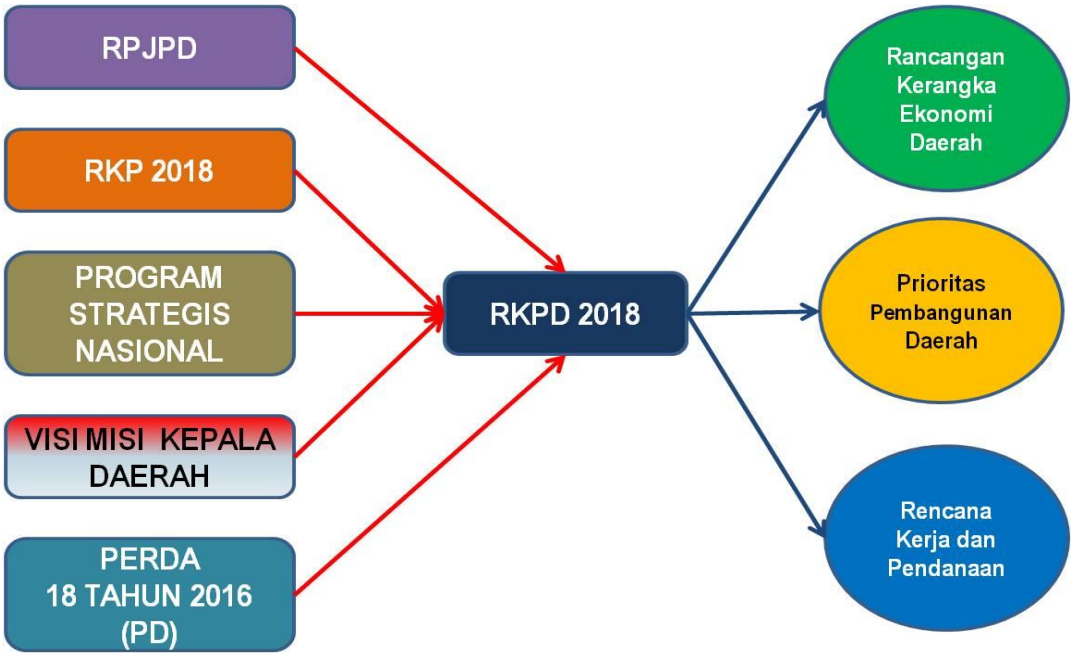
1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Penyusunan RKPD sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, merupakan salah satu dokumen perencanaan pambangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD dimaksud.

Memperhatikan kondisi dimana Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 telah berakhir, maka selanjutnya RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari perencanaan tahun pertama periode pembangunan tahun 2017-2022 disusun dengan berpedoman pada: arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih; dan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini diatur melalui Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Dengan demikian, maka gambaran mengenai kerangka pikir perumusan substansi dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah sebagaimana terlihat pada gambar I.1. berikut:



Gambar I.1 Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Dalam menyusun RKPD Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (*top~down*), dan bawah~atas (*bottom~up*).

Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD.

Perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang kepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas~bawah dan bawah~atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas~bawah dan bawah~atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan RKP 2018, penyusunan

Penyusunan RKP 2018 dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Penguatan implementasi *Money Follow Programme* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standardisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan.

Sedangkan penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam penyusunannya, maka diharapkan dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Selain hal tersebut, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain adalah:

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD, RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD disusun melalui tahapan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.
   Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:
   a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD.
   Rancangan awal RKPD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD. Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD, aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.
   a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
      1) Pengolahan data dan informasi.
      2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
      3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
      4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
      5) Penelaahan terhadap kabijakan pemerintah nasional.
      6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi.
      7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.
      8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
      9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
      10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
      11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
      12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.
   Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
   1) Pendahuluan.
   2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
   3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
   4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
   5) Rencana program prioritas daerah.

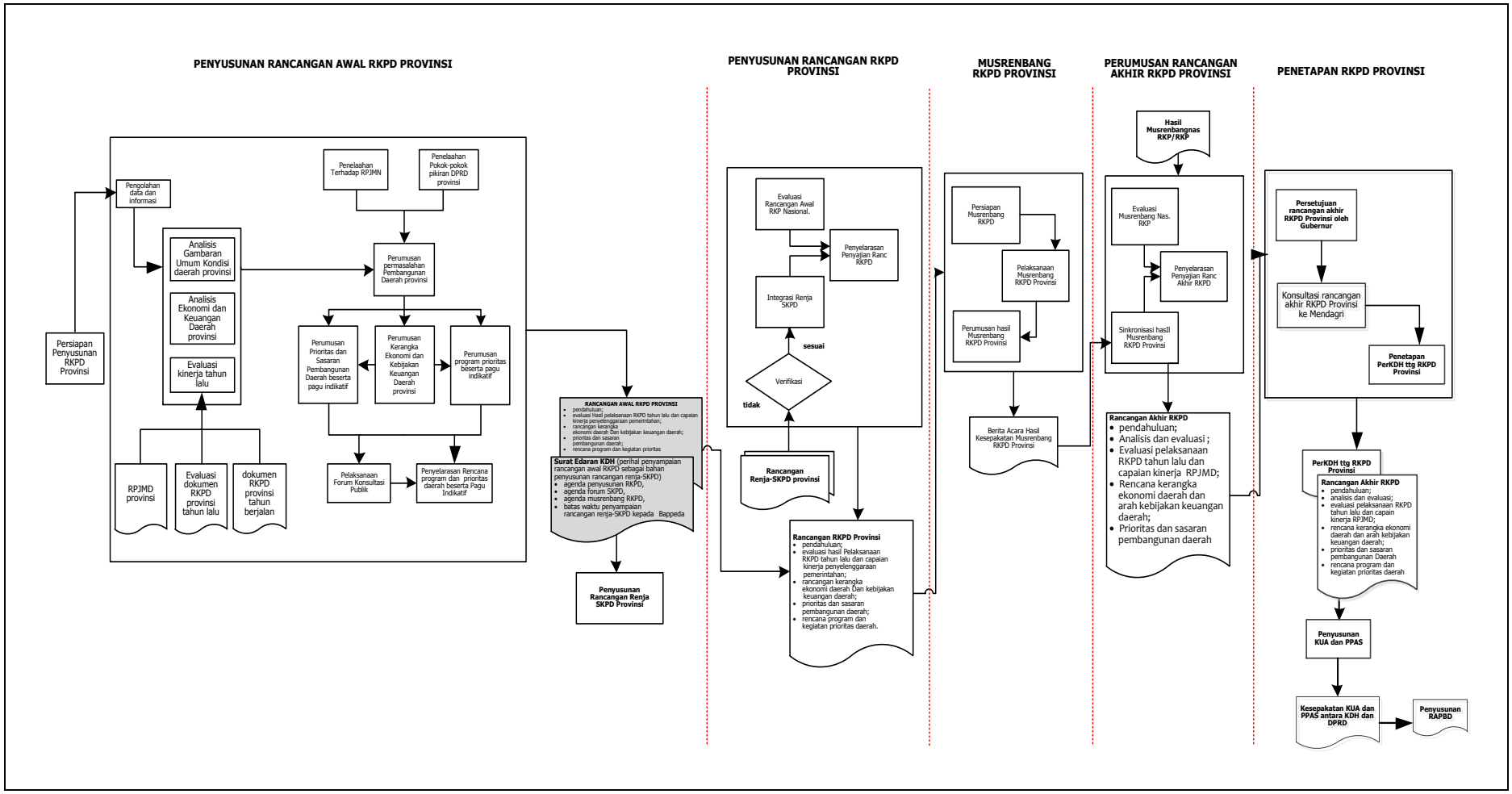
c. Penyusunan rancangan RKPD.
   Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Renja-PD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja-PD provinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD provinsi.

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.
   Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:
   1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota.
   2) Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum MusrenbangRKPD provinsi dilaksanakan.
   3) Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi.
   4) Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
   5) Sinergi dengan RKP.

3. Perumusan rancangan akhir RKPD.
   Pada perumusan rancangan akhir RKPD, verifikasi terhadap rancangan Renja-PD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

4. Penetapan RKPD.
   RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahap ketiga dari RPJPD 2005-2015 dan juga merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Gambar I.2 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E) ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);

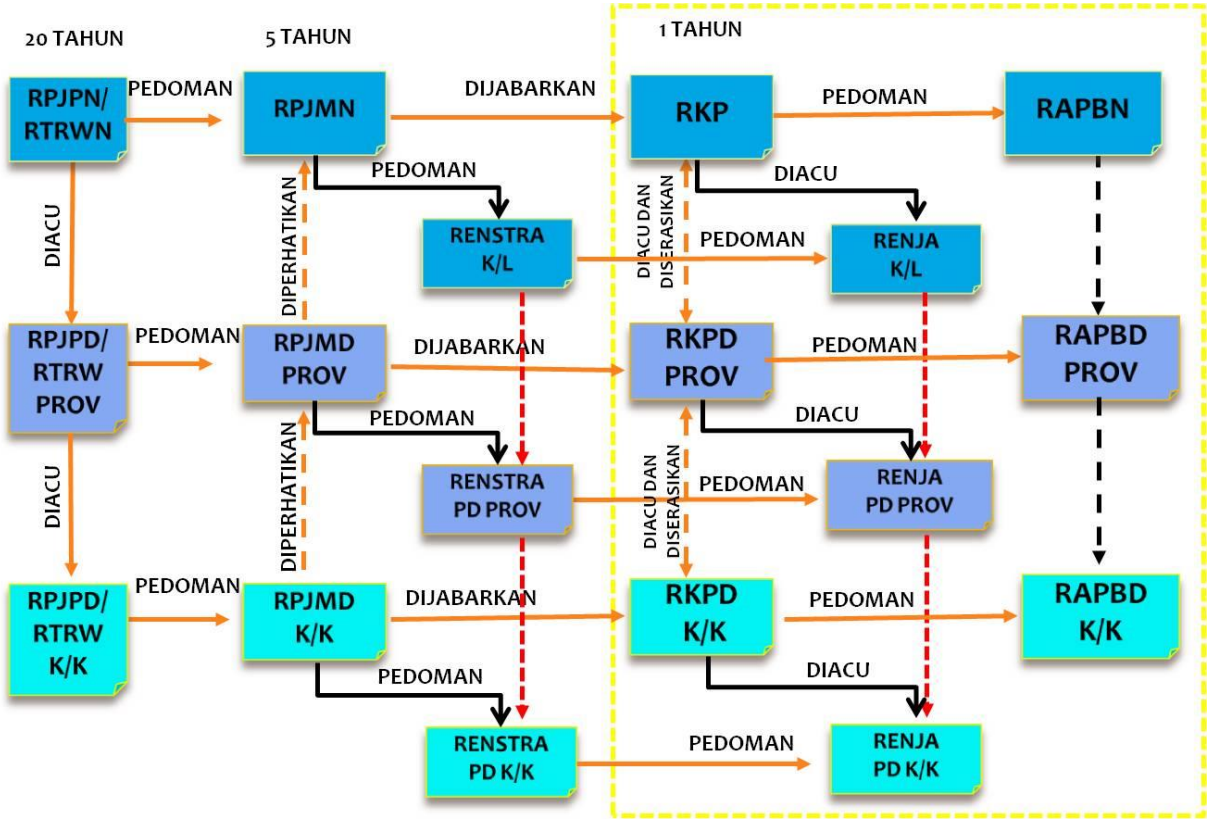
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015 - 2019 serta Renstra masing - masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2018 juga disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok kebijakan jangka panjang daerah sesuai Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan dijabarkan melalui penetapan arah kebijakan dan sasaran pokok prioritas. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat RPJMD 2013-2017 telah berakhir dan membutuhkan transisi sebelum RPJMD berikutnya yang menjabarkan visi dan misi Gubernur terpilih ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Di samping itu, dokumen-dokumen perencanaaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama - sama diacu oleh RKPD

Berdasarkan kondisi diatas, maka keterkaitan antar dokumen perencanaan, spasial dan penganggaran adalah sebagaimana pada Gambar I.3 berikut:



Gambar I.3 Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Daerah, dan PD

Sumber: Diolah dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2016) dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2017), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2018 meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD tahun lalu (Tahun 2016) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD untuk Tahun 2017, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh PD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2017.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berisi seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam Tahun 2018 baik yang akan dikelompokkan dalam belanja tidak langsung, belanja langsung, maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Bellitung, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2018.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Karakteristik lokasi dan wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung serta 1 (satu) Kota yaitu Kota Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota.

Luas wilayah mencapai 81.725,23 km^2. Luas daratan lebih kurang 16.424,23 km^2 atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km^2 atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1.a-II.1.d dan Gambar II.1.

Tabel II.1.a Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungai Liat	8	8	8	8	8
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	6	6	6	6	6
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	6	6	6	6	6
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	8	8	8	8	8
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	5	5	5	5	5
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	7	7	7	7	7
Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	7	7	7	7
Provinsi Kep. Babel		**47**	**47**	**47**	**47**	**47**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Dari Tabel II.1.a di atas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi kecamatan yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah masing-masing kabupaten tersebut 8 kecamatan. Dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi kecamatannya adalah Kabupaten Belitung sebanyak 5 kecamatan. Total seluruh kecamatan yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 47 kecamatan.

Tabel II.1.b Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Desa				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungai Liat	62	62	62	62	62
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	60	60	60	60	60
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	56	56	56	56	56
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	50	50	50	50	50
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	48	48	42	42	42
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	39	39	39	39	39
Pangkalpinang	Pangkalpinang	0	0	0	0	0
Provinsi Kep. Babel		**313**	**313**	**309**	**309**	**309**

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2016

Dari Tabel II.1.b di atas Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi Desa yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dengan jumlah 62 Desa dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Desa adalah Kabupaten Belitung Timur sebanyak 39 desa. Total seluruh desa yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 309 Desa.

Tabel II.1.c Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kelurahan				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungai Liat	9	9	15	15	15
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	4	4	4	4	4
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	7	7	7	7	7
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3	3	3	3	3
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	2	7	7	7	7
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	0	0	0	0	0
Pangkalpinang	Pangkalpinang	42	42	42	42	42
Provinsi Kep. Babel		**67**	**72**	**78**	**78**	**78**

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2016

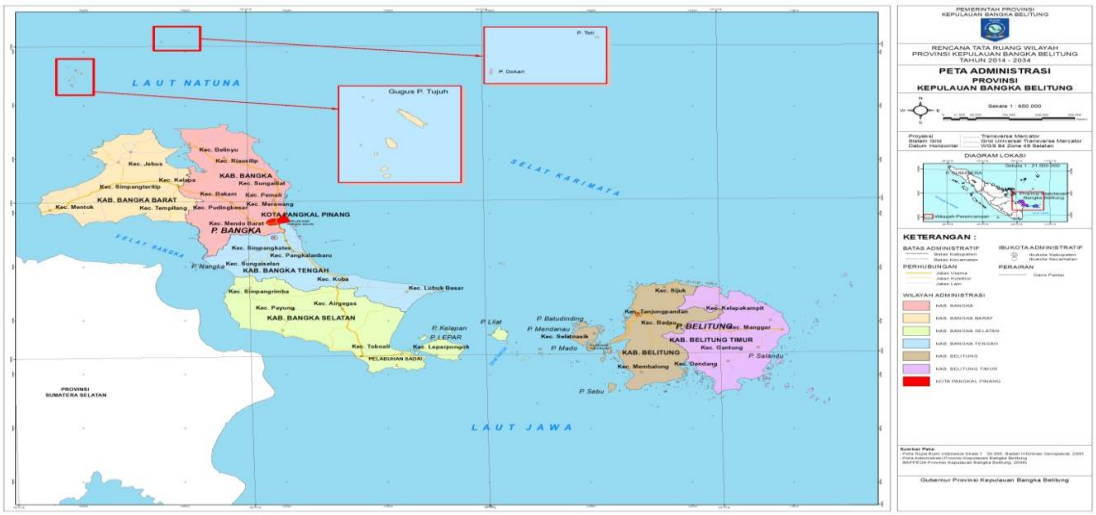
Dari Tabel II.1.c di atas Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi Kelurahan yang paling banyak adalah Kota Pangkalpinang dengan jumlah 42 Kelurahan dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Kelurahan adalah kabupaten Belitung Timur yang tidak memiliki wilayah kelurahan. Total seluruh kelurahan yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 78 kelurahan.

Tabel II.1.d Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km²)				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80
Luas Daratan		16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23
Luas Laut		65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00
Provinsi Kep. Babel		**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2016

Dari Tabel II.1.d di atas Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki Luas wilayah Administrasi yang paling besar adalah kabupaten Bangka dengan luas wilayah 2.950,69 Km² dan kabupaten yang paling kecil luas wilayah Administrasi adalah Kota pangkalpinang sebesar 118,8 Km². Total luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Luas lautan 65.301,23 Km² dan Luas daratan 16.424,23 Km².



Gambar II.1. Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Secara geografis, letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Sebelah Barat dengan Selat Bangka;
- Sebelah Timur dengan Selat Karimata;
- Sebelah Utara dengan Laut Natuna; dan
- Sebelah Selatan dengan Laut Jawa.

2) Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi ini secara geografis terletak pada 104º50' sampai 109º30' Bujur Timur dan 0º50' sampai 4º10' Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, *land management* dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh *geological formation*, termasuk di dalamnya gaya–gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

3) Topografi

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat disebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

4) Geologi

Kondisi geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (*quartz*), dan bilitonite (dikenal dengan nama "satam"). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

5) Hidrologi

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitng merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda *Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbukan dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terltak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain : Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di Pulau Bangka, sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

6) Klimatologi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 2,40 mm sampai dengan 480,20 mm atau curah hujan rata– rata per tahun 186,10 mm. Pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 26,90C sampai dengan 27,80C dengan kelembaban udara terendah 72–73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

7) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan kering yang tidak termanfaatkan juga cukup luas (lahan bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih lanjut dapat diperhatikan Tabel II.2. Dari seluruh luas lahan 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Tabel II.2. Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Penggunaan Lahan	Luas(Ha)				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian Sawah	21.662	23.042	13.262	15.719	15.719
Tegalan	138.246	112.777	109.820	113.105	113.105
Ladang	45.984	48.960	44.085	30.348	30.348
Perkebunan	331.662	332.179	334.698	441.152	441.152
Hutan Rakyat	72.517	85.738	71.323	47.753	47.753
Tambak	*	*	*	*	*
Kolam	*	*	*	*	*
Pengembalaan	8.037	6.086	4.235	1.815	1.815
Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)	122.309	121.407	126.272	76.588	76.588
Lain-Lain (pekarangan)	435.971	387.443	388.068	397.806	397.806
Permukiman	476.857	526.303	550.651	517.741	517.741
Hutan Negara	*	*	*	*	*
Rawa	*	*	*	*	*
Lainnya	*	*	*	*	*
JUMLAH	**1.642.414**	**1.642.414**	**1.642.414**	**1.642.027**	**1.642.027**

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2016
(: dikelompokkan ke jenis penggunaan lahan lainnya)*

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan oleh permukiman sebesar 517.741 Ha kemudian kedua digunakan sebagai perkebunan sebesar 441.152 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 1.815 Ha.

b. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan Perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwasata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, pengembangannya disesuaikan dengan arahan yang digariskan pada RTRWN dan RTR Pulau Sumatera. Perencanaan dan pengembangan dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis.

Perencanaan dan pengembangan Rencana Struktur Ruang, meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transfortasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana lingkungan.

1) Rencana Struktur Ruang

a) Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan kebijakan nasional, potensi, dan rencan pengembangan wilayah provinsi sistem perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional(PKN), yaitu: Kota Pangkalpinang;
2. Pusat Kegiatan Wilayah(PKW), meliputi: Muntok, Tanjungpandan, Manggar;
3. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), meliputi: Toboali dan Koba;
4. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parittiga, Belinyu, Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung, Puding Besar, Pangkalanbaru, Payung, dan Selat Nasik.

b) Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Sesuai dengan Karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan kepulauan sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung direncanakan sebagai sistem transportasi terpadu antar moda yang meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sistem transportasi darat yang ada di Provinsi ini terdiri dari: jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan transfortasi sungai, danau dan penyeberangan serta jaringan transfortasi perkotaan;
2. Sistem transportasi laut terdiri dari pelabuhan dan alur pelayaran; dan
3. Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang udara.

c) Sistem Transfortasi Darat

Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang berkenaan dengan peningkatan status jalan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas: jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengembangan jaringan yang menjadi kewenangan pusat diatur dengan Surat Keputusan Menteri terkait, pengembangan jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan jalur penyeberangan.

d) Sistem Transportasi Laut

Pengembangan sistem transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan sistem kegiatan perekonomian antar kawasan maupun internasional.

Pengembangan sistem transfotasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan, serta dilakukan juga melalui pengembangan alur pelayaran.

e) Sistem Transportasi Udara

Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang lalu lintas udara. Tatanan bandar udara terdiri dari : a. bandar udara pengumpul *(hub)* dan b. bandar udara pengumpan *(spoke).* Bandar udara pengumpul merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Pengembangan sistem transfortasi udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas: Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru di Pangkalpinang dan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan.

Dalam pembangunan dan pengembangan bandar udara harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Rencana Jaringan Energi

Sampai saat ini belum seluruh rumah tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dialiri listrik PLN (48,3 % telah dialiri), dan juga belum seluruh desa telah dialiri listrik PLN (79,6 % telah dialiri). Dengan kondisi masih banyaknya rumah tangga dan desa yang belum dialiri listrik PLN, beban puncak energi listrik PLN terhadap daya mampu pembangkit yang tersedia telah mencapai 94,5 %, hal ini berarti daya mampu yang tersedia (69.320 KW) hampir seluruhnya terpakai pada saat beban puncak yaitu 65.520 KW.

Pengembangan jaringan energi ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik. Pengembangan sistem prasarana pembangkit dan jaringan listrik dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan energi listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman untuk mendukung kegiatan perekonomian, serta pengembangan kawasan. Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya primer, terutama sumber energi terbarukan yang banyak tersedia di Kabupaten/Kota diantaranya tenaga air,

tenaga surya, tenaga angin, biogas, biomasa, gelombang laut dan sumber energi alternatif lainnya. Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan listrik. Kedepannya seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan energi listrik tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan energi listrik per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.3 Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
A. PULAU BANGKA						
1	Bangka	138.036	147.013	160.571	175.380	190.182
2	Bangka Barat	73.556	78.340	85.564	93.456	101.344
3	Bangka Tengah	89.821	95.662	104.484	114.120	123.752
4	Bangka Selatan	86.245	91.854	100.325	109.578	118.826
5	Pangkal Pinang	89.501	94.440	102.543	111.341	120.738
	JUMLAH	**477.159**	**507.309**	**553.487**	**603.875**	**654.842**
B. PULAU BELITUNG						
6	Belitung	83.842	87.455	92.464	97.759	104.266
7	Belitung Timur	62.441	65.133	68.863	72.807	77.653
	JUMLAH	**146.283**	**152.588**	**161.327**	**170.566**	**181.919**
	JUMLAH TOTAL	**623.442**	**659.897**	**714.814**	**774.441**	**836.761**

Sumber : Hasil Analisis Tim RTRWP 2010

g) Rencana Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan akan telepon terdiri atas kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik terdiri atas untuk rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dengan standar masing-masing sebagai berikut :

1. 4 (Empat) rumah kecil memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst);
2. 2 (Dua) rumah sedang memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst); dan
3. Setiap rumah besar memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst).

Standar kebutuhan non-domestik adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan umum dan komersil : 15 % dari domestik
2. Wartel : 250 jiwa per wartel
3. Telepon Umum : 800 jiwa per unit

Kedepannya seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan sambungan telepon tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan sambungan telepon per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.4 Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
A. PULAU BANGKA						
1	Bangka	32.582	36.207	39.546	43.193	45.552
2	Bangka Barat	17.363	19.294	21.073	23.017	24.258
3	Bangka Tengah	21.202	23.560	25.733	28.106	30.379
4	Bangka Selatan	20.358	22.622	24.708	26.987	29.170
5	Pangkal Pinang	21.179	23.259	25.255	27.421	29.502
	JUMLAH	**112.683**	**124.942**	**136.315**	**148.724**	**158.861**
B. PULAU BELITUNG						
6	Belitung	19.173	19.963	21.106	22.315	23.491
7	Belitung Timur	14.278	14.867	15.719	16.619	17.495
	JUMLAH	**33.451**	**34.830**	**36.825**	**38.934**	**40.986**
	JUMLAH TOTAL	**146.134**	**159.772**	**173.140**	**187.658**	**199.847**

Sumber : Hasil Analisis Tim RTRWP 2010

Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem terestrial dan sistem satelit sebagai penghubung lokal dan interlokal, pengembangan jaringan ini dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.

h) Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem pengembangan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: sistem jaringan sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sistem jaringan sungai berupa Wilayah Strategis Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/kota yaitu WS Belitung;

b. Sistem jaringan irigasi terdiri atas daerah irigasi kewenangan pemerintah dan daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;

c. Sistem jaringan air baku terdiri dari: sumber air baku, sistem pengelolaan air baku, dan peruntukan air baku;

d. Sistem pengendalian banjir berupa: pengamanan kawasan tangkapan air hujan, pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi, pengamanan sempada sungai, pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air, dan pembangunan kanal pengatur distribusi air sungai serta normalisasi sungai;

e. Sistem pengamanan pantai dilakukan dengan cara: naturalisasi pantai dengan penghijauan, pengamanan gundukan pasir, pemecah ombak, turap dan pengamanan sempadan pantai.

i) Sistem Prasarana Lingkungan

Sistem prasarana lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: tempat pemrosesan akhir sampah (TPA Regional), tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri bahan beracun berbahaya dan nn beracun berbahaya, sistem drainase, sistem pengelolaan air minun (SPAM) dan sarana prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.



Gambar II.2 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

j) Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

2) Kawasan Lindung

Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi:

- kawasan hutan lindung;
- kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- kawasan perlindugan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan; kawasan cagar budaya serta;
- kawasan rawan bencana alam.

Sesuai dengan arahan dalam RTRWN dan kondisi ekosistem di Provinsi Kep. Bangka Belitung, rencana minimal luas kawasan lindung yang harus dipulihkan kembali dan/atau dipertahankan di provinsi ini mencapai 492.700 Ha, dimana 32% diantaranya (atau 156.730 Ha) merupakan kawasan hutan lindung.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah berupa kawasan gambut dan atau kawasan resapan air hujan. Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria: kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam kategori ini hanyalah kawasan bergambut di Bangka Barat tepatnya di Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jebus.

Sempadan Pantai; sebagaimana diketahui bahwa Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 (dua) pulau besar bangka dan Belitung. Disamping itu terdapat pulau-pulau lain yang lebih kecil yaitu Pulau Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh, Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Kawasan Cagar Alam; berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat cagar alam sebagai berikut: Cagar Alam Gunung Lalang - Belitung, Gunung Menumbing, Gunung Maras, Gunung Mangkol, Gunung Permisan, dan Jering Menduyung, kawasan Gunung Tajam Belitung.

Taman Wisata Alam Laut; di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan Perairan Bangka Selatan.

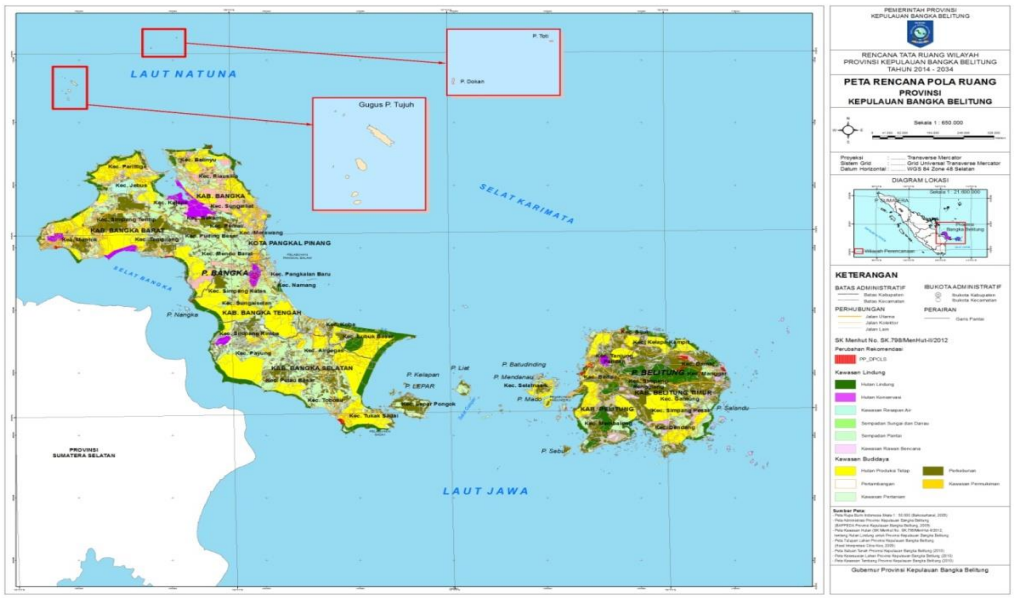
Kawasan Suaka Alam Laut ; dan perairan lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur.

Di Kepulauan Bangka Belitung terdapat kawasan cagar budaya berskala internasional yang berada di bawah naungan UNESCO yaitu kawasan Kota Tua Muntokdan Bukit Menumbing. Di kawasan pusat kota terdapat mercusuar Tanjung Kelian dan benteng Kuta Seribu yang dibangun tahun 1812-1817, mesjid Jami dan kelenteng Kung Fuk Nio serta Komplek Perumahan mayor chung A Thiam yang berusia ratusan tahun (dibangun 1830-an). Di Bukit Menumbing yang mempunyai ketinggian hampir 500 meter dpa dan dikelilingi hutan lindung terdapat bangunan tua yang dikenal dengan Giri Sasana Menumbing yang dibangun Belanda pada tahun 1932. Bangunan-bangunan yang dimaksud bukan saja berusia ratusan tahun namun juga mempunyai nilai sejarah, arsitektur dan budaya yang tinggi, sehingga pemerintah daerah bersama UNESCO telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan Cagar Budaya.

3) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung terdiri dari:

1. kawasan peruntukan hutan produksi;
2. kawasan peruntukan pertanian;
3. kawasan peruntukan perikanan;
4. kawasan peruntukan pertambangan;
5. kawasan peruntukan industri;
6. kawasan peruntukan pariwisata;
7. kawasan peruntukan permukiman;dan
8. Kawasan peruntukan lainnya.



Gambar II.3 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

4) Kawasan Strategis Provinsi

Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

a Tata ruang di wilayah sekitarnya;
b Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
c Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

c. Wilayah rawan bencana

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Ancaman bencana alam tersebut antara lain adalah banjir dan cuaca ekstrim (puting beliung). Di samping itu bencana non alam seperti gagal teknologi (kecelakaan transportasi) juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada Tabel II.5.

Tabel II.5 Data Bencana Alam Tahun 2013 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Korban	Menderita	Dipindahkan	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Banjir	20	0	0	0	936	0	0	0	0	0	0
Kebakaran	125	4	0	0	120	0	0	0	0	0	0
Kabut asap	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Korban	Menderita	Dipindahkan	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Angin puting beliung	26	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0
Tersambar petir	3	5	0	0	11	0	0	0	0	0	0
KLB DBD	3	5	0	0	13	0	0	0	0	0	0
Gempa bumi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerusuhan	1	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Jumlah	**192**	**14**	**0**	**0**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia 2014

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijabarkan sebagai berikut:

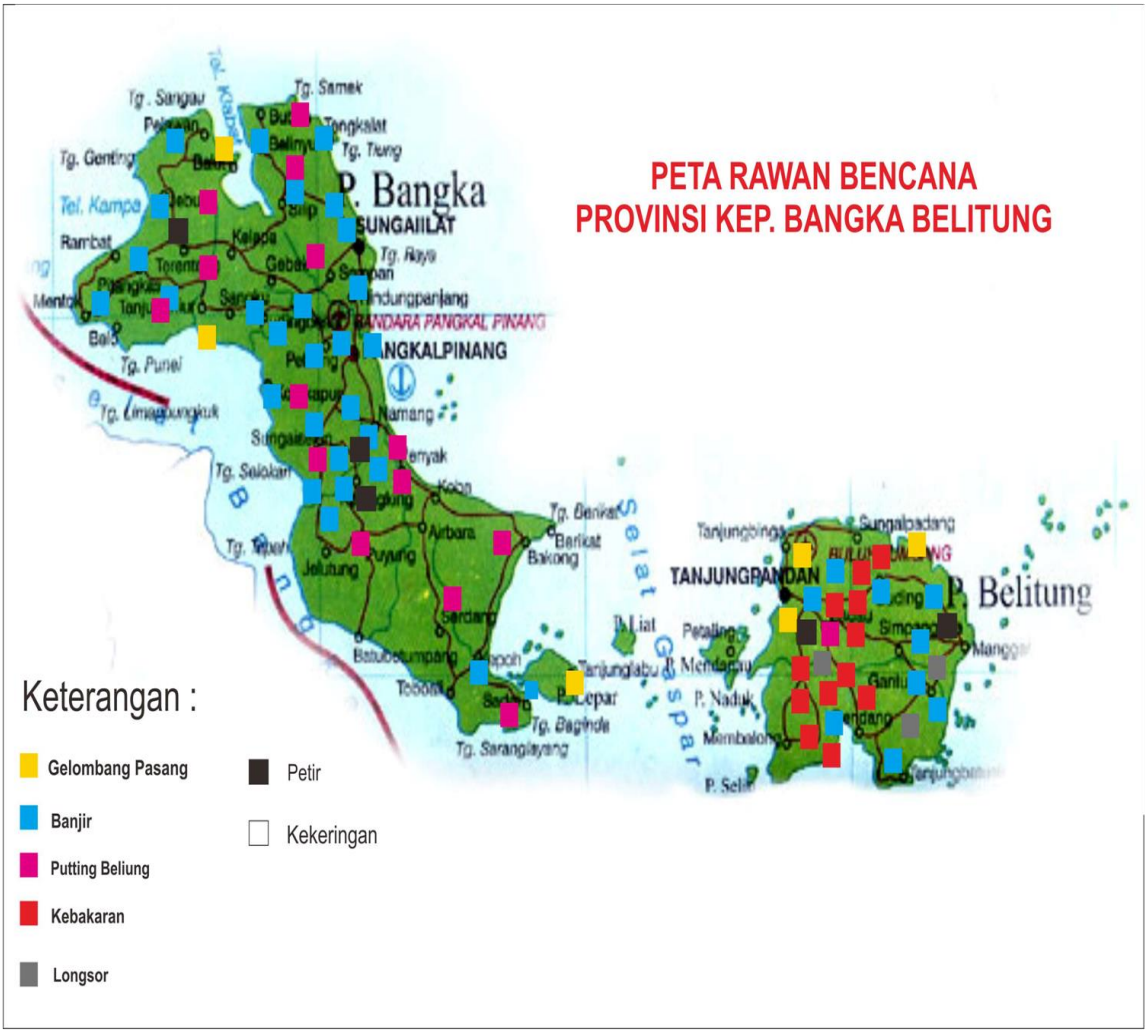
1. Bencana banjir telah terjadi 20 (dua puluh) kejadian dengan korban sebanyak 936 korban
2. Bencana yang paling sering terjadi yaitu kebakaran yaitu 125 kejadian terutama terjadi pada musim kemarautercatat jumlah korban pada bencana tersebut 120 orang.
3. Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi:
    a. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Mentok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Lubuk Besar, Koba, Namang, Sungai Selan, dan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan); Kota Pangkalpinang; Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Sungailiat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);
    b. Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parittiga, Kecamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka); dan
    c. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat).

Tabel II.6. Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Lokasi Bencana	Jenis Bencana	Intensitas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bangka	Banjir dan Puting beliung	Sedang
2	Bangka Tengah	Banjir, pergerakan tanah	Rendah
3	Bangka Selatan	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang, tinggi
4	Bangka Barat	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang

NO	Lokasi Bencana	Jenis Bencana	Intensitas
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Belitung	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang
6	Belitung Timur	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Rendah, sedang
7	Pangkalpinang	Banjir, puting beliung	Rendah, sedang

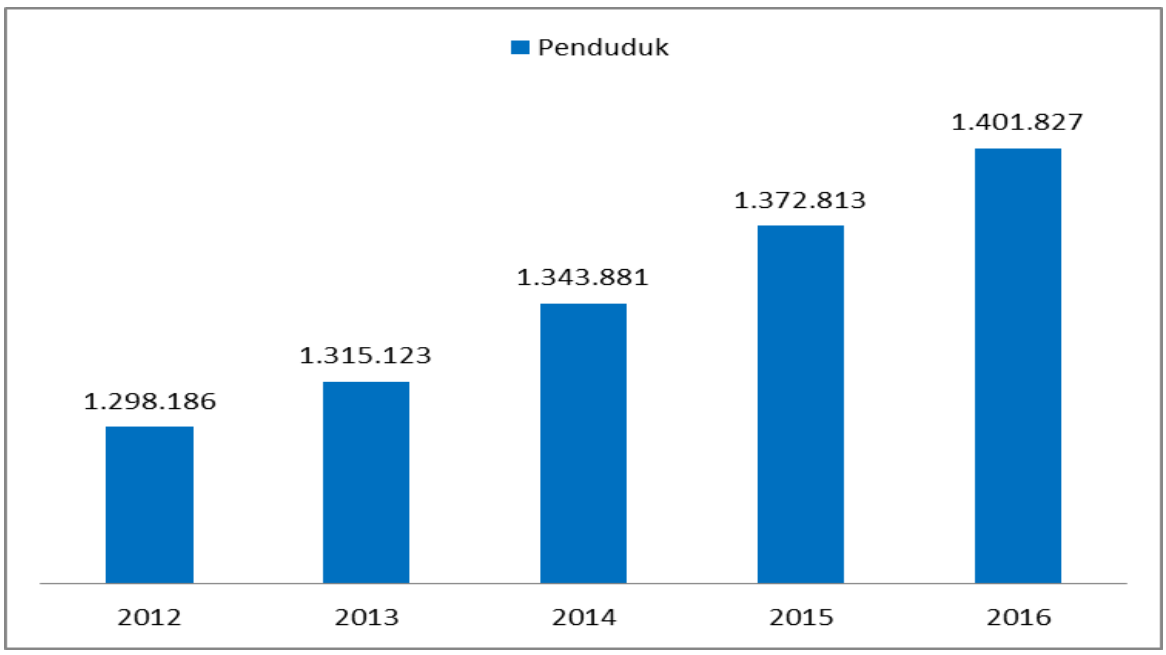
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2014



Gambar II.4 Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

d. Demografi

Dalam kurun waktu 2011-2015, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan sebesar 3,52 persen. Selain faktor natalitas dan mortalitas, faktor lain yang mendorong tingginya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2 tahun terakhir adalah tingginya angka migrasi. Tingginya migrasi ke Kepulauan Bangka Belitung disebabkan karena berkembangnya sektor pariwisata yang diindikasikan dengan meningkatnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor perdagangan, jasa dan restoran.



Grafik II.1 Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung,2016

Pada tahun 2012 penduduk Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 1.286.551 jiwa dan meningkat menjadi 1.401.827 pada tahun 2016. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 4,52 persen pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2012. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi.

Berdasarkan distribusi penduduk, sebagian besar penduduk mendiami wilayah Pulau Bangka, tepatnya berada di Kabupaten Bangka, yaitu sebesar 22,66 persen. Sedangkan sebaran penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebesar 8,70 persen (Tabel II.7).

Tabel II.7. Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/KotaTahun 2012–2016

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)					Laju Pertumbuhan (%)					Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bangka	294.003	298.013	304.485	311.085	317.735	2,02	2,21	2,17	2.22	2,14	100	101	103	105	108
Belitung	163.871	167.602	171.271	175.048	178.721	2,21	2,21	2,19	2.23	2,10	71	73	75	76	78
Bangka Barat	188.376	188.271	192.395	196.598	200.684	2,19	2,19	2,19	2.22	2,08	67	67	68	70	71
Bangka Tengah	170.033	173.346	177.218	180.903	184.720	2,23	2,23	2,23	2.21	2,11	80	82	83	85	87
Bangka Selatan	183.486	185.514	189.492	193.583	197.670	2,25	2,25	2,14	2.22	2,11	51	51	53	54	55
Belitung Timur	112.569	114.469	117.026	119.394	121.971	2,24	2,24	2,23	2.21	2,16	45	46	47	48	49
Pangkalpinang	185.830	187.908	191.994	196.202	200.326	2,24	2,24	2,17	2.22	2,10	1564	1.582	1.616	1.652	1686
Kepulauan Bangka Belitung	**1.298.168**	**1.315.123**	**1.343.881**	**1.372.813**	**1.401.827**	**2,22**	**2,22**	**2,19**	**2.22**	**2,11**	**79**	**80**	**82**	**84**	**85**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012-2016

Secara keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk Kepulauan Bangka Belitung tahun 2011-2016 mengalami peningkatan mulai dari tahun 2011 sebesar 77 jiwa per km^{2,} tahun 2012 sebesar 79 jiwa per km^2, tahun 2013 sebesar 80 jiwa per km2, tahun 2014 sebesar 82 jiwa per km^{2,} tahun 2015 sebesar 84 jiwa per km^2 dan tahun 2016 sebesar 85 jiwa per km$^{2.}$ Konsentrasi penduduk terdapat di ibukota Provinsi yaitu Pangkalpinang dengan melihat kepadatan penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Gambaran umum kondisi masyarakat enggan berfokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB perkapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani.

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita dan sebagai indikator disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi didaerah/wilayah tersebut.

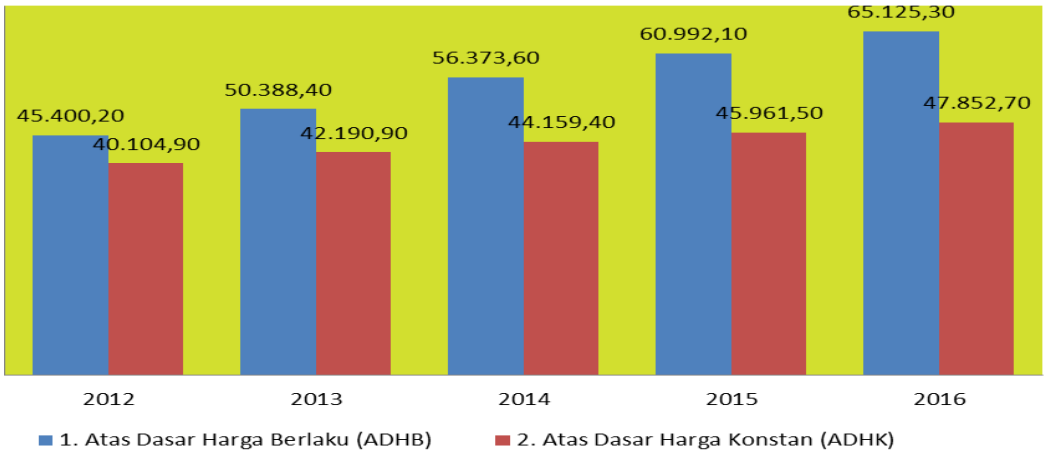
Gambaran mengenai perkembangan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2012–2016, sebagaimana terlihat pada tabel II.8 dihalaman berikut.

Tabel II.8 Perkembangan PDRB Tahun 2012–2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

No.	PDRB	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	45.400,2	50.388,4	56.373,6	60.992,1	65.125,3
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	40.104,9	42.190,9	44.159,4	45.961,5	47.852,7

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

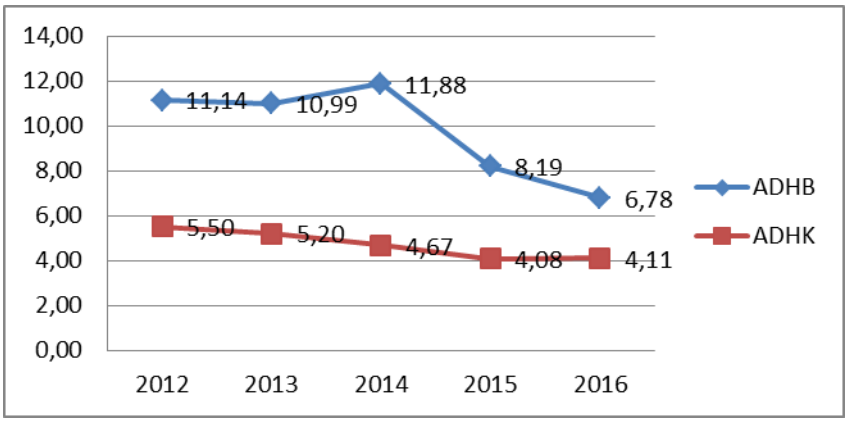
Secara nominal nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) relatif lebih besar dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, yaitu sebesar Rp. 45.400,2 Milyar pada tahun 2012 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 65.125,3 Milyar pada tahun 2016 atau rata-rata tumbuh sebesar 10,64 persen. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 hanya sebesar Rp. 40.104,9 Milyar pada tahun 2012 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 47.852,7 Milyar pada tahun 2016 atau rata-rata tumbuh sebesar 4,29 persen.



Grafik II.2 Perkembangan PDRB Tahun 2012 – 2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Sepanjang kurun waktu 2012–2016 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami trend perlambatan, baik dihitung berdasarkan PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Tahun 2010. Sebagaimana diperlihatkan pada gambar II.2, menunjukkan bahwa trend perlambatan laju pertumbuhan ekonomi ini mulai terlihat pada tahun 2012, di mana laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan ADHB mencapai sebesar 11,14 persen dan berdasarkan ADHK 2010 mencapai sebesar 5,50 persen. Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2011 yang mencapai sebesar 14,87 persen berdasarkan ADHB dan mencapai sebesar 6,90 persen berdasarkan ADHK Tahun 2010. Trend penurunan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2015, dimana laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan ADHB hanya sebesar 8,19 persen dan berdasarkan ADHK Tahun 2010 hanya mencapai sebesar 4,08 persen.

Pada Tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan ADHB masih mengalami perlambatan dimana pertumbuhannya hanya sebesar 6,78 persen, namun berdasarkan ADHK menunjukkan peningkatan pertumbuhan yaitu sebesar 4,11 persen.



Grafik II.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 – 2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang dimulai pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 merupakan dampak dari perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada hampir seluruh kategori ekonomi, dan hanya beberapa kategori yang menunjukkan peningkatan, namun kategori ekonomi ini tidak cukup mampu untuk menahan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, sepanjang periode tahun 2015-2016 lebih dari setengah 17 lapangan usaha ekonomi yang ada telah mengalami pertumbuhan, dan laju pertumbuhannya relatif memberikan andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode 2011 – 2016 dapat dilihat pada tabel II.9 dan tabel II.10. Dari kedua tabel tersebut memperlihatkan bahwa pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, serta sektor industri pengolahan merupakan 4 (empat) sektor utama yang relatif dominan menggerakkan perekonomian daerah. Dilihat dari nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Tahun 2010, lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang paling dominan, diikuti oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori pertambangan dan penggalian. Nilai tambah kategori industri pengolahan pada tahun 2011 mencapai sebesar Rp. 10.321,9 Milyar dan meningkat menjadi sebesar 13.066,6 Milyar pada tahun 2016. Pada periode yang sama nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai sebesar Rp. 7.070,6 Milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 13.026,3 Milyar. Untuk lapangan usaha pertambangan dan penggalian mencapai sebesar Rp. 6.810,2 Milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 7.740,6 Milyar. Begitu juga kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, nilai tambah bruto pada Tahun 2011 sebesar Rp.5.477,8 Milyar meningkat menjadi 9.647,8 Milyar.

Tabel II.9 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2012 – 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.111,9	9.269,6	10.748,3	11.974,7	13.026,3
B	Pertambangan dan Penggalian	6.975,3	7.097,6	7.622,8	7.742,6	7.740,6
C	Industri Pengolahan	11.043,8	12.088,2	12.877,3	12.888,4	13.086,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27,1	27,3	42,0	51,7	70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,2	9,1	10,4	12,1	13,2
F	Konstruksi	3.523,1	4.139,3	4.712,4	5.356,4	5843,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.193,5	6.671,7	7702,4	8.634,1	9.647,8
H	Transportasi dan Pergudangan	1.577,2	1.864,6	2.125,6	2.455,2	2.637,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	992,6	1.152,1	1.321,4	1.459,8	1.607,3
J	Informasi dan Komunikasi	708,6	770,2	849,1	941,7	1.033,2
K	Jasa Keuangan dan	728,8	902,4	998,5	1.086,3	1.198,6

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016
	Asuransi					
L	Real Estat	1.388,3	1.602,9	1.823,4	1.96,7	2.106,2
M,N	Jasa Perusahaan	116,1	134,4	154,0	169,6	176,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.243,5	2.618,0	3.025,6	3.471,6	3.804,7
P	Jasa Pendidikan	998,0	1.172,2	1.362,8	1.645,8	1.894,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	487,6	552,7	629,9	710,7	760,8
R,S,T,U	Jasa lainnya	276,7	315,9	371,7	426,6	498,9
Produk Domestik Regional Bruto		**45.400,2**	**50.388,4**	**56.373,6**	**60.992,1**	**65.125,3**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Selanjutnya, dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, nilai bruto lapangan usaha industri pengolahan mencapai sebesar Rp. 9.804,9 Milyar pada tahun 2012 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 10.668,7 Milyar pada tahun 2016. Untuk nilai tambah bruto kategori pertanian, kehutanan dan perikanan pada periode yang sama sebesar Rp. 7.972,9 Milyar dan meningkat menjadi Rp. 9.116,9 Milyar. Nilai tambah brutokategori pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 6.270,1 Milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 6.495,5 Milyar. Begitu juga untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor nilai tambah bruto yang tercipta sebesar Rp.5528,1 Milyar meningkat menjadi Rp.6.731,1 Milyar.

Tabel II.10 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 – 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.072,9	7.557,7	8.254,3	8.747,3	9.119,9
B	Pertambangan dan Penggalian	6.270,1	6.230,2	6.354,1	6.464,4	6.495,5
C	Industri Pengolahan	9.804,9	10.143,3	10.270,4	10.400,6	10.668,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	30,1	31,5	34,4	37,9	44,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,0	7,3	7,7	8,1	8,6
F	Konstruksi	3.133,8	3.414,7	3.552,4	3.760,8	4.018,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.528,1	5.846,6	6.140,7	6.402,1	6.731,1
H	Transportasi dan Pergudangan	1.384,8	1.484,8	1.570,8	1.658,3	1.749,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	871,0	931,0	1.000,6	1.034,8	1.084,6
J	Informasi dan Komunikasi	679,2	740,2	790,9	849,0	926,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	624,2	728,3	766,6	800,0	858,9
L	Real Estate	1.215,7	1.312,6	1.403,9	1.442	1.494,8
M,N	Jasa Perusahaan	101,2	108,1	115,7	120,3	120,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.873,0	2.014,4	2.149,8	2.337,1	2.490,2
P	Jasa Pendidikan	821,7	903,7	964,9	1.060,3	1.144,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	442,9	475,3	500,6	533,8	559,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	244,3	261,0	281,7	304,6	338,5
Produk Domestik Regional Bruto		**40.104,9**	**42.190,9**	**44.159,4**	**45.961,5**	**47.852,7**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dengan demikian, kontribusi keempat kategori terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat dominan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.11, menunjukkan bahwa berdasarkan nilai PDRB ADHB, rata-rata kontribusi ketiga sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 66,77 persen. Dari total persentase tersebut rata-rata sekitar 21,35 persen merupakan kontribusi dari kategori industri pengolahan sebagai sektor sekunder dan sebesar 32,27 persen merupakan kontribusi dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian sebagai sektor primer dalam perekonomian daerah. Kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebagai sektor tersier berkontribusi 14,21 persen.

Tabel II.11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012–2016 Atas Dasar Harga BerlakuProvinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,87	18,39	19,07	19,63	20,00
B.	Pertambangan dan Penggalian	15,36	14,08	13,52	12,69	11,39
C.	Industri Pengolahan	24,33	23,99	22,84	21,13	20,06
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,07	0,08	0,11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	7,76	8,21	8,36	8,78	8,97
G.	Perdagangan Besar dan EceranMotor	13,64	13,24	13,66	14,16	14,81
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,47	3,70	3,77	4,03	4,05
I.	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	2,19	2,29	2,34	2,39	2,47
J.	Informasi dan Komunikasi	1,56	1,53	1,51	1,54	1,59
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,60	1,79	1,77	1,78	1,84
L.	Real Estate	3,06	3,18	3,23	3,22	3,23
M, N.	Jasa Perusahaan	0,26	0,27	0,27	0,28	0,27
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,94	5,20	5,37	5,69	5,84
P.	Jasa Pendidikan	2,20	2,33	2,42	2,70	2,91
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,10	1,11	1,17	1,17
R,S.T.U	Jasa Lainnya	0,61	0,63	0,66	0,70	0,77
	PDRB	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Selanjutnya, berdasarkan nilai PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.12, menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 68,99 persen. Dari total persentase tersebut rata-rata sekitar 23,62 persen merupakan kontribusi dari kategori industri pengolahan sebagai sektor sekunder dan sebesar 33,12 persen merupakan kontribusi dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta kategori pertambangan dan penggalian sebagai sektor primer dalam perekonomian daerah. Sedangkan untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai sektor tersier memiliki kontribusi sekitar 13,85 persen.

Tabel II.12 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2016 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,64	17,91	18,69	19,03	19,05
B.	Pertambangan dan Penggalian	15,63	14,77	14,39	14,06	13,57
C.	Industri Pengolahan	24,45	24,04	23,26	22,63	22,29
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	7,81	8,09	8,04	8,18	8,40
G.	Perdagangan Besar dan EceranMotor	13,78	13,86	13,91	13,93	14,07
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,45	3,52	3,56	3,61	3,66
I.	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	2,17	2,21	2,27	2,25	2,27
J.	Informasi dan Komunikasi	1,69	1,75	1,79	1,85	1,94
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,56	1,73	1,74	1,74	1,79
L.	Real Estate	3,03	3,11	3,18	3,108	3,12
M, N.	Jasa Perusahaan	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,67	4,77	4,89	5,16	5,20
P.	Jasa Pendidikan	2,05	2,14	2,19	2,31	2,39
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,13	1,13	1,16	1,17
R,S.T.U	Jasa Lainnya	0,61	0,62	0,64	0,66	0,71
	PDRB	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Secara teoritis nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan akumulasi dari nilai PDRB Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan PDRB ADHB sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.13, menunjukkan bahwa sepanjang periode tahun 2011 – 2015 nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata hanya 0,54 persen dari nilai PDB. Hal ini berarti bahwa besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional relatif kecil. Oleh karenanya, besaran perekonomian daerah kabupaten dan kota juga relatif kecil.

Tabel II.13 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2011 s.d 2015 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	7.554,0	8.321,7	9.127,7	10.119,4	10.949,1
Kabupaten Bangka Barat	7.639,8	8.525,0	9.521,0	10.566,8	11.468,5
Kabupaten Bangka Tengah	5.083,2	5.692,4	6.245,1	6.722,3	7.056,1
Kabupaten Bangka Selatan	4.741,3	5.277,0	5.820,0	6.429,8	6.935,4
Kabupaten Belitung	4.719,4	5.333,9	5.999,9	6.734,2	7.345,9
Kabupaten Belitung Timur	4.024,0	4.541,2	5.079,6	5.643,9	6.112,5
Kota Pangkalpinang	6.595,0	7.462,0	8.414,4	9.358,6	10.214,7
Provinsi Kep. Babel	40 849,0	45 400,2	50 393,9	56 389,8	60 992,1
Nasional	7.427.086,1	8.615.704,5	9.546.134,0	10.565.817,3	11.540.789,8

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Selanjutnya, dilihat berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.14, juga menunjukkan bahwa besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih kecil dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional, yaitu hanya sebesar 0,52 persen dari PDB. Dari besaran PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Bangka Barat diikuti oleh Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

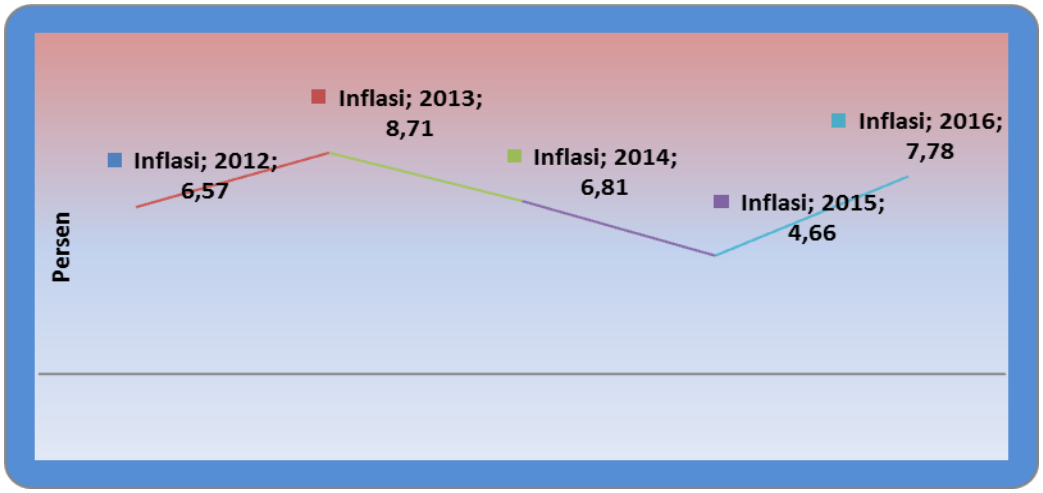
Tabel II.14 Perkembangan PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	7.003,4	7.378,1	7.769,0	8.140,5	8.513,0
Kabupaten Bangka Barat	7.191,8	7.586,5	7.973,5	8.316,2	8.742,0
Kabupaten Bangka Tengah	4.773,1	5.012,8	5.223,9	5.303,1	5.271,8
Kabupaten Bangka Selatan	4.437,3	4.646,0	4.850,3	5.066,3	5.273,3
Kabupaten Belitung	4.389,1	4.656,4	4.933,8	5.166,5	5.401,3
Kabupaten Belitung Timur	3.798,7	4.028,4	4.257,7	4.474,8	4.673,0
Kota Pangkalpinang	6.193,0	8.571,3	6.951,4	7.248,0	7.551,3
Provinsi Kep. Babel	38.014,0	40.105,0	42.198,2	44.171,6	45.961,5
Nasional	7.256.158,7	7.727.083,4	8.156.497,8	8.566.271,2	8.976.931,5

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

b. Laju Inflasi provinsi

Sepanjang periode tahun 2012-2016 inflasi Kota Pangkalpinangmengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 tingkat inflasi berada pada angka 6,57 persen, meningkat pada Tahun 2013 menjadi sebesar 8,71 dan terus mengalami penurunan hingga Tahun 2015 menjadi 4,66 persen. Namun pada Tahun 2016 kembali meningkat menjadi 7,78 persen.



Grafik II.4 Laju Inflasi Tahun 2012-2016 Kota Pangkalpinang

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013-2017

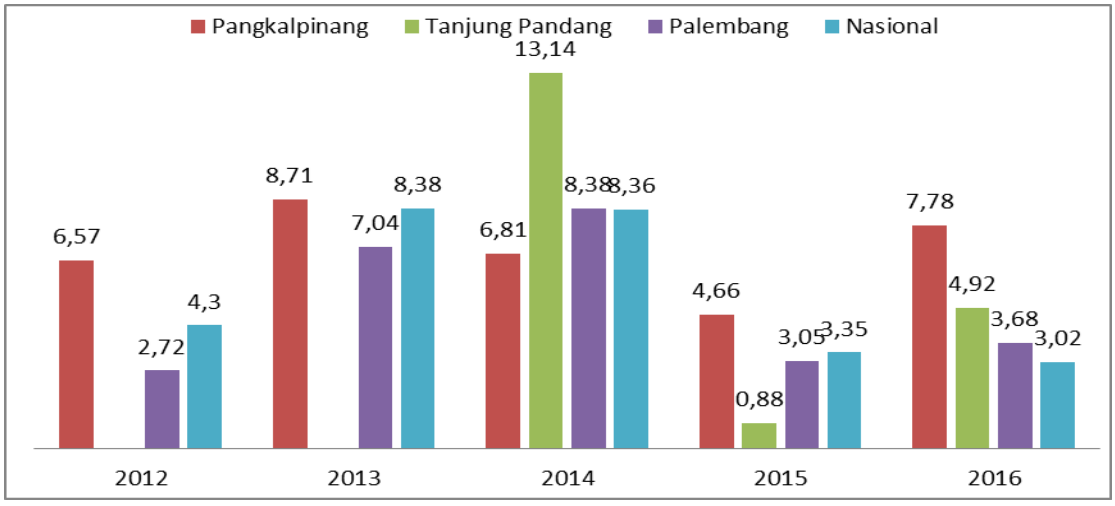
Jika dicermati menurut kelompoknya, sepanjang periode tahun 2011-2015 hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami inflasi tertinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,62 persen dan terendah pada kelompok transportasi dan komunikasi dengan rata-rata inflasi sebesar 5,31 persen.

Tabel II.15 Laju Inflasi Tahun 2012-2016 Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum	**6,57**	**8,71**	**6,81**	**4,66**	**7,78**
1. Bahan Makanan	8,50	11,08	3,39	6,63	13,49
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	7,95	6,82	8,63	7,92	4,77
3. Perumahan	5,81	9,20	8,85	3,74	3,59
4. Sandang	5,79	1,63	6,61	2,60	7,63
5. Kesehatan	5,19	5,08	8,13	5,50	4,31
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	10,31	3,77	6,65	8,62	4,04
7. Transportasi dan Komunikasi	-0,11	11,17	6,98	-2,04	11,42

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013-2017

Tahun 2016, inflasi Pangkalpinang relatif tinggi yaitu 7,78 persen bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,02 persen dan Kota Palembang sebagai wilayah yang terdekat sebesar 3,68 persen, sedangkan Kota Tanjungpandan dengan inflasi 4,92 persen. Kondisi ini tentunya bila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana inflasi Pangkalpinang sebesar 4,66 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi Palembang sebesar 3,05 persen dan Nasional 3,35 persen. Sedangkan Tanjung Pandan tingkat Inflasi terendah0,88 persen. Angka inflasi sebagaimana dimaksud dapat diamati pada grafik II.5 di bawah:



Grafik II.5 Perbandingan Angka Inflasi Tahun 2012-2016 Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional

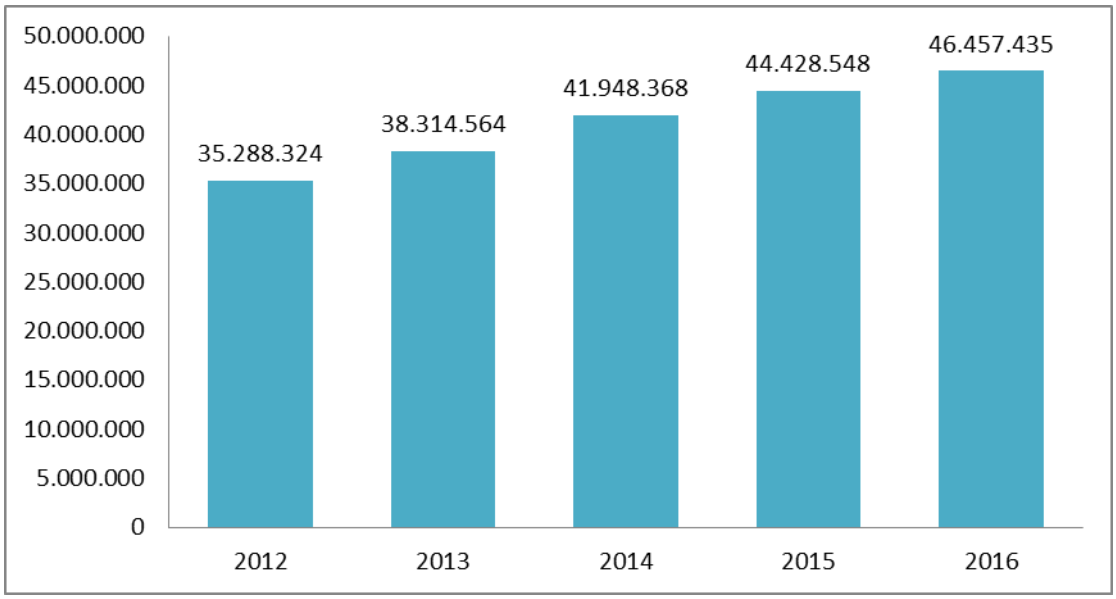
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
Catatan: Inflasi Kota Tanjung Pandan Mulai Dihitung Pada Tahun 2014

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Bahwa PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita selain dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dari daerah tersebut.

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp.35.288.324, kemudian naik mencapai Rp.46.457.435 pada tahun 2016 atau meningkat sebesar Rp.11.169.111.

Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode tahun 2012-2016, diperlihatkan pada grafik II.6.

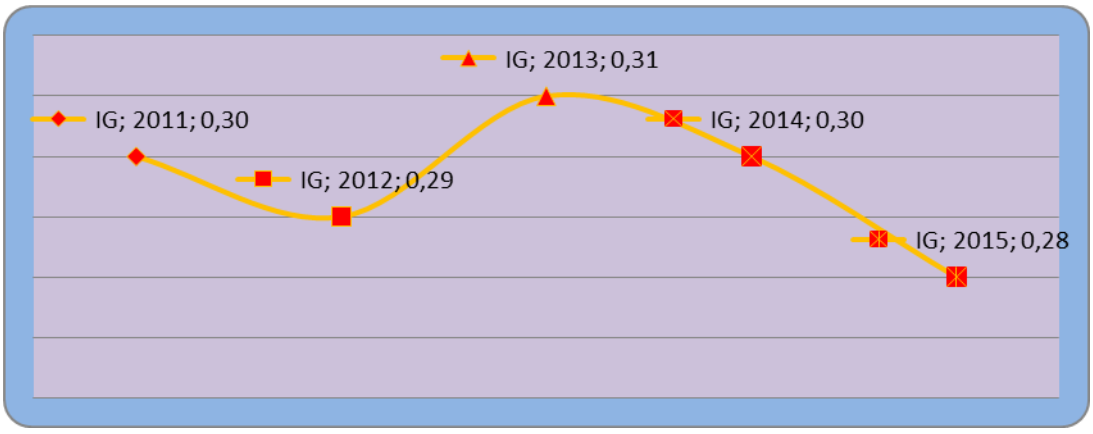


Grafik II.6 PDRB Per Kapita Tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan BangkaBelitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

d. Indeks Gini

Pada Grafik II.7 di bawah terlihat bahwa Indeks Gini cenderung menurun dari 0,30 pada tahun 2011 menjadi 0,29 pada tahun 2012 dan naik menjadi sebesar 0,31 pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 dan 2015 angka Indeks Gini cenderung turun dari sebesar 0,30 menjadi sebesar 0,28. Fenomena penurunan Indeks Gini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif merata.

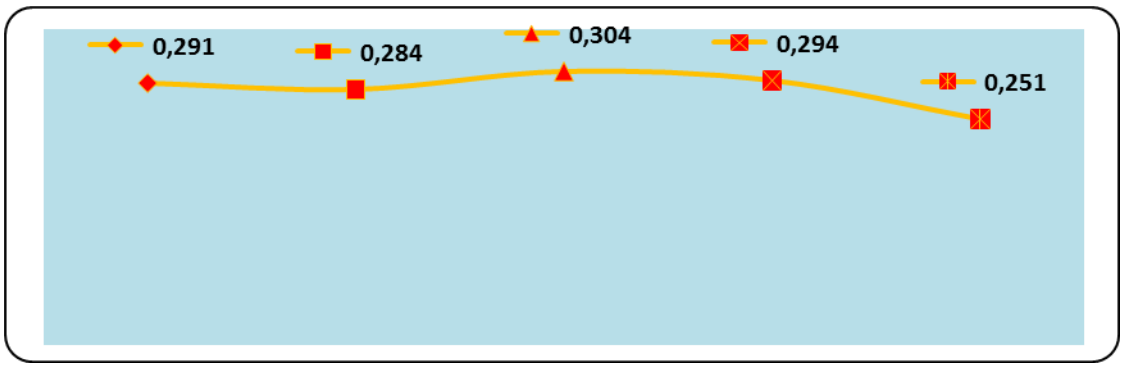


Grafik II.7 Indeks Gini Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 2016=0,28

e. Indeks Ketimpangan Williamson

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang semakin menurun, meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2011 angka indeks sebesar 0,291 dan menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,284, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,304 dan kembali turun sepanjang tahun 2014 dan 2015, yaitu masing-masing menjadi sebesar 0,294 dan 0,251. Berdasarkan angka indeks ini, mengindikasikan bahwa pembangunan wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif mendekati merata. Secara lebih rindi kondisil ini diperlihatkan pada Grafik II.8.



Grafik II.8 Indeks Williamson Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Pendidikan

1) Angka melekhuruf

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Dalam perencanaan pembangunan, angka melek huruf digunakan untuk melihat

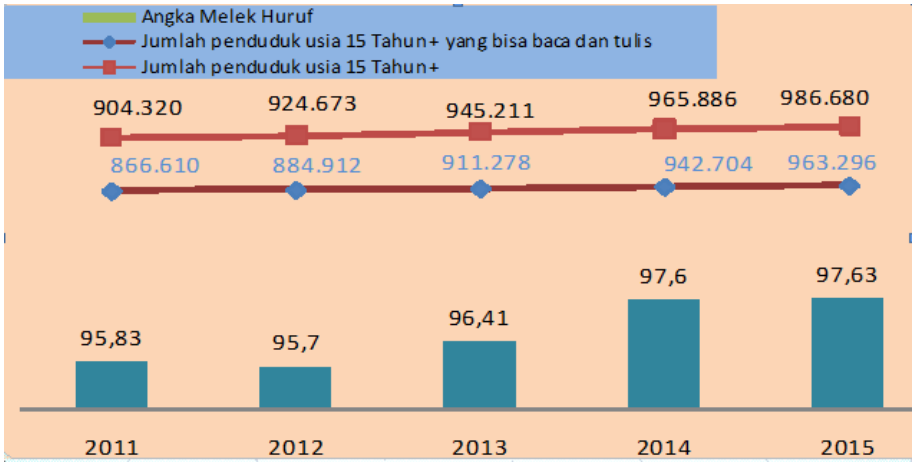
pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka melek huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertera pada Tabel II.16 dan Grafik II.9.

Tabel II.16 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	866,610	884,912	911,278	942,704	963,296
2.	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	904,320	924,673	945,211	965,886	986,680
3.	Angka melek huruf	95,83	95,70	96,41	97,60	97,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka melek huruf dari Tahun 2012 cenderung menurun dari Tahun 2011 dan kembali meningkat pada Tahun 2013 hingga Tahun 2015.



Grafik II.9 Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015), diolah

Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaran yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Angka melek huruf di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.17 berikut:

Tabel II.17 Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca dan Menulis	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Angka Melek Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	218.598	223.356	97,87
2	Kabupaten Bangka Barat	133,731	138,783	96,36
3	Kabupaten Bangka Selatan	129,505	135,693	95,44
4	Kabupaten Bangka Tengah	124,504	127,331	97,78
5	Kabupaten Belitung	126,995	128,459	98,86
6	Kabupaten Belitung Timur	86,9828	88,066	98,77
7	Kota Pangkalpinang	142,962	144,992	98,60
	Jumlah	**963,278**	**986,680**	**97,63**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Data menunjukkan bahwa angka melek huruf terendah dan berada di bawah rata-rata angka provinsi adalah Kabupaten Bangka Selatan. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah juga dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

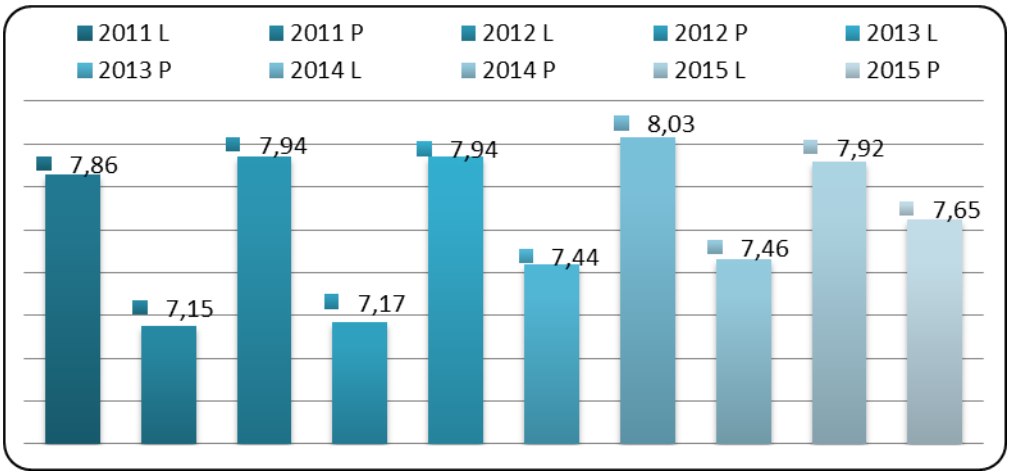
Tabel II.18 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2011		2012		2013		2014		2015	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	8,29	7,44	8,56	7,51	8,34	7,63	8,28	7,47	8,12	8,03
2	Belitung	7,76	7,04	7,94	7,24	8,40	8,09	8,15	7,82	8,33	8,13
3	Bangka Barat	6,97	6,07	7,17	6,64	7,10	6,48	7,47	6,89	7,69	7,31
4.	Bangka Tengah	7,19	6,51	7,40	6,65	7,48	6,76	7,35	6,61	7,25	6,75
5.	Bangka Selatan	6,17	5,65	6,37	5,54	6,45	6,35	6,56	6,23	5,90	5,65
6.	Belitung Timur	7,90	7,60	7,98	7,50	7,59	7,31	8,20	7,74	7,88	7,78
7.	Pangkalpinang	10,33	9,51	9,91	8,98	9,83	9,19	10,00	9,33	10,26	9,71
	Provinsi	**7,86**	**7,15**	**7,94**	**7,17**	**7,94**	**7,44**	**8,03**	**7,46**	**7,92**	**7,65**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat dari tahun 2011 hingga 2014. Namun rata-rata lama sekolah laki-laki tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2014 sedangkan rata-rata lama sekolah perempuan meningkat. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi pada tahun 2011 berada di Kota

Pangkalpinang yaitu sebesar 10,33 tahun dan yang terendah pada Tahun 2012 di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 5,54 tahun.



Grafik II.10 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Melihat perkembangan rata-rata lama sekolah di setiap kabupaten/kota tampak menunjukkan pola yang sama yaitu terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah di setiap kabupaten/kota. Tantangan yang ada yaitu berasal dari tingginya disparitas rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota. Rata-rata lama sekolah tertinggi adalah di Kota Pangkalpinang yaitu 10 tahun atau setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 2 (dua) tetapi belum tamat. Sedangkan rata-rata lama sekolah terendah adalah di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 5,65 (lima koma enam lima) tahun atau setingkat dengan SD kelas 6 (enam) tetapi belum tamat. Perkembangan di Kabupaten Bangka Selatan relatif lambat dibandingkan kabupaten/kota lain. Bahkan pada tahun 2015 menurun dibanding tahun 2011.

Capaian rata-rata lama sekolah laki-laki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi dan di atas rata-rata lama sekolah nasional (7,84) sedangkan rata-rata lama sekolah perempuan masih berada di bawah nasional. Rata-rata lama sekolah yang masih berada di bawah rata-rata lama sekolah nasional adalah Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka Barat. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai rata-rata lama sekolah pada tiga daerah tersebut.

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan APK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2010/2011 sampai dengan Tahun 2014/2015 pada berbagai jenjang pendidikan adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel II.19.

Tabel II.19 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011/2012 s.d 2015/2016Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**SD/MI**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSD/MI	155,832	159,972	168,300	168,655	160.167
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	142,312	145,469	148,649	151,846	157.866
	APK SD/MI	109,50	109,97	113,22	111,07	111,75
2.	**SMP/MTs**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSMP/MTs	54.220	51.888	59.649	64.684	60.498
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	69,202	70,740	72,284	73,840	79.565
	APK SMP/MTs	78,35	73,35	82,52	87,60	84,38
3.	**SMA/MA/SMK**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSMA/MA/SMK	41.133	48.250	54.353	56.185	47.512
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	68,911	70,438	71,981	73,531	80.125
	APK SMA/MA/SMK	59,69	68,50	75,51	76,41	79,10

Sumber : Daerah Dalam Angka 2017
**) Belum termasuk data jumlah siswa MI, MTs, MA*

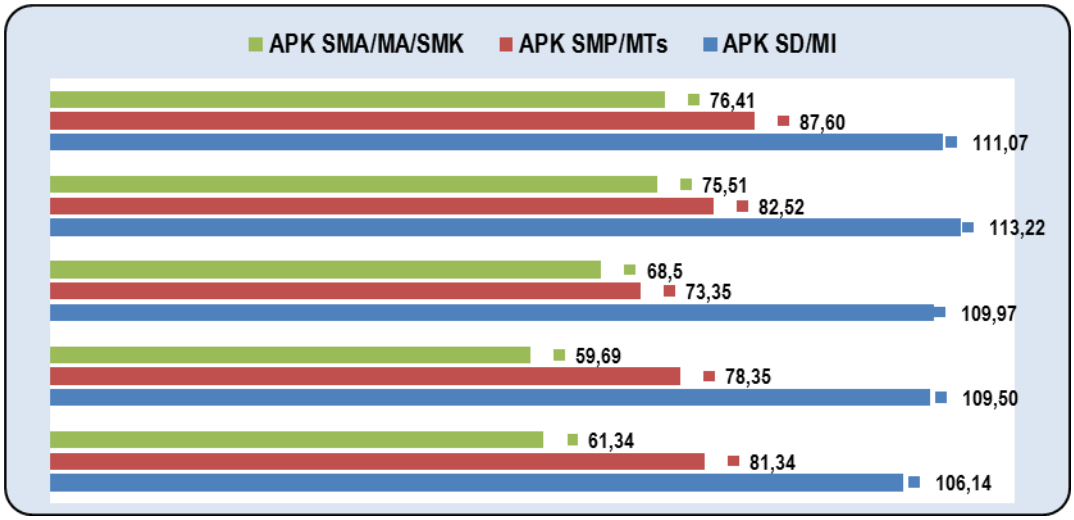
Angka partisipasi kasar tingkat SD/MI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan walaupun fluktuatif. Pada tahun 2016, APK tingkat SD/MI berada pada angka 111,75, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 111,07. Di tingkat nasional, APK SD/MI tahun 2015/2016 sebesar 108,00. Ini berarti, APK SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih di atas angka partisipasi kasar nasional.

Angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTs dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir juga mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif. APK SMP/MTs selama lima tahun berkisar antara 73,35 - 87,60. Pada tahun 2016, berada pada angka 84,38 menurun dari tahun sebelumnya yaitu 87,60. Angka ini berada di bawah angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTs nasional pada tahun 2015/2016 yaitu 100,72.

Sedangkan APK tingkat SMA/MA/SMK dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan, dari sebesar 59,69 menjadi 79,10.

Angka ini berada diatas angka partisipasi kasar nasional yaitu 76,45.

Dari data yang terlihat, nilai APK pada tingkat SD/MI lebih dari 100 persen, yang dapat berarti penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya, atau dapat juga menunjukkan bahwa daerah provinsi mampu menampung penduduk usia sekolah lebih daripada target yang sesungguhnya.



Grafik II.11 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010/2011 s.d 2014/2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

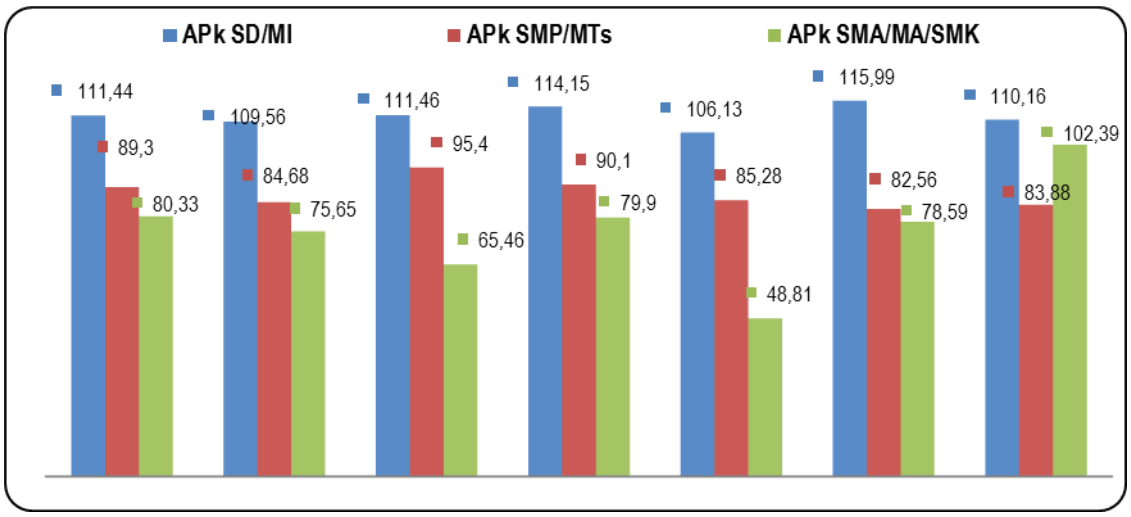
Angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK pada tahun 2011 sebesar 61,34, mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 59,69 namun selanjutnya terus meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2013 angka partisipasi kasar tingkat SMA/MA/SMK sebesar 68,50, Tahun 2014 sebesar 75,51 dan Tahun 2015 sebesar 76,41. Namun angka ini masih di bawah angka partisipasi kasar nasional yaitu 79,2.

Tabel II.20 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014/2015 Menurut kabupaten/kotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APK	Jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APK	Jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	38.315	34,382	111,44	15.005	16,803	89,30	13.257	16,503	80,33
2	Belitung	20.946	19,118	109,56	8.214	9,700	84,68	7.321	9,677	75,65
3	Bangka Barat	25.016	22,444	111,46	9.850	10,325	95,40	6.523	9,965	65,46
4.	Bangka Tengah	23.518	20,603	114,15	9.123	10,126	90,10	8.193	10,254	79,90
5.	Bangka Selatan	24.319	22,914	106,13	9.389	11,010	85,28	5.245	10,745	48,81
6.	Belitung Timur	14.922	12,865	115,99	5.013	6,072	82,56	4.634	5,896	78,59
7.	Pangkal pinang	38.315	34,382	111,44	15.005	16,803	89,30	13.257	16,503	80,33
	Jumlah	**20.946**	**19,118**	**109,56**	**8.214**	**9,700**	**84,68**	**7.321**	**9,677**	**75,65**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka partisipasi kasar pada tahun 2014/2015 tingkat SD/MI terendah di Kabupaten Bangka Selatan 106,13. Walaupun demikian hal ini bukanlah suatu prestasi buruk bahkan telah menunjukkan tingginya partisipasi sekolah pada tingkat SD/MI.



Grafik II.12 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014/2015 Menurut kabupaten/kotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015), diolah

Angka partisipasi kasar tahun 2014/2015 tingkat SMP/MTs terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 82,56 dan tingkat SMA/MA/SMK terendah di Kabupaten Bangka Selatan 48,81. APK tingkat SMP/MTs secara keseluruhan masih berada di bawah APK nasional (101,6) sedangkan APK tingkat SMA/MA/SMK secara umum juga masih di bawah nasional (79,2) kecuali Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang APK-nya telah berada di atas APK nasional.

4) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Tamat sekolah didefinisikan sebagai menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi bila mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah.

Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan Tahun 2011 s.d 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel II.21

Tabel II.21 Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	APT	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kabupaten Bangka	73,5	75,1	74,17	71,59	75,58
	SD	31,37	29,81	29,53	28,77	31,10
	SMP	15,92	16,52	17,48	15,10	19,31
	SMA	21,53	23,19	22,80	22,11	21,07
	Perguruan Tinggi	4,68	5,58	4,36	5,61	4,10
2.	Kabupaten Belitung	70,9	72,05	76,7	75,5	76,51

No	APT	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	SD	31,60	29,29	30,44	30,09	27,40
	SMP	17,31	17,63	17,54	19,77	21,61
	SMA	18,36	20,57	23,44	20,66	20,09
	Perguruan Tinggi	3,63	4,56	5,28	4,98	7,41
3.	Bangka Barat	64,65	66,05	65,21	70,26	70,24
	SD	34,55	31,33	31,00	33,66	31,26
	SMP	13,08	15,73	14,09	14,87	16,41
	SMA	13,96	15,24	16,48	17,22	17,51
	Perguruan Tinggi	3,06	3,75	3,64	4,51	5,06
4.	Bangka Tengah	66,77	66,5	65,59	65,07	68,04
	SD	34,45	31,23	29,94	30,69	33,26
	SMP	14,34	13,53	15,45	14,91	17,17
	SMA	15,27	17,94	16,06	16,33	14,43
	Perguruan Tinggi	2,71	3,80	4,14	3,14	3,18
5.	Bangka Selatan	55,31	56,54	61,59	62,61	56,2
	SD	29,41	30,44	32,95	34,76	30,59
	SMP	12,90	13,44	14,77	14,03	14,16
	SMA	9,95	10,49	10,38	10,61	9,40
	Perguruan Tinggi	3,05	2,17	3,49	3,21	2,05
6.	Belitung Timur	76,06	76,24	74,51	78,4	73,53
	SD	34,39	34,74	36,59	34,31	30,05
	SMP	17,06	17,83	18,18	21,30	20,06
	SMA	19,94	18,83	15,41	18,15	18,97
	Perguruan Tinggi	4,67	4,84	4,33	4,64	4,45
7.	Kota Pangkalpinang	84,55	82,6	81,94	83,21	84,21
	SD	20,13	20,81	21,43	20,35	20,53
	SMP	19,27	15,86	17,69	19,89	19,89
	SMA	32,81	33,50	33,30	32,58	31,16
	Perguruan Tinggi	**12,34**	**12,43**	**9,52**	**10,39**	**12,63**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Bangka pada tingkat Sekolah Dasar mengalami penurunan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 dari 31,37 menjadi 28,77. Kemudian pada Tahun 2015 meningkat kembali menjadi 31,10. Untuk tingkat SMP mengalami fluktuasi, pada Tahun 2011 APK SMP adalah 15,92 namun meningkat pada Tahun 2015 menjadi 19,31. Perkembangan APK SMA dari Tahun 2011 meningkat pada Tahun 2012 dari 21,53 menjadi 23,19. Namun tahun-tahun berikutnya semakin menurun setiap tahun, APK Tahun 2013 sebesar 22,80, Tahun 2014 sebesar

22,11, dan Tahun 2015 sebesar 21,07. Perkembangan APT untuk tingkat Perguruan Tinggi mengalami fluktuasi sejak Tahun 2011, namun pada Tahun 2015 menurun menjadi 4,10 jika dibandingkan dengan Tahun 2011 nilai APT 4,68.

Perkembangan APT tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Belitung dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015 mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan perkembangan APT ini berkurang dari 31,60 menjadi 27,40. Untuk tingkat SMP APT Tahun 2012 meningkat dari Tahun 2011 yaitu dari 17,31 menjadi 17,63, namun menurun pada Tahun 2013 menjadi 17,54, selanjutnya kembali meningkat hingga Tahun 2015 menjadi 21,61. Perkembangan APT tingkat SMA meningkat hingga Tahun 2013 yaitu 23,44 dibanding Tahun 2011 nilai APT adalah 18,36. Namun semakin menurun hingga Tahun 2015 APT menjadi 20,09. Perkembangan APT tingkat Perguruan Tinggi sejak Tahun 2011 mengalami peningkatan walaupun pada Tahun 2014 mengalami penurunan namun pada Tahun 2015 kembali meningkat menjadi 7,41.

Perkembangan APT tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 31,26 dibandingkan Tahun 2011 yaitu 34,55. Untuk tingkat SMP, APT mengalami fluktuasi namun pada Tahun 2015 meningkat menjadi 16,41 dari APT Tahun 2011 yaitu 13,08. Perkembangan APT tingkat SMA cukup menggembirakan yaitu senantiasa meningkat dari Tahun 2011 13,96 menjadi 17,51 pada Tahun 2015. Demikian juga halnya dengan perkembangan APT tingkat Perguruan Tinggi sejak Tahun 2011 selalu mengalami peningkatan hingga Tahun 2015 yaitu 3,06 menjadi 5,06.

Perkembangan APT tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 33,26 dibandingkan Tahun 2011 yaitu 34,45. Untuk tingkat SMP APT mengalami fluktuasi namun pada Tahun 2015 meningkat menjadi 17,17 dari APT Tahun 2011 yaitu 14,34. Perkembangan APT tingkat SMA dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015 mengalami fluktuasi namun pada Tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 15,27 menjadi 14,43. Demikian juga halnya dengan perkembangan APT tingkat Perguruan Tinggi mengalami fluktuasi namun pada Tahun 2015 meningkat dibandingkan APT Tahun 2011 yaitu 3,18 dari 2,71.

Angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Bangka Selatan pada tingkat Sekolah Dasar senantiasa meningkat dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014 yaitu dari 29,41 menjadi 34,76 namun menurun pada Tahun 2015 menjadi 30,59. Untuk tingkat SMP APT meningkat hingga Tahun 2013, menurun pada Tahun 2014, namun jika dibandingkan Tahun 2011 nilai APT meningkat menjadi 14,16 dari 12,90. Demikian juga halnya dengan APT tingkat SMA mengalami fluktuasi namun dibanding Tahun 2011 nilai APT Tahun 2015 menurun dari 9,95 menjadi 9,40. Untuk APT Perguruan Tinggi dari Tahun 2011 mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu dari 3,05 menjadi 2,05.

Di Kabupaten Belitung Timur APT tingkat Sekolah Dasar mengalami penurunan pada tahun 2015 dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 34,39 menjadi 30,05. Untuk tingkat SMP nilai APT mengalami perkembangan yang cukup baik dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014 yaitu dari 17,06 menjadi 21,30 namun pada Tahun 2015 menurun menjadi 20,06, walaupun angka ini meningkat dibandingkan Tahun 2011. Pada tingkat SMA nilai APT mengalami penurunan cukup besar pada Tahun 2013 dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 19,94 menjadi 15,41, namun hingga Tahun 2015 APK terus meningkat menjadi 18,97. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2011. Untuk APT tingkat Perguruan Tinggi sejak Tahun 2011 tidak mengalami perkembangan yang berarti. Tahun 2011 nilai APT sebesar 4,67, dan pada Tahun 2015 nilai APT berkurang menjadi 4,45.

Angka pendidikan yang ditamatkan tingkat Sekolah Dasar di Kota Pangkalpinang hampir tidak mengalami peningkatan dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Pada Tahun 2011 nilai APT sebesar 2013 dan Tahun 2015 sebesar 20,53. Untuk tingkat SMP pada Tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup besar dibanding Tahun 2011 yaitu dari 19,27

menjadi 15,86. Angka ini terus meningkat hingga Tahun 2015 menjadi 19,89. Perkembangan APT untuk tingkat SMA mengalami fluktuasi, namun pada Tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 32,18 menjadi 31,16. Demikian juga halnya dengan APT tingkat Perguruan Tinggi mengalami fluktuasi namun pada Tahun 2015 meningkat jika dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 12,34 menjadi 12,63. Secara keseluruhan angka pendidikan yang ditamatkan Kota Pangkalpinang paling tinggi sedangkan APT yang paling rendah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

5) Angka Partisipasi Murni

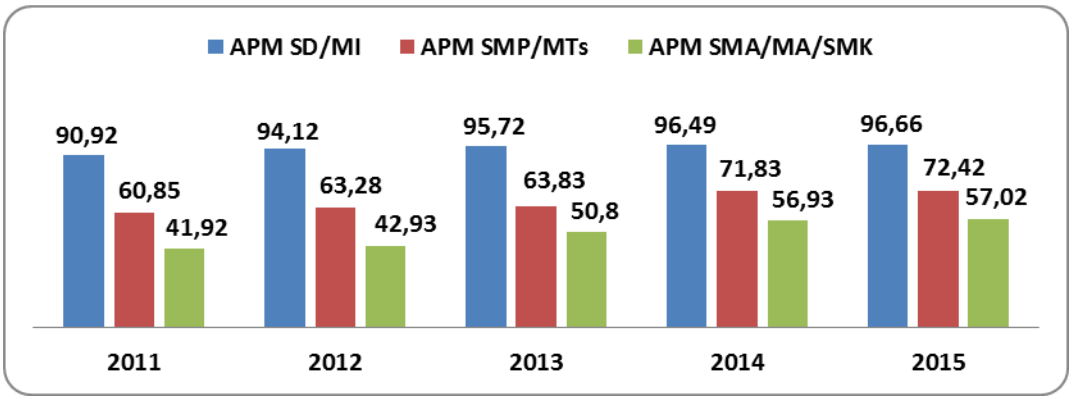
Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Perkembangan APM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 s/d 2015 pada berbagai jenjang pendidikan adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel II.22.

Tabel II.22 Perkembangan APM Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	126.542	133.944	139.243	143.431	146.774
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	139,180	142,312	145,469	148,649	151,846
	APM SD/MI	90,92	94,12	95,72	96,49	96,66
2.	SMP/MTs					
	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	41.183	43,791	45,153	51.921	53.475
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	67,680	69,202	70,740	72,284	73,840
	APM SMP/MTs	60,85	63,28	63,83	71,83	72,42
3.	SMA/MA/SMK					
	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/MA/SMK	28.251	29.583	35.782	40.979	41.927
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	67,393	68,911	70,438	71,981	73,531
	APM SMA/MA/SMK	41,92	42,93	50,80	56,93	57,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Pada kurun waktu Tahun 2011-2015 angka partisipasi murni pada seluruh tingkat pendidikan meningkat. APM SD/MI pada tahun 2015 sebsar 96,99 telah melampaui APM nasional. Namun APM SMP/MTs Tahun 2015 sebesar 72,4 masih di bawah nasional berbeda dengan APM SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 55,3 yang telah berada di atas APM nasional.



Grafik II.13 Perkembangan APM Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

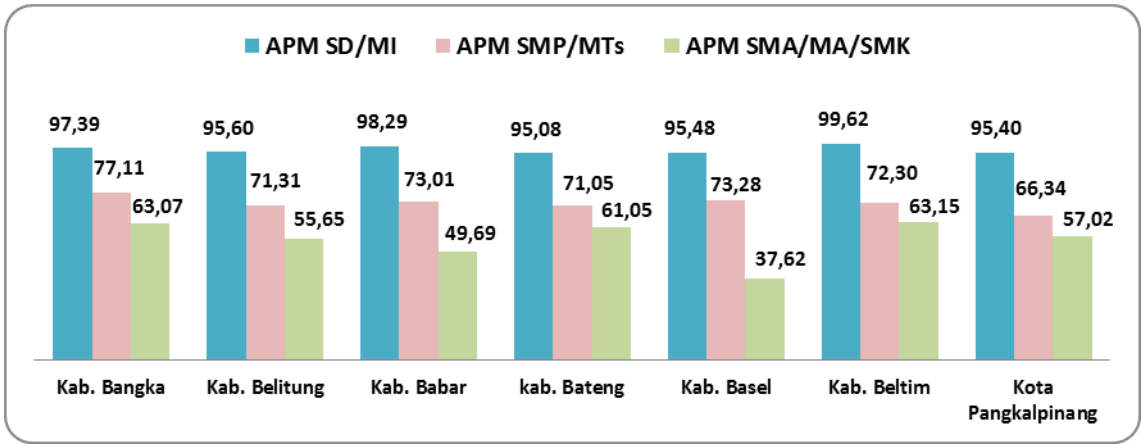
Angka partisipasi murni untuk setiap kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada Tabel II.23 menunjukkan bahwa APM tingkat SD/MI terendah pada Tahun 2015 ada di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 95,08, tingkat SMP/MTs terendah di Kota Pangkalpinang sebesar 66,34 dan terendah tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 37,62.

Tabel II.23 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APM	Jumlah siswa usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APM	Jumlah siswa usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	33.485	34.382	97,39	12.957	16.803	77,11	10.408	16.503	63,07
2	Belitung	18.277	19.118	95,60	6.917	9.700	71,31	5.385	9.677	55,65
3	Bangka Barat	22.060	22.444	98,29	7.538	10.325	73,01	4.952	9.965	49,69
4.	Bangka Tengah	19.589	20.603	95,08	7.194	10.126	71,05	6.260	10.254	61,05
5.	Bangka Selatan	21.878	22.914	95,48	8.068	11.010	73,28	4.042	10.745	37,62
6.	Belitung Timur	12.816	12.865	99,62	4.390	6.072	72,30	3.723	5.896	63,15
7.	Pangkalpinang	18.622	19.520	95,40	6.504	9.804	66,34	7.086	10.491	67,54
	Jumlah	**146.727**	**151.846**	**96,66**	**53.568**	**73.840**	**72,42**	**41.856**	**73.531**	**57,02**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka partisipasi murni tingkat SD/MI pada Tahun 2015 di seluruh kabupaten/kota telah melampaui angka partisipasi murni nasional. Sedangkan untuk tingkat SMP, MTs seluruh kabupaten/kota APMnya berada di bawah nasional.



Grafik II.14 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015 menurut Kabupaten/KotaProvinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Berbeda dengan APM tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka, Belitung, Bangka Tengah, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang telah melampaui APM nasional, hanya Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan saja yang berada di bawah nasional.

B. Kesehatan

1.) Angka kelangsungan bayi hidup

Kesehatan menjadi salah satu topik perhatian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan harus menjadi topik strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.24 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2012-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2013		2014		2015		2016	
		Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bangka	6,96	16,2	5,35	6,73	7,54	9,58	7,43	8,23
2	Belitung	14,75	14,16	12,91	13,81	11,29	12,26	12,17	14,02
3	Bangka Tengah	4,95	4,95	5,74	6,74	6,46	7,86	6,46	6,46
4	Bangka Barat	9,21	8,48	7,61	7,87	7,37	8,38	6,63	7,14
5	Bangka Selatan	8,84	7,74	7,37	8,42	6,28	7,38	5,85	7,52
6	Belitung Timur	14,73	12,84	10,22	11,15	8,25	8,25	6,71	8,62
7	Kota Pangkalpinang	4,73	3,48	2,92	3,16	3,38	3,38	6,33	6,33
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**8,52**	**7,60**	**6,92**	**7,78**	**7,05**	**8,13**	**7,22**	**8,07**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan Tabel di atas, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2013–2016 di Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan meningkat. Untuk Tahun 2016 angka kematian bayi yang paling tinggi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 12,17 dan angka kematian balita yang paling tinggi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 14,02. Pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka kematian bayi sebesar 7.22 dan balita sebesar 8.07 pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 dimana angka kematian bayi sebesar 7.05 dan balita sebesar 8.13.

2.) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 sebesar 69,92 tahun. UHH tertinggi berada masih berada di Kota Pangkalpinang 72,57 tahun diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur 71,30 tahun, Kabupaten Bangka 70,52 tahun, dan Kabupaten Belitung 70,38 tahun, Kabupaten Bangka Tengah70,38 tahun, Kabupaten Bangka Barat 69,52 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 66,99 tahun. Dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini berarti angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi.

Tabel II.25 Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/KotaTahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	70,40	70,45	70,47	70,48	70,52
Belitung	70,15	70,20	70,22	70,32	70,38
Bangka Barat	69,39	69,44	69,46	69,47	69,52
Bangka Tengah	69,90	69,95	69,98	70,28	70,38
Bangka Selatan	66,41	66,51	66,56	66,86	66,99
Belitung Timur	70,98	71,01	71,03	71,23	71,30
Pangkalpinang	72,26	72,29	72,31	72,51	72,57
Prov. Kep. Bangka Belitung	**69,48**	**69,64**	**69,72**	**69,88**	**69,92**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

3.) Persentase balita gizi buruk

Berikut ini pada tabel II.26 menjelaskan perkembangan persentase balita dengan gizi buruk dari tahun 2012 sampai dengan 2016, dimana untuk Tahun 2016 persentase balita dengan Gizi Buruk paling tinggi di Kota Pangkalpinang dengan persentase sebesar 0,10 sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Bangka Tengah dengan 0,03 %.

Tabel II.26 Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	0,15	0,06	0,13	0,08	0,06
2	Belitung	0	0,01	0,01	0,03	0,05
3	Bangka Tengah	0,12	0,10	0,04	0,06	0,03
4	Bangka Barat	0,03	0,07	0,05	0,04	0,09
5	Bangka Selatan	0,21	0,05	0,02	0,05	0,04
6	Belitung Timur	0,20	0,15	0,02	0,06	0,04
7	Kota Pangkalpinang	0,16	0,11	0,01	0,05	0,10
	Kepulauan Bangka Belitung	**0,12**	**0,07**	**0,05**	**0,05**	**0,06**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

4.) Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung fluktuatif, yaitu dari 5,37 persen pada tahun 2012 menjadi 5,25 persen pada tahun 2013, kemudian mengalami penurunan tahun 2014 menjadi sebesar 4,97 persen dan pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,40 persen dan 5.22 persen. Kenaikan ini cenderung dipengaruhi oleh dampak perlambatan perekonomian daerah, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan menjadi relatif terbatas. Sementara itu Indeks Kedalaman Kemiskinan secara konsisten dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini secara lebih rinci diperlihatkan pada tabel II.27.

Tabel II.27 Perkembangan Kemiskinan Tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,37	5,25	4,97	4,83	5,04
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	70,21	70,.90	67,23	66,62	71,07
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	382.412	427.081	469.814	488.701	564.391
4.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,84	0,62	0,60	0,90	0,75

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, September

Tabel II.28 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	3,37	3,47	3,04	2,77	2,67
2.	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	6,69	6,97	6,84	6,83	7,57

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Memperhatikan Tabel II.28,sepanjang periode tahun 2012-2016 tingkat kemiskinan kota dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 Tingkat Kemiskinan Kota dan Tingkat Kemiskinan Desa sebesar 2,78 dan 7,72 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2015 dimana Tingkat Kemiskinan Kota 2,77 dan Tingkat Kemiskinan Desa 6,83 . Disamping itu, kemiskinan di perdesaan masih relatif dominan dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan di desa kurang memberi banyak alternatif, sehingga ketergantungan pada sektor tambang dan pertanian masih sangat besar. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat desa untuk dapat keluar dari kemiskinan.

Tabel II.29 Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Bangka	5.36	5.57	5.40	5,20	5,63
Belitung	6.97	7.26	8.48	7,36	8,38
Bangka Barat	3.59	3.72	3.26	3,15	3,08
Bangka Tengah	5.56	5.77	5.46	3,27	5,67
Bangka Selatan	4.23	4.4	4.01	3,87	3,74
Belitung Timur	7.13	7.43	6.90	6,68	7,33
Kota Pangkalpinang	4.15	4.29	4.15	4,04	4,97
Kepulauan Bangka Belitung	5.16	5.37	5.25	4,97	5,40

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Sementara itu, berdasarkan Tabel II.29,dapat diketahui persentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di KabupatenBelitung dan Belitung Timur. Sementara itu, angka kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang.

Adapun perbandingan jumlah penduduk miskin pada provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada tabel II.30 berikut:

Tabel II.30 Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2012-2016 Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (ribu jiwa)

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	909,04	855,71	837,42	859,41	841,31
Sumatera Utara	1407,25	1.390,80	1.360,60	1.508,14	1.452,55
Sumatera Barat	404,74	380,63	354,74	349,53	376,51
Riau	483,07	522,53	498,28	562,92	501,59
Jambi	271,67	281,57	281,75	311,56	290,81
Sumatera Selatan	1057,03	1108,21	1.085,80	1.112,53	1.096,50
Bengkulu	311,66	320,41	316,50	322,83	325,60
Lampung	1253,83	1134,28	1.143,93	1.100,68	1.139,78
Kepulauan Bangka Belitung	71,36	70,90	67,23	66,62	71,07
Kepulauan Riau	131,22	125,02	124,17	114,83	119,14

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, September

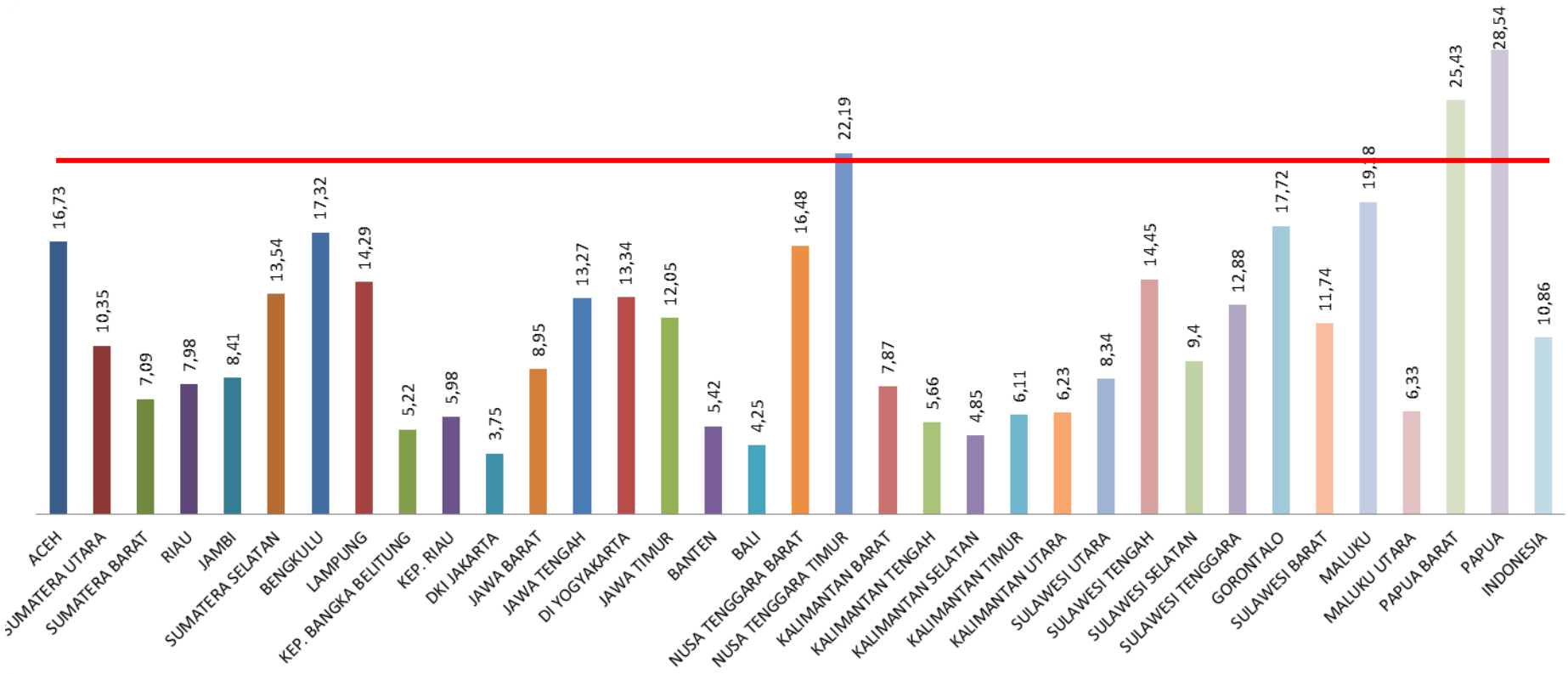
Berdasarkan tabel II.30, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling sedikit diantara provinsi lainnya yang ada di Sumatera, dan persentasenya juga paling rendah diantara provinsi lain yaitu 5,22 % pada tahun 2016. Namun demikian hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dari provinsi lainnya di Sumatera. Berikut tabel persentase penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatera.

Tabel II.31 Persentase penduduk miskin di Pulau SumateraTahun 2012-2016

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	19,46	17,72	16,98	17,11	16,43
Sumatera Utara	10,67	10,39	9,85	10,79	10,27
Sumatera Barat	8,19	7,56	6,89	6,71	7,14
Riau	8,22	8,42	7,99	8,82	7,67
Jambi	8,42	8,42	8,38	9,12	8,37
Sumatera Selatan	13,78	14,06	13,62	13,77	13,39
Bengkulu	17,7	17,75	17,09	17,16	17,03
Lampung	16,18	14,39	14,21	13,53	13,86
Kepulauan Bangka Belitung	5,53	5,25	4,97	4,83	5,02
Kepulauan Riau	7,11	6,35	6,40	5,78	5,84

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (September)

Sementara itu berdasarkan data kemiskinan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan (%) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2016 adalah persentasenya berada di bawah rata-rata wilayah induknya (nasional).



Grafik II.15 Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nasional Tahun 2016

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

5.) Rasio penduduk yang bekerja

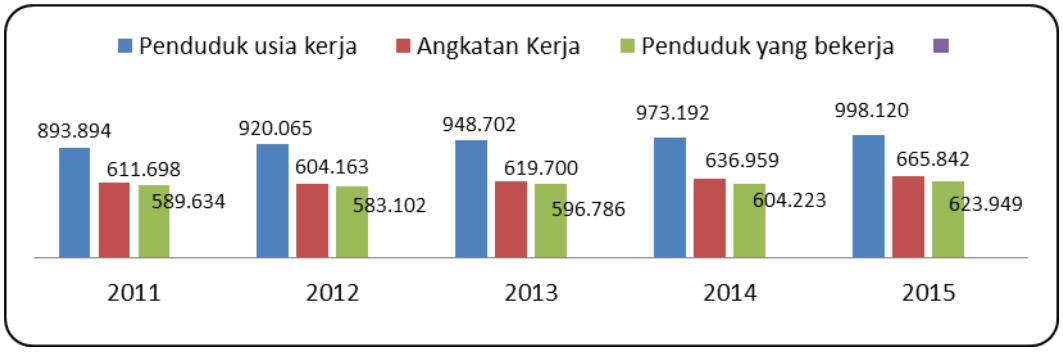
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Provinsi yang baru terbentuk menjadi salah satu daerah yang berpeluang besar dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, baik pencari kerja maupun membangun bidang usaha sendiri. Rasio penduduk yang bekerja yang merupakan perbandingan antara Penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, selama lima tahun (2011-2015) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung stabil, tahun 2011 sebesar 0,96 % dengan penduduk yang bekerja sebanyak 589.634 dan tahun 2015 menurun sebesar 0,94 % dengan penduduk yang bekerja sebanyak 623.949 orang. Peningkatan ini masih wajar mengingat angkatan kerja penduduk usia 15 tahun keatas penduduk Provinsi kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 5 (lima) tahun juga meningkat.

Tabel II.32 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Usia kerja	920.065	948.702	973.192	998.120	1.022.955
2.	Angkatan Kerja	604.163	619.700	636.959	665.842	705.173
3.	Penduduk yang Bekerja	583.102	596.786	604.223	623.949	686.830
4.	Rasio Penduduk yang bekerja	0.97	0.96	0.95	0.94	0,97

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Agustus)

Berdasarkan grafik Grafik II.16 dibawah dapat dilihat perkembangan penduduk yang bekerja, Angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk namun penduduk yang bekerja juga relatif terus meningkat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.



Grafik II.16 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Dalam menggambarkan seberapa Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.33, tren TPAK dari tahun 2011-2015 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung

fluktuatif dimana tahun 2011 sebesar 68,43 dan tahun 2013 turun menjadi 62,91 sedangkan tahun 2015 naik menjadi 66,71, ini berarti bahwa penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi (bekerja dan mencari kerja) sebesar 66,71 % meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya 65,45 %.

Tabel II.33 Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65.67	65,30	62,09	66.71	68,93
2.	Tingkat Pengangguran	3.43	3.65	5.14	6.29	2,60

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Agustus 2017)

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 seperti yang ditunjukan pada Tabel II.34 menunjukkan pola perubahan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya kecuali di sektor Primer (Pertanian dan Pertambangan) yang terjadi pergeseran yang cukup besar, dimana untuk sektor pertanian tahun 2011 sebesar 25,93 % meningkat menjadi 36,63 % pada tahun 2015, sedangkan untuk sektor permabangan pada tahun 2011 sebesar 25,19 % menurun menjadi 12,24 % pada tahun 2015. Hal ini menunjukan bahwa penyerapan tenaga kerja untuk sektor pertanian meningkat dan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih cenderung untuk bertani ketimbang untuk bekerja di bidang pertambangan walaupun pada tiga tahun terkahir harga komoditas pertanian dan perkebunan relatif menurun kecuali lada yang cenderung naik. Sedangkan untuk sektor pertambangan yang relatif menurun selama lima tahun terakhir dikarenakan semakin menurunnya harga komoditas timah sehingga ekspor timah yang semakin menurun dan berdampak dengan berkurangnya antusias masyarakat menambang timah dan kebijakan dari undang-undang minerba yang ketat dan melarang ekspor bahan tambang mentah.

Tabel II.34 Penduduk 15 tahun ke atas Tahun 2011 s.d 2015 menurut Lapangan Pekerjaan UtamaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lapangan Pekerjaan Utama	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sektor Primer :					
1. Pertanian	28,60	28,06	31.41	36.63	32,13
2. Pertambangan	22,10	21,28	17.50	12.24	11,48
Sektor Sekunder:					
3. Industri Pengolahan	6,20	6,06	5.88	5.65	8,02
4. Listrik, Gas dan Air	0,30	0,35	0.21	0.46	0,91
5. Bangunan	5,40	4,99	5.16	4.61	3,21
Sektor Tersier:					
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	19,90	18,49	20.45	19.68	21,69
7. Angkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi	2,40	2,90	2.86	2.91	2,88
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	1,80	1,93	2.19	2.11	1,99
9. Jasa Kemasyarakatan	13,40	15,94	14.35	15.70	17,70
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2015

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

1) Jumlah grup kesenian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, namun yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dimilikinya yang saat ini dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata. Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah Perang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu Maras Taun, Beripat, dsb. Dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan, peran sanggar-sanggar kesenian dan budaya yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, hal yang tergambarkan pada Tabel II.35.

Tabel II.35 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	1,34	1,69	1,65	1,72	1,68
2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,0079	0,0078	0,007604	0,0074	0,0073

*Rumus : jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000*
Sumber: SKPD yang menangani urusan

Berdasarkan data perkembangan Grup kesenian di atas, menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2011-2015 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah grup kesenian dimana tahun 2011 sebesar 1,34 meningkat tahun 2012 menjadi 1,69 dan menurun pada tahun 2013 menjadi 1,65. Pada tahun 2014 kembali meningkat dibandingkan tahun 2013 menjadi 1,72 dan kembali menurun pada tahun 2015 menjadi 1,68.

Tabel II.36 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Menurut kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Bangka	0,503	0
2.	Kab. Belitung	0,328	0
3.	Kab. Bangka Barat	0,167	0
4.	Kab. Bangka Tengah	0,138	0,051
5.	Kab. Bangka Selatan	0,160	0
6.	Kab. Belitung Timur	0,306	0
7.	Kota Pangkal Pinang	0,291	0
	Jumlah	**1,894**	**1**

*Rumus : jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000*
Sumber: SKPD yang menangani urusan

B. Pemuda dan olahraga

1) Jumlah klub olahraga

Data yang diperoleh dari PD yang menangani pemuda dan olahraga, serta Organisasi Cabang Olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga, atletik, sepakbola, bola voli, bola basket, bulutangkis, dan pencak silat, sebanyak 595 perkumpulan, terdapat 68 perkumpulan di Kabupaten Bangka, 103 perkumpulan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Barat, 82 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah, 102 perkumpulan di Kabupaten Bangka Selatan, 77 perkumpulan di Kabupaten Belitung Timur, dan 60 perkumpulan di Kota Pangkalpinang. Perkumpulan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak terdapat pada cabang sepakbola (335 perkumpulan), kemudian bola voli (84 perkumpulan), bulutangkis (67 perkumpulan), pencak silat (52 perkumpulan), bola basket (42 perkumpulan), dan atletik (15 perkumpulan).

Tabel II.37 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	2	2	2	2	2
2.	Kab. Belitung	1	1	1	1	3
3.	Kab. Bangka Barat	-	1	1	1	2
4.	Kab. Bangka Tengah	1	1	1	1	1
5.	Kab. Bangka Selatan	3	6	6	7	7
6.	Kab. Belitung Timur	1	1	1	1	2
7.	Kota Pangkal Pinang	1	1	1	2	2
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**9**	**13**	**13**	**15**	**19**

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota

Tabel II.38 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Sepakbola Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	20	20	31	33	34
2.	Kab. Belitung	15	35	62	66	66
3.	Kab. Bangka Barat	30	38	64	64	64
4.	Kab. Bangka Tengah	24	27	30	36	36
5.	Kab. Bangka Selatan	24	51	51	58	133
6.	Kab. Belitung Timur	33	60	65	65	65
7.	Kota Pangkal Pinang	11	11	11	13	25
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**57**	**242**	**314**	**335**	**423**

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupatendan Kota

Tabel II.39 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	3	3	3	4	9
2.	Kab. Belitung	11	14	15	15	15
3.	Kab. Bangka Barat	17	19	19	19	20
4.	Kab. Bangka Tengah	11	14	15	16	23
5.	Kab. Bangka Selatan	7	10	15	23	159
6.	Kab. Belitung Timur	1	1	2	4	10
7.	Kota Pangkal Pinang	3	3	3	3	10
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**53**	**64**	**71**	**84**	**246**

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota

Tabel II.40 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	6	8	8	10	25
2.	Kab. Belitung	3	3	3	3	15
3.	Kab. Bangka Barat	5	5	10	14	7
4.	Kab. Bangka Tengah	-	-	-	-	2
5.	Kab. Bangka Selatan	2	2	3	3	8
6.	Kab. Belitung Timur	2	2	2	2	10
7.	Kota Pangkal Pinang	8	8	10	10	7
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**26**	**28**	**36**	**42**	**84**

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel

Tabel II.41 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bulutangkis Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	8	10	10	10	15
2.	Kab. Belitung	6	8	10	12	19
3.	Kab. Bangka Barat	2	2	2	4	10
4.	Kab. Bangka Tengah	8	8	10	19	20
5.	Kab. Bangka Selatan	5	5	5	5	59
6.	Kab. Belitung Timur	2	3	3	3	15
7.	Kota Pangkal Pinang	11	11	13	14	20
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**41**	**47**	**53**	**67**	**158**

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel

Tabel II.42 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak silat Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	6	6	9	9	9
2.	Kab. Belitung	6	6	6	6	6
3.	Kab. Bangka Barat	1	1	1	1	2
4.	Kab. Bangka Tengah	4	6	8	10	10
5.	Kab. Bangka Selatan	3	5	5	6	17
6.	Kab. Belitung Timur	2	2	2	2	5
7.	Kota Pangkal Pinang	15	15	15	18	18
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**37**	**41**	**46**	**52**	**67**

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel

2) Jumlah Gedung olahraga

Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari pelaku pembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2007–2014 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah telah disediakannya lahan seluas ±50 Ha untuk pembangunan *Sport Center,* saat ini di kawasan tersebut telah tersedia Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga seluruh *venue* cabang olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut.

Tabel II.43 Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah gedung Olahraga	N/A	10	10	10	10
2.	Jumlah Lapangan Olahraga	N/A	1.730	1.730	1.730	1.731

Dari data perkembangan sarana dan prasarana olahraga di provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami peningkatan, dimana jumlah gedung olahraga sebanyak 10 buah dan lapangan olahraga pada tahun 2015 sebanyak 1.731 buah.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus layanan urusan wajib

A. Urusan Pendidikan

1) Angka partisipasi sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan perbandingan dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang

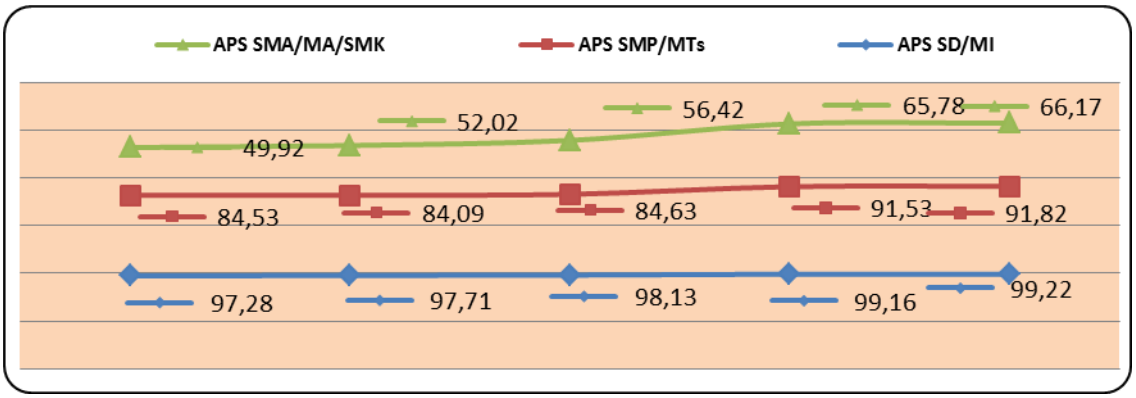
sesuai. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah disuatu daerah mencerminkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2011 s/d 2015 disajikan pada Tabel II.44.

Tabel II.44 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	135.394	139.053	142.749	147.400	150.662
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	139,180	142,312	145,469	148,649	151,846
	APS SD/MI (%)	97,28	97,71	98,13	99,16	99,22
2.	SMP/MTs					
	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	57.210	58.192	59.867	66.161	67.780
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	67,680	69,202	70,740	72,284	73,840
	APS SMP/MTs (%)	84,53	84,09	84,63	91,53	91,82
3.	SMA/MA/SMK					
	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/MA/SMK	33.642	35.847	39.741	47.349	48.655
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	67,393	68,911	70,438	71,981	73,531
	APS SMA/MA/SMK (%)	49,92	52,02	56,42	65,78	66,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2015 selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2015 APS tingkat SD/MI sebesar 99,22%, hal ini menunjukkan masih ada penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 1.184 anak atau 0,78% yang belum mendapatkan layanan sekolah tingkat SD/MI.



Grafik II.17 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs Tahun 2011 sebesar 84,53% dan menurun pada Tahun 2012 yaitu 84,09% dan terus meningkat hingga Tahun 2015 menjadi 91,82%. Demikian juga halnya dengan APS tingkat SMA/MA/SMK dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014 mengalami kenaikan namun menurun pada Tahun 2015. Angka partisipasi sekolah tingkat SMA/MA/SMK Tahun 2015 sebesar 66,17% yang menunjukkan bahwa masih terdapat 33,83% penduduk usia 16-18 tahun belum mendapatkan layanan sekolah tingkat SMA/MA/SMK.

Angka partisipasi sekolah menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.45.

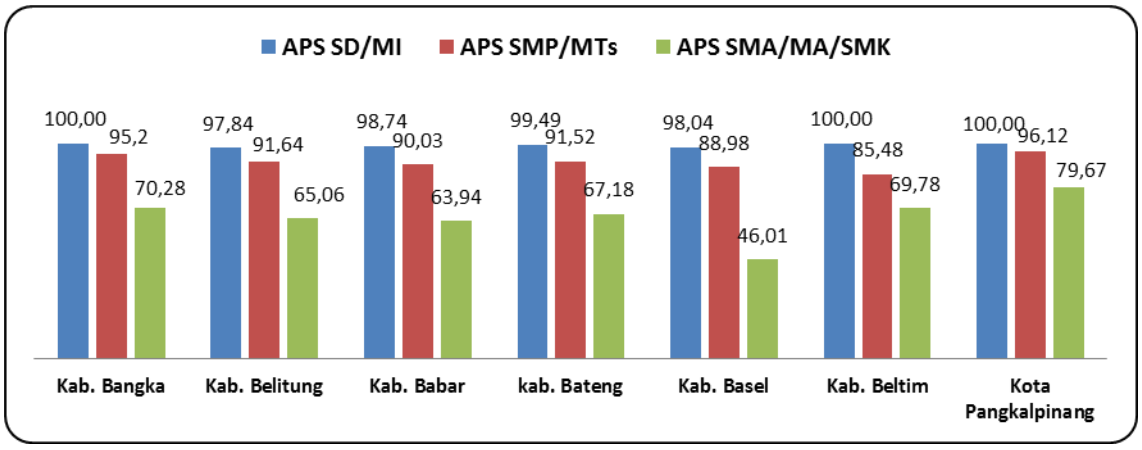
Tabel II.45 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 tahun	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APS	Jumlah siswa usia 13-15 tahun	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APS	Jumlah siswa usia 16-18 tahun	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	34.382	34.382	100	15.996	16.803	95,20	11.598	16.503	70,28
2	Belitung	18.705	19.118	97,84	8.889	9.700	91,64	6.296	9.677	65,06
3	Bangka Barat	22.161	22.444	98,74	9.295	10.325	90,03	6.372	9.965	63,94
4.	Bangka Tengah	20.498	20.603	99,49	9.267	10.126	91,52	6.889	10.254	67,18
5.	Bangka Selatan	22.465	22.914	98,04	9.797	11.010	88,98	4.944	10.745	46,01
6.	Belitung Timur	12.865	12.865	100	5.190	6.072	85,48	4.114	5.896	69,78
7.	Pangkalpinang	19.520	19.520	100	9.424	9.804	96,12	8.358	10.491	79,67
	Jumlah	**150.596**	**151.846**	**99,22**	**67.859**	**73.840**	**91,82**	**48.571**	**73.531**	**66,17**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka partisipasi sekolah Tahun 2015 tingkat SD/MI di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang mencapai 100%, ini menunjukkan seluruh penduduk usia 7-12 tahun telah mendapatkan layanan sekolah tingkat SD/MI. Namun masih ada daerah kabupaten yang belum mencapai 100% APSnya yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan, yang

menunjukkan masih ada penduduk usia 7-12 tahun belum mendapatkan layanan sekolah SD/MI.



Grafik II.18 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015), diolah

Angka partisipasi sekolah Tahun 2015 tingkat SMP/MTs terendah di Kabupaten Belitung Timur 85,48% dan belum ada daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai APS 100%. Ini menunjukkan bahwa pada setiap kabupaten dan kota masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan tingkat SMP/MTs.

Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMA/MA/SMK, APS terendah di Kabupaten Bangka Selatan 46,01%, yang menggambarkan bahwa lebih dari setengah penduduk usia 16-18 tahun belum mendapatkan layanan pendidikan tingkat SMA/MA/SMK. Begitu juga halnya dengan daerah kabupaten/kota lainnya, masih terdapat penduduk usia 16-18 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMA/MA/SMK.

2) Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah / Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Selama kurun waktu 2011-2014 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan.

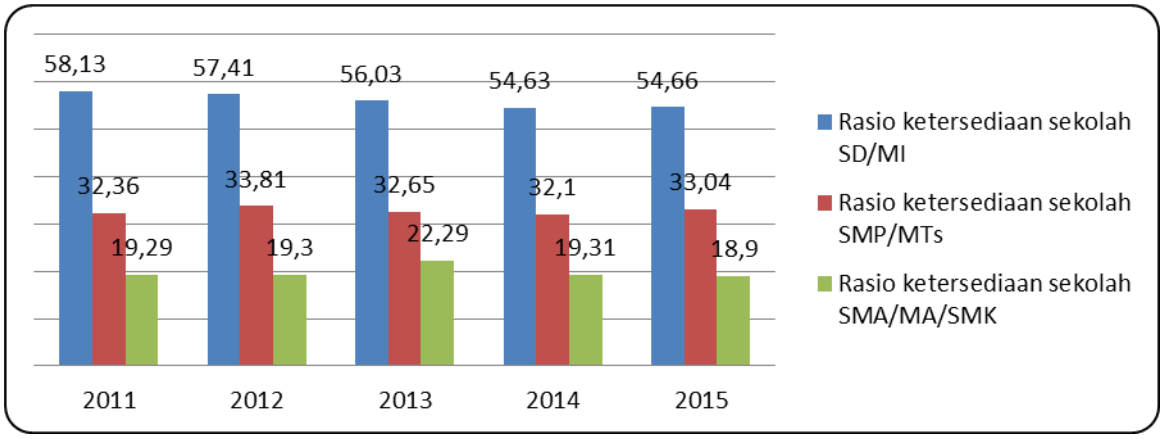
Tabel II.46 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**SD/MI**					
	Jumlah gedung sekolah	809	817	815	812	830
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	139.180	142.312	145.469	148.649	151.846
	Rasio	58,13	57,41	56,03	54,63	54,66

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	**SMP/MTs**					
	Jumlah gedung sekolah	219	234	231	232	244
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	67.680	69.202	70.740	72.284	73.840
	Rasio	32,36	33,81	32,65	32,10	33,04
3.	**SMA/MA/SMK**					
	Jumlah gedung sekolah	130	133	157	139	139
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	67.393	68.911	70.438	71.981	73.531
	Rasio	19,29	19,30	22,29	19,31	18,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Pada tahun 2011 rasio ketersediaan sekolah mencapai 58,13 sekolah per 10.000 penduduk, dan menurun hingga 54,63 sekolah pada Tahun 2014. Pada Tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah sedikit meningkat dibanding tahun 2014 yaitu 54,66 sekolah per 10.000 penduduk.



Grafik II.19 Ketersediaan Sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2016, diolah

Berdasarkan data, rasio ketersediaan sekolah yang terendah ada pada tingkatan SMA/SMK/MA, dengan jumlah penduduk usia sekolah pada tingkatan tersebut berjumlah 73.531 orang, namun kapasitas sekolah yang tersedia adalah hanya 139 sekolah atau dengan rasio 18,90.

Data mengenai ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2014/2015 menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.47.

Tabel II.47 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 menurut Kabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 16-18th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	187	34.382	54,39	59	16.803	35,11	34	16.503	20,60
2	Belitung	121	19.118	63,29	29	9.700	29,90	17	9.677	17,57
3	Bangka Barat	138	22.444	61,49	43	10.325	41,65	22	9.965	22,08
4.	Bangka Tengah	97	20.603	47,08	26	10.126	25,68	13	10.254	12,68
5.	Bangka Selatan	94	22.914	41,02	36	11.010	32,70	18	10.745	16,75
6.	Belitung Timur	105	12.865	81,62	24	6.072	39,53	13	5.896	22,05
7.	Pangkalpinang	88	19.520	45,08	27	9.804	27,54	18	10.491	17,16
	Jumlah	**830**	**151.846**	**54,66**	**244**	**73.840**	**33,04**	**139**	**73.531**	**18,90**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Rasio ketersediaan sekolah Tahun 2014/2015 tingkat SD/MI terendah terdapat di Kabupaten Bangka Selatan 41,02, tingkat SMP/MTS dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Tengah yaitu masing-masing 25,68 dan 12,68.

Sedangkan rasio ketersediaan sekolah Tahun 2014/2015 tingkat SD/MI tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung Timur81,62, tingkat SMP/MTS di Bangka Barat dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Tengah yaitu masing-masing 41,65 dan 22,08.

3) Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata

Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi rasio tersebut berarti bahwa satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Rasio murid dan guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.48 berikut.

Tabel II.48 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**SD/MI**					
	Jumlah guru	9.694	9.875	9.635	9.767	9.303
	Jumlah murid	159.012	161.533	162.152	161.932	165.520
	Rasio	16,40	16,36	16,83	16,58	17,79
2.	**SMP/MTs**					
	Jumlah guru	3.799	3.934	3.841	4.005	3.784
	Jumlah murid	52.688	58.517	59.863	60.101	65.331
	Rasio	13,87	14,87	15,58	15,01	17,26
3.	**SMA/MA/SMK**					
	Jumlah guru	3.326	3.458	3.788	3.444	3.059
	Jumlah murid	38.435	41.999	44.269	42.930	46.914
	Rasio	11,55	12,14	11,69	12,46	15,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Pada kurun waktu 2011-2015, rasio guru dan murid tertinggi ada pada jenjang pendidikan SD/MI yaitu 17,79 pada Tahun 2015. Hal ini disebabkan jumlah guru pada tingkat SD/MI cenderung menurun setiap tahunnya sementara jumlah murid mengalami peningkatan. Jumlah guru pada tingkat SMP/MTs yang selalu meningkat sampai Tahun 2014 dan kembali menurun pada Tahun 2015 dengan jumlah murid yang semakin bertambah yang menyebabkan rasio guru dan murid menjadi meningkat juga. Hal yang sama terjadi pada kondisi guru dan murid pada tingkat SMA/MA/SMK. Walaupun pada setiap tingkatan sekolah rasio guru dan murid mengalami fluktuasi naik dan turun namun secara umum rasio guru dan murid pada masing-masing jenjang pendidikan mengalami peningkatan.

Rasio guru dan murid pada Tahun 2015 pada tingkat SD/MI tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu masing-masing 20,60, tingkat SMP/MTs di Kabupaten Bangka Tengah yaitu 19,46 dan tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Barat yaitu 15,46.

Tabel II.49 Jumlah Guru dan Murid Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	2.049	37.580	18,34	919	15.345	16,70	712	10.458	14,69
2	Belitung	1.269	19.334	15,23	441	8.393	19,03	272	6.324	23,25
3	Bangka Barat	1.412	24.590	17,41	565	8.665	15,34	403	6.229	15,46
4.	Bangka Tengah	1.167	22.964	19,68	423	8.232	19,46	347	5.009	14,43
5.	Bangka Selatan	1.221	24.042	19,70	541	8.502	15,71	366	5.346	14,61
6.	Belitung Timur	1.032	13.253	12,84	353	5.806	16,45	300	3.816	12,72
7.	Pangkalpinang	1.153	23.757	20,60	542	10.388	19,17	659	9.732	14,77
	Jumlah	**9.303**	**165.520**	**17,79**	**3.784**	**65.331**	**17,26**	**3.059**	**46.914**	**15,34**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

B. Urusan Kesehatan

1) Jumlah rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada kurun waktu 2011-2016, ketersediaan fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi baik dan di setiap kabupaten kota sudah memiliki rumah sakit pemerintah. Berikut ini jumlah rumah sakit pemerintah diuraikan pada Tabel II.50.

Tabel II.50 Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	1	1	2	2	2	2
Belitung	1	1	1	1	1	1
Bangka Barat	1	1	1	1	1	1
Bangka Tengah	1	1	1	1	1	1
Bangka Selatan	1	1	1	1	1	1
Belitung Timur	1	1	1	1	1	1
Pangkal Pinang	1	1	1	1	1	1
Provinsi Kep. Babel	**7**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

2) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Tabel II.51 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	8	8	8	8	8
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya milik Pemerintah	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	9	9	9	9	9
6.	Jumlah Penduduk	1.289.321	1.339.773	1.343.881	1.372.813	1.401.827
7.	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Tabel II.52 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten /Kota	Rumah Sakit Umum (Pemerintah		Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kab. Bangka	2	0,01	1	0,00	-	-	-	-	2	0,01	5	0,02
2	Kab. Bangka Barat	1	0,00	-	-	-	-	-	-	1	0,00	2	0,01
3	Kab. Bangka Tengah	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
4.	Kab. Bangka Selatan	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
5.	Kab. Belitung	1	0,01	-	-	-	-	-	-	1	0,01	2	0,01
6.	Kab. Belitung Timur	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
7.	Kota Pangka lpinang	1	0,01	-	-	-	-	-	-	3	0,02	4	0,02
	Jumlah	**8**	**0,04**	**35**	**0,00**	**-**	**-**	**-**		**7**	**0,03**	**16**	**0,08**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel di bawah, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2016 di kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar dibanding tahun 2015, seperti terjadi di Kabupaten Bangka Selatan yang mengalami peningkatan sebesar 74,8 persen, diikuti Kabupaten Bangka Barat 89,5 persen, Kabupaten Bangka Tengah 56,8 persen, Kota Pangkalpinang 88,7 persen. Namun juga terjadi penurunan akses terhadap air bersih yang tidak begitu besar, yakni di Kabupaten Belitung menjadi 74,2 persen dan Kabupaten Belitung Timur menjadi 76 persen.

Tabel II.53 Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	81,39	87,7	87,7	75,3	**77,9**
2	Belitung	78,44	75,6	75,6	84,5	**74,2**
3	Bangka Tengah	78,87	48,2	48,2	47,7	**56,8**
4	Bangka Barat	54,66	87,4	87,4	83,7	**89,5**
5	Bangka Selatan	73,80	76,4	76,4	59,6	**74,8**
6	Belitung Timur	72,39	100	100	76,6	**76,0**
7	Kota Pangkalpinang	91,84	92,0	92,0	87,7	**88,7**
	Kepulauan Bangka Belitung	**76,38**	**80,2**	**80,2**	**73,7**	**77,6**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Beberapa jenis penyakit yang menjadi perhatian dan sekaligus topik penting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain penyakit malaria, HIV, dan demam berdarah. Perkembangan angka penyakit yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.54 Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	**(8)**
1	Bangka	1,67	0,97	0,48	0,21	**0,13**
2	Belitung	1,97	0,66	1,31	0,09	**0,01**
3	Bangka Tengah	4,28	2,13	2,28	0,19	**0,36**
4	Bangka Barat	4,52	4,23	0,98	0,74	**0,09**
5	Bangka Selatan	2,08	0,66	1,63	0,30	**0,17**
6	Belitung Timur	1,58	0,57	0,98	0,05	**0,07**
7	Kota Pangkalpinang	0,67	0,39	0,31	5,18	**0,92**
	Kepulauan Bangka Belitung	**2,36**	**1,39**	**0,68**	**0,97**	**0,18**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016& Data Sektoral 2016

Angka kesakitan malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2012–2016. Hal ini selaras dengan prioritas pembangunan bidang kesehatan yang fokus pada pengurangan angka kesakitan malaria.

HIV/AIDS merupakan masalah lintas sektoral yang memerlukan perhatian seriusdari semua pihak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan semakin tersedianyaakses pelayanan HIV dan AIDS jumlah kasus yang terlaporkan pun semakin banyak. AIDS(*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan gejala penyakit berat karenamenurunnya imunitas tubuh akibat infeksi HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*).Berdasarkan laporan kegiatan serosurvey yang dilakukan di beberapa populasiberisiko menunjukkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah denganepidemi terkonsentrasi (prevalensi > 5% pada populasi berisiko).

Dari kegiatan serosurvey pada populasi beresiko diperoleh data prevalensi >5% di dua kabupaten, yaitu tertinggi di Kota Pangkalpinang 6.67%, Bangka 3.94%, sedangkan di dua

kabupaten lainnya prevalensi HIV adalah sebagai berikut Belitung Timur 2,17% dan Bangka Selatan 1.08% sedangkan yang terendah di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Belitung, Bangka Tengah dan Bangka Barat 0%. Prevalensi kasus HIV/AIDS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disajikan dalam tabel II.55 berikut:

Tabel II.55 Perkembangan Prevelensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	**(8)**
1	Bangka	0	8,33	3,94	3,94	**0**
2	Belitung	0,56	2,70	1,80	0	**0**
3	Bangka Tengah	8,11	2,50	0,01	0	**0**
4	Bangka Barat	4,94	0	0	0	**0**
5	Bangka Selatan	0	3,17	9,84	1,08	**0**
6	Belitung Timur	3,85	0,20	0,02	2,17	**0**
7	Kota Pangkalpinang	1,96	6,98	10,33	6,67	**0**
	Kepulauan Bangka Belitung	**8,11**	**8,33**	**10,33**	**13,86**	**0**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Dengan adanya fenomena gunung es dalam masalah HIV menggambarkan bahwa peningkatan penemuan kasus HIV/AIDS tidak berarti merupakan suatu kegagalan,melainkan disebabkan semakin banyak kasus yang terlaporkan terkait semakin tersedianya akses bagi masyarakat yang memerlukan.

Tabel II.56 Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	**(8)**
1	Bangka	5,60	25,92	43,15	30,90	**66,22**
2	Belitung	19,88	214,38	111,81	13,93	**74,88**
3	Bangka Tengah	3,33	111,48	87,21	25,26	**44,57**
4	Bangka Barat	49,10	98,85	66,72	6,98	**75,88**
5	Bangka Selatan	46,95	75,93	26,47	20,55	**45,97**
6	Belitung Timur	22,66	13,24	7,72	6,80	**23,38**
7	Kota Pangkalpinang	29,17	88,48	27,68	8,88	**39,25**
	Kepulauan Bangka Belitung	**27,93**	**86,17**	**53,4**	**23,82**	**55,53**

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2011-2015

Berdasarkan distribusi angka kesakitan DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2011-2015 cenderung mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Pada tahun 2014, Penurunan angka kesakitan DBD cukup signifikan dimana angka kenaikan terbesar terdapat di Kabupaten Belitung Timur.

Dalam rangka pengendalian permasalahan kesehatan yang terjadi dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pula ketersediaan tenaga dokter menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat, pemerintah berkewajiban

untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan tersebut. Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.57 Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	**(9)**
1	Bangka	11	12	12	12	**12**
2	Belitung	9	9	9	9	**9**
3	Bangka Tengah	7	7	8	8	**8**
4	Bangka Barat	8	8	8	8	**8**
5	Bangka Selatan	9	9	9	9	**9**
6	Belitung Timur	6	6	6	7	**7**
7	Kota Pangkalpinang	9	9	9	9	**9**
	Kepulauan Bangka Belitung	**59**	**60**	**61**	**62**	**62**

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2016

Tabel II.58 Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012		2013		2014		2015		2016	
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
(1)	(2)	(5)	(6)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	**(12)**
1	Bangka	11	36	11	37	12	36	12	33	12	**35**
2	Belitung	9	31	9	31	9	31	9	33	9	**32**
3	Bangka Tengah	7	18	7	21	7	18	8	19	8	**20**
4	Bangka Barat	8	19	8	19	8	19	8	18	8	**19**
5	Bangka Selatan	9	29	8	28	9	29	9	29	9	**28**
6	Belitung Timur	6	18	6	17	6	18	6	18	7	**17**
7	Kota Pangkalpinang	9	19	9	7	9	19	9	19	9	**19**
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**59**	**169**	**58**	**160**	**60**	**169**	**61**	**169**	**62**	**170**

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2016

Tabel II.59 Perkembangan Jumlah Dokter Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	**(19)**
Prov. Kep. Babel	3	2	0	1	2	0	6	1	0	10	0	1	10	0	1	10	0	**1**
Bangka	48	13	11	22	11	17	60	13	17	60	11	22	61	9	16	61	9	**16**
Belitung	34	8	10	4	8	3	40	10	2	41	10	4	40	10	6	40	10	**6**
Bangka Tengah	35	8	7	4	5	0	39	7	2	42	7	4	44	7	5	44	7	**5**
Bangka Barat	29	4	5	4	6	2	38	5	2	54	5	4	36	7	3	36	7	**3**
Bangka Selatan	20	3	6	0	4	0	27	5	0	27	6	0	23	7	3	23	7	**3**
Belitung Timur	24	3	1	14	1	0	34	5	0	34	8	2	32	10	4	32	10	**4**
Pangkalpinang	63	15	46	59	17	30	61	17	41	61	21	51	56	19	42	56	19	**42**
Jumlah	**256**	**54**	**72**	**261**	**54**	**52**	**305**	**63**	**64**	**329**	**68**	**88**	**292**	**69**	**83**	**292**	**69**	**83**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014
Keterangan :
U : Dokter Umum
G : Dokter gigi
Sp : Dokter Spesialis

Berdasarkan data pada Tabel II.59 terlihat bahwa jumlah dokter terus mengalami peningkatan, namun kebutuhan akan tenaga dokter masih dirasakan kurang, terutama pada tenaga dokter spesialis. Terbatasnya ketersediaan akan dokter spesialis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan banyaknya masyarakat yang harus berobat keluar daerah dan hal tersebut dirasakan memberatkan masyarakat terutama dari sisi pembiayaan.

3) Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.) Penataan Ruang

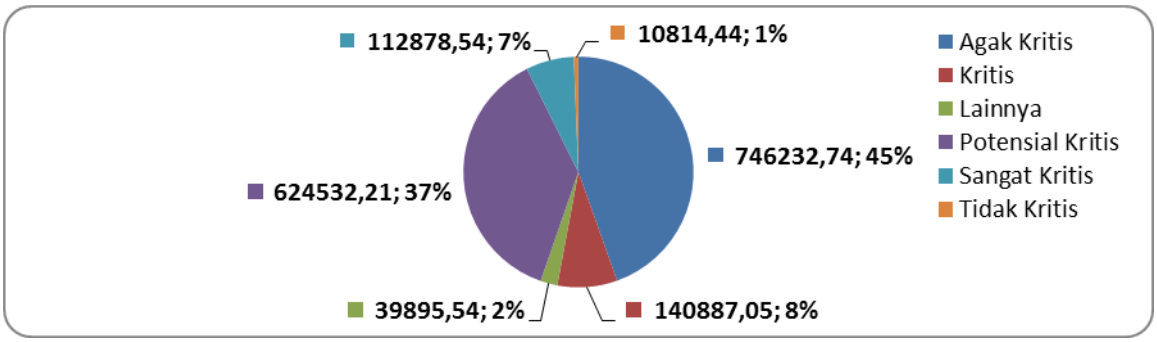
Tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan.

Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur pengelolaan dan sanksinya oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengaturan kawasan dalam Perda Tata Ruang terbagi dua kawasan yaitu: Kawasan lindung seluas 189.965 Ha merupakan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan yang di bawahnya. Kawasan Budidaya berupa kawasan hutan produksi seluas 432.884Ha, kawasan pertanian (903.450 Ha), kawasan perikanan, kawasan pertambangan (400.000Ha), kaw industri, kaw pariwisata, kaw permukiman (59.188Ha), dan kawasan peruntukan lainnya seluas 750Ha. Berdasarkan penentuan kriteria lahan kritis sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor SK.167/V-set/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis, mana lahan kritis terbagi atas lima kriteria yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Kriteria yang umum digunakan sebagai data lahan kritis adalah yang termasuk dalam kriteria sangat kritis (1) dan kritis (2), sedangkan kriteria agak kritis bersama-sama dengan kritis dan sangat kritis, dapat dikatakan sebagai lahan kurang produktif bila ditinjau dari aspek daya dukung/kemampuan lahan (*land capability*).

Tabel II.60 Analisis Total Kelas Tingkat Lahan Kritis Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kelas Kritis	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Agak Kritis	746.232,74
2	Kritis	140.887,05
3	Lainnya	39.895,54
4	Potensial Kritis	624.532,21
5	Sangat Kritis	112.878,54
6	Tidak Kritis	10.814,44
Jumlah		**1.675.240,51**

Sumber: inventarisasi kerusakan lingkungan/lahan Prov. Kep. Bangka Belitung(BLHD), 2014



Grafik II.20 Presentase Lahan Kritis Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Inventarisasi kerusakan lingkungan/lahan (BLHD), 2014

Dapat dilihat dari presentase total lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kelas agak kritis mendapatkan presentasi terbanyak sebesar 45 persen atau 746.232,74 Ha. Diikuti dengan potensial kritis sebesar 37 persen atau seluas 624.532,21 Ha. Sementara itu yang termasuk lahan kritis adalah seluas 140.887,05 Ha atau 8 persen. Sedangkan yang tidak kritis adalah seluas 10.814,44 Ha atau hanya 1 persen saja.

Adanya beberapa perubahan lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2013 ke tahun 2014 yang disebabkan banyak faktor seperti kegiatan pertambangan, industri, dan lain-lain.

Urusan Penataan Ruang, dilaksanakan dalam mendukung target sasaran pembangunan daerah yaitu, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Capaian kinerja pembangunan pada urusan tataruang salah satunya adalah dengan melihat kesesuaian antara perancanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Gambaran mengenai capaian kinerja urusan penataan ruang, adalah sebagaimana yang tertuang didalam tabel II.61 berikut.

Tabel II.61 Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	11.57	11.57	11.57	11.57
Ketaatan terhadap RTRW	87.50	95.00	100.00	100.00
Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	n.a	3.50	6.89	17.20
Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	-	-	-	-

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015)

Berdasarkan tabel II.61 diatas, dapat terlihat bahwa capaian kinerja urusan penataan ruang cenderung meningkat dan berada diatas target yang telah ditetapkan didalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2016 telah ditetapkan 1 (satu) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Tanjung Kelayang Belitung. Penetapan KEK Pariwisata tersebut diharapakan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

2.) Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan guna mendukung target sasaran daerah dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. Salah satunya adalah untuk memastikan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap.
Perkembangan panjang jalan berdasarkan kewenangan dan kondisi pada masing-masing jalan dan jembatan pada tahun 2015 adalah sebagaimana tertuang didalam tabel II.62 berikut:

Tabel II.62 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2015

No	Kondisi Jalan	Negara	Provinsi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jenis Permukaan			
	Diaspal	600,4	896,33	1.496,73
	Kerikil	0,00	0,00	0,00
	Tanah	0,00	3,00	3,00
2.	Kondisi Jalan			
	Baik	539,17	387,33	926,50
	Sedang	52,72	441,89	494,61
	Rusak	7,20	58,60	65,80
	Rusak Berat	1,30	11,51	12,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Berdasarkan data diatas, terdapat 58,60 km panjang jalan provinsi dalam keadaan rusak dan 441,89 km kondisi jalan dalam keadaaan sedang. Dengan kondisi yang demikian, maka peningkatan kualitas jalan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Tabel II.63 Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksidan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2015

Jenis Kontruksi		Negara	Provinsi	Jumlah Total
(1)		(2)	(3)	(5)
1. Beton+Kayu/Baja+Kayu		0,00	81,30	81,30
2. Beton Bertulang		1 804,03	2 876,90	4 680,93
3. Rangka baja		992,15	474,00	1 466,15
Jumlah/Total	**2015**	**2 796,18**	**3 432,20**	**6 228,38**
	2014	**2 273,98**	**3 969,85**	**6 243,83**
	2013	**2 228,00**	**3 444,80**	**5 672,80**
	2012	**2 173,00**	**2 123,40**	**4 296,00**
	2011	**2 262,00**	**1 522,90**	**3 784,90**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

D. Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan dan permukiman dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat telah menghuni rumah tinggal sesuai dengan criteria yang layak, yaitu diatas 7m persegi perkapita. Gambaran mengenai perkembangan hal tersebut adalah sebagaimana disajikan pada table II.64.

Tabel II.64 Persentase Rumah Tangga dengan Luas Hunian per Kapita <= 7,2 m2 Menurut Kabupaten/Kota, 2006-2015

Kabupaten / Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Bangka	2,98	4,08	3,50	2,16
Belitung	8,08	9,05	7,02	5,84
Bangka Barat	7,35	5,85	4,59	6,82
Bangka Tengah	6,76	4,75	2,82	5,11
Bangka Selatan	7,82	6,53	6,13	5,15
Belitung Timur	8,79	7,37	7,64	7,17
Kota Pangkalpinang	6,24	6,16	5,78	7,75
Kepulauan Bangka Belitung	6,41	6,00	5,08	5,34

Sumber : SUSENAS, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sejak tahun 2012, kecenderungan masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni cenderung menurun, namun demikian pada tahun 2014 terdapat peningkatan, meskipun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Tabel II.65 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	N/A	N/A	1.053	1.097	1.229
2.	Jumlah penduduk	1.258.234	1.286.551	1.315.123	1.343.881	1.372.813
3.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk	N/A	N/A	8,01	8,16	8,95

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Dari tabel Rasio Jumlah polisi Pamong Praja di atas, menunjukkan bahwa rasio jumlah polisi pamong praja per jumlah penduduk relatif meningkat dimana tahun 2013 sebesar 8,01 meningkat menjadi 8,16 tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 8,95. Walaupun kenaikan ini relatif kecil namun dapat dijadikan patokan bahwa Pemerintah daerah memberikan perhatian yang cukup terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka belitung.

Tabel II.66 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Siskamling	N/A	N/A	609	721	988
2.	Jumlah Desa	312	312	309	309	309
3.	Rasio Jumlah siskamling	N/A	N/A	1,97	2,33	3,20

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamlingselama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Dari tabel Rasio Pos Siskamling di atas, menunjukkan peningkatan rasio jumlah Pos Siskamling di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana tahun 2013 sebesar 1,97 meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 2,33 dan tahun 2015 sebesar 3,20.

F. Urusan Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4967), Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakanagar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial,penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindakkekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal inimerupakan wujud komitmen baik pemerintah maupun pemerintah daerah yang harus dilakukanlebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yangmenyandang permasalahan sosial, meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanansosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinandan masalah sosialyang mendesak.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel II.67 dimana tahun 2012 jumlah PMKS sebesar 29.177 orang, tahun 2013 meningkat menjadi 38.506 orang, tahun 2015 sebesar 52.346 orang dan tahun 2016 turun menjadi 49.579.

Tabel II.67 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	29.177	38.506	43.968	52.346	49.579

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

G. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan peningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, peningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial dan pengembangan Jamsostek, peningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak.

Dalam menggambarkan seberapa Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.68, tren TPAK dari tahun 2011-2015 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif dimana tahun 2011 sebesar 68,43 dan tahun 2013 turun menjadi 62,91 sedangkan tahun 2015 naik menjadi 66,71, ini berarti bahwa penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi (bekerja dan mencari kerja) sebesar 66,71 % meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya 65,45 %.

Tabel II.68 Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68.43	65.67	62.91	65.45	66.71
2.	Tingkat Pengangguran	3.61	3.49	3.70	5.14	6.29

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

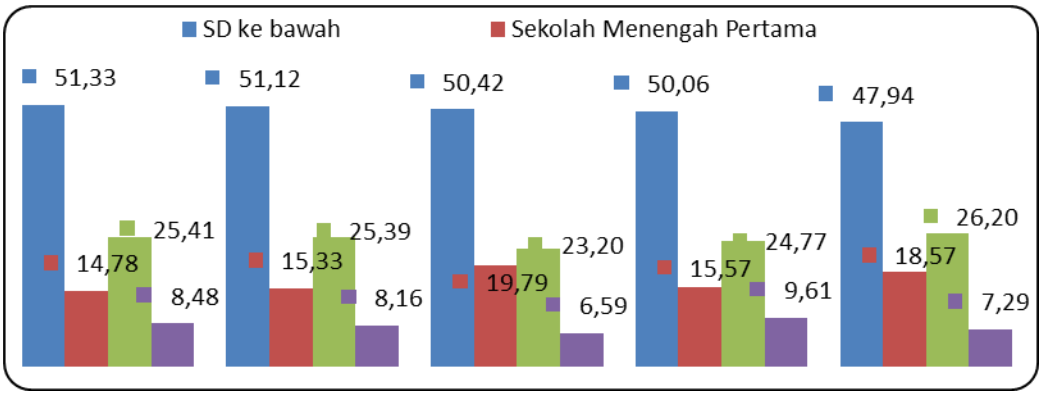
Salah satu indikator dari kualitas Sumber Daya manusia (SDM) dari penduduk yang bekerja adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan dimana kualitas penduduk bekerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Perbaikan kualitas penduduk bekerja diarahkan untuk menurunkan penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA/SMK) tinggi (Diploma dan Universitas).

Tabel II.69 Perkembangan Penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD ke bawah	51.33	51.12	50.42	50.06	47.94
2.	Sekolah menengah Pertama	14.78	15.33	19.79	15.57	18.57
3.	Sekolah menengah atas	25.41	25.39	23.20	24.77	26.20
4.	Perguruan Tinggi	8.48	8.16	6.59	9.61	7.29

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan grafik gambar II.25, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja masih didominasi oleh kategori pendidikan SD ke bawah walaupun dengan tren yang menurun, dimana tahun 2011 sebesar 51,33 % dan tahun 2015 sebesar 47,94 %. Sedangkan untuk kategori pendidikan menengah pertama, Sekolah menengah atas dan Perguruan Tinggi menunjukkan tren yang berfluktuatif namun untuk dua tahun terakhir (2014 dan 2015) menunjukkan tren peningkatan, dimana untuk sekolah menengah atas tahun 2014 sebesar 24,77% sedangkan tahun 2015 sebesar 26,20 %, untuk kategori penduduk yang bekerja dengan tinggat Perguruan Tinggi menunjukkan tren penurunan untuk dua tahun terakhir, dimana tahun 2014 sebesar 9,61 % sedangkan tahun 2015 sebesar 7,29 %. Dari gambaran ini menunjukkan bahwa kualitas penduduk yang bekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah dimana masih didominasi oleh tingkat lulusan Sekolah dasar dan Sekolah menengah pertama sebesar 65,51 % sedangkan tingkat lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi sebesar 34,49%.



Grafik II.21 Penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan Tabel II.69, secara kewilayahan untuk penduduk usia kerja menurut Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, relatif meningkat hanya untuk Kabupaten Belitung yang mengalami penurunan dimana tahun 2014 sebesar 136.813 orang dan tahun 2015 turun menjadi 129.985 orang. Namun secara kumulatif untuk provinsi kepulauan Bangka Belitung Penduduk usia kerja selama 5 (lima) tahun terakhir meningkat.

Tabel II.70 Data Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	201.933	208.239	214.926	220.272	225.989
2.	Kab. Belitung	115.053	119.211	123.535	136.813	129.985
3.	Kab. Bangka Barat	125.921	129.846	133.298	133.833	140.408
4.	Kab. Bangka Tengah	117.671	120.188	122.345	125.701	128.764
5.	Kab. Bangka Selatan	124523	128.040	130.355	126.662	137.251
6.	Kab. Belitung Timur	79.149	81.813	84.767	86.961	89.134
7.	Kota Pangkal Pinang	129.644	132.728	139.476	142.950	146.589
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**893.894**	**920.065**	**948.702**	**973.192**	**998.120**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015), BBDA (2012-2016)

Berdasarkan Tabel II.71, secara kewilayahan untuk Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berfluktuasi untuk semua Kabupaten Kota. Untuk tahun 2015 TPAK tertinggi di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 70.32 % dan terendah di Kabupaten Bangka sebesar 63,88 % sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TPAK tahun 2015 sebesar 66,71 %.

Tabel II.71 Data TPAK Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	68,25	64.24	64.40	65,45	63,88
2.	Kab. Belitung	68,01	67.83	67.81	63.48	67,64
3.	Kab. Bangka Barat	69,27	65.42	69.17	67.12	65,47
4.	Kab. Bangka Tengah	68,94	64.00	62.13	62.48	66,48
5.	Kab. Bangka Selatan	70,38	65.00	64.53	67.08	70,32
6.	Kab. Belitung Timur	67,97	67.00	64.85	68.79	68,11
7.	Kota Pangkal Pinang	66,22	67,51	64.68	64.90	67,41
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**68.43**	**65.67**	**65.32**	**65.45**	**66,71**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Penduduk yang bekerja menurut kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat, kecuali Kabupaten Bangka dimana pada tahun 2014 sebesar 132.128 orang turun pada tahun 2015 menjadi 131.559 orang sedangkan secara kumulatif untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penduduk yang bekerja untuk kurun 5 (lima) tahun terkahir relatif meningkat dan untuk tahun 2015 penduduk yang bekerja sebanayk 623.949 orang.

Tabel II.72 Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	133.488	130.059	132.508	132.128	131.559
2.	Kab. Belitung	75.921	74.430	81.599	82.200	83.903
3.	Kab. Bangka Barat	84.044	81.732	88.601	84.219	86.480
4.	Kab. Bangka Tengah	78.514	73.428	73.376	74.102	79.971
5.	Kab. Bangka Selatan	84.203	80.044	82.739	88.740	94.575
6.	Kab. Belitung Timur	52.448	53.502	53.758	58.259	59.159
7.	Kota Pangkal Pinang	81.016	84.907	84.205	84.575	88.302
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**589.634**	**583.102**	**596.786**	**604.223**	**623.949**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari Kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi makro dari Pemerintah Daerah. Dari Tabel II.73, Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Untuk Tahun 2015 terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya yang memiliki TPT yang tinggi yaitu Kabupaten Bangka sebesar 8,87%, Kabupaten Bangka Tengah sebesar 6,58 % dan Kota Pangkalpinang sebesar 10,64 %. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan bangka

Belitung sebesar 6.29 % dan secara Nasional Provinsi Kepulauan Bangka belitung lebih tinggi dari rata-rata Nasional dimana rata-rata nasional sebesar 6,18 %.

Tabel II.73 Data Tingkat Pengangguran Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	3,15	2,77	4,26	8,36	8,87
2.	Kab. Belitung	2,97	1,76	2,59	3,03	4,57
3.	Kab. Bangka Barat	3,64	3,79	3,91	1,21	5,92
4.	Kab. Bangka Tengah	3,21	4,54	3,47	5,64	6,58
5.	Kab. Bangka Selatan	3,92	3,83	1,64	3,26	2,01
6.	Kab. Belitung Timur	2,51	2,42	2,20	2,61	2,55
7.	Kota Pangkal Pinang	5,63	5,52	6.,66	8,84	10,64
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**3,61**	**3,49**	**3,70**	**5,14**	**6,29**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan Tabel II.74, dapat dilihat jumlah pengangguran pada tahun 2015 terbesar di Kabupaten Bangka yaitu 12.805 orang dan terendah pada Kabupaten Belitung Timur sebanyak 1.550 orang, sedangkan secara kumulatif untuk Provinsi Kepulauan Bangka belitung sebanyak 41.893 orang meningkat dari tahun 2014 yang hanya sebanyak 32.736 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang masih rendah dan tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja dan pencari kerja terutama mereka yang datang dari wilayah pedesaan yang masih beranggapan bahwa di wilayah perkotaan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di bandingkan wilayah pedesaan.

Tabel II.74 Data Pengangguran Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	3.341	3.710	5.900	12.053	12.805
2.	Kab. Belitung	2.327	1.425	2.169	2.635	4.015
3.	Kab. Bangka Barat	3.177	3.217	3.605	1.083	5.443
4.	Kab. Bangka Tengah	2.604	3.489	2.639	4.430	5.631
5.	Kab. Bangka Selatan	3.432	3.187	1.377	2.769	1.936
6.	Kab. Belitung Timur	1.348	1.329	1.211	1.562	1.550
7.	Kota Pangkal Pinang	4.835	4.704	6.013	8.204	10.513
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**22.064**	**21.061**	**22.914**	**32.736**	**41.893**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi melalui pengembilan keputusan serta penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi. IPG juga termasuk salah satu indikator atau indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. Gambaran terhadap perkembangan

pemberdayaan dan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.75 dan Tabel II.76.

Tabel II.75 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

N0	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bangka	52,85	58,07	59,40	62,01	61,32
2.	Belitung	49,21	49,37	48,56	40,16	52,00
3.	Bangka Barat	56,29	58,28	54,81	55,57	59,37
4.	Bangka Tengah	44,54	45,08	54,93	54,29	50,71
5.	Bangka Selatan	43,77	45,79	37,80	37,13	37,93
6.	Belitung Timur	47,21	49,65	50,11	63,33	63,04
7.	Kota Pangkal Pinang	50,01	55,20	56,10	55,44	55,22
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**56,03**	**56,54**	**57,29**	**56,12**	**56,29**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Tabel II.76 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bangka	85,86	86,03	86,77	86,92	87,17
2.	Belitung	85,59	85,73	86,61	87,19	87,98
3.	Bangka Barat	87,28	87,86	88,11	88,56	88,71
4.	Bangka Tengah	89,26	90,06	90,28	90,60	90,61
5.	Bangka Selatan	79,75	81,24	82,17	82,52	82,83
6.	Belitung Timur	83,95	84,17	84,29	85,37	86,10
7.	Kota Pangkal Pinang	82,05	92,08	92,30	92,47	93,09
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**87,10**	**87,54**	**87,73**	**87,74**	**88,37**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angka pemberdayaan gender (IDG) dan pembangunan gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan trend yang semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun secara nasional,IDG masih berada di peringkat 32 dan IPG di peringkat 27 dari 34 Provinsi. Namun hal ini berarti bahwa tingkat partisipasi perempuan yang antara lain tercermin pada bidang politik melalui jumlah keterwakilan perempuan didalam keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Pada periode 2004-2009 berjumlah 1 (satu) orang, meningkat menjadi 5 (lima) orang pada periode 2009-2014. Sementara itu peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi juga semakin meningkat yang ditandai dengan tingginya angka angkatan kerja yang bekerja dari jenis kelamin perempuan.

2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan

persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV.

Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.77 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	5	4
2.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	51	52
3.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	191	199
4.	Pekerja perempuan di pemerintah	1.354	1.407
5.	Jumlah pekerja perempuan	204.416	224.467
6.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	0,66	0,63

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

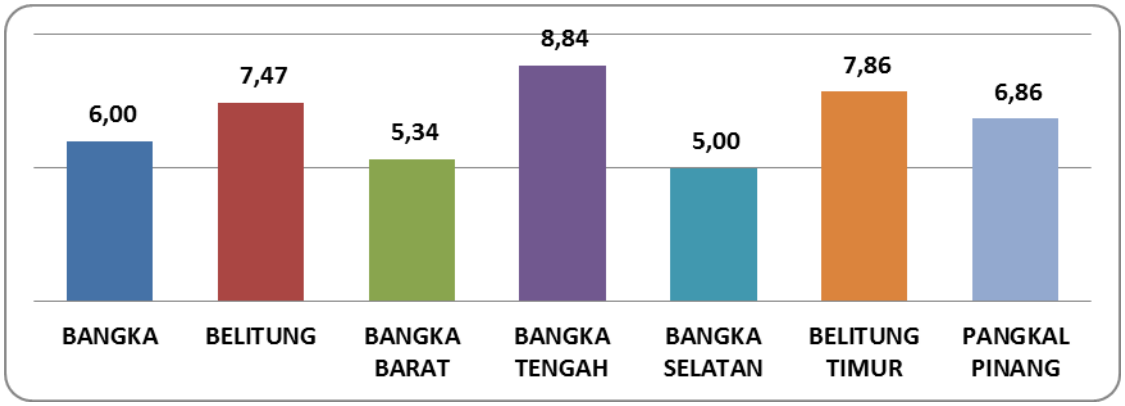
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari 0,66 pada tahun 2014 menjadi 0,63 di tahun 2015, meskipun jumlah pekerja perempuan di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan dan jumlah perempuan yang bekerja juga mengalami peningkatan. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya keluarga.

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah menurut Kabupaten/Kota tahun 2014 disajikan dalam Tabel II.78 dan Grafik II.22 berikut:

Tabel II.78 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jumlah Pekerja Perempuan	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	2.761	46.031	6,00
2	Kabupaten Bangka Barat	1.609	30.123	5,34
3	Kabupaten Bangka Selatan	1.415	28.303	5,00
4	Kabupaten Bangka Tengah	1.807	20.447	8,84
5	Kabupaten Belitung	1.986	26.591	7,47
6	Kabupaten Belitung Timur	1.609	20.479	7,86
7	Kota Pangkalpinang	2.224	32.442	6,86
	Jumlah	**13.411**	**204.416**	**6,56**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Grafik II.22 Grafik Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan gambar II.26 Grafik Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah tahun 2014 berdasarkan Kabupaten/Kota menunjukan persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang tertinggi ada di Kabupaten Bangka Tengah dengan angka 8,84 dan yang terendah di kabupaten Bangka Selatan dengan angka 5,00.

3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rasio KDRT adalah jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga, gambaran terhadap perkembangan Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.79 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah KDRT	N/A	135	115	84	88
2.	Jumlah Rumah Tangga	N/A	352.668	371.242	368.504	345.928
3.	Rasio KDRT		0,038	0,031	0,023	0,025

Sumber: Profil Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015

Berdasarkan Tabel II.78 jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012-2015 mengalami penurunan dari 135 ditahun 2012 menjadi 88 di tahun 2015.

I. Urusan Pangan

Tabel II.80 Data Ketergantungan Beras 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.261.737	1.298.168	1.315.123	1.341.425	1.364.009
2	Kebutuhan Beras/ Tahun	138.160,20	142.149,40	144.005,97	146.886,09	149.359,00
3	Produksi Bersih Beras (ton)	9.542,75	14.414,52	16.663,81	16.863,55	17.553,40
4	Kondisi ketersediaan (%)	6,91	10,14	11,57	11,48	11,75
5	Ketergantungan (%0	93,09	89,86	88,43	88,52	88,25

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Permasalahan umum terkait ketahanan pangan adalah masih rendahnya produksi pangan (utamanya beras) yang mampu dihasilkan oleh petani lokal serta tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Sedangkan kebutuhan beras setiap tahunnya semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Tabel II.80 menunjukkan meskipun terjadi penurunan tingkat ketergantungan dari angka 93,09 % pada tahun 2011 menjadi 88,25% pada tahun 2015 namun angka ini masih cukup tinggi.

Tabel II.81 Data Produksi Padi (Ton) Kabupaten Kota Tahun 2012-215 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kab/ Kota	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Kabupaten Bangka	2.528	3.728	4.681	9.303
2	Kabupaten Bangka Tengah	504	588	470	365
3	Kabupaten Bangka Barat	3.184	4.846	6.296	3.753
4	Kabupaten Bangka Selatan	13.119	16.046	7.803	8.002
5	Kabupaten Belitung	1.400	1.785	1.614	1.477
6	Kabupaten Belitung Timur	2.240	1.487	2.617	4.170
7	Kota Pangkalpinang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel II.81 menunjukkan produksi padi pada tiap kabupaten setiap tahunnya mengalami peningkatan/penurunan produksi yang berfluktuatif yang dipengaruhi beberapa kendala antara lain faktor cuaca, hama penyakit dan kendala teknis lainnya.

Tabel II.82 Data Ketersediaan Pangan 2014-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Keterangan	Satuan	Tahun		
			2014	2015	2016
1	Ketersedian Energi	Kkal/ kap/Hari	2.768,82	2.437,20	2,490,00
2	Ketersediaan Protein	Gram/Kap/Hari	65,07	79,38	71,56
3	Ketersediaan lemak	Gram/Kap/Hari	120.53	144,63	76,55
4	PPH ketersefiaan		57.24	78,50	78,78

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan tabel II.82 diatas Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014-2016 ketersedian energi ideal maupun protein ideal telah terpenuhi. Adapun angka ketersediaan energi ideal yang dipersyaratkan adalah 2.400 kkal/Kap/Hari sedangkan angka ketersediaan idealnya adalah 63 Gram/Kap/Hari.

J. Urusan Pertanahan

1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel II.83 Luas Lahan (m²) Berdasarkan Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013

No	Kabupaten/Kota	2011					2012					2013				
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL
1	Bangka	8.380	-	293.511	-	-	49.684	-	1.101.464	-	-	604.086	-	2.648.055	-	-
2	Bangka Tengah	39.464	-	1.144.196	-	-	22.440	-	1.445.234	-	-	74.197	-	2.004.134	-	-
3	Bangka Barat	-	-	27.672.000	-	-	-	-	4.290.460	-	-	25.855	-	1.694.620	-	-
4	Bangka Selatan	68.096	139.457.500	44.842.708	61.937	-	70.014	139.457.500	48.664.372	276.502	-	101.951	139.457.500	52.813.040	602.411	-
5	Pangkalpinang	264.335	-	357.960	-	-	422.363	-	657.138	-	-	732.862	-	149.645	-	-
6	Belitung	143.353	-	5.260.054	-	-	197.045	-	5.725.718	-	-	1.071.801	55.855.200	2.968.993	-	-
7	Belitung Timur	49.495	14.764.520	378.629	-	-	75.676	-	1.857.907	-	-	5.064	55.855.200	743.650	-	-
	Jumlah	573.123	154.222.020	79.949.058	61.937	-	837.222	139.457.500	63.742.293	276.502	-	2.615.816	251.167.900	63.022.137	602.411	-
	Total Luas Wilayah		**756.527.919**													

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
Keterangan:
HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik , HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan.

Tabel II.84 Luas Lahan (m²) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No.	Kab/Kot	2014					2015						2016					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
1	Bangka	92.935	-	3.012.794	-	-	662.093	128.635	1.543.303	-	-	-	1.325.862	13.370.466	1.510.640	-	550.000	-
2	Bangka Tengah	119.468	-	3.821.638	-	194.723	332.686	-	2.226.024	-	-	-	226.308	-	1.740.960	-	-	-
3	Bangka Barat	444.940	-	7.390.740	-	-	31.915	-	197.805	-	-	-	29.868	-	1.398.692	-	-	-
4	Bangka Selatan	104.354	139.457.500	54.831.907	977.115	-	132.438	139.457.500	59.978.053	1.496.977	-	10.842	556.199	139.457.500	64.299.906	1.768.093	-	10.842
5	Pangkalpinanng	1.196.283	-	1.439.515	-	-	800.392	-	1.224.213	-	-	-	266.080	-	1.081.783	-	-	-

No.	Kab/Kot	2014					2015						2016					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
6	Belitung	185.019	-	10.549.495	-	-	1.352.501	-	2.766.871	-	-	-	743.381	-	2.944.824	-	-	-
7	Belitung Timur	3.278	-	866.903	-	-	598.850	657.256	1.699.841	-	-	-	377.462	572.400	2.782.879	-	-	-
	Jumlah	**2.146.277**	**139.457.500**	**81.912.992**	**977.115**	**194.723**	**3.910.875**	**140.243.391**	**69.636.110**	**1.496.977**	**-**	**10.842**	**3.525.160**	**153.400.366**	**75.759.684**	**1.768.093**	**550.000**	**10.842**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
Keterangan:
HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik , HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW= .....

Tabel II.85 Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013

No.	Kabupaten/Kota	2011					2012					2013				
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL
1	Bangka	2,94	-	102,91	-	-	17,04	-	377,75	-	-	202,70	-	888,57	-	-
2	Bangka Tengah	23,80	-	690,07	-	-	13,23	-	852,30	-	-	42,80	-	1.156,15	-	-
3	Bangka Barat	-	-	15.363,09	-	-	-	-	2.328,89	-	-	13,73	-	900,10	-	-
4	Bangka Selatan	38,27	78.369,36	25.199,75	34,81	-	38,16	76.004,44	26.522,12	150,69	-	54,96	75.173,57	28.468,49	324,73	-
5	Pangkalpinang	147,11	-	190,50	-	-	229,80	-	342,27	-	-	390,01	-	76,27	-	-
6	Belitung	88,00	-	3.240,00	-	-	118,00	-	3.415,00	-	-	622,00	32.423,00	1.723,00	-	-
7	Belitung Timur	45,18	13.477,67	345,63	-	-	67,59	-	1.659,39	-	-	4,52	49.887,19	664,19	-	-
	Jumlah	345,30	91.847,03	45.131,95	34,81	-	483,83	76.004,44	35.497,72	150,69	-	1.330,73	157.483,76	33.876,77	324,73	-
	Total Luas Wilayah		**791.385,01**													

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
Keterangan:
HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik , HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan.

Tabel II.86 Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2014-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	2014					2015						2016					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
1	Bangka	30,52	-	989,47	-	-	212,39	41,26	495,07	-	-	-	417,29	4.208,06	475,44	-	-	-
2	Bangka Tengah	67,41	-	2.156,46	-	109,88	183,90	-	1.230,51	-	-	-	122,51	-	942,49	-	-	-
3	Bangka Barat	231,26	-	3.841,44	-	-	16,23	-	100,61	-	-	-	14,87	-	696,56	-	-	-
4	Bangka Selatan	55,07	73.595,46	28.936,26	515,65	-	68,41	72.040,16	30.983,12	773,30	-	5,60	281,38	70.551,74	32.529,41	494,48	-	5,48
5	Pangkalpinang	623,08	-	718,59	-	-	407,94	-	623,96	-	-	-	132,82	-	540,01	-	-	-
6	Belitung	122,00	-	6.929,00	-	-	885,00	-	1.810,00	-	-	-	478,00	-	1.895,00	-	-	-
7	Belitung Timur	2,86	-	740,78	-	-	510,57	550,41	1.423,72	-	-	-	309,47	469,29	2.281,59	-	-	-
	Jumlah	**1.132,21**	**73.595,46**	**44.312,00**	**515,65**	**109,88**	**2.284,45**	**72.631,83**	**36.666,99**	**773,30**	**-**	**5,60**	**1.756,35**	**75.229,09**	**39.360,49**	**494,48**	**-**	**5,48**
	Total Luas Wilayah	**791.385,01**																

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
Keterangan:
HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik , HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW= .....

2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel II.87 Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013

No.	Kabupaten / Kota	2011			2012			2013		
		Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)
1	Bangka	-	-	-	3	1	33,3	5	-	-
2	Bangka Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bangka Barat	-	-	-	1	-	-	1	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangkalpinang	3	-	-	3	-	-	2	-	-
6	Belitung	3	-	-	4	-	-	7	2	42
7	Belitung Timur	2	-	-	4	1	25	1	-	-
	Jumlah Kasus Terdaftar	**8**			**13**			**16**		
	Jumlah Kasus Diselesaikan		**-**			**2**			**2**	
	Penyelesaian Kasus (%)			**-**			**15,4**			**12,5**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Tabel II.88 Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No.	Kabupaten / Kota	2014			2015			2016		
		Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)
1	Bangka	4	-	-	5	1	20	4	2	50
2	Bangka Tengah	1	-	-	2	-	-	9	7	77,7
3	Bangka Barat	3	-	-	3	-	-	2	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangkalpinang	6	3	50	2	-	-	12	6	50
6	Belitung	5	2	40	5	-	-	11	-	-
7	Belitung Timur	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	Jumlah Kasus Terdaftar	**20**			**18**			**39**		
	Jumlah Kasus Diselesaikan		**5**			**1**			**15**	
	Penyelesaian Kasus (%)			**25**			**5,5**			**38,4**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

3) Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel II.89 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013

No	Kabupaten/Kota	2011			2012			2013		
		Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)
1	Bangka	-	-	-	4	4	100	-	-	-
2	Bangka Tengah	-	-	-	3	3	100	-	-	-
3	Bangka Barat	5	5	100	2	2	100	-	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kabupaten/Kota	2011			2012			2013		
		Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan	Penyelesaian Izin Lokasi	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan	Penyelesaian Izin Lokasi	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan	Penyelesaian Izin Lokasi
5	Pangkalpinang	-	-	-	6	6	100	-	-	-
6	Belitung	-	-	-	2	2	100	-	-	-
7	Belitung Timur	5	5	100	5	5	100	-	-	-
	Permohonan Izin Lokasi	10	10		22	22		0	0	
	Pemberian Izin Lokasi	10	10		22	22		0	0	
	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	**100**	**100**		**100**	**100**		**0**	**0**	

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Tabel II.90 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No	Kabupaten/Kota	2014			2015			2016		
		Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)
1	Bangka	5	5	100	5	5	100	-	-	-
2	Bangka Tengah	4	4	100	14	14	100	-	-	-
3	Bangka Barat	2	2	100	-	-	-	-	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangkalpinang	9	9	100	2	2	100	-	-	-
6	Belitung	5	5	100	9	9	100	-	-	-
7	Belitung Timur	5	5	100	-	-	-	-	-	-
	Permohonan Izin Lokasi	**30**	**30**		**30**	**30**		**0**	**0**	
	Pemberian Izin Lokasi	**30**	**30**		**30**	**30**		**0**	**0**	
	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	**100**	**100**		**100**	**100**		**0**	**0**	

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

K. Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan penyadaran para pemangku kepentingan melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencapai target daerah yaitu meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Gambaran mengenai capaian IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada table II.91.

Tabel II.91 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	**(6)**
IKLH	61.19	58.17	59.29	60.21	**60.56**

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, 2015

Berdasarkan data diatas, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat setiap tahunnya, namun demikian peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Dengan demikian maka masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seleruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel II.91, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2014 di semua kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan. Penurunan akses terhadap air bersih yang paling besar terjadi di Kabupaten Belitung Timur menjadi 73,82 persen diikuti Kabupaten Bangka Barat menjadi 77,58 persen. Hal ini menandakan kebutuhan masyarakat akan akses air bersih harus menjadi perhatian serius dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber-sumber air bersih di tahun berikutnya.

Tabel II.92 Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2010 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	**(9)**
1	Bangka	30,55	83,3	81,39	87,7	73.82	75,3	**77,9**
2	Belitung	48,15	15,5	78,44	75,6	73.73	84,5	**74,2**
3	Bangka Tengah	62,21	60,8	78,87	48,2	38.68	47,7	**56,8**
4	Bangka Barat	70,86	78,5	54,66	87,4	77.58	83,7	**89,5**
5	Bangka Selatan	13,41	62,7	73,80	76,4	75.18	59,6	**74,8**
6	Belitung Timur	25,49	48,6	72,39	100	73.82	76,6	**76,0**
7	Kota Pangkalpinang	13,29	50,6	91,84	92,0	86.72	87,7	**88,7**
	Kepulauan Bangka Belitung	**36,69**	**60,00**	**76,38**	**80,2**	**71.24**	**73,7**	**77,6**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

L. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Tabel II.93 Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		41	58	60	

2) Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Tabel II.94 Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Bayi Berakte Kelahiran					

3) Rasio Pasangan Ber-akte Nikah

Tabel II.95 Rasio Pasangan Ber-akte Nikah

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Pasangan Ber-akte Nikah					

4) Kepemilikan KTP

Tabel II.96 Kepemilikan KTP

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kepemilikan KTP		551.011	740.365	765.507	

5) Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk

Tabel II.97 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		287	328	407	

6) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Tabel II.98 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		2.349.199	1.269.381	1.281.099	

7) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tabel II.99 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		551.011	740.365	765.507	

M. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal dan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa, kapasitas aparat pemerintahandesa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, belum dipahaminya proses penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan, pendataan lembaga kemasyarakatan, pengembangan ada istiadat dan budaya masyarakat desadan stabilitas Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atasprakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung danmewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Dari tabel di bawah menunjukkan kelompok binaan LPM di Provinsi Kepulauan Bangka belitung cenderung meningkat, dimana tahun 2012 jumlah binaan LPM sebanyak 1.096 meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 1.575 dan tahun 2015 sebesar 3.062. Sedangkan kabupaten Belitung Timur memiliki kelompok binaan LPM terbesar pada tahun 2015 yaitu sebanyak 581 LPM dan kabupaten Bangka Selatan yang paling rendah yaitu sebanyak 483 LPM.

Tabel II.100 Kelompok LPM DAN PKK Tahun 2012 s.d 2015 Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2012		2013		2014		2015	
		LPM	PKK	LPM	PKK	LPM	PKK	LPM	PKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bangka	111	292	158	385	482	1.231	501	1.499
2	Belitung	285	451	262	310	330	709	492	767
3	Bangka Barat	269	685	374	887	462	1.370	503	1.480
4.	Bangka Tengah	194	481	266	721	281	776	502	1.202
5.	Bangka Selatan	113	232	291	757	439	1.078	483	1.481
6.	Belitung Timur	125	297	224	534	552	960	581	1.058
	Jumlah	**1.096**	**2.438**	**1.575**	**3.594**	**2.546**	**6.124**	**3.062**	**7.487**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasionaldalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untukmasyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan

mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.Dari data di atas kelompok PKK di Provinsi Kepulauan Bangka belitung cenderung meningkat, dimana tahun 2012 jumlah kelompokPKK sebanyak 2.438 meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 3.594 dan tahun 2015 sebesar 7.487. Sedangkan kabupaten Bangka memiliki kelompok PKKterbanyak pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1.499kelompok PKK dan kabupaten Belitung yang paling rendah yaitu sebanyak 767 kelompok PKK.

N. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pengendalian Penduduk

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan *unmet need* (kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi) yang rendah. Namun kondisi ini tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung, mengingat pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selain dari angka kelahiran juga disebabkan adanya migrasi penduduk dari luar Bangka Belitung.

Pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional. Gambaran tentang laju pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2011 – 2016 adalah sebagaimana disajikan pada table II.100.

Tabel II.101 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertumbuhan (%)	2,25	2,22	2,19	2,15	2,11

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Memperhatikan data diatas, terlihat bahwa sejak tahun 2011 terjadi trend penurunan pertumbuhan. Hal ini seiring dengan menurunnya aktivitas pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung.

2) Rasio Akseptor KB

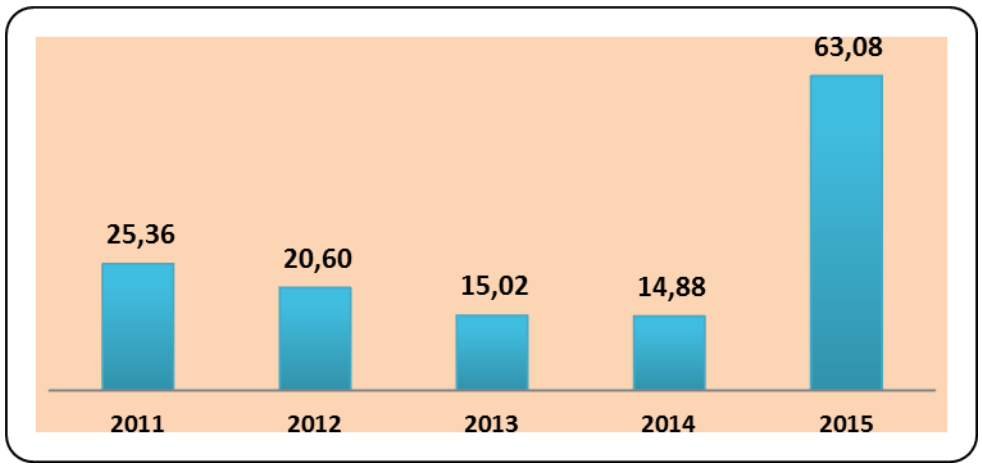
Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.Besarnya angka partisipasi KB *(akseptor)* menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Gambaran terhadap perkembangan Rasio Akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.102 Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah akseptor KB	58.902	52.762	40.976	37.576	176.549
2.	Jumlah pasangan usia subur	232.292	256.116	272.808	252.481	279.880
3.	Rasio akseptor KB	25,36	20,60	15,02	14,88	63,08

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan pada tabel II.102 pada kurun waktu 2011 - 2015 rasio akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami trend penurunan, namun di tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari 14,88 ditahun 2014 menjadi 63,08 pada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar berikut :



Grafik II.23 Grafik Rasio Akseptor KBTahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perkembangan Rasio Akseptor KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara rinci menurut kabupaten/ Kota disajikan dalam Tabel II.103.

Tabel II.103 Rasio Akseptor KB Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2011 s.d 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	0,72	0,78	0,79	0,80	0,77
2.	Kab. Belitung	0,84	0,85	0,88	0,90	0,90
3.	Kab. Bangka Barat	0,29	0,69	0,70	0,78	0,82
4.	Kab. Bangka Tengah	0,88	0,80	0,83	0,71	0,78
5.	Kab. Bangka Selatan	0,86	0,83	0,84	0,83	0,86
6.	Kab. Belitung Timur	0,91	0,93	0,85	0,85	0,84
7.	Kota Pangkal Pinang	0,84	0,83	0,79	0,79	0,76
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**0,72**	**0,78**	**0,79**	**0,80**	**0,77**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan data tahun 2011- 2015 yang ada, Kota Pangkal Pinang mengalami tren penurunan rasio akseptor KB, untuk Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Barat terjadi peningkatan Tren sedangkan Kabupaten yang lain (Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur) mengalami Tren Fluktuatif.

3) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan tingkat kesejahteraan kriteria keluarga dibagi menjadi beberapa tahapandiantaranya**,** Keluarga Pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya sedangkan Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal diantaranya :

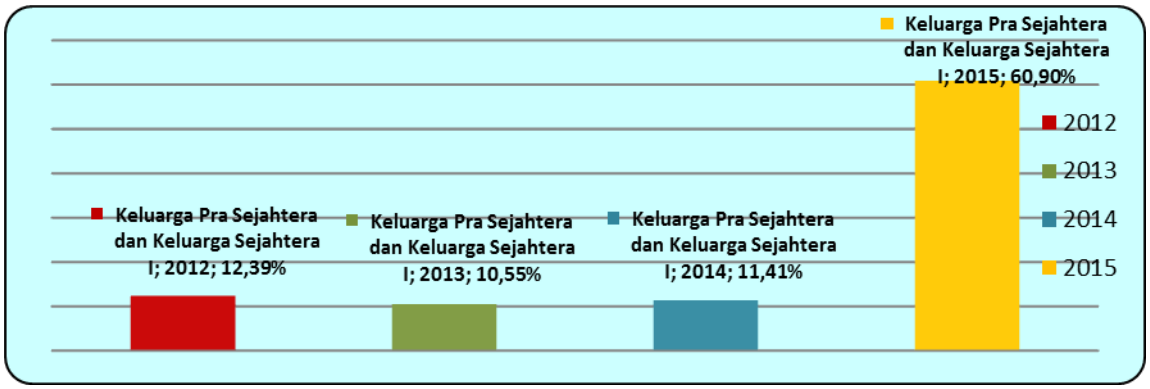
1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga;
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih;
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
4. Bagian yang terluas darilantai rumahbukan dari tanah;
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan.

Gambaran terhadap perkembangan keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel II.104 dan Grafik II.23 sebagai berikut:

Tabel II.104 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah keluarga pra sejahtera	10.462	8.667	10.948	20.248
2.	Jumlah keluarga sejahtera I	33.228	30.487	31.085	190.421
3.	Jumlah keluarga sejahtera I +	308.978	332.088	326.471	135.259
4.	Jumlah keluarga	352.668	371.242	368.504	345.928

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015



Grafik II.23 Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2012 s.d 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

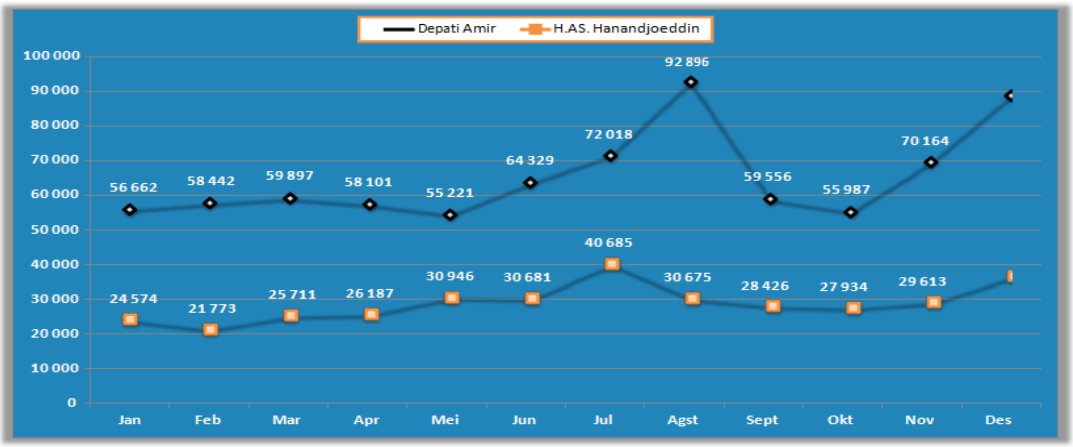
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,2015

Berdasarkan Grafik II.23 Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I mengalami tren Fluktuatif dari tahun 2012 sampai tahun 2014, namun dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan yang drastis, hal ini di pengaruhi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera I seperti yang dapat di lihat pada tabel 2.3.

O. Urusan Perhubungan

Perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkanUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah serta peningkatan Status Bandara Depati Amir di Pangkalan Baru, Bangka Tengah dan HAS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, Belitung menjadi Bandara Internasional.

Gambaran tentang perkembangan pelaksanaan urusan perhubungan udara di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015, adalah sebagaimana disajikan pada Grafik II.24.



Grafik II.24 Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandann Tahun 2015

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan gambar tersebut, pada tahun 2015 kenaikan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada bulan Juli, Agustus dan Desember. Hal ini disebabkan karena pada moment tersebut bertepatan dengan liburan anak sekolah, kuliah dan hari besar keagamaan.

Sementara itu, gambaran mengenai kondisi perhubungan laut di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 adalah sebagai termuat pada table II.105 berikut:

Tabel II.105 Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Pelayaran	Jumlah Kapal (Unit)	Berat (Grt)
(1)	(2)	(3)
1. Luar Negeri		
a. Reguler	-	lo-
b. Nonreguler	4	3.261
2. Pelayaran Dalam Negeri	102	159.704
3. Pelayaran Rakyat	2.503	2.909.102
4. Pelayaran Perintis	313	62.118
5. Kapal Negara/Tamu	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Kunjungan kapal di seluruh pelabuhan di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 masih didominasi oleh pelayaran rakyat yaitu sebanyak 2.503 unit dengan berat total 2.909.102 Grosston.

Disisi lain kondisi urusan perhubungan darat pada tahun 2011 – 2015 yang diukur dari jumlah kendaraan bermotor di Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana tersaji pada tabel II.106.

Tabel II.106 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Jenis Kendaraan					
	Sedan	Bus	Jeep	Pickup	Truck	Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	2 615	39 543	4 275	17 701	8 499	325 432
2014	2 610	35 599	4 295	17 096	8 237	328 114
2013	2 648	31 137	4 325	16 640	8 124	333 802
2012	2 672	26 006	4 036	15 604	7 585	325 196
2011	2 273	19 859	3 424	11 897	6061	279 735

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan tabel tersebut, maka jenis kendaraan yang memiliki pertumbuhan adalah kendaraan jenis pickup dan bus. Peningkatan ini diharapkan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain, kendaraan roda dua mengalami kecenderungan penurunan dalam kurun waktu 2013 – 2015.

Tabel II.107 Jumlah Terminal Bus, Teminal Udara dan Pelabuhan LautTahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terminal Bus/Angkot/Angdes	N/A	12	12	12	12
2.	Pelabuhan Udara	2	2	2	2	2

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Pelabuhan Laut (Pelabuhan pengumpan, Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Khusus)	N/A	55	63	66	74

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Tabel II.108 Jumlah ijin trayek Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah ijin trayek	N/A	25	26	27	27

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

P. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika yang selama ini telah dilaksanakan, yaitu meliputi belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran terutama di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan tertinggal,belum optimalnya pengembangan layanan *e-Gov* yang ditunjukkan dengan masih rendahnya instansi yang memanfaatkan layanan*e-Gov* yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Nasional.

Q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting terhadap pencapaian target sasaran kinerja pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan mendasar pada urusan ini antara lain adalah: masih lemahnya pengawasan terhadap koperasi, kapasitasSDM Koperasi yang masih belum mantap, rendahnya akses anggota koperasi dan UMKM terhadap akses permodalan yang ada, belum optimalnya sarana pemasaran yang salah satunya melalui pasar tradisional, pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM yang juga masih belum optimal, serta pengambangan skala usaha yang masih cenderung mengalami stagnasi.

Tabel II.109 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Koperasi Aktif	N/A	738	782	798	812
2.	Jumlah Koperasi	N/A	950	998	1.076	1.103
3.	Persentase Koperasi Aktif		77.70	78.35	74.16	73.61

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Persentase koperasi yang aktif di provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan, dari data di atas tahun 2013 sebesar 78, 35 % menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 74,16 % dan menjadi 73,61 % pada tahun 2015.

Tabel II.110 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah UKM	284.859	286.992	291.322	292.456	293.985

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Jika dilihat dari tabel di atas, jumlah UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif meningkat selama lima tahun terakhir, pada tahun 2012 UKM sebanyak 284.859 meningkat pada tahun 2014 dan 2015 menjadi masing-masing 291.322 dan 292.456 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 293.985.

R. Urusan Penanaman Modal

Pada tingkat nasional, arah pengembangan penanaman modal diorientasikan pada peningkatan daya saing penanaman modal, hal ini ditegaskan dalam pernyataan visi penanaman modal nasional, yaitu: "Terwujudnya daya saing penanaman modal untuk menunjang kualitas perekonomian nasional". Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal.

Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi, perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyajikan data terkini (*up to date*) peta potensi sumber daya dan peluang investasi lingkup provinsi, terkoneksinya kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan investor/pengusaha besar, tersedianya konsep produk turunan komoditas unggulan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tersedianya SDM promosi yang mempunyai kemampuan *marketing* investasi.

Tabel II.111 Jumlah Investasi dan Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Investasi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Investor	34	43	41	100	74
2	NilaiInvestasi (Trillin Rp)	1.066	1.707	1.739	2.056	1.156

Sumber: BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

S. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Terbatasnya pelatihan olahraga, sarana dan prasarana serta minimnya dana pembinaan, minimnya pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih rendahnya prestasi olahraga pelajar daerah dalam even POPWIL (Pekan

Olahraga Pelajar Wilayah) I Sumatera yang diikuti dari Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, dan Bangka Belitung yang masih menduduki peringkat 6 dari 7 provinsi, belum optimalnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dispora melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,itumerupakan beberapa permasalahan dalam olahraga, sedangkan pergaulan bebas, penggunaan narkoba dan degradesi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaanperencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalammemberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjangpenyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalampembangunan daerah.

Tabel II.112 Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	270	270	270	270	270
2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	7	15	15	14	12

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Dari data Tabel di atas, jumlah organisasi pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir (2012 s.d 2016) relatif stabil dan tanpa penambahan yaitu sebanyak 270 Organisasi Pemuda.

Tabel II.113 Jumlah Klub/Organisasi Olahraga Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Organisasi Olahraga	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Klub/Organisasi Olahraga	595	595	595	595	595

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah klub/organisasi olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung stabil tanpa perubahan yaitu sebanyak 596 klub/organisasi.

T. Urusan Statistik

Pada urusan statistik, terutama statistik sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah, ketersediaan data serta *up-dating* data dan informasi yang akurat menjadi hal yang

penting untuk diperkuat, terutama kaitannya sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, selain itu data tersebut dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing.

Tabel II.114 Buku PDRB dan Provinsi/Kabupaten/Kota Falam Angka Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Buku Provinsi/Kabupaten/Kota dalam angka	8	8	8	8	8
2.	Buku PDRB Provinsi/Kabupaten/Kota	8	8	8	8	8

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

U. Urusan Persandian

Persandian selama lima tahun terakhir belum memiliki struktural esselon empat yang khusus menangani urusan Persandian ini, sejak adanya perubahan terhadap SOTK di masing-masing perangkat daerah, mulai tahun 2017 Struktural Persandian muncul. Fokus urusan persandian ini dalam lima tahun kedepan adalah: (a). jumlah layanan persandian yang dimanfaatkan oleh Perangkat daerah untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (b). jumlah Penanganan terhadap insiden atau penyimpangan sistem informasi, semakin kecil insiden yang terjadi pada setiap tahunnya merupakan bagian dari indikator kinerja dari urusan persandian. Sehingga diharapkan pada setiap tahunnya jumlah insiden atau penyimpangan sistem informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lebih besar dari Nol. Dan (c). adanya kebijakan teknis dan dukungan SDM dibidang keamanan informasi, akan tetapi permasalahan keamanan informasi pada implementasinya berada pada struktural yang berbeda di dalam SOTK yang diterapkan di Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika. Sinergitas antara keamanan informasi dan persandian sangatlah erat hal ini dapat dilihat dari dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada lima tahun kedepan dalam rangka meningkatkan kemanan informasi dan persandian di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

V. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya. Permasalahan pelayanan Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya seperti program pelestarian cagar budaya dan permuseuman yaitu belum adanya museum provinsi, program pembinaan kesenian dan perfillman yaitu belum adanya taman budaya dan pasar seni, masih terbatasnya produksi film yang mengangkat tema pendidikan dan budaya, pembangunan karakter bangsa dan penguatan kearifan lokal serta masih terbatasnya ruang pertunjukkan film.

W. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai wahana belajar sepanjang hayat, perpustakaan mampu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Disinilah pentingnya keberadaan lembaga perpustakaan sebagai media belajar bagi masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia karena memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang maju untuk mendukung pembangunan daerah. Pembangunan urusan perpustakaan masih dihadapkan pada kendala-kendala antara lain budaya baca masyarakat masih tergolong rendah karena masih dominannya budaya lisan di masyarakat, masih terbatasnya lembaga perpustakaan, sarana dan prasarana termasuk koleksi buku pustaka dan tenaga pengelola perpustakaan terbatas, baik jumlah, persebaran maupun kompetensinya.

Jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Kepulauan bangka Belitung relatif menurun walaupun pada tahun 2013 meningkat sangat besar dari tahun sebelumnya. Tahun 2013 jumlah pengunjung perpustakaan seperti yang tergambar pada tabel di bawah sebesar 8.105 orang, menurun pada tahun 2014 menjadi 5.100 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 2.271 orang.

Tabel II.115 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2012 s.d 2015 Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Pengunjung	N/A	2.321	8.105	5.100	2.271

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kategorikan menjadi 2, yaitu perpustakaan milikPemerintah /Pemdadan Perpustakaan Non Pemda. Dari tabel di bawah ini Jumlah Perpustakaan milikpemda selama 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 12 buah sedangkan perpustakaan non pemda terjadi penambahan dimana tahun 2013 sebanyak 1.323 buah menjadi 1.340 pada tahun 2015.

Tabel II.116 Jumlah Perpustakaan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perpustakaan Milik Pemda	12	12	12	12	12
2.	Perpustakaan Non Pemda	N/A	1.323	1.323	1.340	1.340

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

X. Urusan Kearsipan

Tata kelola kearsipan daerah belum terkelola dengan baik. Hal ini terlihat dari persentase sistem kearsipan yang diterapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai 70%. Selain itu, kurangnya tenaga arsiparis dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan. Hal ini terlihat dari jumlah arsiparis yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2016 baru sebanyak 20 arsiparis. Dari sisi jumlah dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah sebanyak 36, angka ini masih belum mencukupi.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sebagai provinsi yang bercirikan kepulauan, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas lautan 79,80 persen dari total wilayahnya pasti memiliki potensi perikanan yang besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Adapun potensi pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada Tabel II.117.

Tabel II.117 Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 – 2014

No.	Uraian	Potensi Produksi (Ton)					Produksi Tahun (Ton)					Persentase
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Perikanan Tangkap	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	157.076,66	192.473,20	202.565,20	199.241,40	203.284,40	18,8I %
2.	Perikanan Budidaya	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	2.622,27	7.990,31	8.113,60	2.939,10	4.198,62	0,22 %

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

a) Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014 tercatat sebesar 4,198.62 ton. Produksi ini naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.939,08ton. Kenaikan produksi budidaya pada tahun 2014 disumbangkan oleh produksi rumput laut.

Produksi Budidaya terbesar berdasarkan media tebar adalah budidaya kolam yaitu sebesar 2.275,14 Ton dengan komoditas terbanyak dihasilkan adalah ikan lele sebanyak1.613,57 ton, disusul oleh Budidaya Laut sebesar 1.088 dengan komoditas utama yaitu Rumput laut Cottoni sebesar 525 Ton dan disusul Budidaya Laut lainnya dengan komoditas kerang darah sebesar sebesar 445,13 Ton. Untuk Budidaya Tambak tercatat pada tahun 2014 juga mengalami penurunanan, dimana tercatat 0.12 ton dengan komoditas ikan nila.

b) Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km^2atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (sumber : KEP MEN KP Nomor : KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumberdaya Ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

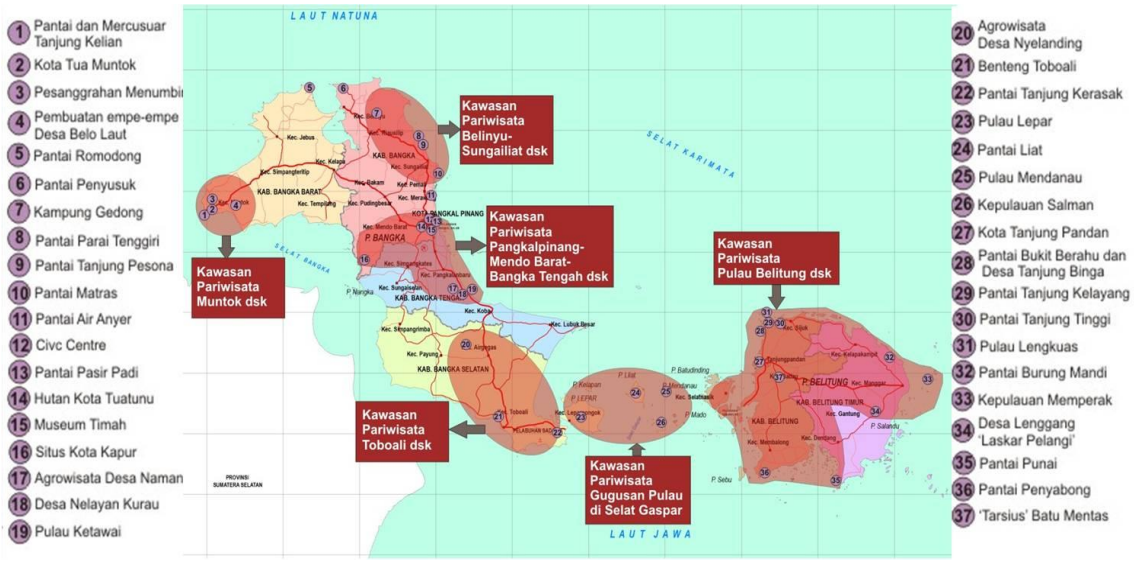
Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014, jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 203,284.4 ton dan mengalami kenaikan dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2013 sebesar 4,043 Ton dimana jumlah produksinya 199,241.4 ton. Produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuatif dari tahun 2003, produksi terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 119,845,44 ton dan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 203,284.4 ton, hal ini menunjukkan sektor perikanan tangkap juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melihat sektor perikanan tangkap yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung, maka sektor perikanan tangkap diharapkan terus berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tetap berlandaskan penangkapan secara lestari dan berkelanjutan.

Pada tahun 2013, produksi yang dihasilkan untuk perikanan tangkap hanya 18,81 persen dari total potensi produksi. Sementara itu, untuk perikanan budidaya, hanya 0,22 persen dari total potensi. Artinya, masih sangat terbuka peluang untuk dilakukan peningkatan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dalam rangka mensejahterakan masyarakat terutama nelayan.

B. Urusan Pariwisata

Bangka Belitung sejak tahun 2010 telah ditetapkan sebagai daerah kunjungan wisata bahari ketiga di Indonesia setelah Bali dan Lombok. Selain itu, sejak tahun 2011, melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, telah menetapkan Kawasan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Selain dikarenakan memiliki potensi wisata yag baik, secara geografispun mendukung Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia.

Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada gambar II.5 berikut :



Gambar II.5 Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Hambatan yang ada pada urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain belum sinkronnya antara struktur organisasi SKPD dengan kewenangan yang dimilikinya, khususnya pada kewenangan di bidang pariwisata di mana secara ideal meliputi 4 (empat) hal yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Sementara struktur yang ada hanya menyediakan tugas dan fungsi untuk pemasaran dan kelembagaan, sementara fungsi untuk destinasi dan industri belum mendapat porsi sebagaimana seharusnya. Akibatnya indikator kinerja menjadi tidak jelas, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Akibatnya PD tidak dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Kurangnya dikenalnya beberapa wisata di beberapa lokasi di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga faktor jarak tempuh dari kota serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata.

Tabel II.118 Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Wisatawan DalamNegeri	191.200	221.747	236.370	278.516	301.938
2.	Jumlah Wisatawan Luar Negeri	1.495	1.864	2.035	2.314	3.498
	Jumlah	**192.695**	**223.611**	**238.405**	**280.830**	**305.436**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitun,2016

Sesuai dengan kategori wisatawan yang dikeluarkan oleh BPS, dimana wisatawan di bagi menjadi 2 jenis yaitu wisatawan dalam negeri dan wisatawan luar negeri. Jumlah wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dan itu sangat bagus karena dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2011 jumlah wisatawan sebanyak 192.695 orang meningkat di tahun 2012 menjadi 223.611 orang dan pada tahun 2015 sebesar 305.436 orang.

C. Urusan Pertanian

Analisa berdasarkan produksi yaitu kenaikan produksi komoditi utama dan meningkatnya daya serap pasar dan lapangan usaha sektor pertanian seperti data dibawah ini :

Tabel II.119 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tanpa Migas (persen) 2010 – 2014

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	10,97	11,16	11,22	11,44	12,13
a. Tanaman Pangan	0,55	0,47	0,52	0,53	0,51
b. Tanaman Hortikultura	2,18	2,14	2,00	1,95	2,02
c. Tanaman Perkebunan	7,14	7,40	7,58	7,82	8,45
d. Peternakan	0,90	0,93	0,92	0,92	0,94
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Beberapa komoditas strategis dan unggulan daerah sektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan antara lain, yaitu : lada, karet, kelapa sawit, padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, cabai, bawang merah, sayuran dataran rendah, durian, jeruk, manggis, buah naga, nanas, sapi, ayam dan itik.

Adapun luasan lahan yang secara eksisting dan potensi yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian, adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.120.

Tabel II.120 Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
I.	**LAHAN PERTANIAN**	
I.1.	Lahan Sawah	15.719
	a. Irigasi	3.090
	b. Tadah hujan	12.136
	c. Pasang surut	18
	d. Lebak	475
I.2.	Lahan Bukan Sawah	1.108.567
	a. Tegal	113.105
	b. Ladang	30.348

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
	c. Perkebunan	441.152
	d. Hutan rakyat	47.753
	e. Pengembalaan	1.815
	f. Sementara tidak diusahakan	76.588
	g. Lain-lain	397.806
	Jumlah	**1.642.027**

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

Permasalahan-permasalahan pada urusan pertanian di Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya; tingkat ketergantungan masyarakat Bangka Belitung terhadap bahan makanan pokok terutama tanaman pangan (padi dan palawija) sangat tinggi sehingga bahan makanan tersebut sebagian besar dipasok dari luar pulau Bangka Belitung, rendahnya produksi pertanian (khususnya padi) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, rendahnya produksi sayuran, kurangnya jaminan harga terhadap produk hortikultura, kurangnya jaminan pasar seperti manggis yang termasuk dalam komoditi unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kurangnya penangkar bibit lada pada saat bibit lada dalam polybag sudah mulai menarik minat masyarakat, kurangnya penangkar bibit karet, sehingga masyarakat harus mengirim dari luar daerah yang mengakibatkan harga bibit lebih tinggi (mahal), mata rantai perdagangan Tandan Buah Segar (TBS) terlalu panjang sehingga mengakibatkan harga yang diterima petani kelapa sawit tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi serta kualitas TBS yang diterima Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) sangat rendah, meningkatnya persyaratan mutu hasil pertanian, rendahnya dukungan perbankan terhadap pengembangan pertania, tingginya angka alih guna (konversi) lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, dan tingginya angka kerusakan lahan, pertumbuhan yang cukup pesat dari negara produsen perkebunan lainnya serta minimnya peran Indonesia dalam sistem perdagangan dunia.

D. Urusan Kehutanan

Pada tahun 2015 tercatat 654.561,34 Ha yang terdiri dari 432.883,52 Ha Hutan Produksi, 185.531,34 Ha Hutan Lindung, 35.453,89 Ha Hutan Konservasi dan 692,59 Ha Hutan Produksi Konversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.121.

Tabel II.121 Luas Hutan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Luas Kawasan Hutan	2011 (Ha)	2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hutan Produksi	466.090	432.884	432.882,82	432.883,52	432.883,52
Hutan Lindung	156.730	189.965	189.972,25	189.983,52	185.531,34
Hutan Konservasi	34.690	35.473	35.472,19	35.453,89	35.453,89
Hutan Produksi Konversi	N/A	692	692,59	692,59	692,59
Jumlah	**657.510**	**659.014**	**659.019,85**	**659.013,52**	**654.561,34**

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2015

Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan adalah: meranti, ramin, membalong, mandaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau, madu alam dan rotan.

E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006.Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ya tersaji pada tabel II.122 berikut.

Tabel II.122 Potensi Bahan Galian Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS BAHAN GALIAN	POTENSI				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pasir Kwarsa				1.482.301 ton	
2	Pasir Bangunan				666.188,06 ton	
3	Kaolin				205.487,50 ton	
4	Granit				55.508,29 m3	
5	Diabas				89.551,12 m3	

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

F. Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan oleh Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Kondisi perkembangan ekspor dan impor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.123.

Tabel II.123 Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U$)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**Ekspor (us Dollar)**	**1.761,5**	**1.596,4**	**1.653,1**	**1.191,1**	**1.290,7**
	Timah	1.527,9	1.374,9	1.376,8	973,2	963,8
	Non Timah	233,6	221,7	276,3	217,9	326,8
2.	**Impor (us Dollar)**	**88,9**	**49,1**	**58,9**	**49,9**	**132,0**
	Migas	15,3	14,3	20,3	31,4	41,4
	Non Migas	73,6	34,8	37,7	18,5	90,61

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Ekspor di Kepulauan Bangka Belitung masih sangat didominasi oleh ekspor logam timah. Pada tahun 2011, ekspor Kepulauan Bangka Belitung mencapai 2.833 juta USD, namun pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan menjadi 1.596,6 juta USD dan pada tahun 2015terus menurun menjadi 1.191,1 juta USD.

Sementara itu, impor Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh impor non migas. Pada tahun 2011, impor mencapai 91,6 juta USD dan menurun pada tahun 2012 dan 2014meningkat menjadi 58 juta USD. Namun kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2015 menjadi 49,9 juta USD. Berdasarkan kondisi ekspor dan impor Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka neraca perdagangan dalam kurun waktu 2011 – 2015 tersebut dalam kondisi surplus neraca perdagangan.

G. Urusan Perindustrian

Pengembangan sektor industri di Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui pengembangan kawasan. Beberapa kawasan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri antara lain adalah:

1. Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat Belinyu, Kabupaten Bangka;
2. Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat (Kecamatan Lubuk Besar), Kabupaten Bangka Tengah;
3. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Muntok di Kawasan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat;
4. Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan;
5. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan;
6. Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan;
7. Kawasan pelabuhan dan industri Sadai, Kabupaten Bangka Selatan;
8. Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
9. Kawasan minapolitan Selat Nasik, Kabupaten Belitung;

10. Kawasan industri perikanan Tanjung Binga, Kabupaten Belitung;
11. Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
12. Kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
13. Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
14. Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan
15. Kawasan lintas timur Pulau Bangka.

Tabel II.124 Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Industri Kecil	6.747	8.956	10.954	12.094
	Laju pertumbuhan	N/A	0,25	0,18	0,09
2.	Industri Menengah	6.827	9.065	11.057	12.206
	Laju pertumbuhan	N/A	0,25	0,18	0,09

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan tabel di atas laju pertumbuhan industri kecil dan menengah di Provinsi Kepulauan BangkaBelitung selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung menurun, dimana tahun 2013 sebesar 0,25 % menurun menjadi 0,18 % tahun 2014 dan tahun 2015 kembalimenurun menjadi 0,09 %.

H. Urusan Transmigrasi

Beberapa permasalahan di bidang ketransmigrasian yang masih dijumpai, diantaranya adalah terkait tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi, masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum *clear* and *clean*, masih rendahnya partisipasi daerah dan swasta dalam pembangunan transmigrasi, masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang, rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi.

Sedangkan upaya peningkatan daya saing bidang ketransmigrasian diarahkan pada:

1. Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan layak dikembangkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan lainnya.
2. Pembangunan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan strategis secara terintegrasi dengan sektor lainnya.
3. Pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada menjadi pusat pertumbuhan atau mendukung pusat pertumbuhan yang ada.
4. Peningkatan daya tarik desa di kawasan transmigrasi.
5. Membangun keterkaitan antara Kota dan desa di kawasan transmigrasi.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi per kapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi per kapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.125.

Tabel II.125 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Total Pengeluaran RT	14.992.051	15.454.545	16.063.117	16.671.130	17.264.384
2	Jumlah RT	320.077	327.278	334.550	341.867	349.534
3	Rasio	46,84	47,22	48,01	48,76	49,39

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2015

Berdasarkan aspek kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan, yaitu membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan konsumsi makanan, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun, yaitu dari Rp. 14.992.051 pada tahun 2011 menjadi Rp. 17.264.384 pada tahun 2015 atau rata-rata peningkatan 3,59 persen per tahun. Peningkatan juga terlihat dari besaran ratio setiap tahunnya, yaitu sebesar 49,39 pada tahun 2015. Peningkatan ini cukup menjadi dasar untuk memprediksikan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung akan terus meningkat setiap tahunnya.

B. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecenderungan nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dengan Rasionilasi tukar petani ditampilkan pada Tabel II.126.

Tabel II.126 Nilai Tukar etani (NTP) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Yang Diterima Petani (lt)	117,57	121,70	128,47	112,62	121,95
2	Indeks Yang Dibayar Petani (lb)	118,55	122,73	128,14	110,89	116,46
3	Rasio	0,99	0,99	1,003	1,016	1,04

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015
1) Rata-rata 2013 mencakup Januari-November 2013 dengan tahun dasar 2007 (2007=100)
2) Mulai Desember 2013, penghitungan NTP menggunakan tahun dasar 2012 (2012=100)

Berdasarkan tabel II.125 maka diperoleh kondisi bahwa dalam kurun waktu 2011-2015 menunjukkan trend yang terus meningkat dan pada tahun 2015 NTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah berada pada angka 104. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang diindikasikan dengan Nilai Tukar Petani sudah semakin sejahtera.

C. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan berapa besar konsumsi rumah tangga non pangan per keluarga per tahun. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.126 dapat dijelaskan bahwa konsumsi rumah tangga non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun yaitu sebesar Rp. 8.065.723,37 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 9.286.512,45 pada tahun 2015. Selain itu, dilihat dari rasio perbandingan antara total pengeluaran dan total pengeluaran konsumsi RT Non-Pangan sepanjang kurun waktu lima tahun relatif konstan.

Tabel II.127 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	8.065.723	8.339.273	8.746.368	9.082.432	9.286.512
2	Total pengeluaran	14.992.051	15.454.545	16.063.118	16.671.131	17.264.385
3	Rasio	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Selanjutnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.128 menunjukkan bahwa besaran total pengeluaran non-pangan pada setiap Kabupaten/kota secara relatif sangat bervariasi. Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau kebiasaan penduduk setempat terkait perilaku pengeluarannya. Apabila suatu penduduk dalam suatu wilayah/daerah nilai pengeluaran pangannya lebih besar dari pada nilai pengeluaran non-pangan, maka daerah tersebut dapat dikatakan secara relatif sebagai daerah berkembang, tetapi apabila pengeluaran pangan lebih kecil dari pada nilai pengeluaran non-pangan maka daerah tersebut dapat dikatakan relatif maju.

Tabel II.128 Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2014 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	Total pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	8.405.782,57	15.398.026,32	0,5459
2	Kabupaten Bangka Barat	9.447.327,08	17.744.791,67	0,5324
3	Kabupaten Bangka Selatan	9.461.271,19	17.372.881,36	0,5446
4	Kabupaten Bangka Tengah	8.963.538,30	16.486.184,11	0,5437
5	Kabupaten Belitung	11.846.791,45	15.524.559,63	0,7631
6	Kabupaten Belitung Timur	10.027.771,61	18.149.812,86	0,5525
7	Kota Pangkalpinang	9.237.663,68	16.771.357,44	0,5508
	Provinsi	**9.082.432,14**	**16.671.130,95**	**0,5448**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

D. Rasio daya serap tenaga kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.129.

Tabel II.129 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	4.604	2.061	19.664	12.532	12.532
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	5	17	39	40	40
3	**Rasio daya serap tenaga kerja**	**920,80**	**121,23**	**504,20**	**313,30**	**313,30**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel II.130 Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraanTahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Panjang Jalan	899,33	899,33	899,33	899,33	899,33
2	Jumlah Kendaraan	323.429	381.099	396.676	395.951	398.065
3	**Rasio**	**0.0028**	**0.0024**	**0.0023**	**0.0023**	**0.0023**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016 / DDA

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk 5 (lima) tahun terakhir tahun 2011-2015 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif menurun dimana tahun 2011 sebesar 0,0028 turun pada tahun 2014 menjadi 0,0024 dan kembali menurun pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,0023.

Tabel II.131 Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	734,5	79.548	0.0092
2	Kabupaten Bangka Barat	847,44	42.514	0.0199
3	Kabupaten Bangka Selatan	569,47	40.218	0.0142
4	Kabupaten Bangka Tengah	292,48	41.293	0.0071
5	Kabupaten Belitung	624,67	68.186	0.0092
6	Kabupaten Belitung Timur	480,88	42.134	0.0114
7	Kota Pangkalpinang	356,10	84.172	0.0042
	Provinsi	**9.082.432,14**	**16.671.130,95**	**0,5448**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Memperhatikan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada 2015 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkapinang memiliki rasio paling rendah, hal ini karena Kota Pangkalpinang memiliki luas wilayah yang relatif kecil namun jumlah kendaraan yang sangat banyak sehingga rasionya menjadi kecil, sedangkan Kabupaten Bangka Barat memiliki rasio yang paling besar yaitu 0,0199.

Tabel II.132 Kelompok LPM DAN PKK Tahun 2012 s.d 2015 Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2012		2013		2014		2015	
		Org	Brg	Org	Brg	Org	Brg	Org	Brg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Dermaga	237.719	292	545.840	385	142.166	1.231	102.213	1.499
2	Bandara								
3	Terminal								
	Jumlah	**1.096**	**2.438**	**1.575**	**3.594**	**2.546**	**6.124**	**3.062**	**7.487**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

B. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka pengingkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase seluas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.133.

Tabel II.133 Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	12.350 Ha	282.719 Ha	0.04
2	Kabupaten Bangka Barat	15.560 Ha	266.501 Ha	0.06
3	Kabupaten Bangka Selatan	18.155 Ha	342.553 Ha	0.05
4	Kabupaten Bangka Tengah	23.741 Ha	188.895 Ha	0.13
5	Kabupaten Belitung	46.225 Ha	183.144 Ha	0.25
6	Kabupaten Belitung Timur	40.709 Ha	269.982 Ha	0.19
7	Kota Pangkalpinang	-	11.880 Ha	0.00
	Jumlah	**156.740 Ha**	**1.485.674 Ha**	**0.11**

Sumber: DDA 2015

C. Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambaran perkembangan kondisi infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.134.

Tabel II.134 Infrastruktur Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Infrastruktur	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3,60	4,07	4,25	5,83	3,21
2.	Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bus	22	22	26	26	26
3.	Ketaatan terhadap RTRW	75	75	75	75	100
4.	Persentase Penduduk berakses airminum	15,02	15,19	29,29	64,98	46,22
5.	Rasio daya tersambung pada rumah tangga	65,69	69,9	69,13	67,95	80,96
6.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	48,06	62,76	92,81	80,96	88,96
7.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,67	0,61	0,65	0,66	0,68
8.	Panjang jalan dilalui roda 4	0,87	0,84	0,93	0,95	0,90

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Tabel II.135 Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2016

NO	JENIS KRIMINALITAS	TAHUN									
		2012		2013		2014		2015		2016*	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	Narkoba	172	157	180	158	188	197	227	192	107	54
2	Pembunuhan	9	6	9	5	9	8	9	10	2	2
3	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	seksusal	51	12	42	39	40	28	58	55	22	13
5	Penganiayaan	205	73	133	91	73	46	88	53	25	8
6	Pencurian	188	72	166	65	148	71	188	77	71	21
7	Perampokan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pemerasan	18	3	9	4	3	2	8	6	6	2
9	Penipuan	146	78	156	52	182	82	124	63	81	20
10	Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
11	Pembakaran	5	1	7	6	9	9	15	8	3	0
12	Penyelundupan	0	0	3	3	5	5	5	4	3	0
13	Lain-lain	1831	1027	1949	1262	1501	834	1756	1021	495	182
Total		**2625**	**1429**	**2654**	**1685**	**2158**	**1282**	**2478**	**1489**	**816**	**302**

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

*Tahun 2016 data sampai dengan bulan Mei.
Keterangan:
JTP = Jumlah Tindak Pidana
PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

Ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam pengertian yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa Jumlah Tindak Pidana berfluktuasi dari tahun ke tahun. Demikian pula Penyelesaian Tindak Pidana. Secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan. Sejumlah faktor penyebab banyaknya jumlah tindak pidana dan belum maksimalnya persentase penyelesaian tindak pidana antara lain banyaknya orang yang mengalami ketertindasan akibat krisis berkepanjangan berujung pada tindak pidana. Selain itu juga dipicu oleh lemahnya kontrol sosial yang tidak diikuti dengan langkah penegakan hukum. Pada saat kontrol sosial melemah, juga terjadi demoralisasi pihak petugas yang mestinya menjaga keamanan. Aparat yang harusnya menjaga keamanan, seringkali justru melakukan tindak pelanggaran. Pada saat yang sama masyarakat belum atau tidak melihat adanya upaya yang berarti dari aparat keamanan sendiri untuk mengembalikan citranya.

B. Jumlah Demo

Tabel II.136 Data Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2016

NO	JENIS	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*
1	Bidang Politik	2	1	5	3	12
2	Bidang Ekonomi	8	7	10	24	15
3	Pemogokan Kerja	4	1	2	3	-
4	Jumlah unjuk rasa	14	9	17	30	17

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
Data tahun 2016 sampai dengan bulan Mei.

C. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Tabel II.137 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha		3	3	4	

D. Kemudahan Perizinan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. Dasar hukum dari pelayanan terpadu antara lain, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayani 38 jenis perizinan guna mempermudah para pelaku usaha meningkatkan investasinya di daerah itu. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai melaksanakan penyelenggaraan PTSP sejak pertengahan 2011 bertempat di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), penyelenggaraan PTSP ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2010 tertanggal 27 Desember dengan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 31 jenis baik perizinan penanaman modal maupun perizinan teknis bersifat sektoral. Kewenangan PTSP dalam pelayanan perizinan bertambah menjadi 38 jenis sejak disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2014 tertanggal 12 Mei. PTSP melayani hampir semua perizinan baik di sektor penanaman modal, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, sektor kehutanan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta sektor perindustrian dan perdagangan. Ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 38 jenis perizinan hampir keseluruhannya tanpa dipungut biaya. Tercatat hanya tiga jenis perizinan yang masih dikenakan biaya yakni perizinan pembuatan izin trayek, izin sektor perikanan dan kelautan serta perizinan memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Untuk masalah perizinan tersebut pemerintah provinsi menyadari bahwa masih banyak hal yang yang harus dibenahi, namun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanannya.Dengan adanya PTSP ini kita semua berharap semoga mutu pelayanan prima bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mottonya yakni cepat, transparan, sederhana, mudah dan pasti.

E. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.135 dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2013-2015 pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan diikuti oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak rokok dan pajak air permukaan kontribusinya masih relatif rendah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang. Dasar hukum pengenaan pajak antara lain :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomer 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

TabelII.138 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(dalam Rp. Juta)

No	Uraian	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	149.719,57	162.036,29	172.239,98
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	154.884,48	139.175,29	110.239,08
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	139.313,51	163.479,97	165.429,32
4	Pajak Air Permukaan	3.544,64	4.036,07	4.680,32
5	Pajak Rokok	-	39.534,99	54.176,24
	Jumlah	**447.462.20**	**508.262.61**	**506.764,94**

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari data realisasi pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas menunjukkan penurunan realisasi penerimaan pajakdaerah, dimana pada tahun 2014 besar PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 508.262.610 menurun di tahun 2015 menjadi sebesar 506.764.940.

F. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrument kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim investasi dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.138, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kurun waktu 2008-2014 jumlah perda yang sahkan untuk mendukung iklim investasi sebanyak 8 Perda, mulai dari Perda pembentukan BUMD sampai dengan Perda penyertaan modal pada bank pembangunan daerah.

Tabel II.139 Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Mendukung Iklim Investasi

No	Nomor	Perda
1	18 Tahun 2008	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera
2	11 Tahun 2008	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Perkreditan
3	12 Tahun 2008	Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Sumsel
4	1 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Babel
5	3 Tahun 2010	Pembentukan BUMD PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	7 Tahun 2011	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung
7	7 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung
8	3 Tahun 2014	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah

Sumber : Biro Hukum Setda Prov. Kep. Bangka Belitung

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

A. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

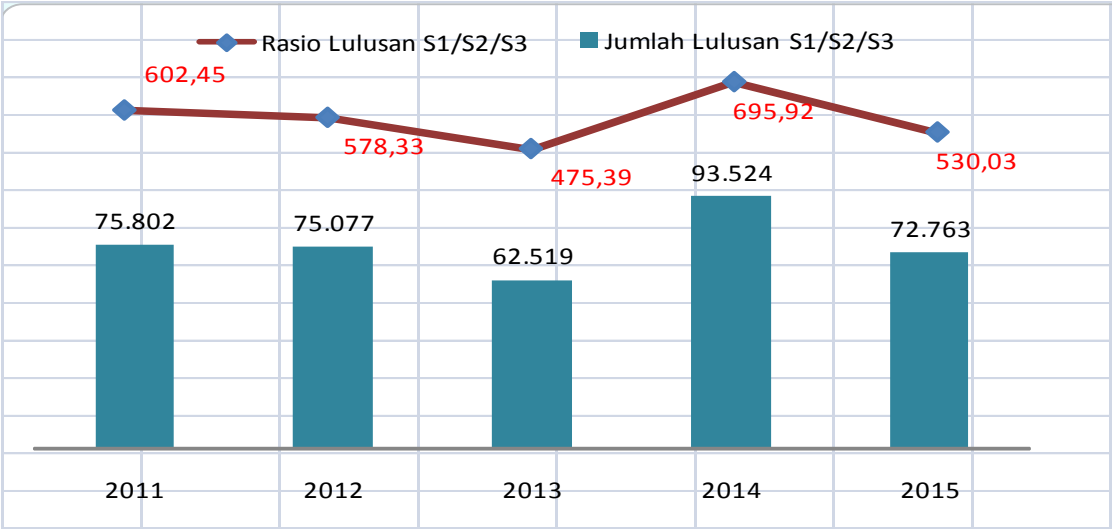
Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel II.140 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	75.802	75.077	62.519	93.524	72.763
2.	Jumlah penduduk	1.258.234	1.298.168	1.315.123	1.343.881	1.372.813
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	602,45	578,33	475,39	695,92	530,03

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan grafik Grafik II.25 di bawah dapat dijelaskan bahwa Kualitas tenaga kerja/rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) cenderung berfluktuasi dimana tahun 2011 sebesar 602,45 per-10.000 penduduk sedangkan tahun 2015 menurun menjadi 530,03 per-10.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja dengan latar pendidikan sarjana/perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun, walaupun sempat pada tahun 2014 rasio ini meningkat sebesar 695,92 per-10.000 penduduk. Diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dengan kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai dengan keinginan pengguna tenaga kerja agar dapat terserap dalam perusahaan-perusahaan, dan secara otomatis dapat meningkatkan rasio kelulusan S1/S2/S3.



Grafik II.25 Rasio lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

B. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat ketergantungan merupakan rasio perbandingan antara usia tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Rasio ketergantungan ini digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Berdasarkan Tabel II.140 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2011 sebesar 47,98 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 47,35 dan kembali mengalami hingga tahun 2015 rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 46,83. Ini mengindikasikan bahwa tingkat ketegantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk yang produktif untuk lima tahun terakhir semakin kecil dan jumlah penduduk usia kerja menjadi semakin besar dibandingkan dengan penduduk bukan usia kerja.

Tabel II.141 Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	361.800	365.752	369.912	377.995	386.133
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	46.154	47.690	49.520	50.602	51.688
3.	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2)	407.954	413.442	419.432	428.597	437.821
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	850.280	873.109	895.691	915.284	934.992
5.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	47,98	47,35	46,83	46,83	46,83

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2017 DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2017 dan realisasi RPJMD 2012-2017 sampai dengan tahun 2016 dilakukan telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2016 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Tabel II.142 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2	1			**URUSAN PENDIDIKAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				WAJIB												
2	1		1	PAUD	APK PAUD	50.83%	44.51%	50,83%	38,19%	75%	50.83%			50.83%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase PAUD terakreditasi minimal B	40%	35%	40%		0%	40%			40%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1		2	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	APK SD Sederajat	116,26%	116,25%	116,26%	116,24%	100%	116.26%			116.26%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					APM SD Sederajat	97%	96.61%	97%	96,23%	99%	97%			97%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					APK SMP Sederajat	98%	96.85%	98%	95,74%	98%	98%			98%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					APM SMP Sederajat	84%	80.07%	84%	76,14%	91%	84%			84%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Rata-rata nilai UAS SD Sederajat	6,75	6,7	6,75		0%	6.75			6.75	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Rata-rata nilai UN SMP Sederajat	7	6,9	7		0%	7			7	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase SD sederajat akreditasi minimal B	90%	85%	90%		0%	90%			90%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase SMP sederajat akreditasi minimal B	90%	85%	90%		0%	90%			90%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1		3	Pendidikan Menengah dan Tinggi	APK Pendidkan Menengah	89%	85%	89%		0%	89%			89%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					APM Pendidkan Menengah	75%	69.53%	75%		0%	75%			75%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Nilai rata-rata UN SMA IPA	7,5	7,4	7,5		0%	7.5			7.5	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Nilai rata-rata UN SMK	7,3	7,25	7,3		0%	7.3			7.3	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase SMA sederajat terakreditasi minimal B	85%	80%	85%		0%	85%			85%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase tingkat melanjutkan lulusan pendidikan menengah ke perguruan tinggi di wilayah Prov. Kep. Babel	10%	5%	10%		0%	10%			10%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase Siswa SMK yang	25%	-	-		#VALU	25%			25%	Pendidikan	Dinas

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
					mendapat pendidikan kewirausahaan					E!						Pendidikan
					Persentase siswa miskin SMA sederajat yang lulus mendapat beasiswa miskin untuk melajutkan keperguruan tinggi	25%	-	-		#VALUE!	25%			25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase mahasiswa miskin yang mendapat beasiswa miskin	25%	-	-		#VALUE!	25%			25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Pendidikan Menengah dan Tinggi	Rasio murid dengan sarana prasarana pengembangan KTM pada SMK pertanian KTM batu betumpang	25%	-	-		#VALUE!	25%			25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1		4	Pendidikan Non Formal	Angka Buta Aksara		3.10%	3%	3,25%	108%				3%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Lembaga Kursus Terakreditasi		30%	35%		0%					Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase lulusan siswa SMA sederajat yang mendapat pendidikan life skill	25%	-	-		#VALUE!	25%			25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1		5	Manajemen Layanan Pendidikan	Dokumen Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan		100%	100%	100%	100%					Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1		6	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Terwujudnya mutu pendidikan dan kesehatan pelajar melalui TP UKS	Peningkatan Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 7 kab/kota	Peningkatan Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 7 kab/kota	Peningkatan Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 7 kab/kota		#VALUE!	Peningkatan Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 7 kab/kota			Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota	Pendidikan	Biro Kesra
2	**2**			**KESEHATAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	66,49%	100%	91,27%	91%	100%			100%	Kesehatan	RSUP
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	24,28%	100%	90,86%	91%	100%			100%	Kesehatan	RSUP
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	95,28%	100%	87,49%	87%	100%			100%	Kesehatan	RSUP
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		100%	99,34%	99%	100%			100%	Kesehatan	RSUP
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%			#DIV/0!					Kesehatan	RSJ
				WAJIB												
2	2		1	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan	100%	90%	95%		0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan	100%	90%	95%		0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ
2	2		2	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	RSJ
					Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar					#DIV/0!					Kesehatan	RSUP
2	2		3	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kab/Kota dengan cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 60%-75%	75	65	70		0%	75			75	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase Promosi pelayanan kesehatan di RSUP	0	0	6	85,80%	14%	0			90	Kesehatan	RSUP
					Persentase Promosi pelayanan kesehatan di RSJ	90	0	85		0%	90			90	Kesehatan	RSJ
2	2		4	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase balita dengan berat badan dibawah garis merah (BGM) 8%-3%	30%	50%	40%		0%	30%			30%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		5	Pengembangan lingkungan sehat	Persentase Kab/Kota melakukan pembinaan kesehatan lingkungan 100%	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		6	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Kab/Kota yang melakukan surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra 42%-98%	84%	74%	84%		0%	84%			98%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian penyakit menualar 100%	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		7	Standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan di provinsi dan kab/kota					#DIV/0!					Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan lanjutan yang terakreditasi nasional	0	0	0		#DIV/0!	0			44%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan RSJ	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	RSJ
					Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan RSUP	80	70	75		0%	80			100	Kesehatan	RSUP
					Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di	85	77	80		0%	85			100	Kesehatan	RSUP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
					RSUP											
					Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSUP)	100	60	80		0%	100			100	Kesehatan	RSUP
					Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSJ	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	RSJ
					Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSJ)	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	RSJ
2	2		8	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase masyarakat miskin di Kab/Kota yang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan 65%-95%	95%	85%	90%		0%	95%			95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		9	Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP	80	34,46%	75%	57,96%	77%	80			80	Kesehatan	RSUP
					Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar di RSJ	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	RSJ
2	2		10	Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Persentase Sarana dan prasarana RSUP yang di pelihara	80	88,34%	75%	91,47%	122%	80			80	Kesehatan	RSUP
					Persentase Sarana dan prasarana RSJ yang di pelihara	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	RSJ
2	2		12	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	angka kematian bai per 1000 kelahiran hidup 35-28	28	30	29		0%	28			28	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		13	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	persentase pembinaan pelayanan kesehatan lansia	80%	50%	75%		0%	80%			80%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		14	Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase tempat pengolahan makanan dan pangan industri rumah tangga (PIRT) sesuai syarat kesehatan 30%-40%	40%	37%	39%		0%	40%			40%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		15	Peningkatan keselamatan ibu dan anak	persentase Kab/Kota dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 96,5%-98%	27	29	28		0%	27			98	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 35-27	26	27	27		0%	26			26	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		16	Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Persentase ketersediaan bank data Provinsi dan Kabupaten/Kota 100%	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase ketersediaan dokumen perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan kesehatan 4 dokumen	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan 4 dokumen	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		17	Pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya	Persentase pelayanan kesehatan yang melaksanakan perkesmas	90%	75%	85%		0%	90%			90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2	2		18	Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana labkesda	persentase sarana dan prasarana labkesda	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	Dinas Kesehatan & BKD Pemprov
2	2		19	Sumberdaya kesehatan	Persentase tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	100	77.1	88.4		#VALUE!	100			100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		20	Bencana Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang melakukan pengendalian PTM 100%	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase kab/kota yang diintervensi dengan kesiapsiagan penanggulangan bidang kesehatan	25%				#DIV/0!	25%			100.00%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	**3**			**PEKERJAAN UMUM**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Pekerjaan Umum	Dinas PU
				WAJIB												
2	3		1	Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	94.50%	94.50%	94.50%		#VALUE!	94.50%			94.50%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong						#DIV/0!						
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong						#DIV/0!						
2	3		2	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	94.50%	94.50%	94.50%		#VALUE!	94.50%			94.50%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		3	Tangap Darurat Jalan dan Jembatan	Persentase cakupan perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana (%)	95%				#DIV/0!	95%			95%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		4	Pembangunan Sistem Informasi/*Data Base* Jalan dan Jembatan	Tersedianya informasi kondisi jalan dan jembatan (%)	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		5	Peningkatan Sarana	Sarana dan prasarana					#DIV/0					Pekerjaan	Dinas PU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6 !	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				dan Prasarana Kebinamargaan	kebinamargaan dalam kondisi baik (%)										Umum	
2	3		6	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Irigasi dalam kondisi baik (%)	-	-	-		#VALUE!	-			-	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		7	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase masyarakat miskin yang tidak memiliki akses air bersih					#DIV/0 !				100.00%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		8	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Embung, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya terkelola dengan baik (%)					#DIV/0 !					Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		9	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang mengelola air minum dan air limbah sesuai baku mutu (%)					#DIV/0 !				100.00%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
					Persentase masyarakat miskin yang tidak memiliki sanitasi					#DIV/0 !					Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		10	Pengendalian Banjir	Persentase daerah rawan banjir (%)					#DIV/0 !				100%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh						#DIV/0 !						Dinas PU
2	3		11	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik (%)					#DIV/0 !				70.00%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Program Pemb. Sarana Dan Prasarana Umum						#DIV/0 !						Dinas PU
2	3		12	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	2 dok	2 dok	2 dok		#VALUE!	2 dok			2 dok	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						#DIV/0 !					Pertanahan	Dinas PU
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)						#DIV/0 !					Pertanahan	Dinas PU
				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,						#DIV/0 !					Pertanahan	Dinas PU
				Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah						#DIV/0 !						
2	**4**			**PERUMAHAN**												
				Program Pengembangan Perumahan						#DIV/0 !					Perumahan	Dinas PU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan						#DIV/0!					Perumahan	Dinas PU
2	4		1	Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial	Persentase cakupan perbaikan perumahan akibat bencana (%)					#DIV/0!				100%	Perumahan	Dinas PU
2	4		2	Pengelolaan Area Pemakaman	TPU terkelola baik (%)					#DIV/0!					Perumahan	Dinas PU
2	**5**			**PENATAAN RUANG**												
2	5		1	Perencanaan Tata Ruang	Persentase meningkatnya sinkronisasi perencanaan tata ruang	90%	80%	85%		0%	90%			Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL	Penataan Ruang	Bappeda
				Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya dokumen rencana detail kawasan strategis provinsi	4 KSP	3 KSP	3 KSP		#VALUE!	4 KSP			8 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	Penataan Ruang	Dinas PU
					Terlaksananya Penyusunan KLHS Rencana Rinci KSP	3 Dokumen KLHS	1 Dokumen KLHS	2 Dokumen KLHS		#VALUE!	3 Dokumen KLHS			6 Dokumen KLHS RTR KSP	Penataan Ruang	Dinas PU
2	5		2	Pemanfaatan Ruang	Tertib pemanfaatan ruang (%)					#DIV/0!				Peta Citra Satlit QuickBird untuk peta tata ruang zona darat, zona laut, Sinkronisasi peta Citra Quick Bird Zona Darat dan Laut, Penguatan dan Pemanfaatan Peta Citra Quick Bird, Wastek	Penataan Ruang	Dinas PU, Bappeda
2	5		3	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang (%)					#DIV/0!				10 PPNS Prov/Kab/Kota dan 5 Laporan Penyelenggaraan PR, Peralatan pendukung PPNS	Penataan Ruang	Dinas PU
				Program Kerjasama Pembangunan						#DIV/0!						
2	**6**			**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran tupoksi	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase peningkatan sarana penunjang disiplin aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-		#VALUE!	-			-	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				WAJIB												
2	6		1	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup terhadap rpjmd	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh						#DIV/0!						
				Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh						#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Dinas PU
										#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda
										#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda
										#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda
										#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6		2	Kerjasama Pembangunan	kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usahadan swasta	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya pembayaran 5x Iuran APPSI, 3 X Iuran BKS serta 10 Dokumen Kerjasama daerah dan Peninkatan SDM Aparatur sebanyak 40 orang memahami Kerjasama Daerah	1x Iuran APPSI, 1 X Iuran BKS serta 3 Dokumen Kerjasama daerah	1x Iuran APPSI, 1 X Iuran BKS serta 5 Dokumen Kerjasama daerah	1x Iuran APPSI, 1 X Iuran BKS serta 2 Dokumen Kerjasama daerah		#VALUE!	1x Iuran APPSI, 1 X Iuran BKS serta 3 Dokumen Kerjasama daerah			1x Iuran APPSI, 1 X Iuran BKS serta 3 Dokumen Kerjasama daerah	Perencanaan Pembangunan	Biro Pemerintahan
2	6		3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan manajamen prgogram dan aparatur untuk kelancaran dan efektifitas tugas pokok dan fungsi bappeda	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6		4	Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase kesesuaian pencapaian sasaran tahunan terhadap RPJMD	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6		5	Perencanaan Pembangunan	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Ekonomi	ekonomi terhadap RPJMD										Daerah	
						27%	87.75%	27%		0%	27%			27%	Perencanaan Pembangunan Daerah	Biro Perekonomian
2	6		6	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sosial Budaya terhadap RPJMD	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Perencanaan Sosial dan Budaya						#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Badan Kesbangpol
										#DIV/0!						
										#DIV/0!						
2	6		7	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup	80%	80%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6		8	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang pemerintahan terhadap RPJMD		70%			#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2				Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang pemerintahan dan Otonomi daerah terhadap RPJMD	80%		75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6		9	Perencanaan Kota-kota Besar dan Menengah	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup terhadap rpjmd	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6		10	Pengembangan Wilayah Perbatasan						#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6		11	Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi	Tersedianya 6 Kesepakatan penyelesaian batas daerah antar Kab/Kota/Provinsi sebanyak dan 1 Peraturan tentang Toponimi	1 (satu) kesepakatan Batas dan 1 Peraturan Toponimi	1 (satu) kesepakatan Batas	1 (satu) kesepakatan Batas		#VALUE!	1 (satu) kesepakatan Batas dan 1 Peraturan Toponimi			Tersedianya 6 Kesepakatan penyelesaian batas daerah antar Kab/Kota/Provinsi sebanyak dan 1 Peraturan tentang Toponimi	Perencanaan Pembangunan	Biro Pemerintahan
			32	Pengembangan Data/Informasi	persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses					#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			32	Pengembangan Data/Informasi	Pengelolaan tertib administrasi belum memadai	0	Aplikasi dan Peralatan	0		#DIV/0!	0			1 Aplikasi dan Peralatan	Perencanaan Pembangunan	Biro Pembangunan
				Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah	Persentase penelitian, kerjasama dan publikasi yang digunakan Sebagai Rekomendasi Pemerintah Daerah	83%		75%		0%	83%			83%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	7			**PERHUBUNGAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan	Persentase pelayanan	1	100%	100%		0%	1			1	Perhubungan	Dinas

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Administrasi Perkantoran	administrasi perkantoran											Perhubungan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	100%	100%		0%	1			1	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	1	100%	100%		0%	1			1	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	100%	100%		0%	1			1	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	100%	100%		0%	1			1	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				WAJIB												
2	7		1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase pemenuhan prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%)	0.00%	24.00%	25.00%	25%	#VALUE!	0.00%			25.00%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
						0	0	1 rute pelayaran	1 rute pelayaran perintis	#VALUE!	0			1 rute pelayaran	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	7		2	Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase Prasana dan Fasiitas LLAJ dalam kondisi baik (%)	75.00%	60.00%	60.00%	75.00%	#VALUE!	75.00%			75.00%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	7		3	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan (%)	30.00%	28.00%	29.00%	29.00%	#VALUE!	30.00%			30.00%	Perhubungan	dinas Perhubungan
						1 paket	1 paket	1 paket		#VALUE!	1 paket			Bandara Internasional	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	7		4	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		7.00%	8.30%	8.20%		#VALUE!	7.00%			7.00%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	7		5	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Angka Pelanggaran lalu lintas (%)	1.20%	2.10%	1.50%	1.50%	#VALUE!	1.20%			1.20%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	**8**			**LINGKUNGAN HIDUP**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%				Lingkungan Hidup	BLHD
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%				Lingkungan Hidup	BLHD
					Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!						
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Lingkungan Hidup	BLHD
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Lingkungan Hidup	BLHD
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Lingkungan Hidup	BLHD
				WAJIB												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2	8		1		Cakupan Pelayanan Persampahan					#DIV/0!				3 TPA Regional di Prov.Kep.Babel	Lingkungan Hidup	BLHD
2	8		2	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Pencemaran air Sungai	11 Sungai	9 Sungai	11 Sungai		#VALUE!	11 Sungai			11 Sungai	Lingkungan Hidup	BLHD
					TSS(mg/l)	<50	<50	<50		#VALUE!	<50			<50		
					BOD(mg/l)	<5,00	<5,26	<5,26		#VALUE!	<5,00			<5,00		
					COD(mg/l)	<29,0	<29,4	<29,4		#VALUE!	<29,0			<29,0		
					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (Gg CO_2 Eq)	13.16	6.23	10.171		0%	13.16			15.499	Lingkungan Hidup	BLHD
						-	7 org	-		#VALUE!	-			7 org	Lingkungan Hidup	BLHD
						-	-	-		#VALUE!	-			1680 org	Lingkungan Hidup	BLHD
					Adanya Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	21 kasus	7 kasus	14 kasus		#VALUE!	21 kasus			55 kasus	Lingkungan Hidup	BLHD
2	8		3	Peningkatan kualitas serta akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Parameter uji yang terakreditasi pada UPTB laboratorium lingkungan (Parameter)	26	8	12		0%	26			30	Lingkungan Hidup	BLHD
					Terinventarisasinya status lingkungan hidup aerah		-	-		#VALUE!				1 dok	Lingkungan Hidup	BLHD
					Terbangunnya jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	-	-	-		#VALUE!	-			8 jaringan	Lingkungan Hidup	BLHD
					Peningkatan Parameter uji yang terakreditasi pada UPTB laboratorium lingkungan	30	12	26		0%	30			30	Lingkungan Hidup	BLHD
2	8		4	Peningkatan Pengendalian Polusi		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota		#VALUE!	7 Kab/Kota			7 Kab/Kota	Lingkungan Hidup	BLHD
					CO	< 10.000 µg/m3	< 10.000 µg/m3	< 10.000 µg/m3		#VALUE!	< 10.000 µg/m3			< 10.000 µg/m3	Lingkungan Hidup	BLHD
					SO_2	< 365 µg/m3	< 365 µg/m3	< 365 µg/m3		#VALUE!	< 365 µg/m3			< 365 µg/m3	Lingkungan Hidup	BLHD
					NO_2	< 150 µg/m3	< 150 µg/m3	< 150 µg/m3		#VALUE!	< 150 µg/m3			< 150 µg/m3	Lingkungan Hidup	BLHD
					PM_{10}	< 150 µg/m3	< 150 µg/m3	< 150 µg/m3		#VALUE!	< 150 µg/m3			< 150 µg/m3	Lingkungan Hidup	BLHD
					Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Lingkungan Hidup	BLHD
					Terbina dan terpantaunya pelaksanaan izin lingkungan		7 Kab/Kota			#DIV/0!				45 keg/usaha	Lingkungan Hidup	BLHD
							7 Kab/Kota			#DIV/0!				7 kab/kota	Lingkungan Hidup	BLHD
					Terbina dan terpantaunya		14 keg/usaha			#DIV/0				45 keg/usaha	Lingkungan	BLHD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
					pelaksanaan izin lingkungan					!					Hidup	
										#DIV/0!				1 dok	Lingkungan Hidup	BLHD
2	8		5	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Luas ruang terbuka hijau (%)					#DIV/0!				30% RTH kawasan perkotaan	Lingkungan Hidup	Dinas PU
					Persentase kabupaten/kota yang memiliki luasan ruang terbuka hijau sebsar 20%	28.57	14.28	14.28		#VALUE!	28.57			28.57	Lingkungan Hidup	BLHD
2	8		6	Deleniasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap upaya konservasi Sumber Daya Alam					#DIV/0!				210 orang	Lingkungan Hidup	BLHD
										#DIV/0!						
2	**9**			**PERTANAHAN**						#DIV/0!						
2	9		1	Pembangunan sistem Pendaftaran Pertanahan	Tersedianya 15 buah Peta Kawasan Komplek Perkantoran terpadu, terinvertarisirnya kawasan terlantar di 7 Kab/Kota serta tersedianya sertifikat tanah milik PemProv sebanyak 39 Persil	-	-	-		#VALUE!	-			Tersedianya 15 buah Peta Kawasan Komplek Perkantoran terpadu, terinvertarisirnya kawasan terlantar di 7 Kab/Kota serta tersedianya sertifikat tanah milik PemProv sebanyak 39 Persil	Pertanahan	Biro Pemerintahan
2	9		2	Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya lahan / tanah untuk pembangunan gedung dan mess Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang representatif					#DIV/0!				1000 M2	Pertanahan	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
					Terlaksananya penata usahaan tanah sebagai asset tetap daerah	-	1 lahan (3.739 M2)	-		#VALUE!	-			1 lahan (bertambah 3.739 M2)	Pertanahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	9		3	Penyelesaian-penyelesaian Konflik Pertanahan	Peningkatan Pemahaman aparatur sebanyak 80 orang dalam penyelesaian konflik pertanahan	1 Angkatan (40 orang)	-	1 Angkatan (40 orang)		#VALUE!	1 Angkatan (40 orang)			Peningkatan Pemahaman aparatur sebanyak 80 orang dalam penyelesaian konflik pertanahan	Pertanahan	Biro Pemerintahan
2	9		4	Pengembangan sistem informasi Pertanahan	Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di Prov. Keop. Babel	Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di Prov. Keop. Babel	-	0		#DIV/0!	Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di			Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di	Pertanahan	Biro Pemerintahan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
											Prov. Keop. Babel			Prov. Keop. Babel		
2	**10**			**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**		**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**					
2	10		1	Penataan Administrasi Kependudukan	Tersedianya 1 (satu) data base Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap yang berbasis online	Peningkatan Pemahaman SDM Aparatur dan Masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 85 %	1 (satu) SIAK Online Antar Provinsi dengan Kab/Kota di Prov. Kep. Babel serta 1 Unit Server	Peningkatan Pemahaman SDM Aparatur dan Masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 80 %		#VALUE!	Peningkatan Pemahaman SDM Aparatur dan Masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 85 %			Tersedianya data base yang lengkap yang berbasis online serta peningkatan pemahaman aparatur dan Masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebesar 85 %)	Kependudukan dan Catatan Sipil	Biro Pemerintahan
				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						#DIV/0!						
2	**11**			**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
				Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas	Persentase Dukungan manajemen dan pelaksanaan	100%	100%	100%		0%	100%			100%		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				teknis lainnya	tugas teknis lainnya											
				WAJIB												
2	1	1	1	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender	Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	55.81	51.16	55.81		#VALUE!	55.81			55.81	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
					Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah	23.3	21	23.3		#VALUE!	23.3			23.3	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
					Persentase Keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	45.45	42.42	45.45		#VALUE!	45.45			45.45	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
2	1	1	2	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase kepala keluarga perempuan miskin yang mendapat peningkatan ekonomi keluarga	20				#DIV/0!	20			20	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
					Prosentase Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan	100	100	100		0%	100			100	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
					Persentase Kelompok Usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA	14.56	13.59	14.56		#VALUE!	14.56			14.56	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
					Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	30.3	30.2	30.3		#VALUE!	30.3			30.3	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
					Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	37	36.95	37		0%	37			37	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
2	1	1	3	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100		0%	100			100	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
					Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak	100	100	100		0%	100			100	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
					Persentase Data Terpilah terkait	100	100	100		0%	100			100		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
					Kesejahteraan Anak											
					Persentase Kabupaten/Kota yang Membentuk Kota Layak Anak (KLA)	28.57	28.57	28.57		#VALUE!	28.57			28.57		
					Persentase Anak yang Mengikuti Forum Anak Tingkat Nasional	15.58	15.58	15.58		#VALUE!	15.58			15.58		
2	**1**	**2**		**KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**												
2	1	2	1	Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	Pesentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana	100	100	100		0%	100			100	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPKBPA
					Tingkat Prevalensi peserta KB aktif	81.8	81.75	81.8		#VALUE!	81.8			81.8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPKBPA
					Keluarga Pra Sejahter dan Keluarga Sejahtera I	10.69	10.95	10.69		#VALUE!	10.69			10.69		
					Keluarga Pra Sejahter dan Keluarga Sejahtera I	10.69	10.95	10.69		#VALUE!	10.69			10.69		
2	**1**	**3**		**SOSIAL**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%			#DIV/0!					Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				WAJIB												
2	1		1	Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS/PSKS penerima	1475 orang	1475 orang	1475 orang		#VALU	1475 orang			7375 orang	Sosial	Dinas

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	3				manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial					E!						Kesejateraan Sosial
2	1 3		2	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial	2785 orang	550 orang	550 orang		#VALUE!	2785 orang			2785 orang	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
					Persentase lansia yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	25%				#DIV/0!	25%			25%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
2	1 3		3	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase fungsi sosial PMKS/PSKS penerima manfaat melalui pemberdayaan sosial dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	2,45	2,05	2,15		0%	2,45			10500	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
2	1 3		4	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Persentase panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	20%				#DIV/0!	20%			20%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
2	1 3		5	Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti	Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	20%				#DIV/0!	20%			20%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
2	1 3		6	Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti	Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia	20%				#DIV/0!	20%			20%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
2	1 3		7	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	Persentase kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran pada urusan sosial	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
2	1 3		8	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase daearah rawan bencana yang di intervensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	36%	70%		0%	100%			100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	1 3		9	Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase ketersediaan logistik dan peralatan terhadap kejadian bencana	100%	80%	90%		0%	100%			100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	1 3		1 0	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang di intervensi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	50%	15%	40%		0%	50%			50%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	1 3		1 1	Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama	Persentase lansia yang mendapat pembinaan keagamaan	25%				#DIV/0!	25%			25%	Sosial	Biro Kesra
2	**1 4**			**KETENAGAKERJAAN**												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya		100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				WAJIB												
2	1	4	1	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetansi	100	87%	100	93,20%	1%	100%			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat					#DIV/0!					Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100%	90%	100%	83,08%	83%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	25				#DIV/0!	25			25	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase lansia yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	25				#DIV/0!	25			25	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	1	4	2	Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	50	0,50%	30	8,31%	0%	50			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	1	4	3	Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	70	45,70%	60	62,39%	1%	70			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek (output)	60	50	55		0%	60			70	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	1	4	4	Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Prosentase pemeriksaan perusahaan	30	70,90%	25	90,91%	4%	30			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Prosentase pengujian peralatan di perusahaan (output)	45	93,60%	40	62,83%	2%	45			50	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	1		5	Revitalisasi BLKI	Prosentase infrastruktur yang	-	-	-		#VALU	-			0.85	Ketenagakerja	Dinas Tenaga

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	4				terbangun					E!					an	Kerja dan Transmigrasi
2	14		6	Perencanaan Tenaga Kerja	Prosentase kesesuaian perencanaan ketenagakerjaan dengan RPJMD	-	-	-		#VALUE!	-			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	14		7	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetansi (%)	-	-	-		#VALUE!	-				Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**15**			**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
				WAJIB												
2	15		1	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah (%)		100%	-		#VALUE!					Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2	15		2	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi		1	100%	-		#VALUE!	1			1	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
					Meningkatnya mutu dan ragam kemasan KUMKM (jenis)	9	100%	-		#VALUE!	9			9	Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2	15		3	Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Koperasi & UMKM (KUMKM)	Tingkat dukungan fasilitas pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM (%)	75	100%	-		#VALUE!	75			75	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
					meningkatnya sarana pemasaran bagi pengembangan UMKM (%)	22	100%	-		#VALUE!	22			22	Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
					-	1	100%	-		#VALU	1			1	Koperasi dan	Dinas Koperasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
										E!					usaha kecil dan menengah	dan UMKM
					Persentase masyarakat miskin yang mendapat akses pemodalan	75	100%	-		#VALUE!	75			kop	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
					Persentase lansia yang mendapat akses pemodalan	75	100%	-		#VALUE!	75			75	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2	1 5		4	Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Tingkat kemampuan SDM Koperasi dan UKM (%)	110	100%	-		#VALUE!	110			110	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2	1 5		5	Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Potensi Lokal	Koperasi komoditi aktif (%)		100%	-		#VALUE!					Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2	1 5		6	Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah	meningkatnya pengawasan Koperasi (persentase)		100%	-		#VALUE!					Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2	**1 6**			**PENANAMAN MODAL DAERAH**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-		80%		0%	-			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		100%		0%	100%			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				WAJIB												
2	1 6		1	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			7 calon investor	8 calon investor		#VALUE!					Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
						1%	96.32%	1%		0%	1%				Penanaman Modal	Biro Perekonomian
2	16		2	Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi			1.800 (Rp.Miliar)	1.900 (Rp.Miliar)		#VALUE!					Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi	Jumlah minat (calon investor)	9 calon investor	6	8 calon investor	4	#VALUE!	9 calon investor			9 calon investor	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
					Nilai realisasi investasi PMA/PMDN	2.100 (Rp.Miliar)	1023,2	1900	1177,2	62%	2.100 (Rp.Miliar)			2.100 (Rp.Miliar)	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2	16		3	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah		-	30%	50%		0%	-			-	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah	Persentase peningkatan data potensi terhadap sektor-sektor produk unggulan	85%	-	-		#VALUE!	85%			85%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2	16		4	Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu		13 sektor	10 sektor	12 sektor		#VALUE!	13 sektor			13 sektor	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Jumlah Sektor Perizinan dan Non Perizinan Usaha	13 sektor	-	-		#VALUE!	13 sektor			13 sektor	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2	**17**			**KEBUDAYAAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				WAJIB												
2	1		1	Pengembangan Nilai Budaya	Pertumbuhan pelestarian nilai tradisi	4	100%	100%		0%	4			4	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Jumlah Pergub pelestarian nilai tradisi					#DIV/0!					Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sanggar seni	0	0	0		#DIV/0!	0				Kebudayaan	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
					terwujudnya mutu pendidikan dan kesehtan pelajar melalui TP UKS	seni rupa islami, musyawarah tokoh adat 7 kab/kota,		seni rupa islami, musyawarah tokoh adat 7 kab/kota,		#VALUE!	seni rupa islami, musyawarah tokoh adat 7 kab/kota,			seni rupa islami, musyawarah tokoh adat 7 kab/kota,	Kebudayaan	Biro Kesra
2	1		2	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola					#DIV/0!					Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Jumlah kegiatan penyelengaraan pagelaran kesenian daerah		100%	100%		0%					Kebudayaan	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
					Rasio Dokumen pendukung pengembangan dengan kawasan kota tua muntok		100%	100%		0%					Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Persentase kerjasama kabupaten kota dalam keikutsertaan paket khusus acara pentas seni kabupaten kota di TMII	100%	0	100%		0%	100%			100%	Kebudayaan	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
2	1		6	Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya	Pertumbuhan nilai sejarah dan nilai budaya yang di apresiasi masyarakat	50	100%	0		#DIV/0!	50			50	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	1		7	Peningkatan pengamalan terhadap kehidupan beragama	terwujud kualitas layanan pada umat beragama dalam kegiatan ibadah	stq/mtq,safari ramadhan,pemberangkatan jamaah haji		stq/mtq,safari ramadhan,pemberangkatan jamaah haji		#VALUE!	stq/mtq,safari ramadhan,pemberangkatan jamaah haji			stq/mtq,safari ramadhan,pemberangkatan jamaah haji	Kebudayaan	Biro Kesra
2	1		8	Pembinaan kerukunan umat beragama	terwujudnya kerukunan umat beragama	peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota		peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota		#VALUE!	peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota			peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota	Kebudayaan	Biro Kesra
2	1			**PEMUDA DAN**												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	8			**OLAHRAGA**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100		0%	100			100	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
				WAJIB												
2	1	8	1	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pelajar dan Kemahasiswaan yang dibina	7	7	7		0%	7			7	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	1	8	2	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Prosentase pemuda peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil mengembangkan	22	18	20		0%	22			22	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Persentase pemuda di wilayah KTM yang mendapat pelatihan wirausaha	10				#DIV/0!	10			10	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Persentase pemuda miskin yang mendapat pelatihan wirausaha	20				#DIV/0!	20			20	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	1	8	3	Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba	Prosentase Pemuda Peserta Pelatihan yang Tidak Terkena NARKOBA setelah pelatihan	100	100	100		0%	100			100	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	1	8	4	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Prosentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	100	100	100		0%	100			90%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	1	8	5	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Peringkat prestasi nasional dalam event POPWIL dan POPNAS	-	-	15		0%	-			POPWIL = 6 POPNAS = 28	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPNAS	11.39	10.13			#DIV/0!	11.39				Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPCANAS	50	28.57	33.33		#VALUE!	50				Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Prosentase Olahragawan Pelajar Berprestasi Hasil dari Pembinaan PPLP 7 PPLPD	57.89	36.84	47.37		#VALUE!	57.89				Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terwujudnya pembinaan olahraga bagi anggota KORPRI	90%	25%	90%		0%	90%			58.00%	Kepemudaan dan olahraga	Sekretariat Korpri
				Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Rasio lansia yang mendapat pelayanan olah raga dengan kecamatan	10				#DIV/0!	10			10	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	1	8	6	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Prosentase jumlah sarana dan prasarana di kawasan sport center Prov. Kep. Bangka	17	17	17		0%	17			20%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
					Belitung											
2	1		7	Pembinaan Generasi Muda	Prosentase partisipasi pemuda yang lolos seleksi Paskibraka	6	6	6		0%	6				Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Prosentase Pemuda yang Lolos Seleksi Paskibra Tingkat Nasional	7	7	7		0%	7			3.57%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**1**			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				WAJIB												
2	1		1	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				100%		0%					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1		2	Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Tindak Kriminal	.....		100%	100%		0%					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Angka kriminalitas (menurun)	0.00207	0,00155	0.00216	0,0013	#VALUE!	0.00207			0.00207	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
					Cakupan penegakkan perda	100.00%	67,56%	72.97%		#VALUE!	100.00%			100.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
2	1		3	Pengembangan Wawasan Kebangsaan		100%	100%	100%		0%	100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1		4	Kemitraan		1	100%	100%		0%	1				Kesatuan	Badan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	9			Pengembangan Wawasan Kebangsaan											Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbangpol
2	1 9		5	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Menurunnya tingkat kenakalan remaja di Prov. Kep. Bangka Belitung	100%		100%		0%	100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1 9		6	Pendidikan Politik Masyarakat	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan, Dukungan dan Fasilitasi Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik	1	1	100%		0%	1				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1 9		7	Pemberdayaan Masayarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pemberdayaan Masayarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	3.00%	2.48%	2.74%		#VALUE!	3.00%			3.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
					Meningkatnya pemahaman dalam menghadapi segala potensi ancaman			100%		0%					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1 9		8	Kemitraan Kamtibmas		100%		100%		0%	100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1 9		9	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Lainnya	Meningkatnya hubungan toleransi antar umat beragama	100%	100%	100%		0%	100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
					Meningkatnya peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat					#DIV/0!					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
					terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi					#DIV/0!					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	12 bulan	12 bulan		#VALUE!	-				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
						80.00%	60.00%	80.00%		#VALUE!	80.00%			100.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
						100.00%	99.21%	99.58%		#VALUE!	100.00%			100.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
						95.00%	93.00%	94.00%		#VALUE!	95.00%			95.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
						74.70%	57.43%	66.47%		#VALU	74.70%			74.70%	Kesatuan	Satpol PP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
										E!					Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
2	19		11	Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada	terlaksananya 7x Monev dan 24 SK Pengangkatan dan Pemberhentian DPRD dan Kepala Daerah	3x Monev dan 1 SK Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah	4x Monev Pemilukada	8 SK Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah		#VALUE!	3x Monev dan 1 SK Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah			terlaksananya 7x Monev dan 24 SK Pengangkatan dan Pemberhentian DPRD dan Kepala Daerah	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Biro Pemerintahan
						100.00%	64.00%	72.97%		#VALUE!	100.00%			100.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
						3.00%	2.48%	2.74%		#VALUE!	3.00%			3.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
						-	12 bulan	12 bulan		#VALUE!	-				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
				Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada		100%	-	100%		0%	100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	19		12	Peningkatan demokrasi		100%				#DIV/0!	100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	**20**			**OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan	Sekretariat DPRD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															persandian	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Daerah
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan	Sekretariat Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Daerah
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Daerah
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Daerah
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,	Inspektorat Provinsi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan	Badan Diklat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Diklat
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Diklat
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Diklat
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat	Badan Diklat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															daerah, kepegawaian, dan persandian	
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	DPPKAD
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	DPPKAD
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	DPPKAD
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	DPPKAD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	DPPKAD
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum,	Satpol PP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Korpri
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Korpri
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat	Sekretariat Korpri

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															daerah, kepegawaian, dan persandian	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Korpri
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	0	0%	0%		#DIV/0!	0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0	0%	0%		#DIV/0!	0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	0	0%	0%		#DIV/0!	0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0%	0%		#DIV/0!	0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0%	0%		#DIV/0!	0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
				WAJIB												
2	2 0		1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			100%	100%		0%					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
2	2 0		2	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah		12 bln	12 bln	12 bln		#VALUE!	12 bln			95	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Umum dan Perlengkapan
				Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan pertemuan dialog/audiensi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan tokoh-					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum,	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
					tokoh masyarakat Bangka Belitung Jakarta/luar Jakarta										administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Bangka Belitung di Jakarta
2	2	0	3	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Catatan hasil pemeriksaan	WTP	WDP	WDP		#VALUE!	WTP			WTP	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100%	100%		0%					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
				Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, Monev dan verifikasi sebanyak 15 proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP	Terlaksananya 8x Monev dan evaluasi proposal atas instansi penerima bantuan hibah	Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP	Terlaksananya 7x Monev dan evaluasi proposal atas instansi penerima bantuan hibah		#VALUE!	Terlaksananya 8x Monev dan evaluasi proposal atas instansi penerima bantuan hibah			Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, Monev dan verifikasi sebanyak 15 proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pemerintahan
										#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan	Sekretariat Korpri

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
2	2 0		4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (upgrading)	Hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (kategori)	-	1 unit	-		#VALUE!	-				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
				Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Optimalnya pelaksanaan kegiatan pada APBD yang sesuai target dan tepat waktu	230 paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan, 36 SKPD, 200 Paket Pengadaan Barang/jasa, 55 peserta, 7 Kab/kota ,50 peserta, 7 biro, 84 Operator SiRUP dan E-Monev	210 paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan, 10 set buku laporan, 55 peserta, 32 peserta , 75 buku	220 paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan, 36 SKPD, 190 Paket Pengadaan Barang/jasa, 55 peserta, 7 Kab/kota ,50 peserta, 7 biro, 35 SKPD dan 7 Biro, 84 Operator SiRUP dan Monev		#VALUE!	230 paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan, 36 SKPD, 200 Paket Pengadaan Barang/jasa, 55 peserta, 7 Kab/kota ,50 peserta, 7 biro, 84 Operator SiRUP dan E-Monev			95	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pembangunan
				Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
					Indeks Reformasi Birokrasi	65.00%	45.00%	55.00%		#VALUE!	65.00%			65.00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat	Inspektorat Provinsi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															daerah, kepegawaian, dan persandian	
					Prosentase jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai kategori (A) atau (B)	75.00%	45.00%	65.00%		#VALUE!	75.00%			75.00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
					Prosentase jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas Negara/Daerah atas temuan hasil Audit BPK-RI dan pengawasn APIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .	98.00%	96.00%	97.00%		#VALUE!	98.00%			98.00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
					Prosentase jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti.	97.00%	94.00%	96.00%		#VALUE!	97.00%			97.00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
					Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat	100.00%	100.00%	100.00%		#VALUE!	100.00%			100.00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
				Peningkatan Sistem	Meningkatnya pelaksanaan	4 Kasus, 2 Monev	4 Kasus	4 Kasus, 2 Monev		#VALU	4 Kasus, 2			50%	Otonomi	Biro Hukum

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum					E!	Monev				daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
2	2 0		5	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah unit kerja yang mendapatkan akuntabilitas minimal B (SKPD)					#DIV/0 !					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
					a). Sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD	8 orang	7 orang	8 orang		#VALU E!	8 orang			88 orang	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
					b). Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	7 orang	6 orang	7 orang		#VALU E!	7 orang			32 orang	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
					Jumlah peningkatan sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD/Pengadaan Barang dan Jasa :					#DIV/0 !					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan	Badan Pendidikan dan Latihan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
2	2	0	6	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti (%)	1 sistem bebasis web bases, 1 unit pengendalian gratifikasi, dan penilaian indeks reormasi birokrasi tahun 2017	Penyempurnaan sistem dan seperangkat alat penunjang	1 sistem bebasis web bases, 1 unit pengendalian gratifikasi, dan penilaian indeks reormasi birokrasi tahun 2016		#VALUE!	1 sistem bebasis web bases, 1 unit pengendalian gratifikasi, dan penilaian indeks reormasi birokrasi tahun 2017				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
					Terkoordinirnya SKPD dalam pelaksanaan RB	85%	0%	80%		0%	85%			terkoordinirnya SKPD di lingkungan Pemprop.Kep Babel	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2	0	7	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	-	3 kasus	-		#VALUE!	-				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
2	2	0	8	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya produk hukum daerah provinsi sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	1512 PHD dan 7 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum	1412 PHD dan 5 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum	1462 PHD dan 6 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum		#VALUE!	1512 PHD dan 7 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan	Biro Hukum

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															persandian	
				Penataan Peraturan Perundang-undangan	Hasil-hasil rapat, persidangan dan produk perundang-undangan yang terdokumentasikan	100	100%	100%		0%	100				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
2	2 0		9	Penataan Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya penyerahan urusan dari Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Provinsi sebanyak 9 Urusan	Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 3x	Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 3x	Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 2x, dan penyerahan urusan dari kab/kota ke Prov sebanyak 9 urusan		#VALUE!	Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 3x			Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 3x, dan penyerahan urusan dari kab/kota ke Prov sebanyak 9 urusan	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pemerintahan
2	2 0		1 0	Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kab/Kota	Terwujudnya produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	460 PHD	410 PHD	450 PHD		#VALUE!	460 PHD			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Hukum
2	2 0		1 1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Terlaksananya percepatan di 47 Kab yang melaksanakan PATEN, terevaluasinya 12 Kinerja kecamatan dan tersedianya 97 buku database kecamatan	8 Kecamatan yang melaksanakan PATEN, 3 Kecamatan dengan kinerja berpredikat dan 25 Buku database kecamatan	16 Kecamatan yang melaksanakan PATEN, 3 Kecamatan dengan kinerja berpredikat dan 25 Buku database kecamatan	-		#VALUE!	8 Kecamatan yang melaksanakan PATEN, 3 Kecamatan dengan kinerja berpredikat dan 25 Buku database kecamatan			Terlaksananya percepatan di 47 Kab yang melaksanakan PATEN, terevaluasinya 12 Kinerja kecamatan dan tersedianya 97 buku database kecamata	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pemerintahan
2	2 0		1 2	Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi	Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan,	87%	-	82%		0%	87%			penempatan pejabat sesuai kompeten	Otonomi daerah, pemerintahan umum,	Biro Organisasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				birokrasi	rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan										administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
				Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan	87%	-	82%		0%	87%			penempatan pejabat sesuai kompeten	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2 0		1 3	Peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Penerapan SPM dan SOP untuk meningkatkan pelayanan publik	97%	90%	95%		0%	97%			Seluruh SKPD memiliki SOP dan SPM	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2 0		1 4	Bantuan Hukum	Persentase lansia yang mendapat bantuan hukum					#DIV/0!				25%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Hukum
2	2 0		1 5	Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Meningkatnya sarana prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	1512 PHD	1412 PHD	1462 PHD		#VALUE!	1512 PHD			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,	Biro Hukum

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															kepegawaian, dan persandian	
2	2	0	16	Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	tertatanya kelembagaan SKPD Pemprov. Kep. Babel dalam struktur yang rasional, efektif, dan efisien.	85%	75%	80%		0%	85%			tertatanya kelembagaan SKPD	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2	0	17	Pengembangan koordinasi dan sikronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Meningkatnya koordinasi dan sikronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan SKPD	85%	0%	85%		0%	85%			Penataan dan sinkronisasi kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2	0	18	Penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Tertatanya manajemen pengelolaan SKPD serta nomenklatur, struktur, kewenangan dan tupoksi SKPD	75%	65%	70%		0%	75%			seluruh SKPD menerapkan manajemen	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2	0	20	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase alumni diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional	600	550	520		0%	600			2,760.00	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pendidikan dan Latihan
				Pembinaan dan Pengembangan						#DIV/0!				1,245.00	Otonomi daerah,	Badan Pendidikan dan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Aparatur											pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Latihan
				Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya kuantitas aparatur yang memiliki kompetensi	80 peserta, 50 peseta, 50 peserta, 40 peseta	360 peseta, 40 Peserta, 100 Peserta dan 40 peserta	60 peserta, 40 peserta, 60 peserta, 50 peserta		#VALUE!	80 peserta, 50 peseta, 50 peserta, 40 peseta			90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pembangunan
				Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi	pelaksanaan bimtek dan rapat	-		#VALUE!	pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi			pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui peningkatan kemampuan/ketrampilan dengan mengikuti pelatihan/pendidikan		80	80		0%					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
				Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase pengembangan kualitas penyelenggara diklat yang mengikuti pelatihan	63	63	63		0%	63			90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,	Badan Pendidikan dan Latihan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
										#DIV/0!				90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
					Prosentase Widyaiswara yang mengikuti pengembangan SDM widyaiswara	18	18	18		0%	18			77	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pendidikan dan Latihan
				Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi	pelaksanaan bimtek dan rapat	-		#VALUE!	pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi			pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat di bidang Hukum	15 orang	4 orang	10 orang		#VALUE!	15 orang			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kemampuan APIP (%)	0	0	0		#DIV/0!	0				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapabilitas dan kompetensi aparatur bagi aparatur Kantor Perwakilan Prov. Kep. Babel di Jakarta	0%	0	0		#DIV/0!	0%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
21	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur bagi aparatur Sekretariat DPP Korpri Prov. Kep. Bangka Belitung	90%	26%	90%		0%	90%			76%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Korpri
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		##########	##########	##########		#VALUE!	##########			90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pendidikan dan Latihan
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	terlaksananya pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional dan sejahtera melalui		80	80		0%					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi	Badan Kepegawaian Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
					peningkatan pendidikan dan karir aparatur serta penempatan aparatur yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi										keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
										#DIV/0!				90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
				Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas PNS yang berkualitas	115	117	115		0%	115			90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pendidikan dan Latihan
			22	Peningkatan akuntabilitas Kepala Daerah	meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B	70%		50%		0%	70%			SKPD yang SAKIPnya baik	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
										#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															dan persandian	
										#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
			23	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Persentase fasilitasi fungsi penganggaran DPRD melalui mekanisme dan tata cara penyusunan APBD dan APBD-P		100%	100%		0%				100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
				Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%)	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			25	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (sebelum) menjadi Program Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi serta Pendapatan Lain-lain	Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%)	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			26	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang	Asset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dan diyakini kebenarannya (%)	100%	0	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Daerah											umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Keuangan dan Aset Daerah
			27	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib pelaporan pengelolaan administrasi keuangan (%)	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B	pelaksanaan rapat	0	0		#DIV/0!	pelaksanaan rapat				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
			28	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Tersedianya 1 (satu) pedoman umum penyelenggaraan asas tugas pembantuan di prov. kep. Babel dan tersosialisasinya 2(dua) peraturan DKTP di Prov. Kep. Babel	-	-	-		#VALUE!	-			Tersedianya 1 (satu) pedoman umum penyelenggaraan asas tugas pembantuan di prov. kep. Babel dan tersosialisasinya 2(dua) peraturan DKTP di Prov. Kep. Babel	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pemerintahan
			29	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 bimtek		-	-		#VALUE!				100	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,	Biro Pembangunan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
			31	Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	.....	100%				#DIV/0!	100%				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kesbangpol
2	**21**			**KETAHANAN PANGAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran											Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Peningkatan Disiplin Aparatur											Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				WAJIB												
2	21		1	Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan bahan pangan daerah (%)	35	100%	7 Kab/kota		#VALUE!	35			35	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
					Pertumbuhan tingkat produksi beras pada kawasan KTM Batu Betumpang	35	100%	7 Kab/kota		#VALUE!	35			35	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
2	**22**			**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
				Peningkatan Sarana	Persentase peningkatan sarana	100%	100%	100%		0%	100%				Pemberdayaan	BPMPD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				dan Prasarana Aparatur	dan prasarana aparatur										Masyarakat dan Desa	
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
				Penataan daerah otonomi baru						#DIV/0!					Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
				dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainya		100%	100%	100%		0%	100%				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
				WAJIB												
2	22		1	Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	Persentase BUMDes dan pasar desa Yang Aktif	10%	15%	10%	5%	50%	10%			50%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
					Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
					Persentase desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	10%	10%	0%		#DIV/0!	10%			25%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	22		2	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa	Persentase desa yang menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenai RKPDes, RPJMDes, APBDes	100%	20%	90%	10%	11%	100%			100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	22		3	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan untuk lanjut usia yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan	5%				#DIV/0!	5%			5.00%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
					Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan partisipatif	15%	10.00%	15.00%		#VALUE!	15%			100.00%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	22		4	Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG	Persentase desa yang mengimplementasikan TTG sesuai dengan OVOP	10%	10%	10%	10%	100%	10%			50%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
					Rasio TTG yang diaplikasikan dengan jumlah desa di kawasan KTM batu betumpang	20%				#DIV/0!	20%			20%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	22		5	Raskintis	Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Raskintis	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	**23**			**STATISTIK**												
2	2		1	Pengembangan Data	Persentase data perencanaan	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Statistik	Bappeda

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	3			dan Informasi	pembangunan yang dapat diakses											
				Pengembangan Data dan Informasi						#DIV/0!					Statistik	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
				Pengembangan data/informasi	Meningkattnya wawasan masyarakat terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Beitung		1000 cd, 1000 buku			#DIV/0!				95	Statistik	Biro Umum dan Perlengkapan
2	**24**			**KEARSIPAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%				Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%				Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%				Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%	100%		0%	100%				Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				WAJIB												
2	24		1	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD Perpustakaan Arsip Kab/kota yang baik pengelolaan kearsipannya	100.00%	80.00%	90%		0%	100.00%			100%	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24		2	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pertumbuhan dokumen/arsip daerah yang berhasil diselamatkan	250 arsip	230 arsip	240 arsip	240 arsip	#VALUE!	250 arsip			250 arsip	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24		3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsiapan	Persentase Arsip yang terpelihara	100%	83.33	83.33%		#VALUE!	100%			300 arsip	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24		4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Persentase desa/kelurahan yang telah mendapat pelayanan informasi kearsipan	24.19%	21.50%	21.50%		#VALUE!	24.19%			186 desa	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24		5	Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Persentase SKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik pengelolaan kearsipannya	100.00%		85%		0%	100.00%			100%	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	**25**			**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pelayanan adm. Perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
				Peningkatan Disiplin Aparatur	terwujudnya disiplin aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
				WAJIB												
2	25		1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase SKPD yang melaksanakan e-Government	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
					Persentase SKPD yang melaksanakan e-Government	-	-	-		#VALUE!	-			-	Komunikasi dan Informatika	Dinas PU
2	25		2	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya jumlah invensi dan inovasi bidang komunikasi dan telekomunikasi	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
2	25		3	Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi	Terwujudnya kualitas SDM	informasi dan publikasi bidang kesejhateraan	stq/mtq,safari ramadhan,pemberangkatan jamaah haji	informasi dan publikasi bidang kesejhateraan		#VALUE!	informasi dan publikasi bidang kesejhateraan			Informasi dan publikasi bidang kesejhateraan	Komunikasi dan Informatika	Biro Kesra
2	25		4	Kerjasama Informasi dan Media Massa	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
2	25		5	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Masih adanya SKPD yang tidak menyampaikan laporan secara lengkap	Jumlah Operator SiRUP dan e-Monep	Jumlah Operator SiRUP dan e-Monep, Aplikasi e-monep	Jumlah Operator SiRUP dan e-Monep		#VALUE!	Jumlah Operator SiRUP dan e-Monep			jumlah operator SiRUP dan e-monev (35 SKPD dan 7 Biro), 1 Apilkasi	Komunikasi dan Informatika	Biro Pembangunan
				Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		-	-	-		#VALUE!	-			-	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
															Komunikasi dan Informatika	Biro Kesra
2	25		6	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		100%	-	100%		0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
2	**26**			**PERPUSTAKAAN**												
2	26		1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan aktif (%)	85.73%	85.73%	85.73%		#VALUE!	85.73%			87%	Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
					Pertumbuhan jumlah kunjungan di perpustakaan Provinsi	500 org	-3321 org	1221 org		#VALUE!	500 org			3500 org	Perpustakaan	Badan Perpustakaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
																dan Arsip Daerah
				Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio jumlah buku di perpustakan KTM batu betumpang dengan jumlah penduduk di kawasan KTM Batu Betumpang	-	-	-		#VALUE!	-			1	Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
3				**URUSAN PILIHAN**												
3	**1**			**PERTANIAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
																Perikanan dan Kehutanan
				WAJIB												
3	1		1	Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan)	Meningkatnya kesejahteraan petani (%)	tinggi ????				#DIV/0!	tinggi ????			tinggi ????	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
				Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani (%)		100%	100%		0%					Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3	1		2	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya kesejahteraan petani (%)					#DIV/0!					Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3	1		3	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan(%)	100	50	66.67		#VALUE!	100			50	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
					Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan SOP GAP (%)		100%	100%		0%					Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3	1		4	Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan (%)	100	83.46	91.71		#VALUE!	100			100	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
					Rasio luas lahan karet dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang	75.00%				#DIV/0!	75.00%			75	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3	1		5	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular (rasio)	0.5				#DIV/0!	0.5			0.5	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3	1		6	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan (%)	100	82.64	90.91		#VALUE!	100				Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3	1		7	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan (%)	85.75	79.5	82.75		#VALUE!	85.75			100	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3	1		8	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya daya serap pasar terhadap hasil produksi komoditas peternakan (%)	100				#DIV/0!	100			100	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3	**2**			**KEHUTANAN**												
				RUTIN												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						#DIV/0!					Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						#DIV/0!					Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Pendidikan kedinasan						#DIV/0!						
				WAJIB												
3	2		1	Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya hutan (rekomendasi)	5	4 kelompok	1 provinsi		#VALUE!	5			5	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2		2	Peningkatan Fungsi dan Daya dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat pengelolaan DAS berbasis masyarakat (%)	Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejateraan masyarakat di hulu dan hilir	terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas	-		#VALUE!	Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejateraan masyarakat di hulu dan hilir			Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejateraan masyarakat di hulu dan hilir	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2		3	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	terjaminnya kepastian kawasan hutan sesuai fungsi hutan (%)	Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal	Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal	-		#VALUE!	Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal			Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal	Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan						#DIV/0!					Kehutanan	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
																Kehutanan
3	2		4	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Jumlah pelanggaran hutan yang ditindaklanjuti (%) dan penurunan luas kebakaran kawasan hutan (Ha)	Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS)	Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS)	-		#VALUE!	Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS)			Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS)	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2		5	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Penurunan Luas Lahan Kritis (%)	Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas	-	-		#VALUE!	Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas			Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2		6	Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	tingkat ketaatan pelaku industri hasil hutan (%)	-	-	-		#VALUE!	-			-	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2		7	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan/KPH (13 unit)	terbentuknya dan beroprasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanamandan hutan alam	-	-		#VALUE!	terbentuknya dan beroprasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanamandan hutan alam			terbentuknya dan beroprasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanamandan hutan alam	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2		8	Peningkatan Data/Informasi/Statistik Kehutanan	ketersediaan data dan informasi kehutanan (dokumen)	-	-	-		#VALUE!	-			-	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	**3**			**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						#DIV/0!					Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						#DIV/0!					Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
				WAJIB												
3	3		1	Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang minyak dan gas bumi (%)	75	30 M Rupiah	100%		0%	75			75	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
3	3		2	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang pertambangan (%)	120 Izin Usaha Pertambangan dan 40 Perusahaan pertambangan	60 Izin Usaha Pertambangan & 10 Perusahaan Pertambang	90 Izin Usaha Pertambangan & 20 Perusahaan pertambangan		#VALUE!	120 Izin Usaha Pertambangan dan 40 Perusahaan pertambangan			150 Izin Usaha Pertambangan & 60 Perusahaan pertambangan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
					Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan (%)	260 M Rupiah	195 M Rupiah			#DIV/0!	260 M Rupiah			325 M Rupiah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
3	3		3	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Persentase elektrifikasi (%)	1 PLTS Terpusat, 200 unit PJU dan sarana umum menggunakan EBT,	100 unit PJU dan sarana umum menggunakan EBT, 60% sparepart pembangkit listrik energi baru terbarukan	-		#VALUE!	1 PLTS Terpusat, 200 unit PJU dan sarana umum menggunakan EBT,			2 PLTS Terpusat, 300 unit PJU dan sarana umum menggunakan EBT,	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
3	3		4	Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah	Tersedianya data potensi ESDM dan air tanah	60 titik geolistrik, 40 laporan penyelidikan kebumian dan 40 laporan supervisi pengelolaan air tanah	20 titik geolistrik	40 titik geolistrik, 20 laporan penyelidikan kebumian dan 20 laporan supervisi pengelolaan air tanah		#VALUE!	60 titik geolistrik, 40 laporan penyelidikan kebumian dan 40 laporan supervisi pengelolaan air tanah			60 laporan penyelidikan kebumian dan 60 laporan supervisi pengelolaan air tanah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
3	**4**			**PARIWISATA**												
3	4		1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tingkat pergerakan wisatawan nusantara & kunjungan wisatawan mancanegara (%)	75	100%	100%		0%	75			75	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	4		2	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Objek wisata terkelola baik (%)	10	0	0		#DIV/0!	10			10	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pengembangan destinasi pariwisata		10 desa wisata	100%	100%		0%	10 desa wisata			10 desa wisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pengembangan Destinasi Pariwisata		50	100%	100%		0%	50			90	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	4		3	Pengembangan Kemitraan	Tingkat kemitraan pelaku budaya dan pariwisata (%)	75	100%	100%		0%	75			75	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	4		4	Ekonomi Kreasif Berbasis Seni dan Budaya	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (%)	10	0	0		#DIV/0!	10			10	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	4		5	Pengembangan Pulau Belitung sebagai	Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		100%	100%		0%					Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				destinasi pariwisata internasional												Pariwisata
3	5			**KELAUTAN DAN PERIKANAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-		#VALUE!	-				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-		#VALUE!	-				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Dukungan Manajemen dan Teknis Kelautan dan Perikanan	Persentase tercapainya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Lingkup DKP	100%	100%	100		0%	100%				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				WAJIB												
3	5		1	Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha) dan jumlah POKMASWAS Aktif	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 550.000 Ha dan 35 kelompok POKMASWAS Aktif	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 180,02 Ha dan 145,55 kelompok POKMASWAS Aktif	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 500.000 Ha dan 35 kelompok POKMASWAS Aktif	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 162 Ha dan 176,67 kelompok POKMASWAS Aktif	#VALUE!	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 550.000 Ha dan 35 kelompok POKMASWAS Aktif			Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 550.000 Ha dan 35 kelompok POKMASWAS Aktif	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	5		2	Pengembangan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) dan Produksi Benih (Ekor)	Produksi Perikanan Budidaya 17.080 ton dan 50.000.000 ekor benih	Produksi Perikanan Budidaya 11.175 ton 25.000.000 ekor benih	Produksi Perikanan Budidaya 13.765 ton dan 31.000.000 ekor benih	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton): 16,21	#VALUE!	Produksi Perikanan Budidaya 17.080 ton dan 50.000.000 ekor benih			Produksi Perikanan Budidaya 17.080 ton dan 50.000.000 ekor benih	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	5		3	Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Produksi Perikanan Tangkap 181.000 ton, NTN : 111	Produksi Perikanan Tangkap 169.000 ton, NTN : 107	Produksi Perikanan Tangkap 175.000 ton, NTN : 109	Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton): 104,06; NTN: 105,21	#VALUE!	Produksi Perikanan Tangkap 181.000 ton, NTN : 111			Produksi Perikanan Tangkap 181.000 ton, NTN : 111	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	5		5	Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Nilai konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) dan Volume Produksi Olahan (ton)	Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita/Tahun) dan 24.000 Ton Produk Olahan	Nilai Konsumsi Ikan : 47 (Kg/Kapita/Tahun) dan 19.000 Ton Produk Olahan	Nilai Konsumsi Ikan : 48 (Kg/Kapita/Tahun) dan 21.000 Ton Produk Olahan	Nilai konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun): 105,21 dan Volume Produksi Olahan (ton):	#VALUE!	Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita/Tahun) dan 24.000 Ton Produk Olahan			Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita/Tahun) dan 24.000 Ton Produk Olahan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
									97,84							
3	6			**PERDAGANGAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				WAJIB												
3	6		1	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perlindungan konsumen dan pengamanan komoditas perdagangan bahan pokok (%)	50	100%	-		#VALUE!	50			50	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						1%		1%		0%	1%				Perdagangan	Biro Perekonomian
3	6		2	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya penataan usaha perdagangan (%)	7	100%	-		#VALUE!	7			7	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	6		3	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor komoditas unggulan daerah (US $)		100%	-		#VALUE!					Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	7			**PERINDUSTRIAN**												
3	7		1	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya asosiasi UMKM (%)	75	100%	-		#VALUE!	75			75	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	7		2	Penataan Struktur Industri	Meningkatnya kelas struktur industri (%)	tinggi	100%	-		#VALUE!	tinggi			tinggi	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	7		3	Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	Meningkatnya jumlah sentra-sentra industri potensial (%)	2	1	-		#VALUE!	2			2	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
																Perdagangan
3	7		4	Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)	Meningkatnya nilai tambah industri berbasis sumber daya alam (%)	7	100%	-		#VALUE!	7			7	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	7		5	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan	Meningkatnya nilai tambah industri berbasis komoditi kerajinan (%)		-	-		#VALUE!					Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	7		6	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatkan penggunaan teknologi industri (%)		-	-		#VALUE!					Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**8**			**KETRANSMIGRASIAN**												
3	8		1	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase kawasan transmigrasi yang didukung oleh kebijakan/perencanaan	100%		100%		0%	100%			600 KK	Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2	Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Prosentase kawasan transmigrasi yang masyarakatnya dibina	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
JUMLAH																

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Memperhatikan perkembangan dari realisasi sasaran pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir, maka upaya yang dapat direspon atas perkembangan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib

1. Pendidikan

Permasalahan di bidang pendidikan antara lain :

a. Masih tingginya angka anak putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada jenjang pendidikan menengah SMA sederajat yang terlihat dari meningkatnya angka DO (*Drop Off*) pendidikan menengah yang pada tahun 2014 berada diangka 1,16 % kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 2,83 %. Faktor utama yang menyebabkan banyaknya anak-anak putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah karena ketidakmampuan orangtua dalam membiayai pendidikan anaknya. Selain itu secara tidak langsung kondisi geografis juga sangat mempengaruhi dan sarana transportasi masih kurang sehingga anak-anak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai sekolah mereka.
b. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disumbang dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang sudah berusia kerja. Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Bangka Belitung tahun 2015 berada pada angka 7,46 Tahun yang masih di katagorikan rendah yang diasumsikan Pendidkan SMP sederajat belum tamat untuk rata-rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
c. Kesempatan yang diberikan pemerintah setempat bagi guru untuk melanjutkan pendidikan formal masih kurang, hal ini terlihat dari data tahun 2015. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mengajar pada tingkat SD sederjat 56,82 %, Tingkat SMP sederajat 75,54 % dan SMA Sederajat 86,96 %, hal ini akan sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar di kelas.
d. Masih belum optimalnya sistem dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh para pendidik sehingga tingkat kualitas dari peserta didik masih rendah. Serta tingkat keaktifan guru masih kurang dalam memberikan pelajaran di sekolah, sehingga murid menjadi lebih pasif. Hal ini dapat disebabkan oleh beban kerja guru yang cukup berat dan harus menguasai berbagai bidang ilmu pengetahunan yang harus mereka ajarkan. Serta masih tingginya perpindahan tenaga pengajar kepada jenjang jabatan struktural pada pemerintahan daerah hal ini akan mempengaruhi kepada ketersediaan tenaga pengajar yang dunia pendidikan.

2. Kesehatan

Permasalahan di bidang kesehatan antara lain :

a. Perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, misalnya kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah, dan pendirian rumah hunian yang kurang layak hal ini terlihat dari masih rendahnya persentase rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang pada tahun 2015 berada pada angka 75,62 % tetapi relatif lebih baik jika dibandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada diangka 71,88%

b. Angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih belum terlalu tinggi yang berada pada angka 69,88 tahun pada tahun 2015 tetapi masih relatif lebih baik di bandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 69,72 tahun. Hal ini terjadi yang salah satunya banyak di sumbang dari tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular.

c. Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang terlihat dari jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 berada pada angka 115,05 terjadi peningkatan di bandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 101,00. Sedangkan untuk angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 berada pada angka 7,05 terjadi peningkatan di bandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 4,00.

d. Jumlah tenaga kesehatan yang jumlahnya masih belum optimal. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat, karena mereka tidak dapat dilayani dengan cepat. Penurunan ini disebabkan karena kondisi geografis yang cukup sulit dan kesejahteraan hidup mereka belum terpenuhi sehingga mereka pindah ke tempat lain yang lebih mudah dan terjamin kesejahteraannya. Hal ini terlihat dari rasio dokter per 100.000 penduduk pada tahun 2015 berada pada angka 0,000287, rasio perawat per 100.000 penduduk pada tahun 2015 berada pada angka 226,86 dan rasio bidan per 100.000 penduduk pada tahun 2015 berada pada angka 88,46.

3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Permasalahan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang antara lain :

a. Untuk sarana dan prasarana transportasi menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi kondisi jalan yang kurang mendukung, khususnya untuk jalan kabupaten dan masih perlunya tambahan jumlah jaringan jalan yang cukup untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

b. Belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah, sehingga menyebabkan aktifitas ekonomi menjadi terganggu.

c. Banyaknya kerusakan jalan yang menyebabkan terputusnya jaringan distribusi.

d. Lemahnya jaringan jalan yang berakibat timbulnya ketidakmerataan distribusi barang dan orang, berpotensi munculnya konflik sosial antar penduduk dan antar kabupaten yang ada.

e. Masih adanya ketidak sesuaian antara tata ruang dengan pembangunan yang dilakukan sehingga akan menimbulkan terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang dalam pembangunan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permasalahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan antara lain :

a. Permasalahan dalam sektor bangunan/konstruksi adalah masih rendahnya perkembangan dunia usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga belum mengoptimalkan pertumbuhan sektor ini. Pertumbuhan yang dialami sektor ini terutama disebabkan oleh permintaan pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk aktivitas pemerintah.

b. Masih rendahnya kepemilikan rumah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin

c. Belum terintegrasi penyediaan air minum dan sanitasi dalam penyediaan pengembangan perumahan

5. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat

   Permasalahan di bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

   a. Masih lemahnya ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman di masyarakat, sehingga masyarakat terjamin keamanannya dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
   b. Masih tingginya tingkat kriminalitas dalam Peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan, serta pemeliharaan kantrantibnas
   c. Belum optimalnya Pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), pendidikan politik masyarakat.
   d. Masih lemahnya Pemahaman masyarakat tentang konsep Wawasan Kebangsaan sebagai respon terhadap beragamnya latar belakang sosial, agama dan budaya masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
   e. Belum optimalnya Penguatan kelembagaan politik yang dapat menyerasikan penyaluran aspirasi berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat.

6. Sosial

   Permasalahan di bidang Sosial antara lain :

   a. Masih belum optimalnya Pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, hal ini terlihat dari data persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial hanya 11,01% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan dibandingan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 14,27%.
   b. Masih belum optimalnya Pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan didukung oleh peraturan perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, penyusunan dan penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai. Hal tersebut terlihat dari angka Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat yang dilayani dan diberdayakan masih relatif rendah berada pada angka 16,99 % pada tahun 2015 relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 13,88 %. Sedangkan berkaitan dengan angka persentase Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mampu berperan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial berada pada angka 6,29% pada tahun 2015 mengalami penurunan jika di bandingkan dengan angka pada tahun 2014 yang berada pada angka 22,08 %.
   c. Masih lemahnya sistem perlindungan dan jaminan sosial yang disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik. Hal ini terlihat dari angka persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial hanya 50,63% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan jika di bandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 66,34%.
   d. Masih tingginya disparitas tingkat kemiskinan dipedasaan dan diperkotaan. Hal ini terlihat dari angka kemiskian di perkotaan sebesar 2,78 % pada bulan maret 2016 dan angka kemiskinan di pedesaan berada pada angka 7,72 %. hal ini terjadi karena

garis kemiskinan di desa lebih tinggi berada pada angka 546.998 pada Maret 2016 jika di bandingkan dengan garis kemiskinan di perkotaan yang berada pada angka 521.773 . Garis kemiskinan yang tinggi ini disumbang dari masih tingginya tingkat harga komoditas pangan dan non pangan yang berada di pedesaan. Kemudian garis kemiskinan provinsi kepulaun Bangka Belitung juga merupakan garis kemiskinan tertinggi di indonesia yang berada pada angka 534.229. sehingga untuk menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan dengan mengendalikan angka inflasi komoditas pangan dan non pangan.

7. Tenaga Kerja

Permasalahan di bidang Tenaga Kerja antara lain :

a Meningkatnya tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hal ini terlihat dari angka pengangguran pada Agustus 2015 berada pada angka 6,29 % dan mengalami peningkatan terus menerus jika dibandingkan dengan angka pengangguran pada Agustus 2013 dan Agustus 2014 yang masing-masing berada pada angka 3,70 % dan 5,14 %. Hal ini terjadi dikarenakan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor pertambangan dan sektor pertanian dimana kedua sektor tersebut merupakan penyumbang tenaga kerja terbesar dalam menggerakan perekonomian daerah. Hal ini terlihat dari data Februari 2016 sektor pertanian dan pertambangan masing-masing menyumbang tenaga kerja sebesar 32 % dan 11,27 %.

b Masih rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, serta kesejahteraan pekerja.

c Masih kurangnya kualitas tenaga kerja, produktifitas tenaga kerja, kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

a. Masih belum optimalnya Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender hal ini terlihat dari TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) penduduk perempuan tahun 2015 mencapai 56,26% naik dibandingkan tahun 2014 hanya sebesar 43,97%. Sedangkan tingkat pengangguran perempuan sebesar 8,21% lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran laki-laki sebesar 5,27%. Kemudian juga terlihat dari masih adanya disparitas antara angka harapan hidup laki-laki dan perempuan dimana untuk laki-laki berada pada angka 68,01 Tahun dan perempuan berada pada angka 71,85 Tahun, sedangkan untuk rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki terlihat laki-laki berada pada angka 7,99 Tahun dan Perempuan 7,14 tahun, dan untuk pengeluaran perkapita antara perempuan dan laki-laki terjadi ketimpangan yang sangat tinggi di mana laki-laki berada pada angka Rp. 17.670.000/tahun dan perempuan berada pada angka Rp.8.232.000/tahun berdasarkan data.

b. Masih adanya kesenjangan atau ketimpangan di dalam menjamin hak anak dalam mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan hal in terlihat dari hak kelangsungan hidup anak berada pada angka 83,60, Hak Perlindungan anak berada pada angka 77,64; Hak Tumbuh Kembang Anak berada pada angka 65,74, hak partisipasi anak berada pada angka 80,23 dan hak identitas anak berada pada angka 93,05 berdasarkan data Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) tahun 2015.

c. Masih tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta perdagangan terhadap perempuan dan anak;

d. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

9. Pangan

Permasalahan di bidang Pangan antara lain :

a. Di sub sektor pertanian produksi padi masih tergantung pada musim (tadah hujan) denagn ladang dan gaga rancah pada musim hujan. diarahkan pada produksi padi ladang. Situasi ini membawa permasalahan tersendiri, yaitu: *pertama*, produktivitas relatif lebih rendah dari produktivitas padi sawah. Kondisi ini menggambarkan inefisiensi dalam pemanfaatan lahan untuk penanaman dengan menggunakan sistem padi ladang; *kedua*, sistem ladang berpindah yang dijalankan oleh mayoritas petani tradisional bisa mengganggu kelestarian dan produksi hutan karena pembukaan ladang baru dilakukan melalui pembabatan atau pembakaran hutan.

b. Produksi bahan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih jauh di bawah kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga perlu mendatangkan dari daerah lain sehingga sewaktu-waktu bisa mengancam ketahanan pangan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Belum adanya perhatian serius yang menyangkut diversifikasi vertikal dan horizontal atas tanaman palawija yang sebenarnya dapat dikembangkan dengan baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

d. Adanya kesulitan ditingkat petani untuk melakukan akses ke pasar atas komoditi yang dihasilkannya maupun untuk memperoleh pupuk dan pestisida.

e. Pembangunan prasarana fisik pendukung pertanian padi sawah yang dilakukan selama ini kurang memberi manfaat nyata dalam mendorong peningkatan produksi padi sawah.

f. Masih lemahnya kemampuan produksi pangan lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata, dan terjangkau.

10. Pertanahan

Permasalahan di bidang Pertanahan antara lain :

a. Masih lemahnyan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah bagi masyarakat.

b. Ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan masyarakat

c. Belum optimalnya pelayanan tata kelola pertanahan kepada masyarakat

d. Masih kurangnya ketersedian tanah bagi kepentingan pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat

11. Lingkungan Hidup

Permasalahan di bidang Lingkungan Hidup antara lain :

a. Kurangnya pemahaman pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, yang ditunjukkan dengan masih maraknya kegiatan penambangan liar/TI dan penebangan liar *(ilegalloging)*.
b. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dalam menangani masalah-masalah perusakan alam yang lintas sektoral dan lintas wilayah. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya program atau kegiatan kerjasama dengan kabupaten atau provinsi lain.
c. Perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan karakteristik wilayah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah yang masih kaya akan SDA. Sumberdaya alam tersebut merupakan salah satu modal dasar bagi pengembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apabila kebijakan pembangunan yang dibuat hanya mengejar peningkatan ekonomi semata maka yang terjadi adalah perusakan lingkungan. Oleh sebab itu perumusan kebijakan pembangunan harus berwawasan lingkungan sehingga kelestarian sumberdaya alam tetap terjaga.
d. Pengelolaan SDA seperti sumberdaya tambang, yang masih mengabaikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas-kuantitas SDA.
e. Kurang berfungsinya aparatur penegak hukum dalam menindak para penjahat lingkungan dapat mengakibatkan makin maraknya kegiatan perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat mengancam keberadaan SDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain :

a. Masalah struktur penduduk didominasi oleh usia produktif, yaitu pada umur 15–64 tahun atau sekitar 66,25% dari total penduduk. Ini memberikan implikasi bahwa pada masa 20 tahun ke depan akan terjadi peningkatan beban penduduk usia tua, yaitu umur 60 tahun atau lebih.
b. Dalam jangka panjang terjadi peningkatan kepada struktur penduduk yang semakin menua (*aging population*). Hal ini disebabkan usia harapan hidup semakin tinggi, sementara pertumbuhan kependudukan rendah.
c. Masih rendahnya pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.
d. Belum optimalnya sistem administrasi kependudukan akan dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

a. Masih adanya desa tertinggal yang harus di intervensi untuk mengelurkannya dari ketertinggalanya hal ini terlihat dari data Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2014 jumlah desa tertinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 12 desa dan desa berkembang berjumlah 52 desa dari total desa berjumlah 309 desa
b. Masih lemahnya kualitas dan kapasitas aparatur desa di dalam menjalakan pembangunan desa

c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi dan sumber daya alam desa dengan basis komoditas lokalnya masing-masing

d. Belum maksimlanya pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

a. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk sehingga perlu lakukan pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.

b. Permasalahan demografi yang selama ini dialami adalah terkait dengan kualitas, kemampuan, kepadatan penduduk yang semakin tinggi, terpusat di perkotaan dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta tidak berkorelasi dengan perkembangan potensi ekonomi. Khusus untuk Kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah terpadat berpotensi terhadap tingginya beban permasalahan perkotaan yang dihadapi.

c. Masih rendahnya penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

d. Permasalahan berkaitan dengan migrasi seperti yang terjadi di daerah lain selalu berkaitan dengan kesempatan kerja. Peluang pekerjaan merupakan magnet atau daya tarik terhadap terjadinya migrasi masuk ke suatu daerah.

15. Perhubungan

Permasalahan di bidang Perhubungan antara lain :

a. Belum optimalnya Pengembangan transportasi laut dan udaradalam mendukung pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena karakteristik daerah yang tidak berbatasan darat secara langsung dengan daerah lain.

b. Belum optimlanya penataan Transportasi darat termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi, dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa, dan perdagangan.

c. Masih sempitnya ruas jalan yang menghubungkan antar kabupaten-kota untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi jangka panjang.Lalu lintas antar kabupaten diprediksikan akan meningkat seiring dengan lancarnya arus barang dan jasa dari pelabuhan ke daerah yang jauh dari pelabuhan.

d. Belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah.

16. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan di bidang Komunikasi dan Informatika antara lain :

a. Kurangnya pertimbangan ekonomis untuk pengembangan jaringan komunikasi dengan melihat situasi lapangan di mana penduduknya tidak banyak dan sangat tersebar

b. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi didalam memfasilitasi dan menjalankan pembangunan baik dari sisi pemerintahan maupun dunia usaha
c. Masih lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan pembangunan dengan basis sistem informasi
d. Masih adanya wilayah blank spot yang tidak terakses dengan jaringan komunikasi atau teknologi informasi
e. Masih banyaknya desa yang belum melek terhadap terhadap teknologi informasi
f. Masih belum optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan darah kepada masyarakat

17. Koperasi Usaha Kecil dan menengah

Permasalahan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

a. Masih lemanya Koperasi dan UKM pada upaya untuk menjadikan Koperasi dan UKM menjadi pelaku ekonomi yang berbasis TI (Teknologi Informasi) dan kuat secara kelembagaan serta jaringan kerja yang luas dalam upaya mendukung visi agri-bahari.
b. Masih kurangnya stimulus-stimulus bantuan modal dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan, dan pelatihan manajemen dalam pengembangan koperasi dan UMKM.
c. Masih sedikitnya koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.
d. Masih adanya koperasi yang tidak aktif dalam menggerakan perekonomian masyarakat

18. Penanaman Modal

Permasalahan di bidang Penanaman Modal antara lain :

a. Masih rendahnya tingkat investasi yang dilakuan oleh para investor dalam mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
b. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mutlak diciptakan.
c. Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

19. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain :

a. Masih kurangnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik.
b. Masih belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan di dalam mendukung pembangunan daerah;
c. Masih lambatnya peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat guna mendukung citra dan jati diri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

16. Statistik

Permasalahan di bidang Statistik antara lain :

a. Masih belum tersedianya data yang valid dan tepat waktu dalam melihat hasil pembangunan dan merencanakan pembangunan Daerah
b. Masih lemahnya kesadaran dan kulitas sumber daya manusia di dalam menyiapkan kebutuhan data untuk pembangunan Daerah
c. Belum optimalnya koordinasi dan pemberian reward atau punishment didalam pelaksanaan penyediaan data untuk pembangunan Daerah

17. Persandian

Permasalahan di bidang Persandian antara lain :

a. Belum optimalnya pengelolahan tata kelola persandian dalam mendukung kinerja pemerintah daerah
b. Belum teroprasionalnya secara maksimal koordinasi persandian antar pemerintah daerah dan pusat didalam menjalankan tugas pemerintahan daerah

18. Kebudayaan

Permasalahan di bidang Kebudayaan antara lain :

a. Masih belum optimalnya pengembangan budaya lokal yang diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. serta masih lemahnya Nilai luhur yang berkembang di masyarakat seperti religius, kebersamaan, persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata kepemerintahan yang baik.
b. Masih kurangnya Pembangunan jatidiri melalui proses transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya dan adat istiadat leluhur yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun dan tidak bertentangan dengan budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.
c. Masih lemahnya Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi IPTEK dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya leluhur serta kurangnya minat masyarakat terhadap IPTEK melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi IPTEK.
d. Masih belum optimlanya Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional, Pengembangan IPTEK serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.

19. Perpustakaan

Permasalahan di bidang Perpustakaan antara lain :

a. Belum optimalnya sistem tata kelola perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, perpustakaan sekolah serta perpustakaan desa dalam mendukung pengentasan buta huruf, membudayakan gemar membaca serta peningkatan pengetahuan masyarakat
b. Masih kurangnya tenaga pustakawan dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dalam mendukung pengembangan pembangunan perpustakaan

20. Kearsipan

Permasalahan di bidang Kearsipan antara lain :

a. Belum optimalnya sistem tata kelola kearsiapan daerah dalam mendukung penataan kearsiapan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mendukung pembangunan dearah.
b. Masih kurangnya tenaga arsiparis dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsiapan dalam mendukung pengembangan pembangunan perpustakaan.

B. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Masih rendahnya pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, kemampuan, dan kapasitas petani ikan dan nelayan dalam memenuhi kebutuhan mutu dan gizi pangan mereka.
b. Masih rendahnya produksi perikanan untuk diekspor dalam meningkatkan penerimaan daerah.
c. Masih rendahnya produktifitas dalam peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
d. Belum optimalnya produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak, dan air tawar (jika memungkinkan di lahan-lahan bekas pertambangan), serta usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai.

2. Pertanian

a. Pada sub sektor perkebunan, di luar perkebunan sawit, tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, bahkan beberapa di antaranya menunjukkan penurunan. Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan potensi besar yang perlu digarap secara lebih intensif. Untuk maksud tersebut maka keberadaan perkebunan besar sangat dibutuhkan sehingga efisiensi pemanfaatan hasil perkebunan dan akses dapat diperoleh.
b. Belum optimalnya populasi dan produksi ternak di semua kabupaten/kota yang ada. Di sisi lain produksi ternak secara komersil masih belum memadai. Kebanyakan masyarakat masih menempatkan peternakan sebagai aktivitas sampingan. Kondisi ini dapat menimbulkan kerawanan pangan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
c. Belum optimalnya Pembangunan bidang pertanian yang diarahkan pada upaya untuk menjadikan sektor pertanian dalam tahap awal sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat menggantikan sektor pertambangan.
d. Masih rendahnya produktivitas usaha perkebunan, serta penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi hasil perkebunan.
e. Masih rendahnya kesejateraan petani yang terlihat dari nilai tukar petani serta masih rendahnya Peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian dan perkebunan
f. Masih lemahanya Pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petani dan kelompok tani dalam meningkatkan kesejateraan petani.

3. Pariwisata

   a. Rendahnya fasilitas kredit yang disediakan perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk menunjang kegiatan sektor pariwisata.

   b. Peran pemerintah daerah dalam upaya pengembangkan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari belum tersedianya fasilitas dan sarana yang mendukung pengembangan kepariwisataan seperti fasilitas pusat informasi pariwisata daerah, fasilitas dan jasa tranportasi yang mendukung pergerakan wisatawan untuk menuju ke obyek-obyek wisata dan sarana infraktruktur seperti jaringan listrik dan telekomunikasi.

   c. Peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan masih minim, di mana seharusnya masyarakat lokal diberikan kesempatan seluas-luasnya dan menjadi prioritas utama untuk berusaha dan terlibat langsung di dalamnya.

   d. Sebagian obyek wisata belum dikelola secara baik, dan belum memiliki fasilitas penunjang yang memadai. Serta aksesibiltas menuju ke obyek-obyek wisata masih terbatas dan jarak tempuh perjalanan yang jauh antara obyek wisata yang satu ke obyek yang lain membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.

   e. Sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan belum dapat berperan secara maksimal baik dari segi jumlah maupun kualitas serta Belum optimalnya pembangunan citra daerah wisata yang akan memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

   f. Masih belum optimalnya Pengembangan kepariwisataan dilakukan secara arif dan berkelanjutan terutama memanfaatkan pesona keindahan alam dan potensi daerah sebagai wilayah bahari yang dikelilingi oleh pantai nan indah. Serta masih belum optimlanya pengembangan Potensi wisata yang di fokuskan kepada pengembangan wisata sejarah dan wisata budaya.

4. Kehutanan

   a. Masih rendahnya pendapatan daerah yang di sumbang dari sektor kehutanan

   b. Belum optimlanya pengelolan hasil hutan dan kawasan hutan dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat

   c. Belum berkembangnya industri hilir produk hasil kehutanan untuk meningkatkan pembangunan daerah

5. Energi dan Sumber daya Mineral

   a. Permasalahan utama dalam sektor pertambangan dan penggalian adalah berkaitan dengan sifat dari komoditas pertambangan dan penggalian, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dengan menipisnya deposit komoditas yang telah dieksploitasi seperti yang dialami pada komoditas timah, maka kontribusi sektor ini terhadap PDRB, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penerimaan pemerintah dengan sendirinya menurun. Demikian juga, komoditas pertambangan lain untuk menggantikan komoditas unggulan selama ini, belum diperoleh secara ekonomis. Salah satu kendala dalam ekplorasi komoditas pertambangan yang baru adalah timbul dari masalah birokrasi perizinan.

   b. Permasalahan yang ada dalam sektor listrik, gas dan air adalah tidak meratanya pengembangan sektor ini di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan ini merupakan konsekuensi logis antara besarnya investasi yang dibutuhkan dalam sub sektor listrik dengan pendapatan yang diharapkan, meskipun PLN membawa misi-misi pembangunan tertentu. Pengembangan listrik di wilayah yang

merupakan ibukota kabupaten terutama didorong untuk menunjang penambahan sarana dan prasarana pemerintah, bukan didorong oleh kegiatan usaha.

6. Perdagangan
   a. Masih belum optimalnya perdagangan yang dilakukan dalam mendukung pemasaran produk-produk lokal keluar daerah maupun keluar negeri.
   b. Masih rendahnya kualitas produk daerah yang akan di pasarakan keluar daerah sehingga mempengaruhi daya saing produk lokal di luar.
   c. Masih lemahnya sistem tata kelola perdagangan dalam daerah untuk memasarkan produk-produk yang dihasilakan didaerah untuk dipasarkan kedalam daerah sendiri.
   d. Masih tingginya ketergantung daerah terhadap produk-produk yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik kamoditas pangan mau pun komoditas non pangan.
   e. Masih kurangnya jiwa enterprenaur aparatur pemerintah didalam memfasilitasi perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat.

7. Perindustrian
   a. Sebagian besar masyarakat masih menganggap penjualan langsung bahan baku yang berasal dari sektor pertanian dan kehutanan lebih menguntungkan dan kurang beresiko dibanding mendirikan industri pengolahan.
   b. Masih rendahnya Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir).
   c. Masih lemahnya hubungan antarindustri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya.
   d. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menunjang keberadaan industri pengolahan yang berskala besar.
   e. Pengembangan industri yang masih terfokus kepada pengembangan industri smelter timah
   f. Masih belum optimalnya dalam pengembangan industri yang berbasis pariwisata.

8. Transmigrasi
   a. Tidak tersedianya lagi lahan untuk pembukaan kawasan transmigrasi baru
   b. Masih belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi yang telah ada baik dalam hal penyedian sarana dan prasaran dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi

Tabel II.143 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

No.	Isu Penting dan Permasalahan Mendesak		
	Tingkat Nasional	**Tingkat Provinsi**	**Lingkungan Eksternal lainnya**
(1)	(2)	(3)	(4)
	Partisipasi penduduk dlm pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu terus ditingkatkan.	Tingginya angka anak putus sekolah (*Drop Out*) khususnya pendidikan menengah	Perkembangan Ekonomi Global
	Perlu upaya sinergis dalam peningkatan kualitas pendidikan kejuruan.	Rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang ekonomi
	Kompetensi guru masih harus ditingkatkan.	Kesempatan yang diberikan pemerintah setempat bagi guru untuk melanjutkan pendidikan formal masih kurang	
	Angka Kematian Ibu (AKI) Masih Tinggi	Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi	
	Disparitas Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Masih Lebar	Angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibawah rata-rata nasional	
	Stunting pada Balita dan Anemia pada Ibu Hamil Masih Tinggi	Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap aspek kesehatan lingkungan.	
	Persyaratan pengajuan kredit kepemilikan rumah yang belum mengakomodir Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Masih rendahnya kepemilikan rumah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin	
	Keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	Penanganan kawasan kumuh yang belum terintegrasi antara sektoral serta pemerintah daerah kab/kota	
	Kapasitas & manajemen layanan air minum belum optimal	Masih rendahnya kinerja pelayanan air bersih dan Krisis air baku karena pencemaran yang cukup tinggi akibat aktivitas tambang timah rakyat	
	Kesadaran terhadap pentingnya sanitasi masih sangat rendah	Belum terintegrasi penyediaan air minum dan sanitasi dalam penyediaan pengembangan perumahan	
		Kondisi kemantapan menurun dengan meningkatnya Kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam & anomali cuaca	Dampak pemanasan Global (Global Warming)

No.	Isu Penting dan Permasalahan Mendesak		
	Tingkat Nasional	**Tingkat Provinsi**	**Lingkungan Eksternal lainnya**
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kinerja sektor industri pengolahan dan ekspor mengalami penurunan	Belum optimalnya industri pengolahan berbasis sumber daya alam (karet lada sawit dll)	Meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor keuangan dalam mendukung pembangunan/ pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
		Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal serta rendahnya minat investor untuk berinvestasi	
	Masih rendahnya daya saing industri pengolahan yang didukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja yang produktif dan kompeten	Tingginya ketergantungan daerah terhadap produk-produk dan bahan baku yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik kamoditas pangan mau pun komoditas non pangan	Pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan
		Lemahnya Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi IPTEK dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya leluhur serta kurangnya minat masyarakat terhadap IPTEK	
	Dibutuhkan penambahan kesempatan kerja > 2 juta dalam setahun	Kurangnya kualitas tenaga kerja, produktifitas tenaga kerja, kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.	Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif
		Meningkatnya tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Meningkatkan penyediakan subsidi operasi, memperluas area layanan, menambah trip perintis untuk Angkutan Laut, ASDP, Udara dan Kereta Api	Belum optimalnya Pengembangan transportasi laut dan udara yang murah dalam mendukung pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pembangunan sistem dan fasilitas angkutan umum massal yang modern, maju, aman, nyaman dan harga yang terjangkau.	Belum optimalnya penataan Transportasi darat termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi, dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa, dan perdagangan	

No.	Isu Penting dan Permasalahan Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang	Adanya desa berkategori desa tertinggal. hal ini terlihat dari data Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2014 jumlah desa tertinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 12 desa dan desa berkembang berjumlah 52 desa dari total desa berjumlah 309 desa	
		Masih terjadi Kesenjangan pembangunan sosial dan pembangunan antar wilayah	
	Masih kurangnya peran DPRD dalam mewakili aspirasi masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi masih berfluktuatif, pada tahun 2015 di 72,31 dan pada tahun 2014 pada 75,32	Terwujudnya Proses Positif Konsolidasi Demokrasi
		Reformasi birokrasi perlu ditingkatkan melalui peningkatan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan mengoptimalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat	



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah,mengimplementasikan program dan isu strategis daerah, serta sebagai pedomandalam merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari. Hal ini sesuai dengan misi Pertama RPJPD Perubahan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagia pencari kerja pada semua sektor pembangunan.
3. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
4. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
5. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta kemudahan perizinan dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
6. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.
8. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global.
9. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata
10. Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
11. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;

12. Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah produk pertanian;
13. Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
14. Peningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis kehutanan;
15. Pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW;
16. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
17. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
18. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
19. Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam;
20. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, sarana prasarana dan promosi pengembangan destinasi wisata.

Guna menyusunan rumusan kebijakan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari misi tersebut, maka perlu dilihat terlebih dahulu gambaran umum tentang perkembangan perekonomian Bangka Belitung serta proyeksinya untuk tahun 2018 dan 2019.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikatortingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi didaerah/wilayah tersebut.

PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2014-2016 sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.1 menunjukkan trend yang meningkat. Secara nominal PDRB pada tahun 2014 sebesar Rp44.159,4 milyar, meningkat menjadi sebesar Rp45.961,5milyar pada tahun 2015 dan sebesar Rp47.853,1 milyar pada tahun 2016.

Tabel III.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017*)	2018*)
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.254.342	8.747.275	9.119.9	9.735.812	10.500.073
B.	Pertambangan dan Penggalian	6.354.052	6.464.379	6.495.453	6.553.867	6.612.851
C.	Industri Pengolahan	10.270.405	10.400.640	10.668.665	11.013.869	11.515.000
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	34.398	37.931	44.9	51.691	61.947
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	7.678	8.119	8.6	9.120	9.708
F.	Konstruksi	3.552.379	3.760.832	4.018.908	4.360.010	4.759.387
G.	Perdagangan Besar dan EceranMotor	6.140.681	6.402.146	6.731.079	7.115.692	7.592.443
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.570.750	1.658.277	1.749.624	1.865.729	2.004.698
I.	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	1.000.562	1.034.807	1.084.610	1.145.101	1.208.997
J.	Informasi dan Komunikasi	790.872	848.950	926.926	1.027.450	1.138.929
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	766.645	799.974	858.860	930.652	1.008.455
L.	Real Estate	1.403.929	1.441.959	1.494.832	1.570.762	1.672.281
M, N.	Jasa Perusahaan	115.692	120.342	120.418	122.281	124.176
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.149.841	2.337.095	2.490.155	2.755.297	3.007.407
P.	Jasa Pendidikan	964.923	1.060.310	1.144.755	1.257.264	1.382.613
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	500.550	533.850	559.519	592.108	625.030
R,S.T.U	Jasa Lainnya	281.710	304.577	338.508	377.571	421.142
PDRB		**44.159.440**	**45.961.462**	**47.852.692**	**50.484.274**	**53.645.138**

Sumber: 2014-2016BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2017-2018 Proyeksi Bappelitbangda*

Dilihat dari perkembangan sektoral, sektor-sektor ekonomi utama seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, secara nominal juga nilainya semakin meningkat. Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor dengan kontibusi terbesarterhadap PDRB, yaitu rata-rata sebesar 22 persen meningkat nilainya dari sebesar Rp10.270,4 milyar pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp10.400,6 milyar pada tahun 2015 dan sebesar Rp10.668,7 milyar pada tahun 2016. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor dominan kedua (19 persen terhadap PDRB) juga mengalami perkembangan yang sama, yaitu dari sebesar Rp8.254,3 milyar pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp8.747,3 milyar pada tahun 2015 dan sebesar Rp9.116,9 milyar pada tahun 2016.

Sejalan dengan perkembangan kedua sektor di atas, sektor pertambangan dan peggalian sebagai salah satu sektor dominan dalam perekonomian daerah juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2014 sebesar Rp6.354,1 milyar menjadi sebesar Rp6,464,4 milyar dan Rp6.495,4 milyar pada tahun 2015 dan 2016. Untuk sektor perdagangan besar dan eceran yang rata-rata berkontribusi sebesar 13 persen terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar Rp6.140,7 milyar pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp6.402,1 milyar pada tahun 2015 dan sebesar Rp6.731,1 milyar pada tahun 2016.

Dengan demikian, kontribusi dari keempat sektor terhadap PDRB rata-rata sebesar 70 persenatau rata-rata mencapai sebesar Rp33.497,2 milyar, sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya rata-rata hanya sebesar 30 persen atau rata-rata sebesar Rp14.355,9 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan dari sektor industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan besar dan ecceran, sehingga sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pendukung dan perkembangan serta kemajuannya sangatlah ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan dari keempat sektor dominan.

Dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang semakin berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha, diperkirakan perekonomian daerah sepanjang tahun 2017 dan 2018 akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, diperkirakan PDRB akan meningkat menjadi sebesar Rp50.484,3 milyar dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp53.645,1 milyar.

Trend peningkatan PDRB sepanjang tahun 2017 dan 2018, diperkirakan masih dipengaruhi oleh trend peningkatan pada sektor industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya diperkirakan masih sebagai sektor pendukung dari keempat sektor dominan tersebut.

Sementara itu, dilihat dari nilai nominal PDRB berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (region) digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah sepanjang tahun 2014-2016 juga menunjukkan peningkatan.Sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.2 dapat dijelaskan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, di mana pada tahun 2014 sebesar Rp22.396,7 milyar meningkat menjadi sebesar Rp23.619,4 milyar pada tahun 2015 dan sebesar Rp24.999,7 milyar pada tahun 2016.

Komponen pengeluaran terbesar kedua yang berkontribusi terhadap PDRB adalah ekspor, namun sejalan dengan penurunan harga komoditas ekspor di pasar dunia seperti karet dan CPO memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekspor Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada tahun 2014 nilai ekspor mencapai sebesar Rp27.201,5 milyar menurun menjadi sebesar Rp21.882,0 milyar pada tahun 2015dan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan menjadi sebesar Rp18.198,5 milyar.

Tabel III.2 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun2014-2018(Juta rupiah)

	Pengeluaran	2014	2015	2016*)	2017*)	2018*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	22.396.670	23.619.430	24.999.657	26.553.695	28.115.052
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	261.768	280.337	305.879	333.578	364.434
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.470.518	4.668.367	4.826.746	5.047.835	5.325.466
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.408.028	9.823.533	10.435.995	11.284.001	12.220.573
5	Perubahan Inventori	889.693	880.047	629.171	636.070	648.441

	Pengeluaran	2014	2015	2016*)	2017*)	2018*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Ekspor Luar Negeri	27.201.531	21.882.041	18.198.542	18.414.864	19.184.900
7	Impor Luar Negeri	(1.038.976)	(1.107.711)	(18.198.542)	(1.934.065)	(2.010.848)
8	Net Ekspor Antar Daerah	(19.425.044)	(14.084.581)	(1.703.852)	(9.850.940)	(10.202.618)
	PDRB	**44.159.440**	**45.961.462**	**79.298.384**	**50.483.628**	**53.643.908**

Sumber: 2014-2016 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2017-2018 Proyeksi Bappelitbangda*

Untuk komponen investasi (dilihat dari nilai pembentukan modal tetap bruto) secara nominal juga mengalami peningkatan sepanjang periode tahun 2014-2016, yaitu masing-masing sebesar Rp9.408,0 milyar, sebesar Rp9.823,5 milyar dan sebesar Rp10.4356,0 milyar. Sejalan dengan peningkatan komponen investasi, komponen konsumi pemerintah juga mengalami peningkatan sepanjang periode yang sama, yaitu sebesar Rp4.470,5 milyar pada tahun 2014meningkat menjadi sebesar Rp4.668,4 milyar pada tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi sebesar Rp4.826,7 milyar pada tahu 2016.

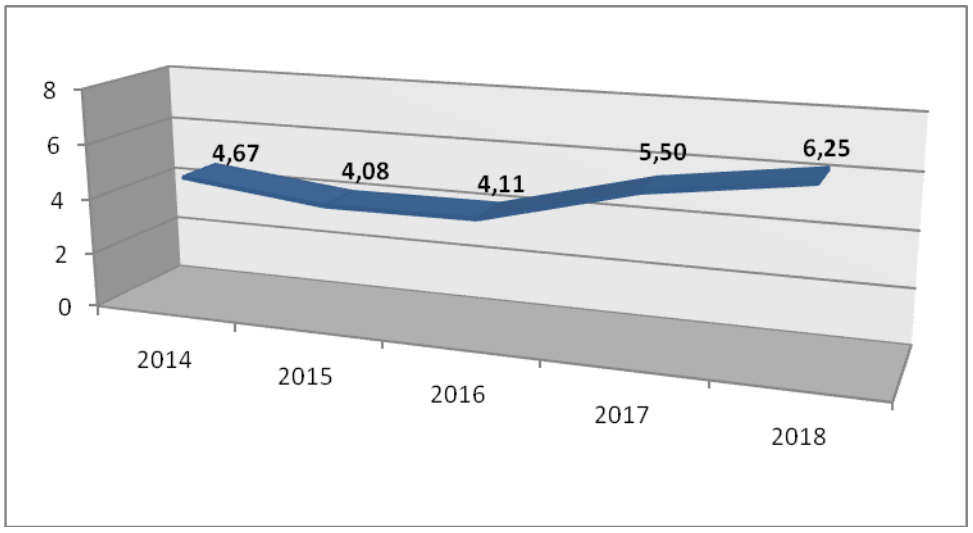
Pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih terus menguat,hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya tingkat keyakinan konsumen dan pelaku usaha yang masih terlihat optimisme.Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada tahun 2017 dan 2018diperkirakan akan terjadi, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor *rowmaterials*sumber daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi, sehingga dengan adanya penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis akan memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi, ekspor diperkirakan juga akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian dunia. Penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakanmulai tumbuh secara positif. Untuk memperkuat perkembangan beberapa komponen pengeluaran tersebut, pengendalian terhadap neraca perdagangan juga harus dilakukan dengan menjaga aktivitas impor lebih rendah daripada ekspor.

3.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun 2014-2016 sebagaimana diperlihatkan pada grafik III.1 cenderung mengalami perlambatan, di mana pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 4,67 persen menurun menjadi sebesar4,08 persen pada tahun 2015 dan sedikit meningkat menjadi sebesar 4,11 persen pada tahun 2016. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terjadinya perlambatan ekonomi global dan turunnya

harga beberapa komoditas ekspor seperti karet dan CPO. Penurunan harga minyak mentah duniajuga membawa dampak bagi perekonomian wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2017 dan 2018, sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.3, laju pertumbuhan ekonomi Kepulaun Bangka Belitung diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,50 persen dan 6,26 persen. Pertumbuhan utama masih ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikananyang diperkirakan tumbuh sebesar 6,90 persen dan 7,85 persen, diikuti olehpertumbuhan di sektor industri pengolahan sebesar 3,10 persen dan 4,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi daerah masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 5,86 persen, diikuti oleh investasi yang tumbuh positif sebesar 6,13 persen dan 8,30 persen. Sejalan dengan perbaikan harga komoditas ekspor, komponen ekspor juga diperkirakan akan tumbuh positif sebesar 1,25 persen dan 4,18 persen.



Grafik III.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Sumber : 2014-2016 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2017-2018 Proyeksi Bappelitbangda*

Tabel III.3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2018

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017*)	2018*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.22	5.86	4,23	6,90	7,85
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.99	1.74	0,48	0,90	0,90
C.	Industri Pengolahan	1.25	1.35	2,58	3,10	4,55
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9.09	5.77	18,34	19,84	19,84
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	4.95	5.74	5,52	6,45	6,45
F.	Konstruksi	4.03	5.54	6,86	8,86	9,16
G.	Perdagangan Besar dan EceranMotor	5,03	4.07	5,14	6,50	6,70
H.	Transportasi dan Pergudangan	5.79	5.78	5,51	6,25	7,45
I.	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	7.47	3.42	4,81	5,58	5,58
J.	Informasi dan Komunikasi	6.85	7.34	9,18	10,85	10,85
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.26	4.35	7,36	8,36	8,36

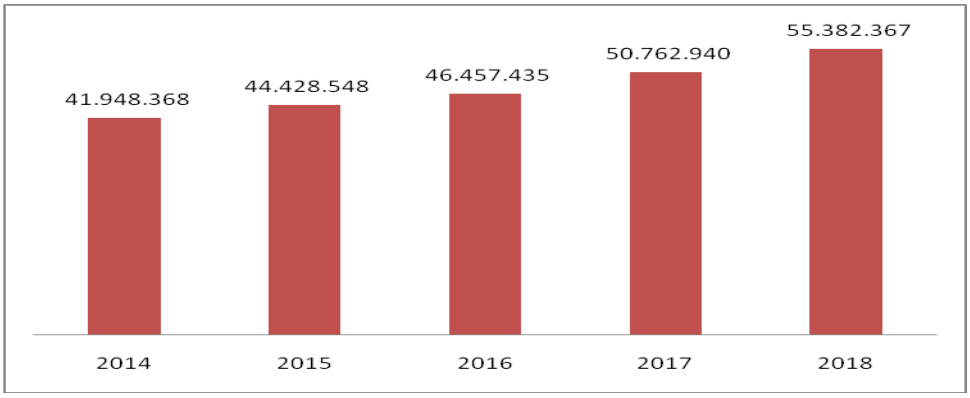
Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017*)	2018*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L.	Real Estate	6,95	2.86	3,67	4,18	6,46
M, N.	Jasa Perusahaan	7.01	4.02	0,06	1,55	1,55
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,72	9.78	6,55	8,95	9,15
P.	Jasa Pendidikan	6,77	9.75	7,96	9,67	9,97
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.31	6.23	4,82	5,56	5,56
R,S.T.U	Jasa Lainnya	7.95	8.12	11,14	11,54	11,54
PDRB		**4.67**	**4.08**	**4,11**	**5,50**	**6,26**

Sumber: 2014-2016 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2017-2018 Proyeksi Bappelitbangda*

3.1.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas

Dalam kurun waktu 2014-2016, sebagaimna diperlihatkan pada grafik III.2 PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, PDRB perkapita sebesar Rp41.948.368,- meningkat menjadi sebesar Rp44.428.548,- pada tahun 2015 dan meningkat menjadi sebesar Rp46457.435,-. Sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah yang tumbuh positif, PDRB perkapita pada tahun 2017-2018 diperkirakan akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp50.762.940,- dan sebesar Rp55.382.367,-.



Grafik III.2 PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 (dalam Rupiah)

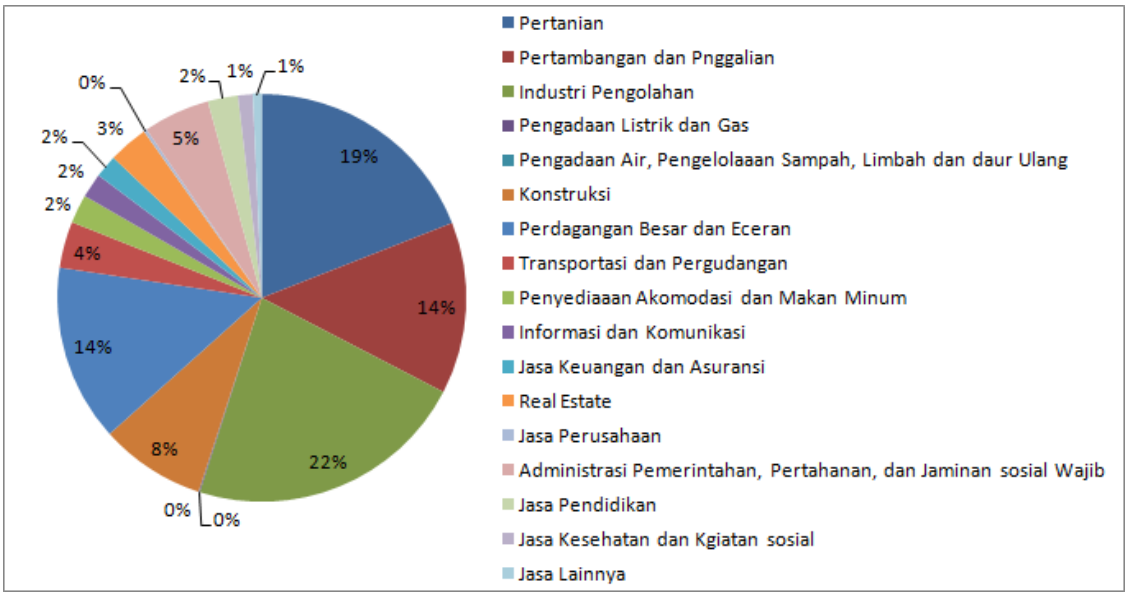
Sumber: 2014-2015 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2016 - 2018 Proyeksi Bappelitbangda*

3.1.1.4 Struktur Sektor Ekonomi

Untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB dapat dilihat dari perkembangan struktur ekonomi daerah. Dengan mengetahui struktur perekonomian dapat diperoleh informasi terkait sektor-sektor mana saja yangpaling dominan dan potensial untuk dikembangkan.

Struktur perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diperlihatkan pada grafik III.3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 20,21 persen, namun sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai sebesar 21,80 persen. Sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi setelah sektor industri pengolahan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 20,15 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 14,92 persen serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 11,24 persen.

Apabila dicermati lebih secara mendalam memperlihatkan bahwa struktur perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalami pergeseran struktur dari yang sebelumnya didominasi oleh sektor primer (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian), bergeser menjadi didominasi oleh sektor tersier (sektor jasa-jasa) dengan kontribus terhadap PDRB mencapai sebesar 48,4 persen. Sedangkan kontribusi sektor sekunder (sektor industri pengolahan) meskipun secara relatif lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, namun cenderung mengalami peran yang menurun.



Grafik III.3 Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)

Selanjutnya, sepanjang tahun 2017 dan 2018, diperkirakan struktur perekonomian daerah masih tetap sama seperti yang terjadi pada tahun 2016. Namun sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran relatif dominan dengan rata-rata kontribusi terhadap PDRB masing-masing sekitar 20 persen.

Tabel III.4 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2018 (dalam persen)

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017*)	2018*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,24	19,63	20,00	19,54	20,08
B.	Pertambangan dan Penggalian	12,75	12,69	11,89	13,45	12,82
C.	Industri Pengolahan	23,05	21,13	20,06	21,46	20,95
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,11	0,08	0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,43	8,78	8,97	8,42	8,58
G.	Perdagangan Besar dan EceranMotor	13,79	14,16	14,81	13,89	13,87
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,80	4,03	4,05	3,74	3,79
I.	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	2,37	2,39	2,47	2,23	2,25
J.	Informasi dan Komunikasi	1,52	1,55	1,59	1,97	2,01
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,79	1,78	1,84	1,76	1,82
L.	Real Estate	3,26	3,22	3,23	3,10	3,16
M, N.	Jasa Perusahaan	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,42	5,69	5,84	5,61	5,78
P.	Jasa Pendidikan	2,44	2,70	2,91	2,52	2,58
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,12	1,17	1,17	1,22	1,24
R,S.T.U	Jasa Lainnya	0,67	0,70	0,77	0,71	0,73
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: 2014-2016 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2017-2018 Proyeksi Bappelitbangda*

3.1.1.5 Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Distribusi PDRB dari sisi pengeluaran sepanjang periode tahun 2014-2016 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata di atas 50 persen, diikuti oleh komponen ekspor dan investasi yang masing-masing berkontribusi di atas 40 persen dan di atas 20 persen terhadap PDRB. Selain ketiga komponen tersebut, konsumsi pemerintah juga menjadi komponen pengeluaran penentu bagi perkembangan perekonomian daerah dengan rata-rata kontribusi terhadap PDRB di atas 10 persen.

Sejalan dengan uraian di atas, diperkirakan motor penggerak perekonomian daerah pada tahun 2017 dan 2018 perekonomian masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang didorong oleh kekuatan ekspor dan investasi serta konsumsi pemerintah.

Secara lengkap, gambaran mengenai struktur pengeluaran dalam PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada 2014 – 2018 diperlihatkan pada Tabel III.5 di bawah ini.

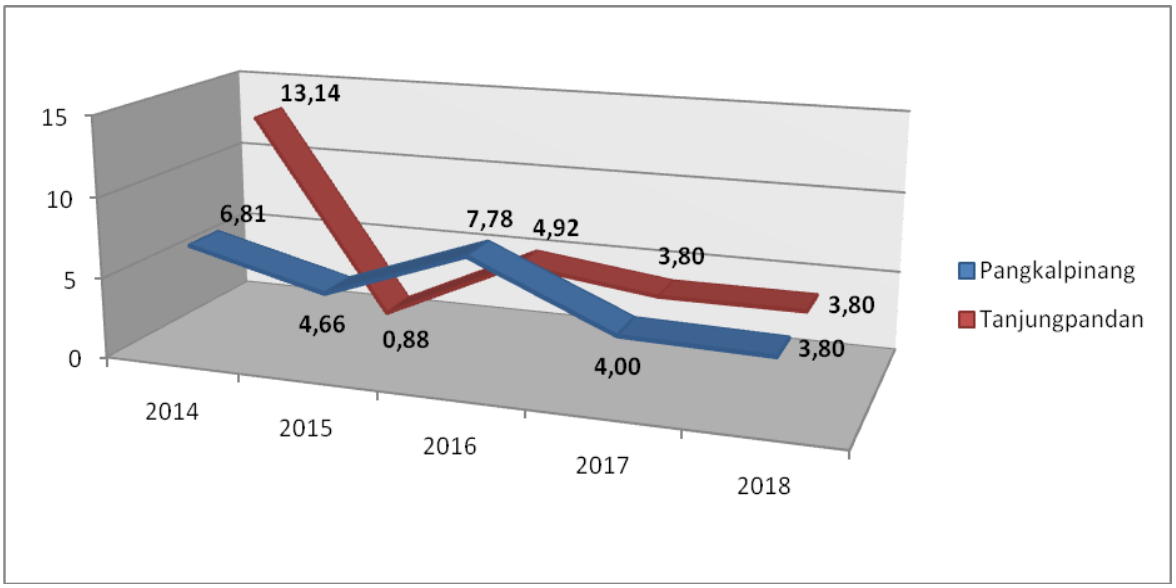
Tabel III.5 Ditribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Beiltung Tahun 2014–2018 (dalam persen)

No	Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*)	2018*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,72	51,39	52,24	52,60	52,41
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,59	0,61	0,64	0,66	0,68
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,12	10,16	10,09	10,00	9,93
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,30	21,37	21,81	22,35	22,78
5	Perubahan Inventori	2,01	1,91	1,31	1,26	1,21
6	Ekspor Luar Negeri	61,60	47,61	38,03	36,48	35,76
7	Impor Luar Negeri	(2,35)	(2,41)	(3,56)	(3,83)	(3,75)
8	Net Ekspor Antar Daerah	(43,99)	(30,64)	(20,56)	(19,51)	(19,02)
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: 2013-2016 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2017 dan 2017 Proyeksi Bappeda*

3.1.1.6 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2015, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 4,66 persen dan Tanjungpandan mengalami inflasi sebesar 0,88 persen *year on year* (Desember 2015 terhadap Desember 2014).



Grafik III.4 Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2014-2018

Sumber: 2014-2016 (BPS),
**)2017-2018 (Proyeksi Bappelitbangda)*

Tabel III.6 Laju Inflasi Tahunan Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2012-2016

Kelompok Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum	**6,57**	**8,71**	**6,81**	**4,66**	**7,78**
1. Bahan Makanan	8,50	11,08	3.39	6.63	13,49
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok danTembakau	7,95	6,82	8.63	7.92	4,71
3. Perumahan	5,81	9,20	8.85	3.74	3.59
4. Sandang	5,79	1,63	6.61	2.60	7,63
5. Kesehatan	5,19	5,08	8.13	5.50	4,31
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	10,31	3,77	6.56	8,62	4,04
7. Transportasi dan Komunikasi	-0,11	11,17	6.98	-2.04	11,42

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2017

Pada tahun 2017 dan 2018, diharapkan tingkat inflasi dapat ditekan hingga mencapai kisaran 4,0 - 3,8 persen untuk kota Pangkalpinang dan 3,8 persen untuk kota Tanjungpandan. Inflasi merupakan cerminan dari kestabilan nilai mata uang. Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja serta stabilitas ekonomi.

Tabel III.7 Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014-2016

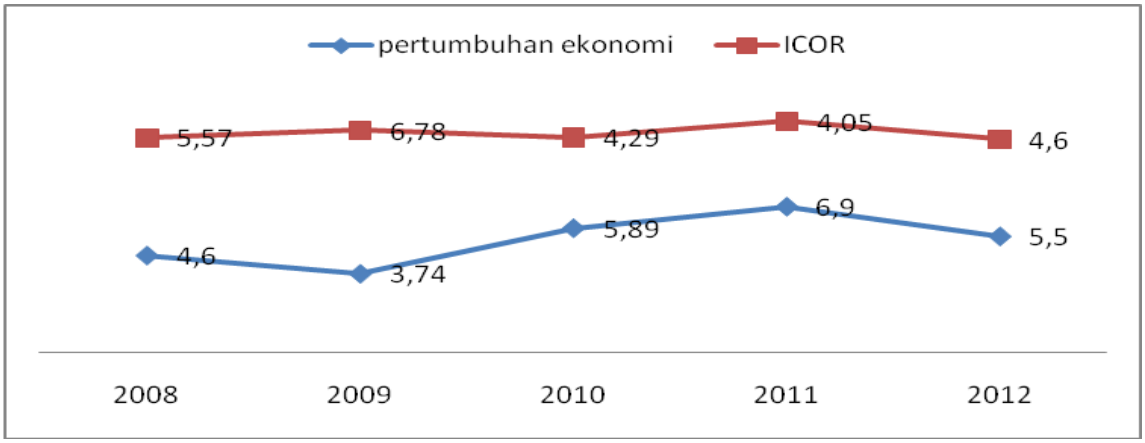
Kelompok Pengeluaran	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Umum	**13.14**	**0.88**	**4,92**
1. Bahan Makanan	21.36	-1.36	2.26
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok danTembakau	6.91	0.88	2.01
3. Perumahan	6.87	0.66	0,17
4. Sandang	12.03	0.08	0.15
5. Kesehatan	4.11	0.16	0.10
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	15.35	0.41	0.18
7. Transportasi dan Komunikasi	20.47	0.05	0.05

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2016

3.1.1.7 ICOR

Tingkat efisiensi suatu perekonomian diukur dengan angka *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR). Suatu daerah memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang semakin efisien jika nilai ICOR-nya semakin kecil yang menunjukkan semakin sedikitnya modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu. Hal ini berarti tingkat produktifitas investasi dan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat, di mana ICOR yang lebih rendah menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi. Tren ICOR diharapkan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yang menunjukkan perbaikan efisiensi aktivitas ekonomi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2009 nilai ICOR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 6,78 sedangkan pertumbuhan ekonomi 3,74 persen. Ini mengindikasikan bahwa di tahun 2009 kegiatan ekonomi kurang produktif salah satunya disebabkan oleh adanya krisis ekonomi dii negara maju. Antara 2009 dengan 2010 terjadi proses perbaikan dari fungsi-fungsi produksi kegiatan ekonomi. Nilai ICOR mulai turun sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,5 persen dengan ICOR sebesar 4,6 persenkondisi ini menggambarkan terjadi perlambatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 yang pertumbuhan ekonominya sebesar 6,9 persen dengan ICOR sebesar 4,05.



Grafik III.5 Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008–2012

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Proyeksi angka ICOR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun selanjutnya diharapkan semakin cenderung untuk turun atau adanya perbaikan produktivitas aktivitas ekonomi diharapkan dapat berdampak langsung terhadap perkembangan perekonomian Bangka Belitung ke arah yang lebih baik. Ini disebabkan semakin membaiknya/mengecilnya nilai ICOR diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas produksi perekonomian daerah (PDRB) yang pada akhirnya dapat mencapai target-target makroekonomi yang telah direncanakan. Pencapaian target-target makroekonomi ini akan bermanfaat dalam pencapaian peningkatankesejahteraan masyarakat yang dicerminkan salah satunya oleh pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

ICOR Kepulauan Bangka Belitung menurut sektor dan sub sektor cenderung bervariasi. Sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertambangan dan penggalian mempunyai ICOR relatif lebih baik dibanding sektor lainnya. Rendahnya angka ICOR sektor pertanian disebabkan oleh proses produksi yang pendek dan kecilnya proporsi investasi dibanding biaya antara (*intermediate cost*) dalam struktur ongkos usaha taninya. Untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran rendahnya ICOR disebabkan oleh perputaran modal yang cepat dan proses produksi yang sangat pendek khususnya subsektor perdagangan dan restoran. Rendahnya angka ICOR sektor pertambangan dan penggalian disebabkan oleh faktor tidak banyaknya investasi baru yang masuk disebabkan karena adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan terkait dengan upaya pembatasan ekspor timah.

3.1.1.8 Tingkat Investasi

Investasi di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyaknya investasi yang ditanamkan oleh dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi daerah.

Pemberdayaan investasi daerah adalah suatu upaya yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah. Realisasi investasi PMA di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.033,25 milyar dan investasi PMDN sebesar Rp 1.023,73 milyar. Hal tersebut sebagaimana yang tergambar pada tabel III.8.

Tabel III.8 Perkembangan Realisasi Investasi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011–2015

Investasi		2011	2012	2013	2014	2015
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMA	Jumlah Proyek	48	46	37	60	76
	Nilai (Rp Milyar)	146,05	59,18	81,52	615,45	1.033,25
PMDN	Jumlah Proyek	7	8	9	8	28
	Nilai (Rp Milyar)	514,40	533,46	543,3	615,45	1.023,73

Sumber: BP2TPM, 2015

Pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan investasi di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan, namun harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri.

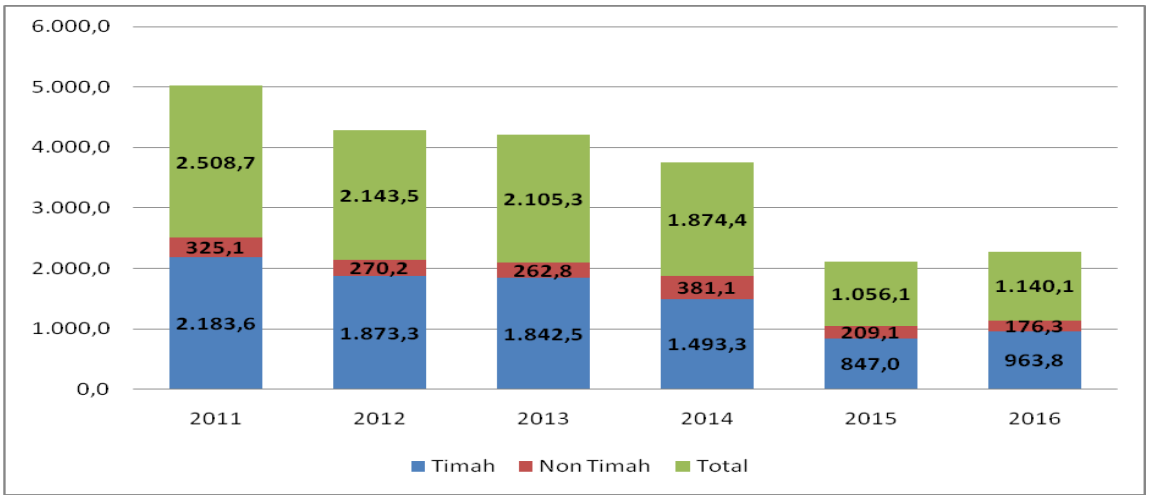
Beberapa kebijakan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Bangka Belitung antara lain adalah; peningkatan kapasitas kelembagaan, menjaga stabilitas sosial dan politik, menjaga stabilitas perekonomian daerah, pengembangan Sumber Daya Manusia dan pembangunan/pengembangan infrastruktur fisik. Selain hal tersebut, upaya dalam rangka menarik investor yang terkait dengan sektor produksi yang menjadi unggulan daerah harus terus dilakukan. Hilirisasi dan industrialisasi terhadap sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan pariwisata merupakan hal yang menjadi prioritas utama.

3.1.1.9 Ekspor dan Impor

Ekspor yang dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan ekspor logam timah. Total ekspor tertinggi sebesar US$ 2.508,7Juta yang terjadi pada tahun 2011 terdiri dari ekspor logam timah sebesar US$ 2.183,9 Jutadan ekspor non logam timah sebesar US$ 325,1 juta. Pada tahun 2016 total eksporbulan Januari s.d. Desember 2016 sebesar US$ 1.140,1 Juta mengalami peningkatan sebesar 7,95 persen dibandingkan Januari

s.d. Desember 2015 sebesar US$ 1.056,0 juta. Peningkatan nilai ekspor tersebut disebabkan oleh naiknya ekspor timah sebesar 13,78 persen dari US$ 847,02 Juta sehingga menjadi sebesar US$ 963,82 Juta sedangkan ekspor non timah mengalami penurunan sebesar 15,6 persen dari US$ 209,06 Juta menjadi sebesar US$ 176,30 juta.

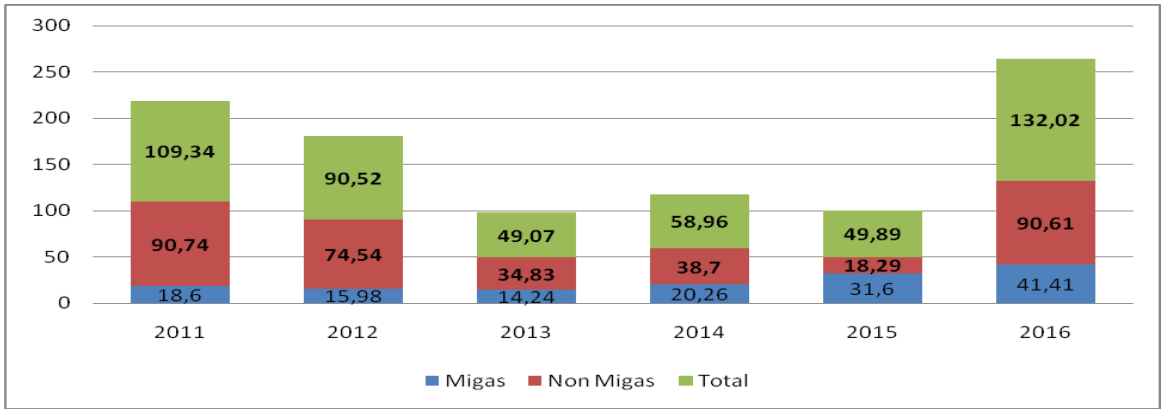
Ringkasan mengenai perkembangan ekspor dan impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010 s.d. 2016, sebagaimana tersaji pada grafik III.6dan III.7 berikut ini.



Grafik III. 6 Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung Tahun2011- 2016 (dalam juta US$)

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Total nilai impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar US$ 109,34 Juta dimana impor non migas sebesar US$ 90,74 Juta dan impor Migas sebesar US$ 18,60 Juta. Pada tahun 2016 totalimpor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga bulan Desember 2016mencapai sebesar US$ 132,01 juta meningkat164,6 persen dibandingkan Januari s.d. Desember 2015sebesar US$ 48,89 juta. Kenaikan nilai impor tersebut disebabkan oleh naiknya nilai impor non migas hingga mencapai 395,49 persen yaitu dari sebesar US$ 18,29 juta menjadi sebesar US$ 90,61 juta dan impor migas mengalami peningkatan sebesar 21,01 persen yaitu dari sebesar UU$ 31,60 juta menjadi sebesar US$ 41,41 juta.



Gambar III. 7 Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2016(dalam juta US$)

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

3.1.2 Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan

3.1.2.1 Pengangguran

Persentase pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2016 menunjukkan penurunan dibanding tahun 2015. TPT pada 2015 sebesar 6,29 persen turun menjadi sebesar 2,60 persen pada 2016. Penurunan angka pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor pertambangan.

Tabel III.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2018 (dalam persen)

Kegiatan Utama	2014	2015	2016	2017*)	2018*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,14	6,29	2,60	5.10	4,50

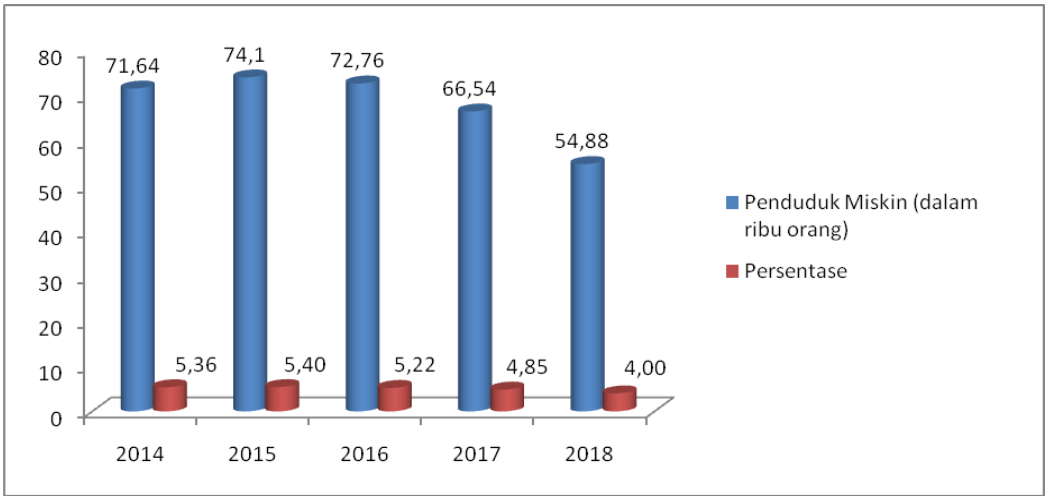
Sumber : 2014 – 2016 (BPS Prov. Kep. Bangka Belitung)
**) 2017 - 2018 Proyeksi Bappelitbangda*

Pada tahun 2017 dan 2018, angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan semakin tumbuhnya sektor industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemberlakukan UU tentang Minerba yang melarang ekspor *rowmaterials* akan menyebabkan industri pengolahan akan semakin tumbuh dan berkembang yang akhirnya akan berdampakterhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru.

3.1.2.2 Kemiskinan

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang peride tahun 2014 - 2016 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 71,64 ribu jiwa atau sebanyak5,36 persen dari total jumlah penduduk, meningkat menjadi 74,1 ribu jiwa atau 5,40 persen pada tahun 2015 dan menurun menjadi sebanyak 72,76 ribu jiwa atau sebanyak 5,22 persen pada tahun 2016.



Gambar III.8 Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 –2018

Sumber: 2014– 2016(BPS Prov. Kep. Bangka Belitung
**) 2017 – 2018 (Proyeksi Bappelitbangda)*

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin cepat, diperkirakan angka kemiskinan pada tahun 2017 dan 2018 terus mengalami penurunan. Kondisi ini diharapkan dapat terwujud melalui penguatan sektor-sektor ekonomi dan program-program pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di daerah perdesaan mengingat angka kemiskinan tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung terjadi di daerah perdesaan.

3.1.2.3 Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur dengan menggunakan pendekatan indeks ketimpangan Williamsondimana semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Adapun Interpretasi dari indeks ketimpanganWilliamson adalah:

Besarnya IW adalah 0 < IW < 1

Jika IW = 0, maka pembangunan wilayah sangat merata,

Jika IW = 1, maka pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan merata,

IW mendekati 0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata,

IW mendekati 1 berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang fluktuatif cenderung menurun meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2011 angka indeks sebesar 0,291berfluktuasi sepanjang tahun 2011-2015 dan kembali ke angka00.251 pada tahun 2015. Berdasarkan angka ini, dimana angka indeks ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mendekati 0, maka pembangunan wilayah semakin mendekati merata. Seperti sebagimana yang ditampilkan pada Tabel III.10.Penurunan angka indeks setiap tahunnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemerataan pembangunan regional antar kabupaten/kota se-provinsiKepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2016 IW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat turun menjadi sebesar 0,247, hal ini diupayakan melalui kebijakan pemerintah dengan melakukan pembangunan secara merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel III.10 Indeks Willamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2011–2016)

Tahun	Indeks Ketimpangan Willamson
(1)	(2)
2011	0,291
2012	0,284
2013	0,304
2014	0,294
2015 *)	0,251
2016 *)	0,247

Sumber: 2011-2014 (BPS.Ri)
**) 2015-2016 (Proyeksi Bappeda)*

3.1.2.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Tabel III.11 Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010–2017)

Tahun	Koefisien Gini
(1)	(2)
2010	0,30
2011	0,30
2012	0,29
2013	0,31
2014	0,30
2015	0,275
2016*)	0,288
2017*)	0,265

Sumber: 2010-2015 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung 2015
**) 2016 - 2017 Proyeksi Bappeda*

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada table III.11, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 adalah sebesar0,31, namun mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,30. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif rendah. Namun demikian, adanya peningkatankoefisien gini pada tahun 2014 perlu disikapi dengan

bijak oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar semakin meratakan distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2015 koefisien gini provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,275, angka tersebut merupakan paling dan pada tahun 2016 diperkirakan turun menjadi 0,288 yang artinya pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin merata.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan 2018

3.1.3.1 Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2017 dan 2018

Tantangan perekonomian global diperkirakan akan berasal dari pelemahan ekonomi China. Dengan pelemahan tersebut akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa dari Indonesia.Ekonomi Indonesia sendiri diperkirakan masih belum seutuhnya terlepas dari tantangan pada 2016 akibat harga minyak dunia yang belum bisa diprediksi, kondisi perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih serta dampak kebijakan presiden Amerika Serikat Donald Trump (efek Trump) yang juga mempengaruhi stabilitas perekonomian dunia.

Namun demikian, melemahnya perekonomian global mendapatkan response yang positif bagi perekonomian Indonesia. Bergesernya status Indonesia sebagai Negara tujuan investasi dunia, tentu berimplikasi positif bagi pengembangan industri dalam negeri. Tetapi, di sisi lain perlu diwaspadai bahwa dampak negatif dari melemahnya perekonomian dunia dapat mengancam stabilitas ekonomi Indonesia.Untuk itu, dalam menjawab tantangan perekonomian global, Indonesia perlu menentukan langkah-langkah antisipatif dengan memperkuat perekonomian domestik. Faktor integral yang menentukan kekuatan ekonomi domestik Indonesia antara lain adalah: 1) pengelolaan konsumsi yang efektif; 2) pengetuan sektor pangan; 3) pengunaan energi yang efisien; 4) Investasi dan perdagangan Internasional. Keempat faktor tersebut bersifat komplementer, sehingga penanganannya harus simultan dan terkoordinasi dengan baik.

Pada intinya, kelemahan–kelemahan di sektor daya saing, rendahnya kapasitas produksi pangan, minimnya penguasaan R&D dan inovasi serta faktor politis yang terkait dengan kepemimpinan dan efektivitas implementasi kebijakan perlu segera dibenahi. Sementara, kekuatan yang dimiliki Indonesia berupa semakin tingginya pertumbuhan kelas menengah, momentum untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang cukup tinggi, serta aspek demografis dan kemajemukan bangsa, perlu terus dipertahankan guna mendorong berbagai kebijakan di bidang energi, moneter, fiskal, pangan dan kerjasama internasional yang efektif.

3.1.3.2 Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018

Pada tahun 2017 dan 2018diperkirakan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung masih akandihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamikainternal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif dengan langkah-langkah yang lebih nyata.

Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018, yaitu:

1. Belum pulihnya perekonomian global;
2. Harga beberapa komoditas unggulan yang masih belum membaik;
3. Faktor cuaca yang kurang kondusif berpengaruh terhadap distribusi pasokan bahan pangan, tangkapan ikan dan jumlah wisatawan yang akan berkunjung;

4. Depresiasi Nilai Tukar Rupiah terus menerus;
5. Kapasitas pengolahan CPO yang ada di Kepulauan Bangka Belitung relatif masih sangat terbatas.

Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan masih terdapat potensi terjadinya resiko peningkatan akibat gangguan pasokan bahan makanan baik dari sisi produksi maupun dstribusi yang dipengaruhioleh gangguan cuaca dan faktor alam. Dari sisi permintaan, trend meningkatnya harga lada serta perayaan hari besar keagamaan dan momen pemilukada Gubernur juga dapat berpotensi mendorong laju inflasi.

Tantangan lainyang mempengaruhiprospek pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018juga mencakup tantangan terkait denganpersaingan ekonomi regional yang saat ini terus berlangsung, meliputi antara lain:

1) Laju peningkatan ekspor dan impor. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, namun hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya laju impor, sehingga neraca perdagangan selama kurun waktu tersebut terus mengalami penurunan. Apabila kondisi daya saing produk tidak segera ditingkatkan, maka dalam era perdagangan bebas kedepan dengan masuknya berbagai produk dari luar dengan kualitas yang lebih baik dan harga lebih terjangkau akan membuat produk lokal akan semakin terpinggirkan.
2) Laju Inflasi. Karakteristik provinsi kepulauan yang dimiliki oleh Bangka Belitung menjadi salah satu penyebab daerah ini menjadi daerah dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia. Angka inflasi yang tinggi, dikhawatirkan akan memberikan dampak yang negatif terhadap penilaian daya saing daerah yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi.
3) Pengembangan sektor unggulan Kepulauan Bangka Belitung harus terus ditangani dengan serius, khususnya pada sektor-sektor industri untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar ASEAN. Di antaranya, industri berbasis agro (CPO, kakao dan karet), industri produk olahan ikan, industri TPT, industri makanan minuman serta industri logam.
4) Daya saing Sumber Daya Manusia. Mobilitas tenaga kerja (*movement of natural persons*) intra ASEAN akan diberlakukan pada beberapa sektor, oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mampu meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga dapat bersaing di daerah maupun pada level ASEAN. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah banyaknya tenaga asing yang masuk ke daerah.
5) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
6) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Lemahnya Infrastruktur, khususnya bidang transportasi dan energi menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

7) Disparitas pembangunan antara wilayah di Kepulauan Bangka Belitung menjadi tantangan tersendiri untuk dijadikan pemicu dalam meningkatkan daya saing antara wilayah. Upaya mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan sangat diperlukan dalam memperkuat jaringan distribusi produk-produk unggulan daerah. Hal ini merupakan suatu keniscayaan agar daya saing setiap wilayah dapat terus ditingkatkan.

8) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-privatepartnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

3.1.3.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Mulai pulihnya perekonomian secara global diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas primer. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan ekspor Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum terbukanya pasar regional dapat memberikan prospek yang cerah bagi pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka pembangunan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 antara lain adalah:

1) Kepulauan Bangka Belitung dikenal dengan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar. Membaiknya perekonomian global menyebabkan meningkatnya harga beberapa komoditi unggulan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 dan 2018.

2) Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadikan daya tarik bagi masuknya investasi, namun hal ini harus didukung oleh penciptaan iklim yang kondusif.

3) Kepulauan Bangka Belitung harus mampu memanfaatkan momentum beralihnya fokus investor ke negara-negara Asia dan dapat menyerap aliran modal menyusul krisis yang melanda kawasan Eropa dan Amerika. Beberapa kawasan dengan daya dukung infrastruktur yang memadai masih akan menjadi tujuan utama arus modal. Serapan investasi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpeluang lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat.

4) Liberalisasi perdagangan ASEAN menyebabkan arus keluar masuk barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi. Kondisi pasar bebas dapat menyebabkan produsen untuk memproduksi barang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah/negara lain.

Kinerja perekonomian daerah yang masih tumbuh positif pada tahun 2016 serta besarnya ekspektasi masyarakat pada perbaikan ekonomi daerah, diharapkan akan memberi dampak positif pada perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 dan 2018. Peningkatan konsumsi rumah tangga yang diikuti dengan pertumbuhan investasi dan ekspor, diperkirakan akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Sedangkan dari sisi produksi, peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang semakin menonjol diikuti oleh perkembangan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan memainkan peranan penting dalam perekonomian Kepulauan Bangka Belitung di masa yang akan datang.

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi dan berkembang serta memperhatikan kerangka ekonomi makro pada kurun waktu 2014-2016 dan program Nawacita Presiden Republik Indonesia, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 akan difokuskan pada beberapa tujuan, antara lain:

1) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
2) Peningkatan nilai ekspor melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk serta industrialisasi komoditi unggulan;
3) Pengendalian angka inflasi melalui peningkatan ketahanan pangan daerah dengan cara perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil,fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan).
4) Peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
5) penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli masyarakat;
6) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia yang diarahkan kepada peningkatan daya saing tenaga kerja untuk menyambut diberlakukannya *Asean Community* tahun 2015 (untuk memanfaatkan potensi jumlah tenaga kerja dan peluang pasar tenaga kerja dan usaha).
7) Mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah degan mendorong laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulanmasing-masing kabupaten/kota tersebut.
8) Pengembangankemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta terutama peningkatan peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinergitas pembangunan).

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis

diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1) Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas;
2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decisionmaker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (PD);
4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficientcondition*bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang),RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) daerah, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaantersebut.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat

dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 diarahkan untuk:

1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscalsustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien;
4) Menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2017-2022.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*". Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen Dana Bagi Hasil Pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang didalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah pada Tabel III.12 berikut ini.

Tabel III.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 s.d tahun 2019

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2016 (N-1)	Proyeksi / Target 2017 (N)	Proyeksi / Target 2018 (N+1)	Proyeksi / Target 2019 (N+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	**Pendapatan asli daerah**	**574.448.892.897,80**	**737.192.092.935,16**	**776.196.230.613,87**	**784.276.232.659**
1.1.1	Pajak daerah	507.983.460.531,72	578.237.062.209,57	649.190.101.400,00	650.149.561.530
1.1.2	Retribusi daerah	8.833.630.591,72	19.409.736.914,87	23.810.905.014,87	28.616.192.926
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.613.342.582,77	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	8.925.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	52.018.459.191,59	131.045.293.810,72	94.695.224.199,00	96.585.478.203
1.2	**Dana perimbangan**	**1.375.004.279.783,00**	**1.666.665.913.570,00**	**1.684.392.043.000,00**	**1.752.826.918.600**
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	142.862.982.783,00	175.828.126.000,00	187.759.686.000,00	197.759.686.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	905.526.208.000,00	1.035.119.230.570,00	1.018.673.218.000,00	1.029.312.179.700
1.2.3	Dana alokasi khusus	326.615.089.000,00	455.718.557.000,00	477.959.139.000,00	525.755.052.900,00
1.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**-**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**
1.3.1	Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.3.4	Sumbangan Pihak Ketiga	-	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
1.3.5	Pendapatan Lainnya (sumbangan pihak ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	**1.949.453.172.680,80**	**2.433.858.006.505,16**	**2.490.588.273.613,87**	**2.528.258.203.435,00**

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah dan kinerja pembiayaan daerah, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakanpendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2018 diarahkan melalui optimalisasisumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah sepertipajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerahdilakukan dengan cara:

1) Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2) Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
3) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
4) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
5) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan serta pemanfaatan tekhnologi online dalam pelayanan objek pajak dan retribusi.
6) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, termasuk dalam PD yang ada
7) Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah, guna peningkatan PAD.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara :

1) Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
2) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;
3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah:

1) Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD:

   a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;

   b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

   c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;

   d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drivethru*, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan Samsat*Outlet*;

   e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama;

   f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

   g) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;

   h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

   i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;

   j) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.

2) Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:

   a) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

   b) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

   c) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;

   d) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan alokasi belanja untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain meliputi : belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap Perangkat Daerah (PD). Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehi.dupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja yang diukur berdasarkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan yang sebelumnya dikelompokkan menurut Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik (Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Berdasaran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkaitsecara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri darijenis belanja:
   a) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahanpenghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
   b) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman PemerintahDaerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalandengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD.
   c) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraanpemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberianhibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD danpenyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semipemerintah (PMI, KONI, dan Pramuka), pemberian hibahkepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
   d) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
   e) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintahan desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
   f) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus seperti. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan

dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

g) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

   a) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

   b) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

   c) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan biaya pemeliharaan untuk digunakan dalam kegiatan belanja investasi daerah dengan metode "*full costing*".

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel III.13.

Tabel III.13 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 s.d Tahun 2019

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi 2016 (N-2)	Proyeksi / Target 2017(N-1)	Proyeksi / Target 2018 (N)	Proyeksi / Target 2019 (N+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**1.210.045.497.804,63**	**1.426.029.877.299,96**	**1.641.780.174.964,33**	**1.723.869.183.712,55**
2.1.1	Belanja pegawai	396.188.739.549,20	669.619.558.349,36	682.068.254.345,40	716.171.667.062,67
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	812.500.000,00	853.125.000,00
2.1.4	Belanja hibah	403.743.237.430,00	269.214.900.000,00	334.069.809.969,00	350.773.300.467,45
2.1.5	Belanja bantuan sosial	717.060.000,00	943.000.000,00	718.910.000,00	754.855.500,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	156.076.110.183,43	362.199.953.426,60	331.112.656.477,93	347.668.289.301,83
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik *	251.916.010.142,00	116.755.422.524,00	287.998.044.172,00	302.397.946.380,60
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.404.340.500,00	7.297.043.00,00	5.000.000.000,00	5.250.000.000,00
					0,00
2.2	**Belanja Langsung**	**860.475.761.617,69**	**1.220.520.155.935,26**	**1.358.219.825.035,67**	**1.426.130.816.287,45**
	Jumlah Belanja Daerah	**2.070.521.259.422,32**	**2.646.550.033.235,22**	**3.000.000.000.000,00**	**3.150.000.000.000,00**

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2018 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 ayat (4) menyatakan "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional" Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) menyatakan "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4) Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan:"Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji", guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixedcost, regularcost*, dan *variablecost* secara terukur dan terarah, yaitu:
   a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);
   b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi;
   c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah,
   d) program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committedbudget*).
6) Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi dan misi, program unggulan Gubernur, Wakil Gubernur terpilih 2017-2022, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
8) Mengangarkan kembali kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2017 namun di tunda pelaksanaanya dikarenakan terdapat prioritas-prioritas daerah yang lebih mendesak (Pasca Banjir)

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebagaimana yang tergambar pada Tabel III.14, diarahkan pada:

1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2018;
2) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
3) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Tabel III.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s.d Tahun 2019

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2016 (N-2)	Proyeksi / Target 2017 (N-1)	Proyeksi / Target 2018 (N)	Proyeksi / Target 2019 (N+1)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	**Penerimaan pembiayaan**	**337.693.794.849,61**	**217.692.026.730,06**	**509.411.726.386,13**	**509.411.726.386,13**
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	337.693.794.849,61	217.692.026.730,06	509.411.726.386,13	509.411.726.386,13
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**337.693.794.849,61**	**217.692.026.730,06**	**509.411.726.386,13**	**509.411.726.386,13**
3.2	**Pengeluaran pembiayaan**	-	**5.000.000.000,00**	**-**	**-**
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	5.000.000.000,00	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	**5.000.000.000,00**	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	**337.693.794.849,61**	**212.692.026.730,06**	**509.411.726.386,13**	**509.411.726.386,13**
3.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)**	**217.326.485.730,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TEMA, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.1 Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018

Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat (3) dinyatakan bahwa "RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN". Selanjutnya, pada ayat (4) dinyatakan bahwa, "RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

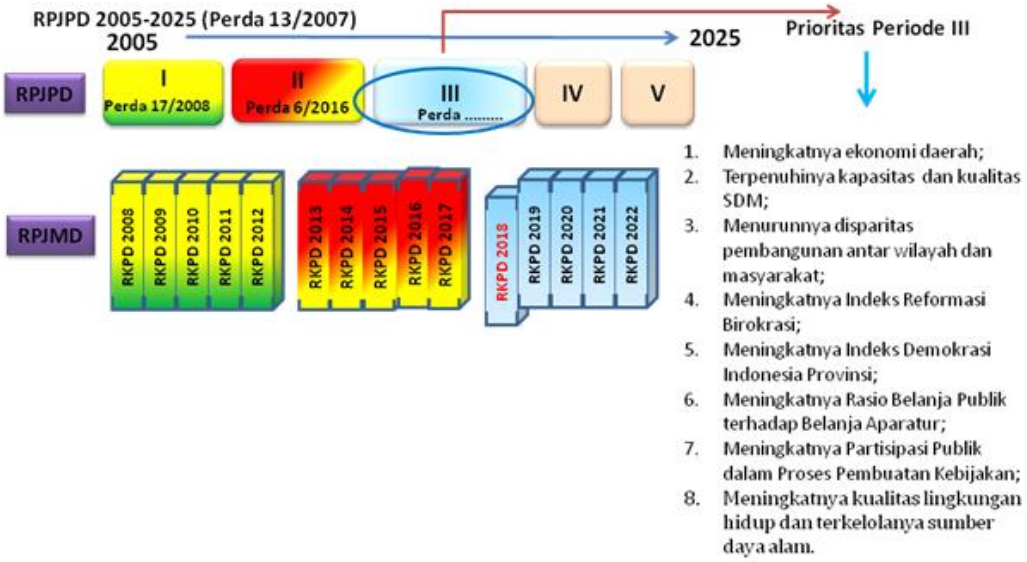
Dengan mempertimbangkan penjelasan diatas dan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yang akan berakhir pada tahun 2017, maka untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, mengacu dan berpedoman pada:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
c. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018;
d. Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tema Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

   Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun III (2017–2022) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Penekanan pada tahapan Lima Tahun III (2017–2022) difokuskan pada upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.



Gambar IV.1 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2018 Terhadap RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Tahun 2017 – 2022

2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2014-2034

   Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, tujuan penataan ruang provinsi yaitu "Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agri-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan" maka pembangunan Daerah tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka:

   a. Rencana Struktur Ruang;
   b. Rencana Pola Ruang
   c. Perwujudan Kawasan Strategis.

3. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah
   Isu strategis dan masalah yang harus segera ditangani pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

   - PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
     - Rendahnya Ketahanan Pangan;
     - Rendahnya Kualitas lingkungan hidup;
     - Rendahnya Nilai tambah dan daya saing produk UKM;
     - Rendahnya Investasi;
     - Tingginya Tingkat pengangguran;
     - Tingginya Inflasi;
     - Rendahnya Laju Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
     - Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan daerah;
     - Belum optimalnya industri pengolahan berbasis sumber daya alam.

- SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

  - Belum optimalnya pembangunan Sumber Daya manusia;
  - Masih terjadi kesenjangan pembangunan sosial;
  - Masih terjadi kesenjangan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender;
  - Belum stabilnya pembangunan demokrasi;
  - Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - Belum optimalnya pengembangan budaya lokal;

- INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

  - Pengendalian banjir;
  - Terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah;
  - Masih terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah;
  - Terbatasnya layanan telekomunikasi dan informatika.

4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2018

   Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2018 merupakan satu kesatuan dalam rencana pembangunan nasional, dengan mengangkat tema yaitu **"Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"**. Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah RI tahun 2018 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan prinsip *Money Follows Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan holistik-tematik, integratif dan spasial dengan memperhatikan pada :

   - Pengendalian Perencanaan;
   - Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018;
   - Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan;
   - Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 adalah **"Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) menuju pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agribahari dan berdaya saing"**

Makna tema:

1. **Kualitas SDM** adalah suatu peranan penting dalam upaya untuk memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAQ yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk mempersiapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai "pemain/subjek" dan bukan "penonton/objek" dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. **Mandiri** menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan.
3. **Pembangunan Ekonomi** dimaknai dengan pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui strategi yang dilaksanakan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.
4. **Berbasis agribahari** adalah cerminan untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah agri bahari yang dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah yaitu pertanian (agrukultur) dan kelautan perikanan. Agrikultur, dimaknai secara luas meliputi sub sektor pertanian rakyat, perkebunan, perikanan dan pengembangan potensi peternakan.Sementara itu, kebaharian diterjemahkan tidak hanya terkait dengan hasil perikanan laut saja melainkan juga potensinya di sektor transportasi (pelabuhan) serta kepariwisataan beserta sektor-sektor pendukungnya.
5. **Daya saing** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya Visi Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, maka pembangunan daerah tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 tahap ketiga (2017-2022) diarahkan pada upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.

Hubungan antara visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 2005-2025 pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Pokok
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan Tahun 2025	1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari	1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah berbasis agri-bahari	Meningkatnya ekonomi daerah
	2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	2. Mewujudkan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Pokok
(1)	(2)	(3)	(4)
	3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah	3. Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih	1. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.
			2. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.
	4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan	4. Mengurangi kesenjangan pembangunan sosial dan pembangunan antar wilayah	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
	5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Berdasarkan Tabel IV.1 di atas, diketahui bahwa untuk Visi Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Tahap Ketiga) akan dilaksanakan melalui 5 (lima) misi yang diharapkan dapat mencapai 5 (lima) tujuan yang ditandai dengan 6 (enam) sasaran pokok. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Sumatera dan Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2 Target Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018

Indikator	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Nasional	Babel	Nasional	Babel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,1	6,8	6,1	5,30
Tingkat Kemiskinan %	8,5-9,5	3,3	12,5	4,42
Tingkat Pengangguran %	5,0-5,3	3,0	4,44	2,10
Gini Ratio	0,38	0,28	0,38	0,26
IPM	75,7	69,92	75,7	69,92
Laju Inflasi (%)	4,0	4±1%	3,5	3,8

Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2017, Rancangan RKP 2018, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017

Target sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPJPD. Dokumen RKPD Tahun 2018 sebagai dokumen rencana tahunan, diarahkan untuk mencapai target dari sasaran tersebut. Adapun sasaran dan target sasaran tahun 2018 yang akan dicapai, disajikan pada Tabel IV.3.

Tabel IV.3 Matriks Indikator Sasaran Pokok

Sasaran Pokok	Indikator	Target 2018
1. Meningkatnya ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB	5,30
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,92
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	73,45
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	64,00
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	0,248
	Indeks Gini	0,26
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,11

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Agar tercapainya Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Tahap Ketiga, 2017-2022), diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPJPD 2005-2025 tahap ketiga (2017-2022) untuk tahun 2018.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

1) pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap Sustainable Development Goals, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;
2) pencapaian visi dan misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2022;
3) pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4) penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2018. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana telah

diuraikan pada Bab II. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, yaitu:

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik;
4. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat;
5. Pembangunan Berdemokrasi;
6. Penanggulangan Bencana;

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial*;*
2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD 2005-2025;
4) Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2018;
5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

4.2.1. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) **"Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"** maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018, sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2018, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97 persen; Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04 persen; Kalimantan sebesar 4,37 persen; Sulawesi sebesar 7,35 persen; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua sebesar 6,87 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 10,25 persen; Jawa sebesar 9,45 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,87 persen; Kalimantan sebesar 5,40 persen; Sulawesi sebesar 9,96 persen; Maluku sebesar 12,52 persen dan Papua sebesar 25,85 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa-bali sebesar 5,90 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; Kalimantan sebesar 5,10

persen; Sulawesi sebesar 4,00 persen; Maluku sebesar 4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan

4. Laju inflasi 3,5 persen.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan secara makro baik di tingkat nasional, regional dan daerah yang tertuang dalam Tabel IV.4 dibawah.

Tabel IV.4 Keselarasan target indikator pembangunan makro antara target Nasional, Regional Sumatera dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018

Indikator	Tahun 2018		
	Nasional	Sumatera	Babel
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1	5,97	5,30
Tingkat Kemiskinan %	12,5	10,25	4,42
Tingkat Pengangguran %	4,44	4,8	2,10
Laju Inflasi (%)	3,5	3,5	3,8

Sumber: RPJMN 2015-2019, Rancangan RKP 2018

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sasaran perekonomian nasional tersebut diatas menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2018. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Penyelarasan 3 (tiga) dimensi pembangunan dengan 6 (enam) prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.5.

Tabel IV.5 Keselarasan antara Dimensi Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pokok Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018

Dimensi Pembangunan (Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2018)		Prioritas RKPD 2018	Sasaran RPJPD 2005-2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dimensi pembangunan manusia	1. Revolusi Mental	Tata Kelola Birokarasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.
		Pembangunaan Berdemokrasi	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.
	2. Pembangunan Pendidikan	Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
	3. Pembangunan Kesehatan		
	4. Pembangunan Perumahan dan Permukiman		
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan	1. Kedaulatan Pangan	Peningkatan Ekonomi	Meningkatnya ekonomi daerah
	2. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan		
	3. Kemaritiman dan Kelautan		
	4. Pariwisata		
	5. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)		
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan	1. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
	2. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
		Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam
4. Kondisi yang Kondusif (kondisi perlu)	1. Pembangunan politik	Pembangunan demokrasi.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.
	2. Hukum		
	3. Pertahanan dan Keamanan		

Berdasarkan Tabel IV.5 di atas, maka terlihat bahwa satu prioritas daerah dapat didukung beberapa sasaran pokok daerah. Pemilihan prioritas daerah dimaksudkan agar didalam implementasinya dapat lebih fokus dan lebih terarah dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun *stakeholder* lainnya.

Penyusunan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 harus diselaraskan juga untuk mendukung pencapaian 10 (Sepuluh) Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Perumahan dan Pemukiman;
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
5. Ketahanan Energi;
6. Ketahanan Pangan;
7. Penanggulangan Kemiskinan;
8. Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman;
9. Pembangunan Wilayah;
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan dan 10 (sepuluh) Prioritas Nasional, diperlukan dukungan dari prioritas pembangunan daerah. Pencapaian Prioritas Nasional tersebut didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.6 Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD Dalam Rangka Mendukung Prioritas RKP 2018.

Tabel IV.6 Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan RKP 2018

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
I	**DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA**						
	1 Revolusi Metal						
	Prioritas 10. Politik, Hukum, pertahanaan keamanaan • Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik • Reformasi Birokrasi Pemerintahan • Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa • Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa • Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik	1 peningkatan Manajemen Perubahan	1 PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase konsistensi dan keselarasan dokumen rencana peningkatan manajemen perubahan	80%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	BAPPEDA
			2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				BAPPEDA
			3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengembangan kinerja	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang	BIRO ORGANISASI
		2 Pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu dilakukan melalui peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi kebijakan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.	1 PROGRAM PERENCANAAN , EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH				BAPPEDA
			2 PROGRAM PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD	3 nilai		BAKUDA
		3 Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, demokratif, responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis; mendorong terciptanya kemandirian fiskal dengan mendorong pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah untuk sebesar mungkin kemakmuran masyarakat.	1 PROGRAM PERENCANAAN , EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH				BAPPEDA
			2 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Prosentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah; tingkat pelayanan sistem informasi pajak daerah	89,64%; 4 nilai	Provinsi	BAKUDA
			3 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN LAIN YANG SAH	Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah	1,57%	Provinsi	BAKUDA
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	Rata-rata prosentase realisasi penerimaan pajak daerah pada unit pelaksanaan teknis; indeks kepuasan masyarakat	100%; 75 nilai	SKPD, Bangka Selatan	BAKUDA

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			5 PROGRAM PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian jadwal penetapan APBD dan perubahan APBD	3 nilai	SKPD, Pangkalpinang	BAKUDA
			6 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	Provinsi	BIRO PEMBANGUNAN
			7 PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD	Persentase Perangkat Daerah yang Menginput Aplikasi E-Monev	100%	Provinsi	BIRO PEMBANGUNAN
			8 PROGRAM PERENCANAAN SETDA	Penyusunan Laporan Dokumen Sekretariat Daerah	100%	Provinsi	BIRO PEMBANGUNAN SETDA
		4 Penegakan Perda dan Perkada yang memiliki sanksi	9 PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Prosentase penegakan/penindakan pelanggar Perda	100%	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka, Belitung, Pangkal Pinang	SATPOL PP
			10 PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBN	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus) di Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	Luar Daerah, Provinsi	BIRO PEMBANGUNAN
		5 Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	1 PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase penataan peraturan perundang-undangan	100%		BIRO HUKUM
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH	Persentase Bantuan Hukum	85%	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka, Belitung, Pangkal Pinang	BIRO HUKUM
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM	Persentase Pengembangan Informasi Hukum dan Dokumentasi Hukum	100%	Provinsi	BIRO HUKUM
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG-	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD,	SETWAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			UNDANGAN				
		6 peningkatan Penataan dan penguatan organisasi	1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SERTA ANALISISI JABATAN	Persentase peningkatan kelembagaan dan analisis jabatan	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO ORGANISASI
			2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan tata laksana	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	BIRO ORGANISASI
			3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengembangan kinerja	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang	BIRO ORGANISASI
		7 peningkatan Penataan Tata Laksana	1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan tata laksana	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO ORGANISASI
			2 PROGRAM PENINGKATAN PUBLIKASI, PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN INFORMASI	Persentase Hasil Kegiatan Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik	100%	Provinsi, SKPD	BIRO HUMAS
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN, DOKUMENTASI, PUBLIKASI MEDIA DAN IT	Persentase Publikasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi yang Dipublikasikan	100%	Provinsi, SKPD	BIRO HUMAS
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PROTOKOLER	Persentase kegiatan protokoler yang dilaksanakan	100%	Provinsi, SKPD	BIRO HUMAS
			6 PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN INVESTASI, PELAYANAN HUMAS DAN PROTOKOLER, SERTA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PENGHUBUNG PROVINSI	Persentase peningkatan informasi dan invesasi, pelayanan humas dan protokoler, serta hubungan antar lembaga penghubung provinsi	100 %	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
			7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN	Persentase pelayanan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD,	SETWAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		8 peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGADAAN SERTA PELAYANAN PROMOSI, MUTASI, KEPANGKATAN DAN PENSIUN ASN	Persentase Ketepatan Waktu Penerimaan SK Pangkat dan Pensiun ASN Terhadap B; Persentase Kesesuaian ASN Pada Promosi, Mutasi dan Kepangkatan Terhadap Analisa Jabatan; Persentase Kesesuaian Antara Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Kebutuhan Organisasi serta Prioritas Pembangunan Daerah; Peringkat Kualitas Pelayanan Penerimaan ASN melalui Jalur Umum dan Pendidikan Kedinasan yang Objektif, Terbuka, Transparan dan Akuntabel	765 SK ASN; 95 %; 70 %; 4 Nilai		BKPSDM
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENILAIAN KINERJA, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN	Tingkat Penilaian Kinerja, Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Disiplin ASN; Tingkat Pelayanan Kesejahteraan ASN; Tingkat sarana dan prasarana terhadap Pelayanan ASN berbasis Tekhnologi Informasi	60 Orang; 4.116 Orang; 90 %		BKPSDM
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ASN	Jumlah ASN terlatih; jumlah SKPD terlatih	1.750 orang; 17 SKPD		BKPSDM
		9 Peningkatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengembangan kinerja	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO ORGANISASI
			2 PROGRAM PERENCANAAN , EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti - Persentase kesesuaian antara tujuan, sasaran, target indikator sasaran, program dan target indikator program dalam RKPD dengan RPJMD - Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang tervalidasi dan dapat			BAPPEDA

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				Diakses - Persentase keselarasan Program, kegiatan dan pagu anggaran antara RKPD dengan APBD			
			1 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAN APARATUR	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	93%	Provinsi	INSPEKTORAT
		10 Peningkatan Penguatan Pengawasan	2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	INSPEKTORAT
			3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA	Peningkatan level kelembagaan Inspektorat	3 level	SKPD	INSPEKTORAT
			1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN	Prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	100%	SKPD, Pangkalpinang	BAKUDA
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AKUTANSI DAN PELAPORAN	Tingkat pelayanan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah; prosentase kabupaten/kota yang memiliki hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dengan rata-rata hasil WTP	4 nilai; 100%	SKPD, Pangkalpinang	BAKUDA
		11 Opini Audit BPK	3 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA ASET DAERAH	Prosentase aser daerah yang dapat diyakini kebenarannya; prosentase kontribusi kemanfaatan aset daerah terhadap PAD	100%; 0,33%	SKPD, Pangkalpinang	BAKUDA
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Rata-rata prosentase realisasi penerimaan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis			SAMSAT
			5 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan tata laksana	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO ORGANISASI

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		12 Peningkatan Kualitas Pelayanaan Publik	6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			7 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Perentase sekolah SMA yang fasilitasi perizinaan/SMA Terakriditasi			DINDIK
			8 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Perentase sekolah SMK yang fasilitasi perizinaan/Terakriditasi			DINDIK
			9 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Perentase sekolah Sekolahluar biasa yang fasilitasi perizinaan/terekriditasi			DINDIK
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PLUT KUMKM	- Persentase KUMKM yang mendapatkan 7 layanan PLUT			KUMKM
			10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN	1 persentase akrediatsi pelayanan RS	1 100%	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	RSUP
			11 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	1 Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	RSUP
			12 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	3 Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Layanan	3 80%	Kabupaten Bangka	RSJ
				4 Persentase elemen Akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi	4 80%	Kabupaten Bangka	
			13 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA	1 Persentase Kabupaten/Kota yang terintegrasi pelayanan keswa	3 100%		RSJ
			14 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN PENGADAAN	Persentase pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	100%	Provinsi	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			15 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	persentase pelayanan Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah	100%	Provinsi	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			16 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Persentase Penerapan aplikasi berbasis Elektronik yang diterapkan dalam proses pengadaan Barang/jasa pemerintah Provinsi	100%	Provinsi, Luar Daerah	BIRO LAYANAN PENGADAAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				Kepulauan bangka Belitung			
			17 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara; Persentase bidang tanah pemerintah provinsi yang bersertifikat; persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	77.460.000 meter persegi;30 bidang;20 persentase	Provinsi	BIRO PEMERINTAHAN
			18 PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Peringkat penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi; Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan; Jumlah kepala daerah dan anggota legislative yang terfasilitasi secara administrasi; Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik	15 peringkat;10 Prosentase;20 %;90 %	Provinsi, SKPD	BIRO PEMERINTAHAN
			19 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan koordinasi hubungan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Peningkatan jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri	90%; 90%	Luar daerah, Provinsi	BIRO PEMERINTAHAN
			20 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	100%	Provinsi, SKPD	DKPUS
			21 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP	Pertambahan jumlah arsip yang dikelola (Dinamis dan Statis)	0%	Provinsi, SKPD, Pangkalpinang	DKPUS
			22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ; Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka; Pertambahan pengunjung	0 %; 0 %; 0 %	SKPD	DKPUS

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				perpustakaan			
			23 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Jumlah layanan M- CAP di 6 Kabupaten	6 kabupaten provinsi, bangka barat, bangka selatan, baltim, bangka tengah, bangka, belitung	6 Kabupaten/Kota	DISKOMINFO (URUSAN TIK)
			24 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tingkat Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah; Persentase Peningkatan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Masyarakat	60 %	7 Kabupaten/Kota	DISKOMINFO (URUSAN PERSANDIAN)
			25 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	persentase PD yang difasilitasi dengan sistem informasi	40 %	PD Provinsi	DISKOMINFO
			26 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNKASI PUBLIK	persentase saluran komunikasi yang dikelola	40%	PD Provinsi	DISKOMINFO
			1 PROGRAM BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah penistaan terhadap simbol negara; Jumlah Konflik Sara	0 %; 3 Jumlah	Luar daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	KESBANGPOL
			2 PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Jumlah rekomendasi koordinasi antar pemangku kepentingan yang dijalankan; Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	7 ; 0 %	Luar daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	KESBANGPOL
		13 Menjamin Kebebasan sipil	3 PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; Jumlah Rekomendasi yang digunakan; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	25 %; 1 Hasil; 30 %	Luar daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	KESBANGPOL
			1 PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Prosentase penindakan pelanggaran Tibumtranmas	100%	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka Barat,	SATPOL PP

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
						Bangka, Belitung, Pangkal Pinang	
			2 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Prosentase peningkatan kualitas Linmas	10%	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka, Belitung, Pangkal Pinang	SATPOL PP
		14 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat (Linmas)	3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL SATPOL PP	Prosentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP	100%	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang	SATPOL PP
			1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan; Persentase keterwakilan perempuan dilembaga publik; Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender			DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			2 PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Prosentase penegakan/penindakan pelanggar Perda			DINSOS
		15 Menjamin Hak-hak politik	2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				BAPPEDA
			3 PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI	Cakupan Pembinaan Poitik Daerah; Tingkat Kinerja Lembaga Demokrasi;	7 Jumlah; 45 %;	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	KESBANGPOL
		16 Menjamin Lembaga-Lembaga Demokrasi	5 PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase konsistensi dan keselarasan dokumen rencana pembangunan demokrasi	80%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	BAPPEDA
			6 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Persentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	100%	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO KESRA
			1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	APK SMA			DINAS PENDIDIKAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	APK SMA			DINAS PENDIDIKAN
			3 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	APK Pendidikan Khusus			DINAS PENDIDIKAN
	2 Pembangunaan Pendidikan		1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang bersertifikasi			DINAS PENDIDIKAN
	Prioritas 1. Pendidikan • Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah • Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel • Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru • Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu menyelenggaraan pendidikan keguruan • Meningkatkan akses dan	1 peningkatan akses pelayanan pendidikan	2 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN TEKNIS PENDIDIKAN MENENGAH, KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase SMA, SMA dan pendidikan khusus yang difasilitasi	100%		UPTD PENDIDIKAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TATA KELOLA KEPENDIDIKAN	persentase biaya BOS yang terialisasi			SMA/SMK/SLB
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	bangunan gedung arsip yang beroprasional	1	Pangkalpinang	DINAS PRKP
		2 peningkatan pelayanan pedidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing	5 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap anak sekolah			PERHUBUNGAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap anak sekolah			PERHUBUNGAN
			8 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI	Jumlah ASN yang terakreditasi	40 SDM, PAK	Provinsi	DISKOMINFO
			9 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	100%	Provinsi	BIRO KESRA

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini • Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi		10 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KEAGAMAN	Persentase pembinaan keagamaan	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO KESRA
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENERIMAAN, PROMOSI, MUTASI, KEPANGKATAN DAN PENSIUN ASN				BKPSDMD
			12 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
			13 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA
			14 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase		BAPPEDA
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ; Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka; Pertambahan pengunjung perpustakaan	0 %; 0 %; 0 %	SKPD	DKPUS
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi; Pertambahan pengelola perpustakaaan yang	100 %; 40 orang	Provinsi, SKPD	DKPUS

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar			
			1 PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT				
			2 PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	23 Pper-100.000 kelahiran hidup	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
			3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	2 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7.2 per 1.000 kelahiran hidup	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
			4 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	3 Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS	70%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
	3 Pembangunaan Kesehatan		5 ROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	4 Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	79,64%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
	Prioritas 2. Kesehatan • Memperkuat upaya promotif dan preventif • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan • Mempercepat perbaikan gizi masyarakat • Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	1 peningkatan derajat kesehatan masyarakat	6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TATA KELOLA KEPENDIDIKAN	5 Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	63%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				1 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	37%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				2 Persentase perempuan usia 30 s.d 50 tahun yang dideteksi dini kaner serviks dan payudara	17,50%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				3 Persentase menurunnya penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, Diabetes Melitus)	32,90%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				4 Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes Rate minimal 85%)	71,40%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				5 Prevalensi HIV (Ket: target prevalensi HIV kurang dari sepuluh persen)	10%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	6 Persentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria	85,71	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				7 Persentase kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	80%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				8 persentase penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ispa, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	100%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
							DINDIK
							DINDIK
							DINDIK
							SMK/SMA/SLB
				persentase kecamata yang di intervensi dengan sarana prasarana air bersih	8 persen		
			8 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100%	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO KESRA
			9 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
			10 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)			
			11 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase		BAPPEDA
			13 PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORUIM KESEHATAN	1 Persentase pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	80%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	UPTD KESEHATAN
			14 PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	persentase pangan yang aman dikonsumsi			DINAS PANGAN
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI				DISPERINDAG
			1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	1			
			2 PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORUIM KESEHATAN	2 Persentase RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	53%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN	4 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	60%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	1 Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standa	1800 sampel	Provinsi Kep. Bangka Belitung	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
			5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM	1		Provinsi Kep. Bangka Belitung	RSUP
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	1 Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	Persentase masyarakat yang terlayani	Provinsi Kep. Bangka Belitung	RSUP
		2 peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA	1 Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP		Provinsi Kep. Bangka Belitung	RSUP
				1 Persentase Resep Sesuai Formularium	1 90%	Kabupaten Bangka	RSJ
				1 Persentase Pasien pasung yang terlayani	1 90%	Kabupaten Bangka	RSJ

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			8 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA	2 Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi psikososial	2 75%	Kabupaten Bangka	
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3 Persentase Kabupaten/Kota yang terintegrasi pelayanan keswa	3 100%	Kabupaten Bangka	
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi	4 100%	Kabupaten Bangka	
			1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAAN TEKNIS HYGINIES PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA	1 Persentase Ruang Rawat Jalan yang Memadai	1 90%		RSJ
			1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAAN PEMERINTAH	2 Persentase Ruang Rawat Inap yang Memadai	2 90%	Kabupaten Bangka	
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAAN PEMERINTAH	3 Persentase Ruang Penunjang yang Memadai	3 90%		
				4 Persentase Bangunan Penunjang yang Memadai	4 70%	Kabupaten Bangka	
				5 Persentase Alat Kesehatan yang Sesuai Standar	5 60%	Kabupaten Bangka	
				6 Persentase Peralatan Penunjang	6 75%	Kabupaten Bangka	
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAAN PEMERINTAH	7 Persentase Obat dan Perbekalan Kesehatan	7 95%	Kabupaten Bangka	
				Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
				Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	2,73%		
				1 Persentase tenaga/SDM kesehatan yang mengikuti program peningkatan	1 75%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				kompetensi			
				3 Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	3 90%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	RSUP
				Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	RSJ
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENERIMAAN, PROMOSI, MUTASI, KEPANGKATAN DAN PENSIUN ASN				BKPSDM
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan panjang talud Sumber Air Baku (m); Panjang Penahan Abrasi pantai; Panjang Pengerukan dan Pengendalian; Luas Jaringan Irigasi/ Optimalisasi irigasi	2 Ha; 200 meter; 2000 meter; 50 Ha		DINAS PUPR
		3 Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Persentase kawasana kumuh yang diintervensi dengan sarana dan prasarana permukiman	30 persen		DINAS PRKP
							DLH
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP				
				Pertumbuhan penggunaan sarana prasarana pertanian untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan			PERTANIAN
	4 Pembangunaan Perumahan dan		1 PROGRAM PENGEMBANGAN	Pertumbuhan sarana			PETANIAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	Permukiman		PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	prasarana pertanian			
	Prioritas 3. Perumahan dan Permukimaan • Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai • Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi • Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset • Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat • Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi	1 Pengembangan Sistem Sumber Daya Air	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN			DINAS PUPR	
		2 Pengembangan Sistem Prasarana Permukiman	2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase benih yang tersertifiksi			UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	persentase penurunan serangan hama penyakit tanaman			UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN
II	**DIMENSI PEMBANGUNAAN SEKTOR UNGGULAN**		1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN	Kontribusi produksi benih/ bibit pertanian terhadap PAD			
	1 Kedaulatan Pangan		5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB			PETANIAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			PERTANIAN	sektor Pertanian			
	Prioritas 6. Ketahanaan pangan • Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN • Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan • Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi • Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan	1 Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;	6 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian			PETANIAN
		2 Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah produk pertanian;	7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB sektor Pertanian			PETANIAN
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP
			9 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif; Jumlah Hari Operasi pengawasan yang efektif dan Efisien	50 Kelompok;150 Hari Operasi		DKP
			11 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	8.750.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU TANJUNG KRASAK
			12 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR PAYAU	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	50.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT TANJUNG RUSA
			13 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LAUT	Jumlah Produksi Calon Induk Ikan yang Unggul ; Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	6.000 ekor;300.000 ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL PEMALI
			14 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR	Jumlah Rekomendasi Hasil uji Keamanan Pangan dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	25 Rekomendasi Hasil		UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN				KOMINFO
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Kawasan Hutan Yang Terkelola	25%	Provinsi, SKPD, Bangka	KEHUTANAN
			17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan			DINAS PERTANIAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			KELOLA KEHUTANAN	holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian			
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian			DINAS PERTANIAN
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB			PERTANIAN
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN				UPTD BALAI PENYULUHAN
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN PENYULUHAN DAN PENINGKATAN SDM PERTANIAN	Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG		Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan	DPMD
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	persentase penduduk rawan pangan yang tertangani; angka kecukupan protein (AKP) dan Angka Kecukupan (AKE)	1%; AKP= 73 gr/kap/hari, AKE= 2539,8 kkal/kap/hari		DINAS PANGAN
			1 PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	kontribusi harga pangan terhadap inflasi daerah	2%		DINAS PANGAN
		3 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian	2 PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	skor PPH	89,2		DINAS PANGAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN				UPTD PANGAN
		4 Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian	4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANGAN	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB			PERTANIAN
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian			PERTANIAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA				DISPERINDAG

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		5 Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan	7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN				DISPERINDAG
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal			PERHUBUNGAN
			9 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal			PERHUBUNGAN
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase jalan yang menuju kawasan pertanian yang dibangun dan pelihara	96%		DINAS PUPR
			11 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan Panjang Talud Sumber Air Baku (m) ; Panjang Penahan Abrasi pantai;Panjang Pengerukan dan Pengendalian; Luas Jaringan Irigasi/Optimalisasi Irigasi	2 hektar; 200 meter; 2.000 meter; 50 hektar	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	DINAS PUPR
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				BIRO EKONOMI
			13 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA
			14 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase		BAPPEDA
			15 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				KOMINFO
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			17 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			18 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif; Jumlah Hari Operasi pengawasan yang efektif dan Efisien	50 Kelompok;150 Hari Operasi		DKP
			19 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	8.750.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU TANJUNG KRASAK
			20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR PAYAU	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	50.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT TANJUNG RUSA
			21 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LAUT	Jumlah Produksi Calon Induk Ikan yang Unggul ; Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	6.000 ekor;300.000 ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL PEMALI
			22 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR	Jumlah Rekomendasi Hasil uji Keamanan Pangan dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	25 Rekomendasi Hasil		UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			23 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN				KUMKM
			24 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBAGAN USAHA				KUMKM
			25 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI				
				Kontribusi Sektor Minyak dan Gas ; Persentase Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas; Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik; Persentase Rasio Ketersedian Daya Listrik	400 Ribu Barel, 100%,100%,100%		DISTAMBEN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan	BIRO EKONOMI
			2 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Kontribusi Sektor Minyak dan Gas ; Persentase Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas; Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik; Persentase Rasio Ketersedian Daya Listrik	400 Ribu Barel, 100%,100%,100%		DISTAMBEN
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				
				Perentase panjang jalan trans bangka pada kawasan tanjung kalian yang direncanakan	100%		DINAS PUPR
			1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN				DINAS PUPR
	2 Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan		3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				DINAS PRKP
	Prioritas 5. Ketahanaa Energi • Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, Pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM) • Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan	1 Pemenuhan listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;	4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	persentase panjang jalan yang direncanakan untuk mendukung sistem transportasi darat			DINAS PUPR
			1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal			DISHUB
		2 Pengembangan Sistem Jaringan /Listrik	2 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal		Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka	DISHUB

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	panjang untuk Sumber Daya energi • Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati • Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan Sumber Daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG • Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO) • Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran					Tengah	
	3 Kemaritiman dan Kelautan		1 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT			Pangkal Pinang, Bangka Tengah	DISHUB

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	Prioritas 8. Infrastruktur, Konektivitas dan kemaritiman • Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya • Pengaturan dan pengendalian ALKI • Penguatan lembaga pengawasan laut • Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana • Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda • Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan • Percepatan pengembangan ekonomi kelautan • Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, dayadukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut • Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan	1 Pengembangan Kawasan Strategis Tanjung Kalian	1 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN				
				Persentase peningkatan tenaga kerja bersertifikat kompetensi	8%		DISNAKER
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga pelatih yang mendapat pelatihan (upgrading)	7,27%	Provinsi	UPD BLKI
		3 Pengembangan Sistem Transportasi Darat	2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja	13,33%	Provinsi	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	pesentase SMK yang memiliki sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan sekolah	50%		DINDIK
		4 Pengembangan Sistem Transportasi Laut	4 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN				KUMKM
		5 Pengembangan Sistem Transportasi Udara	5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS DAN PERKOPERASIAAN	Persentase peningkatan SDM KUMKM terlatih	75%		UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	Iptek kelautan • Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir						
	4 Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)		6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	pertumbuhan varitas bibit yang disetifikasi	1%		UPTD PENGAWASAN SERTIFIKASI MUTU BENIH
	• Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa • Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha • Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) • Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA: (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata • Percepatan pembangunan konektivitas/	1 Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing (pertanian, perikanaan, pariwisata, timah)	1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	pertumbuhan jenis bibit pertanian yang di kembangkan	1%		UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Pertumbuhan produk pariwisata yang terstandarisasi	1%		BUDPAR
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Intensiatas produk KUMK yang terinformasikan dalam setahun	2 kalii		KOMINFO
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase koperasi berkualitas	109%		DKUKM
			5 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil	5%		KUMKM
			6 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL				DISPERINDAG
		2 Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing	7 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase produk yang disetifiaksi	5%		UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
			8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	Jumlah Rekomendasi Hasil uji Keamanan Pangan dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	25 Rekomendasi Hasil		UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			9 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Beroprasioanl Pembangunan Gedung Promosi Produk-produk Koperasi dan UMKM	100%	Pangkalpinang	DINAS PRKP

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	infrastruktur • Pengembangan SDM dan IPTEK • Pengembangan regulasi dan kebijakan • Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal		10 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Pertumbuhan jumlah jenis benih yang yang diawasi	1%		UPTD PENGAWASAN SERTIFIKASI MUTU BENIH
			1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	Pertumbuhan volume usaha koperasi	1%		KUMKM
			2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI				UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN				UPTD BALAI PETERNAKAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 6	persentase peningkatan SDM KUMKM terlatih	75%		UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PERTANIAN
			8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	Persentase Penurunan Serangan Hama Penyakit Tanaman			UPTD BALAI PROTEKSI
		1 Peningkatan produktifitas, kulitas dan daya saing produk pertanian, perikanaan, timah dan pariwisata	9 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN				UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN				DIPERINDAG

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Kontribusi Produksi Benih/ bibit Pertanian terhadap PAD			UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			12 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA
			13 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase		BAPPEDA
			14 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100%	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO KESRA
			15 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Kontribusi subsektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian			DINAS PERTANIAAN
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian			DINAS PERTANIAAN
			17 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	skor PPh	89,2		DINAS PANGAN
			18 PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil	5%		DKUKM
			19 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase peningkatan SDM KUMKM terlatih	755%		UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO,	Persentase koperasi berkualitas	109%		DKUKM

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			KECIL DAN MENENGAH				
			21 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			22 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	8.750.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU TANJUNG KRASAK
			23 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	50.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT TANJUNG RUSA
			24 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN LAUT	Jumlah Produksi Calon Induk Ikan yang Unggul ; Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	6.000 ekor;300.000 ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL PEMALI
			25 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR				DISPERINDAG
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PERTANIAN
			2 PROGRAM PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK				UPTD PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN INDUSTRI
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN INDUSTRI				
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				UPTD BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH
			5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				DPMD
			6 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN				DISPERINDAG
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase kawasan industri yang dilayani air bersih	2%		DINAS PRKP
		2 Peningkatkan dan pengembangan Sumber	2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN,	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah	6,47%		DLH

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam	PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN				
			3 PROGRAM PEMLIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN SAMPAH, DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP				
							KUMKM
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN				KUMKM
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PAREKRAF				KUMKM
			3 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI				KUMKM
		3 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	4 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENAWASAN KOPERASI	Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG		Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan	DPMD
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT				DINDIK
			5 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN				DINDIK
	5 Pariwisata		1 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA				

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	Prioritas 4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata • Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara • Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri • Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjadi fokus pemasaran • Pembangunan kelembangaan pariwisata: membangun SDM pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional	1 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif , peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	2 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal			DISHUB
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal			DISHUB
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT				DISHUB
			5 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN				UPTD TERMINAL TIPE B
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERMINAL TIPE B	Persentase jalan yang menuju kawasan pariwisata yang dibangun dan dipelihara	50%		DINAS PUPR
			7 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang tersusun; Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikembangkan		Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah	DPMD
		2 Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	8 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN				KUMKM
			9 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL				KUMKM
			10 PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUKM	Persentase PD mitra Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B); Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang tercapai	60 Persentase; 80 Persentase		BAPPEDA
			11 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)			
			12 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				BIRO EKONOMI
			14 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Persentase pemuda yang mendapat pemberdayaan		Provinsi	DISPORA
			15 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase atlet yang berprestasi		Provinsi	
			1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Rasio sarana olah raga dengan jumlah atlet		Provinsi	
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	100%		BUDPAR
			3 PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100%	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO KESRA
			1 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase aparatur desa dan lembaga kemansyarakatan yang terbina; Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa yang baik; Persentase desa yang menyusun PERDES (RPJMDES, RKPDES, APBDES tepat waktu)		Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Bangka, Bangka Barat	DPMD
			2 PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH DESA	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat,	DPMD

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				yang terbina		Belitung Timur	
			3 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; Jumlah Rekomendasi yang digunakan; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	0 %; 0 Hasil; 0 %	Luar daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	KESBANGPOL
			4 PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Bangunan dan lingkungan; Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat; Rumah tangga pengguna air bersih; Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4); Ruang Terbuka Hijau ; Sarana air limbah; Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum permukiman; Rumah tangga bersanitasi; Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara; Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi	1 Dokumen		DINAS PRKP
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Persentase kawasan KotaTua Mentok yang dikembangkan			

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		3 Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan prestasi olah raga	2 PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA				
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA				
			1				
		4 Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul.		Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	100%	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINSOS
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial		Provinsi, Pangkal Pinang	UPTD PANTI SOSIAL
			1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial		Provinsi, Belitung Timur	UPTD PANTI SOSIAL
			2 PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PANTI SOSIAL	1 Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa		Kabupaten Bangka	RSJ
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	2 Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	2 42 Hari	Kabupaten Bangka	
		5 Pengembangan Kawasan Strategis Kota Tua Muntok	4	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINSOS
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase pembinaan keagamaan	100%	Luar Daerah, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO KESRA

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		6 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata	1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial		Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINSOS
III	**DIMENSI PEMERATAAN DAN WILAYAH**		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lansia yang ikut olah raga lansia			
	1 Pemerataan antar Kelompok Pendapatan		3 PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase bantuan hukum	85%	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO HUKUM
	Prioritas 7. Penanggulanggan Kemiskinaan Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana	1 Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan penanganan pada fakir miskin		Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINSOS
			6 PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Pesentase			KUMKM
			1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI				KUMKM
			2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase penduduk miskin yang bekerja disektor perdagangan			DISPERINDAG
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase pemuda miskin			DISPORA
		2 Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	4 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Pesentase penduduk miskin yang bekerja disektor pertaniaan			PERTANIAN
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	perentase penduduk miskin yang bekerja disektor perkebunaan			PERTANIAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	persentase penduduk miskin yang bekerja sebagai peternak			PERTANIAN
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Persentase penduduk miskin yang bekerja sebagai nelayan			DKP

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	Pengembangan dan penguatan sistem terkait penyediaan layanan dasar Efektivitas program Bidik Misi Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH		8 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	persentase penduduk miskin yang bekerja disektor perikanaan budidaya			DKP
		3 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.	9 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Intensistas informasi yang ditayangkan mengenai program-program penanggulangan kemiskinan			DKP
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal			DISHUB
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT				DISHUB
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Perentase penduduk miskin dengan rumah tidak layak huni			PEKIM
			13 PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT				
			14 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN				BAPPEDA
			15 PROGRAM PERENCANAAN SOSBUD DAN PEMERINTAHAN	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100%	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO KESRA
			16 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1 Persentase kepesertaaan JKN	1 77,50%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINAS KESEHATAN
			17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase siswa SMA miskin yang dapat beasiswa			DINDIK
			19 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase siswa SMK miskin yang dapat beasiswa			DINDIK
			20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswapendidikan khusus miskin yang dapat beasiswa			DINDIK
			21 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	persentase sanitasi dan air bersih penduduk miskin			PERKIM

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			22 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN				
			23				
				Panjang Jalan dan jembatan Provinsi dalam kondisi mantap	96%		DINAS PUPR
			PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN				DINAS PUPR
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				DINAS PUPR
			2 PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN				DINAS PRKP
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN				DINAS PRKP
			4 PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT	Luas Kawasan Konservasi; Jumlah Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut yang Konsisten	750.000 Ha;2 Rekomendasi Izin		DKP
			5 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
	2 Pembangunaan Perdesaan dan Perkotaan		7 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal			DISHUB

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	Prioritas 9. Pembangunan Wilayah		8 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT				DISKOMINFO
	Pembangunaan Perdesaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa /permukiman transmigrasi Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan Sinergi program pembangunan desa terpadu yang dikoordinir oleh pemerintah daerah Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa	1 Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	10 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				DISKOMINFO
			11 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
			12 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG		Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan	DPMD
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang tersusun; Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikembangkan		Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah	DPMD
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	Persentase aparatur desa dan lembaga kemansyarakatan yang terbina; Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa yang baik; Persentase desa yang menyusun PERDES (RPJMDES, RKPDES, APBDES tepat waktu)		Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Bangka, Bangka Barat	DPMD
			3 PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH DESA			Belitung, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang	
			4			Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat,	

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan/trasmigrasi yang menuju klasterisasi permukiman Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan /transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota					Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan	
			PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN PANGAN	persentase penduduk rawan pangan tertangani	1%		DINAS PANGAN
			PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	kontribusi harga panganterhadap inflasi daerah	2%		DINAS PANGAN
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI PANGAN	skor PPH			DINAS PANGAN
			6 PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	1 Persentase kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	1 54%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
		2 Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	4 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	4 60%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	
			10				DISPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA				DISPORA
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	pesentase sekolah daerah terpencil yang diinterpensi			DINDIK
			12 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB			DINAS PERTANIAN
			13 PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB			DINAS PERTANIAN
			14 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian			DINAS PERTANIAN
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian			DINAS PERTANIAN
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Peningkatan Kelompok Masyarakat Yang Memanfaatkan Hutan; Rehabilitasi Lahan Kritis di	115 Kelompok;30 %		DINAS KEHUTANAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				Kawasan Hutan			
			17 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP
			18 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			19 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN				DISKOMINFO
			20 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase transmigran yang mendapat bantuan	10%	Luar daerah, Provinsi	DINAS TENAGA KERJA
			21 PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGARASI	Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang Diintervensi Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	75%	Provinsi	BPBD
			22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Kedaruratan dan Logistik/Peralatan Penanggulangan Bencana	80%	Provinsi	BPBD
			1 PROGRAM LOGISTIK DAN PENINGKATAN TANGGAP DARURAT BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	75%	Provinsi	BPBD
			2 PROGRAM PENINGKATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINSOS
			3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	kontribusi harga pangan terhadap inflasi daerah	2%		DINAS PANGAN
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan panjang talud Sumber Air Baku (m); Panjang Penahan Abrasi pantai; Panjang Pengerukan dan Pengendalian; Luas Jaringan	2 Ha; 200 meter; 2000 meter; 50 Ha	Kab.Bangka, Kab.Bangka Selatan, Kab.Bangka Tengah, Kab.Bangka Barat, Pangkalpinang, Kab.Belitung Timur	DINAS PUPR

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				Irigasi/ Optimalisasi irigasi			
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Tersedianya Dokumen inventarisasi data insfrastruktur pengendalian banjir	100.000 meter	Kel,pasir padi Pangkalpinang	
			5				SMA/SMK/SLB
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TATA KELOLA KEPENDIDIKAN				KOMINFO
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
	Pembangunaan Perkotaaan Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Penerapan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) : tertata baik, aman, nyaman, dan layak huni (memiliki taman, fasilitas olahraga, dan sarana rekreasi) Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal	3 Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	8 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				DINAS KEHUTANAN
			9 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				UPTD KEHUTANAN
			10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA KEHUTANAN	Data dan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	4 dokumen;70 %	Provinsi	DLH
			11 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP				DINAS PUPR
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Data dan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	4 dokumen;70 %	Provinsi	DLH
			1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP				DLH
			1 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Data dan Informasi Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	4 Dokumen;70 %		DLH
			1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Penaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Penegakan Hukum	38,1 %;64 Nilai;82 Nilai;100 %	Bangka	DLH

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				Lingkungan			
			1 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Sertifikat Akreditasi laboratorium	1 Sertifikat	Provinsi, SKPD	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN				PUPR
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				
			4 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH				DISHUT
		4 Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	5 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM				PERKIM
		5 Pengembangan Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	6 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Data dan Informasi Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	4 Dokumen;70 %		DLH
		6 Pengembangan Pengelolaan kawasan perlindungan setempat	7 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Penaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Penegakan Hukum Lingkungan	38,1 %;64 Nilai;82 Nilai;100 %		DLH
		7 Pengembangan Pengelolaan kawasan lindung lainnya	1 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Sertifikat Akreditasi laboratorium	1 Sertifikat		UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
		8 Pengendalian kulitas air	2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN				DINAS PUPR
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				
			4 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH				DISHUT

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			5 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM				PERKIM
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN				DLH
			7 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP				DLH
			1 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP				UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
		9 pengendalian kualitas udara	2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN				PUPR
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				
			4 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH				DISHUT
			5 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM				PERKIM
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Data dan Informasi Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	4 Dokumen;70 %		DLH
			7 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Penaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air;	38,1 %;64 Nilai;82 Nilai;100 %		DLH

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				Indeks Kualitas Udara; Penegakan Hukum Lingkungan			
			1 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah	6,47%		DLH
		10 Peningkatan tutupan hutan	2 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP				DISHUT
			3 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sertifikat Akreditasi laboratorium	1 Sertifikat		UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN				
			5 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH				DISHUT
			6 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM				UPTD KEHUTANAN
			7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYAN TEKNIS TATA KELOLA KEHUTANAN	Luas Kawasan Konservasi; Jumlah Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut yang Konsisten	750.000 Ha;2 Rekomendasi Izin		DKP
			8 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
		11 Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	9 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			10 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				

4.2.2. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Dokumen RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 korelasi Sasaran RPJPD dan prioritas pembangunan untuk tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel IV.7

Tabel IV.7 Korelasi sasaran RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Sasaran Pokok Pembangunan Tahun 2005-2025 (RPJPD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2018
(1)	(2)
1. Meningkatnya ekonomi daerah	1. Peningkatan Ekonomi
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	2. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	3. Pembangunaan demokrasi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	4. Tata Kelola Birokarasi dan Pelayanaan Publik
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	5. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	6. Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Tabel IV.7 di atas, prioritas RPJPD sama dengan Sasaran Pokok Pembangunan Tahun 2005-2025 (RPJPD), hal ini dikarenakan periode RPJMD yang akan berakhir pada tahun 2017 sehingga menggunakan Prioritas Pembangunan pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025.

4.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial; dan
2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

Berikut adalah penjelasan arah kebijakan pembangunan daerah yang dapat dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2018:

1. Standar Pelayanan Minimal

   Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. <u>Bidang Pendidikan</u>

      1) Pendidikan Menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.

      2) Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

      Selain itu, perumusan kegiatan bidang pendidikan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 antara lain:

      1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar bidang pendidikan dasar, menengah, kesetaraan dan kekhususan di provinsi, kabupaten/kota;
      2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya "kembali ke sekolah" (*back to school*) bagi anak usia sekolah di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang;
      3) Peningkatan SPM Bidang pendidikan, dengan ketentuan untuk kabupaten/kota, meliputi pendidikan dasar dan kesetaraan. Untuk Provinsi, meliputi pendidikan menengah dan kekhususan;
      4) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bidang pendidikan;
      5) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pada lingkup provinsi maupun kabupaten/kota;
      6) Pengendalian dan evaluasi secara berkala penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan baik terkait dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar; dan
      7) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkup kabupaten/kota.

   b. <u>Bidang Kesehatan</u>
      1) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
      2) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

      Selain itu, perumusan kegiatan bidang kesehatan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 antara lain:

      1) Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
      2) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (selain yang ditetapkan melalui SPM):
         a) Malaria
         b) Penyakit Tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)

c) Penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun
d) Penurunan prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 +

3) Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
4) Promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
5) Penyelesaian permasalahan perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah yang akan ditutup pada tahun 2019 (*passing out*).

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum dan penataan ruang pada Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota; dan
2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional lintas kabupaten/kota.

Setiap jenis pelayanan dasar tersebut diterima oleh setiap warga negara. Selain itu, perumusan kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 antara lain:

1) Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
2) Percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
3) Percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat pada Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 antara lain:

1) Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi, melalui:
   a) Penyusunan/pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);
   b) Penyusunan/pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
   c) Penyusunan/pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL); dan

d) Pelaksanaan Studi Primer, terutama *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA).

2) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
3) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
4) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
5) Kepastian perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
6) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
7) Pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
8) Menyusun rencana penyediaan hunian layak;
9) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh; dan
10) Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah penanganan konflik sosial, antara lain:

1) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan
4) Penegakan Peraturan Daerah.

f. Bidang Sosial

SPM bidang sosial meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar SPM sosial pada Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang sosial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 antara lain:

1) Percepatan penanggulangan kemiskinan;
2) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia dalam panti;
3) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia di luar panti;
4) Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
5) Program Keluarga Harapan (PKH);
6) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
7) Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB);
8) Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT);
9) Asistensi Sosial Anak Terlantar;
10) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN);
11) Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda;
12) Basis data terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan; dan
13) Pencegahaan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional

Selain SPM, arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional sebagai berikut:

a. Tenaga Kerja

Dalam rangka pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
2) Pengembangan instruktur yang kompeten;
3) Pengukuran produktivitas tingkat daerah Provinsi;
4) Pengelolaan informasi pasar kerja;
5) Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
6) Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
7) Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
8) Akreditasi lembaga pelatihan;
9) Pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
10) Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel;
11) Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja;
12) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna) di daerah kabupaten/kota dan provinsi;

13) Fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
14) Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
15) Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia);
16) Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;
17) Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
18) Peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial;
19) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi tempat kerja pekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
20) Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial bagi mediator hubungan industrial;
21) Peningkatan pemahaman kepegawaian daerah terhadap fungsional mediator hubungan industrial;
22) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK);
23) Penyusunan Struktur dan Skala Upah di perusahaan;
24) Efektivitas pelaksanaan Dewan Pengupahan;
25) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan termasuk Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
26) Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro di Provinsi dan Kabupaten/kota.

Angka 8 (delapan) sampai dengan 26 (dua puluh enam) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. <u>Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</u>

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
2) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
3) Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
4) Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;
5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
6) Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
7) Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

c. Pangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, maka arah kebijakan kedaulatan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan antara lain:

1) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
2) Stabilisasi harga bahan pangan;
3) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
4) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan
5) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Selanjutnya, dalam perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
2) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
3) Lumbung Pangan;
4) Toko Tani Indonesia (TTI); dan
5) Kawasan pengembangan komoditas (kawasan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura).

Selain itu, kewenangan provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1) Kewenangan Provinsi

   Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup lebih dari satu Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.

2) Kewenangan Kabupaten/Kota

   Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

d. Pertanahan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pertanahan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 adalah dengan penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.

e. Lingkungan Hidup

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
2) Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK, kontribusi nasional perubahan iklim (*National Determined Contribution*) di tingkat provinsi, serta pelaksanaan adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim, yang terintegrasi ke dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Agreement, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi GRK, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional; serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
3) Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4) Pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
5) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup.

f. <u>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</u>

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota pada urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka dalam perumusan kegiatan RKPD Tahun 2018 agar memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
2) Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
3) Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *database* kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;

4) Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
5) Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka dalam perumusan kegiatan RKPD Tahun 2018 agar memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di desa;
2) Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa;
3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
4) Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
5) Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
6) Penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa;
7) Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat desa;
8) Pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa;
9) Pengawalan implementasi Undang-Undang desa secara sistematis; dan
10) Pembentukan desa menjadi desa adat dan desa adat menjadi desa.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka menurunkan angka fertilitas total (*total fertility rate*) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk sesuai dengan amanat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan, maka dalam perumusan program/kegiatan yang perlu diselaraskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*Additional Users*) melalui:
   a) Peningkatan jumlah Peserta KB baru;
   b) Peningkatan jumlah *Contraceptive Prevalency Rate (CPR)*;
   c) Penurunan tingkat putus pakai (*Discontinue Rate*)
   d) Peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
   e) Penurunan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*);
   f) Penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun); dan

g) Penurunan jumlah kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan Wanita Usia Subur/WUS (15-49 tahun).

2) Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja melalui:
   a) Peningkatan partisipasi keluarga Balita pada Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
   b) Peningkatan partisipasi keluarga Remaja pada Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
   c) Peningkatan partisipasi keluarga Lansia pada Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
   d) Peningkatan partisipasi Remaja pada kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
   e) Peningkatan usia kawin pertama;
   f) Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga pra sejahtera (KPS) melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
   g) Pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).

3) Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan melalui:
   a) Pemanfaatan parameter kependudukan oleh Pemangku Kepentingan untuk penyusunan perencanaan pembangunan;
   b) Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah;
   c) Peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal dan informal;
   d) Penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan (bonus demografi);
   e) Penyusunan model solusi strategis dampak kependudukan; dan
   f) Penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan terkini.

4) Pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) bersinergi dengan seluruh dinas/instansi, mitra kerja dan swasta di Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah, yang mencakup:
   a) Kegiatan peningkatan kesertaan ber-KB (berbagai kegiatan prioritas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi);
   b) Kegiatan Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja (berbagai kegiatan terkait Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
   c) Penggerakan Mekanisme Operasional Lini Lapangan oleh Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dan peningkatan peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/ Sub PPKBD (Kader);
   d) Penguatan Koordinasi dan kemitraan dengan dinas dan instansi daerah serta mitra terkait dalam pembagunan Kampung Keluarga Berencana (KB); dan
   e) Peningkatan kegiatan lintas sektor yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokasi Kampung Keluarga Berencana (KB).

5) Pemanfaatan dan pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);

6) Pemanfaatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub PPKBD (Kader) untuk kegiatan KIE, penggerakan dan pembinaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK); dan

7) Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon) sampai dengan fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan Keluarga Berencana (KB) diseluruh tingkatan wilayah (melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) - Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

i. Perhubungan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidang perhubungan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan; dan
2) Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muatan angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan dari pelabuhan utama.

Selain itu, hal-hal yang harus diperhatikan bahwa Pemerintah Provinsi wajib menganggarkan terkait kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang kewenangannya telah beralih dari kabupaten/kota ke provinsi.

j. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
2) Penyelenggaran komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
3) Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
4) Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah;
5) Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
6) Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)-*e government*.

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dalam rangka pelaksanaaan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
2) Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM;
3) Penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
4) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
5) Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
6) Pengawasan koperasi.

l. Penanaman Modal

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) PTSP provinsi dan kabupaten/kota serta KEK dan FTZ yang terhubung dengan SPIPISE dan *tracking system* (implementasi SPIPISE);
2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal;
3) *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan persetujuan penanaman modal;
4) *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal;
5) Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM) kepada provinsi dan kabupaten/kota; dan
6) Fasilitasi penyelesaian masalah.

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka peningkatan peran kepemudaan dan olah raga di daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota;
   a) Meningkatkan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum;
   b) Mendukung pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia;
   c) Meningkatkan peran aktif pemuda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mencegah paham radikalisme;
   d) Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan
   e) Mengembangkan pemuda dalam kewirausahaan dan kecakapan kerja.
2) Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di provinsi dan kabupaten/kota
   a) Kampanye olahraga tradisional, usia dini, pelajar, mahasiswa dan lansia;
   b) Kampanye olahraga massal, petualangan, tantangan dan wisata
   c) Fasilitasi prasarana olahraga rekreasi di daerah;
   d) Meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi; dan
   e) Mendukung pelaksanaan Asian Games 2018.

n. Statistik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan statistik sektoral di daerah, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
2) Menyelenggarakan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
3) Melakukan pengolahan hasil statistik sektoral;
4) Melakukan analisa data statistik sektoral;

5) Melakukan penyajian data statistik sektoral;
6) Melakukan diseminasi data statistik sektoral;
7) Penyediaan peralatan infrastruktur;
8) Koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran; dan
9) Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.

o. Persandian

Dalam rangka meningkatkan pelayanan persandian untuk pengaman informasi pemerintah daerah, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
1) Penyusunan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi;
2) Pengelolaan informasi berklasifikasi;
3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
4) Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
5) Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaring komunikasi sandi;
6) Pelaksanaan operasional pengelolaan pengamanan komunikasi sandi; dan
7) Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan informasi.

Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
1) Peralatan Persandian (Palsan) *jammer* (pengacak frekuensi) diprioritaskan kepada provinsi berdasarkan prioritas hasil pemetaan melalui mekanisme pinjam pakai oleh Lembaga Sandi Negara; dan
2) Dukungan APBD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman di pusat.

p. Kebudayaan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kebudayaan, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
1) Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
2) Revitalisasi museum; dan
3) Revitalisasi taman budaya.

q. Perpustakaan

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan Peningkatan Capaian Peringkat *Programme International for Student Assesment* (PISA): *Reading Literacy* melalui Kegiatan yang terkait dengan Peningkatan Capaian Peringkat PISA yaitu:

1) Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;
2) Peningkatan kuantitas dan kualitas Tenega pengelola Perpustakaan Sekolah SMP, SMA,

SMK (Kejuruan) dan SLB;
3) Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB; dan
4) Pengembangan Perpustakaan Vokasi termasuk didalamnya BLK.

r. Kearsipan

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain penguatan sistem kearsipan berbasis TIK; dan
2) Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

s. Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Ditetapkannya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
2) Target pencadangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3) Perizinan usaha perikanan tangkap;
4) Pendataan kapal perikanan;
5) Kerjasama Daerah untuk nelayan andon;
6) Terkendalinya sumber daya kelautan dan perikanan; dan
7) Perizinan unit pengolahan ikan.

t. Pariwisata

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka dalam perumusan kegiatan RKPD Tahun 2018 agar memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
Pariwisata:

1) Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
2) Pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

3) Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungnan alam dan sosial budaya; dan
4) Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pengembangan Ekonomi Kreatif:
1) Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif sepanjang rantai nilai ekonomi kreatif; dan
2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif.

u. Pertanian

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
1) Prioritas peningkatan produksi pangan, dengan kegiatan:
   a) Cetak sawah
      1. Kewenangan provinsi: penataan prasarana pertanian.
      2. Kewenangan kabupaten/kota: pengembangan prasarana pertanian.
   b) Optimalisasi lahan
   c) Optimalisasi produksi ternak (SIWAB)
      1. Kewenangan provinsi: pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dan 1 (satu Daerah provinsi, pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
      2. Kewenangan kabupaten/kota: pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota.
2) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian termasuk irigasi, dengan kegiatan saprodi budidaya padi, jagung, dan kedelai
   a) Kewenangan provinsi: pengawasan peredaran sarana pertanian, penataan prasarana pertanian.
   b) Kewenangan kabupaten/kota: pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.

v. Kehutanan

Dalam rangka meningkatkan tata kelola hutan, perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
1) Terwujudnya kelembagaan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH (kecuali kesatuan pengelolaan hutan konservasi/KPHK) guna mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan;
2) Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan wilayah Provinsi berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat wilayah provinsi guna mengetahui data dan informasi sumber daya hutan, potensi kekayaan alam, sosial ekonomi dan lingkungannya;
3) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kehutanan tingkat Provinsi sebagai pedoman dan arah bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota masyarakat, pelaku usaha, lembaga dalam penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien;

4) Pemantapan kawasan hutan guna mendukung program pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 termasuk terkait penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan;
5) Pembinaan dan evaluasi pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, terhadap pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, dan jasa lingkungan kecuali pemanfatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
6) Pembinaan industri primer hasil hutan kayu < 6000 m^3/tahun dan UMKM pengolahan hasil hutan yang mendukung pelaksanaan Sertifikasi, Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK);
7) Pelaksanaan rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara guna pemulihan dan peningkatan produktivitas lahan, terutama pada daerah yang terkena dampak bencana dan perubahan iklim;
8) Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya sehingga fungsi hutan tercapai secara optimal dan berkelanjutan;
9) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan;
10) Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA), perlindungan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan/atau tidak termasuk dalam lampiran (*appendix*) CITES, dan pengelolaan kawasan ekosistem penting, serta daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
11) Peningkatan akses masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan serta dinamika sosial budaya melalui Perhutanan Sosial dengan cara 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan;
12) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di tingkat provinsi; dan
13) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, terutama pada daerah yang masuk dalam DAS prioritas dan rawan bencana.

w. <u>Energi dan Sumber Daya Mineral</u>

Dalam rangka pengelolaan energi dan sumber daya mineral, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
1) Optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan batubara melalui dukungan operasionalisasi dan penguatan koordinasi antara perangkat daerah yang membidangi urusan ESDM dengan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan;
2) Kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan nasional, melalui:
   a) Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; dan
   b) Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD Provinsi) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum

Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

3) Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi;
4) Penguatan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
5) Pemanfaatan potensi energi setempat dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
6) Pengawasan terhadap:
   a) penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
   b) penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL agar sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah (sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009);
   c) pelaksanaan kebijakan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017.
7) Dukungan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dalam kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran;
8) Penyediaan database perizinan di bidang ESDM;
9) Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan;
10) Percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.

x. Perdagangan

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Perijinan dan pendaftaran perusahaan;
2) Sarana distribusi perdagangan;
3) Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
4) Pengembangan ekspor; dan
5) Standarisasi dan perlindungan konsumen.

y. Perindustrian

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang perindustrian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Perencanaan pembangunan industri;
2) Perizinan;
3) Sistem informasi industri nasional;
4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri melalui penguatan pengembangan model kerjasama satuan pendidikan dengan industri/swasta (pendidikan akademi komunitas industri dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri);
5) Penumbuhan populasi dan pengembangan industri (penyediaan lahan);

6) Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
7) Pengembangan teknologi.

z. Transmigrasi

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang transmigrasi, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan konektivitas dan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan agropolitan, minapolitan, wisata, dan transmigrasi;
2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
4) Pemerintah Daerah agar mengidentifikasi, mengkaji, baik bersifat administratif dan teknis untuk kawasan transmigrasi;
5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penataan persebaran transmigran;
6) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi pemantapan fungsi satuan permukiman; dan
7) Pemerintah Daerah menyiapkan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya.

Selain itu, perumusan kegiatan dalam bidang transmigrasi antara lain sebagai berikut:

1) Pemenuhan SPM pelayanan dasar di kawasan transmigrasi;
2) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat di permukiman transmigrasi;
3) Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat di permukiman transmigrasi;
4) Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota;
5) Pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
6) Kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

aa. Pengawasan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan: 1) kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin; 2) pengawasan prioritas

nasional dan/atau daerah; 3) pengawalan Reformasi Birokrasi; dan 4) penegakan Integritas; dan

2) Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 750/4277/Sj Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka diperlukan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

bb. Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya;

2) Updating data dan informasi yang akurat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya;

3) Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota dan Perubahan APBD kabupaten/kota untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran;

4) Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dengan menggunakan format I.A, format I.B, dan format I.C peraturan menteri ini;

5) Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan

6) Penyusunan dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

cc. Keuangan Daerah

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas pengelolaan PPK BLUD pada provinsi, kabupaten/kota dengan melakukan bimbingan teknis penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan PPK BLUD pada masing-masing Pemerintah Daerah;
2) Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi reporting pada provinsi, kabupaten/kota dengan melakukan bimbingan teknis dan *training of trainer* pada masing-masing Pemerintah Daerah;
3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah provinsi, kabupaten/kota;dan
5) Penyediaan perangkat pendukung penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan *e-reporting* pada provinsi, kabupaten/kota oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

dd. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2) Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub bidang urusan pemerintahan;
3) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) cabang provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah;
4) Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan
5) Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

ee. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan pengembangan guna mendukung kinerja pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang menjadi urusan pemerintahan daerah;

2) Optimalisasi pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil kelitbangan;
3) Penguatan dan pelaksanaan kebijakan inovasi di daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah; dan
4) Penyediaan dan peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia kelitbangan berbasis fungsional.

ff. Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sasaran prioritas perkotaan sesuai RPJMN 2015-2019, dan mendukung Kebijakan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional serta target *Sustainable Development Goals* (SDGs), sesuai kewenangan provinsi dan kabupaten/kota maka dalam perumusan kegiatan RKPD tahun 2018 agar memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung kebijakan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional dengan penguatan kelembagaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan terpadu;
2) Melaksanakan kerjasama pengelolaan perkotaan pada kawasan Perkotaan yang bertetangga atau pada kawasan metropolitan maupun kawasan pada jaringan lintas perkotaan (*sister city*) pada wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan/pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan;
3) Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan penyediaan/pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan sesuai Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) berdasarkan kewenangan, klasifikasi dan tipologi perkotaan;
4) Melaksanakan *updating* basis data serta pemanfaatan dan penyajian data informasi perkotaan terpadu dan terintegrasi dengan menyusun profil perkotaan yang mendukung sistem informasi perkotaan; dan
5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan di provinsi dan kabupaten/kota.

gg. Perbatasan Antar Negara

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan antar negara, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi-informasi melalui kegiatan yang diarahkan kepada:
   a) Mengembangkan industri pengolahan kawasan perbatasan berbasis potensi unggulan;
   b) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung optimalisasi pemanfaatan potensi SDA lokal;
   c) Membangun fasilitas pemasaran komoditas unggulan;

d) Meningkatkan kualitas produk hasil industri;
e) Meningkatkan dan memperluas akses permodalan, koperasi, dan UMKM;
f) Membangun/meningkatkan pasar tradisional;
g) Membangun/meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pasar; dan
h) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha ekonomi masyarakat.

2) Pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan diarahkan kepada:
a) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar irigasi dan sumber daya air;
b) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat di kawasan perbatasan darat;
c) Membangun/meningkatkan infrastruktur jalan lingkungan/jalan non status untuk membuka keterisolasian wilayah dan akses perekonomian masyarakat;
d) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan ketenagalistrikan (PLN/PLTS);
e) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar telekomunikasi dan informasi;
f) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
g) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
h) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar/kesehatan;
i) Membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan;
j) Meningkatkan sarana operasional aparatur pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan; dan
k) Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan.

hh. Batas Daerah dan Toponimi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penegasan batas dan toponimi, maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 perlu memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Penguatan mekanisme kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi);
2) Fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi);
3) Identifikasi, inventarisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi); dan
4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi).

ii. Penanganan Bencana

Dalam rangka antisipasi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan

kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar;
2) Fasilitasi pusat dan daerah bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar;
3) Sarana Prasarana yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran;
4) Implementasi penerapan SPM bidang bencana dan pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5) Daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
6) Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran.

jj. Pemerintahan Umum

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
2) Peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
3) Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
4) Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan penanganan konflik.

kk. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2018 antara lain memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Reviu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanagan daerah, termasuk pembentukan produk hukum daerah yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus. Guna mewujudkan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang responsif, akomodatif dan akuntabel, agar dapat memberi dampak positif terhadap kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta pelayanan secara cepat, murah dan lebih baik;

2) Dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, mengingat terdapat 171 daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota;
3) Evaluasi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mengetahui efektifitas tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah, penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah; dan
4) Penyusunan dan evaluasi mandiri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Pemerintah Provinsi, serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan memperhatikan arah kebijakan RKP tahun 2018 dan pencapaian SPM diatas, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2018 tertuang dalam Tabel IV.8 berikut ini.

Tabel IV.8 Arah Kebijakan dan Program RKPD 2018 Dalam Mendukung Capaian SPM (Standar Pelayanaan Minimal)

No	Prioritas SPM	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
1	SPM Bidang Pendidikan 1.Pendidikan Menengah; 2.Pendidikan Khusus;	1 peningkatan akses pelayanan pendidikan	1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	APK SMA	DINAS PENDIDIKAN
			2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	APK SMA	DINAS PENDIDIKAN
			3 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	APK Pendidikan Khusus	DINAS PENDIDIKAN
		2 peningkatan pelayanan pedidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing	1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang bersertifikasi	DINAS PENDIDIKAN
			2 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN TEKNIS PENDIDIKAN MENENGAH, KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS	persentase SMA, SMA dan pendidikan khusus yang difasilitasi	UPTD PENDIDIKAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TATA KELOLA KEPENDIDIKAN	persentase biaya BOS yang terialisasi	SMA/SMK/SLB
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	bangunan gedung arsip yang beroprasional	DINAS PRKP
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap anak sekolah	PERHUBUNGAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap anak sekolah	PERHUBUNGAN
			7 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI	ditanyakan kembali ke PD	DISKOMINFO
			8 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	BIRO KESRA
			9 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina	DPMD

No	Prioritas SPM	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
			10 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	BAPPEDA
			11 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	BAPPEDA
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ; Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka; Pertambahan pengunjung perpustakaan	DKPUS
			13 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi; Pertambahan pengelola perpustakaaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar	DKPUS
		1 Peningkatan Kualitas Pelayanaan Publik	1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Perentase sekolah SMA yang fasilitasi perizinaan/SMA Terakriditasi	DINDIK
			2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Perentase sekolah SMK yang fasilitasi perizinaan/Terakriditasi	DINDIK
			3 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Perentase sekolah Sekolahluar biasa yang fasilitasi perizinaan/terekriditasi	DINDIK
		Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan	1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase siswa SMA miskin yang dapat beasiswa	

No	Prioritas SPM	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
		angka kemiskinan.			
			2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswa SMK miskin yang dapat beasiswa	
			3 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase siswapendidikan khusus miskin yang dapat beasiswa	
2	SPM Bidang Kesehatan 1. Pelayanan bagi penduduk berdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /berptensi bencana provinsi, 2. Pelayan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi	1 peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1 PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT		
				1 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	DINKES
				2 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	DINKES
				3 Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS	DINKES
				4 Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	DINKES
				5 Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	DINKES
			2 PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	DINKES
				2 Persentase perempuan usia 30 s.d 50 tahun yang dideteksi dini kaner serviks dan payudara	DINKES
				3 Persentase menurunnya penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, Diabetes Melitus)	DINKES
				4 Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes Rate minimal 85%)	DINKES

No	Prioritas SPM	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
				5 Prevalensi HIV (Ket: target prevalensi HIV kurang dari sepuluh persen)	DINKES
				6 Persentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria	DINKES
				7 Persentase kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	DINKES
				8 persentase penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ispa, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	DINKES
			3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS		DINDIK
			4 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN		DINDIK
			5 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS		DINDIK
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TATA KELOLA KEPENDIDIKAN		SMK/SMA/SLB
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	persentase kecamata yang di intervensi dengan sarana prasarana air bersih	
			8 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	BIRO KESRA
			9 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina	DPMD

No	Prioritas SPM	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
			10 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	BAPPEDA
			11 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	BAPPEDA
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		KOMINFO
			13 PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORUIM KESEHATAN	1 Persentase pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	UPTD KESEHATAN
			14 PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	persentase pangan yang aman dikonsumsi	DINAS PANGAN
		2 peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	1 Persentase RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	
				2 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	DINKES
			2 PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORUIM KESEHATAN	1 Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standa	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	1 Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	RSUP
			4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM	1 Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP	RSUP
			5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	1 Persentase Resep Sesuai Formularium	RSJ
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA	1 Persentase Pasien pasung yang terlayani	RSJ
				2 Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi psikososial	
				3 Persentase Kabupaten/Kota yang terintegrasi pelayanan keswa	

No	Prioritas SPM	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
				4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi	
			7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA	1 Persentase Ruang Rawat Jalan yang Memadai	RSJ
				2 Persentase Ruang Rawat Inap yang Memadai	
				3 Persentase Ruang Penunjang yang Memadai	
				4 Persentase Bangunan Penunjang yang Memadai	
				5 Persentase Alat Kesehatan yang Sesuai Standar	
				6 Persentase Peralatan Penunjang	
				7 Persentase Obat dan Perbekalan Kesehatan	
			8 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina	DPMD
			9 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		DISKOMINFO
			10 Program peningkatan pelayanan teknis hygienis perusahaan dan kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	
		3 Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	1	1 Persentase tenaga/SDM kesehatan yang mengikuti program peningkatan kompetensi	DINKES
				3 Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	DINKES
			2 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	RSUP
			3 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	RSJ
		4 Peningkatan Kualitas Pelayanaan Publik	1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN	1 persentase akrediatsi pelayanan RS	RSUP

No	Prioritas SPM	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	1 Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	RSUP
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	3 Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Layanan	RSJ
				4 Persentase elemen Akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi	
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA	1 Persentase Kabupaten/Kota yang terintegrasi pelayanan keswa	RSJ
		5 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.	1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	1 Persentase kepesertaaan JKN	DINAS KESEHATAN
3	SPM Bidang PU dan Penataan Ruang 1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional untuk lintas kabupaten/kota 2.Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah dengan SPLAD regional untuk lintas kabupaten/kota	1 Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang Jalan dan jembatan Provinsi dalam kondisi mantap	DINAS PUPR
		2 Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	1 PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN		DINAS PUPR
			2 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam kondisi mantap	DINAS PUPR
		3 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase panjang jalan yang menuju kawasan kiak yang dibangun	DINAS PUPR
		4 Pengembangan Kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase panjang jalan menuju kawasan strategis indistri perikanaan terpadu teluk kelabat yang bangun dan dipelihara	DINAS PUPR
		5 Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR		PUPR
		6 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR		DINAS PUPR

No	Prioritas SPM	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
			2 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase panjang jalan menuju kawasan strategis indistri perikanaan Tanjung Binga yang dibangun dan pelihara	DINAS PUPR
		7 Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah produk pertanian;	2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR		DINAS PUPR
		8 Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan	1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan yang menuju kawasan pertanian yang dibangun dan pelihara	DINAS PUPR
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan Panjang Talud Sumber Air Baku (m) ; Panjang Penahan Abrasi pantai;Panjang Pengerukan dan Pengendalian; Luas Jaringan Irigasi/Optimalisasi Irigasi	DINAS PUPR
		9 Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	7 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan yang menuju kawasan pariwisata yang dibangun dan dipelihara	DINAS PUPR
		10 Pengembangan Kawasan Strategis Tanjung Kalian	1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Perentase panjang jalan trans bangka pada kawasan tanjung kalian yang direncanakan	DINAS PUPR
		12 Pengembangan Sistem Transportasi Darat	1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	persentase panjang jalan yang direncanakan untuk mendukung sistem transportasi darat	DINAS PUPR
		13 Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang Jalan dan jembatan Provinsi dalam kondisi mantap	DINAS PUPR
4	SPM Perumahan dan Permukiman 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi 2. Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena program relokasi pemerintah Provinsi	1 Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN		PERKIM
		2 Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN		PERKIM

No	Prioritas SPM	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
		3 Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN		DINAS PRKP
		4 Pengembangan Kawasan Strategis Kota Tua Muntok	2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Bangunan dan lingkungan; Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat; Rumah tangga pengguna air bersih; Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4); Ruang Terbuka Hijau ; Sarana air limbah; Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum permukiman; Rumah tangga bersanitasi; Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara; Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi	DINAS PRKP
		12 Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN		DINAS PRKP
			2 PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT		DINAS PRKP
		5 Pengembangan Sistem Prasarana Permukiman	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Persentase kawasana kumuh yang diintervensi dengan sarana dan prasarana permukiman	DINAS PRKP

No	Prioritas SPM	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP		DLH
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	persentase sanitasi dan air bersih penduduk miskin	
		6 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.	14 PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT	Perentase penduduk miskin dengan rumah tidak layak huni	PEKIM
5	SPM Bidang Sosial 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti 4.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1 Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	1 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	DINSOS
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	UPTD PANTI SOSIAL
			3 PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	UPTD PANTI SOSIAL
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	1 Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	RSJ
				2 Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	
		2 Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata,	1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan	DINSOS

No	Prioritas SPM	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
		dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.		jaminan sosial	
			2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	Prosentase pembinaan keagamaan	BIRO KESRA
			3 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	DINSOS
			5 PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase lansia yang ikut olah raga lansia	DISPORA
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH	Intensiats pelayanan hukum dalam setahun terhadap lansia	BIRO HUKUM
		3 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.	1 PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan penanganan pada fakir miskin	DINSOS
			2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	Pesentase	KUMKM
			3 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL		KUMKM
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	persentase penduduk miskin yang bekerja disektor perdagangan	DISPERINDAG
			5 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda miskin	DISPORA
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Pesentase penduduk miskin yang bekerja disektor pertaniaan	PERTANIAN
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	perentase penduduk miskin yang bekerja disektor perkebunaan	PERTANIAN
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	persentase penduduk miskin yang bekerja sebagai peternak	PERTANIAN

No	Prioritas SPM	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
			9 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase penduduk miskin yang bekerja sebagai nelayan	DKP
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	persentase penduduk miskin yang bekerja disektor perikanaan budidaya	DKP
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Intensistas informasi yang ditayangkan mengenai program-program penanggulangan kemiskinan	DISKOMINFO
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal	DISHUB
			13 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT		DISHUB
			14 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		
			15 PROGRAM PERENCANAAN SOSBUD DAN PEMERINTAHAN		BAPPEDA
			16 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		BIRO KESRA
6	SPM Bidang Kebangpol pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	1 Menjamin Kebebasan sipil	1 PROGRAM BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah penistaan terhadap simbol negara; Jumlah Konflik Sara	KESBANGPOL
			2 PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Jumlah rekomendasi koordinasi antar pemangku kepentingan yang dijalankan; Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	KESBANGPOL
			3 PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; Jumlah Rekomendasi yang digunakan; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	KESBANGPOL
		2 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat (Linmas)	1 PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Prosentase penindakan pelanggaran Tibumtranmas	SATPOL PP
			2 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Prosentase peningkatan kualitas Linmas	SATPOL PP

No	Prioritas SPM	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
			3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL SATPOL PP	Prosentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP	SATPOL PP

Selain dukungan terhadap pencapaian Standar Pelayan Minimal (SPM), prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018 disusun dengan telah memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan SDG's, sehingga apa yang telah diprioritaskan secara langsung merupakan upaya dari pencapaian tujuan SDG's itu sendiri. Berikut ini penjelasan terhadap 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan SDG's yaitu;

1. Tanpa Kemiskinan, tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia;
2. Tanpa Kelaparan, tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;
4. Pendidikan berkualitas, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang;
5. Kesetaraan Gender, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan;
6. Air Bersih dan Sanitasi, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;
7. Energi Bersih dan Terjangkau, menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang;
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak, mendukung perkembangan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi Kesenjangan, mengurangi ketidaksetaraan baik dalam sebuah negara maupun anatara negara-negara didunia;
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas, membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi;
13. Aksi Terhadap Iklim, bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Kehidupan Bawah Laut, melestarikan dan menjaga keberlangsungan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan;
15. Kehidupan di Darat, melindungi, mengembalikan dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah;
16. Institusi Peradilan yang kuat dan Kedamaian, meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakana akases untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan SDG's adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel IV.9.

Tabel IV.9 Arah Kebijakan dan Program RKPD 2018 Dalam Mendukung Tujuan SDGs

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	MENGHAPUS KEMISKINAN (Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinaan dalam segala bentuk dimana pun)	1 Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	1 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	DINSOS
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	UPTD PANTI SOSIAL
			3 PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	UPTD PANTI SOSIAL
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	1 Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	RSJ
				2 Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	
		2 Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	DINSOS
			2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	Prosentase pembinaan keagamaan	BIRO KESRA
			3 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	DINSOS
			5 PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase lansia yang ikut olah raga lansia	DISPORA
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH	Intensiats pelayanan hukum dalam setahun terhadap lansia	BIRO HUKUM
		3 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan	1 PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan penanganan pada fakir miskin	DINSOS

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.			
			2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	Pesentase	KUMKM
			3 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL		KUMKM
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	persentase penduduk miskin yang bekerja disektor perdagangan	DISPERINDAG
			5 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda miskin	DISPORA
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Pesentase penduduk miskin yang bekerja disektor pertaniaan	PERTANIAN
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	perentase penduduk miskin yang bekerja disektor perkebunaan	PERTANIAN
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	persentase penduduk miskin yang bekerja sebagai peternak	PERTANIAN
			9 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase penduduk miskin yang bekerja sebagai nelayan	DKP
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	persentase penduduk miskin yang bekerja disektor perikanaan budidaya	DKP
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Intensistas informasi yang ditayangkan mengenai program-program penanggulangan kemiskinan	DISKOMINFO
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal	DISHUB
			13 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT		DISHUB
			14 PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT	Perentase penduduk miskin dengan rumah tidak layak huni	PEKIM
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		
			16 PROGRAM PERENCANAAN SOSBUD DAN PEMERINTAHAN		BAPPEDA

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			17 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		BIRO KESRA
			19 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	1 Persentase kepesertaaan JKN	DINAS KESEHATAN
			20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase siswa SMA miskin yang dapat beasiswa	
			21 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswa SMK miskin yang dapat beasiswa	
			22 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase siswapendidikan khusus miskin yang dapat beasiswa	
			23 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	persentase sanitasi dan air bersih penduduk miskin	
2	TANPA KELAPARAN (Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, mencapai ketahanaan pangan dengan gizi yang baik, serta meningkatan pertaniaan yang berkelanjutan)	1 Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan penggunaan sarana prasarana pertanian untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan	PERTANIAN
		2 Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah produk pertanian;	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan sarana prasarana pertanian	PETANIAN
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR		DINAS PUPR
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	Persentase benih yang tersertifiksi	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN	persentase penurunan serangan hama penyakit tanaman	UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Kontribusi produksi benih/ bibit pertanian terhadap PAD	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian	PETANIAN
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian	PETANIAN
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB sektor Pertanian	PETANIAN
			9 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	DKP
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	DKP
			11 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif; Jumlah Hari Operasi pengawasan yang efektif dan Efisien	DKP
			12 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR PAYAU	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU TANJUNG KRASAK
			13 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LAUT	ımlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT TANJUNG RUSA
			14 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR	Jumlah Produksi Calon Induk Ikan yang Unggul ; Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL PEMALI
			15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Jumlah Rekomendasi Hasil uji Keamanan Pangan dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		KOMINFO
			17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA KEHUTANAN	Persentase Kawasan Hutan Yang Terkelola	KEHUTANAN
		3 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian	1 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian	DINAS PERTANIAN

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian	DINAS PERTANIAN
		4 Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	PERTANIAN
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN PENYULUHAN DAN PENINGKATAN SDM PERTANIAN		UPTD BALAI PENYULUHAN
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG	DPMD
		5 Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan	1 PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	persentase penduduk rawan pangan yang tertangani; angka kecukupan protein (AKP) dan Angka Kecukupan (AKE)	DINAS PANGAN
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	kontribusi harga pangan terhadap inflasi daerah	DINAS PANGAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	skor PPH	DINAS PANGAN
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANGAN		UPTD PANGAN
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	PERTANIAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian	PERTANIAN
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN		DISPERINDAG
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI		DISPERINDAG
			9 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal	PERHUBUNGAN
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap	PERHUBUNGAN

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				Kondisi Optimal	
			11 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan yang menuju kawasan pertanian yang dibangun dan pelihara	DINAS PUPR
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan Panjang Talud Sumber Air Baku (m) ; Panjang Penahan Abrasi pantai;Panjang Pengerukan dan Pengendalian; Luas Jaringan Irigasi/Optimalisasi Irigasi	DINAS PUPR
			13 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase koordinasi kebijakan perekonomian	BIRO EKONOMI
			14 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	BAPPEDA
			15 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	BAPPEDA
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		KOMINFO
			17 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	DKP
			18 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	DKP
			19 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif; Jumlah Hari Operasi pengawasan yang efektif dan Efisien	DKP
			20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR PAYAU	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU TANJUNG KRASAK
			21 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LAUT	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT TANJUNG RUSA
			22 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR	Jumlah Produksi Calon Induk Ikan yang Unggul ; Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL PEMALI

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			23 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Jumlah Rekomendasi Hasil uji Keamanan Pangan dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			24 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBAGAN USAHA		KUMKM
			25 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI		KUMKM
3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia)	1 peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1 PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT		
				1 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	DINKES
				2 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	DINKES
				3 Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS	DINKES
					DINKES
				4 Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	DINKES
				5 Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	DINKES
			2 PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	DINKES
				2 Persentase perempuan usia 30 s.d 50 tahun yang dideteksi dini kaner serviks dan payudara	DINKES
				3 Persentase menurunnya penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, Diabetes Melitus)	DINKES
				4 Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes Rate minimal 85%)	DINKES

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				5 Prevalensi HIV (Ket: target prevalensi HIV kurang dari sepuluh persen)	DINKES
				6 Persentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria	DINKES
				7 Persentase kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	DINKES
				8 persentase penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ispa, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	DINKES
			3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS		DINDIK
			4 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN		DINDIK
			5 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS		DINDIK
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TATA KELOLA KEPENDIDIKAN		SMK/SMA/SLB
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	persentase kecamata yang di intervensi dengan sarana prasarana air bersih	
			8 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	BIRO KESRA
			9 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina	DPMD
			10 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang	BAPPEDA

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	
			11 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	BAPPEDA
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		KOMINFO
			13 PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORUIM KESEHATAN	1 Persentase pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	UPTD KESEHATAN
			14 PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	persentase pangan yang aman dikonsumsi	DINAS PANGAN
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI		DISPERINDAG
		2 peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	1	
				2 Persentase RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	DINKES
				4 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	
			2 PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORUIM KESEHATAN	1 Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standa	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN	1	RSUP
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	1 Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	RSUP
			5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM	1 Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP	RSUP
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	1 Persentase Resep Sesuai Formularium	RSJ
			7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA	1 Persentase Pasien pasung yang terlayani	RSJ
				2 Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi psikososial	
				3 Persentase Kabupaten/Kota yang terintegrasi pelayanan keswa	

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi	
			8 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA	1 Persentase Ruang Rawat Jalan yang Memadai	RSJ
				2 Persentase Ruang Rawat Inap yang Memadai	
				3 Persentase Ruang Penunjang yang Memadai	
				4 Persentase Bangunan Penunjang yang Memadai	
				5 Persentase Alat Kesehatan yang Sesuai Standar	
				6 Persentase Peralatan Penunjang	
				7 Persentase Obat dan Perbekalan Kesehatan	
			9 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina	DPMD
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		DISKOMINFO
			11 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS HYGIENIS PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	
		3 Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PELAYANAAN PEMERINTAH	1 Persentase tenaga/SDM kesehatan yang mengikuti program peningkatan kompetensi	DINKES
				3 Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	DINKES
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN PELAYANAAN PEMERINTAH	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	RSUP
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN PELAYANAAN PEMERINTAH	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	RSJ
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENERIMAAN, PROMOSI, MUTASI, KEPANGKATAN DAN PENSIUN ASN		BKPSDM
			10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN	1 persentase akrediatsi pelayanan RS	RSUP

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			TEKNIS KEPERAWATAN		
			11 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	1 Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	RSUP
			12 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	3 Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Layanan	RSJ
				4 Persentase elemen Akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi	
			13 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA	1 Persentase Kabupaten/Kota yang terintegrasi pelayanan keswa	RSJ
		4 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	1 PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Jumlah penyediaan data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik perencanaan pembangunanalokasi anggaranpembangunan demokrasi serta penegakkan hukum dan pencegahan kriminal; Jumlah pemanfaatan NIK Data base kependudukan dan KTP_el oleh OPD Provinsi; Jumlah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil disemua kabupaten/kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase PUS yang menggunakan KB MKJP; Persentase keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Pra sejahtera I	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			3 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN		BAPPEDA
			4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BAPPEDA
4	PENDIDIKAN BERKUALITAS (Tujuan 4 : Menjamin kulitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua)	1 peningkatan akses pelayanan pendidikan	1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	APK SMA	DINAS PENDIDIKAN
			2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	APK SMA	DINAS PENDIDIKAN
			3 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN	APK Pendidikan Khusus	DINAS PENDIDIKAN

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			PENDIDIKAN KHUSUS		
		2 peningkatan pelayanan pedidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing	1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang bersertifikasi	DINAS PENDIDIKAN
			2 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN TEKNIS PENDIDIKAN MENENGAH, KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS	persentase SMA, SMA dan pendidikan khusus yang difasilitasi	UPTD PENDIDIKAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TATA KELOLA KEPENDIDIKAN	persentase biaya BOS yang terialisasi	SMA/SMK/SLB
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	bangunan gedung arsip yang beroprasional	DINAS PRKP
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap anak sekolah	PERHUBUNGAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap anak sekolah	PERHUBUNGAN
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		DISKOMINFO
			8 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI		DISKOMINFO
			9 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	BIRO KESRA
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KEAGAMAN	Persentase pembinaan keagamaan	BIRO KESRA
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENERIMAAN, PROMOSI, MUTASI, KEPANGKATAN DAN PENSIUN ASN		BKPSDMD
			12 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase	DPMD

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina	
			13 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	BAPPEDA
			14 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	BAPPEDA
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ; Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka; Pertambahan pengunjung perpustakaan	DKPUS
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi; Pertambahan pengelola perpustakaaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar	DKPUS
5	KESETARAAN GENDER (Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan)	1 Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG);	1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan; Persentase keterwakilan perempuan dilembaga publik; Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		2 menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	2 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi ; Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi ; Persentase Kab/Kota Layak Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			3 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan norma penghapusan diskriminasi tenaga kerja perempuan dan anak	DINAS TENAGA KERJA

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		DINAS SOSIAL
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		DISKOMINFO
6	AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua)	1 Pengembangan Sistem Sumber Daya Air	1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan panjang talud Sumber Air Baku (m); Panjang Penahan Abrasi pantai; Panjang Pengerukan dan Pengendalian; Luas Jaringan Irigasi/ Optimalisasi irigasi	DINAS PUPR
		2 Pengembangan Sistem Prasarana Permukiman	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Persentase kawasana kumuh yang diintervensi dengan sarana dan prasarana permukiman	DINAS PRKP
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP		DLH
7	ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU (Tujuan : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal , berkelanjutan, dn moderen untuk semua)	1 Pemenuhan listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;	1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Kontribusi Sektor Minyak dan Gas ; Persentase Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas; Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik; Persentase Rasio Ketersedian Daya Listrik	
			2 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	BIRO EKONOMI
		2 Pengembangan Sistem Jaringan /Listrik	1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Kontribusi Sektor Minyak dan Gas ; Persentase Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas; Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik; Persentase Rasio Ketersedian Daya Listrik	
8	PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja	1 Peningkatan Kualitas dan produktifitas tenaga kerja (pertanian, perikanaan, timah dan Pariwisata)	1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	1 Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	UPTD BLKI

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua				
			2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	Pertumbuhan volume usaha koperasi	KUMKM
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1 Persentase tenaga kerja yang meningkat produktvitasnya	DISNAKER
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	1 Persentase pencari kerja yang ditempatkan	DISNAKER
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	BUDPAR
			6 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	BAPPEDA
			7 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Prosentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	BIRO KESRA
			8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		2 Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja	1 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan yang diawasi	DISNAKER
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS HYGIENIS PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA	Persatase perusahaan yang menerapan kesehatan kerja	DISNAKER
		3 Penempatan Tenaga Kerja bagi pencari kerja	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA		DISNAKER

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		4 Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	pertumbuhan volume usaha koperasi	KUMKM
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	1 Bimtek metologi bagi instruktur pelatihan kerja swasta (LPKS)
			2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	KUMKM
			3 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil	KUMKM
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI		DISPERINDAG
			5 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pemuda yang mendapat pelatiah wirausaha pemuda	DISPORA
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Persentse petani tanaman pangan yang bekerja	PERTANIAN
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Persentase peteni pekerbunan yang bekerja	PERTANIAN
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	persentase petani peternak yang bekerja	PERTANIAN
			9 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	DKP
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	DKP
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah surat kabar nasional/lokal ; Jumlah penyiaran radio/TV lokal	DISKOMINFO
			12 Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	Persentase ketersedian data sektoral daerah	DISKOMINFO
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal	DISHUB
			14 PROGRAM PEINGKATAN PENGENDALIAN, OPERASIONAL DAN KEBANDARAUDARAAN	Prosentase Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	DISHUB
			15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN		DINAS PUPR

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR		DINAS PUPR
			17 PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi	DINAS PUPR
			18 PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rumah Layak Huni	DINAS PRKP
			18 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Penyelesaian Izin Pertambangan Bukan Logam dan Batuan; Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pengawasan, Pembinaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Usaha Pertambangan MIneral Bukan Logam dan Batuan	DISTAMBEN
			19 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	BAPPEDA
			20 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	BIRO KESRA
		5 Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing (pertanian, perikanaan, pariwisata, timah)	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja bersertifikat kompetensi	DISNAKER
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase tenaga pelatih yang mendapat pelatihan (upgrading)	UPD BLKI
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
			4 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	pesentase SMK yang memiliki sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan sekolah	DINDIK
			5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS DAN PERKOPERASIAAN		KUMKM
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase peningkatan SDM KUMKM terlatih	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
					MENENGAH
		6 Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing	1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	pertumbuhan varitas bibit yang disetifikasi	UPTD PENGAWASAN SERTIFIKASI MUTU BENIH
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	pertumbuhan jenis bibit pertanian yang di kembangkan	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Pertumbuhan produk pariwisata yang terstandarisasi	BUDPAR
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Intensiatas produk KUMK yang terinformasikan dalam setahun	KOMINFO
			5 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	DKUKM
			6 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil	KUMKM
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI		DISPERINDAG
			8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	Persentase produk yang disetifiaksi	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
			9 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Jumlah Rekomendasi Hasil uji Keamanan Pangan dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Beroprasioanl Pembangunan Gedung Promosi Produk-produk Koperasi dan UMKM	DINAS PRKP

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		7 Peningkatan produktifitas, kulitas dan daya saing produk pertanian, perikanaan, timah dan pariwisata	1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	Pertumbuhan jumlah jenis benih yang yang diawasi	UPTD PENGAWASAN SERTIFIKASI MUTU BENIH
			2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	Pertumbuhan volume usaha koperasi	KUMKM
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN		UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS VETERINER		UPTD BALAI PETERNAKAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		KOMINFO
			7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	persentase peningkatan SDM KUMKM terlatih	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK		UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PERTANIAN
			9 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN	Persentase Penurunan Serangan Hama Penyakit Tanaman	UPTD BALAI PROTEKSI
			10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN		UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN		DIPERINDAG
			12 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Kontribusi Produksi Benih/ bibit Pertanian terhadap PAD	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			13 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT	BAPPEDA

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	
			14 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	BAPPEDA
			15 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	BIRO KESRA
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Kontribusi subsektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian	DINAS PERTANIAAN
			17 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian	DINAS PERTANIAAN
			18 PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	skor PPh	DINAS PANGAN
			19 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil	DKUKM
			20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	persentase peningkatan SDM KUMKM terlatih	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			21 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	DKUKM
			22 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	DKP
			23 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU TANJUNG KRASAK
			24 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN LAUT	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT TANJUNG RUSA
			25 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	Jumlah Produksi Calon Induk Ikan yang Unggul ; Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL PEMALI
		8 Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam	1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI		DISPERINDAG

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			2 PROGRAM PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK		UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PERTANIAN
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN INDUSTRI		UPTD PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN INDUSTRI
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA		
			5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		UPTD BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH
			6 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN		DPMD
9	INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR (Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inkulisif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi)	1 Pengembangan Kawasan Strategis Tanjung Kalian	1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Perentase panjang jalan trans bangka pada kawasan tanjung kalian yang direncanakan	DINAS PUPR
		2 Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang			
		3 Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR		DINAS PUPR
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN		DINAS PRKP
		4 Pengembangan Sistem Transportasi Darat	1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	persentase panjang jalan yang direncanakan untuk mendukung sistem transportasi darat	DINAS PUPR
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal	DISHUB

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		5 Pengembangan Sistem Transportasi Laut	1 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal	DISHUB
		6 Pengembangan Sistem Transportasi Udara	1 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN		DISHUB
10	BERKURANGNYA KESENJANGAN (Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra da antar negara)	1 Pengembangan kawasan Transmigrasi dan Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi	1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina	DPMD
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	Persentase dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang tersusun; Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikembangkan	DPMD
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG	DPMD
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGARASI	Persentase lokasi transmigrasi yang aktif	DISNAKER
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian	DINAS PERTANIAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian	DINAS PERTANIAN
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian	DINAS PERTANIAN
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	DKP
			9 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	DKP
			10 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM		DINAS KEHUTANAN

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			11 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase PD mitra Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B); Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang tercapai	BAPPEDA
		2 Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang Jalan dan jembatan Provinsi dalam kondisi mantap	DINAS PUPR
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR		DINAS PUPR
			3 PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN		DINAS PUPR
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN		DINAS PRKP
			5 PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT		DINAS PRKP
			6 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Luas Kawasan Konservasi; Jumlah Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut yang Konsisten	DKP
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	DKP
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	DKP
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal	DISHUB
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		DISKOMINFO
			12 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH		DISKOMINFO

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI		
		3 Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina	DPMD
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG	DPMD
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	Persentase dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang tersusun; Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikembangkan	DPMD
			4 PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH DESA	Persentase aparatur desa dan lembaga kemansyarakatan yang terbina; Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa yang baik; Persentase desa yang menyusun PERDES (RPJMDES, RKPDES, APBDES tepat waktu)	DPMD
			PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN PANGAN		
			5 PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	persentase penduduk rawan pangan tertangani	DINAS PANGAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI PANGAN	kontribusi harga panganterhadap inflasi daerah	DINAS PANGAN
			7 PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	skor PPH	DINAS PANGAN
			10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	1 Persentase kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	DINKES
				4 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			11 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA		DISPORA
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		DISPORA
			13 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	pesentase sekolah daerah terpencil yang diinterpensi	DINDIK
			14 PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	DINAS PERTANIAN
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	DINAS PERTANIAN
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian	DINAS PERTANIAN
			17 PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian	DINAS PERTANIAN
			18 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Kelompok Masyarakat Yang Memanfaatkan Hutan; Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Hutan	DINAS KEHUTANAN
			19 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	DKP
			20 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	DKP
			21 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		DISKOMINFO
			22 PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGARASI	Persentase transmigran yang mendapat bantuan	DINAS TENAGA KERJA
11	KOTA PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN (Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan)	1 Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang Diintervensi Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	BPBD
			2 PROGRAM LOGISTIK DAN PENINGKATAN TANGGAP DARURAT	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Kedaruratan	BPBD

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			BENCANA	dan Logistik/Peralatan Penanggulangan Bencana	
			3 PROGRAM PENINGKATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD
			4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	DINSOS
			PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	kontribusi harga pangan terhadap inflasi daerah	DINAS PANGAN
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan panjang talud Sumber Air Baku (m); Panjang Penahan Abrasi pantai; Panjang Pengerukan dan Pengendalian; Luas Jaringan Irigasi/ Optimalisasi irigasi	DINAS PUPR
				Tersedianya Dokumen inventarisasi data insfrastruktur pengendalian banjir	
			7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TATA KELOLA KEPENDIDIKAN		SMA/SMK/SLB
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		KOMINFO
			9 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina	DPMD
			10 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		DINAS KEHUTANAN
			11 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA KEHUTANAN		UPTD KEHUTANAN
12	KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB (Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab)	1 Pengendalian kulitas air	1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Data dan Informasi Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	DLH
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Penaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Penegakan Hukum Lingkungan	DLH

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	Sertifikat Akreditasi laboratorium	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR		PUPR
			5 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH		
			6 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM		DISHUT
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN		PERKIM
		2 Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Data dan Informasi Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	DLH
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Penegakan Hukum Lingkungan	DLH
			3 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah	DLH
			4 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		DISHUT
			5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	Sertifikat Akreditasi laboratorium	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
			6 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH		

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			7 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM		DISHUT
			8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYAN TEKNIS TATA KELOLA KEHUTANAN		UPTD KEHUTANAN
			9 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Luas Kawasan Konservasi; Jumlah Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut yang Konsisten	DKP
			10 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	DKP
			11 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	DKP
13	PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM (Tujuan : Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya)	1 pengendalian kualitas udara	1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Data dan Informasi Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	DLH
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Penegakan Hukum Lingkungan	DLH
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	Sertifikat Akreditasi laboratorium	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR		DINAS PUPR
			5 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH		
			6 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM		DISHUT
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA		PERKIM

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			PERSAMPAHAN		
14	EKOSISTEM LAUTAN (Tujuan : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan)	1 Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN RUANG LAUT		DKP
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		DKP
			3 PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase penataan Peraturan Perundang-undangan	BIRO HUKUM
			4 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase PD mitra Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B); Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang tercapai	BAPPEDA
			5 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM		BIRO EKONOMI
		2 Pengembangan Kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	1 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal	DISHUB
		3 Pengembangan Kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	2 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase panjang jalan menuju kawasan strategis indistri perikanaan terpadu teluk kelabat yang bangun dan dipelihara	DINAS PUPR
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	DKP
		4 Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	DKP
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	DKP
		5 Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR		PUPR

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		6 Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	1 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	DKP
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	DKP
		7 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	1 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI		DISPERINDAG
		8 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR		DINAS PUPR
			3 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase panjang jalan menuju kawasan strategis indistri perikanaan Tanjung Binga yang dibangun dan pelihara	DINAS PUPR
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal	DISHUB
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	DKP
			6 PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Identifikasi Permasalahan dan Pengkajian ilmiah sesuai Peraturan Penataan Ruang dan Pertanahan secara komprehensif;	DINAS PUPR
		9 Pengembangan Sentra Perikanan	1 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	DKP
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	DKP
			3 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI		KUMKM
			4 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI		KUMKM
15	EKOSISTEM DARATAN (Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi dan meningkatan pemanpaatan yang berkelanjutan ekosistem daratan , mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunaan, memulihakan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan	1 Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Data dan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	DLH

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	keanekaragaman hayati.				
		2 Pengembangan Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR		DINAS PUPR
		3 Pengembangan Pengelolaan kawasan perlindungan setempat	1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Data dan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	DLH
		4 Pengembangan Pengelolaan kawasan lindung lainnya	1 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP		DLH
		5 Peningkatan tutupan hutan	1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP		DLH
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP		DLH
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN		UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR		PUPR
			5 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH		
			6 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM		DISHUT
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN		PERKIM
16	PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (Tujuan 16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk	1 Menjamin hak anak dalam pemabangunan	1 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi ; Rasio Anak yang memerlukan	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif disemua tingkatan			perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi ; Persentase Kab/Kota Layak Anak	
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan norma perlindungan tenaga kerja anak	DINAS TENAGA KERJA
			3 PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Jumlah penyediaan data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik perencanaan pembangunanalokasi anggaranpembangunan demokrasi serta penegakkan hukum dan pencegahan kriminal; Jumlah pemanfaatan NIK Data base kependudukan dan KTP_el oleh OPD Provinsi; Jumlah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil disemua kabupaten/kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	DINAS SOSIAL
			5 PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	1 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	DINAS KESEHATAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		DISKOMINFO
		2 Menjamin Kebebasan sipil	1 PROGRAM BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah penistaan terhadap simbol negara; Jumlah Konflik Sara	KESBANGPOL
			2 PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Jumlah rekomendasi koordinasi antar pemangku kepentingan yang dijalankan; Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	KESBANGPOL
			3 PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; Jumlah Rekomendasi yang digunakan; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	KESBANGPOL

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		3 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat (Linmas)	1 PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Prosentase penindakan pelanggaran Tibumtranmas	SATPOL PP
			2 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Prosentase peningkatan kualitas Linmas	SATPOL PP
			3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL SATPOL PP	Prosentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP	SATPOL PP
			4 PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Prosentase penegakan/penindakan pelanggar Perda	SATPOL PP
		4 Menjamin Hak-hak politik	1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan; Persentase keterwakilan perempuan dilembaga publik; Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			2 PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		DINSOS
		5 Menjamin Lembaga-Lembaga Demokrasi	1 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		DISKOMINFO
			2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BAPPEDA
			3 PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI	Cakupan Pembinaan Poitik Daerah; Tingkat Kinerja Lembaga Demokrasi;	KESBANGPOL
			5 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN		BAPPEDA
			6 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Persentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	BIRO KESRA
17	KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN (Tujuan 17 : Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan Global untuk pembangunan yang berkelanjutan	1 peningkatan Penataan Tata Laksana	1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan tata laksana	BIRO ORGANISASI
			2 PROGRAM PENINGKATAN PUBLIKASI, PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN INFORMASI	Persentase Hasil Kegiatan Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik	BIRO HUMAS
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN, DOKUMENTASI, PUBLIKASI MEDIA DAN IT	Persentase Publikasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi yang Dipublikasikan	BIRO HUMAS

No	Tujuan SDGs	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program		Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PROTOKOLER	Persentase kegiatan protokoler yang dilaksanakan	BIRO HUMAS
			5 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI		DISKOMINFO
			6 PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN INVESTASI, PELAYANAN HUMAS DAN PROTOKOLER, SERTA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PENGHUBUNG PROVINSI	Persentase peningkatan informasi dan invesasi, pelayanan humas dan protokoler, serta hubungan antar lembaga penghubung provinsi	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
			7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN	Persentase pelayanan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran	SETWAN
			19 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan koordinasi hubungan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Peningkatan jumlah kerjasama antarpemerintah daerah, swasta dan luar negeri	BIRO PEMERINTAHAN

4.4. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2018 DALAM MENDUKUNG VISI DAN MISI GUBERNUR PRIODE 2017 – 2022

Visi dan Misi Gubernur Priode 2017 – 2022 dikaitkan dengan prioritas RKPD tahun 2018 dan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2018 yang disajikan dalam tabel IV.10 dibawah:

Tabel IV.10 Prioritas dan Arah Kebijakan RKPD 2018 Dalam Mendukung Visi dan Misi Gubernur Priode 2017 – 2022

Visi Gubernur Terpilih	Prioritas RKPD 2018	Misi Gubernur Terpilih	Arah Kebijakan RKPD 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi	**1 Peningkatan Ekonomi**	**1 Bidang Perekonomian, Pembagian Zonasi Ekonomi (yang diatur dalam perda) untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Hal ini terkait fokus pembangunan daerah melalui timah, pariwisata, perkebunan, dan perikanan**	1 Peningkatan Kualitas dan produktifitas tenaga kerja (pertanian, perikanaan, timah dan Pariwisata)
			2 Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja
			3 Penempatan Tenaga Kerja bagi pencari kerja
			4 Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja
			5 Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing (pertanian, perikanaan, pariwisata, timah)
			6 Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing
			7 Peningkatan standarisasi produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing
			8 Peningkatan produktifitas, kulitas dan daya saing produk pertanian, perikanaan, timah dan pariwisata
			9 Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam

Visi Gubernur Terpilih	Prioritas RKPD 2018	Misi Gubernur Terpilih	Arah Kebijakan RKPD 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
			10 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
			11 Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
			12 Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
			13 Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
			14 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
			15 Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta kemudahan perizinan dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
			16 Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
		2 Bidang , Pembangunan pembangkit tenaga sekaligus terbaharukan agar Provinsi Kepulauaan Bangka Belitung bisa meningkatkan pendapatan daerah dan kemandirian . Sehingga, pembangunan pabrik-pabrik untuk mengolah bahan mentah di bidang pertambangan, pertanian, perkebunaan, perikanaan dan lainnya dapat dilakukan agar hasil-hasil alam Provinsi Kepulauaan Bangka Belitung memiliki	1 Pemenuhan listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;

Visi Gubernur Terpilih	Prioritas RKPD 2018	Misi Gubernur Terpilih	Arah Kebijakan RKPD 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
		nilai tambah dan berkualitas ekspor	2 Pengembangan Sistem Jaringan /Listrik
		3 Bidang Pertambangan, penambangan timah secara berkelanjutan dengan menimbang lingkungan sebagai sektor utama demi menjaga keseimbangan alam	1 Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
			2 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan
		4 Bidang Perikanaan, Pengelolaan hasil-hasil perikanaan secara inivatif untuk menambah daya saing dan meningkatkan kualitas produk	1 Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.
			2 Pengembangan Kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
			3 Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
			4 Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
			5 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
			6 Pengembangan Sentra Perikanan
		5 Bidang Perkebunaan, Mengembalikan kejayaan lada dengan menetapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Provinsi Lada	1 Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
			2 Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah produk pertanian;
			3 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian
			4 Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian

Visi Gubernur Terpilih	Prioritas RKPD 2018	Misi Gubernur Terpilih	Arah Kebijakan RKPD 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
			5 Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan
			6 Pengembangan kawasan Transmigrasi dan Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi
			7 Peningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis kehutanan
			8 Pengembangan Kawasan Hutan Produksi
			9 Pengembangan Kawasan Perhutanan Sosial
			10 Pengembangan Kawasan Hutan Lindung
		6 Bidang Pariwisata, Menyeimbangakan pembangunan pariwisata antar Bangka dan Belitung dengan mendukung konektivitas antar pelabuhan	1 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif , peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata
			2 Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
			3 Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan prestasi olah raga
			4 Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul.
			5 Pengembangan Kawasan Strategis Tanjung Kalian
			6 Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang

Visi Gubernur Terpilih	Prioritas RKPD 2018	Misi Gubernur Terpilih	Arah Kebijakan RKPD 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
			7 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata
			8 Pengembangan Sistem Transportasi Darat
			9 Pengembangan Sistem Transportasi Laut
			10 Pengembangan Sistem Transportasi Udara
			11 Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
	2 Kapasitas dan Kualitas SDM	**7 Bidang Pendidikan, Pemerataan pendidikan untuk tingkat Dasar dan Menengah. Agar jumlah peserta didik meningkat melalui program pendidikan gratis. Dan penyelenggaraan pendidikan berkualitas lewat perbaikan infrastruktur daerah, pembangunan laboratorium penyediaan guru-guru berkualitas, dan lainnya. sementara, untuk pendidikan tinggi, meningkatkan kemampuaan Universitas Bangka Belitung dapat menjadi "World Class Reserch University". diluar hal itu pengkondisian hubungan kerja antara pemerintah dengan kampus harus sinergis.**	1 peningkatan akses pelayanan pendidikan
			2 peningkatan pelayanan pedidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing
		8 Bidang Kesehatan, terwujudnya pembangunan kesehatan masyarakat Bangka Belitung melalui upaya peningkatan mutu pelayanaan (SDM maupun infrastruktur) dan Upaya pencegahan (Preventif-promotif) yang lebih partisipatif serta terukur	1 peningkatan derajat kesehatan masyarakat
			2 peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat

Visi Gubernur Terpilih	Prioritas RKPD 2018	Misi Gubernur Terpilih	Arah Kebijakan RKPD 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
			3 Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
			4 Pengembangan Sistem Sumber Daya Air
			5 Pengembangan Sistem Prasarana Permukiman
	3 Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	**9 Bidang Reformasi Birokrasi, memastikan birokrat sebagai aparatur profesional dan berinisiatif tinggi sehingga, lebih responsif dalam menjawab kebutuhan publik dan tantangan masa depan melalui mekanisme reward and punishment yang jelas**	1 peningkatan Manajemen Perubahan
			2 Pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu dilakukan melalui peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi kebijakan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.
			3 Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, demokratif, responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis; mendorong terciptanya kemandirian fiskal dengan mendorong pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah untuk sebesar mungkin kemakmuran masyarakat.
			4 Penegakan Perda dan Perkada yang memiliki sanksi
			5 Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
			6 peningkatan Penataan dan penguatan organisasi

Visi Gubernur Terpilih	Prioritas RKPD 2018	Misi Gubernur Terpilih	Arah Kebijakan RKPD 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
			7 peningkatan Penataan Tata Laksana
			8 peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
			9 peningkatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja
			10 Peningkatan Penguatan Pengawasan
			11 Opini Audit BPK
		10 Bidang pelayanaan publik, menghadirkan pelayanaan publik yang serba hadir dan efisien sehingga mendapat menjangkau masyarakat babel secara keseluruhan melalui pemanfaatan teknologi informasi	1 Peningkatan Kualitas Pelayanaan Publik
	4 Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah dan Masyarakat	**11 Pemerataan Pembangunan antar wilayah dan masyarakat**	1 Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
			2 Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,
			3 Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
			4 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan

Visi Gubernur Terpilih	Prioritas RKPD 2018	Misi Gubernur Terpilih	Arah Kebijakan RKPD 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
			pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.
			5 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
			6 Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG);
			7 menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
			8 Menjamin hak anak dalam pemabangunan
	5 Pembangunan Berdemokrasi	**1 Peningkatan ketertiban dan keamanan 2 masyarakat**	1 Menjamin Kebebasan sipil
			2 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat (Linmas)
			3 Menjamin Hak-hak politik
			4 Menjamin Lembaga-Lembaga Demokrasi
	6 Penanggulangan Bencana	**1 Bidang kebencanaan, pengalokasian 3 anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulanginya**	1 Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
			2 Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
			3 Pengembangan Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
			4 Pengembangan Pengelolaan kawasan perlindungan setempat
			5 Pengembangan Pengelolaan kawasan lindung lainnya

Visi Gubernur Terpilih	Prioritas RKPD 2018	Misi Gubernur Terpilih	Arah Kebijakan RKPD 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
			6 Pengendalian kulitas air
			7 pengendalian kualitas udara
			8 Peningkatan tutupan hutan
			9 Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

4.5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL

Dengan adanya perubahan paradigma penganggaran dari prinsip *money follow fuction* menjadi *money follow priority programme* dan upaya percepatan pencapaian indikator sasaran pembangunan pokok RPJPD 2005-2025 melalui 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2018, maka pada tahun 2018 dilakukan pendekatan pendekatan holistik – tematik, Integratif dan spasial dalam proses perencanaan.

Dalam hal mengimplementasikan pendekatan holistik – tematik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan 6 (enam) prioritas provinsi menjadi fokus. Sementara itu, pada pendekatan integratif, telah dilakukan proses identifikasi arah kebijakan pembangunan yang mendukung setiap prioritas tersebut yang diikuti dengan proses identifikasi dan inventarisasi program dan Perangkat Daerah penanggungjawab program sebagai fokus pendekatan.

Selanjutnya pada pendekatan spasial, telah dilakukan identifikasi terhadap lokasi dari pelaksanaan aktivitas/kegiatan dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah guna mencapai sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud.

Adapun implementasi pendekatan holistik – tematik, Integratif dan spasial yang dilakukan didalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, adalah sebagaimana yang disajikan pada tabel IV.11 berikut:

Tabel IV.11 Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
1	**Peningkatan Ekonomi**	1 Peningkatan Kualitas dan produktifitas tenaga kerja (pertanian, perikanaan, timah dan Pariwisata)	1 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	1 Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	7,27%	Provinsi	UPTD BLKI
			2 Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	1%		KUMKM
			3 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Persentase tenaga kerja yang meningkat produktvitasnya	13,33%	Provinsi	DISNAKER
			4 Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	1 Persentase pencari kerja yang ditempatkan	8%	Provinsi	DISNAKER
			5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tingkat kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	5%	Provinsi, luar daerah	BUDPAR
			6 Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase	Provinsi	BAPPEDA
			7 Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100 persen	Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO KESRA
			8 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah				UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
		2 Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja	1 Program peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hub. Industrial dan jaminan sosial	Persentase perusahaan yang diawasi	100 persen		DISNAKER
			2 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan Dan Kesehatan Kerja	Persatase perusahaan yang menerapan kesehatan kerja	100 persen		DISNAKER
		3 Penempatan Tenaga Kerja bagi pencari kerja	1 Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja				DISNAKER
		4 Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	1 Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	pertumbuhan volume usaha koperasi	1%		KUMKM
			2 Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	8%		LPKS
			2 Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	109%		KUMKM
			3 Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil	5%		KUMKM
			4 Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri				DISPERINDAG
			5 Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda yang mendapat pelatiah wirausaha pemuda	1%	Provinsi	DISPORA
			6 Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Persentse petani tanaman pangan yang bekerja	80%		PERTANIAN
			7 Program Pengembangan Perkebunan	Persentase peteni pekerbunan yang bekerja	75%		PERTANIAN
			8 Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	persentase petani peternak yang bekerja	75%		PERTANIAN
			9 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP
			10 Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			11 Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah surat kabar nasional/lokal ; Jumlah penyiaran radio/TV lokal	5 Jenis;13 Jenis		DISKOMINFO
			12 Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	ditanyakan kembali ke PD			DISKOMINFO
			12 Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal	55%		DISHUB
			14 Program Peingkatan Pengendalian, Operasional Dan Kebandaraudaraan	Prosentase Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	75%		DISHUB
			17 Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi	20%		DINAS PUPR
			18 Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Penyelesaian Izin Pertambangan Bukan Logam dan Batuan; Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pengawasan, Pembinaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Usaha Pertambangan MIneral Bukan Logam dan Batuan	100%		DISTAMBEN
			19 Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA
			20 Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100%	Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO KESRA

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
		5 Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing (pertanian, perikanaan, pariwisata, timah)	1 Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja bersertifikat kompetensi	8%		DISNAKER
			2 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase tenaga pelatih yang mendapat pelatihan (upgrading)	7,27%	Provinsi	UPD BLKI
			3 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja	13,33%	Provinsi	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
			4 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	pesentase SMK yang memiliki sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan sekolah	50%		DINDIK
			5 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Dan Perkoperasiaan				KUMKM
			6 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase peningkatan SDM KUMKM terlatih	75%		UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		6 Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing	1 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan Dan Sertifikasi Mutu Benih	pertumbuhan varitas bibit yang disetifikasi	1%		UPTD PENGAWASAN SERTIFIKASI MUTU BENIH
			2 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	pertumbuhan jenis bibit pertanian yang di kembangkan	1%		UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Industri Dan Kelembagaan Kepariwisataan	Pertumbuhan produk pariwisata yang terstandarisasi	1%		BUDPAR
			4 Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Intensiatas produk KUMK yang terinformasikan dalam setahun	2 kalii		KOMINFO
			5 Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	109%		DKUKM
			6 Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil	5%		KUMKM

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			7 Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri				DISPERINDAG
			8 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase produk yang disetifiaksi	5%		UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
			9 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Hasil uji Keamanan Pangan dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	25 Rekomendasi Hasil		UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			10 Program Pengembangan Kawasan Permukiman, Pembinaan Penataan Bangunan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Dan Drainase Lingkungan Serta Persampahan	Bangunan dan lingkungan ; drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat; rumah tangga pengguna air bersih; jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4); ruang terbuka hijau; sarana air limbah; prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; rumah tangga bersanitasi; tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; pengelola teknis bangunan gedung negara; penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) Provinsi	100%	Pangkalpinang	DINAS PRKP
		7 Peningkatan produktifitas, kulitas dan daya saing produk pertanian, perikanaan, timah dan pariwisata	1 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan Dan Sertifikasi Mutu Benih	Pertumbuhan jumlah jenis benih yang yang diawasi	1%		UPTD PENGAWASAN SERTIFIKASI MUTU BENIH
			2 Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	1%		KUMKM

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			3 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian				UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			4 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Veteriner				UPTD BALAI PETERNAKAN
			6 Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik				KOMINFO
			7 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	persentase peningkatan SDM KUMKM terlatih	755%		UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			8 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PERTANIAN
			9 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	Persentase Penurunan Serangan Hama Penyakit Tanaman			UPTD BALAI PROTEKSI
			10 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan				UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			11 Program Pengembangan Perdagangan				DIPERINDAG
			12 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	Kontribusi Produksi Benih/ bibit Pertanian terhadap PAD			UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			13 Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			14 Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase		BAPPEDA
			15 Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100%	Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO KESRA
			16 Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Kontribusi subsektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian			DINAS PERTANIAAN
			17 Program Pengembangan Perkebunan	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian			DINAS PERTANIAAN
			18 Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	skor PPh	89,2		DINAS PANGAN
			19 Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil	5%		DKUKM
			20 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	persentase peningkatan SDM KUMKM terlatih	755%		UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			21 Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	109%		DKUKM
			22 Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			23 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	8.750.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU TANJUNG KRASAK
			24 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	50.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT TANJUNG RUSA
			25 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar	Jumlah Produksi Calon Induk Ikan yang Unggul ; Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	6.000 ekor;300.000 ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL PEMALI

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
		8 Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam	1 Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri				DISPERINDAG
			2 Program Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PERTANIAN
			3 Program Pengembangan Dan Pemasaran Industri				UPTD PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN INDUSTRI
			4 Program Pengembangan Sumber Daya				
			5 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja				UPTD BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH
			6 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan				DPMD
		9 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	1 Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri				DISPERINDAG
			2 Program Pengembangan Kawasan Permukiman, Pembinaan Penataan Bangunan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Dan Drainase Lingkungan Serta Persampahan	Bangunan dan lingkungan ; drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat; rumah tangga pengguna air bersih; jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4); ruang terbuka hijau; sarana air limbah; prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; rumah tangga bersanitasi; tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; pengelola teknis bangunan gedung negara; penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan	1 dokumen; 5000 meter; 350 unit, 2500 meter; 0,75 hektar (ha); 1 lokasi; 1 lokasi; 10 unit; 10 lokasi; 30 orang; 1 laporan	7 Kabupaten/kota	DINAS PRKP

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
				kawasan permukiman (RP3KP) Provinsi			
			3 Program Pemliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah	6,47%		DLH
		10 Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	1 Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Kawasan Stategis dan Sentra Industri ; Persentase Jumlah Pertumbuhan Industri	0 Lokasi;0 %		DISPERINDAG
			2 Program Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Panjang Jalan dan jembatan Provinsi dalam kondisi mantap	96%	Bangka Tengah	DINAS PUPR
			4 Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal			DISHUB
			5 Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri				DISPERINDAG
		11 Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	2 Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Kontribusi subsektor tanaman pangan dan holtikulutura terhadap PDRB sektor pertanian			DINAS PERTANIAN
			Program Pengembagan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB sektor Pertanian			DINAS PERTANIAN
			3 Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			Provinsi	DLH
			4 Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tersusunya Dokumen RRTR KSP	1 Dokumen	KTM Batu Betumpang Kab. Basel	DINAS PUPR
		12 Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	2 Program Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam kondisi mantap	96%		DINAS PUPR
			3 Program Pengembangan Kawasan Permukiman, Pembinaan Penataan Bangunan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Dan	Bangunan dan lingkungan ; drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat; rumah tangga pengguna air bersih; jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan	50%	Kawasan KTM Kec. Gantung	DINAS PRKP

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			Drainase Lingkungan Serta Persampahan	permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4); ruang terbuka hijau; sarana air limbah; prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; rumah tangga bersanitasi; tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; pengelola teknis bangunan gedung negara; penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) Provinsi			
			4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase desa dikawasan KTM gantung yang dikembangkan menjadi desa wisata	20%		BUDPAR
			5 Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Kontribusi subsektor tanaman pangan dan holtikulutura terhadap PDRB sektor pertanian			DINAS PERTANIAN
			6 Program Pengembagan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB sektor Pertanian			DINAS PERTANIAN
			7 Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			Provinsi	DLH
			8 Program Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Ruang	Tersusunya Dokumen RRTR		KTM Gantung (Kab. Beltim)	
			1 Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri				DISPERINDAG
		13 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	2 Program Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	96 %	Belitung Timur	DINAS PUPR
			4 Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			5 Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut			DISHUB

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			Laut	terhadap Kondisi Optimal			
			6 Program Pengembangan Kawasan Permukiman, Pembinaan Penataan Bangunan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Dan Drainase Lingkungan Serta Persampahan				DINAS PRKP
			7 Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tersusunya Dokumen RRTR		Air Kelik (Kab. Beltim)	DINAS PUPR
			1 Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Meningkatnya koordinasi hubungan kepala daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung; Meningkatnya jumlah kerjsasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri	90%	Provinsi	BIRO PEMERINTAHAN
		14 Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta kemudahan perizinan dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.	2 Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata Dan Budaya	Prosentase Koordinasi Kebijakan BUMD,Penanaman Modal,Pariwisata dan Budaya	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat	BIRO EKONOMI
			3 Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA
			5 Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Profil proyek yang siap ditawarkan; Perbaikan kemudahan memulai berusaha	1 profil proyek; 1 kebijakan	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			6 Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah minat investasi (calon investor) yang dicatat melalui berbagai kegiatan promosi	4 investor	Luar Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			7 Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA); Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	15 proyek; 2,4 triliun	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			8 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas kualitas pelayanan; jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (izin)	82%; 900 perizinan dan non perizinan	Pangkalpinang, Belitung Timur	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			9 Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil	5%		KUMKM
			1 Program Pengembangan Sumber Daya	Kontribusi Sektor Minyak dan Gas ; Persentase Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas; Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik; Persentase Rasio Ketersedian Daya Listrik	400 Ribu Barel, 100%,100%,100 %		
		15 Pemenuhan listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;	2 Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan	BIRO EKONOMI
			1 Program Pengembangan Sumber Daya	Kontribusi Sektor Minyak dan Gas ; Persentase Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas; Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik; Persentase Rasio Ketersedian Daya Listrik	400 Ribu Barel, 100%,100%,100 %		

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
		16 Pengembangan Sistem Jaringan /Listrik	1 Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan				
		17 Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	2 Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Kontribusi Sektor Pertambangan ; Pengawasan, Pembinaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Usaha Pertambangan MIneral Logam ; Penyelesaian Izin	65 M;100 %;100 %;100 %		
			3 Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentase Koordinasi Kebijakan Perekonomian	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan, Pangkal Pinang	BIRO EKONOMI
			4 Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri; Persentase Potensi SDA yang dikembangkan	36.087 %;0 %		DISPERINDAG
			5 Program Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
			1 Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Kontribusi Sektor Pertambangan ; Pengawasan, Pembinaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Usaha Pertambangan MIneral Logam ; Penyelesaian Izin Pertambangan Mineral Logam; Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	65 M;100 %;100 %;100 %		
		18 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan	1 Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut				DKP
		19 Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	2 Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				DKP
			3 Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penataan Peraturan Perundang-undangan	100%	Provinsi	BIRO HUKUM

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			4 Program Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Kewilayahan	Persentase PD mitra Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B); Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang tercapai	60 Persentase; 80 Persentase		BAPPEDA
			5 Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi kebijakan sumber daya alam	100%	Luar daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO EKONOMI
			1 Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal			DISHUB
		20 Pengembangan Kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	2 Program Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	96%	Kabuapten Bangka	DINAS PUPR
			3 Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			1 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP
		21 Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	2 Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			1 Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
		22 Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP
			1 Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri				DISPERINDAG
		23 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	3 Program Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Dan	Persentase panjang jalan menuju kawasan strategis	96%		DINAS PUPR

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			Jembatan	indistri perikanaan Tanjung Binga yang dibangun dan pelihara			
			4 Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal			DISHUB
			5 Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			6 Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Identifikasi Permasalahan dan Pengkajian ilmiah sesuai Peraturan Penataan Ruang dan Pertanahan secara komprehensif;	30%	KSP Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga	DINAS PUPR
			1 Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
		24 Pengembangan Sentra Perikanan	2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP
			3 Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi				KUMKM
			4 Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi				KUMKM
			1 Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian Dan Penyuluhan Pertanian	Pertumbuhan penggunaan sarana prasarana pertanian untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan			PERTANIAN
		25 Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;	1 Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian Dan Penyuluhan Pertanian	Pertumbuhan sarana prasarana pertanian			PETANIAN
		26 Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah produk pertanian;	3 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan Dan Sertifikasi Mutu Benih	Persentase benih yang tersertifiksi			UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
			4 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	persentase penurunan serangan hama penyakit tanaman			UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			5 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	Kontribusi produksi benih/ bibit pertanian terhadap PAD			UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			6 Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian			PETANIAN
			7 Program Pengembangan Perkebunan	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian			PETANIAN
			8 Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB sektor Pertanian			PETANIAN
			9 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP
			10 Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			11 Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif; Jumlah Hari Operasi pengawasan yang efektif dan Efisien	50 Kelompok;150 Hari Operasi		DKP
			12 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Budi Daya Ikan Air Payau	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	8.750.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU TANJUNG KRASAK
			13 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Budi Daya Ikan Laut	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	50.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT TANJUNG RUSA
			14 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Budi Daya Ikan Air Tawar	Jumlah Produksi Calon Induk Ikan yang Unggul ; Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	6.000 ekor;300.000 ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL PEMALI
			15 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Hasil uji Keamanan Pangan dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	25 Rekomendasi Hasil		UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			16 Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik				KOMINFO

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			17 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	Persentase Kawasan Hutan Yang Terkelola	25%	Provinsi, SKPD, Bangka	KEHUTANAN
			1 Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian			DINAS PERTANIAN
		27 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian	2 Program Pengembangan Perkebunan	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian			DINAS PERTANIAN
			1 Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian Dan Penyuluhan Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB			PERTANIAN
		28 Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian	2 Program Pengembangan Penyuluhan Dan Peningkatan Sdm Pertanian				UPTD BALAI PENYULUHAN
			3 Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG		Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan	DPMD
			1 Program Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	persentase penduduk rawan pangan yang tertangani; angka kecukupan protein (AKP) dan Angka Kecukupan (AKE)	1%; AKP= 73 gr/kap/hari, AKE= 2539,8 kkal/kap/hari		DINAS PANGAN
		29 Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan	2 Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	kontribusi harga pangan terhadap inflasi daerah	2%		DINAS PANGAN
			3 Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	skor PPH	89,2		DINAS PANGAN
			4 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pangan				UPTD PANGAN
			5 Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian Dan Penyuluhan Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB			PERTANIAN
			6 Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian			PERTANIAN

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			7 Program Pengembangan Perdagangan				DISPERINDAG
			8 Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri				DISPERINDAG
			9 Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal			PERHUBUNGAN
			10 Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal			PERHUBUNGAN
			11 Program Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	96%	Bangka Tengah dan Bangka Selatan	DINAS PUPR
			12 Program Pengembangan Sumber Daya Air	Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan Panjang Talud Sumber Air Baku (m) ; Panjang Penahan Abrasi pantai;Panjang Pengerukan dan Pengendalian; Luas Jaringan Irigasi/Optimalisasi Irigasi	2 hektar; 200 meter; 2.000 meter; 50 hektar	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	DINAS PUPR
			13 Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Persentase koordinasi kebijakan perekonomian	100%	Luar daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO EKONOMI
			14 Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA
			15 Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase		BAPPEDA

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			16 Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik				KOMINFO
			17 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP
			18 Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			19 Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif; Jumlah Hari Operasi pengawasan yang efektif dan Efisien	50 Kelompok;150 Hari Operasi		DKP
			20 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Budi Daya Ikan Air Payau	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	8.750.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU TANJUNG KRASAK
			21 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Budi Daya Ikan Laut	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	50.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT TANJUNG RUSA
			22 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Budi Daya Ikan Air Tawar	Jumlah Produksi Calon Induk Ikan yang Unggul ; Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	6.000 ekor;300.000 ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL PEMALI
			23 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Hasil uji Keamanan Pangan dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	25 Rekomendasi Hasil		UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			24 Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembagan Usaha				KUMKM
			25 Program Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi				KUMKM
			1 Program Peningkatan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
		30 Pengembangan kawasan Transmigrasi dan Peningkatan	2 Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan		Belitung, Belitung Timur, Bangka,	DPMD

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
		penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi		kawasan perdesaan yang tersusun; Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikembangkan		Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah	
			3 Program Pengembangan Pendayagunaan SDA, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG		Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan	DPMD
			4 Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigarasi	Persentase lokasi transmigrasi yang aktif	10%	Luar daerah, Provinsi	DISNAKER
			5 Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian			DINAS PERTANIAN
			6 Program Pengembangan Perkebunan	kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian			DINAS PERTANIAN
			7 Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian			DINAS PERTANIAN
			8 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP
			9 Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			10 Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem				DINAS KEHUTANAN
			11 Program Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Kewilayahan	Persentase PD mitra Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B); Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran	60 Persentase; 80 Persentase		BAPPEDA

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
				RPJMD Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang tercapai			
			1 Program Peningkatan Pengelolaan DAS Dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kelompok Masyarakat Yang Memanfaatkan Hutan; Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Hutan	30%		KEHUTANAN
		31 Peningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis kehutanan	2 Program Peningkatan Tata Kelola Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	6%		KEHUTANAN
			3 Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	Persentase Penanganan Permasalahan Kehutanan Yang Ditindaklanjuti	35%		KEHUTANAN
			4 Program Pengembangan Pendayagunaan SDA, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG		Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan	DPMD
			1 Program Peningkatan Tata Kelola Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	6%		DINAS KEHUTANAN
		32 Pengembangan Kawasan Hutan Produksi	1 Program Peningkatan Tata Kelola Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	6%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	DINAS KEHUTANAN
		33 Pengembangan Kawasan Perhutanan Sosial	2 Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat			Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat	
			2 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan				
			1 Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase Penanganan Permasalahan Kehutanan Yang Ditindaklanjuti	35%	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka Selatan,	DINAS KEHUTANAN

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
						Bangka Barat, Bangka, Belitung Timur, Bangka Tengah, Belitung	
		34 Pengembangan Kawasan Hutan Lindung	2 Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kelompok Masyarakat Yang Memanfaatkan Hutan; Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Hutan	115 Kelompok;30 %		DINAS KEHUTANAN
			3 Program Peningkatan Tata Kelola Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	6%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	DINAS KEHUTANAN
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan				
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PAREKRAF				UPTD BALAI PENGEMBANGAN PAREKRAF SERUMPUN SEBALAI
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN				KUMKM
		35 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif , peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PAREKRAF				KUMKM
			3 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI				KUMKM
			4 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENAWASAN KOPERASI				KUMKM
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan		Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan	DPMD

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
				baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG			
			5 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN				DINDIK
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA				DINDIK
		36 Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	2 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA				
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal			DISHUB
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal			DISHUB
			5 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN				DISHUB
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERMINAL TIPE B				UPTD TERMINAL TIPE B
			7 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi Mantap	96%	Kab. Bangka, Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur	DINAS PUPR
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	Persentase dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang tersusun; Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikembangkan		Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah	DPMD
			9 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL				KUMKM
			10 PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUKM				KUMKM
			11 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN	Persentase PD mitra Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang telah menyusun dokumen	60 Persentase; 80 Persentase		BAPPEDA

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			KEWILAYAHAN	Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B); Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang tercapai			
			12 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA
			13 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD, PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA	Persentase koordinasi kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	100%	Luar daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO EKONOMI
			14 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				DISKOMINFO
			15 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN				DISKOMINFO
			5 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda yang mendapat pemberdayaan		Provinsi	DISPORA
		37 Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan prestasi olah raga	PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase atlet yang berprestasi		Provinsi	
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN	Rasio sarana olah raga dengan jumlah atlet		Provinsi	

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			DAN OLAHRAGA				
			PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	100%		BUDPAR
		38 Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul.	2 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100%	Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO KESRA
			3 PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH DESA	Persentase aparatur desa dan lembaga kemansyarakatan yang terbina; Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa yang baik; Persentase desa yang menyusun PERDES (RPJMDES, RKPDES, APBDES tepat waktu)		Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Bangka, Bangka Barat	DPMD
			4 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
			5 PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; Jumlah Rekomendasi yang digunakan; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	0 %; 0 Hasil; 0 %	Luar daerah, Provinsi, , Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	KESBANGPOL
			1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Perentase panjang jalan trans bangka pada kawasan tanjung kalian yang direncanakan	100%	Pulau Bangka	DINAS PUPR
		39 Pengembangan Kawasan Strategis Tanjung Kalian	2 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut pada kawasan tanjung kalian			DISHUB
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut pada kawasan strategis pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang			DISHUB

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
		40 Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	2 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal			
		41 Pengembangan Kawasan Strategis Kota Tua Muntok	1 PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase kawasan KotaTua Mentok yang dikembangkan			
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA				
		42 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata	2 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal			DISHUB
		43 Pengembangan Sistem Transportasi Darat	1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang Jalan dan jembatan Provinsi dalam kondisi mantap	96%	Belitung, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah	DINAS PUPR
		44 Pengembangan Sistem Transportasi Laut	1 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal		Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah	DISHUB
		45 Pengembangan Sistem Transportasi Udara	1 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN			Pangkal Pinang, Bangka Tengah	DISHUB
		46 Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	6 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Luas Kawasan Konservasi; Jumlah Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut yang Konsisten	750.000 Ha;2 Rekomendasi Izin		DKP
			PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang jalan dan jembatan Provinsi dalam kondisi mantap	96%	Bangka- Sumatera	Dinas PUPR
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal			DISHUB

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				DISKOMINFO
			12 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI				DISKOMINFO
			1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	APK SMA			DINAS PENDIDIKAN
			2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	APK SMA			DINAS PENDIDIKAN
			3 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	APK Pendidikan Khusus			DINAS PENDIDIKAN
			1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang bersertifikasi			DINAS PENDIDIKAN
			2 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN TEKNIS PENDIDIKAN MENENGAH, KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS	persentase SMA, SMA dan pendidikan khusus yang difasilitasi	100%		UPTD PENDIDIKAN
2	**Kapasitas dan Kualitas SDM**	1 peningkatan akses pelayanan pendidikan	3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TATA KELOLA KEPENDIDIKAN	persentase biaya BOS yang terialisasi			SMA/SMK/SLB
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Jumlah bangunan gedung arsip/perpus yang beroprasional	1	Pangkalpinang	DINAS PRKP
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap anak sekolah			PERHUBUNGAN

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
		2 peningkatan pelayanan pedidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing	6 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap anak sekolah			PERHUBUNGAN
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				DISKOMINFO
			8 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI	ditanyakan kembali ke PD			DISKOMINFO
			9 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	100%	Provinsi	BIRO KESRA
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KEAGAMAN	Persentase pembinaan keagamaan	100%	Luar daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO KESRA
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENERIMAAN, PROMOSI, MUTASI, KEPANGKATAN DAN PENSIUN ASN	Persentase ketepatan waktu penerimaan SK Pangkat dan Pensiun ASN		Provinsi, SKPD	BKPSDMD
			12 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
			13 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
				(memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)			
			14 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase		BAPPEDA
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ; Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka; Pertambahan pengunjung perpustakaan	0 %; 0 %; 0 %	SKPD	DKPUS
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi; Pertambahan pengelola perpustakaaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar	100 %; 40 orang	Provinsi, SKPD	DKPUS
		3 peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1 PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT				
				1 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	23 Pper-100.000 kelahiran hidup	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				2 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7.2 per 1.000 kelahiran hidup	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				3 Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS	70%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
						Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				4 Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	79,64%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				5 Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	63%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
			2 PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	37%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				2 Persentase perempuan usia 30 s.d 50 tahun yang dideteksi dini kaner serviks dan payudara	17,50%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				3 Persentase menurunnya penyakit tidak menular lainnya	32,90%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
				(tekanan darah tinggi, obesitas, Diabetes Melitus)			
				4 Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes Rate minimal 85%)	71,40%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				5 Prevalensi HIV (Ket: target prevalensi HIV kurang dari sepuluh persen)	10%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				6 Persentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria	85,71	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				7 Persentase kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	80%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				8 persentase penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ispa, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	100%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
			3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase SMA yang memiliki UKS	50%	7 Kabupaten/kota	DINDIK
			4 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK yang memiliki UKS	50%	7 Kabupaten/kota	DINDIK
			5 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase pendidikan khusus yang memiliki UKS	50%	7 Kabupaten/kota	DINDIK
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TATA KELOLA KEPENDIDIKAN	Persentase SMA sederajat yang memiliki layanan kesehatan	50%	7 Kabupaten/kota	SMK/SMA/SLB
			8 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100%	Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO KESRA
			9 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat,	DPMD

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
						Belitung Timur	
			10 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BAPPEDA
			11 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase	Provinsi Kep. Bangka Belitung	BAPPEDA
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				KOMINFO
			13 PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORUIM KESEHATAN	1 Persentase pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	80%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	UPTD KESEHATAN
			14 PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	persentase pangan yang aman dikonsumsi			DINAS PANGAN
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI				DISPERINDAG
		4 peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	2 Persentase RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	53%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				4 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	60%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	
				1 Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	1800 sampel	Provinsi Kep. Bangka Belitung	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
			2 Program Penigkatan Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	1		Provinsi Kep. Bangka Belitung	RSUP
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN	1 Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	Persentase masyarakat yang terlayani	Provinsi Kep. Bangka Belitung	RSUP
			4 PROGRAM PENINGKATAN	1 Persentase sarana dan		Provinsi Kep. Bangka	RSUP

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	prasarana yang tersedia di RSUP		Belitung	
			5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM	1 Persentase Resep Sesuai Formularium	1 90%	Kabupaten Bangka	RSJ
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	1 Persentase Pasien pasung yang terlayani	1 90%	Kabupaten Bangka	RSJ
			7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA	2 Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi psikososial	2 75%	Kabupaten Bangka	RSJ
				3 Persentase Kabupaten/Kota yang terintegrasi pelayanan keswa	3 100%	Kabupaten Bangka	RSJ
				4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi	4 100%	Kabupaten Bangka	RSJ
				1 Persentase Ruang Rawat Jalan yang Memadai	1 90%		RSJ
			8 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA	2 Persentase Ruang Rawat Inap yang Memadai	2 90%	Kabupaten Bangka	RSJ
				3 Persentase Ruang Penunjang yang Memadai	3 90%		RSJ
				4 Persentase Bangunan Penunjang yang Memadai	4 70%	Kabupaten Bangka	RSJ
				5 Persentase Alat Kesehatan yang Sesuai Standar	5 60%	Kabupaten Bangka	RSJ
				6 Persentase Peralatan Penunjang	6 75%	Kabupaten Bangka	RSJ
				7 Persentase Obat dan Perbekalan Kesehatan	7 95%	Kabupaten Bangka	RSJ
				Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
			11 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAAN TEKNIS HYGIENIS PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA	1 Persentase tenaga/SDM kesehatan yang mengikuti program peningkatan kompetensi	1 75%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
			1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAAN PEMERINTAH	3 Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang	3 90%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
				memenuhi syarat			
				Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	RSUP
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAAN PEMERINTAH	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	RSJ
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAAN PEMERINTAH				BKPSDM
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENERIMAAN, PROMOSI, MUTASI, KEPANGKATAN DAN PENSIUN ASN	Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan panjang talud Sumber Air Baku (m); Panjang Penahan Abrasi pantai; Panjang Pengerukan dan Pengendalian; Luas Jaringan Irigasi/ Optimalisasi irigasi	2 Ha; 200 meter; 2000 meter; 50 Ha		DINAS PUPR
		5 Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase kawasana kumuh yang diintervensi dengan sarana dan prasarana permukiman	30 persen		DINAS PRKP
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN				DLH
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase konsistensi dan keselarasan dokumen rencana peningkatan manajemen perubahan	80%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	BAPPEDA
			1 PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN				BAPPEDA
			2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase pengembangan kinerja	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang	BIRO ORGANISASI
		6 Pengembangan Sistem Sumber Daya Air	3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA			Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan,	

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			PEMERINTAH DAERAH			Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah	
		7 Pengembangan Sistem Prasarana Permukiman				Luar Daerah, Provinsi, SKPD	
						Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang	
3	**Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik**	1 peningkatan Manajemen Perubahan					BAPPEDA
			1 PROGRAM PERENCANAAN , EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD	3 nilai		BAKUDA
			2 PROGRAM PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH				BAPPEDA
			1 PROGRAM PERENCANAAN , EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah; tingkat pelayanan sistem informasi pajak daerah	89,64%; 4 nilai	Provinsi	BAKUDA
			2 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah	1,57%	Provinsi	BAKUDA
			3 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN LAIN YANG SAH	Rata-rata prosentase realisasi penerimaan pajak daerah pada unit pelaksanaan teknis; indeks kepuasan masyarakat	100%; 75 nilai	SKPD, Bangka Selatan	BAKUDA
		2 Pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu dilakukan melalui peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi kebijakan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.	4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat kesesuaian jadwal penetapan APBD dan perubahan APBD	3 nilai	SKPD, Pangkalpinang	BAKUDA
			5 PROGRAM PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik	100%	Provinsi	BIRO PEMBANGUNAN

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
				Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota			
		3 Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, demokratif, responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis; mendorong terciptanya kemandirian fiskal dengan mendorong pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah untuk sebesar mungkin kemakmuran masyarakat.	6 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Menginput Aplikasi E-Monev	100%	Provinsi	BIRO PEMBANGUNAN
			7 PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD	Penyusunan Laporan Dokumen Sekretariat Daerah	100%	Provinsi	BIRO PEMBANGUNAN SETDA
			8 PROGRAM PERENCANAAN SETDA	Prosentase penegakan/penindakan pelanggar Perda	100%	Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	SATPOL PP
			9 PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus) di Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	Luar Daerah, Provinsi	BIRO PEMBANGUNAN
			10 PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBN	Persentase penataan peraturan perundang-undangan	100%	Luar daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO HUKUM
			1 PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Bantuan Hukum	85%	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka,	BIRO HUKUM

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
						Belitung, Pangkal Pinang	
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pengembangan Informasi Hukum dan Dokumentasi Hukum	100%	Provinsi, Bangka	BIRO HUKUM
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD,	SETWAN
		4 Penegakan Perda dan Perkada yang memiliki sanksi	4 PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase peningkatan kelembagaan dan analisis jabatan	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO ORGANISASI
			1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SERTA ANALISISI JABATAN	Persentase peningkatan tata laksana	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	BIRO ORGANISASI
		5 Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengembangan kinerja	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang	BIRO ORGANISASI
			3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan tata laksana	100%	Luar daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO ORGANISASI
			1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Persentase Hasil Kegiatan Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik	100%	Provinsi, SKPD	BIRO HUMAS
			2 PROGRAM PENINGKATAN PUBLIKASI, PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN INFORMASI	Persentase Publikasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi yang Dipublikasikan	100%	Provinsi, SKPD	BIRO HUMAS
		6 peningkatan Penataan dan penguatan organisasi	3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN, DOKUMENTASI, PUBLIKASI MEDIA DAN IT	Persentase kegiatan protokoler yang dilaksanakan	100%	Provinsi, SKPD	BIRO HUMAS
			4 PROGRAM PENINGKATAN			Luar Daerah,Provinsi	DISKOMINFO

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			PELAYANAN PROTOKOLER				
			5 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI	Persentase peningkatan informasi dan invesasi, pelayanan humas dan protokoler, serta hubungan antar lembaga penghubung provinsi	100 %	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
		7 peningkatan Penataan Tata Laksana	6 PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN INVESTASI, PELAYANAN HUMAS DAN PROTOKOLER, SERTA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PENGHUBUNG PROVINSI	Persentase pelayanan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD,	SETWAN
			7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN	Persentase Ketepatan Waktu Penerimaan SK Pangkat dan Pensiun ASN Terhadap B; Persentase Kesesuaian ASN Pada Promosi, Mutasi dan Kepangkatan Terhadap Analisa Jabatan; Persentase Kesesuaian Antara Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Kebutuhan Organisasi serta Prioritas Pembangunan Daerah; Peringkat Kualitas Pelayanan Penerimaan ASN melalui Jalur Umum dan Pendidikan Kedinasan yang Objektif, Terbuka, Transparan dan Akuntabel	765 SK ASN; 95 %; 70 %; 4 Nilai		BKPSDM
			1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGADAAN SERTA PELAYANAN PROMOSI, MUTASI, KEPANGKATAN DAN PENSIUN ASN	Tingkat Penilaian Kinerja, Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Disiplin ASN; Tingkat Pelayanan Kesejahteraan ASN; Tingkat sarana dan prasarana terhadap Pelayanan ASN berbasis Tekhnologi Informasi	60 Orang; 4.116 Orang; 90 %		BKPSDM
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENILAIAN KINERJA, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN	Jumlah ASN terlatih; jumlah SKPD terlatih	1.750 orang; 17 SKPD		BKPSDM
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ASN	Persentase pengembangan kinerja	100%	Luar daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah,	BIRO ORGANISASI

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
						Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	
			1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH				BAPPEDA
			2 PROGRAM PERENCANAAN , EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi dan keselarasan dokumen rencana penguatan akuntabilitas kinerja	80%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	BAPPEDA
		8 peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	3 PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN				DISKOMINFO
			4 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	93%	Provinsi	INSPEKTORAT
		10 Peningkatan Penguatan Pengawasan	1 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAN APARATUR	Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	INSPEKTORAT
		9 peningkatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	Peningkatan level kelembagaan Inspektorat	3 level	SKPD	INSPEKTORAT
			3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA				DISKOMINFO
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	100%	SKPD, Pangkalpinang	BAKUDA
		11 Opini Audit BPK	1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN	Tingkat pelayanan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah; prosentase kabupaten/kota yang memiliki hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dengan rata-rata hasil WTP	4 nilai; 100%	SKPD, Pangkalpinang	BAKUDA
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AKUTANSI DAN PELAPORAN	Prosentase aser daerah yang dapat diyakini kebenarannya; prosentase kontribusi kemanfaatan aset daerah	100%; 0,33%	SKPD, Pangkalpinang	BAKUDA

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
				terhadap PAD			
			3 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA ASET DAERAH				SAMSAT
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan tata laksana	100%	Luar daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO ORGANISASI
			5 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Perentase sekolah SMA yang fasilitasi perizinaan/SMA Terakriditasi			DINDIK
			7 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Perentase sekolah SMK yang fasilitasi perizinaan/Terakriditasi			DINDIK
			8 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Perentase sekolah Sekolahluar biasa yang fasilitasi perizinaan/terekriditasi			DINDIK
		12 Peningkatan Kualitas Pelayanaan Publik	9 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS				KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PLUT KUMKM	1 persentase akrediatsi pelayanan RS	1 100%	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	RSUP
			10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN	1 Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	RSUP
			11 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	3 Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Layanan	3 80%	Kabupaten Bangka	RSJ
			12 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	4 Persentase elemen Akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi	4 80%	Kabupaten Bangka	
				1 Persentase Kabupaten/Kota	3 100%		RSJ

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
				yang terintegrasi pelayanan keswa			
			13 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA	Persentase pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	100%	Provinsi	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			14 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN PENGADAAN	persentase pelayanan Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah	100%	Provinsi	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			15 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Penerapan aplikasi berbasis Elektronik yang diterapkan dalam proses pengadaan Barang/jasa pemerintah Provinsi Kepulauan bangka Belitung	100%	Provinsi, Luar Daerah	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			16 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Persentase penyelesaian kasus tanah negara; Persentase bidang tanah pemerintah provinsi yang bersertifikat; persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	77.460.000 meter persegi;30 bidang;20 persentase	Provinsi	BIRO PEMERINTAHAN
			17 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Peringkat penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi ; Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan; Jumlah kepala daerah dan anggota legislative yang terfasilitasi secara administrasi; Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik	15 peringkat;10 Prosentase;20 %;90 %	Provinsi, SKPD	BIRO PEMERINTAHAN
			18 PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Peningkatan koordinasi hubungan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Peningkatan jumlah kerjasama antarpemerintah daerah, swasta, dan luar negeri	90%;90%	Luar daerah, Provinsi	BIRO PEMERINTAHAN

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			19 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	100%	Provinsi, SKPD	DKPUS
			20 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	Pertambahan jumlah arsip yang dikelola (Dinamis dan Statis)	0%	Provinsi, SKPD, Pangkalpinang	DKPUS
			21 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ; Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka; Pertambahan pengunjung perpustakaan	0 %; 0 %; 0 %	SKPD	DKPUS
			22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	DITANYAKAN KEMBALI KE PD			DISKOMINFO
			23 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tingkat Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah; Persentase Peningkatan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Masyarakat			DISKOMINFO
			24 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	persentase PD yang difasilitasi dengan sistem informasi			DISKOMINFO
			25 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	persentase saluran komunikasi yang dikelola			DISKOMINFO
			26 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNKASI PUBLIK	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
			1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG		Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan	DPMD

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang tersusun; Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikembangkan		Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah	DPMD
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	Persentase aparatur desa dan lembaga kemansyarakatan yang terbina; Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa yang baik; Persentase desa yang menyusun PERDES (RPJMDES, RKPDES, APBDES tepat waktu)		Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Bangka, Bangka Barat	DPMD
			4 PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH DESA			Belitung, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang	
						Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan	
4	**Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah dan Masyarakat**	1 Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN PANGAN	persentase penduduk rawan pangan tertangani	1%		DINAS PANGAN
			5 PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	kontribusi harga panganterhadap inflasi daerah	2%		DINAS PANGAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI PANGAN	skor PPH			DINAS PANGAN
			7 PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	1 Persentase kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	1 54%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
			10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	4 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	4 60%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
							DISPORA
			11 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA				DISPORA
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	pesentase sekolah daerah terpencil yang diinterpensi			DINDIK
			13 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB			DINAS PERTANIAN
			14 PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB			DINAS PERTANIAN
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian			DINAS PERTANIAN
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian			DINAS PERTANIAN
			17 PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Peningkatan Kelompok Masyarakat Yang Memanfaatkan Hutan; Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Hutan	115 Kelompok;30 %		DINAS KEHUTANAN
			18 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP
			19 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			20 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN				DISKOMINFO
			21 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase transmigran yang mendapat bantuan	10%	Luar daerah, Provinsi	DINAS TENAGA KERJA
			22 PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGARASI	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi	100%	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah,	DINSOS

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
				sosial		Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	
			1 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial		Provinsi, Pangkal Pinang	UPTD PANTI SOSIAL
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial		Provinsi, Belitung Timur	UPTD PANTI SOSIAL
			3 PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PANTI SOSIAL	1 Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	1	Kabupaten Bangka	RSJ
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	2 Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	2 42 Hari	Kabupaten Bangka	
				Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINSOS
		2 Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase pembinaan keagamaan	100%	Luar Daerah, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO KESRA
			2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial		Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINSOS
			3 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lansia yang ikut olah raga lansia			DISPORA
			5 PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN	Intensiats pelayanan hukum dalam setahun terhadap lansia			BIRO HUKUM

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA				
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH				
		3 Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.		Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan penanganan pada fakir miskin		Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINSOS
			1 PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Pesentase			KUMKM
			2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI				KUMKM
			3 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase penduduk miskin yang bekerja disektor perdagangan			DISPERINDAG
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase pemuda miskin			DISPORA
			5 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Pesentase penduduk miskin yang bekerja disektor pertaniaan			PERTANIAN
		4 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.	6 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	perentase penduduk miskin yang bekerja disektor perkebunaan			PERTANIAN
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	persentase penduduk miskin yang bekerja sebagai peternak			PERTANIAN
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase penduduk miskin			DKP

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	yang bekerja sebagai nelayan			
			9 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	persentase penduduk miskin yang bekerja disektor perikanaan budidaya			DKP
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Intensistas informasi yang ditayangkan mengenai program-program penanggulangan kemiskinan			DISKOMINFO
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal			DISHUB
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT				DISHUB
			13 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Perentase penduduk miskin dengan rumah tidak layak huni			PEKIM
			14 PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT				
			15 Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan				BAPPEDA
			16 PROGRAM PERENCANAAN SOSBUD DAN PEMERINTAHAN	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100%	Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO KESRA
			17 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1 Persentase kepesertaaan JKN	1 77,50%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINAS KESEHATAN
			19 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase siswa SMA miskin yang dapat beasiswa			
			20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase siswa SMK miskin yang dapat beasiswa			
			21 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswapendidikan khusus miskin yang dapat beasiswa			

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			22 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	persentase sanitasi dan air bersih penduduk miskin			
			23 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Jumlah penyediaan data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik perencanaan pembangunanalokasi anggaranpembangunan demokrasi serta penegakkan hukum dan pencegahan kriminal; Jumlah pemanfaatan NIK Data base kependudukan dan KTP_el oleh OPD Provinsi; Jumlah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil disemua kabupaten/kota			DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			1 PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase PUS yang menggunakan KB MKJP; Persentase keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Pra sejahtera I			DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				BAPPEDA
			3 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN				BAPPEDA
		5 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan; Persentase keterwakilan perempuan dilembaga publik; Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender			DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		6 Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta	1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi ;			DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
		memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG);		Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi ; Persentase Kab/Kota Layak Anak			
		7 menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	2 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase perusahaan yang menerapkan norma penghapusan diskriminasi tenaga kerja perempuan dan anak	10%		DINAS TENAGA KERJA
			3 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL			Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINAS SOSIAL
			4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				DISKOMINFO
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi ; Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi ; Persentase Kab/Kota Layak Anak			DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		1 Menjamin hak anak dalam pemabangunan	1 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase perusahaan yang menerapkan norma perlindungan tenaga kerja anak	10%		DINAS TENAGA KERJA
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah penyediaan data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik perencanaan pembangunanalokasi anggaranpembangunan demokrasi serta penegakkan hukum dan pencegahan kriminal; Jumlah pemanfaatan			DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
				NIK Data base kependudukan dan KTP_el oleh OPD Provinsi; Jumlah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil disemua kabupaten/kota			
			3 PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial		Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINAS SOSIAL
			4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	1 14,35%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINAS KESEHATAN
			5 PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT				DISKOMINFO
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah penistaan terhadap simbol negara; Jumlah Konflik Sara	0 %; 3 Jumlah	Luar daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	KESBANGPOL
		1 Menjamin Kebebasan sipil	1 PROGRAM BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah rekomendasi koordinasi antar pemangku kepentingan yang dijalankan; Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	7 ; 0 %	Luar daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	KESBANGPOL
5	**Pembangunan Berdemokrasi**		2 PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; Jumlah Rekomendasi yang digunakan; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	25 %; 1 Hasil; 30 %	Luar daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	KESBANGPOL
			3 PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Prosentase penindakan pelanggaran Tibumtranmas	100%		SATPOL PP
		2 Penyelenggaraan ketertiban umum	1 PROGRAM PENINGKATAN	Prosentase peningkatan kualitas	10%		SATPOL PP

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
		dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat (Linmas)	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Linmas			
			2 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Prosentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP	100%		SATPOL PP
			3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL SATPOL PP	Prosentase penegakan/penindakan pelanggar Perda	100%		SATPOL PP
			4 PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Persentase kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan; Persentase keterwakilan perempuan dilembaga publik; Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender			DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		3 Menjamin Hak-hak politik	1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN				DINSOS
			2 PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA				DISKOMINFO
		4 Menjamin Lembaga-Lembaga Demokrasi	1 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				BAPPEDA
			2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Cakupan Pembinaan Poitik Daerah; Tingkat Kinerja Lembaga Demokrasi;	7 Jumlah; 45 %;	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	KESBANGPOL
			3 PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI	Persentase konsistensi dan keselarasan dokumen rencana pembangunan demokrasi	80%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	BAPPEDA
			5 PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase pengembangan kebijakan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	100%	Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO KESRA
			6 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang Diintervensi Dalam Pencegahan dan	75%	Provinsi	BPBD

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
				Kesiapsiagaan Bencana			
6	**Penanggulangan Bencana**	1 Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Kedaruratan dan Logistik/Peralatan Penanggulangan Bencana	80%	Provinsi	BPBD
			2 PROGRAM LOGISTIK DAN PENINGKATAN TANGGAP DARURAT BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	75%	Provinsi	BPBD
			3 PROGRAM PENINGKATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINSOS
			4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	kontribusi harga pangan terhadap inflasi daerah	2%		DINAS PANGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan panjang talud Sumber Air Baku (m); Panjang Penahan Abrasi pantai; Panjang Pengerukan dan Pengendalian; Luas Jaringan Irigasi/ Optimalisasi irigasi	2 Ha; 200 meter; 2000 meter; 50 Ha	Kab.Bangka, Kab.Bangka Selatan, Kab.Bangka Tengah, Kab.Bangka Barat, Pangkalpinang, Kab.Belitung Timur	DINAS PUPR
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Tersedianya Dokumen inventarisasi data insfrastruktur pengendalian banjir	100.000 meter	Kel,pasir padi Pangkalpinang	
							SMA/SMK/SLB
			7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TATA KELOLA KEPENDIDIKAN				KOMINFO
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
			9 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				DINAS KEHUTANAN
			10 PROGRAM PENINGKATAN				UPTD KEHUTANAN

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
			11 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA KEHUTANAN	Persentase masyarakat yang terkena bencana			
			12 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Data dan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	4 dokumen;70 %	Provinsi	DLH
		2 Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP				DINAS PUPR
		3 Pengembangan Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Data dan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	4 dokumen;70 %	Provinsi	DLH
		4 Pengembangan Pengelolaan kawasan perlindungan setempat	1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP				DLH
		5 Pengembangan Pengelolaan kawasan lindung lainnya	1 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Data dan Informasi Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	4 Dokumen;70 %		DLH
		6 Pengendalian kulitas air	1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Penaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Penegakan Hukum Lingkungan	38,1 %;64 Nilai;82 Nilai;100 %	Bangka	DLH
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Sertifikat Akreditasi laboratorium	1 Sertifikat	Provinsi, SKPD	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN				PUPR
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				
			5 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH				DISHUT
			6 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN				PERKIM

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM				
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Data dan Informasi Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	4 Dokumen;70 %		DLH
		7 pengendalian kualitas udara	1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Penaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Penegakan Hukum Lingkungan	38,1 %;64 Nilai;82 Nilai;100 %		DLH
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Sertifikat Akreditasi laboratorium	1 Sertifikat		UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN				DINAS PUPR
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				
			5 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH				DISHUT
			6 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM				PERKIM
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR				DLH

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN				
		8 Peningkatan tutupan hutan	1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP				DLH
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP				UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN				PUPR
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				
			5 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH				DISHUT
			6 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM				PERKIM
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Data dan Informasi Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	4 Dokumen;70 %		DLH
		9 Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Penaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Penegakan Hukum Lingkungan	38,1 %;64 Nilai;82 Nilai;100 %		DLH
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah	6,47%		DLH

No	Prioritas RKPD 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
			3 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP				DISHUT
			4 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sertifikat Akreditasi laboratorium	1 Sertifikat		UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
			5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN				
			6 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH				DISHUT
			7 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM				UPTD KEHUTANAN
			8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYAN TEKNIS TATA KELOLA KEHUTANAN	Luas Kawasan Konservasi; Jumlah Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut yang Konsisten	750.000 Ha;2 Rekomendasi Izin		DKP
			9 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			10 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			11 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				

4.6 PRIORITAS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Dokumen perencanaan pemerintah akan memuat penjabaran rencana pembangunan menurut wilayah. Pembangunan kewilayahan dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Beitung.

Prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota yang juga sebagai upaya untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar IV.2 Pemetaan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Potensi Lokal

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

Pengembangan potensi unggulan diarahkan pada upaya untuk mewujudkan hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari potensi sumberdaya yang ada.

Adapun gambaran mengenai kondisi pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dijelaskan pada tabel IV.12 sebagai berikut:

Tabel IV.12 Kondisi Indikator Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

Indikator	Provinsi	Bangka	Babar	Bateng	Basel	Pangkal pinang	Belitung	Beltim
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,08	4,54	4,73	0,31	4,06	4,19	4,53	4,09
Pengangguran (%)	6,29	8,87	5,92	6,58	2,01	10,64	4,57	2,55
Kemiskinan (%)	5,4	5,63	3,08	5,67	3,74	4,97	8,38	7,33
Angka Kematian Bayi(per 1000 kelahiran hidup)	7,05	7,54	7,37	6,46	6,28	3,38	11,29	8,25
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,6	12,36	11,48	11,72	10,88	12,76	11,32	11,28
Angka Harapan Hidup (tahun)	69,88	70,48	69,47	70,28	66,86	72,51	70,32	71,23

Berdasarkan Gambar IV.2 dan Tabel IV.12, maka prioritas dan fokus pembangunan wilayah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 diarahkan pada:

1. Kota Pangkalpinang

   Fokus dan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2018 diarahkan pada upaya penguatan pertumbuhan investasi melalui promosi dan regulasi investasi sehingga diharapkan dapat berimplikasi pada penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menurunkan angka pengangguran. Beberapa program kegiatan yang harus dilakukan adalah melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas SDM menuju SDM yang terampil dan berdaya saing.

   Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, maka Kota Pangkalpinang diarahkan pada pengembangan sektor: perdagangan dan jasa; industri pengolahan; serta, pariwisata.

2. Kabupaten Bangka

   Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2018 diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan pertanian tangguh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan angka kematian bayi. Program dan kegiatan yang diarahkan untuk menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka antara lain adalah, penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas SDM, percepatan program-program pengentasan kemiskinan dan pembangunan dibidang kesehatan.
   Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pertanian; pariwisata; perkebunan; pertambangan; dan industri pengolahan.

3. Kabupaten Bangka Barat

   Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2018diarahkan pada penguatan pelayanan dasar, ekonomi masyarakat, pengembangan pariwisata dan daya saing daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaiupaya untuk memantapkan ekonomi daerah dan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah serta angka harapan hidup. Beberapa program kegiatan prioritas yang diarahkan untuk menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka Barat antara lain adalah pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

   Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Barat diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pertanian, pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan.

4. Kabupaten Bangka Tengah

   Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2018 diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan pariwisata dan daya saing daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran, kemiskinan. Program kegiatan prioritas diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan terhadap beberapa sumber produksi, peningkatan kualitas SDM, percepatan program-program pengentasan kemiskinan.
   Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Tengah diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pergadangan dan jasa, pertanian, perkebunan serta pertambangan.

5. Kabupaten Bangka Selatan

   Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2018 diarahkan pada upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Sehingga program kegiatan prioritas diharapkan dapat fokus pada upaya pembangunan bidang pendidikan, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat selain itu diupayakan untuk melakukan peningkatan terhadap beberapa sumber produksi.
   Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Selatan diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan.

6. Kabupaten Belitung

   Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2018 diarahkan pada percepatan pengembangan pariwisata Kabupaten Belitung, pembangunan kawasan industri prioritas/kawasan ekonomi khusus Belitung, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan,peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka kematian bayi dan serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah.

Beberapa program prioritas yang diarahkan antara lain pada upaya untuk mempercepat program-program penanggulangan kemiskinan, pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Belitung diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: perdagangan dan jasa, pariwisata, industri pengolahan dan perikanan.

7. Kabupaten Belitung Timur

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2018 diarahkan pada upaya untuk menguatkan laju pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan angka kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Program kegiatan prioritas diarahkan pada upaya untuk percepatan program-program penanggulangan kmiskinan serta pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, selain itu peningkatan terhadap beberapa sumber produksi.

Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Barat diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan laut.

4.6.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman perencanaan yang harus diacu dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam dokumen RTRW telah ditetapkan Rencana Pola Ruang, Rencana Struktur Ruang, serta Rencana Kawasan Strategis.

a) Rencana Pola Ruang

Di dalam rencana pola ruang telah ditetapkan rencana pengembangan kawasan lindung yang meliputi :

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
3. Kawasan perlindungan setempat;
4. kawasan suaka alam,
5. pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya;
6. kawasan rawan bencana alam.

b) Rencana Struktur Ruang Wilayah

1. Rencana Sistem Perkotaan
2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi.
3. Rencana Sistem Jaringan Energi
4. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
5. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

c) Rencana Kawasan Strategis

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi:

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

4.6.2 Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Bahwa dalam perencanaan pembangunan, diharuskan adanya suatu keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan spasial. Oleh karenanya, didalam dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan sektoral harus mengacu kepada dokumen RTRW yang merupakan dokumen perencanaan spasial sehingga dapat dihasilkan perencanaan yang berorientasi pada kesesuaian antara sektoral dan spasial.

Adapun indikasi program dan kegiatan utama didalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana yang tertuang didalam Tabel IV.13.

Tabel IV.13 Indikasi Program Utama Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	**Pemantapan Sistem Perkotaan**												
A1	**Perwujudan PKNP Pangkal Pinang**	Penyusunan RDTR Kota Pangkal Pinang	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pengembangan kantor Provinsi dan permukiman di Bukit Intan	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan Kawasan Industri di Pangkalbalam	Dinas Perindag									APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pengembangan inner ringroad dan outer ring road	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum
		Pengembangan taman kota	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pemanfaatan kolong dan lahan genangan secara lebih bermanfaat	Badan Lingkhungan Hidup Daerah (BLHD)									APBD Kokab	Badan Lingkhungan Hidup Daerah (BLHD)
		Mengembangkan Pelabuhan Pangkalbalam	Dinas Perhubungan									APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pengembangan kawasan wisata kota di Pasirpadi	Dinas Budpar									APBD Kokab	Dinas Budpar
		Peningkatan terminal	Dinas Perhubungan									APBD Prov	Dinas Perhubungan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A2	**Perwujudan PKW Muntok**	Pemantapan tata batas kawasan kota tua	BPN										BPN
		Penyusunan RDTR Kota tua	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Melakukan restorasi dan revitalisasi bangunan bersejarah	Dinas Pekerjaan Umum									APBN/APBD	Dinas Pekerjaan Umum
		Perbaikan dan pembangunan jalan antar pusat kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan									APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	Badan Lingkhungan Hidup Daerah									APBD Kokab	Badan Lingkhungan Hidup Daerah
A3	**Perwujudan PKW Tanjung Pandan**	Pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Batu	Disperindag									APBD Prov	Disperindag
		Pengembangan kawasan wisata	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Pembangunan infrastruktur pendukung wisata bahari	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan fasilitas perdagangan berskala	Disperindag									APBD Prov	Disperindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		regional (pulau)											
		Pembangunan museum bahari	Disbudpar									APBD Prov	Disbudpar
		Pembangunan terminal tipe B	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan									APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BHLD									APBD Kokab	BHLD
A4	Perwujudan **PKW Manggar**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BHLD									APBD Prov/ APBD Kokab	BHLD
		Pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan Manggar	Dinas Perhubungan									APBN/ APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pembangunan terminal tipe B Pembangunan sistem penyediaan ari minum	Dinas Perhubungan									APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan									APBD Prov	Dinas Kesehatan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
A5	Perwujudan **PKL Kelapa**	Penetapan kawasan permukiman dan kelengkapan fasilitas pendukung	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan masterplan kawasan perdagangan	Disperindag									APBD Kokab	Disperindag
		Pembangunan fasilitas wisata air panas	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Pembangunan industri pengolahan sawit	Diperindag									APBD Prov/ APBD Kokab	Diperindag
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
A6	Perwujudan **PKL Puding Besar**	Pembangunan fasilitas rest area	Dinas Perhubungan									APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan fasilitas	Disperindag									APBD Kokab	Disperindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		perdagangan											
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan									APBD Kokab	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan
A7	Perwujudan **PKL Sungai Selan**	Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU										Dinas PU
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan									APBD Kokab	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan
A8	Perwujudan **PKL Payung**	Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan fasilitas perdagangan	Disperindag									APBD Kokab	Disperindag
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas PU
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan
A9	Perwujudan **PKL Sungailiat**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Sungailiat	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan terminal tipe C	Dishub									APBD Kokab	Dishub
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Dibudpar									APBD Kokab	Dibudpar
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU										Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
A10	Perwujudan **PKWp Koba**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Koba	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan Pembangunan	Dishub									APBD Kokab	Dishub

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		terminal tipe C											
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD
A11	Perwujudan **PKWp Toboali**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Toboali	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan Pembangunan terminal tipe C	Dinas Perhubungan									APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBD Kokab	BLHD
B	**Perwujudan Sistem**												

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Prasarana Wilayah												
B1	**Perwujudan Sistem Transportasi**												
a	**Sistem Transportasi Darat**	Peningkatan kondisi dan daya layan jalan kolektor primer	Dinas PU									APBN	Dinas PU
		Pembangunan jalan kolektor dan lokal primer yang menghubungkan PKL dengan PPK di seluruh wilayah kota/kabupaten	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Peningkatan dan pembangunan terminal B di Muntok, Sungailiat, Tanjung Pandan dan Manggar.	Dinas PU									APBD Prov	Dinas PU
b	**Sistem Transportasi Laut**	Percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan utama Tanjung Batu	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Perbaikan dan peningkatan daya layan pelabuhan Tanjung Gudang (Belinyu), Tanjung Kelian (Muntok), Pangkal Balam (Pangkal Pinang), Tanjung Pandan (Tanjung Pandan),	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pelabuhan Pangkal Sadai (Toboali) dan Pelabuhan Manggar (Manggar)											
		Pembangunan fasilitas dan infrastruktur penunjang pelabuhan laut	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
c	**Sistem Transportasi Udara**	Peningkatan daya dan kualitas layanan bandara Depati Amir	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Peningkatan daya dan kualitas layanan H. AS Hanandjoeddin	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pengembangan fasilitas pendukung bandara	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Penetapan dan sosialisasi kawasan keamanan operasi penerbangan (KKOP) setiap bandara	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
B2	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Listrik**	Pengembangan jaringan sampai pada kawasan perdesaan yang belum terlayani aliran listrik	PLN									APBN/APBD Prov/Masyarakat	PLN
		Pengembangan sumber pembangkit listrik tenaga batubara, mikrohidro dan nuklir	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi
		Peningkatan pelayanan dan	Dinas									APBN/APBD	Dinas

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		penyediaan gardu induk di seluruh PKW dan PKL	Pertambangan dan Energi									Prov/Masyarakat	Pertambangan dan Energi
		Mendorong pengembangan energi terbarukan dengan sumber tenaga yang berasal dari angin, udara dan sinar matahari	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi
		Penyediaan sumber energi listrik secara memadai untuk kawasan pariwisata, industri, bandara, pelabuhan laut dan rumah sakit	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi
B3	**Perwujudan Sistem Telekomunikasi**	Pemanfaatan jaringan optik secara optimal, karena provinsi Kep. Bangka Belitung dilintasi jaringan telekomunikasi serat optik internasional	Dinas Kominfo									APBN/APBD Prov/Swasta	Dinas Kominfo
		pengaturan penempatan menara telekomunikasi secara efektif dan efisien dengan mendorong pengguanaan menara bersama antara operator (*join operation*)	Dinas Kominfo									Swasta	Dinas Kominfo
		pengembangan jaringan dan pelayanan informasi dan telekomunikasi sampai pada	Dinas Kominfo									APBN/Swasta	Dinas Kominfo

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		kawasan perdesaan.											
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi untuk pelayanan publik dan usaha	Dinas Kominfo									APBN/ Swasta	Dinas Kominfo
B4	**Perwujudan Sistem Sumber Daya Air**	Pemanfaatan sumber daya air untuk; pembangkit tenaga listrik mikrohidro	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku air mimun	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku pengarian sawah (irigasi) dan industri	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; air baku pelabuhan laut	Dinas PU										Dinas PU
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; budidaya perikanan air tawar Pembangunan sistem drainase pada kawasan permukiman, areal rawan banjir dan sepanjang sisi jalan	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan cekdam pada hulu sungai	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Sistem pengamanan pantai dari abrasi dilakukan melalui pendekatan struktur dan non struktur	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
B5	**Perwujudan Sistem Prasarana Permukiman**	Penyusunan masterplan dan pembangunan sistem drainase pada seluruh wilayah perkotaan (PKNp, PKW dan PKL)	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar, kawasan wisata, komersial dan kawasan industri (IPAL industri) serta instalasi pengolah limbah beracun dan berbahaya (B3)	BLHD									APBN/APBD Prov	BLHD
		Penyediaan air bersih untuk setiap pusat permukiman,	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		kawasan wisata, industri dan pelabuhan.											
C	**Perwujudan Rencana Pola Ruang**												
C1	**Perwujudan Kawasan Lindung**												
	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov	Dinas Kerhutanan
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Pengawasan kawasan lindung.	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Pengamanan kawasan lindung	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung;	Dinas PU									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas PU
		Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.	Dinas PU									APBD Prov	Dinas PU
	Pengelolaan kawasan perlindungan setempat	Sosialisasi batas sempadan dan manfaat serta resiko kerusakan sempadan	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Rehabilitasi dan penghijauan sempadan	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Pengembangan sempadan sebagai jalur hijau produktif sehingga mempunyai nilai tambah	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Penguatan legalitas sempadan melalui peraturan daerah	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Pengembangan kerjasama penguatan fungsi sempadan dengan lembaga usaha dan	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		atau lembaga masyarakat											
		Pemasangan batas fisik pemelihara sempadan	BLHD									APBN/APBD Prov/Masyarakat	BLHD
	Pengelolaan kawasan cagar budaya	(penjelasan pada kawasan strategis Kota Tua Muntok)	-									-	-
	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Kepulauan Bangka Belitung secara lebih akurat	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia	BLHD									APBN/APBD	BLHD
		Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis	BLHD									APBN/APBD/ LSM	BLHD
		Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada	BLHD									APBN/APBD/ LSM	BLHD

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam											
	Pengelolaan kawasan lindung lainnya	pengembangan dan pemeliharaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah.	BLHD									APBN/APBD/ LSM	BLHD
C2	**Perwujudan Kawasan Budidaya**												
a	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi**	Pemantapan tata batas hutan produksi sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
		Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan)	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
		Pembangunan jalan produksi	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam)	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
		Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
b	**Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat**	Pemantapan tata batas hutan rakyat sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Melakukan rehabilitasi hutan yang mengalami kerusakan	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan)	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pembangunan jalan produksi dean inspeksi	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam)	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
c	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian**	Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		pertanian pangan dan pertanian hortikultur											
		Pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan pendekatan agropolitan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Menetapkan tata batas kawasan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Menetapkan kawasan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegaitan pertanian hortikultur dan atau perkebunan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
d	Perwujudan Sentra Perikanan	Menetapkan kawasan sentra perikanan budidaya dan	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		perikanan tangkap dengan pendekatan minapolitan											
		Menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk pengingkatan produktivitas perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan terutama perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
e	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan	Pemantapan tata batas wilayah pertambangan (WP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR)	Dinas Pertembangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertembangan dan Energi

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Menyusun dan menyepakati pola dan teknik pertambangan timah yang ramah lingkungan	Dinas Pertembangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertembangan dan Energi
		Mendorong bertumbuhnya industri rakyat pengolahan timah yang ramah lingkungan	Dinas Pertembangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertembangan dan Energi
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertambangan, terutama pertambangan rakyat	Dinas Pertembangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertembangan dan Energi
		Mendorong pembangunan dan penyediaan peralatan pengolahan limbah yang ramah lingkungan	Dinas Pertembangan dan Energi									APBD Kokab	Dinas Pertembangan dan Energi
		Mengembangkan seluruh bentuk kegiatan pertambangan dengan skenario hijau	Dinas Pertembangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertembangan dan Energi
		Pemanfaatan kolong sebagai wahana budidaya perikanan dan wisata air	Dinas Pertembangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertembangan dan Energi
f	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri**	Menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindag									APBD Kokab	Dinas Perindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Perindag
		Membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi terbarukan	Dinas Perindag									APBN	Dinas Perindag
		Mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.	Dinas Perindag									APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
g	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata**	Identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBD Kokab	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Berlitung	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBD Kokab	Dinas Budaya dan Pariwisata

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBN/ APBD Prov/APBD Kokab/Masyarakat	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan wisata strategis provinsi	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBD Kokab	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata (*trip*)	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBN/ APBD Prov/APBD Kokab/Masyarakat	Dinas Budaya dan Pariwisata
h	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman**	Penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Penyusunan masterpal perencanaa kota yang ditetapkan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Identifikasi dan perbaikan perumahan yang tidak layak huni	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Peningaktan kualitas	Dinas PU									APBN/ APBD	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		lingkungan permukiman (desa/kota)										Prov/APBD Kokab/Masyarakat	
D	**Perwujudan Kawasan Strategis**												
D1	**Perwujudan Kawasan Tanjung Kalian**	Penyusunan rencana rinci dan rencana teknis kawasan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan masterplan dan businnes plan setiap komponen kegiatan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur pendukung	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan komponen utama seperti PLTU, Stockpile, pelabuhan, terminal, kawasan wisata dan prasarana lainnya.	Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag
D2	**Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu**	Penyusunan masterplan kawasan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penyusunan masterplan pelabuhan Belinyu	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan jalan akses dari Belinyu ke pelabuhan	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan dermaga & terminal	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
D3	**Perwujudan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat**	Penyusunan masterplan kawasan	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penyusunan proposal dan syarat pembangunan kawasan ekonomi khusus	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pengusulan kawasan ekonomi khusus Tanjung Berikat	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Legalisasi kawasan ekonomi khusus tanjung Berikat	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan jalan akses dari Koba – Tanjung Berikat	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan kawasan wisata	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan pelabuhan (dermaga dan terminal)	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembagunan sub kawasan industri (pabrik pengolahan)	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
D4	**Perwujudan KTM Batu Betumpang**	Penyusunan RDTR KTM Batu Betumpang	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur permukiman	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												Kokab	
		Pembangunan sarana sosial budaya	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pengembangan kawasan pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Pengembangan kawasan lindung dan RTH	BLHD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD
D5	**Perwujudan Kawasan Minapolitan Lepar Pongok**	Penyusunan masterplan Minapolitan Lepar Pongok	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Penyiapan kelembagaan pengelola minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pengesahan kawasan minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan sarana penunjang utama kegaitan Minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan infrastruktur pendukung	Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan kawasan	Dinas Kelautan									APBN/APBD	Dinas Kelautan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		industri pengolahan ikan	&Perikanan									Prov/APBD Kokab	&Perikanan
D6	**Perwujudan Kawasan etalase Perikanan Selat Nasik**	Penyusunan masterplan kawasan industri perikanan tangkap dan budidaya	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan kawasan habitat ikan alami dengan mangrove	BLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan tambak ikan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan rumah ikan (pengolahan, budidaya dan hias)	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
D7	**Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga**	Penyusunan masterplan kawasan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		pengembangannya											
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Dinas Perindag/PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag/PU
		Pembangunan jalan akses ke Tanjung Binga (pabrik)	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan dermaga & terminal	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
D8	**Perwujduan Kawasan Kota Terpadu Mandiri**	Penyusunan RDTR KTM Gantung	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur permukiman	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan kampung budaya Laskar Pelangi	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pengembangan kawasan	Dinas Pertanian,									APBN/APBD	Dinas Pertanian,

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		pertanian	Perkebunan dan Peternakan									Prov/APBD Kokab	Perkebunan dan Peternakan
		Pengembangan kawasan lindung dan RTH	BHLD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BHLD
D9	**Perwujduan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)**	Penyusunan masterplan kawasan	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penyiapan lahan	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan jalan askes	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur penunjang	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan sistem pengolahan ikan ekspor	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan dermaga dan terminal (pelabuhan)	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan kawasan wisata	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD	Dinas Budpar

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												Kokab	
		Pembangunan prasarana penunjang lainnya	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
D10	**Perwujduan Pelabuhan ASDP Manggar – Kepang**	Penyusunan masterplan pengembangan ASDP Manggar	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Penyediaan lahan	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan infrastruktur pendukung Perbaikan dan peningkatan kapasitas dermaga dan terminal	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pengadaan kapal penumpang	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Penyediaan sistem air baku dan air minum	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
D11	**Perwujduan Kota Tua Muntok**	Identifikasi dan klasifikasi lokasi dan jenis bangunan *heritage*	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penyusunan proposal pengajuan Kota Tua Muntok	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD	Dinas Budpar

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		sebagai Kawasan Pusaka Nasional, *Asian Herritage* dan diupayakan menjadi *World Heritage*										Kokab	
		Penataan kawasan dan restorasi bangunan	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pengesahan Kota Tua Muntok sebagai kawasan heritage (nasional/dunia)	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penyusunan heritage map dan promosi kawasan	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penyusunan agenda tahunan	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penyelenggaraan atraksi budaya (reguler)	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pengembangan kota Muntok dengan banchmark kota tua	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pelestariaan dan pemeliharaan bangunan/kawasan tua	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
D12	**Perwujudan Kawasan**	Pengembangan kawasan pendidikan	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD	Dinas Pendidikan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Universitas Bangka Belitung (UBB), STAIN, Kota Tua Muntok & Museum Nasional Maritim											Kokab	
		penetapan kawasan sekitar UUB dan STAIN adalah kawasan (aglomerasi) pendidikan	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
		penyusunan masterplan kawasan pendidikan terpadu skala regional, masterplan kawasan Kota Tua Muntok, dan masterplan Museum Nasional Maritim	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
		pembangunan sarana penunjang pendidikan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		pembangunan kawasan wisata pendidikan dan laboratorium alam										APBN/APBD Prov/APBD Kokab	
		pengembangan kerjasama pendidikan dengan universitas luar negeri	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
		pembangunan infrastruktur	Dinas Pendidikan									APBN/APBD	Dinas

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		pendukung kawasan pendidikan terpadu skala regional, kawasan Kota Tua Muntok, dan Museum Nasional Maritim										Prov/APBD Kokab	Pendidikan
D14	**Pengelolaan Cagar Alam Gunung Lalang (Belitung), Gunung Menumbing (Bangka Barat), Hutan Konservasi Gunung Maras (Bangka), Gunung Mangkol (Bangka Tengah), Gunung Permisan (Bangka Selatan), Jering Menduyung (Bangka Barat), Kota Kapur (Bangka), Kawasan Kepulauan Buku Limau (Belitung**	Pemantapan tata batas kawasan Cagar Alam & Hutan Konservasi	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Timur), Taman Kehati (Belitung); dan Karantina Hewan (Pulau Nadu, Kabupaten Belitung)												
		Identifikasi kawasan/areal kritis yang mengalami deforestasi dan kerusakan lingkungan	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Rehabilitasi kawasan melalui reboisasi dan perbaikan tanah	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Perbaikan fasilitas penunjang	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Penguatan perlindungan cagar alam, baik yang bersifat fisik maupun non fisik	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Peningkatan fasilitas karantina hewan											



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB V

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH DAN PAGU INDIKATIF

Bab ini menjabarkan program prioritas tahun 2018 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan periode ketiga pembangunan tahun 2017-2022 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sekaligus memperhatikan visi misi Kepala Daerah terpilih serta arahan tema pembangunan tahun 2018 yaitu "**Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) menuju Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agribahari dan Berdaya Saing**"

Selain hal tersebut, program prioritas dilaksanakan dalam rangka untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan yang sangat cepat mengalami perubahan. Beberapa tantangan dan dinamika pembangunan tersebut teridentifikasi dalam proses dan tahapan perencanaan yang dilakukan. Identifikasi terhadap hal tersebut dapat dilakukan melalui penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD, usulan langsung masyarakat dan stakeholder yang disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik, Musrenbang maupun media informasi lainnya. Selain itu, juga dilakukan pencermatan terhadap usulan secara bottom-up dari kabupaten/kota yang mana proses pengusulannya oleh masyarakat telah dimulai pada saat dilaksanakannya Forum Musrenbang Desa/Kelurahan.

5.1. PENELAAHAN TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan rekomendasi hasil Reses DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rekomendasi hasil reses ini merupakan pokok – pokok pikiran DPRD yang telah diparipurnakan dan menjadi salah satu bahan utama penyusunan RKPD 2018. Penelaahan terhadap rekomendasi hasil reses DPRD dilakukan secara komprehensif oleh seluruh PD baik tingkat Provinsi maupun tingkat wilayah kota/kabupaten untuk dituangkan ke dalam Renja RKPD dan Renja PD Tahun 2018.

Untuk perencanaan pembangunan tahun 2018, beberapa rekomendasi hasil reses DPRD yang sedang dalam proses penelaahan yaitu di antaranya :

Tabel V.1 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
1. KOTA PANGKALPINANG			
	BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH		
1.	Perangkat desa seperti RT, RW agar dapat dinaikkan honornya minimal sama dengan kabupaten lainnya		Diserahkan pada kebijakan Pemerintah Kota
	BIDANG PENDIDIKAN		
2.	Adanya Uang Komite ditingkat SD sd SMA/SMK yang diterapkan oleh Sekolah Negeri cukup memberatkan Orang Tua Murid	Kelurahan Bukit Besar	Akan dilakukan evaluasi terhadap efektivitas alokasi Dana BOS
3.	Kurangnya Perhatian Pemerintah kepada Murid yang berprestasi yang ada disekolah Negeri	Kelurahan Bukit Besar	Sudah ada baesiswa bagi masyarakat miskin dan berprestasi
4.	Agar pihak Pemerintah memikirkan nasib para Guru Honorer yang selama ini gaji guru Honorer dibayar secara sukarela		Harus memperhatikan jenjang pendidikannya untuk disesuaikan dengan kewenangan
5.	Insentif Guru tempat pendidikan Al Qur'an (TPA) dan madrasah dirasakan masih sangat minim,Untuk itu diminta kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menambah insentif para guru TPA tersebut		Sudah diakomodir. Besaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah
6.	Sektor Pendidikan seperti TPA, Pendididkan anak usia Dini (PAUD) dan madrasah kurang diperhatikan		Sudah diakomodir
7.	Mengharapkan kepada pemprov/Pemkot agar lebih memperhatikan Nasib Guru Honorer baik itu kesejahteraannya, statusnya,haknya dan perlakuannya terhadap guru honorer tersebut		Sudah diakomodir
8.	Agar diperjelas fungsi Komite Sekolah dan pungutan uang dari wali murid oleh pihak Komite setiap bulannya untuk apa?		Disesuaikan kewenangannya

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	BIDANG KESEHATAN		
9.	Mohon agar dilakukan sosialisasi dari BPJS mengenai BPJS PBI (Peserta Bantuan Iuran) kepada masyarakat yang katanya gratis dari kelurahan tp kenapa untuk kelanjutannya kartu tersebut tidak bisa di pakai atau belum aktif	Kelurahan Pintu Air	Diserahkan ke Kab/Kota
10.	Mohon kejelasan dari pihak BPJS mengenai BPJS Mandiri yang katanya biaya dokter gratis tapi biaya obat-obatannya bayar(kel. Pintu aer) Diharapkan Badan penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)		Diserahkan ke Kab/Kota
11.	Diharapkan Badan penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) kesehatan melakukan pendataan Ulang kepada warga-warga Kurang Mampu yang belum mempunyai Kartu BPJS	Kelurahan Pintu Air	Diserahkan ke Kab/Kota
12.	Sosialisasi manfaat BPJS PBI masih kurang dan belum dapat dimanfaatkan masyarakat karena belum berlaku sehingga masyarakat harus mendaftar sebagai pengguna BPJS mandiri	Kelurahan Pintu Air, Bukit Besar	Diserahkan ke Kab/Kota
13.	Adanya PAM membantu masyarakat untuk mendapatkan aer bersih tetapi sering kali aeir yang didapat tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perlukan (bukit besar,aer salemba, RRI).	Kelurahan Bukit Besar, Air Salemba, RRI	Kewenangan Kab/Kota
	BIDANG INFRASTRUKTUR		
14.	Kurangya selokan / Bandar di jalan-jalan utama maupun jalan perkampungan menyebabkan banjir yang luas, karenanya warga masyarakat Gandaria, Bukit Baru, Kampung bintang dan Pasir putih mengharapkan Pembangunan Siring dan Selokan serta mencari solusi yang tepat terhadap persoalan banjir ini		Sudah diakomodir
15.	Agar Instansi terkait segera mendata dan memotong pohon-pohon yang sudah tidak kuat disepanjang jalan pitu air karena sudah ada pohon yang tumbang yang merugikan warga masyarakat Pintu Air		Diserahkan ke Kab/Kota

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
16.	Optimalisasi pengerukan sungai/DAS yang ada di Bukit Baru,Bukit Tani, Kampung bintang dan Pasir putih agar segera dikerjakan sehingga dapat meminimalisir saat banjir datang		Sudah diakomodir
17.	Dihimbau kepada pemerintah untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat galian oleh dinas PU kota Pangkal pinang itu menimbulkan debu dan berlumpur pada saat hujan turun serta rawan terjadi kecelakaan		Diserahkan ke Kab/Kota
18.	Jalan arteri maupun jalan-jaln kelurahan yang terkena dampak penggalian harus segera dibenahi seperti semula termasuk akses jalan masuk rumah-rumah warga yang terkena penggalian		Diserahkan ke Kab/Kota
19.	Apabila proyek pipa selesai dipasang mohon agar aspal yang telah hancur segera diperbaiki lagi sehingga jalan mulus kembai		Diserahkan ke Kab/Kota
20.	Agar segera melakukan perbaikan Saluran Irigasi dan Gorong-gorong pasca Banjir	Kelurahan Pasir Putih	Sudah diakomodir
21.	Sungai yang akan dikeruk lebih dalam untuk antisipasi adanya banjir lagi apabila musim hujan nanti	Kelurahan Pasir Garam	Sudah diakomodir
22.	Agar ditindaklanjuti usulan pembangunan WC umum di tempat-tempat keramaian seperti di alun-alun Kota		Diserahkan ke Kota
23.	Meminta kepada Pemerintah agar segera menginventarisir lokasi dan melakukan perbaikan-perbaikan pada Saluran air, Siring dan Gorong-gorong pasca Banjir dapat diminimalisir		Sudah diakomodir
	BIDANG PERTAHANAN		
24.	Masyarakat Girimaya mengharapkan agar Pemerintah membuat Program prona atau Proda setiap tahunnya		Kewenangan nasional
	BIDANG PENDAPATAN		
25.	Pemerintah wajib memperhatikan kenaikan PBB setiap tahunnya dan	Kelurahan Pasir	Kewenangan Kab/Kota

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	Masyarakat pasir putih berkeberatan apabila PBB setiap tahunnya naik	Putih	
	BIDANG KEWIRAUSAHAAN (UMKM) DAN KOPERASI		
26.	Disarankan kepada pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung melalui SKPD terkait agar melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi program pemerintah mengenai bantuan pengembangan usaha kecil masyarakat dan membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha	KelurahanAir itam GG Jagung	Sudah diakomodir
	BIDANG SOSIAL		
27.	Mohon Kepada Pemerintah untuk memonitoring dan Evaluasi terkait Penerima bantuan Rumah layak huni, korban pasca banjir dan puting beliung tidak sesuai dengan data yang disurvey, sehingga masyarakat yang telah didata oleh Instansi terkait banyak yang belum menerima bantuan sesuai dengan keadaan masyarakat yang telah didata	Girmaya, Bukit Tani, Pintu Air dan Bukit Baru	Sudah diakomodir
28.	Proposal bantuan Pembangunan pos kamling dan rehab tempat ibadah seringkali tidak diterima karena kesalahan dan atau kekurangan kelengkapan administrasisehingga pembangunan pos kamling di Gandaria dan Pembangunan mesjid di pintu aer dan bukit baru menjadi terhambat, disarankan kepada pemerintah agar dapat mengeluarkan check list kelengkapan proposal yang baru		Untuk menjadi perhatian
29.	Melihat areal tempat pemakaman/ perkuburan yang sudah sempit, warga Girimaya,pintu aer, Bukit Tani dan Aer Salemba mengharapkan agar Pemerintah dapat memperluas areal pemakaman tersebut		Kewenangan Kab/Kota
30.	Masyarakat memohon kepada pemerintah agar mendata ulang masyarakat yang menerima beras raskin (aer salemba,gg jagung, aer itam)		Sudah diakomodir
31.	Masyarakat memohon kepada pemerintah untuk menangani dan menanggulangi kenakalan Remaja yang ada dilingkungan tersebut	Air Salemba, Bukit Tani, Pasir Putih	Sudah diakomodir

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	BIDANG MINYAK, GAS, LISTRIK DAN AIR		
32.	Ketidak stabilitasan jual gas Elpiji menyebabkan masyarakat menjadi bingung karena kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap harga yang dikeluarkan agen	Bukit Besar, Bukit Baru	Sudah diakomodir
33.	Meminta kepada pemerintah agar memperhatikan kurangnya penerangan/Lampu jalan Provinsi	Pasir Putih	Sudah diakomodir
34.	Mohon diadakan Lampu Jalan untuk Penerangan karena ketakutan masyarakat akan terjadinya perampasan didaerah tersebut	Bukit Baru	Sudah diakomodir
35.	Banyaknya keluahan masyarakat terkait mahalnya harga gas elpiji subsidi 3 kg di toko-toko		Untuk menjadi perhatian
36.	Di mohon kepada Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan turun lapangan untuk melarang pedagang di toko yang menjual gas elpiji		Sudah diakomodir
37.	Mohon untuk menindaklanjuti segera apabila ada yang melakukan penyelewengan terhadap Gas Elpiji 3kg selain digunakan untuk Subsidi Masyarakat		Sudah diakomodir
38.	Akibat kurangnya daya listrik, Sumur Bor yang dibuat oleh pemerintah tidak berjalan , Air PAM juga kotor/keruh		Akan ditindaklanjuti
39.	Mengharapkan agar pemerintah melalui SKPD terkait dapat memonitoring penyaluran Gas elpiji subsidi serta mengantisipasi penyelewengannya agar masyarakat dapat merasakan subsidi gas dari pemerintah		Sudah diakomodir
	BIDANG OLAHRAGA		
40.	Masalah Kenakalan Remaja yang diakibatkan oleh internet atau lain-lain,kami mengusulkan untuk anak-anak tersebut di arahkan untuk kegiatan seperti karang taruna,bola volly dan kegiatan olah raga lainnya		Sudah diakomodir

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	PENGAWASAN PEMERINTAH		
41.	Mohon kepada Pemerintah setidaknya kita memberikan pengetahuan tentang kekerasan anak dan mengajak untuk lebih peduli lingkungan sekitar		Sudah diakomodir
42.	Perlu di bentuknya Kamtibnas dan Penanggulangan bahaya narkoba di Anak-anak agar masyarakat merasa aman dan nyaman		Sudah diakomodir
2. KABUPATEN BANGKA TENGAH			
	BIDANG PEMERINTAH DAERAH		
1.	Masyarakat menginginkan aset provinsi gudang pupuk di hibahkan ke desa Namang	Desa Namang	Perlu dipelajari lebih lanjut
2.	Masyarakat menanyakan program atau bantuan untuk lansia		Sudah diakomodir
3.	Masyarakat mengusulkan bantuan Bumdes untuk KJA sebagai usaha agar menambah PAD Desa		Sudah diakomodir
4.	Ibu-ibu PKK kekurangan sosialisasi terhadap kegiatan PKK		Sudah diakomodir
5.	Masyarakat memohon agar dinas terkait mensosialisasikan tentang badan hukum untuk bidang pertanian, tambang,	Desa Namang	Sudah diakomodir
6.	Masyarakat menginginkan pelatihan kepemudaan langsung di ambil alih oleh desa	Tanjung Gunung	Harus melihat kewenangan dan mekanisme penganggarannya
7.	Perangkat desa Tanjung Gunung mengusulkan BPJS untuk perangkat desa	Tanjung Gunung	Diserahkan ke Kab/Kota
8.	Masyarakat menginginkan adanya asuransi untuk jaminan hari tua bagi nelayan	Batu Belubang	Harus dilakukan penelaahan terhadap peraturan yang ada
9.	Masyarakat meminta agar pembinaan pemuda di desa oleh BLK Disnaker Provinsi di bina dengan sebaik – baiknya agar hasil atau bakat yang dihasilkan maksimal	Terak	Sudah diakomodir
10.	Masyarakat menginginkan bantuan informasi melalui pemerintah daerah mengenai program - program apa saja yang sedang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Provinsi, disebabkan masyarakat ingin ikut serta mensukseskan	Terak	Sudah diakomodir

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	program tersebut baik di bidang pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan dan bidang-bidang lainnya		
	BIDANG PENDIDIKAN		
11.	Masyarakat menanyakan program bantuan pendidikan anak sekolah yang kurang mampu	Desa Namang	Sudah diakomodir
12.	Masyarakat mengeluhkan orang yang menerima KIP (kartu indonesia pintar) tidak dapat semua	Cambai	Sudah diakomodir
13.	Guru memohon memprioritaskan anak di desa untuk KIP (Kartu Indonesia Pintar)	MAN AIAI Sungaiselan	Sudah diakomodir
14.	Guru Mengatakan di sekolah MAN AIAI Sungaiselan masih ada siswa yang belum menerima KIP (Kartu Indonesia Pintar)	MAN AIAI Sungaiselan	Sudah diakomodir
15.	Guru mengharapkan adanya beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.	MAN AIAI Sungaiselan	Sudah diakomodir
16.	Masyarakat agar mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi agar jam sekolah disamakan tidak berbeda-beda lagi	Terak	Sudah ada otonomi sekolah
	BIDANG INFRASTRUKTUR		
17.	Masyarakat meminta siring agar air saat hujan tidak tumpah kejalan utama	Desa Namang	Diperhatikan kewenangannya
18.	Masyarakat memohon agar tiang-tiang listrik belum ada di Rt1, Rt9, dalam gang dan tali PLN belum tersusun rapi	Desa Namang	Koordinasi dengan PLN
19.	Mohon agar jalan menuju ke kebun diperbaiki	Desa Namang	Kewenangan kabupaten
20.	Masyarakat mengeluhkan banyak kabel yang menempel dan membutuhkan tiang listrik di Rt 8	Desa Namang	Koordinasi dengan PLN
21.	Masyarakat meminta perbaikan Mushola di Desa Namang	Desa Namang	Agar mengajukan proposal bantuan
22.	Masyarakat mengeluhkan pada saat musim hujan depan SD mohon di buat saluran air agar tidak tumpah ke rumah warga	Desa Namang	Kewenangan kabupaten

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
23.	Masyarakat memohon mengajukan proposal jalan desa cambai selatan dan perjuangkan jalan tembus desa cambai ke bukit kijang	Cambai	Kewenangan kabupaten
24.	Mengajukan tenaga administrasi belum lengkap mohon bantuan berupa printer, infokus, alat kesenian seperti dambus dan rebana.	Masyarakat IRMAS Cambai	Agar mengajukan proposal bantuan
25.	Masyarakat mengajukan proposal tentang mobil jenazah agar mempermudah masyarakat yang terkena musibah.	Cambai	Agar mengajukan proposal bantuan
26.	Bidan desa meminta bantuan diadakan ambulance desa	Cambai	Agar mengajukan proposal bantuan
27.	Masyarakat mengharapkan dermaga permanen nelayan yang belum terealisasi	Tanjung Gunung	Akan dilakukan pendataan terlebih dahulu
28.	Masyarakat setempat mohon di bangun pasar desa pelelangan ikan dan lahan mereka sudah siap	Tanjung Gunung	Akan dilakukan pendataan terlebih dahulu
29.	Masyarakat nelayan mengusulkan untuk dibuatkan pondok singgah permanen,ada perbatas anantara nelayan dan sektor pariwisata agar tidak terjadi bentrok	Tanjung Gunung	Ditelaah lebih lanjut
30.	Bapak Alimin memohon bantuan conblock masihkurang separuh ditempat pelelangan ikan desa batu belubang.	Batu Belubang	Agar mengajukan proposal bantuan
31.	Masyarakat mengusulkan Tempat Administrasi kantor masih kurang	Batu Belubang	Ditelaah lebih lanjut
32.	Masyarakat mengusulkan Agar penerangan lampu jalan ditambah	Batu Belubang	Ditelaah lebih lanjut
33.	Warga mengajukan akses jalan dari desa teru ke simpang katis kurang lebih 7 km.	Terak	Kewenangan Kab
34.	Pemuda desa teru memohon di ajukan podium lapangan bola	Terak	Agar mengajukan proposal bantuan
35.	Masyarakat mengharapkan agar jalan dari masjid air puyuh di perbaiki sebagai jalan penghubung antara desa Terak dan desa Teru	Terak	Agar mengajukan proposal bantuan
36.	Masyarakat mengajukan permohonan bantuan infrasruktur jalan dari Desa Teru ke Desa Riding yang panjangnya kurang lebih 6 Km	Terak	Kewenangan Kab
37.	Masyarakat mohon bantuan PDAM yang ada di Desa Teru karena tidak ada air di saat musim kemarau	Terak	Kewenangan Kab

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
38.	Pelebaran jalan pada akses jalan menuju air terjun Sadap	perlang	Kewenangan Kab
39	Masalah jalan lingkar desa yang ditimbun tanah puru belum di aspal. Kapan jalan tersebut di aspal panjangnya 1,4 Pal harap ditanggap segera, bila hujan becek dan juga pembuatan shering	Penyak	Kewenangan Kab
40	Normalisasi sering di tengah kampung air tidak mengalir ke laut	Penyak	Kewenangan Kab
41.	Rt I dan 4 jembatan yang tertutup air dan rusak harap dipasang talut sepanjang 1300 meter	Penyak	Sudah diakomodir
42	Berterima kasih dan berharap pembangunan talut di sepanjang desa sampai SMK	Penyak	Sudah diakomodir
43	Mengenai jalan lingkar desa banyak berlubang sebelum parah harap diperbaiki	Penyak	Kewenangan Kab
44	Masyarakat menginginkan adanya Pembuatan / Pemasangan Shering untuk menghidari kecelakaan	Teru	Kewenangan Kab
45	Masyarakat meminta Pemerintah Provinsi memperbaiki SPAM,karena tidak beroperasi akibat intalansi air tidak terpasang ke rumah warga	Teru	Ditelaah lebih lanjut
46	Masyarakat menginginkan adaya Penyambungan kembali listrik dan SPAM yang sudah terputus	Teru	Ditelaah lebih lanjut
	BIDANG PERTANIAN,PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN		
47.	Koprasi wanita mengajukan modal usaha perkebunan untuk kerajinan	Desa Namang	Agar mengajukan proposal bantuan
48.	Masyarakat ingin mengajukan agar DPRD mempertahankan harga lada jangan sampai anjlok supaya selalu stabil dan tidak turun	Cambai	Sudah diakomodir
49.	Masyarakat memohon agar sektor ekonomi mikro di tingkatkan seperti lada, sawit dan karet	Terak	Sudah diakomodir
50	Masyarakat Mengharapkan masalah harga lada, karet dan karet di perjuang kan untuk Gubernur yang terpilih nanti		Sudah diakomodir

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
51.	Masyarakat Menginginkan adanya solusi cara mengatasi hadirnya lada palsu dari luar Daerah sehingga tidak dapat masuk ke pulau	Terak	Sudah diakomodir
	BIDANG PERDAGANGAN		
52.	Masyarakat mengusulkan agar pemasaran pengrajinan ekaminiatur ketilon meminta bantuan promosi agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional	Namang	Agar mengajukan proposal bantuan
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
53.	Masyarakat meminta budidayaikan air tawar dengan lahan yang bekas tambang		Agar mengajukan proposal bantuan
54.	IRMAS juga mengajukan bibit ikan tawar agar kegiatan tambahan bagi IRMAS	Cambai	Agar mengajukan proposal bantuan
55.	Masyarakat mengusulkan Dinas kelautan dan perikanan fasilitas masih kurang	Batu Belubang	Agar mengajukan proposal bantuan
56.	Masyarakat meminta agar di buat batas tempat penangkapan ikan antara wilayah penagkapan nelayan Pangkalpinang dan wilayah penangkapan nelayan Kabupaten	Batu Belubang	Diseuaikan kewenangannya
57.	Masyarakat memohon agar di buatkan tenda tambahan untuk pelelangan ikan karena jika hujan masih basah	Batu Belubang	Agar mengajukan proposal bantuan
58.	Masyarakat memohon pembangunan jembatan dermaga harus di tambah dan mohon tv monitor untuk mengetahui cuaca	Batu Belubang	Agar mengajukan proposal bantuan
59.	Masyarakat meminta masalah tambak ikan	Perlang	Agar mengajukan proposal bantuan
	BIDANG PARIWISATA		
60.	Meminta Pengembangan Pariwisata di daerah Sadap	Perlang	Ditelaah lebih lanjut

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
61.	Masalah alih fungsi kawasan hutan di daerah Sadap	Perlang	Ditelaah lebih lanjut
3. KABUPATEN BANGKA SELATAN			
	PENDIDIKAN (URUSAN WAJIB DAN PELAYANAN DASAR)		
1.	Camat Payung mengharapkan untuk SMK Negeri 1 Payung agar menjadi perhatian khusus karena ada pengelolaan khusus	SMK N 1 Payung	Sudah diakomodir
2.	Masyarakat Desa Batu Betumpang Kecamatan Simpang Rimba mengusulkan agar diadakan pembangunan gedung SMP	Batu Btumpang	Kewenangan Kabupaten
3.	Masyarakat Desa Batu Betumpang Kecamatan Simpang Rimba mengusulkan agar di dirikan Perguruan Tinggi	Batu Btumpang	Kewenangan Nasional
4.	Kepala SMA N.1 Payung mengusulkan untuk SMA N.1 Payung ditambah 2 ruang kelas baru	SMK N 1 Payung	Ditelaah lebih lanjut
5.	Kepala Upt. Dikcam Payung mengharapkan agar pembangunan gedung-gedung TK dan SD khususnya di Payung segera didirikan karena proposalnya sudah masuk ke Provinsi tetapi realisasinya belum ada	UPT Dikcam Payung	Ditelaah lebih lanjut
6.	Kepala Upt. Dikcam Payung mengusulkan agar tidak hanya guru kelas saja yang menerima uang insentif tetapi guru honor olah raga dan agama juga harus mendapatkan uang insentif	UPT Dikcam Payung	Ditelaah lebih lanjut
7.	Kepala Upt.IV mengusulkan agar didirikannya pagar untuk SMP demi keamanan anak-anak		Kewenangan Kabupaten
8.	Masyarakat kelurahan teladan kecamatan toboali terkait masalah guru SMA honor yang sudah diambil alih oleh Provinsi hendaknya jangan sampai timbul masalah terutama kesejahteraan para guru honor	Toboali	Ditelaah lebih lanjut
9.	Masyarakat kelurahan teladan kecamatan toboali Bantuan untuk guru-guru TPA (Honor) mohon diusulkan jangan sampai ditiadakan	Toboali	Ditelaah lebih lanjut
10.	Masyarakat kelurahan teladan kecamatan toboali mohon Bantuan beasiswa untuk mahasiswa, mohon diinformasikan secara transparan	Toboali	Sudah diakomodir

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	KESEHATAN		
11.	Masyarakat Desa Batu Betumpang Kecamatan Simpang Rimba agar peningkatan kesehatan di Puskesmas	Batu Betumpang	Sudah diakomodir
12.	Terkait Dana Hibah camat Payung mohon dukungan dari Provinsi khususnya RSU	Payung	Ditelaah lebih lanjut
13.	Masyarakat kelurahan teladan kecamatan toboali terkait RSUD Bangka Selatan agar pelayanannya tolong ditingkatkan	Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali	Kewenangan Kabupaten
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
14.	Mohon peningkatan aspal di jalan ketapen di ketapol	Ketapol	Kewenangan Kabupaten
15.	Masyarakat desa Permis Kecamatan Simpang Rimba menanyakan Kenapa jalan produksi setelah disurvey ternyata dananya dipangkas?	Desa Permis Simpang Rimba	Kewenangan Kabupaten
16.	Masyarakat Desa Batu Betumpang Kecamatan Simpang Rimba mengeluhkan jalan jembatan lintas sungai ulin-ulih hampir roboh	Desa Batu Betumpang Simpang Rimba	Sudah diakomodir
17.	Masyarakat Desa Batu Betumpang Kecamatan Simpang Rimba mengharapkan jalan tembus batu betumpang ke permis	Desa Batu Betumpang Simpang Rimba	Sudah diakomodir
18.	Masyarakat Desa Batu Betumpang Kecamatan Simpang Rimba mengarapkan agar didirikan SPBU untuk memancing keramaian di desa batu betumpang	Desa Batu Betumpang Simpang Rimba	Ditelaah lebih lanjut
19.	Masyarakat Kecamatan Payung mengharapkan ada perlebaran jalan khususnya di payung sampai dengan air gegas	Kecamatan Payung	Kewenangan Kabupaten
20.	Masyarakat Kecamatan Payung mengusulkan agar satam mas dianggarkan lagi di tahun 2017	Kecamatan Payung	Sudah diakomodir
21.	Camat Pulau Besar minta bantuan agar ada pelebaran jalan nasional dari air	Kecamatan Pulau	Ditelaah lebih lanjut

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	gegas ke pulau besar	Besar	
22.	Masyarakat kecamatan tukak sadai memohon untuk dikembangkan kawasan industri khususnya di sadai dan sekitarnya	Kecamatan Tukak Sadai	Ditelaah lebih lanjut
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
23.	Terkait masalah rumah layak huni Masyarakat Desa Batu Betumpang Kecamatan Simpang Rimba mengusulkan anggaran untuk tahun 2017 itu agar diganti dengan program transmigran warga yang belum punya rumah	Desa Batu Betumpang	Ditelaah lebih lanjut
24.	Masyarakat Desa Bencah kecamatan Air Gegas mengusulkan masih memerlukan Dana Satam Emas ditahun 2017. Selama ini tidak dikerjakan dengan alasan belum ada pendanaan dan jumlah serta juknis	Desa Bencah	Sudah diakomodir
25.	Tahun 2016 akhir mulai dilaksanakan disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan kecuali Kecamatan Toboali		Sudah diakomodir
26.	Dikerjakan ditiap Kecamatan, 14 titik rumah layak huni dengan Anggaran pertitik ± Rp.40.000.000,-		Sudah diakomodir
27.	Penyelesaian perbatasan Desa dengan Desa, Kecamatan dengan Kecamatan, khususnya perbatasan Kecamatan Air Gegas dengan Bangka Tengah	Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Kewenangan Kabupaten
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
28.	Masyarakat Kecamatan Simpang Rimba menanyakan masalah dana desa yang saat ini belum cair sedangkan persyaratannya sudah selesai?	Simpang Rimba	Kewenangan Kabupaten
29.	Ibu PKK dari desa permis kecamatan simpang rimba mengusulkan untuk diklat keluar daerah	Desa Permis	Kewenangan Kabupaten
30.	Masyarakat desa permis kecamatan simpang rimba menanyakan tentang sistem aplikasi sedangkan untuk sistem ini menggunakan dana operasional dan untuk mengajukan ke kabupaten itu perlu biaya	Desa Permis	Kewenangan Kabupaten
31.	Masyarakat desa permis kecamatan simpang rimba masalah jaringan dan	Desa Permis	Kewenangan Kabupaten

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	sumber daya belum begitu bagus perlu adanya bimbingan atau diklat		
32.	Masyarakat Kecamatan Payung mengusulkan agar diadakan samsat keliling untuk memudahkan atau meringankan masyarakat payung untuk membayar pajak motor dan lain sebagainya	Kecamatan Payung	Sudah diakomodir
33.	Terkait masalah KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sejahtera) Masyarakat Kecamatan Payung sasarannya kurang tepat atau mapan karena datanya diambil dari data tahun 2010 kesalahan didata banyak sehingga banyak sekali data-data yang mubazir karena kurang akurat, untuk itu agar masalah ini untuk ditindaklanjuti	Kecamatan Payung	Sudah diakomodir
34.	Masyarakat Kecamatan Simpang Rimba menanyakan apa kendala terkait masalah dana desa yang belum cair padahal persyaratannya sudah selesai	Kecamatan Simpang Rimba	Kewenangan Kabupaten
35.	dalam pertemuan di kantor camat terungkap bahwa satam emas tidak dilaksanakan di kecamatan toboali. Karena terlambatnya data dari dua desa	Toboali	Ditelaah lebih lanjut
36.	camat toboali mengatakan untuk program satam emas akan dilaksanakan di tahun berikutnya	Toboali	Sudah diakomodir
37.	camat toboali mempertanyakan pembangunan Aula Kecamatan, apakah bisa dilaksanakan dengan dana APBN melalui Bapenas	Toboali	Ditelaah lebih lanjut
38.	masyarakat kelurahan toboali kecamatan toboali mempertanyakan tentang bantuan dana hibah masjid mengenai persyaratan yayasan	Toboali	Ditelaah lebih lanjut
	PERHUBUNGAN		
39.	Masyarakat kelurahan toboali kecamatan toboali menanyakan tentang pengembangan pelabuhan sadai supaya dibantu dengan dana APBD Provinsi	Toboali	Ditelaah lebih lanjut
40.	Masyarakat kecamatan tukak sadai mengusulkan untuk pemeliharaan jalan nasional sadai dilaksanakan setiap tahun jangan sampai rusak berat	Kecamatan Tukak Sadai	Kewenangan Nasional

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
41.	Masyarakat kecamatan payung mengusulkan agar didirikannya gedung sport center	Kecamatan Payung	Ditelaah lebih lanjut
	KELAUTAN DAN PERIKANAN (URUSAN PILIHAN)		
42.	Masyarakat Desa Batu Betumpang Kecamatan Simpang Rimba minta solusi bagaimana jalan keluar terkait masalah nelayan dari luar daerah yang sering masuk ke wilayah desa batu betumpang	Kecamatan Simpang Rimba	Ditelaah lebih lanjut
43.	Masyarakat Desa Batu Betumpang Kecamatan Simpang Rimba minta tolong dibuatkan Peraturan dan UU surat izin agar nelayan dari luar tidak semena-mena masuk ke wilayah nelayan desa batu betumpang	Desa Batu Betumpang	Ditelaah lebih lanjut
44.	Masyarakat desa Permis Kecmatan Simpang Rimba mengusulkan untuk dermaga nelayan di desa Rajik	Desa Permis	Ditelaah lebih lanjut
45.	Masyarakat tukak sadai mengusulkan agar memindahkan sebagian kegiatan bongkar muat pelabuhan Pangkalbalam ke pelabuhan Sadai dan termasuk kapal penumpang Bangka – Belitung – Jakarta	Tukak Sadai	Ditelaah lebih lanjut
46.	Masyarakat kelurahan teladan kecamatan toboali terkait Kapal isap diperairan wisata dan nelayan Toboali jangan diizinkan apalagi TI apung yang ilegal, mohon pihak berwenang selalu konsisten untuk menertibkannya	Kecamatan Toboali	Ditelaah lebih lanjut
47.	Masyarakat kelurahan teladan kecamatan toboali mengusulkan Bantuan alat tangkap nelayan ditingkatkan (pukat, kapal, dll)	Kecamatan Toboali	Sudah diakomodir
	PARIWISATA		
48.	Masyarakat Desa Batu Betumpang Kecamatan Simpang Rimba mengharapkan pariwisata cagar budaya	Desa Batu Betumpang	Ditelaah lebih lanjut
49.	Masyarakat kecamatan tukak sadai mengusulkan untuk dikembangkan objek wisata Tanjung Kerasak Desa Pasir Putih Kec. Tukak Sadai dan	Kecamatan Tukak Sadai	Ditelaah lebih lanjut

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	sekitarnya termasuk Lepar Pongok wisata Nasional melalui APBD Provinsi		
	PERTANIAN		
50.	Masyarakat Desa Batu Betumpang mengharapkan untuk peningkatan sawah di Batu Betumpang	Desa Batu Betumpang	Sudah diakomodir
51.	Masyarakat Desa Batu Betumpang Kecamatan Simpang Rimba mengharapkan perkembangan kebun lada	Desa Batu Betumpang	Ditelaah lebih lanjut
52.	Masyarakat Desa Batu Betumpang Kecamatan Simpang Rimba mengeluhkan kurangnya penghasilan dibidang lada	Desa Batu Betumpang	Ditelaah lebih lanjut
53.	Masyarakat Desa Batu Betumpang Kecamatan Simpang Rimba mengharapkan agar program persawahan yang sudah ada bisa di optimalkan dulu jadi hasilnya memuaskan	Desa Batu Betumpang	Sudah diakomodir
54.	Masyarakat kelurahan toboali kecamatan toboali menanyakan tentang bantuan dana bibit lada dan jahe	Kelurahan Toboali	Sudah diakomodir
55.	Masyarakat Desa Bencah kecamatan Air Gegas mengusulkan mohon agar harga lada jangan turun dibawah Rp.100.000,-/Kg, diharap Pemerintah Provinsi mengawasi	Desa Bencah	Ditelaah lebih lanjut
56.	Masyarakat Desa Bencah kecamatan Air Gegas Mohon dinaikan Harga Karet	Desa Bencah	Ditelaah lebih lanjut
57.	Masyarakat Desa Bencah kecamatan Air Gegas mengusulkan mohon bantuan bibit lada unggul kepada petani lada	Desa Bencah	Agar mengajukan proposal bantuan
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
58.	Masyarakat kelurahan teladan kecamatan toboali mengusulkan agar tarif PLN jangan sampai naik	Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali	Koordinasi dengan PLN
4. KABUPATEN BANGKA BARAT			
	PENDIDIKAN		

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
1.	Masyarakat Desa Air Limau Kecamatan Muntok mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk pendidikan walaupun tidak bayar, namun untuk membeli buku sulitnya mendapatkan biaya	Desa Air Liamu Kecamatan Muntok	Diarahkan agar pemanfaatan BOS dapat dialkukan secara efektif salah satunya untuk membeli buku sekolah
2.	Lamanya pencairan dana Operasional Sekolah sepeti SMA Mariayu Kelapa Kecamatan Kelapa	SMA Mariayu Kelapa	Ditelaah lebih lanjut
3.	Mengapa bantuan biaya operasional SMA Negeri lebih besar dari SMA swasta		Ditelaah lebih lanjut
4.	Mengharapkan agar bantuan biaya operasional persiswa Kecamatan Kelapa lebih ditingkatkan	Kecamatan Kelapa	Ditelaah lebih lanjut
5.	Mengharapkan bantuan Pemerintah Provinsi agar dapat menyalurkan anggaran untuk meja kursi belajar di SD Negeri 8 Desa Pebuar Kecamatan Jebus sebanyak 36 Set	SDN 8 Desa Pebuar Kecamatan Jebus	Agar mengajukan proposal bantuan
6.	Gedung plafon SD Negeri 8 Desa Pebuar Kecamatan Jebus sudah roboh	SDN 8 Desa Pebuar Kecamatan Jebus	Agar mengajukan proposal bantuan
7.	Dana bantuan anak SD Negeri 8 Desa Pebuar Kecamatan Jebus agar dapat dicairkan paling lambat bulan juni	SDN 8 Desa Pebuar Kecamatan Jebus	Agar mengajukan proposal bantuan
8.	Untuk insentif Desa Pebuar Kecamatan Jebus bantuan provinsi agar disesuaikan dengan job masing-masing	Desa Pebuar Kecamatan Jebus	Ditelaah lebih lanjut
9.	Agar disediakan tenaga kerja PNS untuk bagian Tata Usaha pada SD Negeri 8 Desa Pebuar kecamatan Jebus	SDN 8 Desa Pebuar Kecamatan Jebus	Kewenangan Kabupaten
10.	Mengusulkan Tenaga honorer pada SD Negeri 8 Desa Pebuar Kecamatan Jebus agar segera di angkat menjadi PNS	SDN 8 Desa Pebuar Kecamatan Jebus	Kewenangan Kabupaten
11.	Insentif guru PAUD Desa Pebuar Kecamatan Jebus agar ditingkatkan	PAUD Desa Pebuar Kecamatan Jebus	Ditelaah lebih lanjut
12.	Terlalu banyak beban pendidikan yang dibebankan kepada murid membuat biaya membengkak, seperti murid diwajibkan untuk membeli buku les, banyak pernak pernik lainnya, sehingga masyarakat berharap sekolah betul-		Ditelaah lebih lanjut

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	betul gratis		
13.	Masyarakat Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang meminta perhatian khusus terhadap murid – murid berupa beasiswa bagi yang tidak mampu untuk divalidasi datanya dan dibantu secara maksimal	Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang	Ditelaah lebih lanjut
14.	Masyarakat Desa Tempilang meminta bantuan beasiswa bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu yang berprestasi saja namun dilihat dari sisi kemampuan dan prestasi anak tersebut walaupun dalam keadaan ekonomi berada dan mohon dibantu juga	Desa Tempilang	Sudah diakomodir
15.	Masyarakat Desa Ketap meminta agar pendistribusian kartu Indonesia Pintar secara merata sesuai dengan validasi data terbaru setiap tahunnya	Desa Ketap	Sudah diakomodir
16.	Masyarakat Desa Ketap meminta agar nasib dan insentif guru honorer lebih disejahterakan dengan gaji yang menyesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini	Desa Ketap	Ditelaah lebih lanjut
17.	Masyarakat Desa Berang meminta agar sisi pendidikan di Desa Berang jangan dianak tirikan dan diperhatikan serta memperoleh bantuan buku – buku penunjang dan tidak dibebankan biaya yang cukup berat kepada masyarakat	Desa Berang	Ditelaah lebih lanjut
	KESEHATAN		
18.	Kurang lengkapnya peralatan kesehatan untuk lansia seperti alat cek darah, cek kolesterol, alat tensi, timbangan di Desa Air Limau Kecamatan Muntok	Desa Air Limau Kecamatan Muntok	Kewenangan Kabupaten
19.	Seluruh masyarakat Kecamatan Kelapa meminta kepada Pemerintah untuk memperjuangkan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Kelapa	Kecamatan Kelapa	Agar dibiatkan rancananya dari Kabupaten
20.	Masyarakat Desa Sangku Kecamatan Tempilang mengharapkan bantuan renovasi puskedes karena sudah bocor	Desa Sangku Kecamatan Tempilang	Agar mengajukan proposal bantuan

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
21.	Agar memperhatikan kesejahteraan kader posyandu Masyarakat Desa Tebing kecamatan Kelapa	Desa Tebing kecamatan Kelapa	Ditelaah lebih lanjut
22.	Masyarakat Desa Tebing kecamatan kelapa mengharapkan adanya bantuan alat USG agar disediakan di tiap-tiap desa	Desa Tebing kecamatan Kelapa	Ditelaah lebih lanjut
23.	Mengapa insentif Kader Posyandu Desa Pebuar Kecamatan Jebus dihapuskan bukannya di tingkatkan	Desa Pebuar Kecamatan Jebus	Kewenangan Kabupaten
24.	Kurangnya sarana sanitasi /WC untuk Sekolah Dasar yang ada di Desa Air Limau Kec. Muntok	Desa Air Limau Kecamatan Muntok	Kewenangan Kabupaten
25.	Desa Cupat Kecamatan Jebus menginginkan tetap menggunakan Jamkesda karena prosedurnya dianggap mudah dan tidak bertele – tele dalam pelaksanaan administrasi	Desa Cupat Kecamatan Jebus	Ditelaah lebih lanjut
26	Masyarakat Desa Cupat mengeluh penggunaan BPJS karena banyak biaya yang dibebankan di luar tangggungan BPJS tersebut	Desa Cupat Kecamatan Jebus	Ditelaah lebih lanjut
27.	Masyarakat Desa Air Buyan Kelumbi meminta agar orang tua serta pemerintah ikut berperan serta untuk memberantas miras serta obat – obatan terlarang yang masuk ke Desa Air Buyan Kelumbi agar tidak merusak generasi penerus yang akan datang	Desa Air Buyan Kelumbi	Kewenangan Kabupaten
28.	Masyarakat Desa Berang meminta kepada pemerintah agar lebih teliti lagi dalam validasi data untuk kartu kesehatan dan validasi data yang terupdate karena kondisi di masyarakat bahwa ada masyarakat yang mendapatkan beberapa kartu kesehatan baik dari kartu kesehatan dari tempat kerja, Jamkesa dan BPJS, sedangkan masyarakat yang tidak mampu dan tidak terdata bahkan tidak memiliki kartu kesehatan	Desa Berang	Ditelaah lebih lanjut
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
29.	Masyarakat Desa Air Limau Kecamatan kelapa mengharapkan jalan perkuburan – Jalan Lingkar Desa untuk dianggarkan pada tahun 2017 atau	Desa Air Limau Kecamatan kelapa	Kewenangan Kabupaten

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	di ABT Tahun 2017		
30.	Masyarakat Desa Air Limau mempertanyakan masalah Jalan tembus ke Pantai air emas, terkait dengan izin pinjam pakai di hutan produksi (HP) agar difasilitasi sehingga bisa digunakan untuk jalan tersebut	Desa Air Limau Kecamatan kelapa	Kewenangan Kabupaten
31.	Tidak adanya bantuan dana dari Pemerintah Daerah terkait dengan Pembangunan Masjid di Desa Air Limau Kecamatan Kelapa, dana 90% sumbangan dari masyarakat desa	Desa Air Limau Kecamatan kelapa	Agar mengajukan proposal bantuan
32.	Untuk dianggarkan Pembangunan Jalan Dermaga Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Kelapa yang belum diaspal	Dermaga Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Kelapa	Ditelaah lebih lanjut
33.	Masyarakat Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Kelapa meminta untuk disediakan hand tractor, mini tracktor untuk penunjang sawah	Dermaga Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Kelapa	Ditelaah lebih lanjut
34.	Masyarakat Desa Sangku Kecamatan Tempilang mengharapkan bantuan dari pemerintah terkait pembangunan masjid Baiturrohman	Desa Sangku Kecamatan Tempilang	Agar mengajukan proposal bantuan
35.	Masyarakat Desa Tebing Kecamatan Kelapa mengharapkan bantuan pembangunan masjid	Desa Tebing Kecamatan Kelapa	Agar mengajukan proposal bantuan
36.	Masyarakat Desa Pebuar Kecamatan Jebus mengharapkan bantuan peningkatan jalan tembus tb 6 – Pebuar yang merupakan akses masyarakat desa pebuar untuk keluar kecamatan Parit Tiga Wilayah Administratif Desa Mislak dan Desa Sungai Buluh	Desa Pebuar Kecamatan Jebus	Kewenangan Kabupaten
37.	Masyarakat Desa Pebuar Kecamatan Jebus mengharapkan bantuan, agar jalan Nelayan yang merupakan jalan utama se-kecamatan Jebus agar segera dianggarkan karena sudah berulang kali diusul namun tidak pernah	Desa Pebuar Kecamatan Jebus	Kewenangan Kabupaten

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	terwujud		
38.	Penyelesaian pinjam pakai hutan agar bisa di bangun jalan menuju kelaut pangkal balok		Kewenangan Kabupaten
39.	Masyarakat Desa Air Buyan Desa Kelumbi meminta agar pemerintah segera memberikan bantuan pendirian pagar bagi Sekolah Dasar Negeri 13 Desa Air Buyan Karena kondisi sekolah tersebut sangat dekat dengan jalan raya Desa Air Buyan Kelumbi dan murid – murid Sekolah Dasar rawan kecelakaan	Desa Air Buyan Desa Kelumbi	Kewenangan Kabupaten
40.	Masyarakat Desa Cupat Jebus meminta pemerintah untuk bersama – sama membantu mereka untuk mengkonfirmasi izin perpanjangan lahan yang diduduki oleh PT. Timah Tbk dan bila telah berakhir masa kontraknya masyarakat meminta untuk mengelola dan memanfaatkan lahan Hutan Produksi tersebut	Desa Cupat Jebus	Koordinasi dengan PT Timah
41.	Masyarakat Desa Tempilang mengeluhkan sikap pemerintah daerah yang lamban terhadap keberadaan Air Pam yang sudah lama dijanjikan ke rumah – rumah warga, peralatan pipa dan peralatan lainnya sudah ada, namun hingga sekarang operasional dari PAM tersebut tidak kunjung menjangkau ke rumah – rumah warga Desa Cupat	Desa Tempilang	Kewenangan Kabupaten
42.	Masyarakat Desa Cupat Kecamatan Jebus mengeluhkan status lahan pemukiman yang berada di kawasan hutan tanaman industri dan tidak bisa dibuatkan sertifikat kepemilikan hak milik tempat tinggal	Desa Cupat	Kewenangan Kabupaten
43.	Masyarakat Desa Ketap juga mengeluhkan hal yang sama dengan status Desa mereka yang berada di kawasan hutan produksi dan tidak bisa dibuat status kepemilikan sah atas keberadaan rumah dan kebun mereka	Desa Ketap	Ditelaah lebih lanjut
	KEHUTANAN		
44.	Masyarakat Desa Air Limau Kecamatan kelapa merasa resah terkait adanya	Desa Air Limau	Ditelaah lebih lanjut

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	rencana pembukaan Hutan Tanam Industri (HTI) karena akan mempersempit peluang masyarakat untuk mendapatkan lahan pertanian	Kecamatan Kelapa	
45.	Masyarakat Desa Tebing kecamatan kelapa menolak adanya pembukaan Hutan Tanam Industri (HTI)	Desa Tebing Kecamatan Kelapa	Ditelaah lebih lanjut
46.	Masyarakat Desa Pebuar Kecamatan Jebus menolak keberadaan Hutan Tanam Industri (HTI)	Desa Pebuar Kecamatan Jebus	Ditelaah lebih lanjut
47.	Masyarakat Desa Berang meminta agar izin keberadaan PT. Sinar Mas untuk tidak diperpanjang lagi karena tidak memberikan kontribusi bagi Desa Berang dan tidak melaksanakan CSR kepada masyarakat Desa Berang sesuai dengan yang dijanjikan	Desa Berang	Ditelaah lebih lanjut
48.	Masyarakat Desa Berang mendukung keberadaan PT. TAB yang membantu perekonomian Desa Berang dengan membantu mempekerjakan masyarakat Desa Berang serta telah melaksanakan CSR bagi masyarakat dan telah memberikan kontribusi lewat plasmanya	Desa Berang	Sudah diakomodir
49.	Masyarakat Desa Berang mengeluhkan kecilnya upah yang dibayarkan oleh PT. Sinar Mas dan dibawah standar minimum	Desa Berang	Kewenangan Kabupaten
	PERTANIAN		
50.	Masyarakat Desa Tebing Kecamatan Kelapa mengeluhkan rendahnya harga karet	Desa Tebing Kecamatan Kelapa	Ditelaah lebih lanjut
51.	Masyarakat Desa Tebing Kecamatan Kelapa mengeluhkan rendahnya harga sawit	Desa Tebing Kecamatan Kelapa	Ditelaah lebih lanjut
52.	Masyarakat Desa Air Buyan Kelumbi, Desa Berang, Desa Ketap dan Desa Cupat Jebus mengeluhkan rendahnya harga karet dan sawit yang menjadi sektor pendapatan utama mereka pasca timah	Desa Air Buyan Kelumbi, Desa Berang, Desa Ketap dan Desa Cupat Jebus	Ditelaah lebih lanjut

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
53.	Masyarakat Desa Tempilang belum familiar terhadap prosedur Surat Keterangan Terdaftar yang didaftarkan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Barat dan sangat bermanfaat bagi kelompok tani guna menunjang aktifitas kelompok tani yang berkualitas	Desa Tempilang	Ditelaah lebih lanjut
54.	Para Kelompok Tani Desa Air Buyan Kelumbi meminta bantuan bibit ternak sapi dan kambing mengingat pakan rumput sudah memadai di Desa tersebut	Desa Air Buyan Kelumbi	Agar mengajukan proposal bantuan
	SOSIAL		
55.	Belum adanya bantuan untuk kepemudaan karang taruna Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Kelapa	Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Kelapa	Agar mengajukan proposal bantuan
56.	Seluruh masyarakat Desa berharap agar pemerintah dapat segera menyelesaikan persoalan terkait SKT (Surat keterangan Terdaftar)		Kewenangan Kabupaten
57.	Masyarakat Desa Air Buyan Kelumbi meminta agar pemerintah membuat suatu operasinal berkala dengan bantuan kepolisian dan kamtibmas agar turun mengadakan razia miras yang marak di Desa Air Buyan	Desa Air Buyan Kelumbi	Kewenangan Kabupaten
58.	Masyarakat Desa Air Buyan Kelumbi meminta bantuan pemerintah untuk mengadakan sosialisasi membantu keberadaan organisasi pemuda di Desa Air Buyan untuk lebih menekankan pada pembenahan moral pemuda	Desa Air Buyan Kelumbi	Sudah diakomodir
59.	Masyarakat Desa Ketap meminta agar pemerintah memberikan bantuan untuk pembinaan keagamaan serta kegiatan sosial kepada masyarakat Desa Ketap	Desa Ketap	Agar mengajukan proposal bantuan
	TENAGA KERJA		
60.	Masyarakat Desa Air Limau Kecamatan Kelapa mengharapkan agar mengutamakan tenaga kerja dari dalam terutama untuk kesehatan	Desa Air Limau Kecamatan Kelapa	Ditelaah lebih lanjut
61.	Masyarakat Desa Berang meminta pemerintah untuk memprioritaskan	Desa Berang	Ditelaah lebih lanjut

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	tenaga kerja dari PT. Sinar Mas dan PT. Tab karena keberadaan PT. Tersebut di Desa Berang		
	KELAUTAN		
62.	Masyarakat Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Muntok mengharapkan bantuan dari Pemerintah untuk dapat memberikan bantuan peralatan alat tangkap ikan dan tambak ikan	Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Muntok	Agar mengajukan proposal bantuan
63.	Masyarakat Desa Cupat Kecamatan Jebus meminta agar nasib kelompok nelayan lebih diperhatikan dan dibantu peralatan yang memadai	Desa Cupat Kecamatan Jebus	Agar mengajukan proposal bantuan
	PANGAN		
64.	Kehidupan Masyarakat Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Kelapa yang kurang mampu perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga ada mata pencaharian seperti Pertambangan, pertanian, kelautan/ tambak udang	Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Kelapa	Ditelaah lebih lanjut
65.	Kehidupan Masyarakat Berang Kecamatan Simpang Teritip sangat memprihatinkan saat ini dan perlu didukung dari segala sektor khususnya	Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip	Ditelaah lebih lanjut
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
66.	Sulitnya mendapatkan sinyal HP di Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Kelapa sehingga sulit berkomunikasi dan mendapatkan informasi	Desa Dendang Kecamatan Kelapa	Ditelaah lebih lanjut
67.	Potongan Pajak PPh golongan 3 sebesar 5 % lebih besar daripada pajak pph golongan IV sebesar 15%		Ditelaah lebih lanjut
68.	Desa Pebuar Kecamatan Jebus mengharapkan bantuan agar pengelolaan Keuangan Provinsi agar bersifat umum yang penggunaannya ditentukan sebesar 30/70% sesuai dengan pasal 10 ayat 2 Permendagri 113 tentang	Desa Pebuar Kecamatan Jebus	Ditelaah lebih lanjut

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	Pengelolaan Keuangan Desa		
69.	Masyarakat Desa Berang berharap agar pemerintah lebih proaktif dalam menyampaikan informasi terupdate kepada masyarakat dan tidak tertinggal informasi dari bantuan – bantuan yang sifatnya menyentuh masyarakat dari segala sektor	Desa Berang	Sudah diakomodir
	PARIWISATA		
70.	Untuk dari segi Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Berharap untuk Frozen Teluk Rubiah ditata Kembali biar lebih indah dan dihidupkan lagi	Bangka Barat	Ditelaah lebih lanjut
71.	Untuk dari segi Pariwisata Masyarakat Desa Air Lintang Berharap untuk kegiatan seperti Perang Ketupat dan Pesta Adat lainya agar dapat didukung dan dapat dianggarakan dananya	Desa Air Lintang	Sudah diakomodir
72.	Untuk dari segi Pariwisata Masyarakat Berharap lebih diperhatikan dan dikembang sehingga pariwisata yang ada dibangka barat dapat lebih maju		Sudah diakomodir
	PEMBANGUNAN		
73.	Untuk Dari Segi Pembangunan mencakup Pertambangan dan Energi, Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Berharap di Kabupaten Bangka Barat dapat didirikan PLTS Karena daerah Kabuapten Bangka Barat masih kekurangan tenaga listrik, dengan didirikan PLTS maka adanya PLTS berdampak terhadap sektor lainnya terutama sektor perekonomian sehingga dapat menarik pengusaha nasional untuk mendirikan usaha di Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat	Ditelaah lebih lanjut
74.	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Juga Berharap Untuk di buat Jembatan dari Kacung, Belit sampai Kayu Arang	Kacung, Belit sampai Kayu Arang Bangka Barat	Kewenangan Kabupaten

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
75.	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga berharap untuk Ases Jalan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menuju Deltim dapat segera dibuat Agar dapat mempermudah Kesana	Bangka Barat	Kewenangan Kabupaten
76.	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Juga berharap untuk dibuat Pemecah gelombang atau dikenal sebagai juga sebagai *Pemecah ombak* atau *breakwater* di Desa Batu Rakit dan Simpang Tritip yang mana berfungsi untuk memecahkan ombak / gelombang dan untuk menenangkan gelombang sehingga sisi Ombak yang mengempur darat tidak terlalu keras dan tidak dapat merusak kapal nelayan dan Rumah warga yang berada dipersisir Pantai	Desa Batu Rakit dan Simpang Tritip Bangka Barat	Dapat diusulkan ke Prov
77.	Untuk segi Pembangunan mencakup Pertambangan dan Energi, Masyarakat Desa Air Lintang dan Para Nelayan Bangka Barat Berharap untuk Permasalahan TI ilegal Yang ada di Bangka Tengah dapat diselesaikan/ditutup karena telah banyak meresahkan warga dan para nelayan sebab Oli dan Limbah dari TI ilegal dan TI Apung Mempengaruhi Hasil Tangkap Ikan dan merusak Lingkungan di Kabupaten Bangka Barat	Desa Air Lintang	Ditelaah lebih lanjut
78.	Untuk segi Pembangunan, masyarakat desa Air Putih meminta dibuat Pelabuhan untuk para nelayan sehingga dapat membantu para nelayan untuk belabuh	Desa Air Putih	Ditelaah lebih lanjut
	BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN		
79.	Untuk dari Segi Perekonomian dan Keuangan Mencakup Koprasi dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berharap agar di Kabupaten Bangka Barat didirikan Galeri UKM agar Hasil Usaha Kuliner atau Kerajinan Masarakat Kabupaten Bangka Barat dapat ditampilkan atau dijual di Galeri Tersebut	Bangka Barat	Kewenangan Kabupaten
80.	Untuk dari Segi Perekonomian dan Keuangan Mencakup Koperasi dan Penanaman Modal, Masyarakat Desa Puput berharap Untuk	Bangka Barat	Sudah diakomodir

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	Proposal/bantuan Usaha Kecil Menengah (UKM) para Nelayan dapat segera dibantu dan jangan diperhambat		
81.	Selain itu juga Masyarakat Desa Juga Berharap agar Proses / administrasi pada Koperasi yang berada di Kabupaten Bangka Barat jangan Memperhambat apabila Masyarakat mau meminjam disana karena tujuan utama didirikan koperasi adalah untuk membantu memperoleh pinjaman dengan bunga yang ringan	Bangka Barat	Sudah diakomodir
82.	Untuk dari Segi Pertanian dan Kehutanan, Kelompok Tani Yang berada di Desa Air Putih berharap ada bantuan dari pemerintah misalnya bantuan lahan , bibit atau pupuk	Desa Air Putih	Agar mengajukan proposal bantuan
83.	Untuk dari Segi Keuangan, Masyarakat berharap untuk Dana APBD yang ada di Bangka Barat agar dapat ditambahdan diperhatikan karena untuk saat ini dana yang sudah ada saat ini sangat Minim sehingga untuk pembangunan disana sangat kurang mereka berharap dengan ada penambahan Bangka Barat lebih maju	Bangka Barat	Sudah diakomodir
	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT		
84.	Untuk dari Segi Kesejahteraan Rakyat Mencakup Sosial dan agama, Masyarakat Desa Air Putih berharap Untuk Masalah HTI dapat segera diselesaikan karena meresahkan warga dan warga menolak adanya HTI di Desa Tersebut	Desa Air Putih	Ditelaah lebih lanjut
85.	Masyarakat Desa Air Putih mengeluh karena untuk pembagian/ penyaluran raskin di Daerah tersebut tidak merata sehingga banyak warga yang seharusnya mendapat bantuan raskin mengeluh tidak mendapat raskin		Sudah diakomodir
86.	Masyarakat juga berharap untuk dana DABA Provinsi yang diperuntunkan untuk pendidikan dapat segera dicairkan di akahir Tahun		Agar mengajukan proposal bantuan
87.	Untuk permasalahan penyaluran kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) masih		Ditelaah lebih lanjut

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	kurang merata sehingga banyak masyarakat yang seharusnya mendapat kartu itu belum memilikinya		
88.	Para nelayan mengeluh tentang bantuan untuk nelayan yang mana mereka sudah melengkapi surat-surat berdasarkan Badan Hukum tapi masih saja bantuan tersebut lama dan terhambat		Kewenangan Kabupaten
89.	Dengan adanyan terbosan Terbaru yang dicanakan oleh PLN yaitu Listrik *Prabayar* maka masyarakat berharap pihak PLN dapat sosialisasi mengenai Listrik Prabayar di setiap daerah – daerah		Koordinasi dengan PLN
90.	Untuk segi kesejahteraan rakyat mencakup pendidikan, masyarakat berharap adanya Penambahan Sekolah Menengah Atas karena Untuk Sekolah Mengah Atas disana Cuma 1 (satu)		Ditelaah lebih lanjut
91.	Masyarakt juga berharap untuk fasilitas ujian yang berada di sekolah-sekolah ditambah misalnya Leptop ujian disekolah karena saat ini sangat terbatas		Diseuaikan kewenangnnya
92.	Masyarakat berharap untuk beasiswa untuk pelajar lebih diperbanyak		Sudah diakomodir
93.	Masyarakat mengeluh karena banyaknya pemuda yang berprestasi dibidang akademik yang belajar diluar banyak yang kembali ke daerah asalnya karena itu dikarenakan untuk jenjang karir di Bangka Belitung masih kurang banyak		Sudah diakomodir
94.	Masyarakat berharap kegiatan Reses seperti ini sering diadakan karena dengan adanya kegiatan seperti ini dewan lebih dekat dengan masyarakat		Sudah diakomodir
95.	Selain itu juga masyarakat juga berharap untuk masalah kepemudaan yang disana lebih diperhatikan dan dering diberi motifasi		Sudah diakomodir
	PEMERINTAHAN		
96.	Untuk Bidang Pemerintahan dari Segi Pertanahan, masyarakat banyak mengeluh tentang untuk memperoleh Surat Kepemilikan Tanah (SKT) itu		Ditelaah lebih lanjut

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	sanagt sulit dikarenakan Sengketa tanah dapat berupa sengketa administrative yang mana tanah tersebut berada di dekat Perusahan swasta atau PT		
5. KABUPATEN BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR			
	PENDIDIKAN		
1.	Pelimpahan wewenang SMK/SMA dari Kabupaten ke Provinsi harus dapat menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Provinsi		Sudah diakomodir
2.	Pembangunan Perguruan Tinggi sudah harus dipikirkan, misalnya fakultas cabang dari UBB		Kewenangan nasional
3.	Bantuan Beasiswa bagi Pelajar yang beprestasi perlu ditingkatkan		Sudah diakomodir
4.	Mohon bantuan sarana dan prasarana untuk SMK di Kecamatan Dendang	SMK di Kecamatan Dendang	Sudah diakomodir
5.	Bidang pendidikan perlu SMK Pertanian di Kecamatan Renggiang	SMK Pertanian di Kecamatan Renggiang	Ditelaah lebih lanjut
6.	Meminta agar anak-anak di Desa Selat Nasik tamatan SMK perikanan diberikan pelatihan untuk meningakatkan pengetahuan sehingga dapat bedaya saing	Desa Selat Nasik	Ditelaah lebih lanjut
	KESEHATAN		
7.	Masyarakat meminta peran dinas kesehatan untuk mengaktifkan layanan posyandu bagi masyarakat lesung batang	Lesung Batang	Ditelaah lebih lanjut
8.	Masyarakat meminta pelayanan perbaikan dari BPJS di Kec.Gantung yang selama ini payah	Kecamatan Gantung	Ditelaah lebih lanjut
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
9.	Pelebaran Jalan Badau - Gantung mohon untuk dapat diselesaikan (di daerah	Badau – Gantung	Sudah diakomodir

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	Balok baru setengah dilebarkan)		
10.	Mohon Bantuan Pembangunan Jalan Jangkang – Kembiri		Identifikasi kewenangan
11.	Bantuan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi, karena masih sulitnya jaringan internet		Sudah diakomodir melalui program kominfo
12.	Bantuan Percetakan sawah di Desa Balok yang dijanjikan Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung untuk dapat segera direalisasikan	Desa Balok	Sudah diakomodir
13.	Bantuan saluran irigasi sawah di Air Mengkeluk Desa Simpang Pesak	Air Mengkeluk Desa Simpang Pesak	Sudah diakomodir
14.	Perbaikan Jembatan Air Dekat, Desa Simpang Pesak karena sudah memakan korban	Desa Simpang Pesak	Kewenangan Kabupaten
15.	Pembangunan Talud Batu Ketapang (Desa Tj. Kelumpang) mohon dilanjutkan	Desa Tj. Kelumpang	Kewenangan Kabupaten
16.	Masyarakat Dusun Tungkuk protes Pemakaian jalan pemerintah oleh PT. SMM yang berakibat rusak parah	Dusun Tungkuk	Kewenangan Kabupaten
17.	Bantuan Pelebaran jalan Membalong – Simpang Rusak	Membalong – Simpang Rusak	Ditelaah lebih lanjut
18.	Aset Provinsi berupa pasar di Desa Simpang Rusak, sampai saat ini belum dimanfaatkan, karena belum serah terima ke Desa	Desa Simpang Rusak	Ditelaah lebih lanjut
19.	Pelebaran jalan Air Raya – Membalong kondisinya saat ini masih sempit	Air Raya – Membalong	Ditelaah lebih lanjut
20.	Bantuan Pembangunan Talud + 300 Meter lagi di Desa Mentigi	Desa Mentigi	Ditelaah lebih lanjut
21.	Jalan Membalong – Tg. Pandan mohon diperlebar	Membalong – Tg. Pandan	Ditelaah lebih lanjut
22.	Petani Danau Nujau yang berada di Desa Gangsu mempertanyakan status rumah yang ditempati mereka, sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah Kabupaten/Provinsi	Desa Gangsu	Ditelaah lebih lanjut
23.	Pengembangan Danau Nujau di Dusun Baru dan Dusun Gangse Kec. Gantung	Dusun Baru, Dusun	Kewenangan Kabupaten

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	meminta bantuan saluran irigasi sepanjang 147 Hektar sawah baru	Gangsae	
24.	Masyarakat mengharapkan pengerukan alur sungai karena pedangkalan,agar mereka tidak terkendala kalau pergi melaut		Ditelaah lebih lanjut
25.	Masyarakat meminta bantuan sarana dan prasarana olahraga bagi pemuda dan pemudi Air seruk	Air Seruk	Agar mengajukan proposal bantuan
26.	Masyarakat desa lesung batang meminta lampu penerangan jalan di desa Air Baik/Lapang Jaya	Desa Air Baik/Lapang Jaya	Ditelaah lebih lanjut
27.	Jalan.Setapak di Jalan Suryo tembus ke Kel.Parit RT 21, Kab Belitung		Kewenangan Kabupaten
28.	Jalan Manggar-Gantung karena sekarang sudah tersa sempit		Ditelaah lebih lanjut
29.	Jalan gusung Cene desa Batu Penyu guna menunjang sektor kelautan dan pariwisata		Kewenangan Kabupaten
30.	Pelebaran dan perbaikan jalan Provinsi di Desa Selinsing yang realisasinya hanya 3 km	Desa Selinsing	Ditelaah lebih lanjut
31.	Pengaspalan dari Desa Nuding sampai ke kec. Gantung yang melewati Desa Selinsing sepanjang 1,5 Km kondisi saat ini sudah parah	Desa Selinsing	Sudah diakomodir
32.	Pemasangan lampu jalan, jaringan listrik baru, pengadaan listrik tenaga surya, bantuan tabung gas elpiji,dan pemasangan tower lampu		Sudah diakomodir
33.	Pembuatan marka jalan		Identifikasi kewenangan
34.	Rehab dan pembangunan baru Dairanase di kec. Manggar	Manggar	Ditelaah lebih lanjut
35.	Pembangunan Talud dan normalisasi bahu jalan kec. Manggar	Manggar	Ditelaah lebih lanjut
36.	Pengaspalan jalan/hotmix kec. Manggar	Manggar	Ditelaah lebih lanjut
37.	Pembuatan sanitasi pembuangan limbah kec. Manggar	Manggar	Ditelaah lebih lanjut
38.	Pembuatan sumur bor,Penyulingan air bersih kec. Manggar	Manggar	Ditelaah lebih lanjut
49.	Meminta pemerintah melakukan Rehab perbaikan jalan menuju pelabuhan di Desa Selat Nasik	Desa Selat Nasik	Kewenangan Kabupaten
40.	Masyarakat desa pagar alam mengusulkan tiga(3) nama jalan untuk dikukuhkan yaitu	Desa Pagar Alam	Ditelaah lebih lanjut

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	*Jalan samiyadi (sepanjang jalan Grand Pelangi) *Jalan Ludin (sepanjang jalan menuju MAN)		
41.	Masyarakat meminta meneruskan pembangunan jalan aspal sampai dengan arah menuju pantai Grand Pelangi di Desa Pagar Alam	Desa Pagar Alam	Ditelaah lebih lanjut
42.	Meminta perbaikan jalan samiyadi yang sudah jelek (Butuh perbaikan & penerangan di Desa Pagar Alam	Desa Pagar Alam	Ditelaah lebih lanjut
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWSAN PEMUKIMAN		
43.	Akses jalan bagi lingkungan masyarakat di Kec.Renggiang	Kecamatan Renggiang	Kewenangan Kabupaten
44.	Pembangunan jembatan di Kec.Renggiang	Kecamatan Renggiang	Kewenangan Kabupaten
	SOSIAL		
45.	perlu bantuan bagi masyarakat miskin di Desa Renggiang	Desa Renggiang	Agar mengajukan proposal bantuan
46.	Meminta pemerintah untuk melakukan lobby politik kepada pengusaha Grand pelangi menyediakan jalan setapak kearah pantai untuk diberikan akses bagi masyarakat (RT 10) di Desa Pagar Alam	Desa Pagar Alam	Agar mengajukan proposal bantuan
	TENAGA KERJA		
47.	Masyarakat meminta adanya latihan keterampilan bagi tenaga kerja warga air seruk belitung yaitu pelatihnan pembengkelan/las pelatihan agrobisnis pertanian dll		Sudah diakomodir
48.	Masyarakat meminta pemerintah alokasi pupuk besubsidi bagi petani di desa Air Seruk		Sudah diakomodir
49.	Diharapkan adanya pelatihan-pelatihan membuat kerajinan untuk para ibu rumah tangga, supaya dapat menambah penghasilan		Sudah diakomodir

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
50.	Pelatihan bagi tenaga kerja perbengkelan otomotif dan sadar wisata dan bantuan rumah layak huni bagi masayarakt miskin di Kec.Manggar	Kecamatan Manggar	Ditelaah lebih lanjut
51.	perlunya pelatihan bagi tenaga kerja agar lebih trampil dibidang pariwisata, perbengkelan dan pertanian di Kec.Renggiang	Kecamatan Renggiang	Sudah diakomodir
52.	Masyarakat meminta diadakannya pelatihan keterampilan Membatik yang diadakan secara resmi dari provinsi agar dapat dijadikan kegiatan padat karya di Desa Talang Jaya	Desa Talang Jaya	Sudah diakomodir
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
53.	Masyarakat meminta bantuan untuk kegiatan ibu-ibu PKK di Desa Pagar Alam	Desa Pagar Alam	Kewenangan Kabupaten
	KOPERASI DAN UKM		
	Mohon bantuan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan kemasan bagi UMKM		Sudah diakomodir
	PENANAMAN MODAL		
54.	Bantuan Modal bagi UMKM di Desa kecamatan Gantung, Lenggang, Lillangan dan Selinsing	Desa kecamatan Gantung, Lenggang, Lillangan dan Selinsing	Agar mengajukan proposal bantuan
55.	Masyarakat RT 14 meminta bantuan modal lewat Kube/Kelompok usahan bersama dapat direalisasikan di Desa Pagar Alam	Desa Pagar Alam	Agar mengajukan proposal bantuan
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
56.	Mohon bantuan sarana dan prasarana olah raga desa Jangkar Asam dan Limbongan	Desa Jangkar Asam dan Limbongan	Agar mengajukan proposal bantuan

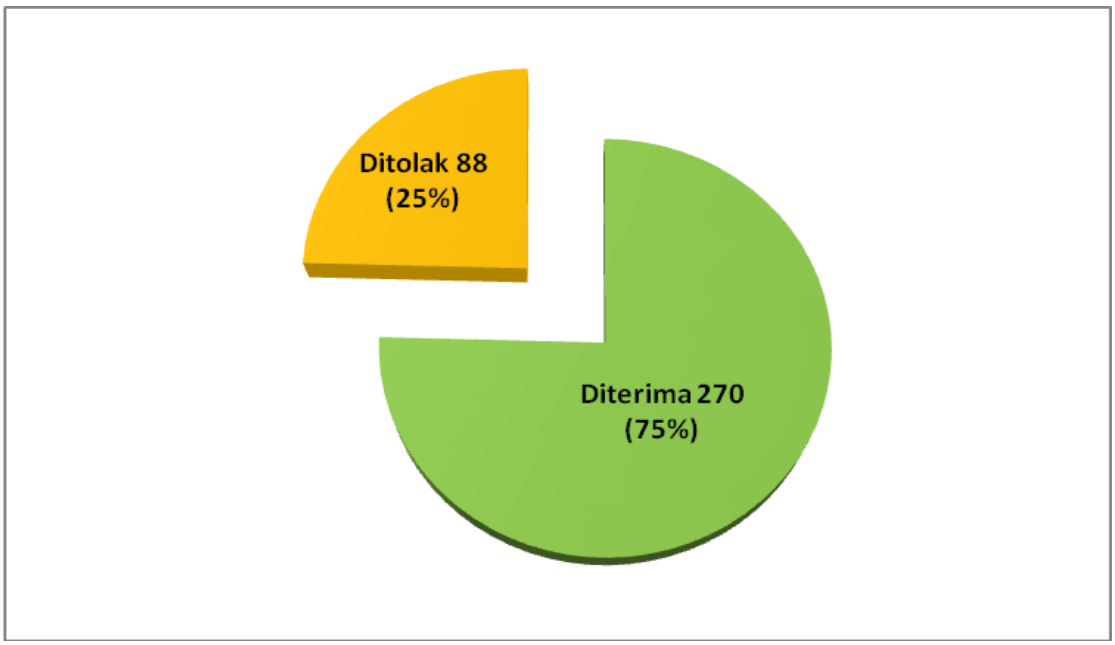
NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
57.	Masyarakat meminta bantuan dalam bentuk dana untuk saran dan prasarana Sportcenter diwilayah desa Talang Jaya seperti : Sepak bola,Volly dan kegiatan olahraga lainnya	Desa Talang Jaya	Agar mengajukan proposal bantuan
	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
58.	Bantuan alat tangkap ikan bagi nelayan di Desa Simpang Pesak	Desa Simpang Pesak	Agar mengajukan proposal bantuan
59.	Siring Jalan yang rusak untuk segera dapat diperbaiki pemerintah		Ditelaah lebih lanjut
60.	Bantuan Kapal untuk nelayan Desa Mentigi	Desa Mentigi	Agar mengajukan proposal bantuan
61.	Bantuan Lampu Navigasi di laut Desa Mentigi	Desa Mentigi	Agar mengajukan proposal bantuan
62.	Bantuan alat tangkap ikan bagi nelayan di Desa Mentigi	Desa Mentigi	Agar mengajukan proposal bantuan
63.	Bantuan tambat perahu di Desa Gangse Danau Nujau Kec. Gantung	Desa Gangse Danau Nujau Kec. Gantung	Agar mengajukan proposal bantuan
64.	Bantuan bibit ikan air tawar di Desa Gangse Danau Nujau Kec. Gantung	Desa Gangse Danau Nujau Kec. Gantung	Agar mengajukan proposal bantuan
65.	Meminta bantuan pengembangan budi daya ikan dan udang, dikawasan pantai desa Selinsing eks penambangan timah dan pasir	Desa Selinsing	Agar mengajukan proposal bantuan
66.	Meminta bantuan hibah bagi nelayan dan petani desa Selinsing	Desa Selinsing	Agar mengajukan proposal bantuan
67.	Tidak adanya penambangan dilaut demi kelangsungan komonitas habitat laut sehingga perlu di kukuhkan oleh Peraturan Daerah		Ditelaah lebih lanjut
68.	Masyarakat selat nasik meminta pemerintah menentukan batas wilayah tangkapan laut	Selat Nasik	Ditelaah lebih lanjut
69.	Dinas kelautan dan perikanan kab.Belitung telang memberikan asuransi kepada masyarakat nelayan di Desa Pagar Alam	Desa Pagar Alam	Sudah diakomodir
	PARIWISATA		
70.	Peninggalan situs Raja Balok yang masuk areal hutan kawasan Perkebunan		Ditelaah lebih lanjut

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	agar dapat dialihkan		
71.	Siring Jalan yang rusak untuk segera dapat diperbaiki pemerintah		Ditelaah lebih lanjut
72.	Desa Kembiri berkeinginan dijadikan daerah tujuan wisata, karena disana terdapat " Kelekak Duren" sekitar 47 hektar dan tari-tarian tradisional, seperti Campak, Beripat, Beregong dll	Desa Kembiri	Ditelaah lebih lanjut
73.	Pelaku wisata mengharapkan adanya Peraturan Daerah untuk mengatur tentang permasalah pariwisata, karena sebagian wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Belitung kebanyakan menggunakan travel-travel dan pemandu wisata dari luar		Ditelaah lebih lanjut
74.	Menghimbau pemerintah untuk ikut mengatasi permasalahan kebersihan pantai di Desa Selat Nasik	Desa Selat Nasik	Ditelaah lebih lanjut
75.	Kolong Air Biru diharapkan adanya pembangunan infrastruktur agar dapat dijadikan objek pariwisata di Kabupaten Belitung	Kolong Air Biru Belitung	Ditelaah lebih lanjut
76.	Meminta Dinas Pariwisata provinsi untuk pengembangan daearah wisata DAM PICE	Daerah wisata DAM PICE	Ditelaah lebih lanjut
77.	Meminta bantuan bibit 5000 batang karet bagi masyarakat kec. Gantung	Kecamatan Gantung	Agar mengajukan proposal bantuan
78.	Masyarakat menyambut baik adanya percontohan perkebunan kunyit di Desa Selinsing, diharapkan akan ada percontohan perkebunan lainnya	Desa Selingsing	Sudah diakomodir
79.	Bantuan nelayan berupa perahu,jaringf GPs dan Mesin kelintin di Kec.Manggar	Kecamatan Manggar	Agar mengajukan proposal bantuan
80.	Budidaya ikan air payau dan air tawar serta pakan ikan, bibit ikan lele dan gurame,Pembuatan balai benih ikan di Kec.Manggar	Kecamatan Manggar	Ditelaah lebih lanjut
81.	Perlunya penguatan di sektor pariwisata, kelautan, pertaniandan perkebunan pase menghadapai pasca penambangan timah dan semua sektor lainnya di Kec.Manggar	Kecamatan Manggar	Ditelaah lebih lanjut
82.	Masyarakat mengajukan Proposal Pengangkatan kolong minyak untuk	Desa Talang Jaya	Agar mengajukan proposal bantuan

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	dijadikan objek pariwisata dengan pendanaan dari pemerintah di Desa Talang Jaya		
83.	Menghimbau pemerintah untuk ikut mengatasi permasalahan kebersihan pantai di Desa Selat Nasik	Desa Selat Nasik	Sudah diakomodir
	PERTANIAN		
84.	Mohon bantuan stabilisasi harga komoditi Lada, Karet dan Sawit di tingkat Petani		Ditelaah lebih lanjut
85.	Mohon bantuan saluran irigasi sawah + 33 Hektar di Kecamatang Dendang	Kecamatan Dendang	Ditelaah lebih lanjut
86.	Bantuan bibit sawit		Tidak diakomodir
87.	Masyarakat di Kecamatan Dendang berharap alokasi Kebun Plasma Masyarakat sebesar 20% untuk segera direalisasikan	Kecamatan Dendang	Ditelaah lebih lanjut
88.	Masalah kemitraan perkebunan antara PT. SMM dan Petani Sawit Rakyat		Ditelaah lebih lanjut
89.	Mohon bantuan pemerintah Provinsi masalah dengan PT. Foresta (perkebunan sawit) belum ada realisasi sampai sekarang padahal kesepakatan sudah terjadi		Ditelaah lebih lanjut
90.	Desa Simpang Rusak memerlukan BUMDES	Desa Simpang Rusak	Kewenangan Kabupaten
91.	Masyarakat meminta bantuan bibit karet danpengelolahan budidaya air tawar		Agar mengajukan proposal bantuan
92.	Mohon kepada pemerintah untuk dapat menstabilkan harga karet yang semakin menurun		Ditelaah lebih lanjut
93.	Pembukaan lahan sawah dan jalan usaha bagi masyarakat petani		Kewenangan Kabupaten
94.	Bantuan bibit tanaman penghijauan, penanaman mangroe, bantuan bibit karet		Agar mengajukan proposal bantuan
95.	Masyarakat Desa Talang Jaya meminta bantuan dana dari provinsi untuk	Desa Talang Jaya	Agar mengajukan proposal bantuan

NO	BIDANG/ISU/KONDISI	LOKASI	JUSTIFIKASI
	keperluan peternakan ayam potong milik warga setempat		
96.	Masyarakat Desa Talang Jaya meminta bantuan dana untuk kawasan yang berpotensi untuk dijadikan peternakan dan agrowisata yang telah memiliki MASTERPLAN,degan tanah seluas 8,1Ha Milik pemerintah desa	Desa Talang Jaya	Agar mengajukan proposal bantuan
	KEHUTANAN		
97.	Hutan lindung di wilayah sungai padang sudah banyak dialihfungsikan, masyarakat mengharapkan dikembalikan kepada masyarakat		Ditelaah lebih lanjut
98.	Masyarakat meminta pemerintah menanggapi usulan yang diusulkan oleh POKMASWAS terkait ijin Hutan Produksi untuk ditinjau ulang kembali karena berbenturan dengan kawasan wisata		Ditelaah lebih lanjut
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
99.	Masyarakat meminta menindak lanjuti kualitas air PDAM di desa Lesung batang di sepanjang Jln.Kapten Saridin	Desa Lesung Batang	Kewenangan Kabupaten
100.	Instalasi PDAM di Kec.Renggiang	Kecamatan Renggiang	Kewenangan Kabupaten
101.	Air Bersih di Kec.Renggiang	Kecamatan Renggiang	Ditelaah lebih lanjut

Berdasarkan penelaahan terhadap hasil Reses DPRD yang tertuang di dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD dapat disimpulkan bahwa terdapat 358 usulan dengan jumlah yang diakomodir sebanyak 88 usulan (24,58%) dan yang belum diakomodir dengan keterangan bukan menjadi kewenangan Prov dan memerlukan tindaklanjut adalah sebesar 270 usulan atau 75,42 persen. Secara lengkap, gambaran mengenai hasil penelaahan terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD adalah sebagaimana termuat pada grafik V.1 berikut:



Grafik V.1 Realisasi Penelaahan terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD

5.2. PENELAAHAN TERHADAP USULAN LANGSUNG MASYARAKAT

Masukan usulan kegiatan berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang yang telah divalidasi secara berjenjang menghasilkan usulan masyarakat yang dapat diakomodir menjadi kegiatan di dalam RKPD dan Rencana Kerja PD. Adapun usulan dan justifikasi dari usulan tersebut secara lengkap sebagaimana termuat pada tabel V.2, dengan rincian sebagai beriikut:

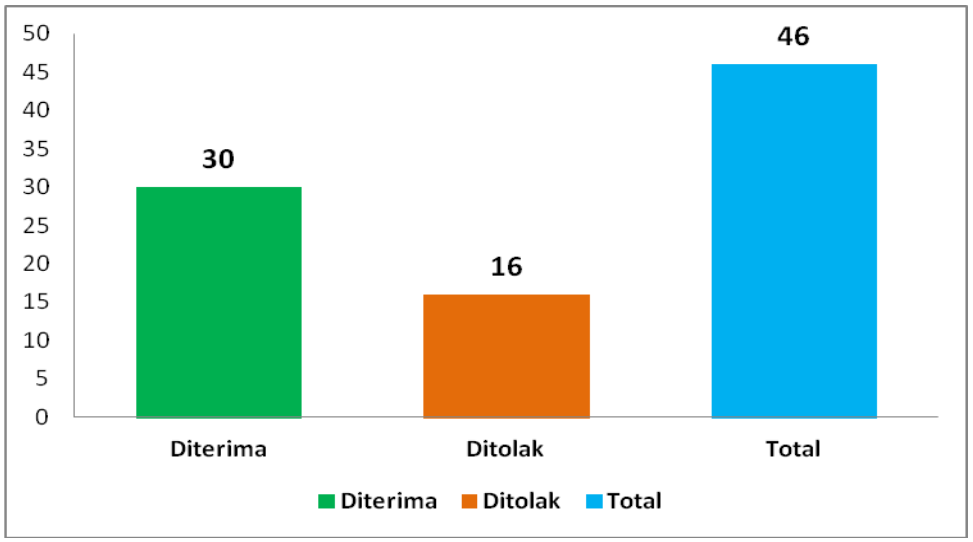
Tabel V.2 Rekapitulasi Usulan Masyarakat pada Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

No	Uraian Masukan Terhadap Isu Strategis	Pengusul	Justifikasi
1	Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk UKM	Bahairi	Diakomodir
2	Rendahnya Investasi	Agung Setiawan (LPJKP Babel)	Diakomodir
3	Pengendalian banjir	Agung Setiawan (LPJKP Babel)	Diakomodir
4	Infrastruktur Jaskom	Agung Setiawan (LPJKP Babel)	Diakomodir
5	Rendahnya peran aktif pemuda (KNPI) dalam mendapatkan dukungan dana serta sarana prasarana kepemudaan di Prov. Kep. Babel	Bambang Patijaya (KNPI/ Pengusaha)	Ditelaah lebih lanjut
6	Posisi tawar harga jual Lada	Ishar Damiri (KAMMI)	Ditelaah lebih lanjut
7	Perbaikan lahan eks-tambang	Ishar Damiri (KAMMI)	Ditelaah lebih lanjut
8	Pusat dakwah Islam/ Islamic Centre	Ishar Damiri (KAMMI)	Ditelaah lebih lanjut
9	Sinkronisasi data dasar	drg. Mulyono Susanto, M.H.S.M	Diakomodir
10	Kependudukan & Demografi (pertumbuhan penduduk)	drg. Mulyono Susanto, M.H.S.M	Diakomodir
11	Distribusi SDM	drg. Mulyono Susanto, M.H.S.M	Diakomodir
12	Pelayanan pulau-pulau terluar & terpencil, terpencar berpenduduk	drg. Mulyono Susanto, M.H.S.M	Diakomodir
13	Over produksi pendidikan, tenaga kerja & kesehatan	drg. Mulyono Susanto, M.H.S.M	Ditelaah lebih lanjut
14	Penyakit meresahkan dunia	drg. Mulyono Susanto, M.H.S.M	Diakomodir
15	Infrastruktur Parawisata	Ahmad Damiri	Diakomodir
16	Harga pangan pokok yang tidak stabil	Ahmad Damiri	Diakomodir
17	Belum optimalnya pembangunan sektor perhubungan	Hendra Irfansyah	Diakomodir

No	Uraian Masukan Terhadap Isu Strategis	Pengusul	Justifikasi
18	Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di pedesaan yang masih rendah	Firmansyah	Diakomodir
19	Rendahnya kualitas SDM, khususnya Pemuda dan olahraga sebagai generasi penerus bangsa	H.Saviat. S (Presidium Babel)	Diakomodir
20	Menurunnya prestasi olahraga, baik ditingkat wilayah pulau sumatera maupun di tingkat nasional	Adi Muslih, SE (Masyarakat Pecinta Bulutangkis (PBSI))	Diakomodir
21	Masih tingginya harga kebutuhan pokok	Irwansyah Putra	Ditelaah lebih lanjut
22	Tingginya tingkat upah tenaga kerja	Irwansyah Putra	Ditelaah lebih lanjut
23	Meningkatkan ekonomi daerah khususnya desa (Pender)	NN (Mahasiswa)	Diakomodir
24	rendahnya nilai tambal dan daya saing produk UKM	NN (Mahasiswa)	Diakomodir
25	belum stabilnya pembangunan perekonomian	NN (Mahasiswa)	Ditelaah lebih lanjut
26	masih terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah	NN (Mahasiswa)	Ditelaah lebih lanjut
27	Peningkatan produksi, nilai tambah, daya saing dan infrastruktur pertanian	Ardiles Akbar & Aprilogra	Diakomodir
28	Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah	Saputra (LSM)	Diakomodir
29	Pertumbuhan produksi, nilai tambah, daya saing dan infrastruktur pertanian	Ardiles Akbar & Aprilogra	Diakomodir
30	tingkat penyerapan tenaga kerja disektor UKM produk unggulan daerah	Agung Sapta	Diakomodir
31	peningkatan jumlah unit usaha & sektor produk unggulan daerah	Agung Sapta	Diakomodir
32	peningkatan jumlah produksi di sektor produk unggulan daerah	Agung Sapta	Diakomodir

No	Uraian Masukan Terhadap Isu Strategis	Pengusul	Justifikasi
33	peningkatan nilai investasi di sektor produk unggulan daerah	Agung Sapta	Diakomodir
34	kemudahan perizinan	Agung Setiawan (LPJKP Babel)	Diakomodir
35	pelayanan yang prima	Agung Setiawan (LPJKP Babel)	Diakomodir
36	Aliran tepat sasaran	Agung Setiawan (LPJKP Babel)	Ditelaah lebih lanjut
37	Organisasi kepemudaan di Prov.babel	Bambang Patijaya (KNPI/ Pengusaha)	Diakomodir
38	perda/ UUD tentang harga minimum jual beli lada	Ishar Damiri (KAMMI)	Ditelaah lebih lanjut
39	pemetaan wilayah khusus pertambangan - ..... Petani bertani lada meningkat	Ishar Damiri (KAMMI)	Ditelaah lebih lanjut
40	Terwujudnya pusat dakwah Islam di Babel	Ishar Damiri (KAMMI)	Ditelaah lebih lanjut
41	Koefisien Varians	Ahmad Damiri	Ditelaah lebih lanjut
42	Persentase wilayah terpencil yang dilayani transportasi massal	Hendra Irfansyah	Diakomodir
43	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang dilayani pelayaran perintis	Hendra Irfansyah	Ditelaah lebih lanjut
44	Angka kecelakaan dan Pelanggaran lalu lintas	Hendra Irfansyah	Ditelaah lebih lanjut
45	Pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha ekonomi desa dan kawasan perdesaan	Firmansyah	Diakomodir
46	Meningkatnya kesehatan, mengurangi pengguna narkoba dan meningkatnya prestasi olahraga baik lokal, nasional maupun internasional	H.Saviat. S (Presidium Babel)	Diakomodir

Berdasarkan penelaahan terhadap hasil usulan langsung masyarakat yang disampaikan pada saat Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang, dapat disimpulkan bahwa terdapat 46 Usulan dengan jumlah yang diakomodir sebanyak 30 usulan (65,22%) dan yang belum diakomodir dengan keterangan memerlukan penelaahan lebih lanjut adalah sebesar 16 usulan atau (34,78%). Secara lengkap, gambaran mengenai hasil penelaahan terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD adalah sebagaimana termuat pada grafik V.2 berikut:



Grafik V.2 Realisasi Penelaahan terhadap Usulan Langsung Masyarakat

5.3. PENELAAHAN TERHADAP USULAN KABUPATEN/KOTA

Memperhatikan dan mensinkronkan pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota merupakan salah satu pendekatan perencanaan, yaitu pendekatan *Bottom-Up*. Penelaahan dan pembahasan terhadap usulan Kabupaten/Kota dilakukan melalui mekanisme Trilateral Meeting antara Bappeda Provinsi, PD Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota.

Akomodasi terhadap usulan yang disampaikan kabupaten/kota dilakukan dengan memerphatikan beberapa criteria sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi;
2. Menjadi kewenangan provinsi. Jika menjadi kewenangan kab/kota maka dapat diusulkan melalui mekanisme dana bantuan;
3. Memperhatikan prioritas pembangunan kewilayahan sebagaimana termuat di dalam Bab IV;
4. Mempertimbangkan kemampuan keuangan provinsi;
5. Menyentuh langsung ke masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, informasi mengenai usulan yang disampaikan oleh kab/kota dan yang telah disetujui untuk dimasukkan dalam RKPD dan Renja PD Tahun 2018 adalah sebagaimana yang tertuang di dalam table V.3 berikut:

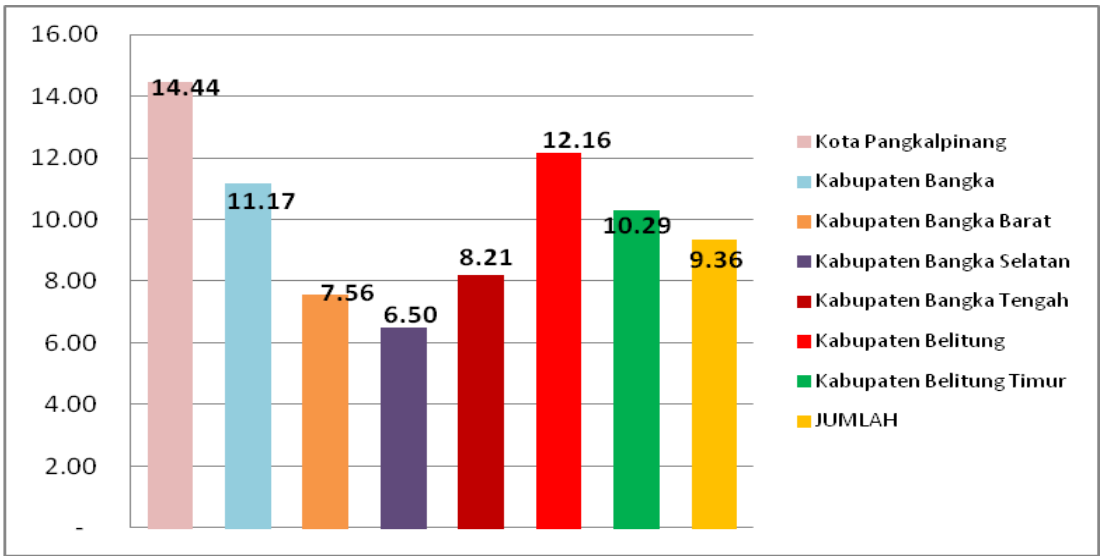
Tabel V.3 Rekapitulasi Hasil Penelaahan Terhadap Usulan Kabupaten/Kota

NO.	KABUPATEN/KOTA	URUSAN		HASIL PERUBAHAN	
		JUMLAH KEGIATAN	PAGU (Rp)	JUMLAH KEGIATAN DISETUJUI	JUMLAH PAGU DISETUJUI (Rp)
1	Kota Pangkalpinang	90	225,683,715,000	14	25.250.085.000
2	Kabupaten Bangka	179	637,874,689,377	25	40.401.975.000
3	Kabupaten Bangka Barat	172	374,699,893,700	57	44.393.820.000
4	Kabupaten Bangka Selatan	277	949,860,016,308	54	49.795.700.000
5	Kabupaten Bangka Tengah	195	355,360,257,000	51	137.452.341.000
6	Kabupaten Belitung	148	606,506,111,884	14	23.059.380.000
7	Kabupaten Belitung Timur	136	331,560,833,000	20	30.468.600.000
	JUMLAH	**1197**	**3,481,545,516,269**	**235**	**350.821.901.000**

Sumber: eplanning.babelprov.go.id

Berdasarkan rekapitulasi usulan kegiatan kab/kota tersebut pada table V.3, maka dapat disimpulkan bahwa, kegiatan yang diusulkan adalah sebanyak 1.197 kegiatan dan yang mendapatkan persetujuan adalah sebesar 235 kegiatan atau hanya sebesar 19,63 persen. Sementara itu dari sisi pagu, total usulan mencapai Rp 3,481,545,516,269 dan yang diakomodasi adalah sebesar Rp 350.821.901.000 atau hanya sebesar 10.07 persen.

Secara visual, persentase realisasi terhadap usulan kabupaten/kota adalah sebagaimana yang disajikan pada grafik V.3 berikut:



Grafik V.3 Persentase Realisasi Usulan Kabupaten/Kota terhadap Total Usulan

Rendahnya akomodasi terhadap usulan kabupaten/kota ini disebabkan karenan sebagian besar usulan yang disampaikan, selain tidak menjadi prioritas provinsi, namun sebagian besar adalah usulan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota itu sendiri. Terhadap hal tersebut, usulan dapat diakomodasi melalui mekanisme dana bantuan provinsi kepada kabupaten/kota yang pembahasannya akan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap kegiatan-kegiatan yang disetujui untuk didanai melalui mekanisme dana bantuan dimaksud.

5.4. RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Berdasarkan pertimbangan yang tergambarkan di dalam kerangka perekonomian daerah dan prioritas serta sasaran pembanunan daerah tahun 2018, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Secara total, terdapat 201 program dan 1.332 kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

A. Program yang dilaksanakan setiap PD:

Program Pelayanan Pemerintah, dengan kegiatan:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

B. Program Urusan Wajib

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

I. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR :

1. URUSAN PENDIDIKAN

a. Program Peningkatan dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan
c. Program Peningkatanan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus
d. Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan
e. Program Peningkatan Layanan Teknis Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Pendidikan Khusus
f. Program Peningkatan Pelayanan Tata Kelola Kependidikan

2. URUSAN KESEHATAN

a. Program Kesehatan Masyarakat
b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
c. Program Pelayanan Kesehatan
d. Program Sumber Daya Kesehatan
e. Program Pelayanan Teknis Keperawatan
f. Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis
g. Program Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum
h. Program Pelayanan Teknis Medik Kejiwaan
i. Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa
j. Program Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa
k. Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. Program Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
b. Program Pengembangan Sumber Daya Air
c. Program Penataan Ruang dan Pertanahan
d. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Program Pengembangan Tata Bangunan, Kawasan Permukiman, Air minum dan Penyehatan Lingkungan
b. Program Pengembangan Perumahan Rakyat

5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

a. Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
b. Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja
c. Program Penegakan Perda dan Perkada
d. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat

6. URUSAN SOSIAL

a. Program Rehabilitasi Sosial
b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
c. Program Penanganan Farkir Miskin
d. Program Pemberdayaan Sosial
e. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial
f. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Eks Psikotik
g. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
h. Program Peningkatan Logistik/Peralatan, Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
i. Program Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

II. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

a. Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
b. Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
c. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja
d. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri
e. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
b. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

3. URUSAN PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4. URUSAN PANGAN

a. Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
b. Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas dan Cadangan Pangan
c. Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan
d. Program Peningkatan Fungi Pelayanan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup
b. Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup
c. Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
d. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan

6. URUSAN PERTANAHAN

a. Program Penataan Ruang dan Pertanahan

7. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a. Program Kependudukan dan Catatan Sipil

8. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Program Pembinaan Pemerintah Desa
b. Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
c. Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat
d. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan

9. URUSAN PERHUBUNGAN

a. Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat
b. Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut
c. Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan
d. Program Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe B

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

a. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan
b. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
c. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil
d. Program Peningkatan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu KUKM

12. URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a. Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
b. Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal

c. Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
d. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

a. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
b. Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga
c. Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

14. URUSAN STATISTIK

a. Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian

15. URUSAN PERSANDIAN

a. Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian

16. URUSAN KEBUDAYAAN

a. Program Pengembangan Kebudayaan

17. URUSAN PERPUSTAKAAN

a. Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan
b. Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

18. URUSAN KEARSIPAN

a. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
b. Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

III.Urusan Pilihan

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut :

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut
b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
c. Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan
d. Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
e. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
f. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau
g. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Budidaya Ikan Laut
h. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar

2. URUSAN PARIWISATA

a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan
d. Program Peningkatan Teknis Museum
e. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Parekraft

3. URUSAN PERTANIAN
a. Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
b. Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian
c. Program Pengembangan Perkebunan
d. Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan
e. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih
f. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman
g. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian
h. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Veteriner
i. Program Pengembangan Penyuluhan dan Peningkatan SDM Pertanian

4. URUSAN KEHUTANAN
a. Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
b. Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sda Dan Ekosistem
c. Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat
d. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan

5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
a. Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah
b. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam
c. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
d. Program Pengembangan Sumbera Daya Energi

6. URUSAN PERDAGANGAN
a. Program Pengembangan Perdagangan

7. URUSAN PERINDUSTRIAN
a. Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri
b. Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri
c. Program Pengembangan Perdagangan
d. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk
e. Program Pengembangan dan Pemasaran Industri

8. URUSAN TRANSMIGRASI
a. Program Pengembangan Kawasan Transmigarasi

IV. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN

a. Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah
b. Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan
c. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
d. Program Perencanaan Sosial,Budaya dan Pemerintahan
e. Program Perencanaan Setda

2. FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN

a. Program Peningkatan Tata Kelola Perpajakan
b. Program Peningkatan Pendapatan dan Retribusi
c. Program Penganggaran Pembangunan Daerah
d. Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi dan Perbendaharaan
e. Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan
f. Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah
g. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Penerimaan Pendapatan Daerah

3. FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a. Program Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerimaan, Promosi, Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun Aparatur Sipil Negara
b. Program Peningkatan Penilaian Kinerja, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara
c. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara
d. Program Pemetaan Potensi Aparatur

4. FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Program Penelitian dan Pengembangan

5. FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN

a. Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur
b. Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Pegelolaan Keuangan dan Asset Daerah
c. Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya

6. FUNGSI PENUNJANG KESEKRETARIATAN DAERAH DAN KESEKRETARIATAN DPRD

a. Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan
b. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Protokoler Dewan
c. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian
d. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam
e. Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya
f. Program Pengendalian Pembangunan

g. Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD
h. Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN
i. Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan
j. Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan
k. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Kb, Dan Pemuda
l. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
m. Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
n. Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah
o. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
p. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
q. Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan Dan Penyaringan Informasi
r. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT
s. Program Peningkatan Pelayanan Protokoler
t. Program Peningkatan Informasi dan Investasi Serta Pelayanan Penghubung Provinsi
u. Program Penelitian dan Pengembangan
v. Program Pengembangan Otonomi Daerah
w. Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah
x. Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan
y. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisisi Jabatan
z. Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah
aa. Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah
bb. Program Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum

5.4. PAGU INDIKATIF

5.4.1. Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing PD untuk merencanakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Secara lengkap, pagu indikatif PD lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana termuat pada tabel V.4 berikut:

Tabel V.4 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU BTL	PAGU BL	TOTAL (BTL+BL)	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan	232.683.220.205,00	246.040.214.000,00	478.723.434.205,00	10	204
2	Dinas Kesehatan	14.788.136.486,00	49.062.815.389,00	63.850.951.875,00	6	33
3	Rumah Sakit Umum Provinsi	29.436.148.310,00	136.739.027.426,42	166.175.175.736,42	6	17
4	Rumah Sakit Jiwa	25.604.392.888,90	45.309.238.000,00	70.913.630.888,90	5	40
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	16.827.663.633,00	220.667.173.212,00	237.494.836.845,00	6	32
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.120.030.554,52	26.076.885.000,00	31.196.915.554,52	3	18
7	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	9.164.219.540,00	13.722.556.850,00	22.886.776.390,00	6	26
8	Dinas Perhubungan	6.213.740.489,00	28.275.570.200,00	34.489.310.689,00	4	34
9	Dinas Lingkungan Hidup	7.431.859.812,00	7.607.253.000,00	15.039.112.812,00	5	28
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	5.515.485.443,00	8.938.664.000,00	14.454.149.443,00	5	40
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.203.466.361,00	9.401.670.723,00	13.605.137.084,00	4	23
12	Dinas Sosial	9.399.170.974,92	19.899.081.000,00	29.298.251.974,92	7	39
13	Dinas Tenaga Kerja	13.788.514.087,00	7.415.093.402,00	21.203.607.489,00	7	22
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.519.940.959,00	7.971.170.590,00	13.491.111.549,00	5	15
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.451.651.800,00	22.100.248.853,00	28.551.900.653,00	6	19
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	6.444.143.859,00	26.919.948.000,00	33.364.091.859,00	5	44
17	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	6.048.870.832,69	13.218.342.550,00	19.267.213.382,69	4	19
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.036.794.397,11	5.959.550.700,00	10.996.345.097,11	5	22
19	SATPOL PP	9.545.424.054,00	9.611.985.000,00	19.157.409.054,00	5	17
20	Sekretariat Daerah	44.824.152.380,00	87.749.716.209,00	132.573.868.589,00	26	128
21	Sekretariat DPRD	9.016.133.730,20	102.273.378.400,00	111.289.512.130,20	3	22
22	DPRD	34.676.202.259,00		34.676.202.259,00		

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU BTL	PAGU BL	TOTAL (BTL+BL)	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
23	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.250.778.653,00		1.250.778.653,00		
24	Badan Keuangan Daerah	50.010.796.303,00	26.490.411.125,00	76.501.207.428,00	7	60
25	Inspektorat	11.946.749.216,00	7.854.861.030,00	19.801.610.246,00	4	17
26	Badan Penghubung Provinsi	3.363.699.700,00	35.542.350.335,00	38.906.050.035,00	2	17
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.173.463.253,00	24.389.360.405,00	36.562.823.658,00	5	19
28	Dinas Pangan	4.480.245.312,14	6.150.882.202,00	10.631.127.514,14	4	37
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.440.309.318,00	9.040.645.930,25	14.480.955.248,25	5	14
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.637.155.057,00	17.525.369.628,00	24.162.524.685,00	6	17
31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.511.585.917,42	6.117.952.000,00	12.629.537.917,42	5	34
32	Dinas Pertanian	15.651.816.398,50	30.051.560.000,00	45.703.376.398,50	8	39
33	Dinas Kehutanan	17.655.472.721,00	15.225.277.376,00	32.880.750.097,00	5	36
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	14.199.869.303,00	23.121.162.000,00	37.321.031.303,00	5	24
35	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.366.836.674,00	31.889.569.000,00	46.256.405.674,00	9	37
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.640.113.464,00	29.860.841.500,00	40.500.954.964,00	6	41
	JUMLAH	**682.068.254.345,40**	**1.358.219.825.035,67**	**2.040.288.079.381,07**	**203**	**1.234**

Sumber: eplanning.babelprov.go.id

5.4.2. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018

Adapun secara lengkap prioritas daerah, sasaran daerah, lokasi, program. Indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, pagu indikatif, prakiraan maju, jenis program dan kegiatan serta Perangkat Daerah penanggungjawab pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebagaimana yang termuat di dalam tabel V.5 berikut:

Tabel V.5 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-								
	Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik*	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi*	**Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	4 Nilai; 100 %					DINAS PENDIDIKAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	2.640.330.000	2.600.000.000	
			Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional	Provinsi, SKPD			Jenis Kegiatan Siswa dan PTK Tk. Nasional dilaksanakan di Prov.Kep.Babel 2 Jenis	2 Jenis	2.000.000.000	3.000.000.000	
			Peningkatan Pelaksanaan Pendidikan PAUD oleh Kab/Kota	Provinsi, SKPD			Terbinanya Pendidikan PAUD oleh Kab/Kota 7 Kab/Kota Tersedianya Majalah Pendidikan PAUD Tk. Provinsi 120.000 Eksemplar	7 Kab/Kota 120.000 Eksemplar	1.000.000.000	2.000.000.000	
			Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi	Provinsi, SKPD			Tersedianya Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi 1 Dok	1 Dok	100.000.000	100.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	499.010.000	3.000.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	199.160.000	210.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	442.090.000	410.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 dokumen	2 dokumen	342.490.000	700.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 4 laporan	4 laporan	365.915.000	265.000.000	
			Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)	Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung			Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional 3 Jejang	3 Jejang	1.000.000.000	1.100.000.000	
			Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	Provinsi, SKPD			Terseleksinya anggota tim lomba Siswa dan PTK Tk. Provinsi 10 Tim	10 Tim	6.200.000.000	7.200.000.000	
			Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau berprestasi	Luar Daerah, Provinsi			Masyarakat yang tidak mampu dan/atau berprestasi menerima beasiswa 1.121 Orang Masyarakat berprestasi menerima beasiswa ke luar negeri 10 Orang	1.121 Orang 10 Orang	8.000.000.000	14.000.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi; Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan balai Labkes	80 NILAI; 70 %					DINAS KESEHATAN
			pelayanan administrasi perkantoran	SKPD			Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan balai Labkes 70 %	70%	2.584.700.145	2.671.763.191	
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	SKPD			Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan balai Labkes 70 %	70%	811.427.467	835.489.690	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan balai Labkes 70 %	70%	155.600.000	206.210.192	
			Peningkatan kapasitas aparatur	SKPD			Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan balai Labkes 70 %	70%	243.063.884	126.329.578	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi			Predikat (nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi 80 nilai	80 nilai	451.068.420	468.991.341	
			Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Provinsi			Predikat (nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi 80 nilai	80 nilai	473.512.479	497.188.103	
			Peningkatan Pelayanan UPTD Balai Labkes	SKPD			Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan balai Labkes 70 %	70%	1.630.021.096	1.711.522.151	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 persen; 100 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani 130 orang	130 orang	2.890.485.000	2.934.295.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 130 orang	130 orang	1.835.773.254	2.300.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Laporan	2 Laporan	318.000.000	110.000.000	
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 5 Laporan	5 Laporan	180.000.000	100.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 50 orang	50 orang	100.000.000	190.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 310 orang	310 orang	231.800.000	320.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	5 %; 100 %; 100 %					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah pegawai (ASN dan PHL) Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 61 Orang	61 Orang	1.424.020.000	1.751.053.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	713.770.000	1.511.007.793	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur yang meningkat disiplinnya 61 Orang	61 Orang	70.300.000	80.300.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur PD yang meningkat kapasitasnya 68 Orang	68 Orang	281.910.000	271.491.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	92.200.000	110.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 7 Laporan	7 Laporan	207.165.000	250.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Skoring (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	70,75 Skor (Nilai); 100 %					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan Administrasi Perkantorann	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang terlayani 100 Orang	100 Orang	2.859.675.100	3.200.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran 13 Paket	13 Paket	2.220.460.000	3.066.546.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD			Jumlah Seragam Pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah 200 Stel	200 Stel	146.100.000	125.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai dengan Kompetensinya 60 Orang	60 Orang	326.720.000	550.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 dokumen	2 dokumen	136.025.000	100.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 7 laporan	7 laporan	92.625.000	75.000.000	
			Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pembangunan	Provinsi, SKPD			Jumlah Rakornas Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	658.830.000	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Perhubungan	3 Nilai; 100 %; 70 %					DINAS PERHUBUNGAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	1.508.980.000	2.606.100.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan	Provinsi			Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan. 1 Dokumen	1 Dokumen	49.090.000	85.000.000	
			Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	Luar Daerah			Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Pemberdayaan Masyarakat di STIP 30 orang	30 orang	302.315.000	-	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Presentase aparatur perangkat daerah yangmemanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana aparatur 100 %	100%	1.501.815.000	1.000.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkatkan Disiplin 100 %	100%	153.425.000	-	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 15 orang	15 orang	119.260.000	178.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat daerah diatas 85 % 4 Dokumen	4 Dokumen	103.180.000	158.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Dokumen	5 Dokumen	45.015.000	74.363.625	
			Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Perhubungan	SKPD			tersedianya website Dinas Perhubungan 1 tahun	1 tahun	52.600.000	-	
			Pengumpulan Data Dan Monitoring Pelayananan Jasa Perhubungan	Provinsi			Data Pelayanan Jasa Perhubungan 1 Dokumen	1 Dokumen	70.260.000	55.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)	Provinsi			Beasiswa bagi Taruna/I STTD Tahun 2014, 2015, 2016,2017 dan 2018 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 39 orang Pendaftaran dan Seleksi Calon Taruna/i STTD Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100 orang	39 orang 100 orang	1.788.389.000	1.950.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	4 Nilai; 100 %					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase aparatur yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	1.647.680.000	1.765.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sarana Prasarana Perkantoran Selama 12 bulan 100 %	100%	770.000.000	885.500.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	82.800.000	122.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	168.300.000	422.625.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	345.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 4 Laporan	4 Laporan	45.000.000	48.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	5 Nilai; 100 %					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
			Pelayanan administrasi perkantoran	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	1.415.000.000	1.556.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	159.252.000	175.177.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	77.300.000	85.030.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	56.804.000	62.484.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 dokumen	2 dokumen	130.335.000	132.781.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Dokumen Jumlah buku dan DVD Profil gender dan Anak 100 Paket Jumlah Informasi yang di publikasikan melalui website 100 Informasi	5 Dokumen 100 Paket 100 Informasi	245.718.000	270.289.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %					DINAS SOSIAL

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100% 180 Pegawai	180 Pegawai	2.478.520.000	2.710.197.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 180 pegawai	180 pegawai	277.732.000	460.215.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 180 pegawai	180 pegawai	240.500.000	303.240.000	
			Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Keuangan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah 1 dokumen Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 4 dokumen	1 dokumen 4 dokumen	836.250.000	1.396.500.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %; 2 nilai					DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	3.162.577.627	3.324.968.910	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	606.690.000	1.115.749.197	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	204.000.000	130.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen Perencanaan	2 Dokumen Perencanaan	27.785.000	35.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 100 %	100%	46.565.797	50.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) selama 12 bulan 100 %	100%	432.024.547	532.024.547	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 100 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	2.367.414.105	2.480.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	501.673.175	600.000.000	
			Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	93.000.000	100.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	103.238.614	150.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	103.238.614	150.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 1 Dikumen	1 Dikumen	10.323.861	17.500.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 100 %					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkal Pinang			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	1.520.940.000	1.700.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pangkal Pinang			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	415.200.000	900.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Pangkal Pinang			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	50.000.000	75.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkal Pinang			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 4 Dokumen	4 Dokumen	70.787.783	80.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pangkal Pinang			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 3 Dokumen/laporan	3 Dokumen/laporan	30.000.000	35.000.000	
			Peningkatan Gedung Kantor	Pangkal Pinang			Persentase peningkatan gedung kantor 100 %	100%	3.000.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	4 nilai; 100 %					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 90 %	90%	2.276.500.000	2.578.081.000	
			Penyusunan Buku Pariwisata Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah buku pariwisata daerah yang terpublikasi 225 buku	225 buku	161.700.000	223.373.800	
			Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan KEK	Luar Daerah, Provinsi			Meningkatnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang 3 kawasan	3 kawasan	154.548.000	194.987.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 90 %	90%	338.700.000	1.358.130.900	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata 10 orang	10 orang	167.000.000	117.425.700	
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata daerah yang berkualitas 6 dokumen	6 dokumen	970.000.000	406.148.000	
			Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Musik Rampak Gendang	Provinsi, Luar Daerah			tersedianya alat musik rampak gendang 50 unit	50 unit	523.300.000	-	
			Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung	Provinsi, Belitung			Persentase pelayanan administrasi perkantoran UPT Disbudpar 90 %	90%	500.000.000	575.000.000	
			Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah	Provinsi			Tersusunnya buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah Bangka Belitung 150 buku	150 buku	367.400.000	418.447.050	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahragaan	75 %; 62 Nilai					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, SKPD			Persentase aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	2.651.000.000	2.688.946.167	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 75 %	75%	464.280.000	702.749.250	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD			Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya 106 Pegawai	106 Pegawai	114.500.000	92.085.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya 10 Pegawai	10 Pegawai	67.505.485	67.100.759	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% 6 Dokumen	6 Dokumen	123.060.361	187.215.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Dokumen	5 Dokumen	107.804.876	224.175.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 0					SEKRETARIAT DAERAH
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	25.490.958.000	26.765.505.900	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	18.622.316.900	19.553.432.745	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	982.720.000	1.031.856.000	
			Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	Provinsi, SKPD			Prosentase pelayanankedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah 100 %	100%	2.849.360.000	2.991.828.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %					SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 100 %	100%	25.000.000	50.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 100 %	100%	25.000.000	50.000.000	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	9.527.199.000	10.567.376.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	636.000.000	765.730.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	799.740.000	432.160.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat Nilai Sakip Perangkat daerah	100 %; 0					INSPEKTORAT DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat			Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	1.679.074.030	1.952.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	596.060.000	482.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 85 orang	85 orang	123.800.000	136.180.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 4 Dokumen	4 Dokumen	22.250.000	31.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 7 Dokumen	7 Dokumen	50.775.000	80.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	443.789.000	656.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Sarana dan Prasarana Yang Layak Fungsi; Nilai Indeks Profesionalitas ASN	90 %; 2 NILAI; 87 %; 82 %					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Pegawai BKPSDMD yang terlayani 187 Orang	187 Orang	5.358.200.000	5.380.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor 2 Paket Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpelihara 5 Paket	2 Paket 5 Paket	3.657.032.000	6.125.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	179.395.200	200.000.000	
			Penguatan Kelembagaan / Organisasi	SKPD			Jumlah Laporan 2 Laporan	2 Laporan	226.000.000	150.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya 567 Orang	567 Orang	1.007.786.000	1.025.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Pegawai BKPSDMD yang meningkat disiplinnya 187 Orang	187 Orang	299.175.000	325.000.000	
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Laporan 9 Laporan	9 Laporan	140.299.400	150.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 nilai; 100 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
									-	-	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	8.723.910.000	11.628.036.894	
			Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur	SKPD			Jumlah pakaian dinas untuk ASN dan THL di Lingkungan BAKUDA 424 paket	424 paket	475.620.000	-	
			Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 3 dokumen	3 dokumen	31.952.742	47.250.000	
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	SKPD			Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya setelah mengikuti Bimtek/Diklat 15 orang	15 orang	148.920.000	315.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	3.425.173.419	5.769.101.625	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 7 laporan	7 laporan	31.952.742	47.250.000	
			Pengelolaan Kehumasan pada Bakuda	Provinsi			Jumlah bulan layanan Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA 12 bulan	12 bulan	74.090.000	146.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan; Predikat nilai SAKIP perangkat daerah	100 %; 0 B					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 203 orang	203 orang	5.158.084.500	6.224.232.200	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 203 orang	203 orang	884.201.000	5.426.347.895	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah aparatur yang meningkat disiplinnya 203 orang	203 orang	198.624.000	50.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	65.248.000	133.865.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah 6 Dokumen/laporan	6 Dokumen/laporan	91.275.000	109.560.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 100 %					DINAS PANGAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	1.287.400.000	1.650.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	490.000.000	1.200.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 98 Persen	98 Persen	60.000.000	80.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD					120.000.000	150.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Persentase capaian dokumen perencanaan 90 persen	90 persen	330.050.247	528.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 100 %	100%	50.600.000	60.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	2 Nilai; 100 %					BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Terfasilitasi selama 12 Bulan 66 Orang	66 Orang	5.000.000.000	5.500.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Sarana Prasarana Perkantoran selama 12 Bulan 66 Orang	66 Orang	551.925.000	650.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Meningkat Disiplinnya 66 Orang	66 Orang	82.820.000	90.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Meningkat Kualitas dan Kapasitasnya 33 Orang	33 Orang	367.600.000	185.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah 3 Dokumen	3 Dokumen	110.000.000	121.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah 5 Laporan	5 Laporan	45.000.000	49.500.000	
			Pembelian Lahan Untuk Badan Penghubung di Jakarta	Luar Daerah, SKPD			Luas lahan yang dibeli untuk pembangunan kantor Badan Penghubung Provinsi di Jakarta 500 m2	500 m2	10.297.015.335	-	
			Pembelian Lahan untuk Asrama Mahasiswa Bangka Belitung	Luar Daerah, SKPD			Luas lahan yang dibeli untuk pembangunan asrama mahasiswa Bangka Belitung di Jakarta dan sekitarnya, Bandung dan sekitarnya serta Palembang dan sekitarnya 300 m2	300 m2	6.600.000.000	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 3 NILAI; 100 %					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	1.700.425.000	1.785.446.250	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 %	100%	226.820.000	238.161.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Peningkatan Displin Paratur 100 %	100%	87.000.000	91.350.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi Serta Keuangan Perangkat Daerah	SKPD			Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan 100 %	100%	297.952.023	312.849.624	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 75 %					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 60 Orang	60 Orang	2.031.800.000	2.321.101.419	
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 60 Orang	60 Orang	412.391.100	80.864.847.000	
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 60 Orang	60 Orang	40.000.000	102.427.500	
			Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Laporan	5 Laporan	81.976.500	110.980.000	
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	100.315.300	198.255.750	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 60 Orang	60 Orang	76.500.000	102.600.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %; 3 Nilai					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	2.075.679.114	2.268.713.070	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	207.503.047	299.778.199	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 Persen	100 Persen	90.600.000	95.130.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 Persen	100 Persen	437.470.000	459.343.500	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	146.875.000	49.500.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Laporan	5 Laporan	57.124.000	60.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	5 Nilai; 80 %					DINAS PERTANIAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, SKPD			Persentase aparatur perangkat daerah yang terlayani 100 %	100%	5.218.230.000	5.268.230.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi operasional satuan kerja perangkat daerah 100 %	100%	1.102.300.000	1.202.300.000	
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada satuan kerja 100 %	100%	647.320.000	850.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Meningkatnya kemampuan aparatur PNS 100 %	100%	196.600.000	300.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan disiplin aparatur	SKPD			Persentase peningkatan disiplin aparatur 100 %	100%	257.915.000	270.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Persentase Pelayanan Dinas Kehutanan	100 %					DINAS KEHUTANAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka Tengah, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Belitung, Bangka Selatan			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	2.075.840.000	2.100.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	2.177.815.000	4.500.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 158 Orang	158 Orang	522.000.000	300.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	325.000.000	325.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 90 %	90%	116.599.900	125.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 95 %	95%	41.895.000	45.000.000	
			Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Tersedianya sistem informasi pembangunan kehutanan 1 Unit	1 Unit	450.550.000	250.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 ; 100 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD, Pangkal Pinang			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	1.751.120.000	3.869.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	1.324.655.000	3.695.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD, Pangkal Pinang			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	154.500.000	150.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mengikat Pelatihan 25 Orang	25 Orang	100.000.000	300.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang			Persentase perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah 87 %	87%	70.000.000	200.000.000	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang			Persentase capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi 95 %	95%	56.000.000	280.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 100 %					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	2.066.084.000	3.319.905.960	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	1.257.740.000	6.982.935.500	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	215.500.000	100.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	468.108.000	1.546.377.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	766.360.000	418.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 4 Dokumen	4 Dokumen	125.268.000	210.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 100 %					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 132 orang	132 orang	2.729.160.000	2.293.893.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 132 orang	132 orang	586.255.000	581.880.000	
			Peningkatan Disipilin Aparatur	SKPD			Jumlah Pegawai 134 orang	134 orang	146.400.000	227.865.750	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 39 orang	39 orang	100.000.000	148.604.400	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 dokumen	2 dokumen	150.000.000	227.865.750	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90% 5 Jenis Dokumen	5 Jenis Dokumen	67.450.000	70.822.500	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	2 nilai; 100 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 59 Orang	59 Orang	1.525.622.000	1.718.088.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 59 orang	59 orang	242.380.000	2.226.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 59 orang	59 orang	63.725.000	120.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 laporan	2 laporan	93.815.400	300.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 laporan	5 laporan	75.800.000	124.740.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	2 Nilai; 80 %					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 80 %	80%	1.703.180.000	1.695.939.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	1.094.500.000	10.143.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 80 %	80%	95.000.000	60.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 80 %	80%	204.125.000	300.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah Dengan Tingkat Konsistensinya Terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah Diatas 85% 3 Dokumen	3 Dokumen	405.171.323	350.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 7 Jenis Dokumen	7 Jenis Dokumen	171.006.094	200.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 persen					RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi			Persentase pelayanan administrasi perkantoran 85 persen	85 persen	6.306.270.000	8.825.653.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi			persentase peningkatan saran dan prasarana aparatur 100 persen	100 persen	2.060.600.000	2.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi			terpenuhinya pakaian khusus RS 100 persen	100 persen	459.375.000	150.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi			persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 persen	100 persen	1.038.236.500	550.000.000	
			Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Provinsi			persentase peningkatan pengembangan capaian kinerja dan keuangan 100 persen	100 persen	30.199.464	210.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat Kepuasan Aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	80 persen					RUMAH SAKIT JIWA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan 12 bulan	12 bulan	3.158.235.000	4.999.479.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan 12 bulan	12 bulan	1.940.366.000	10.066.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah pakaian dinas harian (PDH) lengkap dengan atributnya dan kemeja putih yang dibeli 1 tahun	1 tahun	395.920.000	2.650.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Aparatur	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Persentase peningkatan kapasitas aparatur 80 persen	80 persen	6.783.000.000	10.077.450.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	96.634.000	106.297.400	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Laporan Kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Laporan	5 Laporan	100.000.000	440.000.000	
			Pendidikan								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Ekonomi*	Meningkatnya Ekonomi Daerah*	**Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka**		Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	76,61 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Provinsi, Bangka, Pangkal Pinang			Jumlah sekolah terlayani 26 Sekolah	26 Sekolah	11.200.000.000	9.500.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah Siswa SMA N 4 Pangkalpinang terlayani 631 Siswa	631 Siswa	883.400.000	1.135.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah siswa SLB N Pangkalpinang terlayani 223 Siswa	223 Siswa	1.338.000.000	1.498.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	Provinsi, Bangka			Jumlah siswa SMKN 1 Sungailiat terlayani 1.036 Siswa	1.036 Siswa	1.657.600.000	2.184.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	Provinsi, Bangka			Jumlah siswa SMK N 2 Sungailiat terlayani 627 Siswa	627 Siswa	1.003.200.000	1.382.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangk	Provinsi, Bangka			Jumlah siswa SMKN 1 Mendobarat terlayani 258 Siswa	258 Siswa	412.800.000	642.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	Provinsi, Bangka			Jumlah siswa SMKN 1 Belinyu terlayani 380 Siswa	380 Siswa	608.000.000	728.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	Provinsi, Bangka			Jumlah siswa SMK N 1 Bakam terlayani 361 Siswa	361 Siswa	577.600.000	562.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	Provinsi, Bangka			Jumlah siswa SMAN 1 Bakam terlayani 228 Siswa	228 Siswa	319.200.000	585.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	Provinsi, Bangka			Jumlah siswa SMAN 1 Belinyu Terlayani 504 Siswa	504 Siswa	705.600.000	925.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Provinsi, Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Mendobarat terlayani 521 Siswa	521 Siswa	729.400.000	936.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalpinang terlayani 797 Siswa	797 Siswa	1.360.000.000	1.704.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Provinsi, Bangka			Jumlah Siswa SMAN 2 Mendobarat terlayani 212 Siswa	212 Siswa	296.800.000	372.600.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	Provinsi, Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Merawang terlayani 415 Siswa	415 Siswa	581.000.000	806.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	Provinsi, Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Pemali terlayani 801 Siswa	801 Siswa	1.121.400.000	1.440.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Provinsi, Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Puding Besar terlayani 485 Siswa	485 Siswa	679.000.000	937.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	Provinsi, Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Riau Silip terlayani 322 Siswa	322 Siswa	450.800.000	608.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	Provinsi, Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Sungailiat terlayani 898 Siswa	898 Siswa	1.250.200.000	1.600.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Provinsi, Bangka			Jumlah siswa SMA N 2 Puding Besar terlayani 97 Siswa	97 Siswa	250.000.000	288.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	Provinsi, Bangka			Jumlah Siswa SLB N Sungailiat terlayani 99 Siswa	99 Siswa	594.000.000	742.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah Siswa Terlayani di SMK N 1 Pangkalpinang 1.573 Siswa	1.573 Siswa	2.516.800.000	3.000.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah Siswa SMK N 3 Pangkalpinang terlayani 705 Orang	705 Orang	1.128.000.000	1.186.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah siswa SMK N 4 Pangkalpinang terlayani 550 Orang	550 Orang	880.000.000	1.100.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah siswa SMK N 5 Pangkalpinang terlayani 337 Siswa	337 Siswa	539.200.000	744.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalpinang terlayani 868 Siswa	868 Siswa	1.215.200.000	1.434.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah Siswa SMA N 2 Pangkalpinang terlayani 768 Siswa	768 Siswa	1.075.200.000	1.337.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah Siswa SMA N 3 Pangkalpinang terlayani 884 Siswa	884 Siswa	1.237.600.000	1.488.600.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat		Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat	76,61 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah Sekolah terlayani 13 Sekolah	13 Sekolah	3.778.800.000	5.500.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Parit Tiga terlayani 405 Siswa	405 Siswa	576.000.000	790.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Simpang Teritip Terlayani 631 Siswa	631 Siswa	883.400.000	1.121.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah Siswa SMA N 1 Tempilang terlayani 363 Siswa	363 Siswa	508.200.000	673.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah siswa SLB N Muntok terlayani 75 Siswa	75 Siswa	450.000.000	595.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah Siswa SMK N 1 Muntok Terlayani 715 Siswa	715 Siswa	1.144.000.000	1.394.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah siswa SMK N 1 Kelapa terlayani 551 Siswa	551 Siswa	881.600.000	1.172.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah siswa SMK N 1 Parit tiga terlayani 687 Siswa	687 Siswa	1.099.200.000	1.278.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah Siswa SMK N 1 Tempilang terlayani 268 Siswa	268 Siswa	428.800.000	664.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah Siswa SMK N 1 Simpang Teritip Terlayani 64 Siswa	64 Siswa	250.000.000	256.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Jebus terlayani 625 Siswa	625 Siswa	875.000.000	1.126.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Kelapa Terlayani 631 Siswa	631 Siswa	883.400.000	1.139.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Muntok terlayani 646 Siswa	646 Siswa	904.400.000	1.105.200.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan		Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	76,61 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah sekolah terlayani 27 Sekolah	27 Sekolah	11.569.800.000	14.000.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalan Baru terlayani 454 Siswa	454 Siswa	635.600.000	898.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 1 Sungaiselan 236 Siswa	236 Siswa	330.400.000	475.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 2 Sungaiselan terlayani 548 Siswa	548 Siswa	767.200.000	1.049.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah Siswa SMA Laskar Pelangi Terlayani 64 Siswa	64 Siswa	540.000.000	1.080.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah siswa SLB N Koba terlayani 72 Siswa	72 Siswa	432.000.000	490.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Toboali terlayani 715 Siswa	715 Siswa	1.144.000.000	1.574.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Payung terlayani 342 Siswa	342 Siswa	547.200.000	726.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Pulau Besar Terlayani 89 Siswa	89 Siswa	250.000.000	300.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Tukak Sadai terlayani 316 Siswa	316 Siswa	505.600.000	690.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Simpang Rimba terlayani 153 Siswa	153 Siswa	250.000.000	300.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah Siswa SMK N 1 Koba Terlayani 508 Siswa	508 Siswa	812.800.000	1.394.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah Siswa SMK N 1 Air Gegas terlayani 325 Siswa	325 Siswa	520.000.000	812.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Air Gegas terlayani 584 Siswa	584 Siswa	817.600.000	1.105.200.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Lepar Pongok Terlayani 238 Siswa	238 Siswa	333.200.000	486.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah siswa SMAN 1 Kep. Pongok terlayani 195 Siswa	195 Siswa	273.000.000	405.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Payung terlayani 596 Siswa	596 Siswa	834.400.000	1.117.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Pulau Besar terlayani 145 Siswa	145 Siswa	250.000.000	318.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N Simpang Rimba terlayani 397 Siswa	397 Siswa	555.800.000	770.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Toboali terlayani 873 Siswa	873 Siswa	1.222.200.000	1.630.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 2 Toboali terlayani 476 Siswa	476 Siswa	666.400.000	918.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah siswa SLB N Toboali terlayani 77 Siswa	77 Siswa	462.000.000	630.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah siswa SMK N 2 Koba terlayani 748 Siswa	748 Siswa	1.196.800.000	1.540.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah Siswa SMK N 1 Simpang katis terlayani 751 Siswa	751 Siswa	1.201.600.000	1.584.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalan baru terlayani 864 Siswa	864 Siswa	1.382.400.000	1.800.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah Siswa SMK N 1 Sungai Selan Terlayani 236 Siswa	236 Siswa	377.600.000	510.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 1 Koba terlayani 658 Siswa	658 Siswa	921.200.000	1.249.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 1 LubukBesar terlayani 421 Siswa	421 Siswa	589.400.000	817.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 1 Namang terlayani 407 siswa	407 siswa	569.800.000	808.200.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur		Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	76,61 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	Provinsi, Belitung Timur, Belitung			Jumlah sekolah terlayani 20 Sekolah	20 Sekolah	7.754.640.000	10.000.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Provinsi, Belitung			Jumlah siswa SMA N 2 Tanjungpandan terlayani 757 Siswa	757 Siswa	1.061.200.000	1.420.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Provinsi, Belitung			Jumlah siswa SLB N Tanjungpandan terlayani 131 Siswa	131 Siswa	441.000.000	705.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah siswa SMK N 1 Manggar Terlayani 630 Siswa	630 Siswa	982.400.000	1.388.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah siswa SMK N 1 Kelapa Kampit terlayani 509 Siswa	509 Siswa	804.800.000	1.082.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah siswa SMK N 1 Dendang terlayani 138 Siswa	138 Siswa	828.000.000	1.190.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah siswa SMK N 1 Simpang Renggiang terlayani 148 Siswa	148 Siswa	305.600.000	360.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Damar terlayani 323 Siswa	323 Siswa	453.600.000	639.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Gantung terlayani 625 Siswa	625 Siswa	873.600.000	1.182.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Kelapa kampit terlayani 434 Siswa	434 Siswa	602.000.000	838.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Manggar terlayani 612 Siswa	612 Siswa	929.600.000	1.159.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	Provinsi, Belitung			Jumlah siswa SMK N 1 Tanjungpandan terlayani 1.073 Siswa	1.073 Siswa	1.574.400.000	2.200.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Simpang Pesak terlayani 461 Siswa	461 Siswa	638.400.000	887.400.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah siswa SLB N Manggar terlayani 94 Siswa	94 Siswa	564.000.000	770.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	Provinsi, Belitung			Jumlah siswa SMK N 2 Tanjungpandan terlayani 770 Siswa	770 Siswa	1.236.800.000	1.604.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	Provinsi, Belitung			Jumlah siswa SMK N 3 Tanjungpandan terlayani 500 Siswa	500 Siswa	812.800.000	1.064.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	Provinsi, Belitung			Jumlah siswa SMK N Badau Terlayani 491 Siswa	491 Siswa	782.400.000	1.046.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	Provinsi, Belitung			Jumlah Siswa SMK N 1 Selat nasik Terlayani 132 Siswa	132 Siswa	250.000.000	328.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	Provinsi, Belitung			Jumlah siswa SMA N 1 Membalong terlayani 464 Siswa	464 Siswa	641.200.000	892.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	Provinsi, Belitung			Jumlah siswa SMA N 1 Sijuk terlayani 475 Siswa	475 Siswa	663.600.000	912.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Provinsi, Belitung			Jumlah siswa SMA N 1 Tanjungpandan terlayani 691 Siswa	691 Siswa	967.400.000	1.301.400.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan-		Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal; Persentase SMK Pertaniaan Terkareditasi A; Persentase SMK Pertanian dan Peternakan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) ; Persentase SMK Kelautan dan perikanaan Terkareditasi l A; Persentase SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) ; Persentase SMK pariwisata Terkareditasi A; Persentase SMK Program Keahlian Pariwisata memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) ; Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin; APK SMK; Rata-rata nilai UN SMA;	100 Persen; 100 Persen; 0 %; 50 Persen; 50 Persen; 100 Persen; 33,33 Persen; 100 Persen; 34,98 Persen; 6,4 Poin; 100 Persen; 100 Persen; 0 Persen; 36,17 Persen; 33,72 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kleembagaan SMK	Provinsi, SKPD, Bangka, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Terlaksananya Rehabilitasi SMK 10 Paket Terlaksananya Gebyar SMK 1 Kali Terbangunnya RKB SMK 2 Ruang Tersedianya Meubelair SMK 10 Set Terbangunnya RPS SMK 3 Ruang Tersedianya Bengkel Produktif SMK 1 Unit Terlaksananya Revitasilitasi Prodi SMK 56 Sek Terbangunnya pagar SMK 2 Paket Tersedianya Buku Perpustakaan SMK 1 Paket	10 Paket 1 Kali 2 Ruang 10 Set 3 Ruang 1 Unit 56 Sek 2 Paket 1 Paket	6.000.000.000	18.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	Provinsi, SKPD			Pelaksanaan Lomba-lomba Siswa SMK 7 Jenis Sekolah melaksanakan pendidikan karakter 56 Sekolah Terlaksananya pembinaan kesiswaan SMK 56 Sekolah	7 Jenis 56 Sekolah 56 Sekolah	6.000.000.000	6.500.000.000	
			Pengembangan Kurikulum SMK	Provinsi, SKPD			Terlaksananya pengembangan kurikulum SMK 56 Sekolah Tersedianya analisis instrumen kurikulum SMK 1 Dok Tersedianya Bank Soal Penilaian SMK 1 Dok Tersedianya Assesor 30 Orang SMK memiliki TUK 25 Sekolah SMK melaksanakan UNBK 56 Sekolah	56 Sekolah 1 Dok 1 Dok 30 Orang 25 Sekolah 56 Sekolah	2.283.710.000	3.000.000.000	
			Pemberian Beasiswa Siswa SMK	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Siswa Tidak Mampu terbiayai 1.074 Siswa	1.074 Siswa	1.400.000.000	2.170.800.000	
			Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Terbangunnya RKB SMK 4 Ruang Terbangunnya RPS 25 Unit Tersedianya rumah dinas /asrama 4 Unit Tersedianya peralatan Praktik Siswa 0 Paket Terbangunnya WC/KM Siswa 0 Unit	4 Ruang 25 Unit 4 Unit 0 Paket 0 Unit	14.906.000.000	20.000.000.000	
			Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)		Persentase Sekolah penerima BOS	100 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Provinsi, Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	446.000.000	500.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.180.200.000	1.250.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	882.000.000	950.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.190.000.000	1.267.213.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	2.202.200.000	2.378.533.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	987.000.000	989.383.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	767.200.000	800.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	473.200.000	537.138.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	319.200.000	350.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	704.200.000	750.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	729.400.000	800.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	Provinsi, Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	198.000.000	200.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	295.400.000	350.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Merawang (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	581.000.000	600.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pemali (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.118.600.000	1.150.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Puding Besar (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	677.600.000	700.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Puding Besar (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	134.400.000	200.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Riau Silip (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	450.800.000	500.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.250.200.000	1.300.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	504.000.000	550.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	532.000.000	550.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	359.800.000	396.679.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	150.000.000	170.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.450.400.000	1.639.197.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	872.200.000	1.027.971.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Jebus (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	873.600.000	900.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	880.600.000	900.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	903.000.000	950.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	567.000.000	600.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	879.200.000	900.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	508.200.000	550.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	770.000.000	805.707.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.002.400.000	1.026.427.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	154.000.000	170.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	960.400.000	1.000.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	375.200.000	426.006.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Koba (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	919.800.000	950.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	588.000.000	600.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Namang (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	569.800.000	600.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	645.400.000	700.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	330.400.000	350.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	767.200.000	800.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Koba (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	711.200.000	750.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Koba (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.050.000.000	1.211.647.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	144.000.000	165.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.209.600.000	1.349.019.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.051.400.000	1.102.059.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	330.400.000	350.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	817.600.000	850.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kep. Pongok (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	273.000.000	350.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lepar Pongok (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	333.200.000	350.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Payung (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	833.000.000	850.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	203.000.000	250.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	554.400.000	338.026.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.222.200.000	1.250.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	220.000.000	250.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Toboali (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	666.400.000	700.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	455.000.000	569.551.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	124.600.000	158.980.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Payung (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	478.800.000	510.898.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	214.200.000	250.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.001.000.000	1.071.189.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	442.400.000	500.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Membalong (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	641.200.000	700.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	663.600.000	700.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	967.400.000	1.000.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.061.200.000	1.100.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	182.000.000	200.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Badau (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	684.600.000	706.923.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	210.000.000	250.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.377.600.000	1.657.719.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.082.200.000	1.210.104.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	711.200.000	771.750.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Damar (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	453.600.000	500.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Gantung (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	873.600.000	900.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	602.000.000	650.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	928.200.000	1.000.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.213.800.000	1.300.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Pesak (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	639.800.000	650.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Dendang (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	193.200.000	282.460.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	704.200.000	705.379.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	859.600.000	929.187.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Renggiang (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	267.400.000	350.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	1.073.800.000	1.150.000.000	
	Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia*	Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas SDM*	**Program Peningkatan dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas-**		Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin; APK SMA,; Persentase SMA terakreditasi A; Rata-rata nilai UN SMA; APK SMA Perempuan; APK SMA Laki-Laki	100 Persen; 35,29 Persen; 37,88 Persen; 6,3 point; 39,25 Persen; 31,55 %					DINAS PENDIDIKAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Tersedianya Peralatan Lab SMA 1 Paket Tersedianya Meubelair SMA 15 Unit Lab SMA Terbangun 1 Ruang Jumlah RKB SMA Terbangun 2 Ruang Pagar Sekolah terbangun 2 Sek Ruang SMA yang Direhabilitasi 4 Paket Tersedianya Peralatan CBT SMA 3 Paket Pembangunan RPL 1 Paket Tersedianya Buku Perpusatakaan SMA 1 Paket	1 Paket 15 Unit 1 Ruang 2 Ruang 2 Sek 4 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket	7.000.000.000	11.000.000.000	
			Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	Provinsi, SKPD			Terlaksananya Kegiatan Kesiswaan di SMA 67 Sek Terlaksananya Pendidikan Karakter Siswa SMA 201 Siswa Terlaksananya Lomba-lomba siswa SMAi 7 Jenis	67 Sek 201 Siswa 7 Jenis	7.000.000.000	8.000.000.000	
			Pengembangan Kurikulum SMA	Provinsi, SKPD			SMA melaksanakan pendidikan karakter 67 Sekolah SMA melaksanakan UNBK 67 Sekolah Guru SMA mengikuti pelatihan Kurikulum 67 Sekolah	67 Sekolah 67 Sekolah 67 Sekolah	1.800.000.000	3.500.000.000	
			Pemberian Beasiswa Siswa SMA	Provinsi, SKPD			Jumlah siswa SMA tidak mampu mendapat beasiswa 1.437 Siswa	1.437 Siswa	1.800.000.000	2.982.000.000	
			Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang			Tersedianya Sarpras SMA 23 Sekolah Jumlah RKB Terbangun 30 Ruang Tersedianya peralatan Praktik Siswa 22 Paket Terbangunnya WC/KM Siswa 0 Paket Sekolah yang direhalitasi 0 Paket Terbangunnya RPS 0 Ruang	23 Sekolah 30 Ruang 22 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Ruang	2.319.000.000	17.000.000.000	
			Program Peningkatanan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus-		APK SLB; Persentase SLB terakreditasi A	22,95 Persen; 100 Persen					DINAS PENDIDIKAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Tersedianya meubelair SLB 9 Paket SLB yang direhabilitasi 4 Paket Tersedianya Ruang Penunjang Lainnya 1 Paket Tersedianya Kendaraan Operasional SLB 2 Unit	9 Paket 4 Paket 1 Paket 2 Unit	1.127.475.000	2.500.000.000	
			Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	Provinsi, SKPD			Terbinanya kegiatan kesiswaan di SLB 9 Sekolah Terlaksananya lomba-lomba siswa dan GTK SLB 4 Jenis	9 Sekolah 4 Jenis	1.500.000.000	1.550.000.000	
			Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	Provinsi, SKPD			Jumlah SLB yang menerapkan Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2006 9 Sekolah Jumlah SLB melaksanakan pendidikan keluarga 9 Sekolah	9 Sekolah 9 Sekolah	800.000.000	850.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	Provinsi, SKPD			Terlaksananya pelayanan Pusat layanan Autis 12 Bulan	12 Bulan	1.400.000.000	2.700.000.000	
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)	Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang			Tersedianya RKB SLB 39 Unit Terlaksananya Rehabilitasi SLB 1 Paket Tersedianya Asrama SLB 0 Unit Tersedianya peralatan Praktik Siswa 0 Paket	39 Unit 1 Paket 0 Unit 0 Paket	5.059.000.000	6.000.000.000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan-		Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4, ; Persentase Guru Bersertifikat Pendidik; Persentase guru dengan Nilai Rata-rata Kompetensi Guru minimal 50	95 Persen; 36 Persen; 85 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Mutu PTK SMA	Provinsi, SKPD			Tersedianya analisis kebutuhan guru SMA 1 Dokumen Jumlah guru dan tenaga kependidikan terlatih 420 Orang Jumlah guru SMA menerima beasiswa S1 dan S2 5 Orang	1 Dokumen 420 Orang 5 Orang	1.482.994.000	2.500.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Mutu PTK SMK	Provinsi, SKPD			Tersedianya analisis kebutuhan guru SMK 1 Dok Jumlah guru SMK menerima beasiswa S1 dan S2 5 Orang Jumlah guru dan Tenaga Kependidikan terlatih 405 Orang	1 Dok 5 Orang 405 Orang	1.800.000.000	3.000.000.000	
			Peningkatan Mutu PTK SLB	Provinsi, SKPD			Jumlah guru dan Tenaga kependidikan SLB terlatih 120 Orang Terlatihnya guru sekolah inklusi 50 Orang Guru SLB menerima beasiswa S1 5 Orang Tersedianya analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SLB 1 Dokumen	120 Orang 50 Orang 5 Orang 1 Dokumen	1.300.000.000	2.000.000.000	
			Kesehatan								
	Peningkatan Ekonomi*	Meningkatnya Ekonomi Daerah*	**Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP**		Pertumbuhan pendapatan BLUD RSUP	90 persen					RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
			Pelayanan dan Pendukung pelayanan	Provinsi			Persentase tingkat kepuasan pelayanan pasien 100 persen	100 persen	3.000.000.000	3.500.000.000	
	Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia*	Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas SDM*	**Program Kesehatan Masyarakat**		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita ; Angka kematian ibu per kelahiran hidup; Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup; Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru pertahun; Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat; Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	14,35 %; 23 per kelahiran hidup; 7,2 per seribu kelahiran hidup; 70 %; 79,46 %; 63 %					DINAS KESEHATAN
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Provinsi			Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun 70 %	70%	947.367.852	994.736.245	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Upaya Peningkatan kesehatan Keluarga	Provinsi			Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun 70 %	70%	906.934.652	952.281.385	
			Penurunan kematian Ibu	Provinsi			Angka kematian ibu per kelahiran hidup 23 per kelahiran hidup	23 per kelahiran hidup	1.435.172.761	1.506.931.399	
			Penurunan angka kematian bayi	Provinsi			Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 7,2 per 1000 kelahiran hidup	7,2 per 1000 kelahiran hidup	1.117.376.527	1.173.245.353	
			Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga	Provinsi			Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 14,35 %	14,35 %	1.899.240.600	1.994.202.630	
			Peningkatan Penyehatan lingkungan	Provinsi			Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat 79,46 %	79,46 %	1.289.077.330	1.353.531.197	
			peningkatan kesehatan kerja dan olahraga	Provinsi			Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga 63 %	63%	326.435.630	342.757.412	
			BOX PROVINSI (Dak Non Fisik)				Persentase Status Kesehatan Masyarakat 70 %	70%	1.822.332.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Proram Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Persentase kab/kota yang 20% Puskesmasnya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa; Persentase perempuan usia 30 s.d 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara; Persentase anggaran pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, Diabetes Melitus); Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes Rate minimal 85%); Prevalensi HIV pada penduduk beresiko; Jumlah Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria; Persentase kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon; persentase anggaran penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ispa, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	80 %; 17,5 %; 85 %; 71,4 %; 10 %; 85,71 %; 80 %; 86 %					DINAS KESEHATAN
			pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB	Provinsi			Persentase Kabupaten/ Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85%Persentase Kabupaten/ Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85% 71,4 %	71,4 %	257.815.466	270.706.239	
			Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV	Provinsi			Prevalensi HIV (persen) pada penduduk beresiko 5 %	5%	644.796.480	677.036.304	
			Peningkatan pengendalian penyakit malaria	Provinsi			Jumlah Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria 85,71 %	85,71 %	257.815.466	270.706.239	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	Provinsi			persentase anggaran penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD , zoonosis) 86 %	86%	859.384.887	902.354.131	
			Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker	Provinsi			Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara 17,5 %	17,5 %	128.907.733	135.353.120	
			Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes militus)	Provinsi			Persentase anggaran pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, Diabetes Melitus) 85 %	85%	257.815.466	270.706.239	
			Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa	Provinsi			Persentase kab/kota yang 20% Puskesmasnya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa 80 %	80%	773.446.398	812.118.718	
			Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus	Provinsi			Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon 80 %	80%	2.562.301.600	1.353.531.197	
			Program Pelayanan Kesehatan		Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi; Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional; Persentase kepesertaaan JKN; Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	25 kecamatan; 9 RSUD; 64 %; 60 %					DINAS KESEHATAN
			Peningkatan pelayanan kesehatan primer	Provinsi			Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 25 kecamatan	25 kecamatan	1.718.769.773	1.804.708.262	
			Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Provinsi			Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional 9 RSUD	9 RSUD	1.718.769.773	1.804.708.262	
			Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat	Provinsi			Persentase kepesertaan JKN 64 %	64%	17.596.533.750	16.511.405.828	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	Provinsi			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional 60 %	60%	515.630.932	541.412.479	
			Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan		Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif); Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial; Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	3.310 orang; 90 %; 90 %					DINAS KESEHATAN
			Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan / SDMK	Provinsi			Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) 3.310 orang	3.310 orang	1.784.437.091	1.873.658.946	
			Peningkatan pelayanan kefarmasian	Provinsi			Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial 90 %	90%	1.281.527.634	1.345.604.016	
			Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT	Provinsi			Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 90 %	90%	285.797.897	300.087.792	
			Kefarmasian Dinkes Provinsi (Dak Fisik)				Persentasi Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan 70 %	70%	883.215.000	-	
			Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan		Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	1.800 sampel					DINAS KESEHATAN
			Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis laboratorium kesehatan	Provinsi			Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar 1.800 sampel	1.800 sampel	1.280.789.200	3.649.124.126	
			Akreditasi Laboratorium (DAK Non Fisk)				Jumlah Pelayanan Pemeriksaan Labolatorium Kesehatan Sesuai Standar 1.800 Sampel	1.800 Sampel	161.730.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Teknis Keperawatan		1. Survey kepuasan pasien terhadap pelayanan publik pelayanan teknis keperawatan RSUP, 2.LOS (Length of Stay), 3. Tingkat kelulusan akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi	70 persen					RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
			Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Provinsi			persentase akrediatsi pelayanan RS 100 persen	100 persen	5.786.945.000	3.745.964.000	
			Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis		1. Survey kepuasan pasien terhadap pelayanan publik ,pelayanan teknis medis dan penunjang medis RSUP, 2. Persentase ketersediaan obat,peralatan dan perbekalan kesehatan, 3. Persentase ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit, 4. Rasio korban bencana dengan tenaga kesehatan yang dikirim, 5. Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	70 persen					RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Provinsi			persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 100 persen	100 persen	5.634.790.000	5.500.000.000	
			Upaya Kesehatan Masyarakat	Provinsi			persentase mayarakat yang dilayani sesuai standar 100 persen	100 persen	11.407.027.462	13.000.000.000	
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum		1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit, 2. Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di Rumah Sakit	80 persen					RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi			persentase promosi layanan kesehatan 100 persen	100 persen	196.710.000	251.710.000	
			Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Provinsi			persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RS 100 persen	100 persen	2.462.604.000	18.580.663.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Provinsi			persentase sarana dan prasarana RS yang dipelihara 100 persen	100 persen	5.805.000.000	5.950.000.000	
			Pembangunan Gedung B	Provinsi			persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RS 100 persen	100 persen	40.814.200.000	-	
			Pembangunan dan Lanjutan Pembangunan Gedung Kelas III Rumah Sakit	Provinsi			persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RS 100 persen	100 persen	4.578.980.000	-	
			Review DED dan Masterplan	Provinsi			persentase pembuatan DED dan Masterplan Rumah Sakit 100 persen	100 persen	2.000.000.000	-	
			Perluasan IPAL	Provinsi			persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RS 100 persen	100 persen	699.090.000	-	
			Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK)	Provinsi			persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RS 100 persen	100 persen	44.459.000.000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ		Pertumbuhan Pendapatan BLUD RSJ	75 persen					RUMAH SAKIT JIWA
			Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD						7.500.000.000	8.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza		Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan pelayanan kesehatan; Persentase Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi; Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan publik pelayanan teknis medik kejiawaan; Tingkat Kelulusan Akreditasi RS Jiwa yang memenuhi standar akreditasi; Persentase masyarakat yang direhabilitasi sosial yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa; Persentase korban pasca bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	90 Persen; 42 Hari; 80 Persen; 80 Persen; 80 persen; 75 Persen					RUMAH SAKIT JIWA
			Penyusunan Clinical Pathway dan Discharge Planning ODGJ	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Diagnosa Medis dan kunjungan ke ODGJ 7 Kab/Kota 100 Persen	100 Persen	556.190.000	661.809.000	
			Penjangkauan Bebas Pasung	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Kabupaten/Kota Penjangkauan Pasien Pasung 7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	350.000.000	370.000.000	
			Promosi Kesehatan Jiwa	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Promosi yang dilaksanankan 2 Kegaiatan promosi	2 Kegaiatan promosi	150.000.000	320.000.000	
			Survey Kepuasan Masyarakat	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat ke Kab/Kota 100 Persen	100 Persen	50.500.000	55.500.000	
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah makanan dan minuman pasien, petugas khusus dan petugas bulan puasa 100 persen	100 persen	6.683.570.000	2.173.665.600	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza		Persentasi penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi; Rata-rata lama rawat/ Average Length Of Stay (ALOS); Persentase ketersediaan pelayanan sesuai standar; Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan, Pelayanan Tekhnis Keperawatan Kejiwaan; Persentase Kabupaten/Kota yang terintegrasi pelayanan kesehatan jiwa	55 persen; 90 Persen; 75 persen; 100 Persen; 100 Persen					RUMAH SAKIT JIWA
			Pelayanan Rehabilitasi Psikososial	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Pelayanan rehabilitasi Mental sosial, Napza dan tumbuh kembang anak dan remaja yang terlaksana 14 jenis terapi	14 jenis terapi	800.000.000	880.000.000	
			Penyusunan Panduan Praktik Klinis	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktik Klinis 5 Dokumen	5 Dokumen	40.500.000	-	
			Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan homevisite	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Petugas Puskesmas dan Masyarakat yang mendapatkan informasi Pelayanan Kesehatan Jiwa 7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	213.018.283	615.000.000	
			Penyusunan standar pelayanan medis dan penunjang medis	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis 10 Buku	10 Buku	120.000.000	-	
			Penilaian Akreditasi	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Sertifikat Akreditasi dari Tim KARS 1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000	536.000.000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa		Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ; Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan Kejiwaan dan NAPZA; Persentase Obat dan Perbekalan Kesehatan	90 Persen; 70 persen; 95 Persen					RUMAH SAKIT JIWA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah alat kesehatan yang dibeli 1 paket	1 paket	1.035.815.000	1.139.396.500	
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah gedung rumah sakit yang terawat 1 tahun	1 tahun	918.000.000	255.000.000	
			Rehabilitasi Gedung Laundry	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah gedung laundry yang direhabilitasi 1 paket	1 paket	236.310.285	-	
			Pembangunan Selasar	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah salasar yang dibangun 1 paket	1 paket	300.000.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Terpeliharanya alat kesehatan rumah sakit 1 Tahun	1 Tahun	80.000.000	90.000.000	
			Pengujian dn Kalibrasi Alat Kesehatan	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit 1 Tahun	1 Tahun	94.720.000	100.000.000	
			Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah perbekalan kesehatan dan alat-alat kesehatan yang dibeli 1 paket	1 paket	924.988.000	1.000.000.000	
			Pengadaan Alat-alat Laundry	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Alat-alat laundry yang dibeli 1 paket	1 paket	2.750.000.000	-	
			Pengadaan PABX dan Jaringannya	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah PABX yang dibeli 1 paket	1 paket	150.000.000	-	
			Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Obat dan perbekalan rumah sakit yang dimusnahkan 100 Persen	100 Persen	17.000.000	18.700.000	
			Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Promosi Pelayanan Kesehatan Jiwa 4 promosi	4 promosi	100.000.000	120.000.000	
			Pengadaan Genset	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah genset yang dibeli 1 paket	1 paket	500.000.000	-	
			Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah pakaian dan linen pasien yang dibeli 1 tahun	1 tahun	450.000.000	400.000.000	
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll)	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang dibeli 1 paket	1 paket	200.000.000	200.000.000	
			Pengembangan SIMRS	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah SIM RS yang dikembangkan 1 paket	1 paket	200.000.000	200.000.000	
			Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah jenis obat yang dibeli 55 jenis	55 jenis	1.496.391.432	2.500.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II dan III)	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah ruang rawat inap yang terawat 1 tahun	1 tahun	200.000.000	300.000.000	
			Pengadaan Master Plan Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Tersedianya Dokumen Master Plan 1 dokumen	1 dokumen	1.400.000.000	-	
			Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK)	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Gedung Rawat inap yang direhabilitasi 1 gedung	1 gedung	3.800.000.000	-	
			Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Psikososial	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah gedung Rehabilitasi Psikososial yang direhab 1 paket	1 paket	150.000.000	50.000.000	
			Rehabilitasi Dapur Gizi	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah gedung dapur gizi yang direhabilitasi 1 paket	1 paket	200.000.000	100.000.000	
			Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Minum	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Instalasi Pengolahan Air Minum 1 paket	1 paket	700.000.000	-	
			Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1 tahun	1 tahun	193.080.000	100.000.000	
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Peningkatan Ekonomi*	Meningkatnya Ekonomi Daerah*	**Program Kebinamargaan**		Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap	92,6 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Inspeksi Kondisi Jembatan	Belitung Timur, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Bangka Selatan			Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi jembatan 1 dokumen	1 dokumen	213.018.567	234.320.423	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Provinsi			Jumlah alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan yang terpelihara 10 unit	10 unit	114.950.000	126.445.000	
			Perencanaan Pembangunan Jalan	Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat			Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan 3 Dokumen	3 Dokumen	2.490.000.000	2.590.000.000	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II	Pangkal Pinang			Panjang Jembatan Bturusa II yang terpelihara 784 meter	784 meter	2.278.800.000	2.286.680.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Inspeksi Kondisi Jalan	Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung			Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi jalan 1 dokumen	1 dokumen	213.018.000	234.319.800	
			Pembangunan Jalan	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka			Panjang Jalan yang terbangun 11,35 km	11,35 km	50.675.383.878	51.675.383.878	
			Perencanaan Pembangunan Jembatan	Provinsi, Luar Daerah, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah dokumen perencanaan jembatan 1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000	860.000.000	
			Pembangunan Jembatan	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka Tengah			Panjang Jembatan yang terbangun 1 unit	1 unit	3.543.620.000	3.643.620.000	
			Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang			Panjang jalan yang terpelihara 869,13 km	869,13 km	47.350.962.931	48.350.962.931	
			Pembangunan Jalan (DAK)	Belitung, Tanjung Pandan			memperlancar Arus lalu lintas 18,85 KM	18,85 KM	80.075.000.000	81.075.000.000	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan	Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Panjang Jembatan yang terpelihara 3.050,67 meter	3.050,67 meter	1.358.740.000	1.458.740.000	
			Program Pengembangan Sumber Daya Air		Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan Panjang Talud Sumber Air Baku (M); Panjang Penahan Abrasi pantai ; Panjang Pengerukan dan Pengendalian ; Luas Jaringan Irigasi /Optimalisasi Irigasi	2 hektar; 200 meter; 2.000 meter; 50 hektar					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Bangka Selatan, Bangka, Bangka Barat			jumlah gapoktan yang terbedayakan 4 Kelompok Gapoktan	4 Kelompok Gapoktan	484.410.677	532.851.733	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Regulasi tentang Air Permukaan	Provinsi			Jumlah Regulasi tentang Sumur Resapan, Sumur Biopori, Danau Reservoir, Instalasi Pengelolaan Air Hujan dan SDA 1 regulasi	1 regulasi	355.030.472	355.030.472	
			Peningkatan pembersihan dan pengerukan Sungai/kali banjir	Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Panjang Saluran Pembuangan (banjir) yang terpelihara 15.850 meter	15.850 meter	13.227.170.958	14.227.170.958	
			Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	Bangka, Bangka Selatan			meningkatnya fungsi jaringan irigasi 100 Hektar	100 Hektar	3.497.750.000	3.597.750.000	
			Program Penataan Ruang dan Pertanahan		Identifikasi Permasalahan dan Pengkajian Ilmiah sesuai peraturan Penataan Ruang dan Pertanahan Secara Komprehensif; Luas Lahan Berserfikat dan Persentase Kepemilikan Lahan Untuk Kepentingan Umum ; Ketaatan terhadap RTRW Prov. Kep. Babel; Persentase tersedianya Informasi mengenai RTR melalui Peta Digital dan Peta Analog	30 persen; 24 persen; 75 persen; 44 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov.Kep.Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang 1 laporan	1 laporan	300.000.000	330.000.000	
			Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel	Provinsi			Jumlah dokumen RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi 2 Dokumen	2 Dokumen	1.491.127.983	1.640.240.781	
			Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi	Provinsi			Jumlah dokumen data sertifikasi kepemilikan lahan untuk kepentingan umum 1 Dokumen	1 Dokumen	142.012.188	150.000.000	
			Penataan Penguasaan , Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Provinsi			luas lahan yang dibebaskan 1 ha	1 ha	850.000.000	-	
			Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Provinsi			Jumlah Advice Planning dihasilkan 1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	440.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen Peninjauan kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			menghasilkan 1 Dokumen Materi Teknis RTRW dan Perda Revisi RTRW Prov. Kep. Babel 2 Dokumen	2 Dokumen	1.775.152.360	1.775.152.360	
			Program Pembinaan Jasa Konstruksi		Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi	20 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah Provinsi	Provinsi			Jumlah data dan informasi Jasa Konstruksi 1 Laporan	1 Laporan	855.030.472	940.533.520	
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Provinsi			Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikasi 797 orang Jumlah Kelembagaan yang dibina 1 Laporan	797 orang 1 Laporan	1.231.066.472	1.189.173.120	
			Program Pengawasan dan Peralatan PUPR		Tingkat Pendapatan Peralatan Workshop untuk Daerah	80 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Belitung			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani 30 Orang	30 Orang	1.000.000.000	1.725.000.000	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Provinsi			Alat berat yang dipelihara 1 Paket	1 Paket	288.870.000	317.757.000	
			Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Provinsi			Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi Peralatan Workshopas PUPR 1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	55.000.000	
			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Keciptakaryaan dan Permukiman		Bangunan dan lingkungan; Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat; Rumah tangga pengguna air bersih; Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4); Ruang Terbuka Hijau ; Sarana air limbah; Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum permukiman; Rumah tangga bersanitasi; Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara; Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi	1 Dokumen; 5.000 meter; 350 Unit; 2.500 Meter; 0,75 Hektar (Ha); 1 Lokasi; 1 Lokasi; 10 Unit; 10 Lokasi; 30 Orang; 1 Laporan					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									-	-	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Provinsi			Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang tersusun 7 Dokumen	7 Dokumen	459.000.000	504.900.000	
			Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Pangkal Pinang			Terbangunnya Kawasan RTH di Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Lokasi	1 Lokasi	2.100.000.000	-	
			Peningkatan / Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah	Bangka Selatan, Bangka Barat			Jaringan Distribusi Air Minum yang terlayani di Jalan Raya PELTIM Kab. Bangka Barat dan Sambungan Rumah di Desa Penutuk 4.230 Meter	4.230 Meter	1.473.000.000	1.950.300.000	
			Penyusunan DED Cluster Melayu	Provinsi, Bangka Barat			DED Cluster Melayu yang Tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	449.820.000	494.802.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh	Bangka Selatan			Terbangunnya Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh Provinsi (Desa Permis Kec. Simpang Rimba dan Desa Suka Damai Kec. Toboali) 4.800 Meter	4.800 Meter	1.035.500.000	1.139.050.000	
			Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	Bangka Tengah, Bangka Barat			Terbangunnya Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Provinsi (Desa Padang Mulia Kab. Bangka Tengah dan Desa Tanjung Kab. Bangka Barat) 2.186 Meter	2.186 Meter	455.750.000	501.325.000	
	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat*	Menurunnya Disparitas Pembangunan antara Wilayah dan Masyarakat*	**Program Pembangunan Perumahan Rakyat**		Rumah Layak Huni	50 Unit					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur, Bangka Tengah, Bangka Selatan			Tersedianya Rumah Tidak Layak Huni di 7 Kab/kota 178 Unit	178 Unit	12.222.960.000	22.770.000.000	
			Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	Belitung Timur			Jumlah Rumah yang di rekonstruksi dan di rehabilitasi akibat bencana 75 Unit	75 Unit	4.804.760.000	-	
			Sosialisasi Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	Belitung Timur			Terselenggaranya Sosialisasi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana 75 KK	75 KK	97.580.000	-	
			Sosialisasi Pembiayaan Perumahan Kabupaten / Kota	Provinsi			Jumlah Peserta yang tersosialisasi tentang pembiayaan perumahan 30 Orang	30 Orang	89.475.000	172.500.000	
			Survey Pembiayaan Micro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Bangka Selatan, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Laporan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap 1 Dokumen	1 Dokumen	99.675.000	133.486.250	
			Perencanaan								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Ekonomi*	Meningkatnya Ekonomi Daerah*	**Program Perencanaan Sosial,Budaya dan Pemerintahan**		Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti. 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/ Laporan	266.274.900	550.000.000	
			Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah rekomendasi/laporan hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi urusan perpustakaan dan trantibbum linmas serta pada penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/ Laporan	173.077.350	350.000.000	
			Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan 1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000	300.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik*	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi*	**Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah**		Persentase kesesuaian antara tujuan, sasaran, target indikator sasaran, program dan target indikator program dalam RKPD dengan RPJMD; Persentase keselarasan Program, kegiatan dan pagu anggaran antara RKPD dengan APBD; Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti; Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang tervalidasi dan dapat Diakses	80 Persen; 80 Persen; 65 Persen; 80 Persen					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun 2 Dokumen	2 Dokumen	878.780.000	1.235.000.000	
			Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terkelola 2 Aplikasi	2 Aplikasi	119.823.000	175.000.000	
			Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	Provinsi			Jumlah laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah 6 laporan/rekomendasi	6 laporan/rekomendasi	594.360.000	1.304.050.000	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi yang disusun 16 Laporan	16 Laporan	412.310.000	1.125.000.000	
			Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Elemen Data Perencanaan Pembangunan yang Terisi dan Terbarukan 500 Elemen Data	500 Elemen Data	1.379.178.000	525.000.000	
			Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Dalam Sistem 2 Instrumen	2 Instrumen	124.261.000	175.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase PD mitra Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B); Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang tercapai	60 Persentase; 80 Persentase					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pada penunjang urusan Perencanaan yang ditindaklanjuti. 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/ Laporan	389.059.000	440.000.000	
			Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi/laporan hasil koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian yang ditindaklanjuti. 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/ Laporan	195.590.000	525.000.000	
			Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencannaan dan Evaluasi urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Pariwisata serta pada penunjang urusan Keuangan yang ditindaklanjuti 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/ Laporan	159.765.000	315.000.000	
			Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perecanaan dan Evaluasi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/ Laporan	266.453.500	415.000.000	
			Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Study Pemetaan Jaringan Irigasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Dokumen	1 Dokumen	456.110.000	-	
			Perhubungan								
	Peningkatan Ekonomi*	Meningkatnya Ekonomi Daerah*	**Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat**		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal	55 %					DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi di Pulau Bangka	Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang			Persentase Pembangunan Perlengkapan Jalan terhadap kondisi Optimal pada ruas jalan Provinsi di Pualu Bangka 20 %	20%	2.095.244.000	3.577.360.200	
			Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 30 orang	30 orang	110.398.500	169.203.300	
			Pengadaan Peralatan Pendukung pemeliharaan perlengkapan jalan	SKPD			Jumlah peralatan Pendukung pemeliharaan perlengkapan jalan 10 set	10 set	136.350.700	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas 4 Dokumen	4 Dokumen	68.718.000	185.040.750	
			Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung			Prosentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik 75 %	75%	778.380.000	1.294.877.000	
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Bangka, Pangkal Pinang			Jumlah Unit Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 135 unit	135 unit	5.540.488.000	7.967.486.425	
			Inspeksi/Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Data Hasil Inspeksi Pengujian kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kepuluauan Bangka Belitung 1 Dokumen	1 Dokumen	53.190.000	84.273.000	
			Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur			Jumlah kabupaten/ Kota yang mendapatkan penghargaan wahana tata nugraha 4 Kabupaten Kota	4 Kabupaten Kota	106.746.000	192.933.300	
			Review Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah dokumen Tatrawil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 dokumen	1 dokumen	966.446.000	-	
			Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi di Pulau Bangka	Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi di Pulau Bangka 1 Dokumen	1 Dokumen	625.770.000	-	
			Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta yang mengikuti Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan 14 orang	14 orang	87.890.000	134.710.800	
			Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal	18 %					DINAS PERHUBUNGAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Studi Kelayakan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	Provinsi			Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam 1 Dokumen	1 Dokumen	809.621.000	-	
			Pembangungan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Provinsi			Jumlah Unit Pembangungan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 3 Unit	3 Unit	1.902.000.000	-	
			Studi Kelayakan Dermaga/Pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung				Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Dermaga/Pelabuhan Pulau Gresik Kab. Belitung 1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	-	
			Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan		Prosentase Pelaksanaan Hasil Perjanjian Kerjasama di sektor Perhubungan Udara; Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	47 %; 3,8 %					DINAS PERHUBUNGAN
			Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari Besar Keagamaan	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah hari pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari Besar Keagamaan 3 Hari	3 Hari	68.480.000	201.928.500	
			Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Angkutan Umum yang diperiksa terkait surat-surat kendaraan, Penimbangan Muatan dan pengukuran dimensi kendaraan 600 unit kendaraan	600 unit kendaraan	141.140.000	214.000.000	
			Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	Pangkal Pinang			Jumlah kendaraan pedukung operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan 4 unit	4 unit	456.435.000	-	
			Pengadaan Road Barrier dan Traffic Cone	Pangkal Pinang			Jumlah Road Barrier dan Traffic Cone 70 Buah	70 Buah	44.064.000	-	
			Pekerjaan Konsultasi Penilaian/ Aprraisal Pengembangan Bandara Depati Amir	Bangka Tengah			Jumlah dokumen jasa konsultansi penilaian/ appraisal pengembangan bandar udara depati amir 1 Dokumen	1 Dokumen	205.695.000	-	
			Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir	Bangka Tengah			Prosentase Pekerjaan jalan akses ke Gedung VIP Bandara Depati Amir 100 %	100%	6.409.200.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan dan Pemasangan Gardu dan Jaringan Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir	Bangka Tengah			Persentase Pengadaan dan Pemasangan Gardu dan Jaringan Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir 100 %	100%	646.150.000	-	
			Pengadaan Pagar Panel dan BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir	Bangka Tengah			Jumlah Pengadaan Pagar Panel dan BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir 900 meter	900 meter	813.200.000	-	
			Pemasangan Saluran Air PDAM Gedung VIP Bandara Depati Amir				Jumlah paket pemasangan Saluran Air PDAM Gedung VIP Bandara Depati Amir 1 paket	1 paket	215.635.000	-	
			Lingkungan Hidup								
	Penanggulangan Bencana*	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Terkelolanya Sumber Daya Alam*	**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup**		Persentase Parameter Kualitas Lingkungan Yang terakreditasi	100 %					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Peningkatan Mutu Pemeriksaan Kualitas Lingkungan di Laboratorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Parameter Lingkungan yang akreditasi 30 Parameter	30 Parameter	230.000.000	264.500.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	Provinsi, SKPD			Jumlah sampel yang dilayani dalam 1 tahun 1.100 Sampel	1.100 Sampel	929.500.000	1.100.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Paket Pengadaan 1 Paket	1 Paket	195.000.000	1.000.000.000	
			Sampling Parameter Kualitas Lingkungan	Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang			Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan 25 Titik Sampling	25 Titik Sampling	75.000.000	86.250.000	
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup		FALSE	FALSE					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyusunan Rencana Perlindungan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Luar Daerah, Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Dokumen Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) 1 Dokumen	1 Dokumen	343.953.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah Dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 1 Dokumen	1 Dokumen	110.765.000	-	
			Analisis data dan informasi Lingkungan Hidup	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 1 Dokumen	1 Dokumen	95.800.000	118.116.000	
			Penyusunan Dokumen KLHS	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen KLHS 2 Dokumen	2 Dokumen	790.725.000	-	
			Layanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Bangka			Jumlah Usaha/Kegiatan yang dilayani 6 Usaha/Kegiatan	6 Usaha/Kegiatan	100.000.000	140.300.000	
			Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota	Provinsi, Luar Daerah, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah			Jumlah Komisi Penilaia Amdal yang di Evaluasi 7 Komisi Penilai Amdal	7 Komisi Penilai Amdal	70.875.000	121.912.000	
			Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup		Persentase penurunan Konsentrasi BOD ; Persentase penurunan Konsentrasi COD ; Persentase penurunan Konsentrasi TSS ; Persentase Penurunan Konsentrasi SO2	6,44 mg/l; 18,03 mg/l; 40,28 mg/l; 148,47 µg/Nm3					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Beitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Sungai 54 Titik Pantau	54 Titik Pantau	130.900.000	448.895.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian Beban Pencemaran Air	Luar Daerah, Provinsi, Bangka			Rekomendasi Pengendalian Beban Pencemaran Air 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	125.000.000	270.480.000	
			Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Titik pantau kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 21 Titik Pantau	21 Titik Pantau	106.420.000	172.500.000	
			Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan	Luar Daerah, Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi 40 100	40 100	118.240.000	517.500.000	
			Penerimaan, penelaahan, dan verifikasi pengaduan masyarakat	Luar Daerah, Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Pengaduan masyarakat yang diverifikasi 10 Kasus	10 Kasus	75.000.000	115.000.000	
			Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas		FALSE	FALSE					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Studi Manajemen dan Produksi Persampahan	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Dokumen Studi Manajemen dan Produksi Persampahan 1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	-	
			Rencana Pra Pembangunan Kawasan Tempat Pembuangan akhir Sampah Terpadu Regional	Provinsi, Luar Daerah, Bangka Tengah			Jumlah Laporan Rencana Pra Pembangunan 2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	-	
			Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Provinsi, Luar Daerah, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Kader/Kelompok Masyarakat yang Terlatih 35 Kader/Kelompok	35 Kader/Kelompok	284.905.000	328.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Inventarisasi emisi gas rumah kaca	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Dokumen Inventarisasi emisi gas rumah kaca 1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	64.640.000	
			Implementasi upaya adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (ProKlim)	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur			Jumlah Kampung Iklim 3 Kampung Iklim	3 Kampung Iklim	50.000.000	60.000.000	
			Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup 14 Penghargaan	14 Penghargaan	81.390.000	150.000.000	
			Pemantauan dan Evaluasi Program Adipura	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Rata-rata Nilai Fisik Adipura 74 Nilai	74 Nilai	35.000.000	46.805.000	
			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik*	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi*	**Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil**		Jumlah penyediaan data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik perencanaan pembangunanalokasi anggaranpembangunan demokrasi serta penegakkan hukum dan pencegahan kriminal; Jumlah pemanfaatan NIK Data base kependudukan dan KTP_el oleh OPD Provinsi; Jumlah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil disemua kabupaten/kota	7 Jumlah; 5 Jumlah; 7 jumlah					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
			Rapat teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat provinsi	SKPD			Jumlah rapat 1 kali	1 kali	50.000.000	55.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil se- provinsi kepulauan bangka belitung	SKPD			Jumlah laporan 1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	110.000.000	
			Pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil (DAK)	SKPD			bimbingan teknis bagi aparatur Dukcapil Provinsi dan Kab/Kota 3 kali bimtek Jumlah rapat koordinasi 2 kali rapat	3 kali bimtek 2 kali rapat	340.750.000	374.825.000	
			Pembinaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (DAK)	SKPD			Jumlah rapat koordinasi 2 kali rapat Bimbingan teknis terkait kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk 4 kali bimtek	2 kali rapat 4 kali bimtek	369.250.000	406.175.000	
			Pembinaan penyelenggaraan Pencatatan Sipil (DAK)	SKPD			Bimbingan teknis dan sosialisasi melalui media terkait kebijakan penduduk dan pencatatan sipil 3 kali bimtek dan sosialisasi melalui media Jumlah rapat koordinasi 2 kali rapat	3 kali bimtek dan sosialisasi melalui media 2 kali rapat	367.516.000	404.000.000	
			Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	SKPD			Tersedianya buku profil 40 buku profil Tersedianya buku agregat data kependudukan 40 Buku agregat data kependudukan Jumlah rapat koordinasi 2 kali rapat Bimbingan Teknis 3 kali bimtek	40 buku profil 40 Buku agregat data kependudukan 2 kali rapat 3 kali bimtek	359.175.000	395.000.000	
			Pengelolaaan pemanfataan data kependudukan	SKPD			Jumlah Pelaksanaan rapat dengan instansi terkait 2 kali Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi 1 Kali Jumlah PKS 3 PKS	2 kali 1 Kali 3 PKS	100.000.000	110.000.000	
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia*	Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas SDM*	**Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak**		Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi ; Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi ; Persentase Kab/Kota Layak Anak	0 Persen; 0 Persen; 0 Persen					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
			Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD			Kelancaran Fungsi Komisi Perlindungan Anak (KPAD) Prov. Kep. Bangka Belitung 1 Kegiatan	1 Kegiatan	248.521.000	273.373.000	
			Workshop Pencegahan Kenakalan dan Kekerasan Terhadap Anak bagi Siswa SLTP/SLTA	SKPD			Jumlah Peserta 60 Orang	60 Orang	100.770.000	110.000.000	
			Advokasi dan KIE Provinsi Layak Anak	SKPD			Jumlah Advokasi dan KIE 12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	110.000.000	
			Advokasi dan KIE kebijakan Forum Anak/Kota	SKPD			Jumlah Advokasi dan KIE 12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	110.000.000	
			Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan	SKPD			Jumlah Perserta Peringatan Anak 800 Orang	800 Orang	249.065.000	275.000.000	
			Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)	SKPD			Jumlah peserta rapat 45 orang	45 orang	70.767.000	77.000.000	
			Penguatan pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan (fungsi P2TP2A)	SKPD			Kelancaran Fungsi pusat pelayanan terpadu 1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000	220.000.000	
			Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SKPD			Jumlah peserta rapat 700 orang	700 orang	700.000.000	-	
			Workshop dan Fasilitasi Kab/Kota Menuju Provinsi layak anak (Provila)	SKPD			Jumlah Peserta Workshop dan Fasilitasi kebijakan kab/kota layak anak 60 Orang	60 Orang	129.833.000	142.000.000	
			Partisipasi Anak dalam pembangunan (Forum Anak)	SKPD			1. Peserta Forum anak daerah TK provinsi; 2. Peserta Forum anak Nasional dan Kogres anak Indonesia 89 Orang	89 Orang	190.229.000	209.251.000	
			TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	SKPD			Terlaksananya TOT bagi aktifis PATBM kab/kota 80 Orang	80 Orang	200.000.000	220.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Berdemokrasi*	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi*	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**		Persentase kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan; Persentase keterwakilan perempuan dilembaga publik; Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender	100 %; 30 %; 100 %					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
			TOT Kewirausahaan bagi Perempuan Produktif dan Remaja Putus Sekolah	SKPD			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja perempuan 16 orang	16 orang	100.000.000	110.000.000	
			Penguatan kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	SKPD			Jumlah peserta Workshop 20 SKPD	20 SKPD	100.000.000	110.000.000	
			Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumahan perempuan di Kab/Kota	SKPD			Jumlah Pembinaan dan Monev 14 kali	14 kali	50.000.000	55.000.000	
			Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	SKPD			Jumlah advokasi dan KIE 6 bulan	6 bulan	100.000.000	110.000.000	
			Pembinaan usaha kelompok ekonomi produktif perempuan (Percontohan)	SKPD			Jumlah kelompok kepala keluarga perempuan miskin yang diberikan pembinaan usaha kelompok ekonomi produktif 14 kelompok	14 kelompok	200.000.000	220.000.000	
			Pembinaan Organisasi Perempuan	SKPD			Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan 12 Bulan	12 Bulan	250.000.000	275.000.000	
			Peningkatan nilai nilai kejuangan perempuan indonesia	SKPD			Jumlah Peserta Peringatan Hari Ibu 450 Orang	450 Orang	200.000.000	220.000.000	
			Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana								
	Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia*	Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas SDM*	**Program Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		Persentase PUS yang menggunakan KB MKJP; Persentase keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Pra sejahtera I	100 %; 100 %					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana	SKPD			Jumlah masyarakat yang menerima pelayanan KB di 7 Kab/ kota 500 Akseptor	500 Akseptor	200.000.000	220.000.000	
			Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	SKPD			Jumlah pemenang Kampung KB 3 pemenang	3 pemenang	200.000.000	220.000.000	
			Pembinaan peningkatan peran perempuan dalam kehidupan keluarga	SKPD			Jumlah pemenang lomba dalam rangka hari keluarga 3 pemenang	3 pemenang	150.000.000	165.000.000	
			Pembinaan dan Monev Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga diKabupaten/Kota	SKPD			Jumlah kab/ kota yang dilakukan pembinaan dan Monev 7 kab/ kota	7 kab/ kota	50.000.000	55.000.000	
			Pendampingan kemah nasional konselor sebaya 2018	SKPD			Jumlah peserta 1.500 orang	1.500 orang	878.379.000	966.000.000	
			Advokasi dan KIE program KKBPK	SKPD			Jumlah Peserta 25 orang	25 orang	50.000.000	55.000.000	
			Penggerakan KB MKJP	SKPD			Jumlah peserta 150 orang	150 orang	100.000.000	110.000.000	
			Promosi Penguatan Bina Keluarga Lansia	SKPD			Jumlah Peserta 200 Peserta	200 Peserta	100.000.000	110.000.000	
			Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	SKPD			Jumlah Peserta 100 Peserta	100 Peserta	150.000.000	165.000.000	
			Sosial								
	Peningkatan Ekonomi*	Meningkatnya Ekonomi Daerah*	**Program Rehabilitasi Sosial**		Persentase korban napza; Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	100 %; 100 %; 100 %; 100 %					DINAS SOSIAL

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan Optimalisasi/Meningkatnya Peranan Panti/ Yayasan/ Organisasi Sosial dan Kader Masyarakat dalam Pelayanan Lanjut Usia 300 Orang	300 Orang	98.650.000	362.250.000	
			Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 100 Anak	100 Anak	50.000.000	315.000.000	
			Pembinaan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Provinsi, Bangka Barat, Belitung Timur			Jumlah masyarakat dan korban napza yang mendapatkan pembinaan penyalahgunaan napza 95 Orang	95 Orang	-	126.000.000	
			Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Peyandang Disabilitas	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Perlindungan, Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dan Meningkatnya Kinerja dan Peran serta Yayasan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Kader/ dan PSKS dalam Memberikan Pelayanan dan Pendampingan kepada Penyandang Disabilitas 250 Orang	250 Orang	150.000.000	399.000.000	
			Pembinaan Sosial Tuna Sosial	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah tuna sosial yang mendapatkan pembinaan sosial 20 Orang	20 Orang	-	103.740.000	
			Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur			Jumlah korban tindak kekerasan bermasalah sosial yang mendapat perlindungan dan bantuan usaha 24 Orang	24 Orang	-	105.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau Tim PIPA	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah bayi dan anak yang mendapat pertimbangan perizinan untuk di adopsi 6 org	6 org	43.000.000	52.500.000	
			Pendampingan dan advokasi sosial klien bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah anak yang mendapat pendampingan dan advokasi apabila berhadapan dengan hukum 10 org	10 org	49.800.000	105.000.000	
			Rapat Koordinasi Uppksa kab/kota se-Indonesia	Provinsi			Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi UPPKSA Kabupaten/Kota se-Indonesia 350 orang	350 orang	-	-	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial; Persentase desa/kelurahan rawan bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial; Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial; Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana	100 %; 100 %; 100 %; 100 %					DINAS SOSIAL

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana alam 56 org Jumlah korban bencana alam yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial Jumlah korban bencana alam yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial 25 KK Jumlah desa/kelurahan rawan bencana alam yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 1 Desa	56 org 25 KK 1 Desa	546.000.000	687.750.000	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah desa/kelurahan rawan bencana sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 7 desa/kelurahan Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana sosial 70 org Jumlah korban bencana sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial 50 kk	7 desa/kelurahan 70 org 50 kk	233.520.000	262.500.000	
			Penguatan Akses Jaminan Sosial Keluarga	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah keluarga miskin penerima santunan kematian 55 org Jumlah pekerja sektor informal/ mandiri dan keluarga miskin penerima PKH yang memperoleh jaminan sosial 800 org	55 org 800 org	-	210.000.000	
			Pendampingan dan Dukungan Program Keluarga Harapan (PKH)	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pendampingan program PKH 42.942 org	42.942 org	275.000.000	407.963.378	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Penanganan Farkir Miskin		Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera; Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Usaha; Persentase debitur yang membayar tunggakan kredit usaha peningkatan ekonomi masyarakat (KUPEM)	100 %; 100 %; 100 %					DINAS SOSIAL
			Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sosial Ekonomi Keluarga Miskin	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat			Jumlah warga miskin pedesaan yang memperoleh bantuan usaha dan bimbingan teknis berusaha 60 org	60 org	-	315.000.000	
			Penguatan dan Peningkatan KUalitas Sosial Ekonomi Pra Sejantera	Provinsi, Belitung			Jumlah warga miskin perkotaan yang memperoleh bantuan usaha dan bimbingan teknis berusaha dan bimbingan teknis 60 org	60 org	-	315.000.000	
			Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan USaha Warga Miskin	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah warga miskin pesisir dan pulau pulau kecil yang memperoleh bantuan usaha dan bimbingan teknis berusaha 60 org	60 org	180.000.000	315.000.000	
			Pendampingan dan Penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah debitur KUPEM yang mencicil atau melunasi tunggakannya 335 debitur	335 debitur	34.800.000	105.000.000	
			Pemberian Bantuan Sosial Subsidi Beras Kepada Keluarga Miskin Secara Gratis	Provinsi, Bangka, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan Bantuan Sosial Subsidi Beras Secara Gratis 47.321 org	47.321 org	11.600.412.000	15.887.550.000	
			Pelatihan Keterampilan dan Menajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah			Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pelatihan manajemen usaha 180 kk	180 kk	-	210.000.000	
			Program Pemberdayaan Sosial		Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	100 %					DINAS SOSIAL

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemberdayaan Keluarga	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Klien yang ditangani melalui LK3 75 org	75 org	55.822.550	302.004.150	
			Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP	Provinsi			Jumlah sarana dan prasarana TMP yang dapat dipelihara dan disediakan 1 TMP	1 TMP	247.568.000	105.000.000	
			Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah peserta dan partisipasi dalam memperingati Hari pahlawan dan HKSN 200 org	200 org	501.506.450	526.581.772	
			Penyuluhan Sosial	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah kelompok sasaran dan lokasi yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial 200 org	200 org	100.000.000	262.500.000	
			Asistensi dan Advokasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah dunia usaha/lembaga/ masyarakat yang menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis Berhadiah sesuai aturan berlaku 50 org	50 org	-	78.750.000	
			Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka, Bangka Selatan, Belitung			Jumlah pilar-pilar Sosial yang diberdayakan 82 org	82 org	-	105.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial		Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	100 %					DINAS SOSIAL
			Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah klien/warga binaan sosial yang mendapatkan pelayanan psikososial 20 org	20 org	519.000.000	622.700.400	
			Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah sarana/prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disediakan 5 pkt	5 pkt	100.000.000	254.614.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh pelatihan dan keterampilan kerja 20 org	20 org	-	26.250.000	
			Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah klien yang dapat diadvokasi dan dipulangkan 20 org	20 org	20.000.000	42.000.000	
			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	72 %					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka, Belitung Timur			Terselenggaranya Mitigasi Penanggulangan Bencana di daerah rawan bencana di 7 Kabupaten/Kota 100 Peserta	100 Peserta	356.100.239	360.000.000	
			Fasilitasi Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan Dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Provinsi, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat			Terselenggaranya Koordinasi berkala para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana 1 Kegiatan	1 Kegiatan	350.000.000	350.000.000	
			Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka Tengah			Jumlah Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100 orang	100 orang	456.224.950	710.000.000	
			Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan Dan Masyarakat	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang			Terlaksananya Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Ke Aparatur Kelurahan/Desa 100 Peserta	100 Peserta	290.055.220	30.000.000	
			Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan			Terlaksananya Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelematan Dini Saat Terjadi Bencana Sebanyak 7 Kegiatan di setiap 7 Kabupaten/kota 10 Media Cetak/Elektronik	10 Media Cetak/Elektronik	324.557.897	325.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana		Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	75 %					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Bimbingan Teknis Pemulihan Kesehatan Psikis Masyarakat Pasaca Bencana Kabupaten/Kota dan Provinsi	Luar Daerah, Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung			Terdidik dan terlatihnya tenaga terampil Pemulihan Kesehatan Psikis Masyarakat Pasacabencana Kabupaten/Kota dan Provinsi 200 orang dalam Tahun 2017 - 2022 40 Peserta	40 Peserta	142.000.000	145.000.000	
			Monitoring Dan Evaluasi Pascabencana Ke Kabupaten/Kota	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur			Tersusunnya Data Sarana Prasarana Pascabencana 5 laporan dalam Tahun 2017 - 2022 1 Laporan	1 Laporan	143.625.000	145.000.000	
			Bimbingan Teknis Aparatur Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dalam Menangani Tindakan Dini Pascabencana	Provinsi, Pangkal Pinang, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Terdidik dan terlatihnya tenaga terampil Penanganan Tindakan Dini Pascabencana 200 orang dalam Tahun 2017 - 2022 40 Peserta	40 Peserta	138.800.000	140.000.000	
			Pemeliharaan Jembatan Portable	Provinsi, Belitung Timur, Bangka, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Terpeliharanya 8 Unit Jembatan Portable dalam Tahun 2017 - 2022 2 Unit	2 Unit	114.250.000	115.000.000	
			Bongkar Dan Atau Pasang Jembatan Portable	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Terlaksananya Bongkar dan atau Pasang Jembatan Portable 1 Unit	1 Unit	102.025.000	105.000.000	
			Pelatihan Bongkar Pasang (Install) Jembatan Portable Kabupaten/Kota Dan Provinsi	Provinsi			Terdidik dan terlatihnya tenaga terampil Bongkar Pasang (Install) Jembatan Portable 200 orang dalam Tahun 2017 - 2022 40 Peserta	40 Peserta	110.300.000	115.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat*	Menurunnya Disparitas Pembangunan antara Wilayah dan Masyarakat*	**Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial**		Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	100 %					DINAS SOSIAL
			Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Kilen	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah klien yang memperoleh pendampingan dan pembinaan lanjutan 10 org	10 org	40.000.000	42.000.000	
			Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penghuni panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan 20 org	20 org	50.000.000	78.750.000	
			Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan rehabiltasi Sosial Dalam Panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan bagi penghuni panti 20 Orang	20 Orang	666.000.000	710.052.000	
			Penyediaan bantuan UEP bagi eks Penghuni panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah eks penghuni panti yang menerima bantuan UEP 4 org	4 org	40.000.000	42.000.000	
			Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah sarana penunjang yang disediakan dalam Panti 1 panti	1 panti	315.000.000	409.500.000	
			Rehabilitasi ringan prasarana panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah prasarana panti yang direhabilitasi 1 panti	1 panti	150.000.000	157.500.000	
			Program Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana		Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Kedaruratan dan Logistik/Peralatan Penanggulangan Bencana	80 %					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat			Terlaksananya operasional kegiatan Posko TRC BPBD 12 Bulan	12 Bulan	1.933.050.000	2.000.000.000	
			Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Luar Daerah			Meningkatnya Ketersediaan Logistik dan Peralatan Bantuan dari BNPB untuk Penanggulangan Bencana 1 Paket	1 Paket	100.000.000	100.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengerahan Dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Terlaksananya pengerahan dan mobilisasi ke lokasi bencana 7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	276.500.000	150.000.000	
			Pengadaan/Penyediaan Logistik untuk Penanggulangan Bencana	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Meningkatnya ketersediaan logistik untuk Penanggulangan Bencana 4 Item Barang	4 Item Barang	111.200.000	200.000.000	
			Pengadaan/Penyediaan Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana				Meningkatnya ketersediaan peralatan untuk Penanggulangan Bencana 9 Item Peralatan	9 Item Peralatan	480.000.000	1.000.000.000	
			Pemeliharaan / Perawatan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Meningkatnya Kualitas Logistik dan Peralatan untuk Penanggulangan Bencana 9 Jenis Peralatan PB	9 Jenis Peralatan PB	300.000.000	300.000.000	
			Tenaga Kerja								
	Peningkatan Ekonomi*	Meningkatnya Ekonomi Daerah*	**Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial**		Persentase perusahaan perkebunan yang diperiksa dan dibina ; persentase perusahaan pariwisata yang diperiksa dan dibina; persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina ; persentase perusahaan pertambangan yang diperiksa dan dibina	2 %; 1,6 %; 1,2 %; 1,36 %					DINAS TENAGA KERJA
			Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Provinsi			Jumlah Perusahaan yang mendapat penghargaan 3 perusahaan	3 perusahaan	34.448.000	150.000.000	
			Peningkatan sarana Hubungan Industrial	Provinsi			Jumlah perusahan dalam pembuatan PP/ PKB 30 perusahaan	30 perusahaan	92.080.350	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeriksaan Norma Kerja dan norma keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja (K3)	Provinsi			Jumlah Perusahaan Pertambangan yang diperiksa dan dibina 20 Perusahaan Jumlah Perusahaan bidang lainnya yang diperiksa dan dibina 250 Perusahaan Jumlah Perusahaan pariwisata yang diperiksa dan dibina 40 Perusahaan Jumlah Perusahaan Kelautan dan Perikanan yang diperiksa dan dibina 10 Perusahaan Jumlah Perusahaan perkebunan dan pertanian yang diperiksa dan dibina 40 Perusahaan	20 Perusahaan 250 Perusahaan 40 Perusahaan 10 Perusahaan 40 Perusahaan	193.565.350	256.945.000	
			Peningkatan fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan masalah Ketenagakerjaan	Provinsi			Jumlah rapat LKS tripartit dan pembahasan masalaha ketenagakerjaan 4 Kali rapat	4 Kali rapat	167.643.850	200.000.000	
			Peningkatan fungsi DP, Pembahasan UMP, UMK/UMSK dan Sosialisasi UMP	Provinsi			Jumlah Rapat Pembahasan UMP 4 Kali	4 Kali	151.864.100	200.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja		persentase pencari kerja yang di tempatkan; Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi; Persentase peningkatan tenaga kerja sektor pertambangan Timah bersertifikat kompetensi; Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing; Persentase peningkatan tenaga kerja pertaniaan bersertifikat kompetensi; Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanaan bersertifikat kompetensi; Pesentase lansia potensial yang mendapatkan pelatihan ketenagakerjaan; Persentase wanita Tuna sosial yang mendapatkan pelatihan tenaga kerja; Persentase penyandang disabilitas yang mendapatakan pelatihan keterampilan tenaga kerja; Persentase Exs korban Napza yang mendapatkan pelatihan	14,29 %; 15,5 %; 15,54 %; 4.000.000.000 Rp.; 15,54 %; 15,54 %; 0 %; 0 %; 0 %; 0 %					DINAS TENAGA KERJA
			Pembinaan dan Pengendalian TKA	Provinsi			Jumlah pembinaan terhadap perusahaan pengguna TKA 25 Perusahaan	25 Perusahaan	77.320.000	100.000.000	
			Pemasaran Tenaga kerja (Job Convassing)	Provinsi			Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 64 Perusahaan	64 Perusahaan	81.312.189	90.000.000	
			Bimtek metodologi bagi instruktur lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	Provinsi			Jumlah Peserta bimtek metologi bagi instruktur LPKS 30 Orang	30 Orang	102.709.142	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja		persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	2,73 %					DINAS TENAGA KERJA
			Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja(UPTD Hyperkes)	Luar Daerah			Jumlah Tenaga kerja yang diperiksa kesehatan kerjanya 42 tenaga kerja	42 tenaga kerja	44.568.150	55.500.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengujian Lingkungan Kerja	Provinsi			Jumlah tenaga kerja dan lingkungan perusahaan yang diperiksa 7 Perushaan	7 Perushaan	41.082.250	65.000.000	
			Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan Dan Pengujian Lingkungan	Provinsi			Terkalibrasinya alat uji kesehatan 8 alat uji	8 alat uji	70.810.000	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri		Persentase pencari kerja bidang pertaniaan lada, karet dan sapi yang mendapat pelatihan ; Persentase pencari kerja bidang Kelautan dan perikanaan yang mendapat pelatihan ; Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan; Persentase pencari kerja bidang pertambangan Timah yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutaan	0,14 %; 0,11 %; 0,11 %; 0,14 %					DINAS TENAGA KERJA
			Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/ Kota	Provinsi			Jumlah Pencari kerja bidang Pertambangan Timah yang mendapat pelatihan 224 orang Jumlah Pencari kerja bidang lainnya yang mendapat pelatihan 112 orang Jumlah Pencari kerja bidang Kelautan dan perikanan yang mendapat pelatihan 16 orang Jumlah Pencari kerja bidang Pariwisata yang mendapat pelatihan 96 orang Jumlah Pencari kerja bidang pertanian lada, karet dan sapi yang mendapat pelatihan 16 orang	224 orang 112 orang 16 orang 96 orang 16 orang	1.495.500.000	2.750.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor pertanian Lada, karet dan sapi; Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor Perikanaan; Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata; Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor pertambangan Timah; persentase pertumbuhan produktifitas tenaga kerja sektor perikanaan	0,02 %; 0,12 %; 0,05 %; 0,05 %; 0,12 %					DINAS TENAGA KERJA
			pelayanan dan peningkatan produktivitas	Provinsi			jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan peningkatan produktifitas 40 Tenaga kerja	40 Tenaga kerja	183.705.000	175.000.000	
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
			Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi		persentase pertumbuhan koperasi aktif; persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi ; persentase peningkatan koperasi berkualitas	15,5 %; 12,7 %; 6,6 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	SKPD, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung			Sosialisasi kepada kelompok strategis 80 orang Rapat koordinasi penguatan kelembagaan koperasi 80 orang Peningkatan pemahaman nilai-nilai dan prinsip perkoperasian 35 koperasi pembuatan akta notaris untuk koperasi 14 akta	80 orang 80 orang 35 koperasi 14 akta	805.261.189	1.347.000.000	
			Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Tersedianya peraturan internal perkoperasianpada koperasi provinsi 35 ART dan Persus Meningkatnya pemahaman pengurus koperasi tentang penerapan sanksi 35 Pengurus Koperasi	35 ART dan Persus 35 Pengurus Koperasi	275.302.970	573.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Belitung Timur, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan			Terpilihnya koperasi berprestasi tingkat provinsi 0 Koperasi Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi 2 Koperasi Terpilihnya Tokoh pengerak koperasi 3 Tokoh	0 Koperasi 2 Koperasi 3 Tokoh	84.466.630	500.000.000	
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		persentase peningkatan volume usaha koperasi; persentase peningkatan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan; persentase peningkatan investasi koperasi sektor pariwisata	10 %; 4 %; 7 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha	Luar Daerah, SKPD, Belitung Timur, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Bangka Selatan			Pengembangan usaha koperasi produktif 0 koperasi Pengembangan Jaringan pemasaran produk 0 koperasi Koperasi yang melakukan kemitraan 5 koperasi Pendampingan akses pembiayaan koperasi 0 koperasi	0 koperasi 0 koperasi 5 koperasi 0 koperasi	167.461.704	1.200.000.000	
			Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	SKPD, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Bimbingan Teknis mengenai SPI 40 Pengurus/Pengawas koperasi Aplikasi pengolah data usaha koperasi 0 aplikasi Koperasi yang mengikuti pola pengembangan usaha 28 koperasi	40 Pengurus/Pengawas koperasi 0 aplikasi 28 koperasi	323.480.990	900.000.000	
			Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Bangka Tengah, Belitung Timur			Penyediaan Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) 5 PPKL Pemasyarakatan kewirausahaan koperasi 35 pengurus koperasi Pembinaan Perkoperasian 35 Pembina Koperasi/PPKL	5 PPKL 35 pengurus koperasi 35 Pembina Koperasi/PPKL	447.367.327	835.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil		persentase pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil; persentase pertumbuhan pelaku usaha kecil; persentase pertumbuhan produk usaha kecil yang dikembangkan; pertumbuhan produk usaha kecil yang tersertifikasi	5 %; 15 %; 4 %; 540 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Luar Daerah, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka			Pendampingan akses permodalan 0 pelaku usaha Pendampingan perizinan 2.500 IUMK Akses promosi dan pemasaran produk melalui pameran 20 pelaku usaha sosialisasi aplikasi mobile platform pemasaran produk 600 pelaku usaha Akses promosi dan pemasaran produk melalui web online 100 pelaku usaha	0 pelaku usaha 2.500 IUMK 20 pelaku usaha 600 pelaku usaha 100 pelaku usaha	1.173.340.000	1.688.000.000	
			Pembangunan Gedung Pemasaran Produk KUKM	Bangka Tengah			Gedung Pemasaran Produk KUKM 1 tahapan	1 tahapan	8.720.082.503	25.192.000.000	
			Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	Luar Daerah, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Barat			Rapat Forum Koordinasi Pemberdayaan Usaha Kecil 1 rakor Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil 0 pergub Akses teknologi tepat guna 1 pelaku usaha Kerjasama pelaku usaha antar daerah 1 kesepakatan kerja sama Gelar Produk Halal 1 kali Diseminasi dan fasilitasi sertifikasi halal 1.000 sertifikat halal Data Usaha Kecil 1 Dokumen	1 rakor 0 pergub 1 pelaku usaha 1 kesepakatan kerja sama 1 kali 1.000 sertifikat halal 1 Dokumen	2.529.618.000	6.250.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kualitas kewirausahaan	Luar Daerah, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur			Peningkatan kualitas kewirausahaan 0 pelaku usaha workshop kewirausahaan 0 pelaku usaha Wirausahawan yang dikembangkan sesuai dengan kompetensi 50 pelaku usaha pelaku usaha berprestasi tingkat provinsi 10 pelaku usaha	0 pelaku usaha 0 pelaku usaha 50 pelaku usaha 10 pelaku usaha	550.605.941	470.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		persentase SDM koperasi terlatih ; persentase SDM Usaha Kecil terlatih	4,13 %; 0,68 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Peningkatan fungsi pelayanan pemerintah pada pelatihan koperasi dan UMKM	SKPD			persentase aparatur yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	511.581.745	700.000.000	
			Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	SKPD, Belitung Timur, Belitung			SDM Koperasi yang terlatih 450 orang SDM Usaha Kecil terlatih 120 orang	450 orang 120 orang	2.500.000.000	3.000.000.000	
			Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM		Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pusat Layanaan Usaha Terpadu PLUT KUMKM; Pertumbuhan produk parekraf	0 %; 10 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Belitung Timur			Pendampingan inovasi produk 21 produk Pendampingan terhadap pelaku usaha 70 pelaku usaha Pembentukan kelembagaan sentra usaha 7 sentra usaha Klinik usaha terpadu 2.000 pelaku usaha	21 produk 70 pelaku usaha 7 sentra usaha 2.000 pelaku usaha	832.791.485	1.460.000.000	
			Penanaman Modal								
			Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Jumlah profil investasi; Jumlah UMKM yang bermitra dengan investor	3 Profil investasi; 2 UMKM					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Studi Kelayakan Potensi Investasi Sektor Potensi	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Belitung Timur			Jumlah kajian potensi investasi sektor potensi 1 Kajian	1 Kajian	370.665.000	400.000.000	
			Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah informasi data potensi investasi 1 Data potensi	1 Data potensi	106.509.000	150.000.000	
			Workshop Penanaman modal	Pangkal Pinang			Jumlah pelaksanaan workshop 2 Kali	2 Kali	135.000.000	250.000.000	
			Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal		Jumlah investor	7 investor					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyelenggaraan Pameran Investasi	Luar Daerah			Jumlah pameran investasi 6 Pameran	6 Pameran	793.415.000	609.500.000	
			Pembuatan Bahan Promosi	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah jenis bahan promosi 6 Jenis bahan promosi	6 Jenis bahan promosi	233.225.000	275.000.000	
			Promosi Investasi melalui Media Massa	Pangkal Pinang			Jumlah media massa untuk informasi investasi 3 Media	3 Media	93.638.000	250.000.000	
			Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi		Persentase pertumbuhan realisasi investasi (sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan, sektor pariwisata, sektor pertambangan)	43 %					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyusunan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dari perusahaan 100 Buku LKPM	100 Buku LKPM	106.509.142	125.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu		Persentase penerbitan izin tepat waktu	78 %					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah izin yang diterbitkan 1.050 Izin	1.050 Izin	1.001.641.665	1.350.000.000	
			Penyusunan Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan	Pangkal Pinang			, Luar Daerah, Provinsi, SKPDJumlah buku kompilasi berisikan rekapitulasi data perizinan dan non perizinan 40 Buku kompilasi	40 Buku kompilasi	43.640.000	50.000.000	
			Kebudayaan								
			Program Pelestarian Budaya		Budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	12 %					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Kajian Tradisi Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah naskah kajian tradisi 2 naskah	2 naskah	90.500.000	95.059.500	
			Pengelolaan cagar budaya	Provinsi			Jumlah cagar budaya yang dikelola 1 Cagar budaya	1 Cagar budaya	84.700.000	89.000.000	
			Pendokumentasian dan publikasi koleksi museum daerah	Provinsi			Jumlah cetakan dan digitalisasi publikasi koleksi museum daerah 1 paket	1 paket	142.000.000	149.112.600	
			Registrasi cagar budaya Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah cagar budaya yang teregistrasi 50 Cagar budaya	50 Cagar budaya	106.500.000	111.834.000	
			Penulisan Sejarah Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Naskah Sejarah Bangka Belitung 1 naskah	1 naskah	212.100.000	222.737.500	
			Pentas seni budaya	Provinsi			jumlah sanggar yang dipentaskan 35 pentas/event	35 pentas/event	269.200.000	282.745.500	
			Pembinaan drum band serumpun sebalai	Provinsi			Jumlah personil drum band yang dibina 60 Orang	60 Orang	427.900.000	449.372.000	
			Pendokumentasian Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Karya Cetak, Karya Rekam dan Digitalisasi 200 buku/poster/sketsa	200 buku/poster/sketsa	110.000.000	115.562.000	
			Partisipasi dan Penghargaan serta kerjasama di bidang budaya	Provinsi			Jumlah penggiat budaya 38 anugerah budaya/dukungan event budaya/lembaga adat/dewan kesenian/kominitas budaya	38 anugerah budaya/dukungan event budaya/lembaga adat/dewan kesenian/kominitas budaya	3.500.000.000	5.799.856.600	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Gita bahana dan Aubade Kemerdekaan RI	Provinsi			Jumlah peserta gita bahana dan aubade 256 orang	256 orang	416.100.000	436.947.000	
			Festival Budaya Melayu	Provinsi			Jumlah Festival Budaya yang diselenggarakan 1 Festival/event	1 Festival/event	950.000.000	997.500.000	
			Kepemudaan dan Olahraga								
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda		Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara; Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina; Persentase Dokumen Kepemudaan yang Tersusun; Persentase Pemuda yang Bekerja; Persentase Insan Kepemudaan yang Berprestasi dan Berdedikasi yang Menerima Bantuan	0 %; 0 %; 0 %; 0 %; 0 %					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Pemberdayaan Peran serta Pemuda	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah pemuda yang mengikuti pemberdayaan peran serta pemuda 48 Pemuda	48 Pemuda	310.300.000	392.975.000	
			Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara	Provinsi			Jumlah pemuda yang pemuda yang mengikuti pemberdayaan pemuda lintas negara 30 Pemuda	30 Pemuda	315.000.000	456.500.000	
			Pengiriman dan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda yang Berdedikasi dan Berprestasi	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah pemuda berdedikasi dan berprestasi yang menerima bantuan dan penghargaan 10 Pemuda	10 Pemuda	90.921.828	110.000.000	
			Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Pemuda	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah pemuda yang Mengikuti pengembangan, pembinaan dan pelatihan generasi pemuda 234 Pemuda	234 Pemuda	2.850.000.000	3.370.594.700	
			Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah pemuda yang mengikuti pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda 98 Pemuda	98 Pemuda	276.500.000	330.847.117	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga		Persentase Peserta yang Mengikuti Olahraga Rekreasi dan Tradisional ; Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan; Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang di bina dalam Bidang Keolahragaan; Pertumbuhan Event Olahraga Tingkat Regional, Nasional dan International; Persentase Insan Olahraga yang Berprestasi dan Berdedikasi yang menerima Bantuan; Persentase Atlet Berprestasi yang dibina di Tingkat Provinsi yang Memperoleh Medali; Persentase Lansia yang Mengikuti Olahraga Khusus Lansia	0 %; 0 %; 0 %; 0 %; 2 %; 0 %; 0 %					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahragawan Berbakat pada Sentra Keolahragaan dan Klub Olahraga	Provinsi			Jumlah atlet yang berprestasi yang di latih dan di bina 48 Atlet	48 Atlet	948.800.000	1.222.853.775	
			Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan dan pemassalan olahraga 60 Peserta	60 Peserta	385.000.000	468.640.224	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah atlet berprestasi yang mengikuti kejuaraan 142 Atlet	142 Atlet	1.310.400.000	1.732.339.758	
			Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	Provinsi			Jumlah atlet yang mengikuti Training Camp (TC) dan Try Out 105 Atlet	105 Atlet	804.250.000	1.646.405.035	
			Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	Luar Daerah			Jumlah medali yang diperoleh atlet berprestasi 10 Medali	10 Medali	1.425.600.000	1.892.285.615	
			Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga		Persentase Ketersediaan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	8 %					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jasa Konsultansi dan Kontruksi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Provinsi			Jumlah dokumen prasarana kepemudaan dan olahraga 2 Dokumen	2 Dokumen	531.250.000	38.400.000.000	
			Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Provinsi			Jumlah prasarana yang di revitalisasi 3 Prasarana	3 Prasarana	247.170.000	2.150.000.000	
			Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kepemudaan dan Olaharaga Standar Nasional	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah prasarana yang dilakukan penilaian 1 Laporan	1 Laporan	195.000.000	350.000.000	
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
	Pembangunan Berdemokrasi*	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi*	**Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**		Prosentase penindakan pelanggaran Tibumtranmas	100 %					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah bulan penyelenggaraan tibumtranmas Satpol PP (penertiban, pengamanan, pengawalan dan patroli 12 bulan	12 bulan	1.939.852.000	2.861.797.500	
			Gelar pasukan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Tibumtranmas & Linmas serta kesiapsiagaan Tim Pemadam Kebakaran	Pangkal Pinang			jumlah peserta Gelar pasukan 600 orang	600 orang	136.544.000	149.297.500	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja		Prosentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP	1,62 %					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pembinaan peningkatan personil bagi Satuan Polisi Pamong Praja	Pangkal Pinang			Jumlah peserta yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan pembinaan 1.320 orang	1.320 orang	246.367.000	200.000.000	
			Pengiriman Peserta Bimtek dan Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur	Luar Daerah			Jumlah peserta yang terfasilitasi mengikuti Bimtek dan Diklat 10 orang	10 orang	131.503.000	157.903.500	
			Program Penegakan Perda dan Perkada		Cakupan penegakan perda	100 %					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Penindakan yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang			Jumlah penyelidikan dan penyidikan (pemberkasan) 13 penyelidikan/penyidikan	13 penyelidikan/penyidikan	113.508.500	261.811.500	
			Pembinaan dan penindakan non yustisial terhadap pelanggar Perda dan Perkada	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat			Jumlah warga, aparatur, badan hukum yang ditindak secara non yustisial 302 orang	302 orang	234.656.000	261.811.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bimtek Pemberkasan PPNS Penegak Perda Se-Provinsi Kep. Babel	Pangkal Pinang			Jumlah PPNS yang mengikuti kegiatan 30 orang	30 orang	45.830.000	53.477.000	
			Penata kelolaan Sekretariat PPNS Prov. Kep. Babel	Provinsi			Jumlah koordinasi penyidikan, pemeriksaan, dan penertiban Satpol PP 4 kali kegiatan/rapat	4 kali kegiatan/rapat	20.225.000	41.120.000	
			Pemberdayaan peran dan tugas PTI (Petugas Tindak Internal) Satpol PP Prov. Babel	Pangkal Pinang			Jumlah dokumen pendisiplinan internal anggota Satpol PP 12 dokumen	12 dokumen	18.800.000	23.950.000	
			Rapat Koordinasi Satpol PP se-Provinsi Kep. Babel dengan PPNS di lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang			Jumlah peserta Rapat koordinasi Satpol PP dengan PPNS 0 peserta	0 peserta	-	58.367.000	
			Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat		Presentase peningkatan kualitas Linmas dalam penyelenggaraan Kantrantibnas; Presentase peningkatan kualitas Linmas dalam penanggulangan bencana dan kebakaran	1,51 %; 4,23 %					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pembinaan dan penyelenggaraan Kantrantibmas bagi Satlinmas se-Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang			Jumlah peserta Linmas 50 orang satlinmas	50 orang satlinmas	95.664.000	-	
			Pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi Satlinmas dan Satpol PP	Pangkal Pinang			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi Satlinmas dan Pol PP 70 orang	70 orang	231.603.000	-	
			Program Penguatan Kewaspadaan Nasional		Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	0 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Penyelenggaraan penanganan Konflik sosial	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Peringkat pelaporan Konflik Sosial Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 Peringkat	5 Peringkat	400.000.000	600.000.000	
			Forum Komunikasi dan Koordinasi KOMINDA	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Laporan 2 Laporan	2 Laporan	205.373.800	270.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penguatan Kerjasama Intelijen Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme di Bangka Belitung	Provinsi, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Laporan 4 Laporan	4 Laporan	42.491.100	300.000.000	
			Penguatan kewaspadaan dan deteksi Dini serta serta pengawasan Orang Asing di Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Laporan 4 Laporan	4 Laporan	60.195.700	105.000.000	
			Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara; Jumlah Kasus Konflik SARA	0 Jumlah; 3 Jumlah					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Partisipasi acara HUT RI 5.000 orang	5.000 orang	1.240.180.000	1.250.000.000	
			Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Cakupan yang di kategori lomba 3 Jumlah kategori lomba	3 Jumlah kategori lomba	300.000.000	308.000.000	
			Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Sekolah yang di Kunjungi 14 Sekolah	14 Sekolah	127.473.400	220.000.000	
			Pembentukan, Pendidikan dan Pelatihan Kader bela negara	Bangka Tengah, Namang			Jumlah Kader Bela Negara 44 Orang	44 Orang	134.555.200	248.000.000	
			Program Pembinaan Politik dalam Negeri		Cakupan Pembinaan Poitik Daerah; Tingkat Kinerja Lembaga Demokrasi	7 Jumlah; 45 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Rekomendasi 4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	220.000.000	242.000.000	
			Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Provinsi, Belitung, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka			Jumlah peserta yang memahami Undang-Undang Pemilu 420 Orang	420 Orang	350.000.000	385.000.000	
			Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik	Provinsi			Jumlah Partai politik yang mendapatkan bantuan Keuangan 11 Parpol	11 Parpol	68.500.000	66.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik	Bangka, Bangka Selatan, Belitung, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta yang mengerti etika dan budaya politik 200 Orang	200 Orang	200.133.300	302.000.000	
			Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Laporan 4 Laporan	4 Laporan	137.584.800	250.000.000	
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan		Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza ; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	25 %; 200 Orang; 30 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Evaluasi Data dan Informasi Lembaga Usaha Ekonomi serta Pemantauan Stabilitas Harga Sembako di Daerah	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	237.662.000	372.000.000	
			Penguatan Komunikasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Ormas	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah Ormas yg di beri bantuan 10 Ormas	10 Ormas	100.000.000	440.000.000	
			Forum Komunikasi dan Kerjasama antar Umat Beragama	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah rekomendasi 3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	70.819.000	110.000.000	
			Penyuluhan Pencegahan dan penangulangan narkotika	Bangka Barat			Jumlah Peserta yang memahami Bahaya Narkotika 50 Orang	50 Orang	63.240.000	303.000.000	
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah								
	Peningkatan Ekonomi*	Meningkatnya Ekonomi Daerah*	**Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam**		Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah masyarakat penerima Gas Elpiji 3Kg dan BBM 1 Laporan	1 Laporan	153.324.000	162.500.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Monitoring dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan masalah Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan			Jumlah Rekomendasi dan kerjasama antar tim terpadu penanganan masalah pertambangan timah 4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	203.835.075	400.000.000	
			Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Komoditi Pangan	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung			Jumlah Laporan Komoditi Pangan 1 Laporan	1 Laporan	137.765.700	150.000.000	
			Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya		Prosentase Koordinasi Kebijakan BUMD,Penanaman Modal,Pariwisata dan Budaya	100 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah dokumen Pembentukan bank umum syariah Bangka Belitung 1 Dokumen	1 Dokumen	762.011.400	1.500.000.000	
			Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan Program CSR di Provinsi 3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	117.100.800	150.000.000	
			Kajian Strategis Destinasi Wisata Baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah laporan pengembangan destinasi wisata baru 1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	120.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Belitung			Jumlah laporan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	120.000.000	
			Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah dokumen tata laksana BUMD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Berkas	1 Berkas	99.100.000	150.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik*	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi*	**Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian**		Prosentase Koordinasi Kebijakan Perekonomian	100 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka belitung	Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Belitung, Bangka Barat, Bangka			Jumlah Rekomendasi Tim Pengendalian inflasi daerah 5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	198.500.000	310.000.000	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah data koperasi dan UKM yang aktif di Prov.Kep.Babel 1 Berkas	1 Berkas	117.100.800	125.000.000	
			Monitoring,Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD, Belitung			Jumlah Laporan Pengembangan Destinasi Wisata Baru 1 Laporan	1 Laporan	117.856.050	220.000.000	
			Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD			Jumlah UMKM yang aktif di Prov.Kep.Babel 1 Laporan	1 Laporan	166.000.000	100.000.000	
			Forum Pengembangan Ekonomi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah laporan antara OPD Provinsi, Kab/Kota 1 Laporan	1 Laporan	119.100.000	210.000.000	
			Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN		Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN di Provinsi dan Kabupaten/Kota	75 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pengelolaan Pengembangan Aplikasi Sistem e-Monep APBN	Pangkal Pinang			Jumlah Aplikasi e-Monep APBN 1 Aplikasi	1 Aplikasi	257.308.000	373.784.859	
			Tim Terpadu Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan APBN	Pangkal Pinang			Jumlah Laporan 2 Laporan	2 Laporan	161.256.731	243.864.764	
			Koordinasi Kebijakan APBN	Provinsi			Rekomendasi Evaluasi APBN 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	56.950.000	161.200.000	
			Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan		Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100 %					SEKRETARIAT DPRD
			Fit and Proper test tentang pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	Provinsi			Jumlah pelaksanaan fit and proper test calon anggota KPID 1	1	97.099.700	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat paripurna	SKPD			Jumlah hasil rapat 15 paripurna	15 paripurna	383.999.000	637.723.900	
			Pembahasan anggaran pemerintah prov.kep.babel	SKPD			Dokumen nota/kesepakatan 4	4	378.000.000	415.800.000	
			Pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya	Luar Daerah			Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas 18 Perda	18 Perda	19.322.900.000	21.214.500.000	
			Kunjungan kerja badan anggaran	Luar Daerah			Jumlah laporan kunjungan kerja 6 laporan	6 laporan	2.491.350.000	3.100.000.000	
			Kunjungan kerja badan legislasi/pembentukan perda	Luar Daerah			Jumlah laporan kunjungan kerja 4 laporan	4 laporan	1.927.030.700	2.756.000.000	
			Kunjungan kerja badan kehormatan	Luar Daerah			Jumlah laporan kunjungan kerja 4 laporan	4 laporan	939.900.000	1.250.000.000	
			Reses	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan aspirasi masyarakat 135 aspirasi	135 aspirasi	7.424.100.000	7.824.100.000	
			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Luar Daerah			Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat 90 anggota	90 anggota	2.083.850.000	1.955.600.000	
			Rapat koordinasi asosiasi DPRD provinsi seluruh indonesia (ADPSI)	Luar Daerah			Jumlah rekomendasi / kesepakatan 3 kesepakatan	3 kesepakatan	532.250.000	589.875.000	
			Penyediaan tenaga ahli dan kegiatan akademik	SKPD			Jumlah tenaga ahli dan pakar hukum 8 tenaga ahli dan pakar hukum	8 tenaga ahli dan pakar hukum	729.390.000	831.200.000	
			Koordinasi dan konsultasi masalah hukum dan administrasi kesekretariatan	Luar Daerah, SKPD			Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi 5 laporan	5 laporan	200.000.000	250.000.000	
			Kunjungan kerja komisi	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah laporan kunjungan kerja 48 laporan	48 laporan	46.202.000.000	29.125.180.000	
			Kunjungan kerja badan musyawarah	Luar Daerah			Jumlah laporan kunjungan kerja 5 laporan	5 laporan	1.321.220.000	1.650.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler Dewan		Persentase pelayanan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran	100 %					SEKRETARIAT DPRD
			Publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah publikasi tugas dan fungsi DPRD 30 publikasi	30 publikasi	2.459.690.000	2.659.690.000	
			Forum komunikasi sekwan se-Indonesia	SKPD			meningkatnya kapasitas sekretaris DPRD 3 Laporan	3 Laporan	500.000.000	500.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat	SKPD			Meningkatnya sarana prasarana perkantoran DPRD selama 12 bulan 100 %	100%	4.267.660.000	5.138.320.000	
			Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur		Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan pada komponen proses Indeks Reformasi Birokrasi	6 Nilai					INSPEKTORAT DAERAH
			Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung secara Online	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Selatan			Jumlah laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi 4 Laporan	4 Laporan	206.000.000	346.000.000	
			Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah laporan RAD PPK Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung 4 Laporan	4 Laporan	77.650.000	125.000.000	
			Program Pengawasan dan Pembinaan Pegelolaan Keuangan dan Asset Daerah		Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti; Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah; Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	90 %; 93 %; 100 %					INSPEKTORAT DAERAH
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Perangkat Daerah yang diawasi 140 Obrik	140 Obrik	2.800.000.000	2.940.000.000	
			Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor 2 Rakor/1 PKPT	2 Rakor/1 PKPT	156.174.000	314.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah evaluasi yang dilaksankan 140 obrik	140 obrik	447.444.000	577.000.000	
			Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Prosentase Jumlah pengembalian uang yang disetor ke kas daerah 10 %	10%	383.750.000	582.000.000	
			Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	SKPD			Tingkat akurasi data tindak lanjut hasil pengawasan 100 %	100%	162.320.000	170.436.000	
			Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah laporan Tim Satgas Saber Pungli 2 Laporan	2 Laporan	205.775.000	397.000.000	
			Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur			Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti 10 Laporan	10 Laporan	100.000.000	257.250.000	
			Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya		Peningkatan capaian Level Kapabilitas SPIP; Peningkatan Capaian Level Maturitas SPIP	3 level; 2 level					INSPEKTORAT DAERAH
			Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah peningkatan penerapan SPI Perangkat Daerah 42 Perangkat Daerah Provinsi	42 Perangkat Daerah Provinsi	250.000.000	262.500.000	
			Konsultasi Audit	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah			Jumlah konsultasi yang dilaksanakan 42 Perangkat Daerah Provinsi	42 Perangkat Daerah Provinsi	150.000.000	160.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Promosi, Informasi, dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga		Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta	100 %					BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
			Penyelenggaraan Keprotokolan dan pelayanan tamu serta pimpinan daerah	Luar Daerah			Terfasilitasinya Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan di Jabodetabek 12 Bulan	12 Bulan	1.300.000.000	1.400.000.000	
			Publikasi, Promosi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah			Terpublikasinya tayangan jadwal kalender promosi wisata Bangka Belitung 12 bulan	12 bulan	3.500.000.000	5.000.000.000	
			Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya daerah	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Pengunjung 500 orang	500 orang	1.500.000.000	1.010.000.000	
			Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai 2 kali	2 kali	500.000.000	750.000.000	
			Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Luar Daerah			Jumlah Pendampingan Kepala Daerah/Wakìl Kepala Daerah 15 Kali	15 Kali	400.000.000	500.000.000	
			Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat 5 kali	5 kali	2.000.000.000	2.200.000.000	
			Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan	SKPD			Jumlah Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan 1 set	1 set	83.400.000	95.000.000	
			Penguatan Peran Hubungan Antar Lembaga dan organisasi kemasyarakatan perantauan	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Kegiatan yang Terselenggara dalam Meningkatkan Peran Hubungan Antar Lembaga 1 Kali	1 Kali	204.590.000	110.000.000	
			Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Anjungan yang di Rehabilitasi Berat 1 Anjungan	1 Anjungan	3.000.000.000	-	
			Pangan								
	Peningkatan Ekonomi*	Meningkatnya Ekonomi Daerah*	**Program Peningkatan Ketersediaan Pangan**		Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan yang difasilitasi; Capaian Skor PPH Ketersediaan	1 Orang; 89,5 Skor					DINAS PANGAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan	Provinsi			Jumlah Rekomendasi Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Regulasi	1 Regulasi	52.700.000	170.000.000	
			Adhikarya Pangan Nusantara	Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah pelaksanaan Pemberian Penghargaan APN tingkat Provinsi 1 kali	1 kali	-	170.000.000	
			Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Dokumen Analisis Akses Pangan masyarakat 1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	150.000.000	
			Penyusunan Dokumen Daerah Rawan Pangan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Dokumen Desa Rawan Pangan 1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	50.000.000	
			Koordinasi peningkatan produktivitas komoditi pangan	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			jumlah Dokumen laporan koordinasi peningkatan produktivitas komoditi pangan 1 dokumen	1 dokumen	-	200.000.000	
			Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Terbentuknya Desa Mandiri Pangan 5 Desa	5 Desa	233.030.000	500.000.000	
			Gerakan Pemenuhan Gizi 1000 hari kehidupan	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan Gerakan pemenuhan gizi 300 orang	300 orang	-	250.000.000	
			Rencana Induk Pengembangan Perekonomian dan Teknologi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Pangan 1 Dokumen	1 Dokumen	637.305.000	-	
			Penyediaan Sarana Pengelolah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah sarana pengolahan hasil pangan 1 unit	1 unit	-	325.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penanganan Daerah Rawan Pangan	Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah orang yang tertangani di daerah rawan pangan 350 orang	350 orang	272.500.000	350.000.000	
			Penyusunan dan Pengkajian Dokumen Neraca Bahan Makanan	Provinsi			Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan 1 Buku	1 Buku	186.600.000	250.000.000	
			Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Dokumen FSVA dan SKPG serta terlaksananya investigasi dan penanggulangan rawan pangan di wilayah kepulauan bangka belitung 1 Dokumen	1 Dokumen	78.600.000	175.000.000	
			Program Pengembangan Distribusi Pangan		persentase Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah; Coefisien Varian Harga pangan pokok (beras); Coefisien Varian Harga Pangan Hortikultura (Cabe Merah); Coefisien Varian harga pangan hewani (Ayam)	2,5 persen; 5 Persen; 25 persen; 10 persen					DINAS PANGAN
			Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat			Jumlah Gapoktan yang difasilitasi 5 GAPOKTAN	5 GAPOKTAN	159.532.854	750.000.000	
			Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor	Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor (Dokumen) 1 Dokumen	1 Dokumen	70.345.000	110.000.000	
			Penyusunan Neraca Prognosa Pangan	SKPD			Jumlah Laporan Neraca Prognosa Pangan 1 Laporan	1 Laporan	36.920.000	82.950.000	
			Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi	Provinsi, SKPD			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Daerah Pemerintah 30 ton	30 ton	350.600.000	575.000.000	
			Pengendalian Distribusi Pangan	Bangka Barat, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang			Jumlah Pengawasan Pemantauan Harga pangan Pokok di Tingkat Produsen, Konsumen dan pasokan di 6 Pelabuhan 4 Pengawasan	4 Pengawasan	157.229.601	200.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Pembinaan kepada Lumbung Pangan Masyarakat 2 kali	2 kali	80.820.000	300.000.000	
			Penindakan Hukum Kasus Penyimpangan Pangan	Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Bangka Barat			Teratasinya Kasus Penyimpangan Pangan 1 Kasus	1 Kasus	-	75.000.000	
			Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Gabah dan Beras	SKPD			Pelatihan untuk kelompok masyarakat 1 Angkatan	1 Angkatan	-	140.000.000	
			Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan		Peningkatan Skor PPH Konsumsi menjadi 92,50; Persentase Pangan yang aman dikonsumsi	89 Skor PPH; 80 Persen					DINAS PANGAN
			Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan termasuk gerakan makan sayur, buah dan ayam merawang (GEMA SABUK AMANG)	Belitung, Pangkal Pinang			Jumlah Event Gerakan Gema SABUK AMANG 2 Kali	2 Kali	115.300.000	200.000.000	
			Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tingkat Provinsi	Provinsi			Jumlah Event 1 Event	1 Event	-	250.000.000	
			Bimtek Peningkatan kualitas SDM di bidang pengawasan keamanan pangan	Provinsi			Jumlah Bimtek Keamanan Pangan 1 kali	1 kali	-	150.000.000	
			Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan pada kelompok masyarakat	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaatan Pekarangan 22 kelompok	22 kelompok	200.120.000	350.000.000	
			Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Event Daerah dan Nasional 2 Event	2 Event	250.000.000	300.000.000	
			Identifikasi dan Analisis Pola Pangan Harapan	Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Dokumen data Skor PPH 1 DOkumen	1 DOkumen	141.720.000	250.000.000	
			Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan 5 Kali	5 Kali	200.000.000	250.000.000	
			Pengadaan Mobil Lab Keliling Pengawasan Keamanan Pangan	SKPD			Jumlah Pengadaan Kendaraan Laboratorium Keliling 1 Unit	1 Unit	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan	Provinsi			Jumlah Sarana dan Prasarana 1 paket	1 paket	88.229.500	350.000.000	
			Pengembangan Pelaku usaha produk PSAT Lokal (Sertifikat (Prima 3, Sertifikat Prima 2 dan Registrasi PSAT) (Pelaku Usaha)	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Komoditi yang mendapat Sertifikat Produk Pertanian 25 Komoditi	25 Komoditi	190.000.000	250.000.000	
			Pengembangan Produk Pangan Lokal Hasil Pertanian	Provinsi			Jumlah Pelaku Usaha yang dibina 20 Pelaku usaha	20 Pelaku usaha	136.280.000	250.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
			Program Pembinaan Pemerintah Desa		Persentase aparatur desa dan lembaga kemansyarakatan yang terbina; Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa yang baik; Persentase desa yang menyusun PERDES (RPJMDES, RKPDES, APBDES tepat waktu)	3 Nilai; 3 Nilai; 3 NILAI					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan	Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Desa yang dimonitoring Bantuan Keuangannya 309 desa	309 desa	159.000.000	166.950.000	
			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Bangka Barat, Bangka, Belitung, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bangka Tengah, Pangkal Pinang			Jumlah Aparatur Desa yang dibina 40 Aparatur	40 Aparatur	295.000.000	309.750.000	
			Penataan Kewenangan Desa	Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah laporan penataan kewenangan Desa yang tersusun 2 Laporan Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina 21 Desa/Kel Jumlah Desa dan Kelurahan yang Evaluasi Perkembangannya 12 Desa/kel	2 Laporan 21 Desa/Kel 12 Desa/kel	807.127.668	847.484.051	
			Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa melalui Siskeudes	Belitung, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat			Jumlah Bendahara Desa 32 Aparatur Desa, Kabupaten dan Provinsi	32 Aparatur Desa, Kabupaten dan Provinsi	150.000.000	157.500.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat		persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina	3 Nilai; 3 Nilai					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pendampingan Kelembagaan Desa	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat			Jumlah Pokjanal Posyandu aktif 100 Pokjanal Posyandu Jumlah BUMDES yang aktif 40 BUMDes Jumlah Lembaga Adat Desa yang aktif 10 Lembaga Adat	100 Pokjanal Posyandu 40 BUMDes 10 Lembaga Adat	821.000.000	862.050.000	
			Pemberdayaan Masyarakat	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat			Jumlah Kelompok PKK yang dibina 18 Kelopok PKK Terlaksanannya Rakor PKK Provinsi 20 Rakor Jumlah Desa yang dinilai dalam kegiatan BBGRM 7 Desa/Kel	18 Kelopok PKK 20 Rakor 7 Desa/Kel	1.769.420.000	1.857.891.000	
			Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa	Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Julmlah Peserta 50 orang Jumlah Rakor 1 Rakor Julmlah Dokumen 2 Laporan Jumlah bantuan alat 4 Unit	50 orang 1 Rakor 2 Laporan 4 Unit	430.955.000	452.502.750	
			Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat		Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG	3 Nilai; 3 NILAI; 3 NILAI					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Bangka Barat, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Peserta Lomba dan gelar TTG yang dikutsertakan 30 peserta Jumlah Peserta workshop TTG 30 orang	30 peserta 30 orang	662.718.365	695.854.283	
			Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat			Jumlah Kader KPM yang dibina 30 Kader Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan 100 Pengurus BUMDes	30 Kader 100 Pengurus BUMDes	525.326.717	551.593.053	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembangunan Kawasan Perdesaan		Persentase dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang tersusun; Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikembangkan	3 Nilai; 3 Nilai					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pembangunan Kawasan Perdesaan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat			Jumlah rakor 2 rakor jumlah dokumen 2 Rancangan	2 rakor 2 Rancangan	1.107.901.157	1.163.296.215	
			Statistik								
			Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio Ketersediaan informasi sektoral prioritas pertahun	0					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Inventarisasi dan Pengelolaan data sektoral daerah	SKPD			Jumlah ketersediaan data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah 8 kelompok parameter (28.800 data)	8 kelompok parameter (28.800 data)	181.886.360	218.263.632	
			Komunikasi dan Informatika								
			Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase pemenuhan jaringan informasi di pulau terpencil; - Rasio intensitas informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata periode satu tahun; - Persentase jumlah sektor yang ada dengan informasi/ berita tiap sector yang dipublikasikan; Rasio informasi tentang pelayanan kesehatan dengan periode satu tahun; Persentase kesesuaian antara kuantitas berita dengan informasi yang dipublikasi	0 ; 5 Jenis; 13 Jenis; 0 ; 0					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Provinsi			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola 16 Saluran	16 Saluran	2.000.000.000	2.900.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Data Informasi Publik	Provinsi			Jumlah data/informasi pemerintah daerah 400 informasi/bln Jumlah data/informasi pemerintah daerah 2 Pertemuan kegiatan Jumlah data/informasi pemerintah daerah 2 Pameran kegiatan	400 informasi/bln 2 Pertemuan kegiatan 2 Pameran kegiatan	1.000.000.000	1.650.000.000	
			Pengelolaan Kemitraan	Provinsi			Jumlah mitra yang terfasilitasi 132 kemitraan	132 kemitraan	1.500.000.000	1.900.000.000	
			Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Persentase peningkatan permberdayaan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk birokrasi	6					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Provinsi, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat 6 kabupaten 20 kali layanan interaktif	20 kali layanan interaktif	442.511.622	619.516.272	
	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat*	Menurunnya Disparitas Pembangunan antara Wilayah dan Masyarakat*	**Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi**		Rasio luas wilayah desa dengan luas cakupan pelayanan jaringan internet; Persentase SMA/SMK yang telah berbasis IT; Persentase insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi; - Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	5 Jaringan; 1 Ada; 0 ; 0					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Provinsi			Kapasitas layanan Infrastruktur dan teknologi 1 paket command center Kapasitas layanan Infrastruktur dan teknologi 1 paket hotspot Kapasitas layanan Infrastruktur dan teknologi 3 paket internet Kapasitas layanan Infrastruktur dan teknologi 1 paket rak Kapasitas layanan Infrastruktur dan teknologi 2 paket lisensi Kapasitas layanan Infrastruktur dan teknologi 1 paket data center	1 paket command center 1 paket hotspot 3 paket internet 1 paket rak 2 paket lisensi 1 paket data center	7.369.895.000	6.660.669.750	
			Pengembangan dan Optimalisasi Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment	Provinsi			kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment 6 aplikasi layanan kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment 7 lisensi aplikasi pendukung kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment 40 website kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment 6 laporan	6 aplikasi layanan 7 lisensi aplikasi pendukung 40 website 6 laporan	1.526.920.000	1.844.612.000	
			Pembangunan Media Penyebaran Informasi Masyarakat	Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat			Jumlah Media Penyebaran Informasi Masyarakat 7 lokasi	7 lokasi	-	1.843.054.500	
			Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	Provinsi			Kapasitas Jaringan Komunikasi Data 6 interkoneksi Kapasitas Jaringan Komunikasi Data 1 Server Kapasitas Jaringan Komunikasi Data 1 Lisensi aplikasi pendukung	6 interkoneksi 1 Server 1 Lisensi aplikasi pendukung	375.000.000	300.000.000	
			Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi 0 insiden	0 insiden	50.000.000	180.000.000	
			Perpustakaan								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia*	Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas SDM*	**Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan**		Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ; Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka; Pertambahan pengunjung perpustakaan	0 %; 0 %; 0 %					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah	Provinsi			Jumlah dokumen Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah 2 Dokumen	2 Dokumen	66.055.000	120.000.000	
			Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Provinsi			jumlah pengunjung Perpustakaan Keliling Bagi pelajar, mahasiswa dan Masyarakat 4 Kabupaten	4 Kabupaten	270.679.000	400.000.000	
			Publikasi dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	Provinsi			Jumlah pengunjung hasil Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca bagi masyarakat umum 1.500 Orang	1.500 Orang	82.000.000	350.000.000	
			Kegiatan Pengelolaan Layanan Website	Provinsi			Jumlah informasi yang tersedia dalam website 200 Informasi	200 Informasi	36.603.600	70.000.000	
			Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka	Provinsi			Jumlah Bahan Pustaka yang terpelihara dan terkelola 430 Bahan Pustaka	430 Bahan Pustaka	35.860.000	100.000.000	
			Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Provinsi			Jumlah peserta lomba menulis puisi untuk anak SD, lomba bercerita bahasa daerah, lomba menulis anak untuk anak SMP dan SMA dan lomba penulisan cerita rakyat daerah 260 orang	260 orang	327.770.000	528.750.000	
			Penyediaan Buku Bacaan untuk Perpustakaan Sekolah	Provinsi			Jumlah Sekolah 1.015 Sekolah	1.015 Sekolah	426.036.500	500.000.000	
			Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah	Provinsi			Jumlah koleksi hasil terbitan daerah yang terkumpul berupa karya cetak dan karya rekam 140 terbitan	140 terbitan	53.955.000	75.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik*	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi*	**program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan**		presentase perpustakaan terakreditasi; Pertambahan pengelola perpustakaaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar	100 %; 40 orang					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			Lomba Pustakawan Terbaik Tingkat Provinsi	Provinsi			Jumlah pustakawan teladan tingkat provinsi 15 Orang	15 Orang	80.000.000	100.000.000	
			Penilaian Angka Kredit Pustakawan	Provinsi			Jumlah DUPAK pustakawan dan calon pustakawan 20 DUPAK	20 DUPAK	30.000.000	40.000.000	
			Kegiataan Pendataan Nomor Pokok Perpustakaan di Prov. Kep. Babel	Provinsi			Jumlah Perpustakaan sekolah yang memperoleh NPP 21 Perpustakaan	21 Perpustakaan	53.250.000	70.875.000	
			Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Prov. Kep. Babel	Provinsi			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang mengikuti Lomba 14 Perpustakaan	14 Perpustakaan	124.260.600	183.750.000	
			Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahaan dan Perpustakaan Sekolah	Provinsi			Jumlah perpustakaan yang dibina 21 Perpustakaan	21 Perpustakaan	72.426.200	107.100.000	
			Kegiatan Akreditasi Perpustakaan Sekolah	Provinsi			Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah terakreditasi 4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	106.502.000	115.000.000	
			Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Perpustakaan	Provinsi			Jumlah pustakawan yang ahli dan terampil 80 orang	80 orang	250.000.000	1.950.000.000	
			Pertanian								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Ekonomi*	Meningkatnya Ekonomi Daerah*	**Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura**		Peningkatan produksi komoditi strategis tanaman pangan (padi) ; peningkatan produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Besar) ; peningkatan produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Rawit) ; peningkatan produksi komoditi strategis Hortikultura (Bawang Merah) ; Pengembangan Kawasan Padi; Pengembangan kawasan cabai ; Pengembangan kawasan bawang merah; Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura ; NTP subsektor Tanaman Pangan; NTP subsektor Hortikultura	40.313 ton; 2.528,54 ton; 2.257,43 ton; 81,72 ton; 0 (kaw/unit); 0 (kaw/unit); 0 (kaw/unit); 30 (pelaku usaha/poktan); 94,08 %; 100,55 %					
			Pengembangan komoditi hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik	Provinsi			Pengembangan komoditas hortikultura strategis 15 hektar	15 hektar	643.970.000	1.450.000.000	
			Pengembangan Komoditi pangan dengan penerapan GP-PTT (padi dan jagung)	Provinsi			pelaksanaan GP-PTT tanaman padi dan jagung di provinsi kepulauan bangka belitung 200 hektar	200 hektar	675.775.000	2.250.000.000	
			Pelatihan teknis budidaya, penanganan panen dan pasca panen komoditi pangan dan hortikultura	Provinsi			Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kualitas SDM pertanian 3 Kelompok tani	3 Kelompok tani	54.700.000	65.000.000	
			Pengembangan komoditas hortikultura lokal yang unggul	Provinsi			Jumlah komoditas hortikultura lokal yang unggul 10 Ha	10 Ha	305.790.000	1.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian		ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian ; Kebijakan dan implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan ; Peningkatan pemberdayaan petani dalam mendukung sektor pertanian ; Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian	14 (%); 1 (Dok); 10 (%); 10 (%)					DINAS PERTANIAN
			Pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian	Provinsi			Terlaksananya pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian 100 %	100%	582.152.200	400.000.000	
			Pembangunan jaringan irigasi tersier	Provinsi			jaringan irigasi peetanian 500 ha	500 ha	774.890.000	3.500.000.000	
			Pengembangan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian	Provinsi			Berkembangnya kualitas pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian 100 %	100%	456.830.000	600.000.000	
			Rembug Tani Nasional	Provinsi			Terlaksananyan Rembug Tani Nasional 100 %	100%	1.847.640.500	-	
			Peningkatan kapabilitas penyuluhan dan SDM pertanian	Provinsi			Meningkatnya kapabilitas penyulluhan dan sdm pertaninan 100 %	100%	1.190.831.000	1.350.000.000	
			Penyusunan Rencana Desain Kawasan,DED dan KLHS agropolitan berbasis Demosntration Farmin Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Rencana Desain Kawasan,DED dan KLHS agropolitan berbasis Demosntration Farmin Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Dokumen	2 Dokumen	994.000.000	-	
			Program Pengembangan Perkebunan		Peningkatan produksi lada; Peningkatan produksi karet; Pengembangan kawasan lada ; Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan ; NTP subsektor Perkebunan	41.111 ton; 58.438 ton; 1 (kaw/unit); 31 (pelaku usaha/poktan); 98,8 %					DINAS PERTANIAN
			Intensifikasi tanaman perkebunan	Provinsi			peningkatan produktivitas tanaman perkebunan 1.000 Ha	1.000 Ha	2.214.812.500	4.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan	Provinsi			penerapan penanggulangan OPT perkebunan 200 Ha	200 Ha	351.245.000	500.000.000	
			Ekstensifikasi/Perluasan areal tanaman perkebunan	Provinsi			perluasan tanaman perkebunan pada kabupaten sentra 50 Ha	50 Ha	891.300.000	950.000.000	
			Penanganan pasca panen tanaman perkebunan	Provinsi			sarana pascapanen lada dan karet melalui poktan/gapoktan 4 Unit	4 Unit	376.715.000	2.100.000.000	
			Peningkatan pemasaran komoditas strategis perkebunan	Provinsi			pemasaran komoditas strategis perkebunan 100 %	100%	398.034.000	500.000.000	
			Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan		populasi ternak besar sapi ; populasi ternak ayam; Pengembangan kawasan ternak sapi ; Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan ; NTP subsektor Peternakan	13.090 (ekor); 12.075.000 (ekor); 1 (kaw/unit); 8 (pelaku usaha/poktan); 93,86 %					DINAS PERTANIAN
			Peningkatan populasi ternak	Provinsi			Meningkatnya populasi ternak (sapi dan unggas) 14 kelompok tani	14 kelompok tani	2.506.930.000	2.506.930.000	
			Pemberian asuransi peternakan	Provinsi, SKPD			Pemberian asuransi peternakan 2.000 ekor sapi	2.000 ekor sapi	200.000.000	200.000.000	
			Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor Peternakan	Provinsi			pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor peternakan 100 %	100%	173.950.000	300.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan	Provinsi			fungsi pelayanan laboratorium keswan dan klinik hewan 100 %	100%	515.415.000	450.000.000	
			Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis dan Gangguan Reproduksi	Provinsi			angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular/zoonosis pada ternak 100 %	100%	275.320.000	400.000.000	
			Sosialiasi pengawasan mutu hasil ternak sapi di RPH	Provinsi			sosialiasi pengawasan mutu hasil ternak sapi di RPH 40 Pelaku usaha	40 Pelaku usaha	72.200.000	200.000.000	
			Pengawalan dan bimtek pengolahan limbah ternak sapi / pupuk kompos / organik	Provinsi			pengawalan dan bimtek pengolahan limbah ternak sapi / pupuk kompos / organik 30 Kelompok	30 Kelompok	252.900.000	252.900.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih		Jumlah benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel; Jumlah benih tanaman pangan yang bersertifikat dan berlabel ; Jumlah benih tanaman hortikultura yang bersertifikat dan berlabel; Pengawasan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; Jumlah varietas unggul yang didaftarkan	1.050.000 (polibag) ; 125 (ton); 1.250 (polibag); 40 Produsen; 2 Varietas					DINAS PERTANIAN
			Pengawasan peredaran benih dan pembinaan produsen	Provinsi			Pengawasan dan pembinaan produsen benih yang mengedarkan benih 40 Produsen/penangkar	40 Produsen/penangkar	128.225.000	128.225.000	
			Sertifikasi benih Pertanian/Perkebunan	Provinsi			meningkatnya kualitas benih di provinsi kepulauan bangka belitung 100 %	100%	148.780.000	200.000.000	
			Penilaian kultivar/varietas unggul lokal	Provinsi			Jumlah varietas unggul lokal provinsi kepulauan bangka belitung 2 varietas	2 varietas	93.475.000	100.000.000	
			Peningkatan fungsi pelayanan UPTD BPSMB	SKPD			UPTD BPSMB 1 UPTD	1 UPTD	168.915.000	200.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman		Terkendalinya areal tanam yang terserang OPT dan DPI	5 (%)					DINAS PERTANIAN
			Peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman	Provinsi			Terkendalinya areal tanam yang terserang OPT dan DPI 5 %	5%	160.600.000	160.600.000	
			Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman	SKPD			UPTD Balai Proteksi Tanaman 1 UPTD	1 UPTD	240.000.000	300.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian		Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana; Ketersediaan bibit ayam ; Ketersediaan anakan sapi ; Ketersediaan benih sumber padi ; Ketersediaan bibit lada ; Ketersediaan bibit karet	6 Dok/Unit; 5.000 (ekor); 15 (ekor); 2 (ton); 25.000 polibag; 40.000 polibag					DINAS PERTANIAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian	SKPD			UPTD Balai Benih Pertanian 1 UPTD	1 UPTD	453.300.000	480.000.000	
			Penyediaan benih sumber dan benih sebar	Provinsi, SKPD			Meningkatnya ketersediaan benih sumber dan benih sebar 100 %	100%	938.670.000	938.670.000	
			Pembangunan gedung pertemuan dan prasarana penunjang	SKPD			tersedianya balai pertemuan dan sarana penunjangnya di UPTD Balai Benih Pertanian 1 paket	1 paket	1.877.000.000	-	
			Integrasi jagung dan sapi	SKPD			Tersedianya pakan ternak (jagung) 10 Ha	10 Ha	147.490.000	150.000.000	
			Pembangunan gudang pakan ternak silase	SKPD			tersedianya gudang pakan ternak silase 1 Unit	1 Unit	167.099.800	-	
			Pembangunan kandang ternak beserta sarana dan prasarananya	SKPD			Tersedianya kandang ternak beserta sarana dan prasarananya 1 paket	1 paket	2.350.240.000	-	
			Kehutanan								
	Penanggulangan Bencana*	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Terkelolanya Sumber Daya Alam*	**Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan**		Persentase luas Kawasan Hutan yang dikelola; Persentase izin usaha hasil hutan kayu ; Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan ; Presentase luas areal kawasan hutan yang dikelola di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	50 %; 20 %; 20 %; 9,53 %					DINAS KEHUTANAN
			Pemanfaatan Kawasan Hutan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka			Jumlah Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 11 Izin	11 Izin	292.900.300	450.000.000	
			Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Bangka Tengah			Jumlah izin usaha hasil hutan kayu 12 Izin	12 Izin	243.650.163	300.000.000	
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka			Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola 8 Dokumen	8 Dokumen	331.000.000	497.042.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu 2 Komoditi	2 Komoditi	362.821.513	300.000.000	
			Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	Luar Daerah, Provinsi			Terlaksananya keikutsertaan dalam Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan 1 Kali	1 Kali	504.000.000	650.000.000	
			Penyelesaian usulan perubahan status kawasan hutan / TORA	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Dokumen penyelesaian perubahan status kawasan hutan 6.600 Hektar	6.600 Hektar	167.400.000	250.000.000	
			Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem		Persentase Penanganan tindak pidana Kehutanan; Persentase Kawasan Ekosistem Essensial; Persentase Penurunan Luas Kebakaran Hutan	20 %; 20 %; 20 %					DINAS KEHUTANAN
			Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani 2 Berkas	2 Berkas	450.000.000	600.000.000	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Bangka Tengah, Belitung Timur			Penurunan Luas Kebakaran Hutan dan Lahan 3.955 Hektar	3.955 Hektar	342.506.000	500.000.000	
			Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah			Luas kawasan hutan dan lahan yang terlindungi 155.000 Hektar	155.000 Hektar	375.000.000	450.000.000	
			Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan 60 Orang	60 Orang	550.000.000	750.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tenaga Pendukung Polisi Hutan	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Petugas PAMHUT 15 Orang	15 Orang	512.500.000	600.000.000	
			Identifikasi,Inventarisasi dan Pemanfaatan Kawasan ekosistem essensial	Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Luas Kawasan ekosistem essensial yang diindetifikasi dan diinvetarisasi 2 Kawasan	2 Kawasan	257.527.000	319.527.000	
			Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat		Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial; Persentase DAS kritis yang dikelola; Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi	2,07 %; 9,11 %; 0,88 %					DINAS KEHUTANAN
			Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Dokumen Peningkatan Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai 2.194,64 Hektar	2.194,64 Hektar	225.000.000	300.000.000	
			Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah pemegang IPPKH yang memenuhi kewajiban rehabilitasi DAS 3 Izin	3 Izin	173.062.500	230.750.000	
			Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah dokumen penyelenggaran RHL 1 Dokumen Luas tegakan benih yang teridentifikasi dan terseleksi 20 Hektar	1 Dokumen 20 Hektar	177.515.000	177.515.000	
			Penyelenggaaraan Penyuluhan Kehutanan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terbina 85 Kelompok	85 Kelompok	529.235.000	680.000.000	
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi, SKPD			Luas rehabilitasi hutan dan lahan 80 Hektar	80 Hektar	852.073.000	900.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan Perhutanan Sosial	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 20.000 Hektar	20.000 Hektar	514.140.000	800.000.000	
			Penumbuhan dan Pengembangan kelompok pecinta alam/ pramuka/siswa sekolah	Provinsi, SKPD			Jumlah kelompok pecinta alam/pramuka 5 Kelompok	5 Kelompok	250.000.000	250.000.000	
			Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ gaharu dan pelawan	Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah sumber benih gaharu dan pelawan 20 Hektar	20 Hektar	499.725.000	400.000.000	
			Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kompleks Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Tengah, Pangkal Pinang					-	300.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan		Persentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	33,33 %					DINAS KEHUTANAN
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka			Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Sigambir Kotawaringin 2 Dokumen	2 Dokumen	217.000.000	300.000.000	
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bubus Panca	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka			Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Bubus Panca 2 Doumen	2 Doumen	215.368.000	300.000.000	
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka Selatan			Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Muntai Palas 2 Dokumen	2 Dokumen	218.508.000	250.000.000	
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah			Jumlah pengelolaan hutan KPHP Sungai Sembulan 2 Dokumen	2 Dokumen	275.310.000	300.000.000	
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat			Jumlah kegiatan pengelolaan hutan KPHP Rambat Menduyung 2 Dokumen	2 Dokumen	215.968.000	300.000.000	
			Pelayanan Tenis UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat			Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Jebu Bembang Antan 2 Dokumen	2 Dokumen	213.368.000	250.000.000	
			Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung			Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHL Belantu Mendanau 2 Dokumen	2 Dokumen	275.000.000	250.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur			Jumlah kegiatan pengelolaan hutan oleh KPHP Gunung Duren 2 Dokumen	2 Dokumen	275.000.000	250.000.000	
			Energi dan Sumber Daya Mineral								
	Peningkatan Ekonomi*	Meningkatnya Ekonomi Daerah*	**Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah**		Pengembangan dan Penyajian Perpetaan/SIG; Kontribusi Sektor Pemetaan; Pemerdayaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur/Masyarakat/Pelaku Usaha dalam Pemanfaatan/ Pengelolaan potensi Geologi dan Air Tanah; Data dan Informasi Geologi dan Air Tanah	100 %; 3.000.000.000 Rupiah; 100 %; 100 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Persentase Data dan Informasi Geologi dan Air Tanah 100 %	100%	150.000.000	490.000.000	
			DED dan Pembangunan Fasilitas Pemakaian Air Tanah	Provinsi			Jumlah DED Pembangunan Instalasi dan Pengeboran Air Bawah Tanah 3 Desa	3 Desa	1.700.000.000	2.000.000.000	
			Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Pesentase Kontribusi Kabupaten/Kota dalam penetuan Nilai Perolehan Air Tanah 100 %	100%	812.016.000	-	
			Kajian Inventarisasi Potensi Mineral Ikutan Timah	Provinsi			Peresentase Inventarisasi Potensi Mineral Ikutan Timah 0 %	0%	342.270.000	400.000.000	
			Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam		Kontribusi Sektor Pertambangan ; Pengawasan, Pembinaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Usaha Pertambangan MIneral Logam ; Penyelesaian Izin Pertambangan Mineral Logam; Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	65 M; 100 %; 100 %; 100 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam	Provinsi			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral Logam 100 %	100%	350.000.000	950.000.000	
			Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah Pendapatan Kontribusi Sektor Pertambangan 80 Milyar	80 Milyar	103.700.000	300.000.000	
			Verifikasi , Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)	Provinsi			Jumlah Dokumen terverifikasi dalam Rencana Reklamasi 10 Dokumen	10 Dokumen	103.945.000	500.000.000	
			Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Lahan Terganggu Oleh Aktifitas Pertambangan di Dalam dan di Luar Izin Usaha Pertambangan (IUP)	Provinsi			Persentase Invetarisasi dan Pemetaan Kawasan Lahan Terganggu 0 %	0%	950.396.000	2.000.000.000	
			Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Penyelesaian Izin Pertambangan Bukan Logam dan Batuan; Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pengawasan, Pembinaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Usaha Pertambangan MIneral Bukan Logam dan Batuan	100 %; 100 %; 100 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan	Provinsi			Persentase Apartur dalam Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Bukan Mineral dan Batuan 100 %	100%	223.820.000	750.000.000	
			Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Nominator dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan 3 Pemenang/Perusahaan	3 Pemenang/Perusahaan	75.000.000	320.000.000	
			Pertemuan Tahunan KTT dan Pembina Usaha Pertambangan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Peserta Pertemuan Teknis 180 Orang	180 Orang	112.000.000	180.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Sumber Daya Energi		Kontribusi Sektor Minyak dan Gas ; Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas; Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik; Rasio Ketersedian Daya Listrik	400 Ribu Barel; 100 %; 100 %; 100 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumah Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) 350 Unit	350 Unit	12.118.110.000	35.000.000.000	
			Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan 4 Laporan/Triwulan	4 Laporan/Triwulan	150.000.000	500.000.000	
			Koordinasi Kegiatan Migas dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Kontribusi dari Sektor Minyak dan Gas 400 Ribu Barel	400 Ribu Barel	125.850.000	240.000.000	
			Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan Gas	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemantauan Pendistribusian BBM dan Gas 4 Laporan/Triwulan	4 Laporan/Triwulan	150.000.000	290.000.000	
			Penyusunan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi			Jumah Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 1 Dokumen	1 Dokumen	321.280.000	-	
			Pemeliharaan Penerangan Jalan umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi			Persentase Pengadaan Spare part PLTS yang diganti 100 %	100%	300.000.000	550.000.000	
			Pembangunan Bio Gas Skala Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DAK)	Provinsi			Jumlah Desa Pembangunan Bio Gas Skala Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 Desa	5 Desa	1.576.500.000	2.000.000.000	
			Pariwisata								
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Persentase destinasi pariwisata provinsi yang ditingkatkan kualitas dan daya saing kepariwisataan	0 %					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daya Tarik Wisata Mangrove Kurau Barat	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah kawasan Ekowisata Mangrove yang tertata 1 kawasan	1 kawasan	177.500.000	-	
			Penyusunan RIRD KSPP Muntok dan Sekitarnya	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah Dokumen RIRD KSPP Muntok dan Sekitarnya 1 dokumen	1 dokumen	710.000.000	-	
			Penyusunan RIRD KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya	Provinsi, Bangka			Jumlah Dokumen RIRD KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya 1 Dokumen	1 Dokumen	710.000.000	-	
			Penyusunan RIRD KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan Sekitarnya	Bangka, Bangka Tengah, Pangkal Pinang			Jumlah Dokumen RIRD KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan Sekitarnya 1 Dokumen	1 Dokumen	710.000.000	-	
			Penyusunan RIRD KSPP Pulau Belitung dan Sekitarnya	Provinsi, Belitung Timur, Belitung			Jumlah Dokumen RIRD KSSP Pulau Belitung dan Sekitarnya 1 dokumen	1 dokumen	710.000.000	-	
			Penyusunan RIRD Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Toboali dan Sekitarnya	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah Dokumen Penyusunan RIRD Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Toboali dan Sekitarnya 1 Dokumen	1 Dokumen	532.500.000	-	
			Penyusunan RIRD Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Selat Gaspar dan Sekitarnya	Provinsi, Bangka Selatan, Belitung, Lepar Pongok, Selat Nasik,			Jumlah Dokumen RIRD Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Selat Gaspar dan Sekitarnya 1 Dokumen	1 Dokumen	532.500.000	-	
			Pelaksanaan Forum koordinasi pengembangan destinasi pariwisata	Provinsi			Presentase destinasi pariwisata yang dikembangkan 1 kegiatan	1 kegiatan	106.500.000	149.112.600	
			Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Provinsi			Jumlah Desa Wisata yang diberdayakan 4 kab/kota	4 kab/kota	135.400.000	189.654.000	
			Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Destinasi Pariwisata	Provinsi, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlahh sarana prasarana yang difasilitasi di destinasi pariwisata kabupaten / kota 11 DTW dan unit	11 DTW dan unit	3.978.400.000	4.177.324.200	
			Pembuatan Papan Informasi di Daya Tarik Wisata	Provinsi			Jumlah Papan Informasi Pariwisata 10 unit	10 unit	162.600.000	220.000.000	
			Penyusunan Kajian Geopark Bangka dan Belitung	Provinsi			Jumlah dokumen kajian yang tersusun 1 dokumen	1 dokumen	412.500.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Tingkat kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	5 %					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata 6 bahan promosi dan informasi	6 bahan promosi dan informasi	488.500.000	716.600.500	
			Pelayanan Informasi Pariwisata	Luar Daerah, Provinsi			Tersedianya informasi destinasi pariwisata Bangka Belitung 4 TIC	4 TIC	127.200.000	133.661.800	
			Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung	SKPD			Jumlah media informasi yang berbasis IT 2 website	2 website	167.000.000	299.112.600	
			Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah partisipasi event promosi pariwisata di dalam dan luar daerah 4 event	4 event	248.500.000	260.947.000	
			Partisipasi Event Promosi Pariwisata	Provinsi, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur			jumlah event pariwisata 15 event	15 event	2.500.000.000	5.503.725.000	
			Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui media	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah kerjasama dengan media massa 5 media cetak, media elektronik dan cyber media	5 media cetak, media elektronik dan cyber media	300.000.000	486.143.700	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan		persentase sumber daya pariwisata, industri pariwisata dan pelaku usaha sektor ekonomi kreatif yang dilatih dan kompeten; Jumlah Lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan pariwisata daerah	100 %; 100 %					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			penyelenggaraan sertifikasi bagi sumber daya pariwisata	Provinsi			Jumlah peserta sertifikasi sumber daya pariwisata 280 orang	280 orang	700.000.000	1.296.545.000	
			penyelengaraan pemilihan putra-putri kepariwisataan provinsi kepulauan bangka belitung	Provinsi			Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan Putra Putri Kepariwisataan 3 event	3 event	497.000.000	632.927.000	
			penyelengaraan kegiatan wisata kuliner	Provinsi			jumlah penyelenggaraan kegiatan wisata kuliner 1 kegiatan	1 kegiatan	177.500.000	186.390.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			forum komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan Daerah	Provinsi			Jumlah pertemuan Forum komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan 1 kegiatan	1 kegiatan	177.700.000	186.672.000	
			Pelatihan Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif	Provinsi			jumlah orang yang terlatih dalamPengembangan Industri Ekonomi Kreatif 30 pelaku usaha	30 pelaku usaha	390.500.000	745.563.000	
			Partisipasi Event Festival Nusantara	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah event / festival yang diselenggarakan 10 event / festival	10 event / festival	500.000.000	1.575.000.000	
			Kelautan dan Perikanan								
			Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut		Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan; Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi	815.077 Ha; 60 %					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pembangunan Dermaga Jetty	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka Selatan, Belitung, Bangka Barat			Jumlah sarana dan prasarana yang dmanfaatkan oleh masyarakat pesisir 3 Jetty	3 Jetty	5.100.000.000	5.500.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah rekomendasi teknis penerbitan perizinan 7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	200.000.000	360.000.000	
			Pendampingan Teknis RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah Pendampingan RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7 Kegiatan	7 Kegiatan	750.000.000	-	
			Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Luas kawasan konservasi Daerah yang Ditetapkan 44.000 Ha	44.000 Ha	200.000.000	500.000.000	
			Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil dan Kawasan Konservasi perairan (DAK)	Provinsi			Jumlah Sarana dan Prasarana uang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir 1 Jetty	1 Jetty	1.780.350.000	2.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Volume Produksi Perikanan Tangkap; Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap; Pertumbuhan pendapatan asli daerah; Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat ; Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok; Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik; Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	211.300 Ton; 6,79 %; 400 Juta Rupiah; 0 Ton; 0 Ton; 0 Ton; 0 Ton					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Provinsi			jumlah layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	1.951.742.700	2.200.000.000	
			Peningkatan dan Pengembangan PPI	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah PPI yang ditingkatkan dan dikembangkan 1 PPI	1 PPI	3.158.715.900	6.300.000.000	
			pengadaan kapal perikanan tangkap lengkap	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat, berupa kapal dan alat tangkapnya 8 kapal	8 kapal	1.769.063.000	10.500.000.000	
			Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat 240 unit	240 unit	1.119.295.000	6.100.000.000	
			Peningkatan kualitas SDM perikanan tangkap	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka Selatan, Belitung Timur			Jumlah SDM Perikanan Tangkap yang dibina 50 orang	50 orang	117.500.000	250.000.000	
			Peningkatan pengelolaan sumber daya ikan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah nelayan yang dibina 25 orang	25 orang	65.930.000	250.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan		Volume Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan; Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran; kontribusi komoditas ikan terhadap inflasi; Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Kelabat; Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok; Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik; Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	11.620 Ton; 53 Kg/Org/Thn; 20.610 Ton; 1,12 %; 8 Komoditas; 0 Ton; 0 Ton; 0 Ton; 0 Ton					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Identifikasi Potensi dan Penyusunan Panduan Investasi Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Dokumen Kajian Identifikasi Potensi dan Penyusunan Panduan Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Dokumen	1 Dokumen	1.814.198.000	-	
			Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah pasar hasil perikanan yang dibina 7 Pasar	7 Pasar	49.940.000	70.000.000	
			Penyusunan Masterplan Pengembangan Balai Benih Ikan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Dokumen Penyusunan Masterplan Pengembangan Balai Benih Ikan 1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	-	
			Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah pelaku usaha yang dibina untuk mendapatkan penerbitan SKP pada UPI skala menengah-besar maupun skala mikro-kecil 30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	110.870.000	175.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat 3 Unit	3 Unit	184.168.000	400.000.000	
			Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah promosi usaha perikanan 5 Kegiatan	5 Kegiatan	437.932.000	731.000.000	
			Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah promosi usaha perikanan 3 Promosi	3 Promosi	296.688.000	715.000.000	
			Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Persentase Wilayah Perairan Bangka Belitung yang diawasi	15 %					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pengawasan sumber daya kelautan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah hari operasi kapal pengawas 40 Hari Operasi jumlah pelaku usaha kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku 25 pelaku usaha	40 Hari Operasi 25 pelaku usaha	885.330.000	1.450.000.000	
			Pengawasan sumber daya perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah POKMASWAS aktif 30 kelompok jumlah pelaku usaha perikanan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku 40 pelaku usaha	30 kelompok 40 pelaku usaha	102.515.000	450.000.000	
			Pengawasan tindak pidana kelautan dan perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			umlah perkara tindak pidana kelautjan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel dan tepat waktu serta 3 berkas data dan informasi tindak pidana kelautan dan perikanan di kab/kota yang akuntabel 1 dokumen	3 berkas 1 dokumen	124.000.000	200.000.000	
			Peningkatan fungsi BOOST Center	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah layanan fungsi BOOST Center 12 bulan	12 bulan	165.048.000	240.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan		Pertumbuhan pendapatan asli daerah; Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	25 Juta Rupiah; 80 %					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan fungsi laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah layanan fungsi pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan 12 bulan	12 bulan	870.286.000	900.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau		Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul; Pertumbuhan pendapatan asli daerah	8,75 Juta Ekor; 25 Juta Rupiah					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit 12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	863.730.400	1.850.000.000	
			Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP)	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah produksi benih 35 Juta ekor	35 Juta ekor	191.160.000	750.000.000	
			Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Payau	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Tingkat survival rate benih dan calon induk unggul 25 %	25%	85.512.000	135.000.000	
			Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak (DAK)	Provinsi			Tersedianya pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana BBIL 1 Paket	1 Paket	1.936.594.000	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut		Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul; Pertumbuhan pendapatan asli daerah	0,05 Juta Ekor; 150 Juta Rupiah					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit 12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	789.380.000	1.200.000.000	
			Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah produksi benih 0,055 Juta Ekor	0,055 Juta Ekor	223.906.000	440.000.000	
			Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjungrusa (DAK)	Provinsi			Tersedianya pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana BBIL 1 Paket	1 Paket	809.518.000	1.000.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar		Jumlah Calon Induk Unggul; Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul; Pertumbuhan pendapatan asli daerah	6.000 ekor; 0,3 Juta ekor; 125 Juta Rupiah					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit 12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	437.137.000	1.000.000.000	
			Perdagangan								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Perdagangan		Pertumbuhan Volume Ekspor; Persentase rumah tangga miskin yang bekerja di sektor perdagangan; Persentase pemantauan dan pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok); Persentase peningkatan sarana dan sarana perdagangan yang dibangun; Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan; Pertumbuhan komoditi yang terjual malalui Pasar Lelang; Persentasse peningkatan promosi produk dalam negeri	860.000 ton; 10 %; 73 %; 0 %; 0 %; 0 Komoditi; 10 %					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Pelaksanaan Pasar murah	Provinsi			Jumlah pelaksanaan 30 kali	30 kali	360.000.000	500.000.000	
			Pelaksanaan Paper Day	Provinsi			Terlaksananya kegiatan partisipasi 200 org	200 org	437.741.000	447.741.000	
			Peningkatan kompetensi pelaku usaha sektor perikanan	Provinsi			Jumlah Pelaku usaha 30 Pelaku usaha	30 Pelaku usaha	60.750.000	100.000.000	
			Operasi Pasar Murah	Provinsi			Jumlah Masyarakat 30.000 KK	30.000 KK	3.789.650.000	3.800.000.000	
			Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	Provinsi			Jumlah Pelaku usaha 40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	300.000.000	500.000.000	
			Pengadaan lahan dan Pembangunan PUJASERA	Provinsi			jumlah lahan yang dibebaskan 3 lahan	3 lahan	10.300.000.000	20.000.000.000	
			Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	Provinsi, Bangka Tengah			Jumlah gudang diadakan, gudang terbangun dan sistem resi gudang yang dijalankan/terkelola 4 bangunan dan sistem resi gudang	4 bangunan dan sistem resi gudang	2.705.680.000	7.000.000.000	
			Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaku usaha	Provinsi			Jumlah Pelaku Usaha 40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	113.000.000	250.000.000	
			Peningkatan dan perluasan akses pasar	Provinsi			Jumlah keikutsertaan 2 Kali	2 Kali	72.600.000	1.000.000.000	
			Peningkatan kemampuan SDM Perdagangan dan Produk	Provinsi			Jumlah orang 160 Orang	160 Orang	153.910.000	400.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perindustrian								
			Program Pengembanga Wilayah dan Pengawasan Industri		Jumlah kawasan strategis/kawasan industri/kawasan sentra; Jumlah industri yang memenuhi standar industri	0 kawasan; 15 Industri					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)	Provinsi			Jumlah Dokumen yang tersususn 1 Dokumen	1 Dokumen	218.524.000	-	
			Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan			Jumlah Industri yang diawasi 58 industri	58 industri	112.060.000	500.000.000	
			Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis	Provinsi			Jumlah Dokumen tesususun 1 Dokumen	1 Dokumen	60.897.000	300.000.000	
			Pengembangan Kawasan stategis/kawasan industri/sentra	Provinsi			Jumlah Dokumen yang Tersususun 1 Dokumen	1 Dokumen	286.358.000	400.000.000	
			Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri	Provinsi, Bangka Selatan, Belitung			Jumlah Lokasi Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri 1 lokasi	1 lokasi	45.660.000	150.000.000	
			Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	Provinsi			Jumlah Industri Besar dan SIKIM yang teregistrasi 1 unit	1 unit	128.899.000	450.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri		Persentase tenaga kerja Industri terhadap total tenaga kerja; Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanan; Persentase Tenaga Kerja yang tererap di Industri Pariwisata; Persentase industri yang memiliki informasi kandungan nutrisi olahan pangan; Pertumbuhan industri pada sektor pertanian; Persentase tenaga kerja industri pada sektor pertanian; Pertumbuhan industri turunan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan; Persentase tenaga kerja yang terserap di bidang industri turunan pertambangan`	5,1 %; 0,68 %; 0,31 %; 2,96 %; 1.474 unit; 10,13 %; 4 unit; 1,04 %					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Industri oleh PFPP	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Belitung, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur			Jumlah Pelaku Industri 210 Pelaku Industri	210 Pelaku Industri	147.855.000	240.699.000	
			Seminar Halal Internasional	Provinsi			Jumlah Peserta 100 orang	100 orang	158.305.000	210.000.000	
			Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	Provinsi			Jumlah SDM Yang Terlatih 180 Pelaku Industri/masyarakat	180 Pelaku Industri/masyarakat	677.439.000	400.000.000	
			Inkubator Wirausaha baru	Provinsi			Jumlah Kelompok 1 kelompok	1 kelompok	100.000.000	245.112.000	
			Peningkatan Daya Saing Produk Industri	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi 610 Pelaku industri	610 Pelaku industri	674.235.000	743.638.500	
			Rumah Pengembangan Produk	Provinsi			Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi 400 Pelaku Industri	400 Pelaku Industri	200.000.000	542.586.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Lomba Industri Kreatif	Provinsi			Jumlah Produk Kreatif 21 produk	21 produk	82.513.500	99.016.200	
			Pembinaan dan Pengembangan OVOP	Provinsi			Jumlah OVOP 3 OVOP	3 OVOP	60.000.000	180.000.000	
			Promosi/Gelar Produk Industri	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Event 9 event	9 event	1.500.000.000	1.803.443.250	
			Pemberdayaan Dekranasda	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Pelaku Industri/Masyarakat 500 Pelaku Industri/Masyarakat	500 Pelaku Industri/Masyarakat	751.405.000	824.937.750	
			Program Peningktan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian		Indeks Keberdayaan Konsumen; Persentase pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga); Persentase pengembangan standarisasi dan lab. kemetrologian	20 Indeks; 10 %; 10 %					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Provinsi			Jumlah barang dan jasa 10 barang dan jasa	10 barang dan jasa	415.500.000	896.000.000	
			Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Provinsi, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Kabupaten/Kota 7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100.000.000	355.000.000	
			Peringatan Hari Konsumen Nasional	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah peserta 500 orang	500 orang	650.796.000	150.000.000	
			Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka, Pangkal Pinang			Jumlah Konsumen 400 orang	400 orang	60.500.000	135.000.000	
			Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta 130 orang	130 orang	120.000.000	150.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk		Persentase komoditi unggulan daerah yang di uji (7 komoditi) dan kalibrasi peralatan (4 besaran)	27 %					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah Pegawai 23 orang	23 orang	750.000.000	845.195.000	
			Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	Provinsi			Jumlah Lingkup Akreditasi 3 ruang lingkup	3 ruang lingkup	155.724.000	114.700.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Personil Terlatih 8 personil	8 personil	135.000.000	104.712.000	
			Monitoring Mutu Pengujian	Belitung Timur, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Bangka Selatan			Laporan Mutu Komoditi 2 laporan	2 laporan	196.575.000	196.822.000	
			Transmigrasi								
			Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigarasi		persentase KK transmigrasi mandiri	80,04 %					DINAS TENAGA KERJA
			Peningkatan fungsi POKJA KTM Tingkat Provinsi	Provinsi			Jumlah dokumen hasil pembahasan dengan tim POKJA KTM 1 laporan	1 laporan	39.632.850	81.520.000	
			peningkatan kapasitas SDM bidangTransmigrasi	Provinsi			Jumlah warga transmigrasi yang mendapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi 40 orang	40 orang	101.694.000	173.320.350	
			Gema Hari Bhakti Transmigrasi tingkat Provinsi Kep.Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah laporan hasil peringatan hari bhakti transmigrasi 1 dokumen	1 dokumen	57.515.200	95.623.500	
			Keuangan								
	Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik*	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi*	**Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah**		Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah; Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah ;	23,76 %; 3 NILAI					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	Luar Daerah, Provinsi			Tercapainya realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah melalui PKB, BBNKB, PAP, PBBKB dan Pajak Rokok 619.190.464.260 Rp	619.190.464.260 Rp	696.645.000	812.005.000	
			Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka 12 bulan	12 bulan	559.503.750	857.905.750	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung	Belitung			Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung 12 bulan	12 bulan	612.750.000	917.000.000	
			Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 12 bulan	12 bulan	411.315.330	574.791.000	
			Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah bulan layanan Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat 12 bulan	12 bulan	550.116.500	575.000.000	
			Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan 12 bulan	12 bulan	422.812.500	620.125.000	
			Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur 12 bulan	12 bulan	483.750.000	741.750.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	SKPD			Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah 12 Bulan	12 Bulan	674.595.000	834.186.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling (PPRG)	Provinsi			Jumlah Bulan Layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling 12 Bulan	12 Bulan	483.380.000	613.554.750	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	Pangkal Pinang			Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan Samsat Corner 12 Bulan	12 Bulan	97.170.000	99.599.250	
			Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	Provinsi			Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait 2 kali	2 kali	64.590.000	121.985.250	
			Penyusunan Pedoman tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang disusun 3 PERGUB	3 PERGUB	80.900.000	102.684.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sosialisasi Pajak Daerah	Provinsi			jumlah peserta Sosialisasi Perda Pajak Daerah 490 orang jumlah hari pameran yang diikuti 4 hari Jumlah spot sosialisasi pada media massa cetak dan elektronik 220 kali	490 orang 4 hari 220 kali	377.560.000	645.000.000	
			Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah bulan layanan Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang 12 bulan	12 bulan	600.000.000	1.000.000.000	
			Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah		Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap Pendapatan Daerah	76,24 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Provinsi			jumlah Perangkat Daerah dan pihak terkait penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain 40 instansi	40 instansi	316.335.000	443.900.000	
			Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Provinsi			Jumlah penyelenggaraan Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain 0 kali	0 kali	-	60.530.825	
			Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Provinsi			Jumlah penyelenggaraan Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 1 kali	1 kali	112.550.000	187.000.000	
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 45 orang	45 orang	49.996.000	-	
			Penyusunan Pedoman Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah	SKPD			Jumlah Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah 2 pergub	2 pergub	74.830.000	-	
			Pembelajaran pengelolaan dan peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ke daerah lain	Luar Daerah			Jumlah kunjungan dalam rangka Pelaksanaan Pembelajaran pengelolaan dan peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ke daerah lain 2 kali	2 kali	-	110.000.000	
			Tim pengawasan peningkatan pendapatan daerah	Provinsi			Realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2.614.692.766.940 Rp	2.614.692.766.940 Rp	330.230.000	550.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Penganggaran Pembangunan Daerah		Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jadwal penetapan APBD dan perubahan APBD; Prosentase kesesuaian antara RAPBD dengan dokumen KUA-PPAS	3 nilai; 100 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD 4 rancangan peraturan	4 rancangan peraturan	1.331.625.000	1.621.416.500	
			Peningkatan fungsi pelayanan aplikasi SIMDA	Provinsi			terlaksananya asistensi aplikasi SIMDA 0 modul	0 modul	-	300.000.000	
			Penyusunan KUA dan PPAS	SKPD			Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan 4 DOKUMEN	4 DOKUMEN	626.160.000	688.776.000	
			Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD (PPRG)	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 200 orang	200 orang	225.000.000	350.000.000	
			Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) (PPRG)	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 100 orang	100 orang	170.640.000	-	
			Penyusunan Analisa Standar Belanja	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah keputusan Gubernur tentang Analisa Standar Belanja 1 keputusan	1 keputusan	200.000.000	-	
			Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD 14 keputusan	14 keputusan	500.000.000	400.000.000	
			Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD 0 keputusan	0 keputusan	-	400.000.000	
			Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Provinsi			Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 8 kali	8 kali	187.500.000	275.000.000	
			Penyusunan pedoman tentang penyusunan RKA-PD/PPKD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Rapergub tentang pedoman penyusunan RKA-PD/PPKD 1 rancangan peraturan	1 rancangan peraturan	220.480.000	375.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan		Prosentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 rancangan peraturan	1 rancangan peraturan	300.000.000	370.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah bulan layanan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan 12 bulan layanan	12 bulan layanan	508.870.000	670.000.000	
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 1 laporan	1 laporan	100.000.000	120.000.000	
			Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 7 keputusan	7 keputusan	120.000.000	140.000.000	
			Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Nota Kesepakatan antara Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyusunan Laporan Keuangan 1 dokumen	1 dokumen	132.759.142	220.000.000	
			Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah		Nilai aset daerah yang dapat diyakini kewajarannya; Prosentase kontribusi kemanfaatan aset daerah terhadap PAD	4.633.238.278.093,17 Rp; 0,33 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 200 orang	200 orang	163.828.000	252.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan				Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)Pengadaan dan Pemeliharaan 1 keputusan	1 keputusan	50.000.000	75.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Laporan Pengadaan Barang 1 laporan	1 laporan	246.830.000	480.000.000	
			Forum Komunikasi Manajemen Asset Daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Dokumen data permasalahan dan pemecahan masalah asset di tingkat Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0 dokumen	0 dokumen	-	130.000.000	
			Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah	Provinsi			Jumlah Dokumen Penilaian Asset yang sebelumnya bernilai Rp.0,00/Rp 1,00 dan Asset yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga 1 dokumen	1 dokumen	192.700.000	261.580.000	
			Penyusunan pedoman tentang pengelolaan barang milik daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah pergub tentang pengelolaan barang milik daerah 1 peraturan	1 peraturan	133.550.000	203.000.000	
			Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PPRG)	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 orang	0 orang	-	132.000.000	
			Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25 orang	25 orang	148.328.000	245.000.000	
			Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	Provinsi			Jumlah Laporan Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah 2 laporan	2 laporan	138.812.000	205.318.850	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 keputusan	1 keputusan	149.850.000	250.000.000	
			Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Keputusan Gubernur tentang penetapan penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 keputusan	1 keputusan	117.200.000	135.000.000	
			Penyusunan laporan barang milik daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 laporan	2 laporan	129.660.000	187.000.000	
			Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah	Provinsi			Jumlah Sertifikat lahan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20 sertifikat bidang tanah	20 sertifikat bidang tanah	163.920.000	350.000.000	
			Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi		prosentase bendahara perangkat daerah yang berkompeten	100 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD (PPRG)	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD 120 orang	120 orang	140.064.000	335.524.200	
			Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen register SP2D, Buku Kas Umum B.IX BUD, Laporan posisi kas harian dan laporan posisi kas bulanan 4 dokumen	4 dokumen	96.400.000	154.000.000	
			Peningkatan fungsi pelayanan dan pemeliharaan sistem penggajian ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang			Jumlah bulan layanan Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung 12 bulan	12 bulan	85.587.000	132.269.500	
			Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan								
			Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan		Persentase Pegawai ASN Yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi; Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	93 %; 83 %; 91 %					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan dan Pengadaan ASN	Provinsi, SKPD			Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN / Sekolah Kedinasan 25 Orang Jumlah Dokumen Perencanaan Kepegawaian 4 Dokumen Jumlah Yang Lulus Seleksi CASN/ASN 150 Orang	25 Orang 4 Dokumen 150 Orang	1.000.043.725	1.286.094.000	
			Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun	Provinsi, SKPD			Jumlah ASN yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun 750 Orang	750 Orang	173.482.000	200.000.000	
			Promosi dan Mutasi ASN	SKPD			Jumlah ASN yang Lulus Seleksi Mutasi 50 Orang Jumlah ASN yang di Promosi 250 Orang	50 Orang 250 Orang	936.404.980	930.000.000	
			Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara		Persentase SKP Pegawai ASN Yang Berkategori Baik dan Dinilai Tepat Waktu; Persentase Akurasi Data dan Informasi Kepegawaian; Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang; Tingkat Kesenjangan Kompensasi Dalam Jabatan Yang Sama	55 %; 78 %; 0,16 %; 0 %					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	SKPD			Jumlah ASN yang di monev SKP-nya 5.000 Orang	5.000 Orang	43.112.100	175.000.000	
			Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	SKPD			Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani 8 Kasus Jumlah ASN Yang Diperiksa Untuk Cuti Sakit / Kejiwaan 3 Orang Jumlah ASN yang diverifikasi/divalidasi 5.396 Orang Jumlah Regulasi Kepegawaian 3 Dokumen Jumlah ASN Yang mengikuti Workshop 120 Orang Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya 5.396 Orang Jumlah ASN yang diperiksa Narkoba 1.500 Orang	8 Kasus 3 Orang 5.396 Orang 3 Dokumen 120 Orang 5.396 Orang 1.500 Orang	1.212.141.800	1.270.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian	SKPD			Jumlah Data Kepegawaian Yang Diupdate 8.500 Data Jumlah ASN Yang Diperbaiki NIP, Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir 10 Orang Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang dirilis 4 Aplikasi Jumlah Artikel, Konten, Terjemahan 350 Artikel/terjemahan/konten Jumlah Arsip Kepegawaian 4.500 Arsip Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan DUK 280 Buku Jumlah ID Card 3.000 Buah	8.500 Data 10 Orang 4 Aplikasi 350 Artikel/terjemahan/konten 4.500 Arsip 280 Buku 3.000 Buah	525.096.250	703.540.000	
			Peningkatan Kesejahteraan, Pemberian Penghargaan dan Pengembangan Profesi ASN	SKPD			Jumlah ASN yang menerima KGB 2.000 Orang Jumlah ASN yang menerima KARIS / KARSU / KARPEG 100 Orang Jumlah ASN yang dibina rohaninya 1.600 Orang Jumlah Dokumen Kepengurusan KORPRI dan Koperasi 0 Dokumen Jumlah ASN berprestasi 3 Orang Jumlah ASN penerima Satya Lencana 100 Orang Jumlah ASN Purnabakti 0 Orang Jumlah Atlet ASN Berprestasi 0 Orang Jumlah ASN yang mengikuti Tilawatil Quran 5 Orang	2.000 Orang 100 Orang 1.600 Orang 0 Dokumen 3 Orang 100 Orang 0 Orang 0 Orang 5 Orang	730.037.000	1.774.000.000	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara		Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial; Persentase Pegawai ASN Yang Meningkat Kompetensi Teknis dan Fungsional; Nilai Akreditasi Diklat; Persentase Pegawai ASN Yang Meningkat Pendidikan Formalnya	91 %; 82 %; 2 Nilai; 36,9 %					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	SKPD			umlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan 80 Orang Jumlah ASN yang Lulus Diklat Dasar 120 Orang	80 Orang 120 Orang	2.005.094.000	3.850.000.000	
			Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	SKPD			Jumlah ASN yang lulus Diklat teknis dan fungsional 880 Orang Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek Melalui Jalur Kontribusi 120 Orang	880 Orang 120 Orang	3.076.996.500	5.200.000.000	
			Peningkatan Pendidikan Formal	SKPD			Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa dan Cost Sharing 35 Orang	35 Orang	2.126.509.000	2.858.100.000	
			Peningkatan Mutu Kediklatan	SKPD			Nilai Akreditasi Diklat 2 Nilai Jumlah Dokumen 3 Dokumen	2 Nilai 3 Dokumen	240.039.000	415.000.000	
			Program Penilaian dan Pemetaan Kompetensi ASN		Persentase ASN Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Standar Penilaian	20,89 %					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengukuran dan Penilaian Kompetensi Aparatur	SKPD			Jumlah ASN Yang Dianalisa Kebutuhan Uji Kompetensinya 0 Orang Jumlah ASN Yang Mengikuti Revolusi Mental 0 Orang Jumlah ASN yang Mengikuti Assesment 800 Orang Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara 0 Orang Jumlah ASN Yang Mengikuti Roadshow Penilaian Kompetensi ASN 0 Orang Jumlah ASN Yang Mengikuti Workshop Kepemimpinan 0 Orang Jumlah ASN yang lulus seleksi Talent Scounting 100 Orang Jumlah ASN Yang Lulus Ujian Dinas Tingkat I dan II 0 Orang Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi PIM III dan IV 0 Orang Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Berorganisasi ASN 0 Orang Jumlah ASN Yang Mengikuti Pembangunan Karakter Bangsa 0 Orang Jumlah ASN Yang Dipetakan Rekam Jejaknya 0 Orang Jumlah ASN Yang Dievaluasi Pelaksanaan Penilaian dan Pemetaannya 0 Orang	0 Orang 0 Orang 800 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 100 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang	1.452.516.450	3.667.450.000	
			Persandian								
			Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik Pemerintah daerah di lingkungan Pemprov Babel	100 %					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang			Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah 4 Layanan	4 Layanan	63.905.485	68.405.485	
			Kearsipan								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan		Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	100 %					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			Lomba arsiparis teladan Tingkat Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Peserta Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi 30 orang	30 orang	97.385.000	-	
			Lomba pengelolaan Kearsipan desa/kel, OPD, LKD kab/kota	Provinsi			Jumlah Peserta Lomba pengelolaan Kearsipan 21 orang	21 orang	92.225.000	-	
			Penilaian Angka Kredit Arsiparis	Provinsi			Jumlah PAK yang dinilai 80 PAK	80 PAK	71.170.000	110.396.000	
			Pembinaan kearsipan di SMA/SMK dan SLB Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah SMA/SMK dan SLB yang dibina 28 SMA/SMK dan SLB	28 SMA/SMK dan SLB	115.346.000	-	
			Pembinaan, pendampingan dan lomba kearsipan di Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Perangkat daerah yang dibina, didampingi dan dilombakan 40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	142.480.000	-	
			Arsip Masuk Desa	Provinsi			Jumlah desa/kelurahan yang mendapat layanan sadar arsip 35 Desa/Kel	35 Desa/Kel	141.980.000	302.736.000	
			Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip		Pertambahan jumlah arsip yang dikelola (Dinamis dan Statis)	0 %					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Provinsi			Jumlah arsip yang dipelihara provinsi 200 arsip	200 arsip	35.503.000	60.000.000	
			Penelusuran sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah arsip sejarah provinsi kepulauan bangka belitung 251 Buku Jumlah arsip sejarah provinsi kepulauan bangka belitung 16 Dokumen	251 Buku 16 Dokumen	233.015.000	-	
			Pendataan arsip Inaktif di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah arsip inaktif 44 Arsip Inaktif	44 Arsip Inaktif	45.900.000	78.750.000	
			Pengelolaan dan pendataan arsip vital di Kabupaten/kota Provinsi kep. Bangka Belitung	Provinsi			jumlah LKD di kab/kota 7 LKD Kab/kota	7 LKD Kab/kota	106.509.000	110.000.000	
			Pemberkasan dan pendataan arsip terjaga di Provinsi kep. Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah arsip terjaga 40 arsip	40 arsip	49.704.200	90.000.000	
			Pendampingan pengelolaan arsip dinamis di Kab/Kota	Provinsi			jumlah LKD di kab/kota 7 LKD Kab/Kota	7 LKD Kab/Kota	161.454.000	250.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendampingan Pendataan Arsip Statis Kabupaten/Kota	Provinsi			Jumlah LKD kab/kota yang didampingi 12 Arsip	12 Arsip	66.900.000	135.000.000	
			Penelitian dan Pengembangan								
	Peningkatan Ekonomi*	Meningkatnya Ekonomi Daerah*	**Program Penelitian dan Pengembangan**		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Kajian Science Technology Park	Provinsi			Jumlah Dokumen Pengembangan Teknology Park 1 Dokumen	1 Dokumen	308.280.000	-	
			Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Penelitian 4 penelitian	4 penelitian	380.575.000	630.000.000	
			Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi Daerah 1 Dokumen	1 Dokumen	234.850.000	420.000.000	
			Penguatan Jaringan Kelitbangan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Kelitbangan 3 Dokumen	3 Dokumen	286.275.000	682.500.000	
			Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi/Dokumen Penelitian yang dihasilkan 12 Rekomendasi/Penelitian	12 Rekomendasi/ Penelitian	432.100.000	1.100.000.000	
			Sekretariat Daerah								
			Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah		Meningkatnya koordinasi hubungan kepala daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung; Meningkatnya jumlah kerjsasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri	90 %; 90 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Terlaksananya Rapat Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Kali	2 Kali	220.949.000	382.389.000	
			Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	SKPD			Terlaksananya keikutsertaan Provinsi dalam APPSI 1 Kali	1 Kali	101.320.000	230.464.000	
			Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	SKPD			Terlaksananya keikutsertan dalam BKS Provinsi Kepulauan 1 Kali	1 Kali	137.765.704	260.284.000	
			Kegiatan Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	Provinsi			jumlah rekomendasi kerjasama/perjanjian 8 rekomendasi	8 rekomendasi	197.400.000	144.411.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Inventarisasi potensi kerjasama	Provinsi			Prosentase Terlaksananya inventarisasi potensi daerah yang dapat dikerjasamakan oleh perangkat daerah 100 %	100%	93.150.000	119.374.000	
			Kegiatan Penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat	Provinsi			Pelaksanaan penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat 4 kali pertemuan	4 kali pertemuan	888.700.000	450.000.000	
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		Prosentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100 persen					SEKRETARIAT DAERAH
			Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Provinsi			terlaksannya pelayanan yang optimal kepada masyarakat 21 Rekomendasi	21 Rekomendasi	-	430.233.000	
			Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah	Provinsi			Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi bansos dan hibah 200 Proposal	200 Proposal	133.985.000	186.235.000	
			Evaluasi dan Analisi Proposal Bansos dan Hibah	Provinsi			Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah 500 proposal	500 proposal	201.204.000	253.204.000	
			Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan		Persentase penataan Peraturan Perundang-undangan	80 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan Propemperda Dan Rancangan Peraturan Daerah	Provinsi			Jumlah Raperda yang selesai disusun 10 Raperda Jumlah Usulan Propemperda yang selesai disusun 1 Usulan Propemperda	10 Raperda 1 Usulan Propemperda	959.843.600	1.500.000.000	
			Penyusunan Produk Hukum Daerah	Provinsi			Jumlah Produk Hukum Daerah yang selesai disusun 70 Peraturan Gubernur Jumlah Produk Hukum Daerah yang selesai disusun 900 Kepgub	70 Peraturan Gubernur 900 Kepgub	567.480.000	500.000.000	
			Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	Provinsi			Jumlah Naskah Hukum Lainnya (NHL) yang selesai disusun 100 NHL	100 NHL	67.220.000	150.000.000	
			Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi			Jumlah Rancangan PHD Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan Teknis 20 Rancangan PHD	20 Rancangan PHD	-	420.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi			Jumlah Raperda Kabupaten/Kota yang selesai dievaluasi 10 Raperda	10 Raperda	317.780.000	400.000.000	
	Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik*	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi*	**Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan**		Persentase penyelesaian kasus tanah negara; Persentase bidang tanah pemerintah provinsi yang bersertifikat; persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	77.460.000 meter persegi; 30 bidang; 20 persentase					SEKRETARIAT DAERAH
			Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka, Belitung Timur			terlaksananya proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 30 bidang 30 Bidang	30 Bidang	108.400.000	118.345.000	
			Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Belitung Timur, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung			Jumlah penyelesaian sengketa batas daerah antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 sengketa batas administrasi wilayah	1 sengketa batas administrasi wilayah	59.244.500	108.129.000	
			Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan, Dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan)	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang			Jumlah Kabupaten yang terinventarisir 6 Kabupaten	6 Kabupaten	124.370.500	157.000.000	
			Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas daerah	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah segmen batas daerah yang diinventarisir dan dipelihara 6 segmen batas	6 segmen batas	48.806.282	105.000.000	
			Kegiatan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Belitung Timur, Belitung			Jumlah pilar batas daerah yang terpasang 5 pilar batas	5 pilar batas	94.762.475	130.800.000	
			Pengadaan Lahan	Provinsi			Jumlah Lahan yang tersedia 40 ha	40 ha	4.950.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Otonomi Daerah		Peringkat penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi ; Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan; Jumlah kepala daerah dan anggota legislative yang terfasilitasi secara administrasi; Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik	15 peringkat; 10 Prosentase; 20 %; 90 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Provinsi			Tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1 Dokumen	1 Dokumen	165.953.745	327.905.000	
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017	Provinsi, SKPD			Tersusunnya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) 1 dokumen	1 dokumen	351.810.000	367.500.000	
			Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung			Tersusunnya dokumen EKPPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung 7 dokumen	7 dokumen	276.971.408	467.000.000	
			Kegiatan Desk Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Belitung			Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkada Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung 3 Provinsi/Kabupaten/Kota	3 Provinsi/Kabupaten/Kota	143.257.000	262.500.000	
			Kegiatan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan KDH dan WKDH	Provinsi			Terselenggaranya Pelantikan KDH dan WKDH Provinsi/Kabupaten/Kota 3 kali	3 kali	116.415.704	210.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri	Provinsi			Jumlah izin keluar negeri yang dikeluarkan 10 surat izin	10 surat izin	74.753.565	157.000.000	
			Rapat koordinasi optimalisasi penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan Otonomi Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi			Terlaksananya rapat penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan otonomi daerah di Provinsi Kep, Bangka Belitung 1 kali	1 kali	116.015.704	229.587.000	
			Rapat koordinasi penerapan pelaksanaan NSPK di Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah peserta rakor 50 orang terlaksananya rapat koordinasi mengenai penerapan NSPK di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1 kali	50 orang 1 kali	101.165.704	229.582.000	
			Workshop Penataan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			workshop penataan dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah 1 kali	1 kali	102.310.000	125.000.000	
			Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan		Prosentase pembinaan keagamaan	100 persen					SEKRETARIAT DAERAH
			Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung	Provinsi			persentase pembinaan masyarakat 80 %	80%	1.335.332.000	1.502.648.000	
			Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan	Provinsi			Frekunsi Peyelenggaraan Safari Ramadhan 7 Masjid	7 Masjid	616.530.000	675.100.000	
			Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Provinsi			Jumlah Jemaah haji yang diberangkatan 1.100 jemaah/orang	1.100 jemaah/orang	903.270.000	998.600.000	
			Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi			Terseleksinya Petugas Haji Daerah TPHD/TKHD 9 orang	9 orang	488.088.000	554.080.000	
			Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji	Provinsi			Jumlah Jamaah yang Terfasilitasi Biaya Domestik Haji 1.100 orang	1.100 orang	3.170.920.000	3.250.000.000	
			Musabaqoh Hafidz Qur	Luar Daerah			Jumlah Penyelenggaraan Hafidz Qur-an 1 Kali	1 Kali	2.317.990.000	2.372.040.000	
			Pembinaan dan Pemberangkatan Khafilah STQ Nasional	Pangkal Pinang			Jumlah Khafilah yang mengikuti STQ 30 orang	30 orang	1.380.410.000	1.506.600.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Bangka Barat			Jumlah yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 50 orang	50 orang	-	336.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah		Persentase Pelayanan Hukum	80 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi	Provinsi			Jumlah kasus sengketa perdata yang melalui tahapan proses penyelesaian 1 Kasus	1 Kasus	170.370.000	300.000.000	
			Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	Provinsi			Jumlah kasus sengketa TUN yang melalui tahapan proses penyelesaian 1 Kasus	1 Kasus	191.528.000	300.000.000	
			Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah laporan pembinaan penyelesaian sengketa kabupaten/kota 1 Laporan	1 Laporan	93.865.626	150.000.000	
			Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi dan Kab/Kota 1 Laporan	1 Laporan	94.444.000	210.000.000	
			Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum 40 Masyarakat Miskin	40 Masyarakat Miskin	156.966.000	230.000.000	
			Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten/Kota	Provinsi			Jumlah orang yang diberikan penyuluhan hukum 200 Orang	200 Orang	248.633.000	350.000.000	
			Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum		Persentase Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum	80 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pengelolaan dan Pengembangan JDIH	Provinsi, SKPD			Jumlah Peraturan Perundang-undangan dan artikel yang dipublikasikan melalui website JDIH 75 Peraturan Perundang-undangan Jumlah Peraturan Perundang-undangan dan artikel yang dipublikasikan melalui website JDIH 120 Artikel	75 Peraturan Perundang-undangan 120 Artikel	482.138.000	600.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum	Provinsi, SKPD			Jumlah Rak dan Buku Perpustakaan 3 Rak Jumlah Rak dan Buku Perpustakaan 50 Buku	3 Rak 50 Buku	61.658.000	85.000.000	
			Penyusunan Katalog Perda dan Pergub Tahun 2001 - 2017 dan Kompilasi Perda dan Pergub Tahun 2017	Provinsi, SKPD			Jumlah buku kompilasi dan katalog Perda/Pergub yang tersedia 120 Buku	120 Buku	69.125.500	85.000.000	
			Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Rekomendasi pembangunan di bidang hukum 1 Rakor	1 Rakor	137.470.000	170.000.000	
			Program Perencanaan Setda		Persentase Dokumen Keuangan dan Laporan Kinerja meningkat	75 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Provinsi			Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen	3 Dokumen	149.599.950	202.610.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah	Provinsi			Jumlah Laporan 4 Laporan	4 Laporan	151.868.018	225.703.000	
			Pengintegrasian Sistem Informasi Data	Provinsi			Jumlah Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	
			Program Pengendalian Pembangunan Daerah		Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota	92 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	Pangkal Pinang, Belitung Timur			Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota 1 Laporan	1 Laporan	108.080.000	380.450.000	
			Koordinasi Sistem Monitoring TEPRA (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota	Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi Sistem Monitoring TEPRA (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota 4 Laporan	4 Laporan	578.951.855	662.436.606	
			Tim Evaluasi dan Pengawasan Internal Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kabupaten/Kota	Belitung			Jumlah Rekomendasi Evaluasi dan Pengawasan Internal Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kabupaten/Kota 3 Laporan	3 Laporan	213.050.750	249.810.000	
			Koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) 1 Dokumen	1 Dokumen	92.961.165	331.765.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi Penetapan Target Fisik dan Keuangan APBD Provinsi	Provinsi			Jumlah Dokumen Laporan Penetapan Target Fisik dan Keuangan APBD Provinsi 1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	-	175.000.000	
			Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd		Persentase Realisasi Program dan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi Penyempurnaan Aplikasi e-Monep APBD	Pangkal Pinang			Jumlah Aplikasi e-Monep APBD yang disempurnakan 1 Aplikasi	1 Aplikasi	398.674.000	538.326.000	
			Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	Pangkal Pinang			Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Monitoring 1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	102.652.670	152.650.000	
			Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan		Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT; Survey kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	90 persen; 80 Nilai indeks Kepuasan					SEKRETARIAT DAERAH
			Peningkatan penerapan data dan informasi layanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan informasi barang/jasa 1 Paket	1 Paket	211.370.000	533.841.000	
			Pengelolaan data dan informasi	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi PBJ 1 Aplikasi	1 Aplikasi	125.128.000	259.050.000	
			Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah Dokumen dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan 8 Dokumen	8 Dokumen	112.637.000	411.235.000	
			Peningkatan Pelayanan Publik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah SOP dan Penerapannya 1 Dokumen	1 Dokumen	105.764.000	242.863.500	
			Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa		Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP; Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	90 persen; 80 Nilai Indeks Kepuasan					SEKRETARIAT DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Waktu Layanan Pengadaan oleh ULP 12 Bulan	12 Bulan	1.927.350.000	3.540.240.000	
			Peningkatan Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Frekuensi Pelatihan / Pembinaan / bimtek / Pendampingan 3 kali	3 kali	183.145.000	495.429.000	
			Peningkatan pelayanan perencanaan Pengadaan barang dan jasa	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Tengah			Jumlah Pendampingan dan Monev Pengadaan 2 Kali	2 Kali	111.378.000	404.888.000	
			Pencegahan dan Penanganan Pengaduan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Pangkal Pinang			Jumlah Sosialisasi 2 kali	2 kali	116.025.000	594.011.000	
			Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Persentase Penggunaan e - Procrument terhadap belanja pengadaan; Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	90 persen; 80 Nilai Indeks Kepuasan					SEKRETARIAT DAERAH
			Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah Bulan Layanan oleh LPSE 12 Bulan	12 Bulan	1.195.925.000	2.116.136.000	
			Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE 2 Aplikasi	2 Aplikasi	459.493.000	962.824.500	
			Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Penerapan aplikasi Penyedia Barang/Jasa 1 Aplikasi	1 Aplikasi	308.280.000	781.825.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Bulan Pemeliharaan Jaringan & Perangkat SPSE 12 Bulan	12 Bulan	575.430.000	1.159.235.000	
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisisi Jabatan		Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran kelembagaannya; Persentase ASN memahami dan mengimplementasikan analisa jabatan,analisa beban kerja,peta jabatan dan standar kompetensi teknis; Persentase jumlah pejabat struktural ASN yang memahami dan mengimplementasikan uraian tugas dan fungsi; Persentase jumlah OPD provinsi, kabupaten, kota yang efektif dan efisien	70 %; 75 %; 75 %; 70 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah dokumen pembinaan 40 PD di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung 1 Dokumen	1 Dokumen	81.146.000	132.670.000	
			Pembinaan kelembagaan UPTD/UPTB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah laporan pembinaan kelembagaan 1 dokumen	1 dokumen	74.827.500	160.000.000	
			Pembinaan kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah dokumen laporan pembinaan 1 Dokumen	1 Dokumen	83.475.000	150.000.000	
			Evaluasi jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah dokumen evaluasi jabatan 1 Dokumen	1 Dokumen	74.751.945	160.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen standar kompetensi teknis 1 Dokumen	1 Dokumen	113.207.580	130.000.000	
			Pembinaan dan analisa jabatan dan beban kerja	Provinsi			Jumlah dokumen Anjab dan ABK 2 dokumen	2 dokumen	195.087.500	220.000.000	
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah; Persentase peningkatan informasi data profil aparatur jabatan struktural propinsi kepulauan bangka belitung; Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN	70 %; 65 %; 63 ; 96 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan laporan kinerja tahun 2017 dan perjanjian kinerja tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah laporan kinerja dan perjanjian kinerja 1 Dokumen	1 Dokumen	75.331.000	175.000.000	
			Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah laporan 1 laporan	1 laporan	63.309.781	270.000.000	
			Bimbingan teknis penyusunan capaian kinerja individu ASN di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah peserta 43 orang	43 orang	94.735.500	160.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah laporan 1 laporan	1 laporan	72.140.240	120.000.000	
			Forum Sekretaris Daerah Prov.babel	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat			jumlah dokumen kesepakatan 1 Dokumen	1 Dokumen	50.241.497	175.000.000	
			Pembinaan dan Evaluasi Profil Aparatur UPT Pemprov Babel	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			laporan pembinaan dan evaluasi profil aparatur UPT 1 laporan	1 laporan	33.615.875	145.000.000	
			Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah peserta 50 orang	50 orang	67.424.000	215.000.000	
			Bimbingan teknis E-LHKPN	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah peserta 50 orang	50 orang	106.301.000	165.000.000	
			Rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen hasil/kesepakatan rakor 1 dokumen	1 dokumen	127.570.000	200.000.000	
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah		Peningkatan kepuasan masyarakat; Peningkatan kinerja sumber daya aparatur	0 ; 50 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Laporan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik 1 Dokumen	1 Dokumen	48.999.680	150.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan, Pangkal Pinang			Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan SOP 1 laporan	1 laporan	85.119.480	170.000.000	
			Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Dokumen roadmap pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen	1 Dokumen	123.155.325	275.000.000	
			Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen terkait kepuasan masyarakat 1 dokumen	1 dokumen	86.513.375	150.000.000	
			Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan			Dokumen kesepakatan Biro/Bagian Organisasi 1 Dokumen	1 Dokumen	88.991.825	170.000.000	
			Penyelenggaraan standar pelayanan minimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah			Jumlah laporan optimalisasi penyelenggaraan SPM 1 laporan	1 laporan	72.493.150	285.000.000	
			Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Kegiatan Bimtek 1 Kegiatan	1 Kegiatan	97.924.275	300.000.000	
			Audit Surveillance ISO 9001:2008 menuju Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Samsat Sungailiat dan UPTSP	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Ketetapan atas ISO 9001 : 2008 1 Dokumen	1 Dokumen	149.319.550	200.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Belitung Timur			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan RB 1 dokumen	1 dokumen	100.324.275	200.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT		Persentase pemanfaatan media dan IT untuk layanan kehumasan, dokumentasi dan publikasi	80 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Publikasi Media Massa / Cetak	Provinsi, SKPD			Jumlah publikasi di media massa/cetak 154 Tayang	154 Tayang	1.467.700.000	2.242.500.000	
			Publikasi Media Elektronik/IT	Provinsi, SKPD			Jumlah publikasi di media elektronik dan IT 105 Tayang	105 Tayang	299.942.025	458.425.765	
			Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho	Provinsi, SKPD			Jumlah publikasi media luar 27 Tayang	27 Tayang	163.901.900	260.899.580	
			Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah Provinsi	Provinsi, SKPD			Jumlah Terbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi 4.200 Eksemplar	4.200 Eksemplar	241.827.425	378.407.385	
			Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT	Provinsi, SKPD			Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Media Elektronik dan IT 10 Orang	10 Orang	19.771.050	30.315.610	
			Program Peningkatan Pelayanan Protokoler		Persentase agenda kepala daerah yang terlayani	80 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi, SKPD			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 4.550 Bulan	4.550 Bulan	66.562.500	78.846.875	
			Workshop Bidang Keprotokolan	Provinsi, SKPD			Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang keprotokolan 60 Orang	60 Orang	96.135.750	221.802.225	
			Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi		Persentase Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik	80 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi, SKPD			Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur di sekretariat daerah 17.728 Eksemplar	17.728 Eksemplar	183.992.200	285.174.930	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2019 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengumpulan, Penyaringan informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Frekuensi Pendampingan Layanan Publikasi dan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan luar Daerah 179 kali	179 kali	259.830.650	396.076.330	
			Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Provinsi, SKPD			Jumlah Ketersediaan informasi dan dokumentasi yang bisa diakses publik 21 PD	21 PD	230.918.550	362.861.110	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan	Provinsi, SKPD			Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan 4.000 Buah	4.000 Buah	533.821.375	792.152.775	
			Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan	, Luar Daerah, Provinsi, SKPD()			Jumlah SDM yang mengikuti kursus/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di luar daerah 2 Orang	2 Orang	15.808.550	39.573.110	
	Pembangunan Berdemokrasi*	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi*	**Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata**		prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	100 persen					SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Sekolah yang dinilai 28 sekolah	28 sekolah	297.820.000	384.090.000	
			Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Partisipasi Acara HUT Bangka Belitung 3.000 orang	3.000 orang	1.025.580.000	1.096.630.000	
			Koordinasi Bidang Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata	Provinsi			Jumlah Rekomendasi yang dicapai 21 Rekomendasi	21 Rekomendasi	-	530.200.000	
	TOTAL								**1.358.219.825.035**	**1.672.901.648.659**	



BAB VI

PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah melalui pendekatan pada prioritas pencapaian arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Tahap III, karena Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berakhir di tahun 2017. Disamping itu prioritas pembangunan daerah secara prinsip tetap mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota maupun RPJMD Provinsi Tetangga seperti Provinsi Sumatera Selatan, memperhatikan Program Pembangunan Nasional 9 Agenda Nawa Cita, serta percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kesepakatan-kesepakatan pembangunan SDG's Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, diantaranya sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemeintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dengan prinsip *money follow program.* Dengan demikian usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain kerangka pendanaannya diusulkan ke APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun ke Pemerintah Pusat melalui APBN baik dalam bentuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam kerangka pendanaan program dan kegiatan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka Dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD

Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Keberhasilan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, tidak hanya memuat kegiatan–kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program–program RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2018 sebagai penjabaran dari Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan mempedomani RKPD ini.
4. Pelaksanaan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2018, ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) dan Kebijakan Umum APBD 2018 serta Prioritas dan Pagu Indikatif PD Tahun 2018.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung No. 2,Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335
PANGKALPINANG 33149